MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Bapak/Ibu Gubernur;
2. Bapak/Ibu Bupati;
3. Bapak/Ibu Wali Kota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 05 TAHUN 2021

TENTANG PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait pelaporan kinerja pemerintah daerah:

1. Pelaporan Kinerja untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi
   a. Terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (Lkj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
   b. Sistematika format penyusunan LPPD mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
   c. Informasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terdapat pada LPPD mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja;

d. Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijelaskan dalam LPPD pada Bab I Pendahuluan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan informasi yang harus disampaikan adalah tentang Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja sebagaimana tabel 5.2 RPJMD, serta menyampaikan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun pelaporan;

e. Sedangkan capaian akuntablitas kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijelaskan dalam LPPD pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

f. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah pada Bab II LPPD memuat:
   1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
   2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;
   4) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
   5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
   6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
   7) Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

   Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

g. Informasi akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf f harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat dengan hasil reviu/pernyataan telah direviu dilampirkan pada LPPD untuk memastikan bahwa informasi telah menyajikan data kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

h. LPPD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota pada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya akan diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri pada Menteri PANRB, namun dikarenakan masih terdapat proses integrasi sistem informasi penyampaian laporan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PANRB, maka Gubernur/Bupati/Walikota tetap menyampaikan LPPD pada Menteri PANRB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara daring melalui esr.menpan.go.id.

2. Pelaporan Kinerja bagi Perangkat Daerah

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaaan anggaran yang telah dialokasikan;

b. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;

c. Laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati/Walikota/Gubernur paling lambat (2) dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta disampaikan pada Menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui esr.menpan.go.id yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 4 Maret 2021

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappenas;
5. Menteri Dalam Negeri.

PEMERINTAHAN
KABUPATEN
KOTABARU



Muh. Rusli, S.Sos
BUPATI KOTABARU

Syairi Mukhlis, S.Sos
WAKIL BUPATI KOTABARU

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN ANGGARAN 2025















KOTABARU
HEBAT

BUPATI KOTABARU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kami selaku Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik, walaupun dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen Pemerintah dan Masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, tokoh agama, alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kotabaru, yang telah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Bumi Saijaan.semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Kotabaru senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kotabaru, 27 Maret 2026

BUPATI KOTABARU,

MUH RUSLI, S.SOS

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
DAFTAR TABEL	**v**
BAB I. PENDAHULUAN	**I-01**
1.1. Latar Belakang	I-01
1.1.1 Penjelasan Umum	I-01
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	I-01
b. Data Geografis wilayah	I-01
c. Jumlah Penduduk	I-06
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	I-13
e. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah	I-21
f. Jumlah Pegawai Negeri SIpil	I-24
g. Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	I-25
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-94
1.1.3.Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-117
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	**II-01**
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-01
2.2 Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-08
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)……	II-09
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang Urusan Pemerintahan	II-25
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan	II-27
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	**III-01**
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-02
3.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler / Penugasan / Afirmasi	III-05
3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pendidikan	III-07
3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan	III-10
3.5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan	III-13
3.6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Konektivitas	III-15
3.7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Irigasi	III-17
3.8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pangan Akuatik	III-19
3.9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	III-25
3.10. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK Puskesmas	III-27
3.11. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK BPOM	III-29
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	**IV-1**
4.1 Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	IV-5
4.1.3 Realisasi	IV-13
4.1.4 Alokasi Anggaran	IV-14
4.1.5 Dukungan Personil	IV-16
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	IV-17
4.2 Urusan Kesehatan	IV-19

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-19
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-21
4.2.3 Realisasi IV-24
4.2.4 Alokasi Anggaran..... IV-39
4.2.5 Dukungan Personil..... IV-41
4.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-44

4.3 Urusan Pekerjaan Umum..... IV-45
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-45
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-46
4.3.3 Realisasi IV-47
4.3.4 Alokasi Anggaran..... IV-48
4.3.5 Dukungan Personil..... IV-50
4.3.6 Permasalahan dan Solusi IV-52

4.4 Urusan Perumahan Rakyat..... IV-53
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-53
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-55
4.4.3 Realisasi IV-55
4.4.4 Alokasi Anggaran..... IV-56
4.4.5 Dukungan Personil..... IV-57
4.4.6 Permasalahan dan Solusi IV-57

4.5 Urusan Trantibum dan Linmas pada BPBD IV-59
4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-59
4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-65
4.5.1.3 Realisasi IV-66
4.5.1.4 Alokasi Anggaran..... IV-67
4.5.1.5 Dukungan Personil..... IV-68
4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi IV-72

4.5 Urusan Trantibum dan Linmas pada Satpol PP dan Damkar IV-73
4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-75
4.5.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-76
4.5.2.3 Realisasi IV-77
4.5.2.4 Alokasi Anggaran..... IV-77
4.5.2.5 Dukungan Personil..... IV-79
4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-80

4.6 Urusan Sosial IV-82
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-83
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal IV-84
4.6.3 Realisasi IV-92
4.6.4 Alokasi Anggaran..... IV-102
4.6.5 Dukungan Personil..... IV-103
4.6.6 Permasalahan dan Solusi IV-105

4.7 Program dan Kegiatan IV-106
4.7.1 Urusan Pendidikan..... IV-106
4.7.2 Urusan Kesehatan IV-108
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum..... IV-112
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat..... IV-115
4.7.5 Urusan Trantibum dan Linmas..... IV-118

4.7.6 Urusan Sosial..... IV-122

BAB V. PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Sejarah berdirinya Kabupaten Kotabaru berawal dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintah yaitu kabupaten - kabupaten, daerah - daerah Swapraja dalam Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan Ibukotanya adalah Kotabaru.

Wilayah Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan resmi Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru meliputi kewedanan-kewedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 sebagai undang-undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan Kawedanan Pasir.

Terbentuknya Kabupaten Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).

b. Data Geografis Wilayah ;

Secara geografis kabupaten Kotabaru terletak antara 2^0 20’ - 4^0 21’ Lintang Selatan dan 115^0 15’ - 116^0 30’ Bujur Timur. Adapun wilayah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Selatan : Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu

Sebelah Timur : Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.



Sumber : Bagian Pemerintah Kabupaten Kotabaru, 2026

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru

Luas Wilayah

Tabel I.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Kotabaru

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
1	Pulau Sembilan	Marabatuan	4,76	0,05	5
2	Pulaulaut Barat	Lontar	297,81	3,16	11
3	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar	101,01	1,07	10
4	Pulaulaut Selatan	Tanjung seloka	378,07	4,01	8
5	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan	107,12	1,14	9
6	Pulaulaut Timur	Berangas	642,81	6,82	14
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali	225,50	2,39	8
8	Pulaulaut Utara	Dirgahayu	96,88	0,72	10/1
9	Pulaulaut Tengah	Salino	337,64	3,58	7
10	Kelumpang Selatan	Pantai	279,66	2,97	9
11	Kelumpang Hilir	Serongga	281,20	2,98	9
12	Kelumpang Hulu	Sei. Kupang	553,44	5,87	10
13	Kelumpang Barat	Bungkukan	589,15	6,25	6
14	Hampang	Hampang	1.684,64	17,88	9
15	Sungai Durian	Manunggul Lama	1.042,38	11,06	7

NO.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
16	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu	349,29	3,71	13
17	Kelumpang Utara	Pudi	279,45	2,97	7
18	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan	391,87	4,16	11
19	Sampanahan	Gunung Batu Besar	488,89	5,19	10
20	Pamukan Utara	Bakau	638,63	6,78	13
21	Pamukan Barat	Sengayam	589,84	6,26	5
22	Pulaulaut Sigam	Sigam	36,87	0,27	11/3
JUMLAH			**9.422,46**	**100,00**	**202 / 4**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, 2024

Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah seluas 9.422,46 km^2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru.

Topografi

Kondisi topografi cukup beragam. Dari daerah pantai di sebelah timur yang merupakan daerah cukup datar sampai ke arah barat wilayahnya semakin

bergelombang sampai berbukit. Pada wilayah bagian barat dari selatan ke utara merupakan jalur pegunungan, yaitu pegunungan Meratus memanjang sampai ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Keadaan wilayah yang medannya bergelombang sampai terjal terdapat di Pulau Laut bagian tengah. Secara umum, konfigurasi medan wilayah Kabupaten Kotabaru miring arah ke timur.

Berdasarkan letak ketinggiannya dari permukaan laut 46% Kabupaten Kotabaru terletak pada ketinggian antara 25–100 m. Letak ketinggian ini secara umum menentukan pola pengelolaan dan pemanfaatannya, yaitu:

- ketinggian 0 – 7 m : daerah rawa dan pantai, seluas 86.618 q ha (5,98 % dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru), digunakan untuk usaha tambak ikan;
- ketinggian 7 – 10 m : seluas 43.743 ha (3,01%), digunakan sebagai sawah dengan satu kali tanam;
- ketinggian 10 – 25 m : seluas 256.792 ha (17,73%), digunakan sebagai sawah dua kali tanam;
- ketinggian 25 – 125m : seluas 667.932 ha (46,10%);
- ketinggian 125 – 500 m : seluas 320.388 ha (22,1%) digunakan untuk pertanian lahan kering, perkebunan dan ladang;
- ketinggian 500 – 1000 m : seluas 67.064 ha (4,63%) merupakan daerah yang sulit untuk diolah sebagai lahan pertanian;
- ketinggian > 1000 m : seluas 6.433 ha (0,44%), diperuntukkan sebagai kawasan lindung.

Selain ketinggian, faktor kelerengan juga menentukan pola pengusahaan lahan. Secara umum, berdasarkan kelerengan wilayah Kabupaten Kotabaru dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 0 – 2 % : 154.211 ha (10,64 %)

- 2 – 15 % : 877.315 ha (60,55 %)
- 15 – 40 % : 331.297 ha (22,85 %)
- > 40 % : 86.146 ha (05,96 %)

Kelerengan digunakan sebagai batas pengusahaan lahan-lahan dengan kelerengan lebih dari 40% tidak diusahakan secara produktif, tetapi dijadikan sebagai kawasan lindung. Wilayah dengan kelerengan yang lebih besar dari 40% terletak di Pegunungan Meratus dan Pegunungan Sebatung.

Wilayah 2 – 15 % dan 15 – 40 % kebanyakan terdapat di kaki Pegunungan Meratus, sedangkan yang termasuk dataran 0 – 2 % menyebar luas pada hampir semua wilayah di Kabupaten Kotabaru.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru pada 31 Desember 2025 adalah 334.497 jiwa yang tersebar di 198 desa dan 4 kelurahan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan 54.129 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kelumpang Utara sebesar 5.790 jiwa.

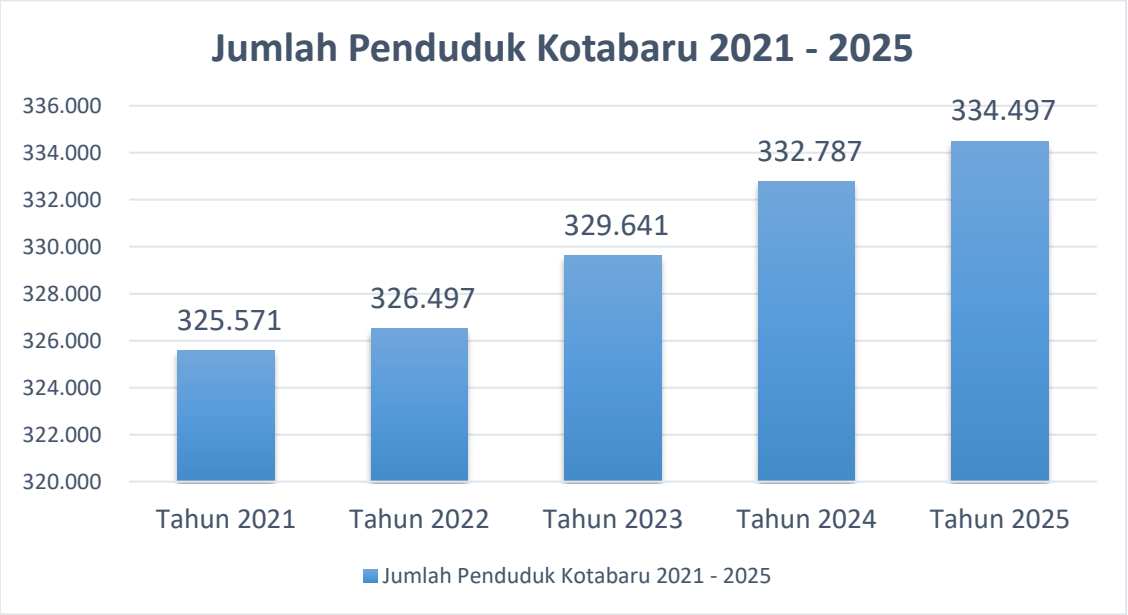
Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan penyebaran penduduk. Selama ini sebagian besar penduduk Kabupaten Kotabaru masih terpusat di Kecamatan Pulau Laut Utara, sekitar 16,302 % penduduk tinggal di kecamatan tersebut. Ironisnya, Kecamatan Kelumpang Utara yang memiliki luas sekitar 2,97 % dari luas total Kabupaten Kotabaru hanya dihuni sekitar 1,77% penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru selama 5 Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 data disajikan per Kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2025

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pulau Sembilan	6.371	6.080	6.064	6.113	6.124
2	Pulaulaut Barat	10.299	10.120	10.315	10.490	5.130

NO	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024	2025
3	Pulaulaut Tanjung Selayar	11.035	11.404	11.584	11.824	11.956
4	Pulaulaut Selatan	10.564	10.489	10.828	11.050	5.410
5	Pulaulaut Kepulauan	13.940	14.382	14.597	14.810	14.877
6	Pulaulaut Timur	13.984	14.211	14.099	14.098	14.157
7	Pulau Sebuku	7.256	7.371	7.532	7.397	7.406
8	Pulaulaut Utara	53.811	53.748	53.739	53.889	54.129
9	Pulaulaut Tengah	11.575	11.763	11.817	11.972	12.038
10	Kelumpang Selatan	10.409	10.314	10.310	10.447	10.481
11	Kelumpang Hilir	23.145	23.586	24.241	24.709	24.818
12	Kelumpang Hulu	16.182	16.549	16.896	17.235	17.366
13	H a m p a n g	11.889	12.518	12.932	13.199	13.330
14	Sungai Durian	11.673	11.755	12.119	12.326	12.416
15	Kelumpang Tengah	13.262	13.285	13.226	13.319	12.038
16	Kelumpang Barat	7.089	7.564	7.792	8.035	8.113
17	Kelumpang Utara	5.910	5.948	5.842	5.814	5.790
18	Pamukan Selatan	12.749	12.673	12.599	12.698	12.729
19	Sampanahan	11.047	11.052	11.157	11.300	11.414
20	Pamukan Utara	15.018	14.829	14.756	14.824	14.891
21	Pamukan Barat	10.240	10.240	10.623	14.810	10.929
22	Pulaulaut Sigam	37.723	36.901	36.573	36.463	36.619
Jumlah		**325.571**	**326.497**	**329.641**	**332.787**	**334.497**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026



Sumber Data : Rekapitulasi Hasil DKB Pusat Semester 2 Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru

C.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk menjadi salah satu indikator pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2024-2025. Adapun pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah sebesar 0,51% atau terjadi pertambahan penduduk sebesar 1.710 Jiwa. Data yang lengkap disajikan dengan jumlah selisih penduduk Tahun 2024 dengan Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

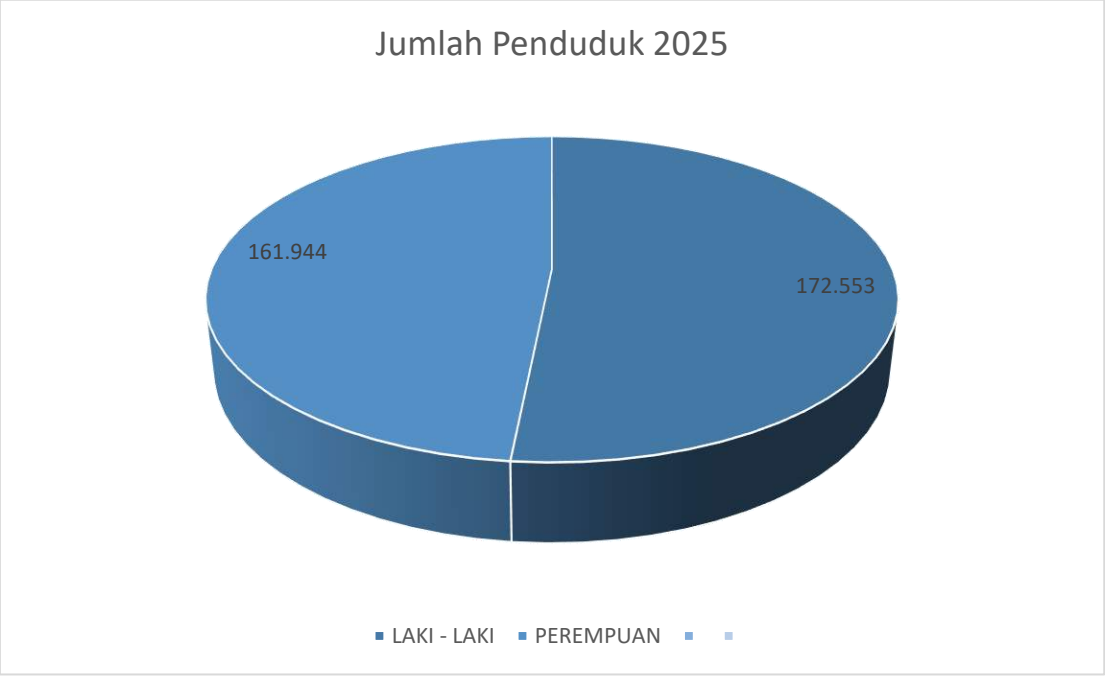
Tabel I.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	ANGKA PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN PENDUDUK	PERSENTASE (%)
1	Pulau Sembilan	6.113	6.125	12	0,20
2	Pulaulaut Barat	10.409	10.471	62	0,60

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	ANGKA PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN PENDUDUK	PERSENTASE (%)
3	Pulaulaut Tanjung Selayar	11.050	11.098	48	0,43
4	Pulaulaut Selatan	14.098	14.157	59	0,42
5	Pulaulaut Kepulauan	7.397	7.406	9	0,12
6	Pulaulaut Timur	53.836	54.129	293	0,54
7	Pulau Sebuku	10.447	10.481	34	0,33
8	Pulaulaut Utara	17.235	17.366	131	0,76
9	Pulaulaut Tengah	13.319	13.344	25	0,19
10	Kelumpang Selatan	5.814	5.790	(24)	(0,41)
11	Kelumpang Hilir	12.698	12.729	31	0,24
12	Kelumpang Hulu	11.300	11.414	114	1,01
13	H a m p a n g	14.824	14.891	67	0,45
14	Sungai Durian	13.199	13.330	131	0,99
15	Kelumpang Tengah	12.326	12.416	90	0,73
16	Kelumpang Barat	11.972	12.038	66	0,55
17	Kelumpang Utara	24.709	24.818	109	0,44
18	Pamukan Selatan	8.035	8.113	78	0,97
19	Sampanahan	10.856	10.929	73	0,67
20	Pamukan Utara	14.810	14.877	67	0,45
21	Pamukan Barat	11.824	11.956	132	1,12

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2025	ANGKA PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN PENDUDUK	PERSENTASE (%)
22	Pulaulaut Sigam	36.516	36.619	103	0,28
Jumlah		**332.787**	**334.497**	**1.710**	**0,51**

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desember Tahun 2025



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

C.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pada Tahun 2025 komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut dibawah :

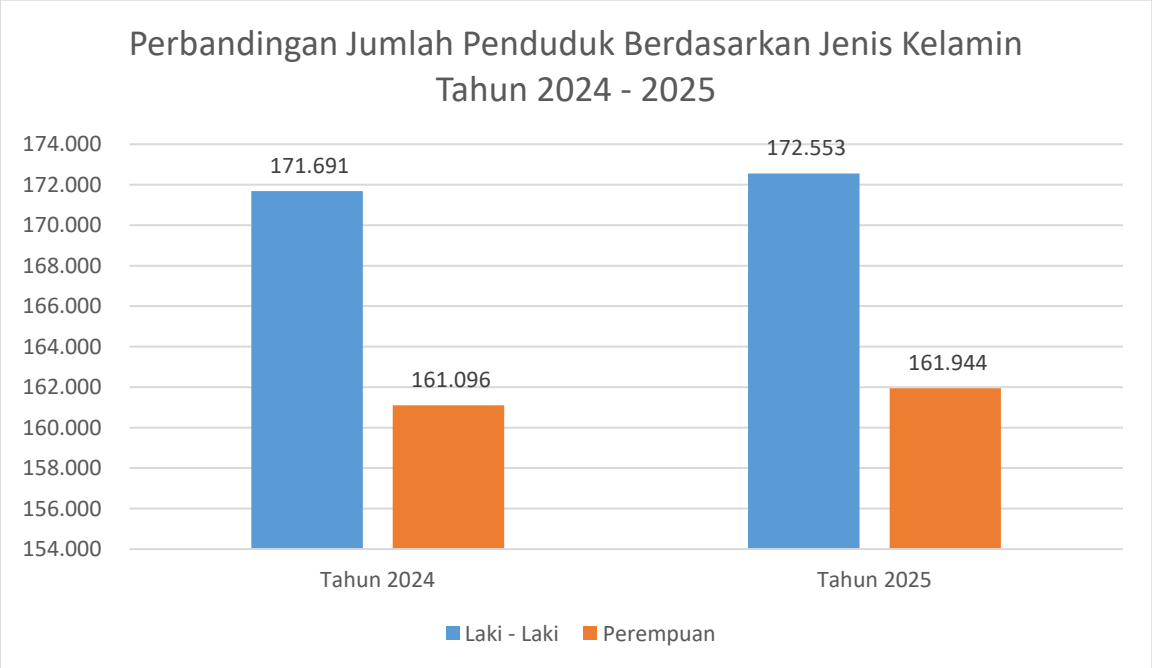
Tabel I.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	PENDUDUK LAKI-LAKI	PENDUDUK (PEREMPUAN)	JUMLAH PENDUDUK	SEX RATIO
1	PULAU SEMBILAN	3.100	3.025	6.125	102,48
2	PULAU LAUT BARAT	5.341	5.130	10.471	104,11
3	PULAU LAUT SELATAN	5.688	5.410	11.098	105,14
4	PULAU LAUT TIMUR	7.451	6.706	14.157	111,11
5	PULAU SEBUKU	3.823	3.583	7.406	106,70
6	PULAULAUT UTARA	27.611	26.518	54.129	104,12
7	KELUMPANG SELATAN	5.415	5.066	10.481	106,89
8	KELUMPANG HULU	9.050	8.316	17.366	108,83
9	KELUMPANG TENGAH	6.938	6.406	13.344	108,30
10	KELUMPANG UTARA	3.010	2.780	5.790	108,27
11	PAMUKAN SELATAN	6.666	6.063	12.729	109,95
12	SAMPANAHAN	6.014	5.400	11.414	111,37
13	PAMUKAN UTARA	7.770	7.121	14.891	109,11
14	HAMPANG	7.027	6.303	13.330	111,49
15	SUNGAI DURIAN	6.550	5.866	12.416	111,66
16	PULAU LAUT TENGAH	6.216	5.822	12.038	106,77
17	KELUMPANG HILIR	12.762	12.056	24.818	105,86
18	KELUMPANG BARAT	4.157	3.956	8.113	105,08
19	PAMUKAN BARAT	5.664	5.265	10.929	107,58
20	PULAU LAUT KEPULAUAN	7.603	7.274	14.877	104,52

NO	KECAMATAN	PENDUDUK LAKI-LAKI	PENDUDUK (PEREMPUAN)	JUMLAH PENDUDUK	SEX RATIO
21	PULAU LAUT TJ. SELAYAR	6.095	5.861	11.956	103,99
22	PULAULAUT SIGAM	18.602	18.017	36.619	103,25
	TOTAL	172.553	161.944	334.497	106,55

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru 2026

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara *Sex Ratio* penduduk Kotabaru lebih banyak Laki-Laki dibandingkan Perempuan. Hal ini terjadi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Penduduk Kabupaten Kotabaru terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 172.53 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 161.944 jiwa, sehingga capaian nilai *sex ratio* Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebesar 106,55



Gambar I.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Kotabaru terdiri dari 22 kecamatan, dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Pulau Laut Sigam.

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang ini.

Bupati Kotabaru (Muh. Rusli, S.Sos) dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh seorang Wakil Bupati Kotabaru (Syairi Muhklis, S.Sos) dan organisasi perangkat daerah yang dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 32) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.5 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
1	Pulau Sembilan	Marabatuan (Ibukota)	4,76	0,05	5
		Tengah			
		Tanjung Nyiur			
		Teluk Sungai			
		Labuan Barat			
2	Pulaulaut Barat	Lontar (Ibukota)	297,81	3,16	11
		Lontar Timur			
		Lontar Utara			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Sebanti			
		Semaras			
		Terangkeh			
		Gemuruh			
		Tapian Balai			
		Sumber Sari			
		Subur Makmur			
		Sepagar			
3	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Pelayar (Ibukota)	101,01	1,07	10
		Tanjung Sungkai			
		TanjungTengah			
		Tanjung Kunyit			
		Teluk Tamiang			
		Gosong Panjang			
		Kampung Baru			
		Tata Mekar			
		Bandar Raya			
		Bangun Rejo			
4	Pulaulaut Selatan	Tanjung seloka (Ibukota)	378,07	4,01	8
		Tanjung Seloka Utara			
		Alle-Alle			
		Labuan Mas			
		Sungai Bahim			
		Sungai Bulan			
		Tanjung Serudung			
		Teluk Sirih			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
5	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan (Ibukota)	107,12	1,14	9
		Tanjung Lalak Utara			
		Kerayaan Utara			
		Pulau Kerasian			
		Pulau Kerayaan			
		Pulau Kerumputan			
		Teluk Aru			
		Teluk Kemuning			
		Oka-oka			
6	Pulaulaut Timur	Berangas (Ibukota)	642,81	6,82	14
		Batu Tunau			
		Bekambit			
		Bekambit Asri			
		Betung			
		Karang Sari Indah			
		Kulipak			
		Langkang Baru			
		Langkang Lama			
		Sungai Limau			
		Sejakah			
		Tanjung Pengharapan			
		Teluk Gosong			
		Teluk Masjid			
7	Pulau Sebuku	Sungai Bali (ibukota)	225,50	2,39	8
		Kanibungan			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Mandin			
		Rampa			
		Sarakaman			
		Sekapung			
		Belambus			
		Ujung			
8	Pulaulaut Utara	Dirgahayu (ibukota)	96,88	0,72	10/1
		Gunung Ulin			
		Gunung Sari			
		Megasari			
		Sebelimbingan			
		Stagen			
		Rampa			
		Semayap			
		Sungai Taib			
		Kotabaru Hulu (Kel.)			
9	Pulaulaut Tengah	Salino (ibukota)	337,64	3,58	7
		Mekarpura			
		Pantai Baru			
		Sungai Pasir			
		Selaru			
		Semisir			
		Sungup Kanan			
10	Kelumpang Selatan	Pantai (ibukota)	279,66	2,97	9
		Bumi Asih			
		Pantai baru			
		Pembelacanan			
		Sangking Baru			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Sungai Kupang Jaya			
		Sungai Nipah			
		Suka Maju			
		Tanjung Pangga			
11	Kelumpang Hilir	Serongga (ibukota)	281,20	2,98	9
		Langadai			
		Mandala			
		Pelajau Baru			
		Pulau Panci			
		Tarjun			
		Tegal Rejo			
		Telaga Sari			
		Sahapi			
12	Kelumpang Hulu	Sungai Kupang (ibukota)	553,44	5,87	10
		Bangkalan Dayak			
		Bangkalan Melayu			
		Banua Lawas			
		Cantung Kiri Hilir			
		Karang Payau			
		Laburan			
		Mangkirana			
		Sido Mulyo			
		Karang Liwar			
13	Kelumpang Barat	Bungkukan (ibukota)	589,15	6,25	6
		Batang Kulur			
		Siayuh			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Tanjung Sari			
		Magalau Hilir			
		Magalau Hulu			
14	Hampang	Hampang (ibukota)	1.684,64	17,88	9
		Cantung Kanan			
		Cantung Kiri Hulu			
		Lalapin			
		Limbur			
		Muara Orie			
		Peramasan			
		Limbungan			
		Hulu Sampanahan			
15	Sungai Durian	Manunggul Lama (ibukota)	1.042,38	11,06	7
		Buluh Kuning			
		Gendang Timburu			
		Manunggul Baru			
		Rantau Jaya			
		Rantau Budha			
		Terombong Sari			
16	Kelumpang Tengah	Tanjung Batu (ibukota)	349,29	3,71	13
		Sang-sang			
		Sebuli			
		Sungai Pinang			
		Sungai Punggawa			
		Sembilang			
		Senakin			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Senakin Seberang			
		Tamiang Bakung			
		Tanah Rata			
		Tanjung Selayar			
		Tebing Tinggi			
		Geronggang			
17	Kelumpang Utara	Pudi (ibukota)	279,45	2,97	7
		Mangga			
		Pudi Seberang			
		Sungai Hanyar			
		Sungai Seluang			
		Sulangkit			
		Wilas			
18	Pamukan Selatan	Tanjung Samalantakan (ibukota)	391,87	4,16	11
		Gunung Calang			
		Mulyodadi			
		Pondok Labu			
		Rampa cengal			
		Sakadoyan			
		Sakalimau			
		Sekandis			
		Sesulung			
		Sukadana			
		Talusi			
19	Sampanahan	Gunung Batu Besar (ibukota)	488,89	5,19	10
		Banjarsari			
		Basuang			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Papaan			
		Rampa Manunggul			
		Sampanahan			
		Sampanahan Hilir			
		Sungai Betung			
		Sepapah			
		Sukamaju			
20	Pamukan Utara	Bakau (ibukota)	638,63	6,78	13
		Balamea			
		Bepara			
		Betung			
		Binturung			
		Harapan Baru			
		Kalian			
		Lintang Jaya			
		Mulyo Harjo			
		Pamukan Indah			
		Sekayu Baru			
		Tamiyang			
		Wonorejo			
21	Pamukan Barat	Sengayam (ibukota)	589,84	6,26	5
		Mangka			
		Marga Jaya			
		Mayang Sari			
		Batuah			
22	Pulaulaut Sigam	Sigam (ibukota)	36,87	0,27	11/3
		Hilir Muara			

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	LUAS (Km^2)	(%)	JUMLAH DESA/KEL.
		Kotabaru Hilir (Kel.)			
		Baharu Utara			
		Batuah			
		Tirawan			
		Kotabaru Tengah (Kel.)			
		Gedambaan			
		Baharu Selatan (Kel.)			
		Sarang Tiung			
		Sebatung			
JUMLAH			**9.422,46**	**100,00**	**202 / 4**

Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah seluas 9.422,46 km^2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru.

e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

e.1 Jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat

dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Sekretariat DPRD
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru
7. Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Kabupaten Kotabaru
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru
9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru
14. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru
16. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru
17. Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten Kotabaru
18. Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru
19. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru
20. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru
21. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru
22. Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru

23. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru
24. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Kotabaru
25. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
26. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra
30. Rumah Sakit Umum Daerah Sengayam

Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Pulaulaut Barat
2. Kecamatan Pulaulaut Selatan
3. Kecamatan Pulaulaut Timur
4. Kecamatan Pulau Sebuku
5. Kecamatan Pulaulaut Utara
6. Kecamatan Kelumpang Selatan
7. Kecamatan Kelumpang Hulu
8. Kecamatan Kelumpang Tengah
9. Kecamatan Kelumpang Utara
10. Kecamatan Pamukan Selatan
11. Kecamatan Sampanahan
12. Kecamatan Pamukan Utara
13. Kecamatan Hampang
14. Kecamatan Sungai Durian
15. Kecamatan Pulautlaut Tengah
16. Kecamatan Kelumpang Hilir
17. Kecamatan Kelumpang Barat
18. Kecamatan Pamukan Barat
19. Kecamatan Pulaulaut Kepuluan
20. Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar

21. Kecamatan Pulau Sembilan
22. Kecamatan Pulaulaut Sigam

F. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

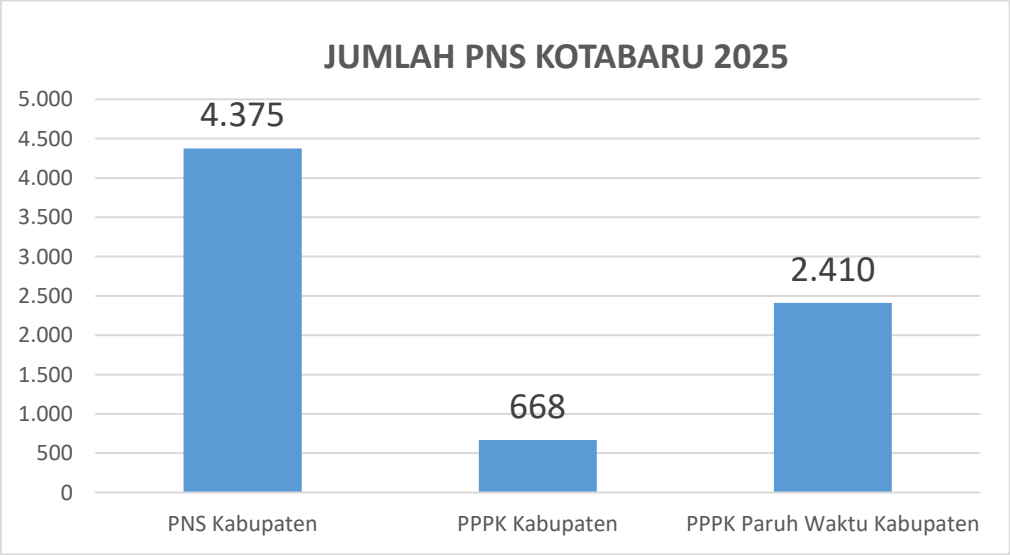
Pegawai negeri sebagai pelaksana kebijakan sekaligus sebagai pelayan 24able24 untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil di daerah diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara. Sehingga setiap tahun jumlah Pegawai Negeri sipil mengalami dinamika perubahan mengikuti regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada 24able berikut:

Tabel I.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025

NO	Jenis Kepegawaian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS Kabupaten	1.964	2.411	4.375
2	PPPK Kabupaten	251	417	668
3	PPPK Paruh Waktu Kabupaten	872	1.538	2.410
	Jumlah	3.087	4.366	7.453

Sumber Data : BKPSDM per Desember 2025



Gambar I.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil 2021-2025

g. Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah

g.1. Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

Realisasi anggaran pedapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.7 Realisasi Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.778.153.534.417,00**	**3.220.827.388.171,85**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**319.433.558.218,00**	**392.920.665.304,85**
4.1.01	Pajak Daerah	121.326.273.739,00	128.196.429.724,20
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.01.07	Pajak Restoran	436.050.815,00	88.911.650,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	7.000.000,00	0,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	7.000.000,00	0,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	429.050.815,00	88.911.650,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	429.050.815,00	88.911.650,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	0,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	382.286.339,00	466.149.813,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	365.011.112,00	460.099.563,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	365.011.112,00	460.099.563,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	17.275.227,00	6.050.250,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	17.275.227,00	6.050.250,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	22.304.117,00	37.823.398,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	22.304.117,00	37.823.398,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	22.304.117,00	37.823.398,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	605.417.487,00	330.611.130,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	605.417.487,00	330.611.130,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	605.417.487,00	330.611.130,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.401.607.586,00	23.352.760.860,20
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	15.762.788.570,00	9.349.678.299,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	15.762.788.570,00	9.349.678.299,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.663.004.520,00	641.294.879,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.663.004.520,00	641.294.879,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	968.160.000,00	235.619.885,00
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	968.160.000,00	235.619.885,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.007.654.496,00	13.126.167.797,20
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.007.654.496,00	13.126.167.797,20
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.317.614.113,00	4.106.860.867,00
4.1.01.15.01	PBBP2	3.317.614.113,00	4.106.860.867,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.317.614.113,00	4.106.860.867,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.961.583.097,00	11.983.920.945,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.457.882.505,00	1.600.041.225,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.457.882.505,00	1.600.041.225,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.503.700.592,00	10.383.879.720,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	7.503.700.592,00	10.383.879.720,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	9.149.116,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	9.149.116,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [(],MBLB],	0,00	9.149.116,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.769.335.785,00	47.346.065.545,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	12.873.672.286,00	14.698.798.859,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	8.298.672.286,00	7.804.607.478,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.575.000.000,00	6.894.191.381,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	29.885.477.427,00	31.406.902.461,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2.200.000.000,00	2.831.242.007,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	27.685.477.427,00	28.575.660.454,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	693.482.102,00	755.615.418,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	653.482.102,00	707.231.565,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	40.000.000,00	48.383.853,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	115.908.910,00	136.911.657,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	115.908.910,00	136.911.657,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	200.795.060,00	347.837.150,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	122.495.593,00	290.351.275,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	4.000.000,00	62.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	3.500.000,00	19.000.750,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	13.500.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	57.299.467,00	38.423.125,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.642.607.520,00	18.139.163.600,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	16.642.607.520,00	18.139.163.600,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	16.642.607.520,00	18.139.163.600,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.787.466.880,00	22.335.012.800,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	24.787.466.880,00	22.335.012.800,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	24.787.466.880,00	22.335.012.800,00
4.1.02	Retribusi Daerah	68.522.847.228,00	98.551.361.978,96
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	58.172.824.255,00	83.574.343.541,96
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.515.824.255,00	82.897.049.541,96

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	11.211.686.852,00	13.061.849.691,54
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	46.304.137.403,00	69.835.199.850,42
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	261.000.000,00	255.480.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	261.000.000,00	255.480.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000,00	316.373.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000,00	316.373.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	126.000.000,00	105.441.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	126.000.000,00	105.441.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.874.628.505,00	9.247.248.996,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.734.128.000,00	4.854.124.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	711.600.000,00	1.066.348.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	117.550.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	9.000.000,00	14.463.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	143.528.000,00	345.863.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	2.149.400.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	450.000.000,00	1.160.500.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.697.328.985,00	1.651.019.456,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.697.328.985,00	1.651.019.456,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	63.571.520,00	40.047.540,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	63.571.520,00	40.047.540,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	4.800.000,00	4.800.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	4.800.000,00	4.800.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	893.600.000,00	818.158.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	893.600.000,00	818.158.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	136.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	100.000.000,00	136.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.001.200.000,00	1.333.600.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.001.200.000,00	1.333.600.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.000.000,00	409.500.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	360.000.000,00	409.500.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.475.394.468,00	5.729.769.441,00
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	7.500.000,00	0,00
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.817.894.468,00	5.610.137.841,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.817.894.468,00	5.610.137.841,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	650.000.000,00	119.631.600,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	650.000.000,00	119.631.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.781.816.292,00	16.031.391.758,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	71.781.816.292,00	16.031.391.758,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	71.781.816.292,00	16.031.391.758,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	71.781.816.292,00	16.031.391.758,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.802.620.959,00	150.141.481.843,69
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	11.060.000.000,00	18.773.980.492,26
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.000.000.000,00	18.402.759.188,58
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.000.000.000,00	18.402.759.188,58
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	60.000.000,00	371.221.303,68
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	60.000.000,00	371.221.303,68
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	25.855.140.444,00	23.833.758.586,36
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.855.140.444,00	23.833.758.586,36
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.855.140.444,00	23.833.758.586,36
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	114.584.295,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	114.584.295,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	114.584.295,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000.000.000,00	50.290.971.333,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000.000.000,00	50.290.971.333,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.000.000.000,00	50.290.971.333,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.338.807.930,42
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.338.807.930,42

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.338.807.930,42
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	40.325.000,00	260.271.744,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	3.390,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	3.390,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	239.307,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	239.307,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	100.000,00	488.817,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	100.000,00	488.817,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000,00	5.712.171,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000,00	5.712.171,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.000.000,00	55.444.991,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	20.000.000,00	55.444.991,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.725.000,00	54.852.968,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2.500.000,00	54.428.202,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000,00	417.566,00
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan	25.000,00	7.200,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
	Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu		
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15.000.000,00	140.781.600,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	15.000.000,00	140.781.600,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.000.000,00	2.748.500,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	1.000.000,00	2.748.500,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.200.000,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	0,00
4.1.04.13.02.0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	1.200.000,00	0,00
4.1.04.13.02.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.200.000.000,00	4.510.129.402,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.200.000.000,00	4.510.129.402,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	2.200.000.000,00	4.510.129.402,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.092.918,00	32.422.216.002,67
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	25.200.000,00	177.620.500,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	25.200.000,00	115.848.000,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	61.772.500,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	98.710.300,00	159.936.823,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	70.000.000,00	102.582.923,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	7.868.170,00	32.554.640,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	0,00	1.260.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	13.383.000,00	14.513.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.800.000,00	2.985.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	4.659.130,00	6.041.260,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	52.900.000,00
4.1.04.15.15.0053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	52.900.000,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	83.760.500,00	210.211.500,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	56.470.500,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	27.000.000,00
4.1.04.15.16.0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	7.750.000,00
4.1.04.15.16.0924	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	13.700.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.15.16.1063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	67.529.000,00
4.1.04.15.16.1064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	83.760.500,00	32.109.500,00
4.1.04.15.16.1065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	5.652.500,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	273.158.000,00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	273.158.000,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	22.275.025.923,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	22.275.025.923,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	47.494.000,00
4.1.04.15.34.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	47.494.000,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	32.296.118,00	1.457.195.162,67
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	74.096.045,00
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	20.365.000,00	20.365.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.15.61.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	1.220.259.000,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.309.000,00	5.309.000,00
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	130.544.000,00
4.1.04.15.61.0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	6.622.118,00	0,00
4.1.04.15.61.0041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	6.622.117,67
4.1.04.15.64	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.126.000,00	10.126.000,00
4.1.04.15.64.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar	10.126.000,00	10.126.000,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	7.758.548.094,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	7.758.548.094,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	10.895.862.597,00	10.596.762.057,98
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.442.139.893,00	9.748.146.530,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	9.442.139.893,00	9.748.146.530,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	102.177.200,00	134.037.600,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	102.177.200,00	134.037.600,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.351.545.504,00	714.577.927,98
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	1.351.545.504,00	714.577.927,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**319.433.558.218,00**	**392.920.665.304,85**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.443.854.663.051,00**	**2.823.025.003.497,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.312.574.775.438,00	2.686.204.364.092,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.340.332.885.438,00	1.760.734.060.506,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	167.090.924.000,00	159.923.428.600,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	147.106.145.000,00	140.773.215.500,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	19.984.779.000,00	19.150.213.100,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.167.724.251.438,00	1.595.292.921.906,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	39.575.000,00	39.575.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	2.228.168.900,00	5.570.422.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	2.159.971.231.538,00	1.584.197.648.906,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.642.495.000,00	1.642.495.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.842.781.000,00	3.842.781.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.517.710.000,00	5.517.710.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.517.710.000,00	5.517.710.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	606.087.550.000,00	605.970.108.600,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	490.061.095.000,00	489.944.691.600,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	490.061.095.000,00	489.944.691.600,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	116.026.455.000,00	116.025.417.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	798.962.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.807.844.000,00	5.807.844.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	57.923.536.000,00	57.923.536.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	51.495.075.000,00	51.495.075.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.183.885.000,00	168.975.219.386,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	37.151.689.000,00	36.818.354.413,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	36.711.385.000,00	36.378.928.426,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	223.704.000,00	223.425.984,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	216.600.000,00	216.000.003,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	155.032.196.000,00	132.156.864.973,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.027.344.000,00	4.596.359.944,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	357.324.000,00	357.324.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	42.316.498.000,00	36.669.988.173,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.167.000.000,00	1.772.000.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.935.672.000,00	4.782.797.400,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	210.000.000,00	210.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.126.600.000,00	2.131.647.500,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.544.718.000,00	1.895.197.688,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	526.040.000,00	526.040.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.558.746.000,00	14.993.063.343,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	68.507.754.000,00	62.659.656.796,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	431.000.000,00	403.675.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	1.233.500.000,00	1.069.115.129,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**3.138.604.320.438,00**	**2.535.679.388.492,00**
4.2.01.05	Dana Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.951.815.000,00	6.951.815.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.951.815.000,00	6.951.815.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.951.815.000,00	6.951.815.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**173.970.455.000,00**	**150.524.975.600,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	131.279.887.613,00	136.820.639.405,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.785.748.300,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	5.039.453.587,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	118.875.807.330,00	109.239.972.845,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	242.699.356,00	472.797.897,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.161.380.927,00	18.282.666.776,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**131.279.887.613,00**	**136.820.639.405,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**3.443.854.663.051,00**	**2.823.025.003.497,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**14.865.313.148,00**	**4.881.719.370,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.615.313.148,00	3.773.557.530,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.313.148,00	3.773.557.530,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.615.313.148,00	3.773.557.530,00
4.3.03.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	7.250.000.000,00	1.108.161.840,00
4.3.03.05.01	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	7.250.000.000,00	1.108.161.840,00
4.3.03.05.01.0001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	7.250.000.000,00	1.108.161.840,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**14.865.313.148,00**	**4.881.719.370,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.778.153.534.417,00**	**3.220.827.388.171,85**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kotabaru, Januari 2026

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5	**BELANJA DAERAH**	**4.580.832.249.036,00**	**3.666.170.501.203,61**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.621.491.002.938,00**	**2.077.574.776.931,66**
5.1.01	Belanja Pegawai	957.698.129.260,00	759.289.192.109,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	470.134.983.045,00	344.429.339.932,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	314.238.595.709,00	239.994.761.406,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	267.696.674.256,00	214.793.989.780,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46.541.921.453,00	25.200.771.626,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.436.722.890,00	21.283.784.978,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.157.322.772,00	19.100.836.017,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.279.400.118,00	2.182.948.961,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.296.210.906,00	4.082.950.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.227.472.236,00	4.082.950.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	68.738.670,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.619.619.960,00	16.554.096.742,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.382.010.290,00	14.207.646.840,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.237.609.670,00	2.346.449.902,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.822.012.451,00	3.785.771.442,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.266.752.345,00	3.674.740.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.555.260.106,00	111.031.442,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.844.295.110,00	12.697.247.677,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.530.413.883,00	11.168.539.932,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.313.881.227,00	1.528.707.745,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.394.628.006,00	24.017.965.617,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.103.370.340,00	23.004.373.314,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.291.257.666,00	1.013.592.303,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.492.221,00	3.209.433,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.431.299,00	2.849.471,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.060.922,00	359.962,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.470.408.762,00	20.052.754.623,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.731.914.172,00	18.140.097.875,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.738.494.590,00	1.912.656.748,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	987.269.264,00	489.199.504,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	608.850.000,00	437.016.334,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	378.419.264,00	52.183.170,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.091.467.254,00	1.467.598.510,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.213.835.219,00	1.311.048.996,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	877.632.035,00	156.549.514,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.904.260.512,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.725.812.612,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	178.447.900,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	431.267.394.665,00	360.806.371.873,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	223.195.493.283,00	191.123.683.412,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	207.313.539.152,00	177.405.743.763,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	15.881.954.131,00	13.717.939.649,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	9.352.610.944,00	5.787.587.943,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	8.440.967.491,00	5.185.612.767,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	911.643.453,00	601.975.176,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.471.458.795,00	6.980.296.607,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.953.489.751,00	6.613.150.272,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	517.969.044,00	367.146.335,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.710.842.537,00	16.391.479.504,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	16.946.842.537,00	14.627.479.504,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	94.323.806.848,00	72.171.163.991,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	86.282.527.612,00	65.829.057.263,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.041.279.236,00	6.342.106.728,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.213.182.258,00	68.352.160.416,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	14.242.400,00	13.744.600,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	1.203.840,00	950.482,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	40.153.840,00	11.306.696,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	860.840.600,00	756.787.686,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	110.587.600,00	109.225.397,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	306.697.240,00	302.919.392,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.382.201.360,00	1.365.175.622,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	966.706.249,00	658.114.262,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	938.520.129,00	731.563.846,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.600.000,00	3.083.598,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	30.650.000,00	4.669.872,00
5.1.01.02.06.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	123.790.000,00	33.749.691,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	85.000.000,00	62.907.206,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	375.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	39.520.000,00	13.852.841,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	3.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	49.260.000,00	48.080.700,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.750.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0048	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.020.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	65.082.366.300,00	62.659.656.796,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.085.480.000,00	1.069.115.129,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	431.000.000,00	451.675.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	49.560.000,00	36.360.000,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.425.387.700,00	19.221.600,00
5.1.01.02.06.0071	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	148.020.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.286.813.378,00	25.398.767.829,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00	774.165.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00	774.165.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.222.740,00	74.188.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.222.740,00	74.188.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.370.000,00	84.803.820,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.370.000,00	84.803.820,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	68.707.800,00	66.402.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	68.707.800,00	66.402.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.306.950,00	1.122.539.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.306.950,00	1.122.539.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.532.890,00	111.584.025,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.532.890,00	111.584.025,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.753.210,00	35.949.270,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.753.210,00	35.949.270,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.115.200.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.115.200.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.528.800.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.528.800.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.772.500,00	75.819.650,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.772.500,00	75.819.650,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.231.073.088,00	7.913.196.014,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	186.640.000,00	63.572.166,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.920.000,00	1.593.648,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.150.000,00	4.780.944,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.033.363.088,00	7.843.249.256,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.699.200.000,00	7.489.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.699.200.000,00	7.489.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	78.783.200,00	6.720.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	78.783.200,00	6.720.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.100.227.780,00	1.465.373.805,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	486.588.098,00	51.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	486.588.098,00	51.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.056.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.056.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	91.800.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	91.800.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.128,00	6.807.480,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.128,00	6.807.480,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.629.325,00	1.625.581,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.629.325,00	1.625.581,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000.574,00	920,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000.574,00	920,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.000.000,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.459.311.555,00	1.307.083.824,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.497.600,00	4.497.599,65
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	380.160,00	319.234,76
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	12.680.160,00	3.955.296,99

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	34.922.400,00	23.589.327,62
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	96.851.760,00	96.851.759,52
5.1.01.05.10.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [(],MBLB],	271.844.400,00	255.250.170,21
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	436.484.640,00	436.484.639,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	305.275.658,00	230.220.868,25
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(],BBNKB],	296.374.777,00	255.914.928,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	905.760.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	305.760.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	305.760.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	26.996.230.392,00	26.283.578.670,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	26.996.230.392,00	26.283.578.670,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	26.996.230.392,00	26.283.578.670,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.382.013.634.809,00	1.099.329.429.299,66
5.1.02.01	Belanja Barang	440.327.644.959,00	296.730.953.919,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	440.246.435.959,00	296.674.161.919,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	494.551.500,00	445.862.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.284.210.759,00	5.242.864.640,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.299.425.750,00	14.751.895.811,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	251.650.000,00	199.308.220,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	984.159.380,00	796.357.620,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	380.615.000,00	369.779.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	276.991.000,00	276.620.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.582.031.500,00	8.483.527.791,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	798.278.000,00	580.240.600,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.512.000,00	3.612.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	141.057.500,00	140.083.450,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	44.000.000,00	42.850.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.424.000,00	2.424.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.755.767.200,00	1.258.679.223,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.708.043.397,00	5.875.536.582,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.796.457.085,00	7.271.780.018,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.998.359.682,00	17.992.327.003,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.376.121.000,00	1.244.537.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.130.817.040,00	7.324.878.786,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.485.380.180,00	2.335.657.667,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.808.841.582,00	3.461.714.302,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.427.795.500,00	3.119.405.924,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	502.416.000,00	476.740.260,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.898.395.000,00	2.223.713.692,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.468.878.000,00	1.266.103.598,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	15.136.368.620,00	14.814.364.465,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	978.849.910,00	773.613.595,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	143.861.343.950,00	131.635.345.932,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	33.000.000,00	32.950.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	32.270.324,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.327.994.000,00	3.905.550.894,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	600.027.500,00	599.208.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	103.005.190.000,00	4.265.927.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.449.148.000,00	19.587.083.883,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.329.880.000,00	13.201.252.333,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	92.400.000,00	91.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.446.350.000,00	1.043.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.444.762.500,00	13.109.498.853,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	411.600.000,00	347.170.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	714.500.000,00	640.203.300,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	58.500.000,00	52.350.380,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	846.850.000,00	814.274.073,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.380.200.000,00	2.126.138.046,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.000.000,00	1.999.665,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	91.300.000,00	91.300.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	201.000.000,00	200.401.458,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	10.938.100,00	7.299.100,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	44.625.000,00	42.889.800,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.154.500.000,00	819.091.460,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.575.575.000,00	1.448.808.595,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.557.710.000,00	1.353.046.100,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	558.375.000,00	483.294.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	61.209.000,00	56.792.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	4.417.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	56.792.000,00	56.792.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0420	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.01.04.0559	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	463.749.096.562,00	397.243.799.256,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	363.678.301.556,00	310.391.386.229,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	884.240.000,00	610.980.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	22.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.911.430.000,00	7.636.812.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.866.230.000,00	9.029.110.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	185.400.000,00	174.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.275.700.000,00	5.840.300.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	39.600.000,00	18.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	208.970.000,00	177.570.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	113.150.000,00	112.650.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	626.400.000,00	556.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	82.415.000.000,00	79.382.002.455,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	37.702.983.068,00	31.344.087.752,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.091.471.340,00	917.649.339,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.049.900.000,00	656.550.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.203.200.000,00	865.155.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	243.375.000,00	214.300.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	718.750.000,00	715.475.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	30.000.000,00	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.337.000.000,00	1.239.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	881.950.000,00	713.090.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.855.000.000,00	2.633.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.578.360.000,00	17.552.825.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	173.100.000,00	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.785.362.633,00	12.944.243.500,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.067.900.000,00	8.560.240.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.956.762.400,00	18.357.648.600,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.554.732.400,00	6.478.764.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.437.400.000,00	4.991.575.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	115.000.000,00	81.100.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.085.400.000,00	782.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	477.500.000,00	423.900.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.701.300.000,00	1.466.466.700,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	657.950.000,00	579.740.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	446.500.000,00	326.055.930,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	254.200.000,00	254.112.500,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.092.004.584,00	2.053.228.230,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.571.050.500,00	12.080.070.759,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	99.055.000,00	92.842.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	785.048.000,00	549.480.945,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	368.800.000,00	365.668.106,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	19.828.585.500,00	19.427.065.537,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	97.200.000,00	20.060.084,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.779.524.000,00	1.845.851.409,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.185.260.000,00	14.571.713.951,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	880.715.000,00	763.785.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.685.986.000,00	24.831.114.021,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	487.168.900,00	148.042.255,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	97.000.000,00	89.981.696,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	14.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.164.518.431,00	585.588.960,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	256.900.000,00	39.950.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.445.338.800,00	16.961.230.500,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	831.130.000,00	112.260.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.751.160.600,00	41.521.004.958,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.188.868.800,00	2.635.062.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	21.792.449.000,00	21.792.444.853,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.224.744.800,00	12.700.724.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.649.220.000,00	206.830.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.410.000,00	80.188.556,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.100.000.000,00	2.526.571.549,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	940.200.000,00	939.990.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	639.268.000,00	639.193.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	130.500.000,00	130.500.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.485.940.000,00	3.562.247.040,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	282.000.000,00	281.999.940,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.038.500.000,00	858.487.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	382.400.000,00	100.300.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.500.000,00	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	616.750.000,00	533.163.500,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.352.620.000,00	1.123.396.600,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	342.000.000,00	340.100.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	382.170.000,00	235.300.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.019.875.000,00	1.702.960.290,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	180.000.000,00	179.978.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	290.025.000,00	240.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	277.150.000,00	181.346.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	68.000.000,00	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	59.000.000,00	56.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	22.000.000,00	20.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.120.200.000,00	981.536.290,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	3.500.000,00	3.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.060.350.000,00	1.051.571.750,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	1.912.850.000,00	947.871.750,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	147.500.000,00	103.700.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.593.471.106,00	3.588.821.922,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	465.225.416,00	330.691.200,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	512.600.000,00	476.862.800,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.637.395.690,00	1.910.929.158,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	378.250.000,00	324.546.100,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	150.000.000,00	120.096.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	450.000.000,00	425.696.664,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.013.800.000,00	6.735.886.235,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	400.000.000,00	399.964.119,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.283.000.000,00	1.070.761.500,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.840.850.000,00	3.823.421.806,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	32.450.000,00	17.838.810,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.457.500.000,00	1.423.900.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.507.721.000,00	1.416.000.000,00
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	1.507.721.000,00	1.416.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.334.500.000,00	590.755.932,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	884.500.000,00	162.340.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	950.000.000,00	428.415.932,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	500.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.116.117.300,00	26.548.264.900,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.726.197.800,00	5.707.858.400,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	21.563.255.500,00	20.207.522.500,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	826.664.000,00	632.884.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	57.360.000,00	4.400.000,00
5.1.02.02.14.0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	57.360.000,00	4.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	90.635.112.172,00	70.049.105.356,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.609.196.000,00	16.342.229.170,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	316.000.000,00	311.057.420,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	500.000.000,00	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.850.000.000,00	1.022.244.245,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.100.000.000,00	123.342.670,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	50.000.000,00	46.269.250,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.644.773.000,00	4.254.750.232,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.934.420.000,00	1.490.085.676,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.350.960.000,00	1.077.358.385,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	174.800.000,00	79.060.500,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	246.440.000,00	78.385.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	140.000.000,00	123.433.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	39.198.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.204.718.000,00	1.983.142.604,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	346.030.000,00	250.742.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	31.250.000,00	30.400.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	322.660.000,00	186.505.300,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	170.640.000,00	116.252.885,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	11.100.000,00	5.210.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.400.000,00	1.650.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	404.000.000,00	387.732.990,00
5.1.02.03.02.0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	4.248.805.000,00	4.174.209.013,00
5.1.02.03.02.0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.149.907.000,00	19.539.450.770,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.047.005.000,00	14.004.202.833,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	485.050.000,00	483.908.724,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	199.975.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	370.000.000,00	369.879.700,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	250.000.000,00	249.317.608,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	440.000.000,00	439.121.147,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	3.037.854.000,00	3.001.724.520,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	890.000.000,00	497.618.087,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	19.000.000,00	19.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	25.248.000,00	24.986.300,00
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	135.750.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	100.000.000,00	99.716.851,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.874.009.172,00	34.167.425.416,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.764.787.500,00	7.739.355.935,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.073.826.672,00	3.934.920.971,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.653.115.000,00	4.652.264.259,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	15.000.000,00	14.500.000,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	5.808.610.000,00	840.414.684,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.039.470.000,00	839.995.904,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	528.300.000,00	344.508.616,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.990.900.000,00	15.801.465.047,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	207.370.144.000,00	165.117.013.665,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	205.970.144.000,00	165.054.200.168,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.369.463.000,00	105.213.747.337,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.416.146.000,00	59.735.682.831,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	184.535.000,00	104.770.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.400.000.000,00	62.813.497,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri	1.400.000.000,00	62.813.497,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.950.875.000,00	66.264.479.977,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.821.025.000,00	61.838.589.977,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.329.125.000,00	1.744.239.977,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.215.000.000,00	1.048.850.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	60.421.900.000,00	58.190.500.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	855.000.000,00	855.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.129.850.000,00	4.425.890.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	906.100.000,00	793.500.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.223.750.000,00	3.632.390.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	43.946.704.740,00	41.188.570.578,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	41.007.104.740,00	40.154.758.578,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	38.910.104.740,00	38.382.758.578,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.097.000.000,00	1.772.000.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	723.000.000,00	710.412.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	513.000.000,00	500.412.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	210.000.000,00	210.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	2.216.600.000,00	323.400.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.126.600.000,00	233.400.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.034.057.376,00	62.735.506.548,66
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.034.057.376,00	62.735.506.548,66
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	65.034.057.376,00	62.735.506.548,66
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	999.900.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	999.900.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	999.900.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.000.000.000,00	999.900.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	250.836.838.869,00	191.082.855.523,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	740.000.000,00	739.619.200,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	740.000.000,00	739.619.200,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	740.000.000,00	739.619.200,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	234.580.824.869,00	182.511.061.885,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.917.102.540,00	38.378.856.059,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.255.000.000,00	7.848.742.750,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.662.102.540,00	30.530.113.309,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	180.663.722.329,00	144.132.205.826,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.278.698.270,00	36.207.380.500,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	136.385.024.059,00	107.924.825.326,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	70.000.000,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	70.000.000,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	70.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.649.530.000,00	1.649.530.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.649.530.000,00	1.649.530.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.649.530.000,00	1.649.530.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	13.796.484.000,00	6.182.644.438,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.355.912.000,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.355.912.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.859.872.000,00	4.290.044.438,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.859.872.000,00	4.290.044.438,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.580.700.000,00	1.892.600.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.580.700.000,00	1.892.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.942.400.000,00	26.873.400.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	28.962.400.000,00	26.013.400.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	28.962.400.000,00	26.013.400.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	28.962.400.000,00	26.013.400.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	980.000.000,00	860.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	980.000.000,00	860.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	980.000.000,00	860.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.621.491.002.938,00**	**2.077.574.776.931,66**
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.349.562.595.412,00**	**1.074.309.325.375,95**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	174.363.891.000,00	147.641.529.207,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	174.363.891.000,00	147.641.529.207,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	173.195.191.000,00	147.541.656.957,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	1.000.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.492.500.000,00	1.667.171.438,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	300.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	167.402.691.000,00	145.874.485.519,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.168.700.000,00	99.872.250,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	400.000.000,00	0,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	768.700.000,00	99.872.250,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	309.151.226.104,00	292.534.218.652,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	15.504.286.000,00	14.380.450.482,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	14.565.950.000,00	13.444.649.083,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	6.750.000.000,00	6.623.250.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	7.815.950.000,00	6.821.399.083,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	938.336.000,00	935.801.399,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	60.000.000,00	59.973.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	163.964.000,00	162.807.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	526.700.000,00	525.729.300,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	187.672.000,00	187.291.799,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	67.831.884.000,00	62.833.254.368,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	64.142.884.000,00	62.148.384.368,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.225.500.000,00	1.225.500.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	35.972.192.000,00	35.514.328.853,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.683.790.000,00	11.012.844.113,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	46.222.000,00	43.885.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	13.946.980.000,00	13.174.116.402,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.268.200.000,00	1.177.710.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	3.650.000.000,00	646.020.000,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	3.000.000.000,00	0,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	650.000.000,00	646.020.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	39.000.000,00	38.850.000,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	39.000.000,00	38.850.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.341.402.000,00	325.912.312,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	217.550.000,00	217.347.831,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	133.550.000,00	133.549.983,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	84.000.000,00	83.797.848,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	43.555.000,00	42.753.981,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	43.555.000,00	42.753.981,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.080.297.000,00	65.810.500,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.000.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	80.297.000,00	65.810.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	800.000.000,00	581.180.322,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	800.000.000,00	581.180.322,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	330.000.000,00	326.766.240,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	400.000.000,00	254.414.082,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	70.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.411.269.920,00	35.178.354.414,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.349.717.220,00	8.166.675.651,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	218.382.000,00	167.971.101,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.131.335.220,00	7.998.704.550,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.989.671.700,00	25.948.263.631,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.560.518.900,00	22.162.458.440,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	144.538.000,00	140.161.920,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.009.194.200,00	2.125.226.496,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	207.500.000,00	2.485.290,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.067.920.600,00	1.517.931.485,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.071.881.000,00	1.063.415.132,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	297.000.000,00	295.997.435,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00	29.526.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	544.910.000,00	539.978.697,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	199.971.000,00	197.913.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.996.614.700,00	8.553.199.536,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.971.482.700,00	6.531.406.135,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.167.609.000,00	3.138.214.599,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.664.631.000,00	1.571.280.896,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.139.242.700,00	1.821.910.640,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.742.000,00	28.493.400,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.500.000,00	13.311.400,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	17.242.000,00	15.182.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	1.990.000.000,00	1.990.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	4.390.000,00	3.300.001,00
5.2.02.06.04.0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi	4.390.000,00	3.300.001,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.067.352.564,00	13.577.150.605,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.737.652.564,00	13.283.720.605,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	12.411.489.939,00	11.964.555.605,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.326.162.625,00	1.319.165.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	329.700.000,00	293.430.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	300.000.000,00	269.730.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	29.700.000,00	23.700.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.081.529.266,00	3.288.085.504,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.241.574.166,00	2.210.898.700,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.942.387.130,00	1.926.400.000,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	299.187.036,00	284.498.700,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.166.600.000,00	415.799.984,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	216.600.000,00	216.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	950.000.000,00	199.799.984,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	673.355.100,00	661.386.820,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	14.285.600,00	11.211.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	659.069.500,00	650.175.820,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	54.910.685.250,00	52.440.959.947,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	33.300.718.250,00	32.065.115.661,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.904.996.000,00	1.820.207.756,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.639.322.000,00	4.548.855.895,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	26.756.400.250,00	25.696.052.010,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.609.967.000,00	20.375.844.286,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	177.303.000,00	169.552.500,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	17.053.000.000,00	16.966.229.973,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.379.664.000,00	3.240.061.813,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	233.205.000,00	231.546.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	14.705.000,00	13.320.000,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	14.705.000,00	13.320.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	218.500.000,00	218.226.000,00
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	218.500.000,00	218.226.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.933.760.000,00	1.917.504.313,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.933.760.000,00	1.917.504.313,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1.933.760.000,00	1.917.504.313,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	96.611.320.000,00	95.420.522.191,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	96.611.320.000,00	95.420.522.191,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	9.862.000.000,00	9.818.833.591,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	4.460.400.000,00	4.205.114.661,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	82.288.920.000,00	81.396.573.939,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	598.601.094,00	598.501.500,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	598.601.094,00	598.501.500,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	598.601.094,00	598.501.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.829.316.310,00	3.207.597.158,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.829.316.310,00	3.207.597.158,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.829.316.310,00	3.207.597.158,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.085.668.533,00	231.583.566.815,95
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	247.716.547.533,00	230.005.604.562,95
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	246.039.115.533,00	228.622.084.129,95
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.724.109.827,00	20.543.958.048,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	194.250.000,00	194.250.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	127.002.719.500,00	125.285.557.226,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	8.725.221.750,00	8.524.580.400,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	61.232.056.000,00	52.803.349.579,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	415.000.000,00	380.585.015,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.422.300.000,00	2.122.798.511,95
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.609.720.000,00	1.281.366.079,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	153.329.338,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	20.445.409.118,00	17.370.712.959,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	115.000.000,00	114.926.312,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.677.432.000,00	1.383.520.433,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.078.000.000,00	800.622.302,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	100.000.000,00	99.536.031,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	452.000.000,00	436.309.200,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	47.432.000,00	47.052.900,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.121.000,00	60.121.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	60.121.000,00	60.121.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	60.121.000,00	60.121.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.309.000.000,00	1.517.841.253,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.309.000.000,00	1.517.841.253,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.309.000.000,00	1.517.841.253,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	562.339.458.061,00	363.826.640.053,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	509.004.844.361,00	333.328.560.322,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	439.107.843.503,00	283.843.800.035,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	280.368.895.803,00	200.385.669.145,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	132.848.535.980,00	80.637.509.110,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	25.890.411.720,00	2.820.621.780,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	69.897.000.858,00	49.484.760.287,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	59.338.187.358,00	42.396.489.164,00
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	7.202.553.500,00	5.251.278.579,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	3.356.260.000,00	1.836.992.544,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	36.022.009.250,00	16.524.724.516,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	13.853.275.976,00	3.719.776.801,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	13.853.275.976,00	3.719.776.801,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.667.757.274,00	8.692.129.101,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.067.029.000,00	6.091.475.827,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.600.728.274,00	2.600.653.274,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.500.976.000,00	4.112.818.614,00
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	5.217.000,00	5.217.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	3.306.764.000,00	925.164.299,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	4.000.000,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.184.995.000,00	3.182.437.315,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	13.980.000.000,00	13.707.166.115,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.140.000.000,00	6.940.920.780,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	7.140.000.000,00	6.940.920.780,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	240.000.000,00	239.445.335,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	240.000.000,00	239.445.335,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	6.600.000.000,00	6.526.800.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	6.600.000.000,00	6.526.800.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.332.604.450,00	266.189.100,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.949.661.450,00	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.949.661.450,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	382.943.000,00	266.189.100,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	382.943.000,00	266.189.100,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.867.812.166,00	5.762.997.205,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.818.704.000,00	4.715.277.515,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.818.704.000,00	4.715.277.515,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	4.223.704.000,00	4.220.372.515,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	100.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	45.000.000,00	44.955.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	450.000.000,00	449.950.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	900.000.000,00	898.612.690,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	900.000.000,00	898.612.690,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	900.000.000,00	898.612.690,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	149.108.166,00	149.107.000,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	149.108.166,00	149.107.000,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	149.108.166,00	149.107.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	47.754.539.548,00	32.960.373.443,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	47.754.539.548,00	32.960.373.443,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	47.754.539.548,00	32.960.373.443,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.814.539.548,00	2.677.897.199,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	44.490.000.000,00	29.982.909.444,00
5.2.06.01.01.0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	100.000.000,00	99.766.800,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	350.000.000,00	199.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1.349.562.595.412,00**	**1.074.309.325.375,95**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.786.925.251,00**	**40.800.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.786.925.251,00	40.800.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.786.925.251,00	40.800.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.786.925.251,00	40.800.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.786.925.251,00	40.800.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.786.925.251,00**	**40.800.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**603.991.725.435,00**	**514.245.598.896,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.759.485.366,00	15.487.772.852,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.132.627.374,00	9.911.107.747,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.132.627.374,00	9.911.107.747,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.132.627.374,00	9.911.107.747,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.626.857.992,00	5.576.665.105,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.626.857.992,00	5.576.665.105,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	7.626.857.992,00	5.576.665.105,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	584.232.240.069,00	498.757.826.044,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	479.232.240.069,00	398.757.826.044,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	312.213.600.069,00	255.184.665.444,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	312.213.600.069,00	255.184.665.444,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	167.018.640.000,00	143.573.160.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**603.991.725.435,00**	**514.245.598.896,00**
	JUMLAH BELANJA	**4.580.832.249.036,00**	**3.666.170.501.203,61**

g.2 Rekapitulasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah

Rekapitulasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.8

Rekapitulasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
	PENDAPATAN	3.778.153.534.417,00	3.220.730.594.228,85
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	80.362.394.468,00	106.413.943.810,94
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	76.137.000.000,00	98.654.405.969,94
1.02	Dinas Kesehatan	21.137.000.000,00	25.356.612.055,96
1.02	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	55.000.000.000,00	73.035.870.827,98
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.225.394.468,00	7.759.537.841,00
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.225.394.468,00	7.759.537.841,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.725.256.985,00	5.916.118.056,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	670.000.000,00	237.181.600,00
2.07	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	670.000.000,00	237.181.600,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	114.000.000,00	167.023.000,00
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	114.000.000,00	167.023.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.316.456.985,00	2.223.538.456,00
2.17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.316.456.985,00	2.223.538.456,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.750.000.000,00	2.426.764.000,00
2.19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.750.000.000,00	2.426.764.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	874.800.000,00	861.611.000,00
2.15	Dinas Perhubungan	874.800.000,00	861.611.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	893.571.520,00	1.610.047.540,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	893.571.520,00	1.610.047.540,00
3.25	Dinas Perikanan	893.571.520,00	1.610.047.540,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.691.172.311.444,00	3.106.790.484.821,91
5.02	KEUANGAN	3.691.172.311.444,00	3.106.790.484.821,91
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.562.301.619.787,00	2.891.117.526.559,04
5.02	Badan Pendapatan Daerah	128.870.691.657,00	215.672.958.262,87

g.3 Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.9

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.321.180.638.656,00	1.697.184.738.212,66
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	919.496.289.662,00	603.408.363.461,00
1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	919.496.289.662,00	603.408.363.461,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	633.881.464.908,00	576.964.399.361,66
1.02	Dinas Kesehatan	451.044.855.376,00	406.434.724.790,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	505.909.873.883,00	344.841.948.134,00
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	505.909.873.883,00	344.841.948.134,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.528.999.798,00	122.702.063.780,00
1.04	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	184.528.999.798,00	122.702.063.780,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47.904.830.941,00	33.262.601.011,00
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	31.258.909.725,00	22.610.673.936,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.459.179.464,00	16.005.362.465,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
1.06	Dinas Sosial	29.459.179.464,00	16.005.362.465,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	700.356.209.135,00	610.823.270.224,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.996.852.800,00	17.117.850.030,00
2.07	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	18.996.852.800,00	17.117.850.030,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.229.220.500,00	12.482.692.469,00
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.229.220.500,00	12.482.692.469,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	33.997.857.454,00	29.308.245.810,00
2.09	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.997.857.454,00	29.308.245.810,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	174.418.300.450,00	147.142.505.288,00
2.10	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	174.418.300.450,00	147.142.505.288,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.837.030.253,00	61.734.746.291,00
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	66.837.030.253,00	61.734.746.291,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.619.108.150,00	10.598.716.579,00
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.619.108.150,00	10.598.716.579,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.634.691.314,00	12.446.217.423,00
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.634.691.314,00	12.446.217.423,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.062.031.010,00	6.277.508.900,00
2.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.062.031.010,00	6.277.508.900,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	162.981.798.819,00	155.933.816.241,00
2.15	Dinas Perhubungan	162.981.798.819,00	155.933.816.241,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.045.954.939,00	67.152.961.038,00
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.045.954.939,00	67.152.961.038,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.212.236.891,00	20.234.458.982,00
2.17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	23.212.236.891,00	20.234.458.982,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.087.886.447,00	11.385.125.937,00
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.087.886.447,00	11.385.125.937,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	57.694.467.687,00	39.034.600.653,00
2.19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	57.694.467.687,00	39.034.600.653,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	439.466.728,00	356.568.950,00
2.20	Dinas Komunikasi dan Informatika	439.466.728,00	356.568.950,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	189.146.089,00	173.285.750,00
2.21	Dinas Komunikasi dan Informatika	189.146.089,00	173.285.750,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.415.563.000,00	2.610.727.801,00
2.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.415.563.000,00	2.610.727.801,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	18.727.537.394,00	16.122.702.538,00
2.23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.727.537.394,00	16.122.702.538,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	767.059.210,00	710.539.544,00
2.24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	767.059.210,00	710.539.544,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	254.612.804.848,00	186.326.447.536,95
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.590.807.121,00	77.718.153.154,00
3.25	Dinas Perikanan	98.590.807.121,00	77.718.153.154,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	72.470.869.335,00	63.570.892.945,00
3.26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	72.470.869.335,00	63.570.892.945,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.537.511.440,00	32.384.811.888,00
3.27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	68.537.511.440,00	32.384.811.888,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	212.634.000,00	204.475.277,00
3.28	Dinas Lingkungan Hidup	212.634.000,00	204.475.277,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.863.390.400,00	5.744.206.311,95
3.30	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6.863.390.400,00	5.744.206.311,95
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.422.021.500,00	6.434.949.969,00
3.31	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.422.021.500,00	6.434.949.969,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	515.571.052,00	268.957.992,00
3.32	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	515.571.052,00	268.957.992,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	298.247.657.451,00	242.984.466.705,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.556.965.097,00	162.216.657.393,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	99.690.692.354,00	80.767.809.312,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	860.163.198.829,00	702.549.427.187,00
5.01	PERENCANAAN	26.901.181.450,00	22.167.291.365,00
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.901.181.450,00	22.167.291.365,00
5.02	KEUANGAN	771.803.041.960,00	631.816.089.543,00
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	743.537.863.727,00	608.453.313.691,00
5.03	KEPEGAWAIAN	39.388.735.319,00	30.615.275.242,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	39.388.735.319,00	30.615.275.242,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	11.114.377.100,00	7.650.728.288,00
5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.114.377.100,00	7.650.728.288,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.955.863.000,00	10.300.042.749,00
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.955.863.000,00	10.300.042.749,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	21.292.100.424,00	18.962.179.364,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	21.292.100.424,00	18.962.179.364,00
6.01	Inspektorat	21.292.100.424,00	18.962.179.364,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	106.060.479.961,00	84.976.233.639,00
7.01	KECAMATAN	106.060.479.961,00	84.976.233.639,00
7.01	Kecamatan Pulau Sembilan	3.798.064.406,00	3.011.352.614,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Barat	3.943.157.481,00	3.219.150.004,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Selatan	4.505.077.154,00	3.506.193.005,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	4.245.515.401,00	2.787.595.994,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Timur	4.780.114.118,00	4.035.561.133,00
7.01	Kecamatan Pulau Sebuku	5.947.327.503,00	4.844.446.374,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Utara	7.812.359.648,00	7.200.529.204,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Tengah	5.051.721.101,00	4.211.071.807,00
7.01	Kecamatan Kelumpang Hilir	3.881.613.248,00	3.239.484.486,00
7.01	Kecamatan Kelumpang Hulu	4.127.540.088,00	3.276.589.384,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4
7.01	Kecamatan Kelumpang Barat	4.223.964.129,00	3.003.613.294,00
7.01	Kecamatan Kelumpang Tengah	4.022.849.967,00	2.872.104.567,00
7.01	Kecamatan Kelumpang Utara	4.335.237.700,00	3.317.551.687,00
7.01	Kecamatan Pamukan Selatan	3.757.326.197,00	2.707.459.693,00
7.01	Kecamatan Pamukan Utara	4.574.030.028,00	2.323.723.828,00
7.01	Kecamatan Pamukan Barat	4.538.465.969,00	3.657.922.430,00
7.01	Kecamatan Hampang	4.231.445.206,00	2.888.949.690,00
7.01	Kecamatan Sampanahan	3.925.413.989,00	3.112.739.878,00
7.01	Kecamatan Sungai Durian	4.057.824.186,00	2.935.518.871,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	5.120.717.850,00	4.596.490.617,00
7.01	Kecamatan Pulau Laut Sigam	10.757.455.653,00	10.425.979.447,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.919.159.732,00	13.344.254.966,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.919.159.732,00	13.344.254.966,00
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.919.159.732,00	13.344.254.966,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manusia guna meningkatkan taraf kehidupannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan guna terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya kelak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup lahir dan batin secara adil dan merata.

Tujuan dan pembangunan Kabupaten Kotabaru mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 yaitu “Kotabaru Kepulauan SA-IJAAN, Maju, dan Berkelanjutan”. SA-IJAAN dalam kalimat visi tersebut merupakan akronim dari Sejahtera, Amanah, Inovatif, Jaya, Aman, Adil, dan Nyaman. SA-IJAAN sebagai moto Kabupaten Kotabaru memiliki makna: semufakat, satu hati dan se-iya sekata. Cerita hikayat SAIJAAN berkaitan dengan kebijaksanaan, kesabaran, kejujuran, kesetiaan, kesederhanaan, dan pentingnya memenuhi janji. Pesan-pesan ini dapat dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan dengan penuh nilai dan integritas. Pesan moral Hikayat SA-IJAAN diantaranya adalah (1) tentang pentingnya bersikap tenang, (2) amanat untuk bersikap jujur, setia, dan saling percaya, (3) amanat tentang nilai kesederhanaan dan kesabaran, dan (4) tentang pentingnya menepati janji. Visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Makna Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru 2025-2045 yaitu SA-IJAAN, Maju, dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. S (Sejahtera)

   Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti aman sentosa dan makmur; selamat terlepas dari segala macam gangguan). Pada tahun 2045, masyarakat Kabupaten Kotabaru menuju pada kehidupan yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal (no one left behind). Kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain terwujudnya masyarakat yang adil dan setara, rasa aman, gotong royong, dan saling menghormati. Kesejahteraan masyaraakat adalah tujuan utama dari pembangunan daerah melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. A (Amanah)

   Amanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti dapat dipercaya. Pada tahun 2045, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kotabaru mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kabupaten Kotabaru yang amanah mencerminkan masyarakat dan pemerintah yang jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku, dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai. Peningkatan tuntutan transparansi dari masyarakat akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalismenya dalam pengembangan sumber daya aparatur serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dapat diukur dari peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

3. I (Inovatif)

   Inovatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; berrsifat pembaruan (kreasi baru). Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk

mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi. Dengan kemampuan tersebut, Kabupaten Kotabaru memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

4. J (Jaya)

   Jaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti selalu berhasil; sukses; dan hebat. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru akan berhasil melakukan berbagai pembangunan di seluruh sektor kehidupan masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kabupaten Kotabaru memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Kabupaten Kotabaru juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kotabaru tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat. Komunikasi berbagai kebijakan pembangunan ke depan dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian, dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pembangunan

5. A (Aman)

   Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindungi atau tersembunyi; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Pada tahun 2045, masyarakat Kabupaten Kotabaru terhindar dan terlindungi dari serangan, bahaya, ancaman dan kerusuhan yang mengancam ketenteraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Selain itu, tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan diselenggarakan guna mendukung terwujudnya keamanan dan

ketenteraman masyarakat. Situasi daerah yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan mewujudkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

6. A (Adil)

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Pada tahun 2045, seluruh wilayah di Kabupaten Kotabaru akan menikmati seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kotabaru akan memiliki infrastruktur dasar yang mendukung jalannya pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Selain berbasis wilayah, pembangunan juga tidak akan berat sebelah dan tidak memihak kepada kelompok/golongan, suku, agama, ras apapun sehingga pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal (no one left behind)

7. N (Nyaman)

Nyaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti segar, sehat, sedap, sejak, dan enak. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru akan menjadi daerah modern yang nyaman ditinggali oleh masyarakatnya dan pengunjung (wisatawan) yang datang karena lingkungan yang asri dan lestari. Kenyamanan Kabupaten Kotabaru akan ditopang oleh konektivitas dan layanan infrastruktur, dan fasilitas layanan birokrasi berskala nasional, stabilitas keamanan daerah yang baik, kualitas lingkungan yang asri, bersih dan didukung handalnya infrastruktur

permukiman, persampahan, pemenuhan air bersih, dan pencegahan kebencanaan

8. Maju

Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti berjalan (bergerak) ke muka ; tampil ke muka; mendesak ke depan (tentang pasukan); pergi atau keluar medan perang; menjadi lebih baik (laku, pandai, sebagainya); berkembang; lulus (dalam ujian); teelah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi; cerdas; berkembang pikirannya; berpikir dengan baik. Pada tahun 2045, Kabupaten Kotabaru sebagai kabupaten maju berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada kearifan dan kekayaanbudaya. Kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten kepulauan berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat

9. Berkelanjutan

Berkelanjutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti berlangsung terus menerus; berkesinambungan. Sebagai kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kotabaru ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya yang terjaga dengan baik

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKP Tahun 2025 yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Tujuan RKP 2025

- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan IKN.
- Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja berkualitas,menurunkan ketimpangan, dan produk ramah lingkungan.

Target RKP 2025

- Pertumbuhan ekonomi: 5,3% - 5,6%.
- Tingkat kemiskinan: 6-7%.
- Pengangguran terbuka: 4,5-5%.
- Rasio Gini: 0,379 - 0,382.

Fokus RKP 2025:

- Penguatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah.

Prioritas RKP Tahun 2025 :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah:
   a. Peningkatan partisipasi sekolah
   b. Peningkatan kualitas tenaga kerja,
   c. Pemerataan layanan kesehatan.

2. Fondasi Perekonomian Berbasis SDA Terbarukan yang Masih Belum Kuat;
    a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan
    b. Hilirisasi industri dan diversifiikasi produk turunan berbasis SDA.
3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian yang Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan:
    a. Pengembangan moda transportasi massal,
    b. Memperkuat konektivitas antar wilayah.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana :
    a. Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan,
    b. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,
    c. Peningkatan ketahanan bencana berbasis mitigasi dan adaptasi,
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
    a. Tata kelola pemerintahan berbasis digital yang adaptif dan inovatif.
6. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
    a. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memiliki arah kebijakan Pengembangan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung erekonomian berkelanjutan berpedoman pada pencapaian Pembangunan Global (SDGs) dengan Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan tema **Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan**". Dengan prioritas daerah:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

Program dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru berisi program–program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Visi pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 yaitu “Kotabaru Kepulauan SA-IJAAN, Maju, dan Berkelanjutan”. Yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kotabaru periode 2025-2030 pada rancangan RPJMD tahun 2025-2029 “Kotabaru Hebat, Maju dan berkelanjutan”. Dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka beberapa sector masih harus menjadi perhatian dan fokus untuk mencapai visi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut.

Ada pun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
2. Penyediaan infrastruktur dasar belum optimal antarwilayah, serta pembangunan daerah kurang mempertimbangkan aspek penataaan ruang dan lingkungan hidup.
3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang kurang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,
4. Peningkatan kesempatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan belum optimal, dan
5. Kualitas sumber daya manusia belum optimal.

Menimbang hal-hal yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam peningkatan ekonomi agromaritim dan investasi.
2. Belum mantapnya infrastruktur dasar termasuk infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukung ketahanan lingkungan dan iklim.
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.
4. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata"** dengan memperhatikan perubahan kondisi Kabupaten Kotabaru termasuk Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dilakukan penyesuaian tema RKPD Perubahan Tahun 2025 yaitu **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"**. Dengan fokus pembangunan:

1. Pengembangan ekonomi agromaritim dan peningkatan iklim investasi yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
2. Pemerataan infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
3. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan,
4. Pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta perluasan jaminan sosial,
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Rencana Kerja

Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM
    1) Peningkatan kualitas pendidikan
    2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
    3) Pengendalian prevalansi stunting
2. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
    4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing
    5) Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
    6) Peningkatan investasi
    7) Peningkatan kemandirian desa
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
    8) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
    9) Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
    10) Penguatan dan Pemantapan Sistem Informasi Perencanaan
4. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
    1) Peningkatan layanan kepada PPKS
    2) Peningkatan lapangan kerja
    3) Pengembangan UMKM
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan pengelolaan Lingkungan Hidup
    1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
    2) Peningkatan kualitas rumah, sanitasi dan air minum
    3) Pengendalian pemanfaatan ruang
    4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

RKPD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional. Pembangunan Kabupaten Kotabaru juga merupakan dukungan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti dan mengatasi isu / Permasalahan strategis sebagaimana disebutkan diatas maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru dengan menyesuaikan Prioritas Rencana Kerja Pemeritah Pusat Tahun 2025 dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2025. Adapaun hubungan penyesuaian prioritas Rencana Kerja Pemerintah tersebut sebagai berikut :

Tabel I.10 Prioritas RKP Tahun 2025

No	Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten KotabaruTahun 2025
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau,	Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sector perekonomian
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
3	Melanjutkan hilirisasi		

No	Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten KotabaruTahun 2025
	dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas SDM
6	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	

No	Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten KotabaruTahun 2025
	masyarakat yang adil dan makmur.		
7	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik dan investasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
8	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		

Prioritas daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045. Serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030 yang saat ini masih dituangkan dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 juga juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan nasional dan program prioritas Asta Cita, seperti penguatan layanan gizi melalui MBG, intervensi stunting berbasis rumah tangga, penguatan UMKM digital, serta pengendalian inflasi berbasis pangan lokal.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kotabaru

tabel I.11 Tujuan Sasaran dan Strategi Pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, dan Berdaya Saing	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Unggul yang Merata	1	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan dasar secara inklusif
			2	Akselerasi pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik satuan pendidikan dasar di seluruh satuan pendidikan
		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Prima bagi Semua	1	Pembangunan fasilitas infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh wilayah
			2	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
			3	Peningkatan derajat kesehatan daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender di Masyarakat	1	Akselerasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			2	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
		Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat	1	Peningkatan pembinaan kerukanan antarumat beragama guna mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum daerah
			2	Peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
2	Menguatnya Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Adil Bagi Semua	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah Secara Berkelanjutan	1	Akselerasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
			2	Optimalisasi peran penyuluh pertanian guna peningkatan produktivitas
			3	Koordinasi dengan provinsi untuk pengembangan perikanan tangkap laut
			4	Peningkatan produktivitas perikanan budidaya
			5	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan industri di daerah
			6	Peningkatan penyediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai di daerah
			7	Peningkatan daya tarik destinasi dan sarana pendukung pariwisata
			8	Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Disertai dengan Daya Beli yang Terjaga dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	1	Peningkatan pemberdayaan sosial melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
			2	Peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, dan PMKS
			3	Peningkatan perlindungan dan penyediaan jaminan sosial

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
			4	Peningkatan pelatihan kerja sesuai kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			5	Fasilitasi penempatan tenaga kerja daerah sesuai kompetensi
			6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			7	Peningkatan pemberdayaan usaha mikro di daerah
			8	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
			9	Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
			10	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha daerah
			11	Peningkatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan untuk Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	1	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
			2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
			3	Perbaikan pengelolaan media komunikasi publik dengan pemangku kepentingan
			4	Optimalisasi pengelolaan egovernment pemerintah daerah
			5	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan
			6	Peningkatan kapasitas DPRD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran daerah
			7	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis bukti
			8	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			9	Peningkatan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah
			10	Peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara di daerah
			11	Pengembangan kompetensi SDM aparatur baik teknis maupun manajerial
			12	Peningkatan pengawasan kinerja dan keuangan daerah
4	Terwujudnya Pembangunan Wilayah	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang berkualitas	1	Penyediaan fasilitas sumber daya air secara berkelanjutan
			2	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
	Berbasis Desa yang Merata dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	dan ramah lingkungan		air minum di daerah
			3	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan fasilitas persampahan di daerah
			4	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			5	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan fasilitas pengolahan limbah domestik dan industri di daerah
			6	Pengembangan sistem drainase di daerah
			7	Penyelesaian pembangunan kantor pemerintahan di Komplek Perkantoran Sebelimbingan
			8	Peningkatan kualitas jalan daerah kewenangan kabupaten
			9	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
			10	Fasilitasi pengembangan perumahan di daerah
			11	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
			12	Penyediaan tanah untuk pembangunan
			13	Penyediaan dan rehabilitasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1	2	3	4	
				perlengkapan sarana dan prasarana jalan
			14	Penyediaan jaringan internet
		Terwujudnya kemandirian desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Optimalisasi kerja sama antar desa
			2	Fasilitasi sarana prasarana desa menuju desa mandiri
			3	Perbaikan administrasi pemerintahan desa
			4	Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
			2	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			3	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah
		Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	1	Peningkatan pelayanan informasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			2	Perlindungan sosial bgi korban bencana alam

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029

Tabel I.12 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotabaru 2025-2029

MISI RPJMD 2025 - 2029	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Membangun Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul dan Kreatif	Kotabaru Cerdas Plus	Pendidikan
	Kotabaru Sehat Plus	Kesehatan
	Pengembangan Event Budaya Berbasis Pendapatan	Kebudayaan
	Penguatan Hubungan Kelembagaan Antara Pemda dan Forkopinda	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; Kewilayahan
	Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Perempuan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI 2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Tenaga Kerja
	Hilirisasi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan; Pertanian
	Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	Penanaman Modal; Unsur Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Swasta untuk Peningkatan Pendapatan Daerah dan Penciptaan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Tenaga Kerja

MISI RPJMD 2025 - 2029	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PENANGGUNG JAWAB
	Lapangan Kerja	
	Pemberdayaan CSR untuk Pertumbuhan Ekonomi	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
MISI 3 Menguatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi Pelayanan Publik Daerah	Komunikasi dan Informatika
	Reformasi Penataan Kelembagaan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	Penyederhanaan Administrasi Pelayanan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	Kenaikan Tunjangan Berkala	Unsur Penunjang Urusan Keuangan
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Unsur Penunjang Urusan Keuangan
Misi 4: Membangun Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berkeadilan untuk Ketahanan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	Pengembangan dan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup
	Rehabilitasi Rumah Ibadah, Tempat Bersejarah, Sarana Olahraga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyelesaian RDTR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan Embung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengelolaan Limbah Industri dan Rumah Tangga	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup

MISI RPJMD 2025 - 2029	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PENANGGUNG JAWAB
	Rehabilitasi Rumah Warga Kurang Mampu dan Penataan	Perumahan Rakyat dan Kawasan
	Kawasan Kumuh	Permukiman
	Penuntasan Banjir dan Genangan Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Jaringan Internet	Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Laut	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan Jalan Alternatif Wilayah Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penuntasan Jembatan Penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu	Unsur Penunjang Urusan Keuangan

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kotabaru

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi:

a. Pengembangan Dermaga Sebuku

b. Pembangunan Jalan Tol Batulicin – Kotabaru – IKN

c. Pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan.

Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru:

1. Kawasan yang diprioritaskan karena memiliki nilai strategis dari sudut kepentinganekonomi, terdiri atas :
   a. Kawasan Pusat Bisnis Kota Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara
   b. Pengembangan S2TS (Stagen, Sebelimbingan, Tarjun dan Serongga), meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kelumpang Hilir.

c. Kawasan Industri Tarjun di Kecamatan Kelumpang Hilir.
d. Kawasan Agropolitan Pertanian, berada di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah dan Kecamatan Pamukan Barat.
e. Kawasan Industri Sebuku yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku;
f. Kawasan Energi Terbarukan (Kincir angin) di Daerah Pesisir Kabupaten Kotabaru:
g. Kawasan Energi Pangan berada di Kecamatan Pulaulaut Barat, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Kecamatan Pulaulaut Selatan.
h. Pengembangan Kotabaru Maritim di Kecamatan Pulaulaut Barat, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Sebuku dan Kecamatan Kelumpang Selatan.
i. Pengembangan Kawasan Terpadu Pulau Kepulauan; pembangunan di Kawasan yang dikembangkan antara lain BLK, Sekolah Rakyat, BLK, RSUD Pratama, Laboratorium pertanian terpadu, peternakan terpadu, perkebunan dan pengembangan lainnya.

Pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kotabaru di atas juga ditujukan untuk mendukung prioritas nasional (Asta Cita) beserta prioritas pembangunannya juga termasuk prioritas pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kawasan pertumbuhan industri baru berupa Kawasan Pengembangan Mekar Putih, Pelabuhan Laut Dalam sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita masyarakat.\

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dalam membuktikan komitmennya terhadap pelayanan publik. Melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melampaui target nasional, Kotabaru berhasil memastikan bahwa setiap warga negara—dari pusat kota hingga gugusan pulau terpencil—mendapatkan hak-hak dasarnya secara berkualitas.

Keberhasilan SPM kesehatan tahun 2025 ditandai dengan tercapainya angka cakupan layanan 100% pada 12 indikator utama. Pemkab Kotabaru melakukan terobosan dengan menempatkan tenaga medis spesialis di wilayah kepulauan dan optimalisasi Puskesmas Keliling Perairan. Berkat alokasi anggaran yang tepat sasaran, masyarakat tidak lagi terhambat kendala geografis untuk mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak serta penanganan penyakit menular.

Urusan pendidikan di bawah SPM tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di wilayah terpencil (daerah 3T). Dinas Pendidikan sukses memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal melalui program "Jemput Bola Siswa". Rasio guru terhadap murid serta ketersediaan buku teks utama telah memenuhi standar baku, menciptakan lingkungan belajar yang setara antara desa dan kota.

Pemerintah kab Kotabaru mencatatkan progres signifikan pada urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

- Akses Air Minum: Perluasan jaringan perpipaan yang menjangkau pemukiman baru.
- Sanitasi: Pembangunan sistem pengolahan limbah domestik yang ramah lingkungan di wilayah padat penduduk.
- Keamanan Bangunan: Ketegasan dalam standar kelayakan fungsi bangunan umum guna menjamin keselamatan warga.

Kinerja Satpol PP dan Damkar serta BPBD Kotabaru di tahun 2025 mendapat apresiasi tinggi. Respon cepat (*response time*) terhadap bencana alam dan kebakaran hutan di bawah 15 menit menjadi bukti efektivitas koordinasi lapangan. Penguatan mitigasi bencana di daerah rawan pesisir juga menjadi prioritas yang berhasil dijalankan secara konsisten

Kunci utama keberhasilan ini terletak pada penggunaan aplikasi e-SPM Kotabaru, sebuah sistem monitoring *real-time* yang memungkinkan pimpinan daerah memantau capaian setiap indikator setiap harinya. Transparansi data ini memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusinya tanpa birokrasi yang berbelit.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah hasil nyata realisasi dari berbagai indicator ekonmi utama dalam kurun waktu satu tahun anggaran pemerintahan berjalan. Tujuan capaian kinerja makro adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2018.

Pada aspek kesejahteraan masyakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator).

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator Kinerja Makro pembangunan tersebut terdiri darI Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian Indikator Makro Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Tahun 2021 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.94	71,57	72,01	72,42	73,03
2	Angka Kemiskinan	4,86	4,30	4,32	4,45	4,39
3	Angka Pengangguran	5,57	6,70	6,08	6,05	5,93
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.35	4.58	4,29	5,30	5,34
5	Pendapatan Per Kapita	11.720.000	12.191.000	12.480.000	12.929.000	13.163.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,306	0,331	0,316	0,296	0,275

Sumber data: BPS Kotabaru, Maret 2026

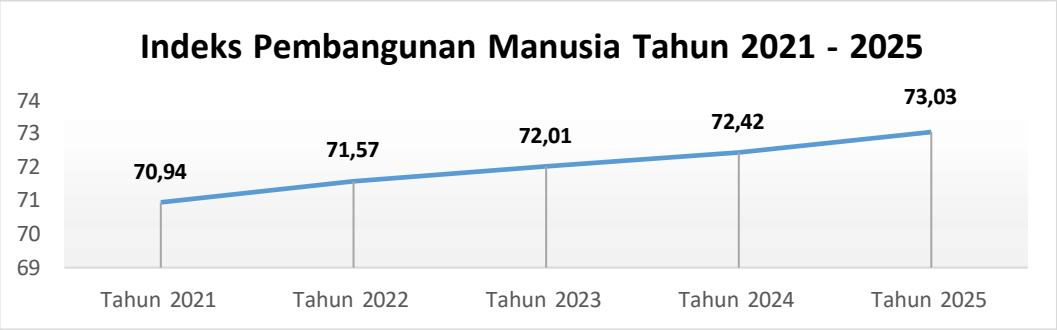
1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran yang menunjukan tingkat pencapaian pembangunan manusia disuatu wilayah. Indeks Pembangunan Kabupaten Kotabaru menunjukan trend positif meningkat setiap tahun yaitu sebesar 72,42 pada tahun 2024.dan meningkat menjadi 73,03 pada tahun 2025. Hal ini seiring komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru mendorong kegiatan Pembangunan di Bidang Pendidikan sehingga meningkatkan persentase pendidikan di Kabupaten Kotabaru dengan cara memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan, menambah jumlah guru setiap tahun, melalukan peningkatan sertifikasi guru, mencegah angka putus sekolah serta meningkatkan akses pendidikan.

Selain itu juga Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru juga meningkatkan layanan di bidang kesehatan dibuktikan dengan meningkatnya usia harapan

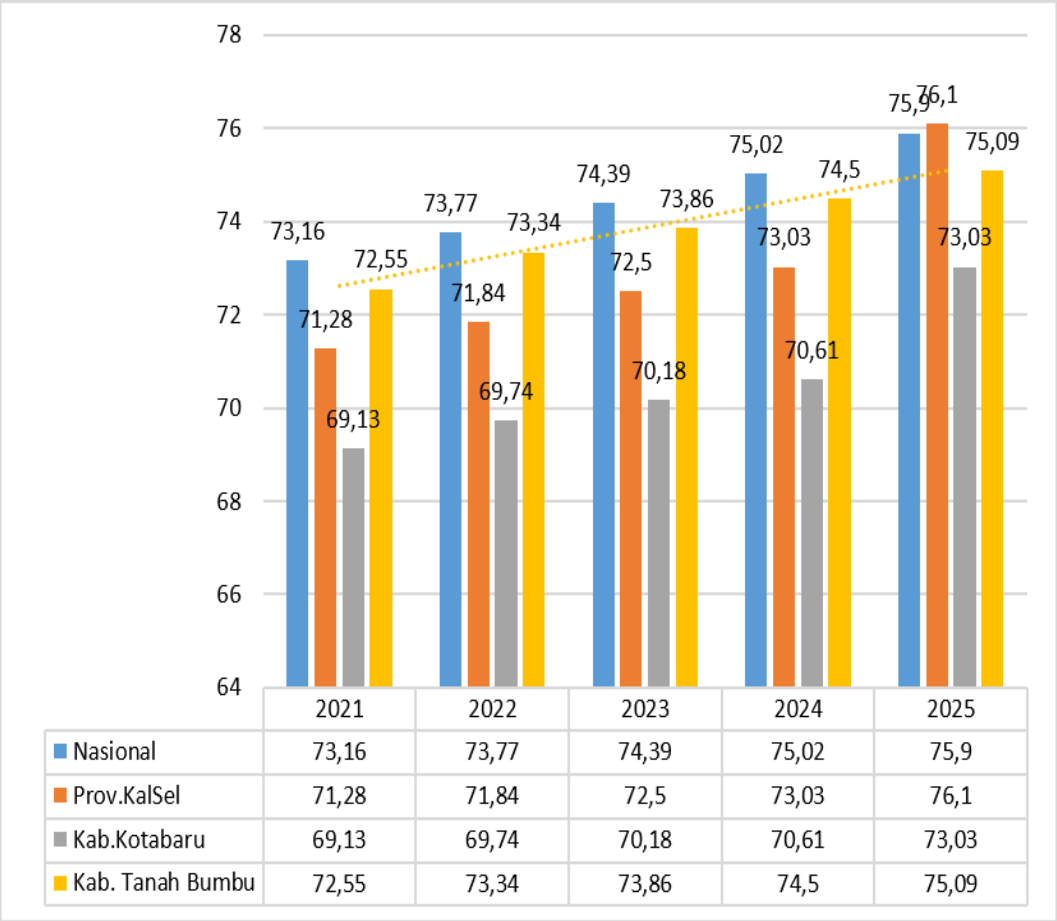
hidup warga masyarakat kabupaten kotabaru yaitu dari 73,88 pada tahun 2024 meningkat 74.03 pada tahun 2025.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 meningkat setiap tahun, dan informasi tersebut disajikan dengan data berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 – Tahun 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,9
Prov.KalSel	71,28	71,84	72,5	73,03	76,1
Kab.Kotabaru	69,13	69,74	70,18	70,61	73,03
Kab. Tanah Bumbu	72,55	73,34	73,86	74,5	75,09

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotabaru selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, meskipun secara angka masih berada di posisi terendah dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Tanah Bumbu. Dimulai dari angka 69,13 pada tahun 2021, Kotabaru secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusianya hingga menembus angka 73,03 pada tahun 2025, dengan lonjakan yang cukup signifikan terlihat pada transisi tahun 2024 ke 2025. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut, meskipun tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi dan nasional masih cukup besar.

Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka IPM paling rendah di antara pembanding lainnya dalam grafik tersebut, wilayah ini berhasil mempertahankan pertumbuhan yang progresif setiap tahunnya dan mencapai tonggak penting di tahun 2025 dengan melampaui angka 73.

Kenaikan yang signifikan ini dipicu oleh faktor pendorong utama berupa peningkatan standar hidup layak melalui pertumbuhan ekonomi daerah serta perbaikan akses layanan kesehatan yang memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih membayangi adalah kondisi geografis Kotabaru yang didominasi wilayah kepulauan, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik dan sulitnya pemerataan fasilitas pendidikan serta kesehatan ke area terpencil. Tantangan ini terlihat dari pertumbuhan IPM yang cenderung melambat pada periode 2021 hingga 2024 sebelum akhirnya mengalami lonjakan tajam pada proyeksi tahun 2025.

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah Indikator yang mengukur persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 mengalami trend positif yaitu terjadi pengurangan dari 4,45 pada tahun 2024 menjadi 4,39 pada tahun 2025.

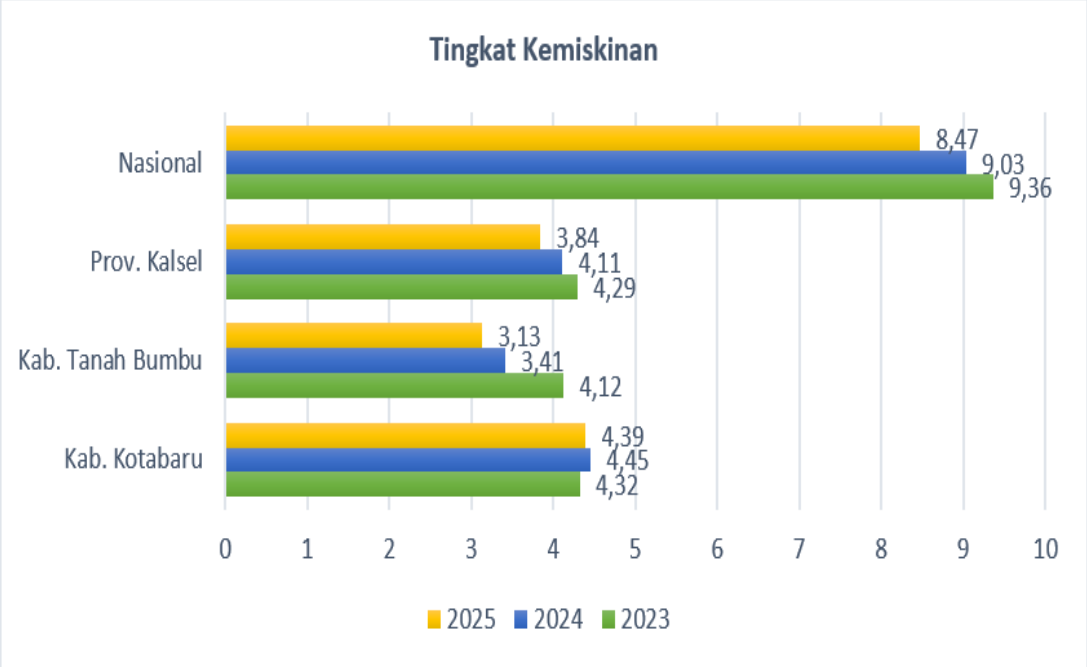
Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembukaan lapangan kerja dengan berkolaborasi setiap perusahaan yang berinvetasi di daerah dengan mewajibakan menggunakan tenaga lokal minamal 50% dan serta dengan program perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Data angka kemiskinan Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten secara Nasional, di Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Tanah Bumbu, namun Kabupaten Kotabaru menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda dengan adanya fluktuasi tipis. Secara Nasional, angka kemiskinan turun dari 9,36% pada 2023 menjadi 8,47% pada 2025, sementara Kalimantan Selatan berhasil menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 3,84% di tahun 2025. Menariknya, meskipun angka kemiskinan Kabupaten Kotabaru di tahun 2025 (4,39%) masih berada di bawah angka Nasional, angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 2023 yang berada di angka 4,32%, berbeda dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil melakukan penurunan tajam dari 4,12% menjadi 3,13% dalam periode yang sama.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru selama periode 2023–2025 relatif stabil di kisaran 4,3%, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik karena angkanya jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional. Namun, adanya kenaikan tipis sebesar 0,07 poin persentase dari tahun 2023 ke 2025 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal agar tidak terjadi tren peningkatan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu mengidentifikasi faktor penyebab stagnasi ini, terutama jika dibandingkan dengan performa Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu mencapai penurunan signifikan, guna memastikan capaian kinerja daerah tetap selaras dengan target penurunan kemiskinan makro

3. Angka Pengangguran

Indikator Angka Pengangguran adalah merupakan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja.

Angka pengangguran di Kabupaten Kotabaru dari tahun 2024 sebesar 6,05 mengalami penurunan menjadi 5,93 pada tahun 2025. Hal ini seiring kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, untuk mendayagunakan pekerja lokal pada perusahaan yang berinvetasi di kotabaru, selaian itu juga Pemerintah memberikan stimulus dan bimbingan serta pelatihan kepada

penggiat UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.

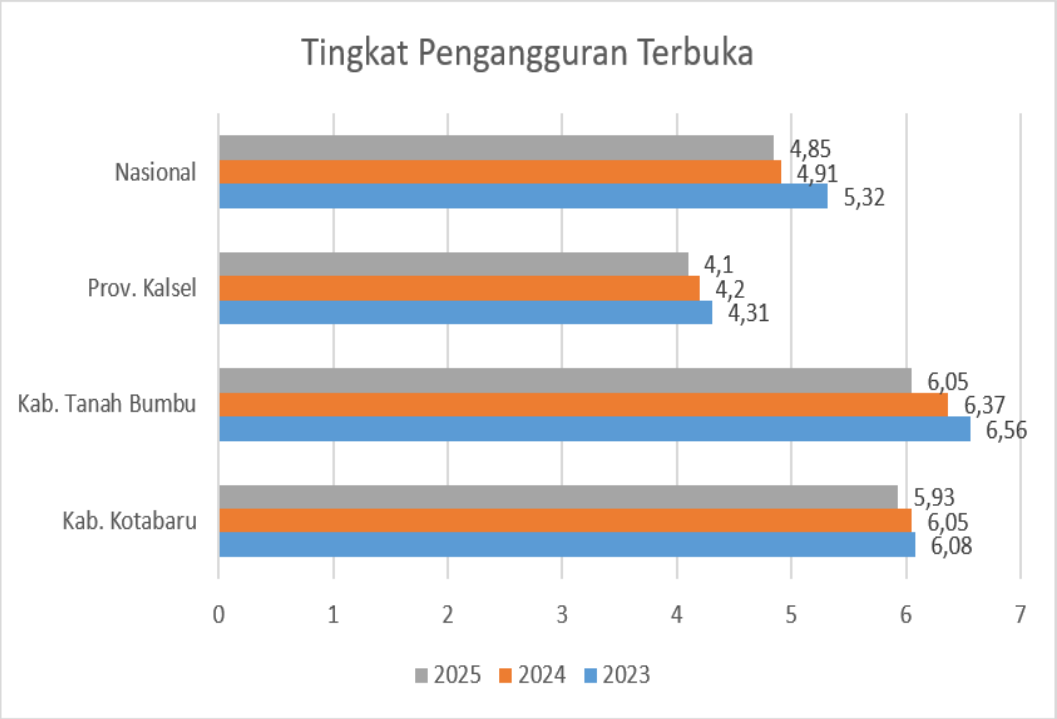
Mengantisipasi meningkatnya angka pengguran Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui dinas tenaga kerja telah melaksanakan bimbingan dan pembekalan keterampilan bagi usia produktif untuk dapat membuka usaha / lapangan kerja secara mandiri. Adapun pembekalan tersebut yaitu melakukan kursus dibidang perbengkelan, kursus menjahit, kursus tata boga, kursus adminstrasi perkantoran, diharapkan melalui pembekalan tersebut peserta memiliki ilmu dasar sehingga siap terjun ke dunia kerja.

Selain itu pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan bagi UMKM sehingga UMKM Kabupaten Kotabaru memiliki daya saing, dan dapat mandiri. Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencoba berkolaborasi dengan investor dan pengusahan di Kabupaten kotabaru dalam rangka membuka lapangan kerja untuk meningkatkan penyerapan angkatan usia produktif. Data angka pengangguran Kabupaten Kotabaru dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 disajikan sebagaimaan data berikut :



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten di seluruh wilayah pengamatan, mulai dari level Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,93%, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024 (6,05%) dan 2023 (6,08%). Meskipun trennya menurun, angka pengangguran di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (4,1%) dan rata-rata Nasional (4,85%) pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten masih lebih besar dibandingkan skala provinsi maupun nasional.

Kabupaten Kotabaru berhasil menjaga tren positif dalam menekan angka pengangguran selama periode 2023–2025 dengan total penurunan sebesar 0,15 poin persentase. Pencapaian angka 5,93% di tahun 2025 mencerminkan adanya efektivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan atau

pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja baru. Namun, pemerintah daerah perlu tetap waspada dan meningkatkan program penguatan kompetensi SDM, mengingat angka TPT Kotabaru masih cukup jauh melampaui angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan upaya ekstra agar daya saing tenaga kerja lokal dapat setara atau bahkan lebih baik dari rata-rata provinsi.

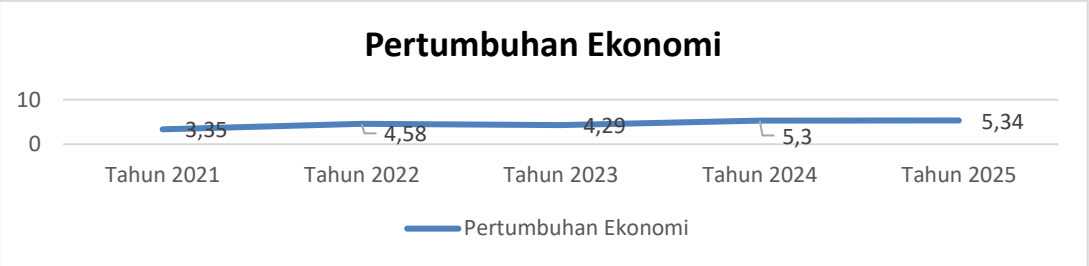
4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah adalah indkator kondisi perekonomian yang terjadi secara bekelanjutan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten kotabaru pada tahun 2020 mencapai titik terendah yaitua minus 1,87 ini terjadi akibat pandemi COVID 19 dimana pertumbuhan minus ini dirasakan diseluruh Kabupaten/Kota di indonesia, dampak ini tidak hanya dirasakan diindonesia bahkan diluar negeri negara-negara besar merasakan dampak dari pandemi covid 19 yang menyembabkan penurunan pertumbuhan ekonomi

Adapaun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 sebesar 3,35, dan secara perlahan mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi nasional disertai dengan kerja keras bapak bupati mewujudkan visi-misi untuk meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarkat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar 5,34. Hal ini sejalan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan percepatan belanja Pemerintah, Relaksasi Pajak Penghasilan dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan melaksanakan Kebijakan keuangan negara melalui reklaksasi APBN.

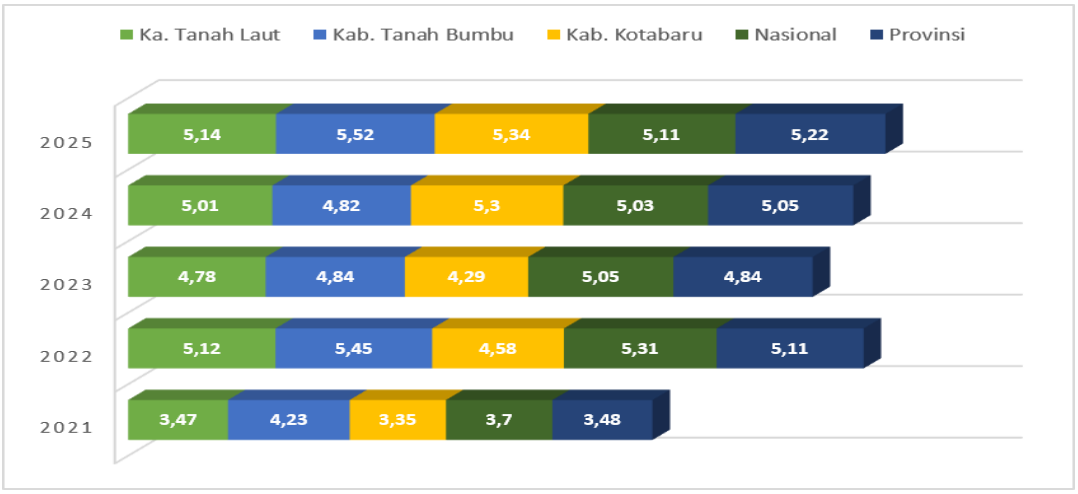
Dan juga kebijakan pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru yaitu melalui bekerjasama dengan sektor perbankan melalui relaksasasi pembiayaan, memberikan dukungan terhadap UMKM Kabupaten Kotabaru, melakukan kebijakan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas daya beli dan bahan pokok dimasyarakat, serta menjaga inflasi agar dalam ambang batas wajar.

Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ditujunkkan dengan diagram sebagai berikut :



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hingga 2025, dinamika perekonomian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun berujung pada peningkatan yang sangat progresif. Pada periode awal (2021–2023), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru masih berada pada fase pemulihan dengan capaian yang relatif lebih lambat dibandingkan daerah komparasinya. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 3,35%, kemudian meningkat menjadi 4,58% pada 2022, sebelum akhirnya sedikit terkoreksi ke angka 4,29% pada tahun 2023. Sepanjang tiga tahun tersebut, performa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru secara konsisten masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan maupun

pencapaian Nasional.

Namun demikian, kinerja perekonomian Kabupaten Kotabaru mengalami titik balik (turning point) dan akselerasi yang luar biasa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi melesat tajam mencapai angka 5,30%, sekaligus berhasil melampaui capaian Kabupaten Tanah Laut (5,01%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (4,82%), serta memposisikan diri di atas rata-rata pencapaian Nasional (5,03%) dan Provinsi (5,05%). Momentum positif ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,34%. Meskipun pada tahun 2025 posisinya berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu, capaian Kabupaten Kotabaru tetap mencatatkan performa yang sangat baik karena tetap konsisten berada di atas angka rata-rata pertumbuhan tingkat Provinsi (5,22%) dan Nasional (5,11%).

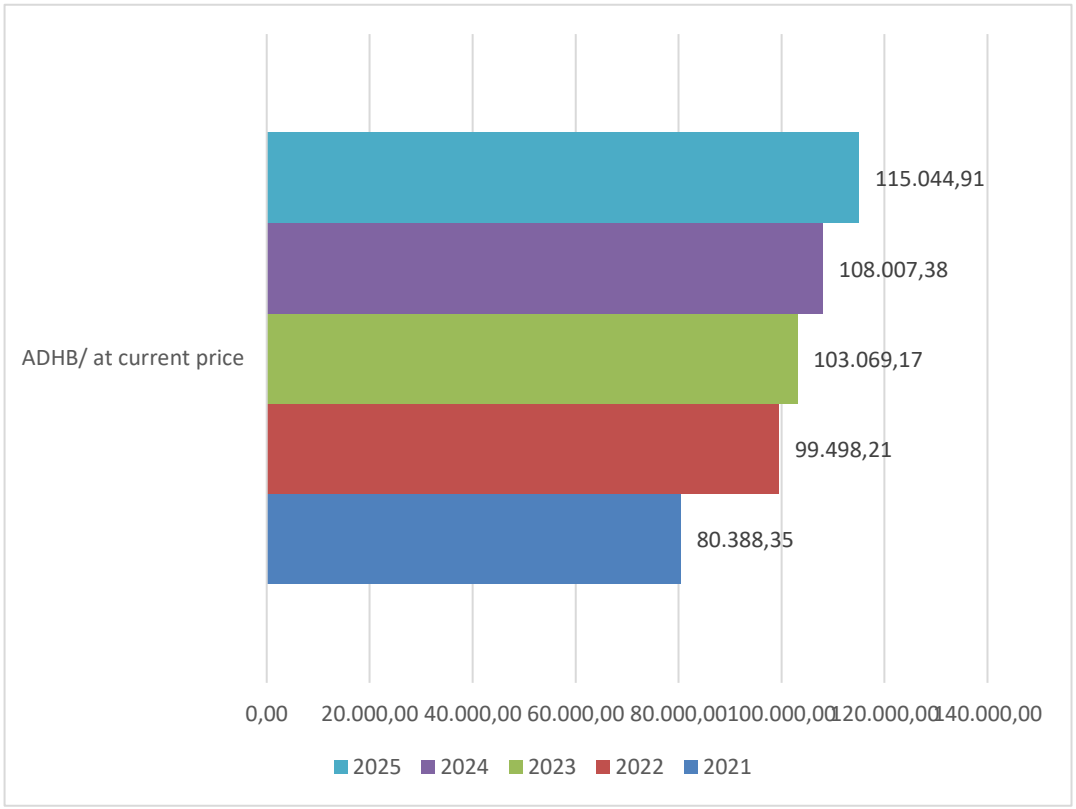
Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 2021–2025 menunjukkan resiliensi dan daya ungkit yang sangat positif. Meskipun sempat mengalami ketertinggalan laju pertumbuhan pada paruh pertama periode (2021–2023), Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil mengeksekusi strategi akselerasi pembangunan dan ekonomi yang terbukti efektif, ditandai dengan lonjakan tajam pada tahun 2024 dan tren keberlanjutan di tahun 2025 yang sukses menembus di atas target rata-rata provinsi dan nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan, stimulus, maupun program prioritas daerah yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat. Fokus Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke depan adalah menjaga stabilitas dan konsistensi momentum pertumbuhan ini, serta terus mengoptimalkan sektor-sektor riil unggulan yang terbukti menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi daerah

5. Pendapatan Perkapita (PDRB)

Pendapatan perkapita yaitu indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk disuatu wilayah dalam waktu satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pergerakan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kotabaru diawali pada angka 80.388,35 di

periode pertama. Kinerja perekonomian kemudian menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan pada periode kedua dengan melonjak tajam hingga menyentuh angka 99.498,21. Capaian positif ini berhasil dipertahankan dan terus bergerak naik pada tiga periode selanjutnya. Secara berturut-turut, angka PDRB per kapita merangkak naik menjadi 103.069,17, kemudian 108.007,38, hingga akhirnya menembus angka tertinggi pada 115.044,91 di akhir periode data.

Pertumbuhan angka yang berujung pada level 115.044,91 ini mencerminkan dinamika roda perekonomian Kabupaten Kotabaru yang terus berputar maju. Meskipun perhitungan atas dasar harga berlaku (at current price) berarti peningkatan angka ini turut dipengaruhi oleh faktor pergerakan harga atau inflasi daerah, tren kenaikan yang konsisten tetap menjadi sinyal fundamental yang baik. Capaian ini diharapkan dapat terus sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat nyata di Kotabaru, sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk terus memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi andalannya.

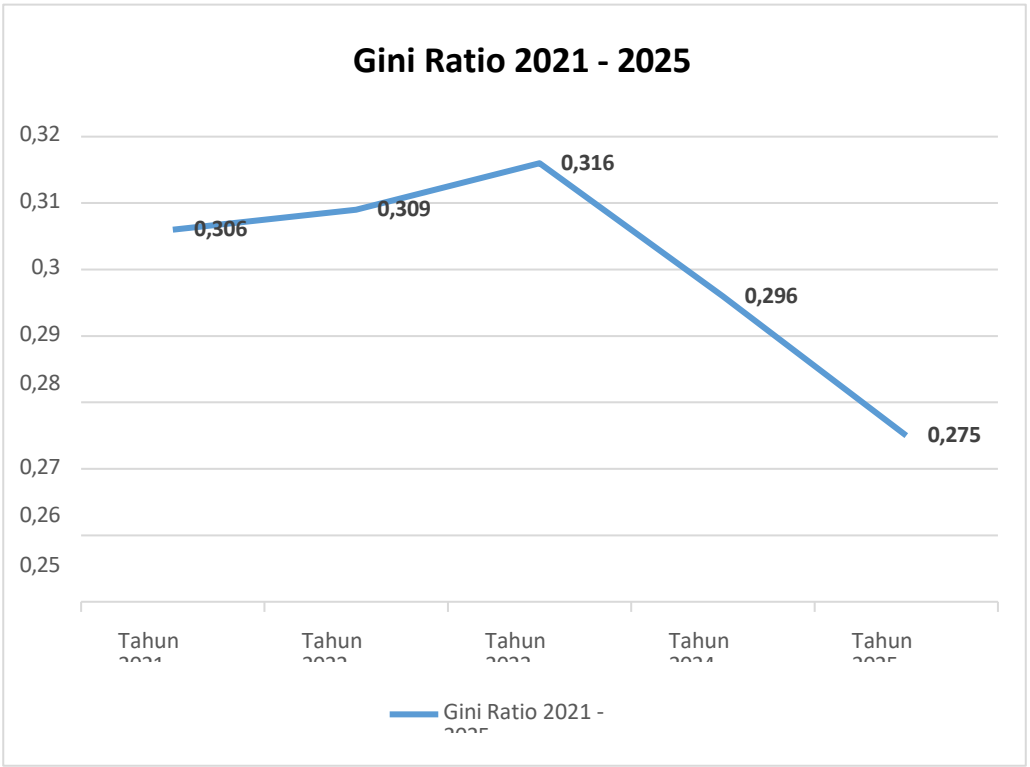


Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

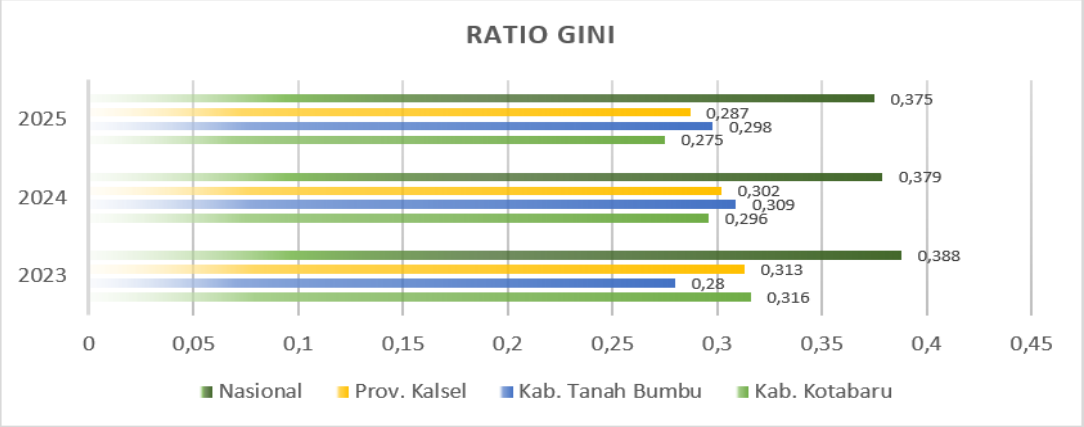
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan rendah jika nilai Gini ratio kurang dari 0,3. Ketimpangan pendapatan sedang jika nilai Gini ratio berada di antara 0,3 hingga 0,5. Ketimpangan pendapatan tinggi jika nilai Gini ratio 0,5 atau lebih. Indikator Gini Ratio Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 relatif stabil dikisaran lebih dari 0,3, yaitu sebesar 0,296 pada tahun 2024 dan sebesar 0,275 pada tahun 2025. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Kotabaru ketimpangan pendapatan di kategori rendah.
Artinya pendapatan terdistribusi merata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Gambaran indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada data yang disajikan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026

Grafik
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk yang positif di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru selama periode 2023 hingga 2025. Secara umum, angka Gini Ratio Nasional merupakan yang tertinggi (berkisar antara 0,388 hingga 0,375), sementara wilayah lingkup daerah menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yang mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan angka Gini Ratio yang konsisten di hampir seluruh wilayah ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerataan pendapatan dan akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, wilayah ini menunjukkan performa pemerataan ekonomi yang sangat impresif dan konsisten. Meskipun sempat berada di angka 0,316 pada tahun 2023 (lebih tinggi dari Kabupaten Tanah Bumbu saat itu), Kotabaru berhasil menekan angka ketimpangannya secara signifikan menjadi 0,296 pada tahun 2024, dan mencapai level terendah sebesar 0,275 pada tahun 2025. Dengan angka tersebut, Kabupaten Kotabaru tidak hanya berhasil melampaui capaian nasional dan provinsi, tetapi juga resmi menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dibandingkan wilayah lainnya yang tertera dalam grafik pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di masyarakat Kotabaru semakin merata.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan adalah hasil ukuran dari perwujudan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penilaian capaian kinerja merupakan hasil perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD atau RKPD) dengan realisasi yang dicapai di lapangan, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Tujuan penilaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk Mengukur Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan, ebagai Dasar Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bahan Pembinaan dan Pengawasan hasil evaluasi, Dasar Pengambilan Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran pada tahun yang akan dating dan mendorongn mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan untuk mencapai good government dan good governance

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap, yaitu dijelaskan secara rinci pada point selanjutnya .

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1.a.1 Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru	
		1.a.2 Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %		
		1.a.3 Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	56,23 %		
		1.a.4 Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	69,46 %		
		1.a.5 Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	71,67%		
2	Kesehatan	1.b.1 Persentase Kematian ibu	0,13	Dinas Kesehatan	
		1.b.2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	8,92		
		1.b.3 Persentase pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	92,84 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.b.4. Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai standar	79,62 %		
		1.b.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	81,52 %		
		1.b.6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,89 %		
		1.b.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,01 %		
		1.b.8 Persentase pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar	61,21 %		
		1.b.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,36 %		
		1.b.10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47,02 %		
		1.b.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		
		1.b.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	69,44 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1.b.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,41 %		
		1.b.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	96,82 %		
3	Pekerjaan Umum	1.c.1 Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	51,06 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kotabaru	SDA
		1.c.2 Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	42.40 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kotabaru	SDA
		1.c.3 Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	83.53 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.c.4 Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72.68%		
		1.c.5 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	93.62		
		1.c.6 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	11.09%		
		1.c.7 Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %		
		1.c.8 Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %		
		1.c.9 Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12.21 %		
		1.c.10 Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota			
4	Perumahan Rakyat	1.d.1 Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mermperoleh rumah layak huni	0%	Dinas Perumahan Rakyat , Permukiman dan Pertanahan	
		1.d.2 Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	20,15%		
		1.d.3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%		
		1.d.4 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, sarana, dan utiitas umum	100%		
5	Ketentrama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e1 Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	0.00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		1.e.2 Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %		
		1.e.3 Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.e.4 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		
		1.e.5 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		
		1.e.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82.61%		
6	Sosial	1.f.1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	96.97 %	Dinas Sosial	
		1.f.2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		
		1.f.3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	94.55 %		
		1.f.4 Persentase gelandangan dan pengemis yang	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %		
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	91.28 %		
8	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	40.24%		
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah	77.57%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan			
9	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	baru dilaksanakan tahun 2021
		2.b.2 Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %		25 : 89066
10	Pangan	2.c.1 Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43.00 %	Dinas Ketahanan Pangan	
11	Pertanahan	2.d.1 Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	28.44 %	Dinas Perumahan Rakyat , Permukiman dan Pertanahan	
		2.d.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0 %		
		2.d.3 Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
12	Lingkungan Hidup	2.e.1 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	75.00 %	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.e.2 Persentase jumlah sampah yang tertangani	15.55 %		
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	0 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.2 Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0 %		
		2.f.3 Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	0 %		
		2.f.4 Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	0 %		
		2.f.5 Persentase akta kematian yang	0 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			diterbitkan bagi yang melaporkan			
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	0 %		
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	0 %		
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	DPMD	
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	61.82 %		
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	100 %		
15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	10.41 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	sumber data dari BPS
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive	66.66 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Prevalence Rate (mCPR)			
		2.h.3 Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	44.00 %		
16	Perhubungan	2.i.1 Konektivitas Kabupaten/Kota	0.62	Dinas Perhubungan	
		2.i.2 Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.37		
		2.i.3 Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100 %		
17	Komunikasi dan Informatika	2.j.1 Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	14.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.j.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87.50 %		
		2.j.3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	56,64 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
18	KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	34.69 %	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	81.76 %		
19	PENANAMAN MODAL	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-29,43 %	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru	
		2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	70.03 %		
20	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	23.07 %	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru	
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam	2.64 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		2.m.3 Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	2.89 %		
		2.m.4 Persentase jumlah atlet berprestasi	38.46 %		
21	Statistik	2.n Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Persandian	2.o Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	27.02 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
23	Kebudayaan	1.2 Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.p.2 Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-66.67 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
24	Perpustakaan	2.q.1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	58.26	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	Surat Keterangan
		2.q.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	10.98		Surat Keterangan
25	Kearsipan	2.r Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	79.17 %	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
26	Kelautan & Perikanan	3.a.1 Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100.20 %	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	Data Produksi terlampir
		3.a.2 Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	72.81 Kg/Kap		
27	Pariwisata	3.b.1 Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0.01 %	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru	
		3.b.2 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-4.49 %		
		3.b.3 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	7.85 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
28	Pertanian	3.c.1. Peningkatan produksi tanaman pangan	-10.17 %	Dinas Pertanian	
		3.c.2 Peningkatan produksi hortikultura	-34.84 %		
		3.c.3 Peningkatan produksi komoditas peternakan	32.39 %		
		3.c.4 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	9.31 %		
29	Perdagangan	3.f Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	36.07 %	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	
30	Perindustrian	3.g.1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3.	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota			
		3.g.2 Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1.32 %		
		3.g.3 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	63.44 %		
		3.g.4 Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	30.09 %		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3 IKK Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1 Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	BPKAD Kabupaten Kotabaru
		4.b.1 Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	19.37 %	
		4.b.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	12.20 %	
		4.b.3 Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	73.12 %	
		4.b.4 Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	45.35 %	Inspektorat
2	Kepegawaian	4.c Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71.04 %	BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Perencanaan	4.d Persentase Perangkat daerah yang menetapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	BAPPERIDA
4	Pengawasan	4.e.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,02	Inspektorat
		4.e.2 Kapabilitas Sistem Penendalian Intern Pemeirntah (APIP)	3	
		4.e.3 Manajemen Risiko Indkeks	2,52	
		4.e.4 Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	90,03	
5	Pengadaan	4.f.1 Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40.00 Poin	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotabaru
		4.f.2 Pemanfaatan sistem pengadaan	24.69 Poin	
		4.f.3 Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22.22 Poin	
6	Manajamen Keuangan	4.g.1 Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1 (Tepat Waktu)	BPKAD dan Bag Hukum

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4.g.2 Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	90 %	Bag. Hukum
		4.h Penilaian Maladministrasu Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3	Inspekorat dan Bag. Organisasi

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru menginformasikan capaain keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan kinerja Bupati Kotabaru Tahun 2025. Adapun Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang termuat dalam Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan, akuntabilitas kinerja daerah saat ini berada pada fase krusial seiring dengan masa transisi kepemimpinan. Pada tahap awal, pengukuran keberhasilan pembangunan mengacu pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026. Regulasi ini menjadi instrumen vital dalam mengawal visi dan misi daerah yang sedang berjalan, memastikan setiap program kerja Perangkat Daerah tetap selaras dengan target makro yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru menginformasikan capaain keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan kinerja Bupati Kotabaru Tahun 2025. Adapun Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang termuat dalam Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan, akuntabilitas kinerja daerah saat ini berada pada fase krusial seiring dengan masa transisi kepemimpinan. Pada tahap awal, pengukuran keberhasilan pembangunan mengacu pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026. Regulasi ini menjadi instrumen vital dalam mengawal visi dan misi daerah yang sedang berjalan, memastikan setiap program kerja Perangkat Daerah tetap selaras dengan target makro yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Namun, guna menghadapi dinamika politik dan administratif pasca pergantian kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029. Penetapan regulasi baru ini berfungsi sebagai jembatan strategis yang menjamin agar tidak terjadi kekosongan parameter pengukuran kinerja selama masa transisi. Melalui penyesuaian IKU ini, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan keberlanjutan program sebelumnya dengan prioritas baru yang akan diusung, sehingga standar pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran tetap terjaga secara akuntabel tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan.

Secara keseluruhan, integrasi antara kedua regulasi tersebut mencerminkan komitmen Kabupaten Kotabaru dalam mempertahankan nilai SAKIP yang unggul. Proses transisi ini dikelola sedemikian rupa agar

pergeseran fokus pembangunan tetap didasarkan pada data dan indikator yang terukur, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah baru nantinya memiliki landasan evaluasi yang kuat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen kendali untuk memastikan bahwa transisi kepemimpinan tetap memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kotabaru.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja (Sebelum Perubahan)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2022
(Sebelum Perubahan)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**$\frac{PDB_n - PDB_{n-1}}{PDB_{n-1}} X100\%$**	**5,3-5,97%**
1.	Meningkatnya Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	10,03%
2.	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	105.264,16 Ton
3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81,50
4.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri	$\frac{\text{PDRB tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk tahun n}} X100\%$	34,50%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Kontribusi tahun n / Jumlah Target Kontribusi tahun n X100%	6,63%
2.	**Meningkatnya investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**100% - Tingkat Kesempatan Kerja**	**4,45%**
6.	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru	Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.457.417 Juta
7.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja	∑Penduduk Bekerja / ∑Angkatan kerja X100%	95,55%
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	90%
3.	**Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang**	**Indeks Gini**	**1-∑fi (Yi+Yi+1)**	**0,274**
9.	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Jalan Mantap tahun n / Total Jalan X100%	33,18%
10.	Mewujudkan konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = Bobot Angkutan Jalan+ Bobot Angkutan Penyebrangan+ Bobot Angkutan Laut	0,94%
11.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Air Tahun n / Jumlah Rumah Tangga X100%	38,91%
12.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestic tahun n / Jumlah Rumah tangga X100%	25%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni tahun n}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$ X100%	98,85%
14.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	$\frac{\text{Ruang yang dimanfaatkan sesuai RTRW tahun n}}{\text{Jumlah RTRW}}$ X100%	97,20%
15.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6693
16.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,73
4.	**Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana Alam dan Non Alam**	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks Bahaya X** **Indeks Kerentanan / Indeks Kapasitas**	**153,79**
17.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	$\frac{\text{Kelompok masyarakat sadar bencana tahun n}}{\text{Jumlah masyarakat}}$ X100%	80%
5.	**Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**$\frac{1}{3}$ X (Indeks Harapan Hidup+ Indeks Pendidikan+ Indeks Standar Hidup Layak)**	**71,01-71,48**
18.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang penddikan dasar	Indeks Pendidikan	$\frac{2}{3}$ X (Indeks Melek Huruf) +$\frac{1}{3}$ X (Indeks Rata-rata Lama Sekolah)	11,00
19.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,40
6.	**Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**$\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Keseluruhan Populasi Penduduk}}$ X100%**	**4,03**
20.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan social	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan social tahun n}}{\text{Jumlah PPKS}}$ X100%	77,55%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**B (67,50)**
21.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	Nilai SAKIP	Nilai	BB
22.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.2
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
(Sebelum Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**	**5,3-5,97%**	**5,34**	**100,75%**	**Sangat Tinggi**
1	Meningkatnya Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	PDRB sektor pertanian	%	10,03%	10,66	106,28%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	105.264,16 Ton	121.483,07 Ton	115,40%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,50	75,34*	92,44%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri	%	34,50%	28,79	83,45%	Tinggi
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	%	6,63%	18,28%	275,71%	Sangat Tinggi
2	**Meningkatnya investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**4,45%**	**5,93**	**66,74%**	**Sedang**
6	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru	Nilai Investasi	Juta	1.457.417 Juta	4.713.191 Juta	323,39%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja	%	95,55%	94,07	98,45%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	90%	9%	10%	Sangat Rendah
3	**Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif**	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,274**	**0,275**	**99,63%**	**Sangat Tinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang						
9	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	33,18%	42,40%	127,78%	Sangat Tinggi
10	Mewujudkan konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,94%	0,60%	63,82%	Rendah
11	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	%	38,91%	82,27	211,43%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan limbah Domestik	%	25%	72,68%	290,72 %	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	98,85%	23,77	24,04%	Sangat Rendah
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20%	97,20%	100%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6693	0,7417*	110,81%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,73	80,22	118,44%	Sangat Tinggi
4	**Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana Alam dan NonAlam**	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**153,79**	**108,02**	**129,76%**	**Sangat Tinggi**
17	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	%	80%	100	125%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5	**Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**71,01-71,48**	**73,03**	**102,16%**	**Sangat Tinggi**
18.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang penddikan dasar	Indeks Pendidikan	Indeks	11,00	9,82*	89,27%	Tinggi
19.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia	70,40	74,03	105,16%	Sangat Tinggi
6	**Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**Angka**	**4,03**	**4,39**	**91,06%**	**Sangat Tinggi**
20	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	77,55%	91,75	118,31%	Sangat Tinggi
7	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**B (67,50)**	**BB (76,22)**	**112,91%**	**Sangat Tinggi**
21	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	Nilai SAKIP	Nilai	BB (70,1-80)	B (64,80)	92,43%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.3
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.
(Sebelum Perubahan)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**	**3,35**	**4,58**	**4,29**	**5,30**	**5,34**	**0,04 poin**	
1.	Meningkatnya Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	PDRB sektor pertanian	%	11,32	11,10	10,71	10,63	10,66	0,03 poin	-
2.	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	93.450.79	97.487,89	101.917,56	117.802,11	121.483,07 Ton	3.680,96 poin	
3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,85	77,03	69,84	75,34	75,34*	-	-
4.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri	%	33,03	28,57	28,06	28	28,79	0,79 poin	-
5.	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	%	4,36	5,11	6,12	6,42	18,28%	11,86 poin	
2.	**Meningkatnya investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**5,57**	**6,70**	**6,08**	**6,05**	**5,93**	**0,12 poin**	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat									
6.	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru	Nilai Investasi	Juta	1.635.360. Juta	2.236.753 Juta	2.848.790. Juta	6.678.898 Juta	4.713.191 Juta		1.965.707 Poin
7.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja	%	94,43	93,30	93,92	93,95	94,07	0,12 poin	
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	4,94	1,21	1,41	8,38	9%	0,62	
3.	**Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang**	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,306**	**0,331**	**0,316**	**0,296**	**0,275**	**0,021 poin**	
9.	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	32,19	25,00	27,85	28,79	42,40%	13,61	
10.	Mewujudkan konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,66	0,66	0,69	0,896	0,60%		0,296

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	%	46,60	49,04	37,21	37,81	82,27	44,46 poin	-
12.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan limbah Domestik	%	15,32	23,51	24,75	24,86	72,68%	47,82 poin	-
13.	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	96	96	99,16	88,53	23,77		64,76 poin
14.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20%	-	-
15.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6652	0,68208	0,72246	0,7417	0,7417*	-	-
16.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,50	72,20	74,47	76,09	80,22	4,13 poin	
4.	**Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana Alam dan Non Alam**	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**172,71**	**162,17**	**147,79**	**152,79**	**108,02**	**44,77 poin**	**-**
17.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	%	-	20	30,58	60	100	40 poin	
5.	**Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**69,13**	**69,74**	**70,18**	**70,61**	**73,03**	**2,42 poin**	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten Kotabaru sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional									
-	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang penddikan dasar	Indeks Pendidikan	Indeks	9,70	9,765	9,81	9,82	9,82*	-	-
19.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia	69,32	69,56	69,77	69,83	74,03	4,2 poin	
6.	**Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**Angka**	**4,86**	**4,30**	**4,32**	**4,45**	**4,39**	**0,06**	
20.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	-	73,68	70,45	91,66	91,75	0,09	
7.	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**CC (56,83)**	**CC (58,64)**	**CC (56,24)**	**B (67,31)**	**BB (76,22)**	**8,91 poin**	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI					REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B (61,26)	B (61,78)	B (64,80)	3,02 poin	
22.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.4
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah
(Sebelum Perubahan)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**	**5,63-5,91**	**5,34**	**94,84%**
1	Meningkatnya Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	PDRB sektor pertanian	%	10,04	10,66	106,17%
2	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	105.895,75	121.483,07 Ton	114,71%
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,00	75,34*	91,87%
4	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri	%	35,00	28,79	82,25%
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	%	6,62	18,28%	276,13%
2	**Meningkatnya investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**4,35**	**5,93**	**63,67%**
6	Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru	Nilai Investasi	Juta	1.603.158	4.713.191 Juta	293,99%
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja	%	95,65	94,07	98,34%
8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	100	9%	9%
3	**Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola**	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,268**	**0,275**	**97,38%**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
	pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang					
9	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	35,09	42,40%	120,83%
10	Mewujudkan konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	1	0,60%	60%
11	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	%	41,31	82,27	199,15%
12	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses pengolahan limbah Domestik	%	25,14	72,68%	289,10%
13	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	%	99,53	23,77	23,88%
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	%	97,20	97,20%	100%
15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6699	0,7417*	110,71%
16	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,86	80,22	118,21%
4	**Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana Alam dan Non Alam**	**Indeks Risiko Bencana**	**Indeks**	**152,99**	**108,02**	**129,39%**
17	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	%	100	100	100%
5	**Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru sehingga memiliki karakter mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**71,01-71,95** **(71,95)**	**73,03**	**101,5%**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
	yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional					
18.	Meningkatnya aksesibilitas sdan pemerataan pendidikan pada semua jenjang penddikan dasar	Indeks Pendidikan	Indeks	11,25	9,82*	87,28%
19.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia	70,70	74,03	104,7%
6	**Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**Angka**	**3,97**	**4,39**	**89,42%**
20	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan social	%	77,55	91,75	118,31%
7	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**B (70,00)**	**BB (76,22)**	**108,88%**
21	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	Nilai SAKIP	Nilai	BB	B (64,80)	92,43%
22	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.5
Faktor- Faktor Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Serta Tindak Lanjut Yang Dilakukan (Sebelum Perubahan)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan				
Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agrobisnis dan ekowisata	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)**	❖ Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan ❖ Peningkatan investasi daerah di Kabupaten Kotabaru yang mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat ❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Kabupaten Kotabaru menjadi daerah dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan ❖ Tersedianya kawasan industri di Kabupaten Kotabaru ❖ Tersedianya pelabuhan yang dapat digunakan sebagai hub logistik regional ❖ Adanya dukungan kebijakan dari level pemerintah pusat hingga kabupaten untuk mendorong peningkatan investasi	❖ Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun ❖ Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur ❖ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar ❖ Sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang kurang baik ❖ Adanya perizinan yang rumit dan berbelit-belit sehingga minat investasi rendah ❖ Adanya degradasi lingkungan akibat dampak pertambangan dan abrasi garis pantai ❖ Kredit usaha belum dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM	❖ Diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian ❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja ❖ Pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab terhadap lingkungan agar berkelanjutan ❖ Perbaikan kualitas berbagai infrastruktur daerah (jalan, listrik) ❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar memiliki kualifikasi minimal diploma/sarjana ❖ Peningkatan kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan ❖ Pembuatan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal ❖ Peningkatan percepatan layanan investasi dan penyederhanaan regulasi di daerah ❖ Pengembangan ekonomi biru dan sirkuler ekonomi ❖ Pendampingan intensif pada UMKM melalui pusat inkubasi bisnis daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah PulauLaut	❖ Digitalisasi produk UMKM daerah ❖ Percepatan pengembangan kawasan industri
Sasaran 1: Meningkatnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)	**PDRB Sektor Pertanian (%)**	❖ Kebutuhan manusia akan pangan di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah ❖ Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai bantuan dan subsidi input ❖ Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi pada sektor perikanan dan kehutanan ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki lahan yang luas dan subur untuk pengembangan sektor pertanian ❖ Tersedianya infrastuktur pertanian seperti irigasi sehingga lahan lebih produktif ❖ Adanya kemajuan teknologi di bidang pertanian ❖ Akses pasar yang terbuka dengan adanya pelabuhan dan kemitraan dengan industri pengolahan hasil pertanian	❖ Teknologi yang digunakan petani masih tradisional dan belum menerapkan smart agriculture untuk peningkatan produktivitas ❖ Akses pembiayaan permodalan petani belum optimal karena sifat usaha yang belum *bankable* ❖ Introduksi teknologi produksi pertanian yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha di bidang pertanian ❖ Pelaku usaha pertanian didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat ❖ Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi ❖ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik ❖ Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan ❖ Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (*middlemen*) ❖ Keterbatasan infrastruktur penyimpanan produk pertanian dan jalan usaha tani dalam kondisi kurang optimal	❖ Peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi pertanian yang maju ❖ Fasilitasi penyediaan benih dan bibit unggul bagi petani ❖ Pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah ❖ Pembangunan prasarana pertanian ❖ Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana pendukung akselerasi produk pertanian ❖ Pengawasan peredaran hewan dan produk asal hewan ❖ Penanggulangan hama dan wabah yang mengganggu tanaman pertanian maupun hewan ❖ Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan petani ❖ Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha bagi petani ❖ Pembentukan badan usaha milik petani yang menyalurkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen ❖ Regenerasi pelaku usaha pertanian untuk peningkatan produktivitas ❖ Penyusunan kebijakan daerah untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ❖ Fasilitasi penyediaan pembiayaan murah bagi petani melalui KUR

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Kurangnya insentif bagi petani kecil untuk pengembangan usaha	❖ Pemetaan lahan pertanian berbasis SIG untuk optimasi tanam
Sasaran 2: Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	**Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (Ton)**	❖ Kebutuhan manusia akan protein di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah ❖ Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui berbagai bantuan dan subsidi input ❖ Potensi sumber daya laut yang tinggi di WPPNRI 712 ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki lahan yang luas untuk pengembangan tambak ❖ Tersedianya infrastruktur pelabuhan perikanan ❖ Ketersediaan teknologi modern untuk pengembangan perikanan budidaya ❖ Terbukanya akses pemasaran produk perikanan dengan adanya pelabuhan dan kedekatan lokasi dengan IKN	❖ Teknologi yang digunakan pembudidaya ikan masih tradisional dan belum menerapkan *smart aquaculture* untuk peningkatan produktivitas ❖ Alat tangkap dan armada kapal yang digunakan nelayan masih tradisional ❖ Akses pembiayaan permodalan pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal karena sifat usaha yang belum *bankable* ❖ Introduksi teknologi produksi perikanan yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha ❖ Pelaku usaha perikanan didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat ❖ Perubahan iklim membuat pola produksi pembudidaya ikan mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi ❖ Alih fungsi lahan pesisir menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik ❖ Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan ❖ Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (*middlemen*)	❖ Peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi budidaya perikanan yang maju ❖ Fasilitasi penyediaan benih unggul bagi pembudidaya ikan ❖ Pembangunan infrastruktur perikanan yang merata ❖ Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana pendukung akselerasi produk perikanan ❖ Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan ❖ Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan ❖ Pembentukan badan usaha milik nelayan dan pembudidaya ikan yang menyalurkan produk perikanan secara langsung kepada konsumen ❖ Modernisasi alat tangkap modern dan ramah lingkungan ❖ Perluasan tambak pada lahan yang produktif dan sesuai untuk budidaya ikan ❖ Penanaman mangrove dan terumbu karang untuk merehabilitasi ekosistem ❖ Peningkatan nilai tambah produk perikanan dengan pembangunan UPI modern dan *cold chain system* yang terintegrasi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Adanya kerusakan terumbu karang dan penurunan luas mangrove yang mengancam habitat ikan	❖ Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan
Sasaran 3: Meningkatnya ketahanan pangan	**Indeks Ketahanan Pangan**	❖ Kabupaten Kotabaru menjadi produsen pangan yang besar didukung ketersediaan lahan pertanian yang luas ❖ Kebutuhan manusia akan pangan di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah ❖ Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk memeratakan distribusi pangan bagi seluruh rakyat ❖ Adanya fasilitas pelabuhan yang mendukung kelancaran distribusi pangan ❖ Ketersediaan teknologi yang mendukung informasi mengenai pasar dan stabilitas harga pangan ❖ Daya beli masyarakat yang tinggi sehingga memiliki kemudahan akses terhadap sumber pangan ❖ Peningkatan teknologi yang mendorong tingginya kualiitas dan keamanan pangan	❖ Teknologi yang digunakan petani masih tradisional dan belum menerapkan smart agriculture untuk peningkatan produktivitas ❖ Stok atau cadangan pangan daerah belum terpetakan dengan baik ❖ Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi ❖ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik ❖ Distribusi pangan masih terkendala kondisi infrastruktur daerah yang belum optimal ❖ Manajemen stok pangan belum dikelola dengan baik ❖ Pola dan keanekaragaman konsumsi masyarakat belum optimal	❖ Peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi pertanian yang maju ❖ Fasilitasi penyediaan benih dan bibit unggul bagi petani ❖ Pembangunan prasarana pertanian ❖ Rehabilitasi pemeliharaan sarana prasarana pendukung akselerasi produk pertanian ❖ Pengawasan peredaran hewan dan produk asal hewan ❖ Penanggulangan hama dan wabah yang mengganggu tanaman pertanian maupun hewan ❖ Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ❖ Peningkatan kapasitas kelembagaan petani ❖ Peningkatan kelancaran distribusi pangan ❖ Pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan ❖ Perbaikan manajemen stok/cadangan pangan daerah ❖ Perbaikan pola dan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
Sasaran 4: Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal	**Distribusi PDRB (ADHB) sektor industri pengolahan (%)**	❖ Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi di sektor industri pengolahan melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien	❖ Sektor industri di Kabupaten Kotabaru didominasi industri pertambangan yang menjadi penopang utama PDRB ❖ Kualitas SDM pelaku industri kecil belum memadai ❖ Manajemen pengelolaan usaha belum berjalan efektif dan efisien	❖ Diversifikasi ekonomi Kabupaten Kotabaru berbasis industri pengolahan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk pertumbuhan ekonomi berkelenjuatan ❖ Pengembangan industri kecil berbasis potensi masing-masing kawasan kluster

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi di sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, dan perikanan ❖ Tersedianya kawasan industri yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah ❖ Dukungan kebijakan investasi oleh pemerintah berkaitan dengan perizinan ❖ Tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan listrik ❖ Adanya akses permodalan dengan bunga rendah dari pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat ❖ Tersedianya akses pasar regional ke kota-kota di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa ❖ Adanya inisiatif hilirisasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai tambah produk	❖ Akses permodalan pelaku industri kecil belum memadai ❖ Penerapan teknologi pengolahan yang terkini belum sepenuhnya dijalankan sehingga kualitas produk belum baik ❖ Sentra kawasan industri kecil belum direncanakan dengan baik sehingga belum tertata ❖ Belum terintegrasinya pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal ❖ Kualitas produk yang dihasilkan industri kecil belum mampu menembus pasar luar daerah ❖ Terbatasnya akses pemasaran produk industri kecil ❖ Keterbatasan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi rusak dan kebutuhan air industri yang tinggi ❖ Adanya kondisi ekonomi nasional dan global yang kurang baik dapat mengurangi permintaan dan menurunkan output industri	❖ Fasilitasi peningkatan mutu produk industri kecil daerah ❖ Fasilitasi pemasaran produk industri kecil daerah ❖ Penyediaan informasi yang mencakup data industri daerah berbasis sektoral ❖ Fasilitasi pembinaan pengelolaan usaha pelaku industri kecil ❖ Pemetaan produk unggulan industri daerah yang layak dipromosikan ke luar daerah ❖ Penyediaan lahan untuk kawasan industri ❖ Dorongan hilirisasi produk unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan ❖ Perbaikan kualitas infrastruktur daerah seperti pembangunan jalan dan penyediaan air ❖ Penguatan SDM bidang perindustrian dengan pelatihan vokasional ❖ Pemberian insentif seperti pembebasan PBB bagi industri ❖ Peningatan promosi dan koordinasi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kotabaru
Sasaran 5: Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	**Persentase Kontribusi PAD sektor Pariwisata (%)**	❖ Kabupaten Kotabaru memiliki destinasi wisata alam unggulan seperti pantai, pegunungan, dan pulau-kecil ❖ Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan festival tahunan yang ramai menjadi magnet wisatawan	❖ Akses menuju destinasi belum memadai dengan kondisi jalan yang rusak ❖ Adanya isu lingkungan berupa sampah di pantai yang mengurangi estetika wisata air ❖ Banyak terjadi alih fungsi lahan pantai untuk permukiman	❖ Pengembangan wisata air terintegrasi melalui pembangunan fasilitas modern ❖ Pengembangkan paket wisata "*Kotabaru Beach Expedition*" dengan kapal wisata unik ❖ Digitalisasi ekosistem pariwisata dengan meluncurkan platform "*Kotabaru Tourism Hub*" (aplikasi + website)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan daya tarik destinasi wisata prioritas ❖ Aksesibilitas yang meningkat dengan adanya rencana pengembangan bandara ❖ Berkembangnya digitalisasi promosi pariwisata dengan kolaborasi dengan *influencer* lokal dan internasional ❖ Kabupaten Kotabaru menjadi andalan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ❖ Ketersediaan produk kreatif berbasis kearifan lokal seperti kain sasirangan dan kuliner berbasis produk ikan ❖ Adanya dukungan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata lokal ❖ Adanya kolaborasi stakeholder melalui kemitraan dengan pelaku usaha (hotel, biro perjalanan) maupun dukungan komunitas wisata lokal ❖ Adanya pembangunan hotel-hotel baru di Kabupaten Kotabaru	❖ Adanya persaingan dengan destinasi domestik lainnya di Provnsi Kalimantan Selatan ❖ Kualitas akomodasi di Kabupaten Kotabaru belum merata ❖ Adanya kerusakan lingkungan karena berbagai aktivitas industri, permukiman ❖ Sistem pemungutan retribusi belum sepenuhnya online dan masih ada yang manual	❖ Implementasi *cashless payment* di seluruh objek wisata utama yang dikelola pemerintah daerah ❖ Pembentukan pusat pelatihan pariwisata berbasis kompetensi ❖ Pengembangan kalender wisata musiman (*seasonal tourism calendar*) ❖ Pengemasan ulang festival tradisional dengan konsep kontemporer ❖ *Green tourism initiative* dengan *Program "Plastic Free Beach Tourism"* dengan insentif bisnis ❖ *Strategic marketing* dengan Kampanye "*The Hidden Paradise of Borneo"* ❖ Kolaborasi dengan OTA (*Online Travel Agent*) nasional ❖ Pelatihan digital marketing untuk UMKM pariwisata *joint promotion* dengan kabupaten/kota sekitar ❖ Pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata unggulan daerah ❖ Peningkatan SDM pariwisata dengan pelaksanaan sertifikasi massal ❖ Fasilitasi pembangunan akomodasi penunjang pariwisata ❖ Pengembangan sistem pembayaran retribusi secara digital dan terintegrasi
Tujuan 2: Meningkatnya investasi, usaha kecil menengah	**Tingkat pengangguran Terbuka (%)**	❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk	❖ Banyak penduduk perempuan yang memilih keluar dari pasar tenaga kerja untuk menjadi ibu rumah tangga	❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar pekerjaan di sektor formal meningkat

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
dan koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat		❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Peningkatan investasi daerah akan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Adanya keberpihakan dari pemerintah kabupaten melalui program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat lokal ❖ Adanya program pembangunan daerah yang mengarah pada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja	❖ Kapasitas sumber daya yang ada pada saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kualifikasi pasar tenaga kerja ❖ Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur ❖ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar ❖ Ketersediaan lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi rendah ❖ Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh wilayah ❖ Para calon tenaga kerja yang dibina kurang memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal ❖ Adanya perubahan iklim yang mengancam lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan perikanan	❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan kompetensi ❖ Pembuatan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal ❖ Penumbuhan minat wirausaha bagi calon tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi pencari kerja ❖ Penyediaan bursa tenaga kerja tingkat kabupaten ❖ Pembangunan pusat ketenagakerjaan terpadu ❖ Pengembangan industri padat karya yang meyerap teaga kerja ❖ Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda melalui program inkubasi ❖ Penyediaan layanan hubungan industrial
Sasaran 6: Meningkatnya kuantitas dan besaran investasi di Kabupaten Kotabaru	**Nilai Investasi (Rp)**	❖ Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien ❖ Stabilitas yang tinggi terkait dengan keamanan di Kabupaten Kotabaru ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan dan perikanan	❖ Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi ❖ Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanan secara online masih mengalami kendala ❖ Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas	❖ Pembuatan peta potensi investasi daerah ❖ Penambahan SDM yang mumpuni dalam fasilitasi pelayanan perizinan ❖ Penyusunan strategi promosi penanaman modal ❖ Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		❖ Layanan investasi sudah berbasis online		❖ Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ❖ Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian kemudahan dan insentif daerah
Sasaran 7: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	**Angka Kesempatan kerja (%)**	❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk ❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Peningkatan investasi daerah akan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Adanya keberpihakan dari pemerintah kabupaten melalui program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat lokal ❖ Adanya program pembangunan daerah yang mengarah pada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja	❖ Banyak penduduk perempuan yang memilih keluar dari pasar tenaga kerja untuk menjadi ibu rumah tangga ❖ Kapasitas sumber daya yang ada pada saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kualifikasi pasar tenaga kerja ❖ Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur ❖ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar ❖ Ketersediaan lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi rendah ❖ Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh wilayah ❖ Para calon tenaga kerja yang dibina kurang memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal ❖ Adanya perubahan iklim yang mengancam lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan perikanan	❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar pekerjaan di sektor formal meningkat ❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan kompetensi ❖ Pembuatan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal ❖ Penumbuhan minat wirausaha bagi calon tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi pencari kerja ❖ Penyediaan bursa tenaga kerja tingkat kabupaten ❖ Pembangunan pusat ketenagakerjaan terpadu ❖ Pengembangan industri padat karya yang meyerap teaga kerja ❖ Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda melalui program inkubasi ❖ Penyediaan layanan hubungan industrial

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Sasaran 8: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil	**Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (%)**	❖ Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kewirausahaan, seperti pelatihan, akses pembiayaan, dan insentif pajak ❖ Kemajuan teknologi mempermudah wirausahawan untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti melalui *e-commerce* ❖ Adanya kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi atau komunitas bisnis dapat memberikan peluang baru usaha ❖ Adanya program pelatihan kewirausahaan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausahawan ❖ Tingginya permintaan terhadap produk atau jasa tertentu mendorong pertumbuhan usaha	❖ Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan menjadi hambatan utama bagi banyak wirausahawan ❖ Minimnya pengalaman dalam manajemen bisnis dapat menghambat perkembangan usaha ❖ Kompetisi yang tinggi di pasar sering kali menjadi tantangan besar ❖ Proses perizinan dan regulasi yang kompleks dapat menghambat operasional usaha ❖ Kurangnya akses terhadap fasilitas seperti transportasi atau teknologi dapat menghambat efisiensi usaha	❖ Peningkatan Akses Pembiayaan dengan memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk mendukung wirausahawan baru ❖ Penyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup pengembangan *soft skills* dan *hard skills* ❖ Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional bisnis ❖ Kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan komunitas bisnis untuk mendukung wirausaha ❖ Promosi produk lokal dan kampanye untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ❖ Simplifikasi regulasi dengan menyederhanakan proses perizinan usaha untuk mempermudah wirausahawan baru ❖ Pendampingan intensif bagi wirausahawan pemula untuk membantu mereka mengatasi tantangan awal ❖ Peningkatan Infrastruktur dengan memperbaiki akses transportasi, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya ❖ Pemberian edukasi tentang manajemen keuangan agar wirausahawan dapat mengelola modal dengan lebih baik ❖ Penguatan jaringan dengan membantu wirausahawan membangun jaringan bisnis yang kuat untuk memperluas peluang pasar

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Tujuan 3: Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang	**Indeks Gini**	❖ Peningkatan investasi daerah akan mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat ❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatan PDRB per kapita ❖ Adanya kebijakan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ❖ Adanya kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha (ekonomi)	❖ Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan ❖ Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun ❖ Adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan modal	❖ Diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian ❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja ❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar memiliki kualifikasi minimal sarjana ❖ Penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ❖ Pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha ❖ Peningkatan kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan
Sasaran 9: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)**	❖ Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas masyarakat ❖ Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat melaporkan kondisi jalan yang rusak ❖ Ketersediaan teknologi untuk pembangunan jalan di wilayah yang sulit	❖ Wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan yang terluas di Provinsi Kalimantan Selatan ❖ Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal ❖ Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten ❖ Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat dikerjakan	❖ Perbaikan manajemen pengelolaan administrasi proyek sehingga sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan baik dan kualitasnya optimal ❖ Peningkatan kualitas jalan sesuai standar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan daerah ❖ Penambahan jalan baru pada wilayah prioritas yang menghubungkan pusat produksi dan wilayah pemasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Kendaraan yang melewati jalan banyak yang melebih kapasitas kemampuan jalan (ODOL) ❖ Pembangunan utilitas sering merusak kondisi jalan ❖ Ketergantungan pasokan material untuk pembangunan jalan dari luar daerah	❖ Penindakan tegas dengan denda tinggi pada truk yang melebihi batas beban kemampuan jalan (ODOL) ❖ Pemetaan digital kondisi jalan berbasis SIG sesuai prioritas berdasarkan dampak ekonomi ❖ Penguatan road maintenance management system dan mekanisme respon cepat untuk perbaikan ❖ Peningkatan partisipasi dengan aplikasi pelaporan kerusakan jalan secara real-time ❖ Pemetaan ruas jalan kewenangan kabupaten berdasarkan kondisi kerusakan jalan
Sasaran 10: Mewujudkan Konektivitas Kabupaten	**Rasio Konektivitas Kabupaten (%)**	❖ Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat ❖ Tersedianya pelabuhan angkutan laut, udara, dan darat di Kabupaten Kotabaru ❖ Posisi strategis Kabupaten Kotabaru di wilayah ALKI II ❖ Adanya investasi dari pihak swasta yang juga turut membangun jalan ❖ Adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk penyelesaian jembatan penghubunga Pulaulaut dan Pulau Kalimantan	❖ Wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan yang terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pulau-pulau kecil ❖ Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal sehingga masih banyak jalan dalam kondisi rusak ❖ Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten ❖ Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat dikerjakan ❖ Pembangunan utilitas sering merusak kondisi jalan ❖ Ketergantungan pasokan material untuk pembangunan jalan dari luar daerah	❖ Perbaikan manajemen pengelolaan administrasi proyek sehingga sehingga proses konstruksi dapat berjalan dengan baik dan kualitasnya optimal ❖ Peningkatan kualitas jalan sesuai standar yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan daerah ❖ Penambahan jalan baru pada wilayah prioritas yang menghubungkan pusat produksi dan wilayah pemasaran ❖ Pemetaan digital kondisi jalan berbasis SIG sesuai prioritas berdasarkan dampak ekonomi ❖ Penguatan road maintenance management system dan mekanisme respon cepat untuk perbaikan ❖ Peningkatan partisipasi dengan aplikasi pelaporan kerusakan jalan secara real-time

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Sebagian besar infrastruktur yang baik hanya berada di wilayah perkotaan	❖ Pemetaan ruas jalan kewenangan kabupaten berdasarkan kondisi kerusakan jalan ❖ Pengembangan konektivitas jaringan transportasi darat dan laut ❖ Pembangunan dermaga penyeberangan dan pembukaan rute kapal ferry penyeberangan ❖ Optimalisasi anggaran dengan skema KPBU untuk proyek strategis daerah
Sasaran 11: Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (%)**	❖ Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur penyedia air bersih dan minum ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki sungai yang dapat menjadi sumber air baku bagi masyarakat ❖ Peningkatan kebutuhan rumah tangga yang signifikan akan air bersih dan minum ❖ Adanya dukungan penyediaan air minum dari perusahaan daerah	❖ Kondisi cuaca kemarau mengakibatkan kapasitas air baku mengalami penurunan yang signifikan ❖ Kapasitas embung yang menjadi penampung tidak bertambah signifikan dibanding dengan peningkatan masyarakat	❖ Normalisasi embung yang menjadi penopang persediaan air baku ❖ Pembangunan embung baru untuk peningkatan kapasitas air baku ❖ Perbaikan menajemen sumber daya air baik oleh pemerintah maupun PDAM ❖ Pembangunan intake air baku melalaui jaringan perpipaan untuk perluasan pelaynan distribusi air minum
Sasaran 12: Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik (%)**	❖ Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pengolahan limbajh ❖ Adanya fasilitas IPAL untuk pengolahan limbah ❖ Adanya kemajuan teknologi dalam pengolahan limbah	❖ Kondisi geografis yang sulit dimana pada lahan rawa akan sulit dibangun *septic tank* ❖ Banyak septic tank yang tidak memenuhi standar kualitas ❖ Masih banyak warga yang belum paham pentingnya IPAL ❖ Masih adanya budaya membuang limbah langsung ke sungai ❖ Lemahnya penegakan aturan terkait pembuangan limbah	❖ Pembangunan IPAL komunal baru dan sistem jaringan perpipaan di kawasan padat penduduk ❖ Pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat dengan penyediaan septic tank bioseptic murah ❖ Penegakan regulasi dengan persyaratan wajib IPAL untuk perumahan baru yang dibangun dan sanksi tegas bagi pembuang limbah sembarangan ❖ Penerapan teknologi adaptif dengan IPAL floating untuk wilayah rawa

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
				❖ Pendanaan melalui BLUD untuk pengelolaan IPAL ❖ Kolaborasi multi pihak melalui CSR untuk fokus pada sanitasi masyarakat
Sasaran 13: Meningkatnya kualitas perumahan	**Persentase peningkatan rumah layak Huni (%)**	❖ Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ❖ Adanya sinkronisasi penanganan dengan beberapa sumber dana yang berbeda dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni ❖ Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu memberikan solusi dan inovasi	❖ Pendataan rumah layak huni belum berjalan optimal sehingga target persentase rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum tercapai ❖ Prasarana dasar permukiman bersih, jalan lingkungan, dan sanitasi belum memadai untuk terwujudnya lingkungan permukiman dan perumahan sehat ❖ Pemahaman masyarakat akan kondisi rumah yang baik sesuai standar masih rendah ❖ Rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni yang terhambat karena kepemilikan lahan, tidak diperbolehkan untuk direhab oleh pemilik tanah serta kerusakan dan luas rumah yang bervariatif	❖ Pendataan status layak huni rumah masyarakat ❖ Penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh ❖ Peningkatan penyadaran publik tentang pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh ❖ Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat prioritas ❖ Memprioritaskan rehab rumah dengan alas hak legal dan tidak bermasalah secara administrasi ❖ Rehabilitasi rumah tidak layak huni hanya komponen utama misal struktur, dinding tanpa plester dan aci, lantai tanpa keramik, serta galvalum untuk menekan biaya
Sasaran 14: Meningkatnya kualitas penataan ruang	**Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)**	❖ Ketersediaan regulasi di Kabupaten Kotabaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah ❖ Ketersediaan sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang, dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi	❖ Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi implementasi rencana penataan ruang belum optimal ❖ Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengendalian penataan ruang ❖ Proses penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang daerah belum berjalan optimal dan koordinasi antar lembaga masih kurang	❖ Koordinasi dan sinkronisasi intensif dalam penyusunan perubahan RTRW dan RDTR ❖ Percepatan penyusunan dokumen turunan dari Perda RTRW dan Perbup RDTR meliputi petunjuk pelaksanaan dan teknis ❖ Koordinasi dan sinkronisasi intensif tentang pengendalian pemanfaatan ruang daerah ❖ Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang melalui berbagai platform pelayanan publik

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		❖ Ketersediaan forum penataan ruang daerah yang terkait dengan kebijakan lintas perangkat daerah ❖ Ketersediaan sumber daya pengawas penataan ruang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten	❖ Sosialisasi tata ruang di daerah belum inovatif ❖ Belum adanya penentuan target dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang ❖ Belum tersedianya Tematik untuk pelaksanaan audit tata ruang ❖ Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan dan teknis peraturan terbaru	❖ Optimalisasi dan perbaikan sistem informasi penataan ruang daerah ❖ Evaluasi pemanfaatan ruang (pengkajian kesesuaian eksisting dengan peraturannya) dilakukan dengan cara menambah jumlah titik pengamatan yang diawasi dan disesuaikan dengan aturan baru yang berlaku ❖ Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan tata ruang Kabupaten Kotabaruyang dilakukan dengan diseminasi dan dilakukan secara interaktif melalui berbagai plaatform
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas pembangunan desa	**Indeks desa membangun**	❖ Tersedianya anggaran pembangunan desa melalui alokasi dana desa setiap tahun dari pemerintah ❖ Setiap desa memiliki produk unggulan berbasis lokal yang menyerap banyak tenaga kerja ❖ Banyak desa yang telah teraliri listrik, memiliki jalan beraspal, dan terkoneksi internet ❖ Adanya partisipasi aktif masyarakat desa dalam program pembangunan desa ❖ Dukungan multistakeholder dari CSR perusahaan dan perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat desa	❖ Masih terdapat desa yang sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang rusak ❖ SDM desa sebagian besar berkualifikasi pendidikan rendah ❖ Banyak tenaga kerja produktif berpindah ke kota ❖ Kualitas pemerintahan desa belum baik karena aparatur berkualifikasi pendidikan menengah ❖ Banyak terjadi pelaporan keuangan desa yang tidak transparan dan akuntabel ❖ Pembangunan di desa sebagian besar berupa proyek infrastruktur yang mudah menyerap anggaran	❖ Pengembangan kerja sama antar desa untuk pemasaran produk unggulan ❖ Optimalisasi BUMDesa sebagai penghasil pendapatan yang berkelanjutan bagi desa ❖ Sekolah kepemimpinan desa bagi aparatur pemerintahan desa mencakup perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, dan pelaporan pembangunan ❖ Perbaikan digitalisasi adminitrasi desa dan sistem akuntansi desa berbasis cloud ❖ Penyediaan tenaga pendamping desa untuk percepatan pembangunan desa ❖ Peningkatan kerja sama dengan perusahaan dan perguruan tinggi untuk pembangunan desa secara berkelanjutan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Sasaran 16: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks kualitas lingkungan Hidup**	❖ Adanya Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ❖ Alokasi APBD untuk program rehabilitasi sungai, pantai, penghijauan, dan pengelolaan sampah ❖ Adanya potensi restorasi ekosistem sungai sebagai penyerap karbon alami dan pengendali banjir ❖ Adanya dukungan dari pemerintah pusat seperti program seperti ProKlim (Program Kampung Iklim) dan CityNet untuk pembangunan berkelanjutan ❖ Tersedianya teknologi pengelolaan lingkungan dengan pemanfaatan sensor kualitas air, drone pemantau deforestasi, dan sistem *early warning* banjir ❖ Adanya partisipasi masyarakat dalam gerakan menjaga lingkungan seperti komunitas lokal seperti "Peduli Sungai" dan bank sampah aktif ❖ Adanya kolaborasi riset dengan perguruan tinggi tentang ekologi gambut, mangrove, dan mitigasi banjir ❖ Adanya pembangunan taman kota, jalur hijau, dan biopori di permukiman ❖ Perusahaan mulai menerapkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasionalnya	❖ Adanya tekanan perubahan iklim seperti curah hujan ekstrem, kenaikan muka air laut, dan penurunan tanah (*land subsidence*) ❖ Adanya pencemaran air sungai seperti limbah domestik, sampah plastik, dan aktivitas tambang ❖ Adanya konversi lahan basah untuk permukiman yang mengurangi daya dukung lingkungan ❖ Ketidakcukupan dana untuk teknologi pengolahan limbah dan rehabilitasi sungai dan pantai ❖ Adanya polusi udara dari transportasi dan industri seperti emisi kendaraan bermotor dan pembakaran sampah ilegal ❖ Adanya pelanggaran AMDAL oleh proyek pembangunan dan industri ❖ Adanya kebiasaan buang sampah ke sungai dan pantai dan penggunaan plastik sekali pakai ❖ Minimnya sistem pemantauan kualitas lingkungan real-time karena keterbatasan data dan pemantauan ❖ Kerusakan permanen lahan karena aktivitas pertambangan yang tidak menerapkan kaidah keberlanjutan	❖ Pelaksanaan program restorasi ekosistem sungai dan pantai terpadu dengan metode *bio-engineering* ❖ Pembangunan floating *wetland* dan penanaman vegetasi riparian asli (purun, bakau) ❖ Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis *Circular Economy* dengan pembangunan *Material Recovery Facility* (MRF) kapasitas tinggi ❖ Implementasi *waste bank* digital dengan insentif poin *redeemable* ❖ Penerapan *smart environmental monitoring system* dengan jaringan sensor kualitas air dan udara real-time di 50 titik strategis ❖ Integrasi data lingkungan dalam *Kotabaru Environmental Dashboard* ❖ Revitalisasi sistem drainase berbasis alam dengan pembangunan biopori dan sumur resapan di zona rawan banjir ❖ Penguatan regulasi dan penegakan hukum melalui revisi Perda dengan sanksi progresif untuk pencemar lingkungan ❖ Peningkatan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya kurikulum lingkungan hidup di semua tingkat sekolah ❖ Pelatihan *green entrepreneurship* berbasis sampah untuk warga

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
				❖ Pengembangan ekonomi biru (blue *economy*) melalui ekowisata sungai dan pantai dengan konsep *zero waste tourism* ❖ Pembentukan Forum Multi-Pihak (pemerintah-swasta-akademisi-LSM) ❖ Peningakatan *public-private-community co-funding* untuk proyek lingkungan
Tujuan 4: Meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam	**Indeks resiko bencana**	❖ Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi risiko bencana, seperti partisipasi aktif dalam program kebencanaan ❖ Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengurangan risiko bencana, seperti program edukasi dan pelatihan ❖ Adanya pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan bencana dan sistem peringatan dini ❖ Sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam penanganan bencana ❖ Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program mitigasi risiko bencana ❖ Tersedianya fasilitas seperti posko bencana dan alat berat untuk evakuasi ❖ Adanya keterlibatan komunitas lokal dalam pengawasan dan pelaporan risiko bencana dan kejadian bencana ❖ Adanya kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana ❖ Adanya regulasi yang mendukung pengurangan risiko bencana, seperti	❖ Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya mitigasi risiko bencana ❖ Resistensi masyarakat seperti penolakan terhadap program mitigasi, seperti relokasi dari daerah rawan bencana ❖ Pergantian kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat pelaksanaan program ❖ Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mempersulit masyarakat untuk berpartisipasi dalam program mitigasi bencana ❖ Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini ❖ Kurangnya edukasi sehingga informasi tentang risiko bencana tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat	❖ Peningkatan edukasi masyarakat dengan mengadakan program edukasi dan simulasi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat ❖ Penguatan Sistem Peringatan Dini dengan memasang lebih banyak alat peringatan dini di daerah rawan bencana, seperti banjir, untuk memberikan waktu respons yang lebih cepat ❖ Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti tanggul, drainase, dan posko bencana untuk mengurangi dampak bencana ❖ Optimalisasi teknologi dengan mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan dan pemantauan risiko bencana secara real-time ❖ Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan intensif kepada personel BPBD dan relawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani bencana ❖ Penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		larangan pembangunan di daerah rawan banjir		untuk memastikan respons yang cepat dan efektif ❖ Peningkatan anggaran yang memadai untuk mendukung program mitigasi dan penanganan risiko bencana ❖ Relokasi masyarakat dari daerah rawan bencana ke lokasi yang lebih aman dengan pendekatan persuasif ❖ Pelaksanaan kampanye kreatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana ❖ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program mitigasi untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan
Sasaran 17: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana	**Persentase kelompok masyarakat sadar bencana (%)**	❖ Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi risiko bencana, seperti partisipasi aktif dalam program kebencanaan ❖ Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengurangan risiko bencana, seperti program edukasi dan pelatihan ❖ Adanya pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan bencana dan sistem peringatan dini ❖ Sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam penanganan bencana ❖ Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program mitigasi risiko bencana ❖ Tersedianya fasilitas seperti posko bencana dan alat berat untuk evakuasi	❖ Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya mitigasi risiko bencana ❖ Resistensi masyarakat seperti penolakan terhadap program mitigasi, seperti relokasi dari daerah rawan bencana ❖ Pergantian kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat pelaksanaan program ❖ Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mempersulit masyarakat untuk berpartisipasi dalam program mitigasi bencana ❖ Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini ❖ Kurangnya edukasi sehingga informasi tentang risiko bencana tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat	❖ Peningkatan edukasi masyarakat dengan mengadakan program edukasi dan simulasi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat ❖ Penguatan Sistem Peringatan Dini dengan memasang lebih banyak alat peringatan dini di daerah rawan bencana, seperti banjir, untuk memberikan waktu respons yang lebih cepat ❖ Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti tanggul, drainase, dan posko bencana untuk mengurangi dampak bencana ❖ Optimalisasi teknologi dengan mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan dan pemantauan risiko bencana secara real-time

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		❖ Adanya keterlibatan komunitas lokal dalam pengawasan dan pelaporan risiko bencana dan kejadian bencana ❖ Adanya kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana ❖ Adanya regulasi yang mendukung pengurangan risiko bencana, seperti larangan pembangunan di daerah rawan banjir		❖ Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan intensif kepada personel BPBD dan relawan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani bencana ❖ Penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif ❖ Peningkatan anggaran yang memadai untuk mendukung program mitigasi dan penanganan risiko bencana ❖ Relokasi masyarakat dari daerah rawan bencana ke lokasi yang lebih aman dengan pendekatan persuasif ❖ Pelaksanaan kampanye kreatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana ❖ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program mitigasi untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan
Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Di Kabupaten Kotabaru Sehingga Memiliki Karakter Mental, Spiritual Dan Fisik Agar	**Indeks Pembangunan Manusia**	❖ Kenaikan ini didorong oleh membaiknya standar hidup layak yang dipengaruhi oleh sektor komoditas unggulan di Kotabaru ❖ Adanya perbaikan pada akses pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan kesehatan (Usia Harapan Hidup) yang mulai terakumulasi hasilnya pada angka IPM di tahun-tahun terakhir.	❖ Luasnya wilayah yang terfragmentasi oleh laut membuat distribusi tenaga pengajar dan medis tidak merata, sehingga menghambat capaian pendidikan dan kesehatan di pelosok. ❖ Terdapat jarak (*gap*) yang cukup lebar antara Kotabaru (73,03) dengan rata-rata Nasional (75,9) di tahun 2025, menunjukkan bahwa kecepatan akselerasi masih perlu ditingkatkan.	❖ Memperkuat jaringan internet di pulau-pulau terpencil agar akses modul pendidikan setara dengan di pusat kota. ❖ Mengoptimalkan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir/kepulauan secara rutin. ❖ Mengembangkan industri pengolahan hasil laut dan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang stabil.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Mampu Berperan Dan Mempunyai Daya Saing Yang Tinggi Di Segala Bidang, Baik Di Tataran Provinsi Kalimantan Selatan Maupun Nasional				❖ Pembangunan jembatan atau dermaga yang lebih modern untuk menurunkan biaya logistik dan mempermudah akses ke fasilitas pelayanan publik
Sasaran 18: Meningkatnya Aksesbilitas dan Pemerataan Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan Dasar	**Indeks Pendidikan**	❖ Relevansi pembelajaran dengan isu lokal meningkatkan minat siswa. ❖ Digitalisasi materi ajar mempermudah akses referensi bagi guru. ❖ Standarisasi evaluasi hasil belajar berbasis teknologi. ❖ Peningkatan daya tarik dan kenyamanan lingkungan belajar. ❖ Kesiapan mental dan teknis pendidik dalam menghadapi ujian/asesmen. ❖ Pemetaan kemampuan siswa lebih awal sebelum ujian nasional/utama.	❖	❖
Sasasran 19: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Usia Harapan Hidup (UHH)**	❖ Perluasan jangkauan Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Posyandu) di wilayah kepulauan dan pedalaman Kotabaru ❖ Penurunan angka stunting secara konsisten berkontribusi langsung pada kualitas kesehatan balita yang menjadi fondasi angka harapan hidup. ❖ Peningkatan jumlah penduduk yang ter-cover BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi ragu berobat karena kendala biaya.	❖ Karakteristik wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau (kepulauan) menyulitkan distribusi tenaga medis spesialis dan kecepatan penanganan darurat (emergency response). ❖ Masih terbatasnya jumlah dokter spesialis di RSUD daerah dibandingkan dengan rasio populasi, yang seringkali memaksa pasien dirujuk ke luar daerah. ❖ Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan	❖ Memberikan skema tunjangan khusus atau beasiswa ikatan dinas bagi dokter spesialis agar bersedia menetap dan bertugas di Kotabaru. ❖ Optimalisasi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk memantau riwayat kesehatan penduduk secara real-time (sinkronisasi dengan SatuSehat). ❖ Edukasi berbasis komunitas yang fokus pada kearifan lokal untuk mengubah pola hidup sehat dan pencegahan penyakit degeneratif.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Peningkatan akses terhadap air minum layak dan sanitasi lingkungan yang menekan angka penyakit menular (seperti diare dan ISPA). ❖ Hubungan positif antara daya beli masyarakat dengan kemampuan pemenuhan gizi keluarga di Kabupaten Kotabaru.	diabetes yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat lokal. ❖ Belum meratanya kualitas fasilitas kesehatan antara wilayah pusat kota dengan wilayah kecamatan terluar/terjauh. ❖ Pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini (early detection) dan pemeriksaan kesehatan rutin yang masih perlu ditingkatkan.	
Tujuan 6: Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan	**Angka Kemiskinan**	❖ Sektor pertambangan dan perkebunan besar menyediakan lapangan kerja formal yang stabil bagi sebagian besar penduduk usia produktif. ❖ Sebagai wilayah kepulauan, akses masyarakat terhadap pangan protein (ikan) relatif mudah dan murah, yang menjaga garis kemiskinan dari sisi pengeluaran makanan. ❖ Efektivitas penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa) yang tepat waktu mampu menahan masyarakat di garis bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem.	❖ Warga miskin di pulau-pulau terpencil memiliki biaya transaksi yang besar untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga sisa pendapatan untuk tabungan menjadi nihil. ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki tantangan logistik yang membuat intervensi program kemiskinan menjadi lebih mahal dan lambat sampai ke sasaran	❖ Melakukan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan bantuan modal usaha hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif. ❖ Memprioritaskan pembangunan dermaga rakyat dan jalan lingkungan di kantong-kantong kemiskinan untuk memangkas biaya logistik rumah tangga. ❖ Memetakan perusahaan besar di sekitar wilayah kantong kemiskinan dan mewajibkan mereka melakukan intervensi khusus (misal: bedah rumah, sanitasi, dan pemberian alat kerja) di desa-desa dengan angka kemiskinan tertinggi di wilayah operasionalnya. ❖
Sasaran 20: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	**Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)**	❖ Dukungan komitmen pembiayaan baik dari APBD Kabupaten Kotabaru maupun sinergi bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemensos) dan Provinsi.	❖ Luasnya wilayah yang terdiri dari kepulauan menyulitkan verifikasi faktual dan pendistribusian bantuan secara fisik ke wilayah terpencil.	❖ Melakukan penyisiran aktif ke wilayah kepulauan dan pesisir untuk memastikan PPKS kategori rentan (lansia tunggal, disabilitas berat) mendapatkan akses

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
	yang memperoleh bantuan social	❖ Kerja sama yang kuat antara Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil dalam percepatan kepemilikan NIK bagi PPKS, karena NIK adalah syarat mutlak menerima bantuan.		bantuan tanpa harus melapor ke kantor dinas ❖ Mengaktifkan atau memperkuat peran Puskesos di tingkat desa sebagai garda terdepan penanganan keluhan dan pemutakhiran data kemiskinan. ❖ Mendorong sektor swasta (perusahaan tambang/perkebunan di Kotabaru) untuk menyalurkan bantuan melalui program CSR bagi PPKS yang belum bisa tercover oleh anggaran pemerintah (APBN/APBD).
Tujuan 7: Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	❖ Kolaborasi yang baik dan terus meningkat dalam mendukung Indeks RB bersaa dengan OPD yang bersangkutan ❖ Capaian dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang hampir sempurna di angka 99% mencerminkan komitmen kuat terhadap pemulihan ekonomi melalui produk lokal. ❖ ingkat digitalisasi arsip yang mencapai 89,2% menunjukkan kesiapan infrastruktur administrasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern ❖ Efektivitas dalam mencapai indikator kinerja utama makro yang berada di angka 92%	❖ Penetapan target IKU dan Rencana Aksi belum sepenuhnya selaras dengan target "Baik" yang ditetapkan dalam Kepmen 182 Tahun 2024. ❖ Belum dijadikannya manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan serta kurangnya monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ❖ Masih ditemukan sasaran strategis yang tidak selaras antara level Pemda dan OPD, serta indikator yang bersifat *output* saja (bukan *outcome*). ❖ Masih adanya risiko hubungan kedekatan antara penyedia jasa dengan pejabat dan belum optimalnya mekanisme pencegahan gratifikasi.	❖ Melakukan reviu total agar target Rencana Aksi minimal setara dengan standar nasional Kepmen 182/2024 dan memastikan adanya keabsahan formal atas dokumen tersebut. ❖ Memperbaiki setiap indikator kinerja agar memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat ❖ Membentuk komite/satgas pengelola risiko korupsi dan melaksanakan *probity audit* secara berkala untuk mendeteksi masalah dalam pengadaan ❖ Mengembangkan aplikasi *e-catalog* lokal dan *dashboard* transparansi anggaran yang memuat daftar hitam (*blacklist*) vendor untuk mencegah nepotisme. ❖ Menyempurnakan rencana aksi RB Tematik (Kemiskinan dan Stunting) dengan melibatkan akademisi, sektor swasta (CSR),

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
				dan komunitas dalam satu peta jalan yang logis ❖ Meningkatkan sosialisasi antikorupsi kepada *stakeholders* dan menjadikan pimpinan sebagai *role model* dalam penegakan pengelolaan gratifikasi
Sasaran 21: Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	**Nilai SAKIP**	❖ Kualitas pohon kinerja di level Pemerintah Daerah dinilai telah cukup baik, ditandai dengan penetapan *Critical Success Factor* (CSF) yang relevan untuk mencapai hasil akhir (*ultimate outcome*). Ini memudahkan penarikan benang merah sasaran dalam laporan kinerja. ❖ Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebenarnya sudah difasilitasi dengan aplikasi manajemen kinerja untuk pelaporan progres, yang jika dioptimalkan, akan sangat membantu penyediaan data LKJIP secara *real-time* dan akurat ❖ Dengan raihan nilai 64,80 dan predikat "B" , ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah masuk kategori "Baik" , sehingga perbaikan yang dibutuhkan lebih bersifat penyempurnaan teknis dan peningkatan komitmen	❖ Pada dokumen laporan kinerja, analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja tidak disampaikan secara lengkap dan kurang mendalam. Kebanyakan laporan justru hanya berisi penjelasan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. ❖ Satuan pada beberapa indikator kinerja belum dirumuskan dengan jelas, dan banyak indikator belum mendefinisikan sumber datanya dengan pasti. Hal ini menyulitkan evaluasi dan menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menghitung capaian kinerja yang akan dilaporkan ❖ Pengukuran kinerja secara periodik dan berjenjang belum dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat Daerah yang tidak melaporkan progres capaian kinerja triwulanan pada aplikasi manajemen kinerja, sehingga menyulitkan rekapitulasi data historis untuk penyusunan LKJIP tahunan.	❖ Perangkat Daerah harus menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan menyampaikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara detail. Analisis ini krusial untuk dijadikan dasar merumuskan solusi atau mempertahankan strategi guna meningkatkan capaian kinerja di masa depan. ❖ Dokumen pelaporan wajib menyertakan informasi *benchmarking* atas indikator capaian kinerja tertentu yang memungkinkan untuk dibandingkan dengan capaian level nasional, provinsi, atau daerah sekitar. Ini berguna untuk memberikan gambaran level keberhasilan yang lebih objektif ❖ Memperjelas satuan ukur pada seluruh indikator agar spesifik dan konsisten. Selain itu, seluruh indikator wajib dilengkapi dengan definisi sumber data dan mekanisme pengumpulan data yang tersedia ❖ Meningkatkan komitmen seluruh level jabatan (dari Kepala Dinas hingga staf) untuk melakukan pengukuran kinerja periodik secara disiplin. Identifikasi kendala dan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
				hambatan harus dilakukan setiap periode, bukan hanya di akhir tahun
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	**Opini BPK**	❖ Adanya kemauan kuat dari Bupati dan jajaran kepala SKPD untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan. ❖ Penggunaan sistem terintegrasi yang meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat konsolidasi data ❖ Peran aktif Inspektorat dalam melakukan *review* laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK, sehingga temuan-temuan kecil dapat diperbaiki lebih awal. ❖ Kecepatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.	❖ Penyesuaian terhadap aturan baru dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri yang terkadang membutuhkan waktu adaptasi teknis di lapangan.	❖ Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. ❖ Mengadakan *workshop* berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel. II.6
Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai (Sebelum Perubahan)

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) **Indikator Kinerja SS** PDRB sektor pertanian				10,03	10,66	106,28%	
	Program 1.1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Produktivitas Pertanian Meningkatnya Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Pertanian dan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian	7.011.387.690	8.154.765.913	116,30%	 4,73 100 100	 4,57 100 100	 96,62% 100% 100%	85,01%
	Kegiatan 1.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian **Sasaran Kegiatan 1.1.1** Meningkatnya Penggunaan Sarana Produksi Pertanian yang Tepat Guna **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tersedianya Sarana produksi Pertanian	5.365.671.690	4.055.968.264	75,59%	100	100	100%	132,29%
	Kegiatan 1.1.2 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.181.000	428.789.700	585,9%	100	100	100%	17,06%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 1.1.2 Meningkatnya Penyediaan Pakan Ternak yang Berkualitas **Indikator Kinerja Kegiatan** Kegiatan Persentase Jumlah Pakan Ternak yang Berkualitas							
	Kegiatan 1.1.3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain **Sasaran Kegiatan 1.1.3** Meningkatnya Penyediaan Ternak **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.572.535.000	3.670.007.949	233,38%	4,5	4,5	100%	42,84%
	Program 1.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Perluasan Areal Tanam Pertanian Meningkatnya Produktivitas Pertanian Meningkatnya Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian **Indikator Kinerja Program** Rasio antara target dan realisasi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	2.774.102.500	20.290.672.654	731,43%	 50 3,8	 50 3,8	 100% 100%	13,67%
	Kegiatan 1.2.1 Pengembangan Prasarana Pertanian	1.002.036.500	1.178.663.600	117,62%				85,01%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 1.2.1 Meningkatnya Luas Tanam Pertanian Meningkatnya Standarisasi Perkebunan Meningkatnya kualitas produk Olahan Hasil pertanian **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah peningkatan Luas tanam pertanian Persentase Kebun Yang Terstandarisasi Persentase Kebun Yang Terstandarisasi				 280,84 100 100	 280,84 100 100	 100% 100% 100%	
	Kegiatan 1.2.2 Pembangunan Prasarana Pertanian **Sasaran Kegiatan 1.2.2** Meningkatkan Infrastruktur Prasarana Pertanian **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tersedianya infrastruktur Prasarana Pertanian	1.711.290.000	15.377.456.299	898,58%	100	90,32	90,32%	10,05%
	Program 1.3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner **Sasaran Program** Meningkatnya Pengendalian Penyebaran Penyakit Hewan **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	373.446.000	348.282.890	93,26%	 2,54 12	 2,54 2,3	 100% 180%	150,11%
	Kegiatan 1.3.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	322.211.500	300.011.890	93,11%	14	10	71,43%	76,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 1.3.1 Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan							
	Kegiatan 1.3.2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner **Sasaran Kegiatan 1.3.2** Meningkatnya Pelayanan Keamanan Produk Hewan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pelayanan Keamanan Produk Hewan	51.234.500	48.271.000	94,22%	10	10	100%	106,13%
	Program 1.4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Indikator Kinerja Program** Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	494.496.750	857.343.775	173,37%	100	100	100%	57,68 %
	Kegiatan 1.4.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 1.4.1** Luas Pengendalian Serangan OPT dan DPI Tanaman **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Luas Pengendalian Serangan OPT dan DPI Tanaman	494.496.750	857.343.775	173,37%	100	100	100%	57,68 %
	Program 1.5 Program Penyuluh Pertanian	541.537.500	2.449.864.661	452,39%				22,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya Kelembagaan Pertanian Meningkatnya Regenerasi Petani **Indikator Kinerja Program** Persentase SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Persentase petani muda terhadap jumlah petani				 100 100 100	 100 100 100	 100% 100% 100%	
	Kegiatan 1.5.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian **Sasaran Kegiatan 1.5.1** Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Kelembagaan Petani **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Persentase Kelembagaan Ekonomi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	541.537.500	2.449.864.661	452,39%	 28 28 20	 28 28 20	 100% 100% 100%	22,10%
2	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya **Indikator Kinerja S S** Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)				 105.264,16 ton	 121.483,07 ton	 115,40%	
	Program 2.1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya **Sasaran Program** Meningkatnya produksi perikanan budidaya **Indikator Kinerja Program** Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	47.034.870.789	36.289.374.087	77,15%	35.702,98	35.702,98	100%	129,61%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 2.1.1** Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan yang baik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sarana prasarana penangkapan ikan (%)	83.836.000	83.358.000	99,43%	100	100	100%	100,57%
	Kegiatan 2.1.2 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil **Sasaran Kegiatan 4.2.2** Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	357.085.500	350.251.600	98,09%	100	100	100%	101,95%
	Kegiatan 2.1.3 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.2.3** Meningkatnya kepemilikan tada daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pembudidaya ikan kecil yang memiliki tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	73.477.000	71.392.000	97,16%	100	100	100%	102,92%
	Kegiatan 2.1.4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan **Sasaran Kegiatan 4.2.4** Meningkatnya sarana prasarana pembudidayaan ikan yang baik	46.520.472.289	35.784.372.487	76,92%	100	95,56	95,56%	124,23%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase sarana prasarana pembudidayaan ikan							
	Program 2.2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap **Sasaran Program** Meningkatnya produksi peikanan tangkap **Indikator Kinerja Program** Jumlah produksi perikanan nelayan tangkap (ton)	31.410.178.654	26.179.561.440	83,35%	85.535,24	85.779,00	100.28%	120.32%
	Kegiatan 2.2.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 2.2.1** Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan yang baik **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase sarana prasarana penangkapan ikan (%)	30.591.652.650	25.454.662.864	83,21%	100	97,21	97,21%	116,83%
	Kegiatan 2.2.2 Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.2.2** Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kelompok nelayan yang eningkat kapasitasnya	300.215.250	229.180.005	76,34%	100	100	100%	131%
	Kegiatan 2.2.3 Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	126.048.150	124.078.854	98.44%	100	100	100%	101,59%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 2.2.3 Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan							
	Kegiatan 2.2.4 Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota **Sasaran Kegiatan 4.1.4** Meningkatnya kepemilikan tanda daftar kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kapal perikanan berukuran sampai 10 GT yang memiliki tanda daftar kapal perikanan	293.956.604	279.597.834	95.12%	100	100	100%	105,14%
	Kegiatan 2.2.5 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota **Sasaran Kegiatan 2.2.5** Meningkatnya kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki buku kapal perikanan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase persentase kapal perikanan berukuran sampai 10GT yang memiliki tanda daftar kapal perikanan	98.306.000	92.041.883	93,63%	100	100	100%	106,81%
	Program 2.3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	240.247.500	118.524.613	49,33%				202,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Terjaganya kelestarian ekosistem perairan umum daratan serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengawasan yang optimal **Indikator Kinerja Program** Jumlah perairan umum daratan/sungai, danau, waduk dan perairan lainnya yang di awasi (Ha) Jumlah lahan budidaya perikanan yang di awasi (Ha)				42,946 8.455	42,946 8.455	100% 100%	
	Kegiatan 2.3.1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.3.1** Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan secara efektif, tepat waktu sesuai ketentuan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelaksanaan pengawasan perikanan tangkap Persentase pelaksanaan pengawasan perikanan budidaya	240.247.500	118.524.613	49,33%	 100 100	 100 100	 100% 100%	202,71%
3	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Ketahanan Pangan **Indikator Kinerja S S** Indeks Ketahanan Pangan				81,50	75,34	92,44%	
	Program 3.1 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat **Sasaran Program** Meningkatnya Ketersediaan Pangan Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.293.945.950	3.078.138.690	134,18%				76,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terciptanya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok **Indikator Kinerja Program** Skor PPH Ketersediaan Persentase Cadangan Pangan Skor PPH Konsumsi Jumlah angka kecukupan gizi (AKE) Jumlah angka kecukupan protein (AKP) Indeks Perkembangan Harga (IPH) Pangan Pokok				 72 2 92,20 2198 68,7 100	 91 2 89,27 2132 66,99 100	 126,39% 100% 96,82% 97% 97,51% 100%	
	Kegiatan 3.1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **Sasaran Kegiatan 7.6.1** Meningkatnya Akses Pasokan Pangan Pokok **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Peningkatan Gerakan Pangan Murah	383.022.500	1.556.378.800	406,34%	12	23	191,67%	47,16%
	Kegiatan 3.1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.6.2** Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Persentase Cadangan Pangan) **Indikator Kinerja Kegiatan** Volume Cadangan Pangan	1.536.834.000	1.141.377.800	74,26%	100	83,71	83,71%	112,72%
	Kegiatan 3.1.3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	374.089.450	380.382.090	101,68%	4	8	200%	196,99%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 3.1.3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang ragam dan bergizi seimbang **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah sosialisasi dan edukasi B2SA							
	Program 3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan **Sasaran Program** Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	729.719.000	3.498.189.959	479,38%	50	67,5	135%	28,16%
	Kegiatan 3.2.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.2.1** Penguatan Infrastruktur Cadangan Pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah peningkatan infrastruktur cadangan pangan	729.719.000	3.498.189.959	479,38%	8	8	100%	20,86%
	Program 3.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan **Sasaran Program** Menurunnya Daerah Rawan Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase penurunan Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan	346.898.500	372.646.182	107,42%	15,80	16,83	106,52%	99,16%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 3.3.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.3.1** Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penurunan Desa Rawan Pangan	99.230.500	85.694.000	86,35%	-2	4	-200%	-231,61
	Kegiatan 3.3.2 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan **Sasaran Kegiatan 3.3.2** Pemantauan dan pengawasan desa rawan pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	247.668.000	286.952.182	115,86%	-4	4	-100%	-86,31%
	Program 3.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan **Sasaran Program** Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Pangan segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	491.108.000	260.753.495	53,09%	90	90	100%	188,35%
	Kegiatan 3.4.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.4.1** Memastikan PSAT aman dari cemaran kimia, biologis dan fisik	491.108.000	260.753.495	53,09%	64	70,8	110,63%	208,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah PSAT yang memenuhi Persyaratan mutu dan Keamanan Pangan							
4	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal **Indikator Kinerja S S** Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri				34,50	28,79	83,45%	
	Program 4.1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah **Indikator Kinerja Program** Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	6.274.131.000	6.356.879.969	101,32%	100	94,67	94,67	93,44%
	Kegiatan 4.1.1 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.1.1** Meningkatnya hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda	6.274.131.000	6.356.879.969	101,32%	100	94,67	94,67	93,44%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 4.2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota **Sasaran Program** Meningkatnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait **Indikator Kinerja Program** Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100.000.000	12.478.500	12,48%	4,39	1,313	29,93%	239,87%
	Kegiatan 4.2.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) **Sasaran Kegiatan 4.2.1** Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	100.000.000	12.478.500	12,48%	4,39	1,313	29,93%	239,87%
	Program 4.4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional **Sasaran Program** Meningkatnya Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	322.176.000	65.591.500	20,36%	96	96	100%	491,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini							
	Kegiatan 4.4.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.24.1** Meningkatnya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas	322.176.000	65.591.500	20,36%	96	96	100%	491,19%
5	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata **Indikator Kinerja S S** Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata				6,63	18,28	275,71%	
	Program 5.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata **Sasaran Program** Meningkatnya Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase Lama Tinggal Wisatawan	102.700.441.250	25.582.174.779	24,90%	42,86	42,86	100%	401,60%
	Kegiatan 5.1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	9.560.000.000	405.855.792	4,24%	10	10	100%	2.358,49%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 5.1.1 Terlaksananya perancangan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi obyek dan daya tarik wisata yang dirancang untuk dikembangkan							
	Kegiatan 5.1.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.1.2** Terlaksananya penataan kawasan pengelolaan destinasi pariwisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi penataan Kawasan destinasi pariwisata yang dikelola	92.238.483.250	24.800.950.487	26,88%	4	4	100%	372,02%
	Kegiatan 5.1.3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.1.3** Terlaksananya peningkatan kepatuhan terhadap standar usaha pariwisata **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah usaha pariwisata yang mematuhi standar usaha pariwisata	901.958.000	375.368.500	41,61%	10	10	100%	240,32%
	Program 5.2 Program Pemasaran Pariwisata **Sasaran Program** Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan jangkauan audiens promosi pariwisata	8.084.315.650	6.695.728.152	82,82%	5	5	100%	120,74%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 5.2.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.2.1** Terlaksananya promosi destinasi wisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah destinasi wisata daerah yang dipromosikan	8.084.315.650	6.695.728.152	82,82%	18	18	100%	120,74%
	Program 5.3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah	23.385.824.450	1.500.924.413	6,41%	5	5	100%	1.560,06%
	Kegiatan 5.3.1 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.3.1** Tersedianya sarana dan prasarana ruang kreatif daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi sarana dan prasarana ruang kreatif daerah yang disediakan dan difungsikan	21.808.625.600	681.727.160	3,12%	1	1	100%	3.205,12%
	Kegiatan 5.3.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif **Sasaran Kegiatan 5.3.2** Terlaksananya fasilitasi pendaftaran HAKI Daerah	1.577.198.850	819.197.253	51,94%	40	40	100%	192,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual							
	Program 5.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif **Sasaran Program** Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif **Indikator Kinerja Program** Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	21.469.136.650	8.136.570.244	37,89%	20	20	100%	263,92%
	Kegiatan 5.4.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar **Sasaran Kegiatan 5.4.1** Terselenggaranya peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi guna memperkuat daya saing dan inovasi pelaku ekonomi kreatif di daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapat Penguatan Kapasitas	20.712.628.500	7.658.196.094	36,97%	2	2	100%	270,48%
	Kegiatan 5.4.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif **Sasaran Kegiatan 5.4.2** Terselenggaraanya peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM tingkat dasar yang diselenggarakan	756.508.150	478.374.150	63,23%	5	5	100%	158,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
6	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kuantitas dan Besaran Investasi di Kabupaten Kotabaru **Indikator Kinerja S S** Nilai Investasi				1.457.417 Juta	4.713.191 Juta	323,39%	
	Program 6.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya daya tarik investasi daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kotabaru (PMDN dan PMA)	1.279.845.000	1.007.239.800	78,70%	0,50%	-29,43%	-58,86%	-74,79%
	Kegiatan 6.1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.1.1** Tersusunnya peraturan/kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang tersusun	299.668.000	206.811.200	69,01%	100	100	100%	144,9%
	Program 6.2 Program Promosi Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya Minat investor yang masuk ke Kabupaten kotabaru	1.572.825.950	1.164.685.216	74,05%	100	100	100%	135,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase peningkatan minat investor yang masuk ke Kabupaten Kotabaru (PMDN dan PMA)							
	Kegiatan 6.2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.2.1** Terlaksananya promosi dan fasilitasi investasi yang terarah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	1.572.825.950	1.164.685.216	74,05%	100	100	100%	135,04%
	Program 6.3 Program Pelayanan Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya efisiensi pelayanan perizinan berbasis risiko Meningkatnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelayanan publik **Indikator Kinerja Program** Persentase izin yang selasai sesuai SOP Persentase peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi pada bidang pelayanan. Persentase penurunan jumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan publik	1.227.050.750	700.046.978	57,05%	 100 100 100	 100 100 100	 100% 100% 100%	175,28%
	Kegiatan 6.3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 6.3.1** Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang	1.227.050.750	700.046.978	57,05%				175,28%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	penanaman modal melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kotabaru **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberian Fasilitasi kepada Perusahaan Persentase pelayanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi secara elektronik yang tersedia. Persentase layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik yang tersedia.				100 100 100	100 100 100	100% 100% 100%	
	Program 6.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal **Sasaran Program** Terciptanya kepatuhan pelaku usaha penanaman modal terhadap regulasi (LKPM) **Indikator Kinerja Program** Persentase kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap regulasi	1.022.485.700	585.459.976	57,25%	100	100	100%	174,67%
	Kegiatan 6.4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.4.1** Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko. **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko yang terlaksana.	1.022.485.700	585.459.976	57,25%	100	100	100%	174,67%
	Program 6.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal **Sasaran Program** Peningkatan kualitas data penanaman modal dan perizinan	450.474.000	253.855.108	56,35%	100	100	100%	177,46%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang akurat dan real-time.							
	Kegiatan 6.5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.5.1** Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal. **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pembinaan dan pendampingan optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana.	450.474.000	253.855.108	56,35%	100	100	100%	177,46%
	Program 6.6 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja **Sasaran Program** Terlaksananya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Program** Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Komptensi	5.714.041.490	6.370.422.022	111,48%	55	24	43,64%	39,14%
	Kegiatan 6.6.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi **Sasaran Kegiatan 6.6.1** Terlaksananya pengukuran Komptensi dan Produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelaksanaan pelatihan	5.476.960.440	6.277.460.994	114,61%	100	100	100%	87,25%
	Kegiatan 6.6.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	99.998.545	29.920.545	29,92%	10	10	100%	334,22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 6.6.2 Terlaksanannya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
	Kegiatan 6.6.3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.2.3** Terlaksananya pengukuran Komptensi dan Produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	137.082.505	63.040.483	45,98%	2	2	100%	217,48%
	Program 6.7 Program Penempatan Tenaga Kerja **Sasaran Program** Terlaksananya penempatan tenaga kerja **Indikator Kinerja Program** Persentase Tenagakerja yang ditempatkan	956.023.492	484.778.732	50,70%	76	50,35	66,24%	130,65%
	Kegiatan 6.7.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.3.1** Terlaksananya Pelayanan Antarkerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelayanan antar kerja	556.023.942	250.779.145	45,10%	365	268	73,30%	162,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 6.7.3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Sasaran Kegiatan 5.3.3** Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lowongan kerja yang diinformasikan	249.999.790	161.065.627	64,42%	400	350	87,63%	136,02%
	Program 6.8 Program Hubungan Industrial **Sasaran Program** Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan **Indikator Kinerja Program** Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1.648.301.200	2.018.502.005	122,45%	21	19,43	92,51%	75,54%
	Kegiatan 6.8.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.8.1** Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peaturan yang berlaku	355.000.000	185.181.956	52,16%	32	23,68	74,01%	141,89%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 6.8.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.8.2** Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.293.301.200,	1.833.320.049	141,75%	2,5	2,38	95,03%	67,04%
8	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil **Indikator Kinerja S S** Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil				90	9	10%	
	Program 8.1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil **Indikator Kinerja Program** Persentase Usaha Mikro dan Kecil	6.489.000.000	3.988.864.314	61,47%	90	82,05	91,17%	148,31%
	Kegiatan 8.1.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.489.000.000	3.988.864.314	61,47%	90	82,05	91,17%	148,31%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 8.1.1 Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
	Program 8.2 Program Pengembangan UMKM **Sasaran Program** Meningkatnya Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan **Indikator Kinerja Program** Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	775.000.000	574.141.934	74,08%	80	80	100%	134,98%
	Kegiatan 8.2.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil **Sasaran Kegiatan 4.16.1** Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran UMKM **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah umkm yang dipasarkan produknya	775.000.000	574.141.934	74,08%	80	80	100%	134,98%
	Program 8.3 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi **Indikator Kinerja Program** Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	69.727.000	33.842.000	48,54%	86,67	86,67	100%	206,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.3.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.3.1** Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.193.000	14.836.000	46,08%	85	85	100%	216,99%
	Kegiatan 8.3.2 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam **Sasaran Kegiatan 8.3.2** Meningkatnya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	37.534.000	19.006.000	50,64%	90	90	100%	197,49%
	Program 8.4 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT **Indikator Kinerja Program** Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT	410.421.000	716.660.536	174,62%	44	44	100%	57,27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.4.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 8.4.1** Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	410.421.000	716.660.536	174,62%	44	44	100%	57,27%
	Program 8.5 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya KSP / USP Koperasi yang dinilai kesehatannya **Indikator Kinerja Program** Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	305.000.000	105.094.500	34,46%	92	92	100%	290,21%
	Kegiatan 8.5.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.12.1** Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	305.000.000	105.094.500	34,46%	92	92	100%	290,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Program 8.6 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian **Sasaran Program** Meningkatnya koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian **Indikator Kinerja Program** Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	351.515.000	316.164.496	89,94%	47,62	47,62	100%	111,18%
	Kegiatan 8.6.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.6.1** Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	351.515.000	316.164.496	89,94%	47,62	47,62	100%	111,18%
	Program 8.7 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan **Indikator Kinerja Program** Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	195.041.000	607.420.730	311,4%	57,14	57,14	100%	32,11%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.7.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.7.1** Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	195.041.000	607.420.730	311,4%	57,14	57,14	100%	32,11%
	Program 8.8 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan **Sasaran Program** Meningkatnya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **Indikator Kinerja Program** Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	280.000.000	125.945.062	44,98%	96,67	86,41	89,39%	198,72%
	Kegiatan 8.8.1 Penerbitan Tanda Daftar Gudang **Sasaran Kegiatan 4.17.1** Meningkatnya Rekomendasi TDG yang diterbitkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rekomendasi TDG yang diterbitkan	160.000.000	73.572.000	45,98%	91	81,9	90%	195,73%
	Kegiatan 8.8.2 Penerbitan Surat Keterangan Asal **Sasaran Kegiatan 8.8.2** Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asa **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal	120.000.000	52.373.062	43,64%	96,67	85,79	88,75	203,36%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 8.9 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Program** Meningkatnya pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan **Indikator Kinerja Program** Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	6.042.600.000	4.725.743.945	78,21	69,23%	66,02%	95,37%	121,94%
	Kegiatan 8.9.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Kegiatan 8.9.1** Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.752.600.000	4.540.660.545	78,93%	36,92	35,14	95,18%	120,58%
	Kegiatan 8.9.2 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Kegiatan 8.9.2** Meningkatnya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	290.000.000	185.083.400	63,82%	41,54	41,54	100%	156,69%
	Program 8.10 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting **Sasaran Program** Meningkatnya stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	550.954.850	442.514.463	80,32%	100	100	100%	124,51%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok							
	Kegiatan 8.10.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 8.10.1** Meningkatnya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	33.770.500	67,54%	100	100	100%	148,06%
	Kegiatan 8.10.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.10.2** Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	313.230.500	300.653.863	95,98%	100	100	100%	104,18%
	Kegiatan 8.10.3 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi **Sasaran Kegiatan 8.10.3** Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan**	187.724.350	108.090.100	57,58%	75,76	75,76	100%	173,67%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Program 8.11 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen **Sasaran Program** Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar **Indikator Kinerja Program** Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	469.999.850	277.100.445	58,96%	90	90	100%	169,61%
	Kegiatan 8.11.1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan **Sasaran Kegiatan 8.11.1** Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	469.999.850	277.100.445	58,96%	90	90	100%	169,61%
9	**Sasaran Strategis** **Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi** **Indikator Kinerja SS** **Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**				33,18	42,40	127,78%	
	Program 9.1 Program Penyelenggaraan Jalan **Sasaran Program** Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	583.292.120.769	258.906.886.487	44,38%	100	80,34	80,34%	181,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap							
	Kegiatan 9.1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 9.1.1** Meningkatnya panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan kondisinya **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan kondisinya	583.292.120.769	258.906.886.487	44,38%	100	80,34	80,34%	181,02%
10	**Sasaran Strategis** **Mewujudkan Konektivitas Kabupaten** **Indikator Kinerja SS** **Rasio Konektivitas Kabupaten**				0,94	0,60	63,82%	
	Program 10.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) **Sasaran Program** Optimalisasi Pelayanan Transportasi Darat Meningkatnya Keselamatan Angkutan Jalan **Indikator Kinerja Program** Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang) Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	137.452.261.684	135.276.245.913	98,42%	100	99,76	99,76%	101,36%
	Kegiatan 10.1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50.032.994.382	124.939.575.315	249,71%	100	100	100%	400,46%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 12.19.1 Meningkatnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun							
	Kegiatan 10.1.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C **Sasaran Kegiatan 12.19.2** Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2.504.998.906	252.963.400	10,10%	1	1	93,45%	925,24 %
	Kegiatan 10.1.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir **Sasaran Kegiatan 10.1.3** Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.871.841.940	1.327.458.940	70,92%	12	12	100%	141%
	Kegiatan 10.1.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Kegiatan 10.1.4** Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.380.024.370	1.372.100.316	99,43%	1750	1.700	97,15%	97,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	yang Terdaftar							
	Kegiatan 10.1.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota **Sasaran Kegiatan 10.1.5** Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.093.986.000	1.038.140.476	94,90%	12	12	100%	105,37%
	Kegiatan 10.1.8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 10.1.8** Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.554.156.250	3.329.681.906	130,36%	12	12	100%	76,71%
	Kegiatan 10.1.9 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Layanan Angkutan Perkotaan **Sasaran Kegiatan 10.1.9**	37.621.400	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN			BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
				ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Layanan Angkutan Perkotaan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Layanan Angkutan							
			Kegiatan 10.1.10 Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 10.1.10** Meninkatnya Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	97.649.520	57.314.520	58,69%	100	90,75	90,75%	154,62%
			Kegiatan 10.1.11 Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah **Sasaran Kegiatan 10.1.11** Meningkatnya tertib izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penertiban izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah	32.261.000	13.858.000	42,96%	100	100	100%	232,78%
			Kegiatan 10.1.12 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang	80.126.700	71.082.300	88,71%	100	100	100%	112,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 10.1.11** Meningkatnya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Penetapan Tarif Angkutan Umum							
	Kegiatan 10.1.13 Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 10.1.11** Meningkatnya Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penetapan RencanaUmum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.917.130.554	2.874.070.740	98,52%	3	3	100%	101,50%
	Program 10.2 Program Pengelolaan Pelayaran **Sasaran Program** Optimalnya Layanan Angkutan Laut dan Penyeberangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengelolaan Pelayaran	13.680.768.656	4.246.483.772	31,03%	100	98,62	98.62%	317,82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 10.2.1 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Sasaran Kegiatan 10.2.3** Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12.508.200.340	3.641.077.974	29,11%	1	1	100%	343,52%
	Kegiatan 10.2.2 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Sasaran Kegiatan 10.2.4** **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	927.664.996	535.598.394	57,74%	1	1	100%	173,19%
	Kegiatan 10.2.3 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 10.2.3** Meningkatnya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian	141.222.520	5.768.000	4,08%	1	1	100%	2.450,9%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 10.2.4 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Sasaran Kegiatan 10.2.4** Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.680.800	3.314.000	3,20%	1	1	100%	3.125%
11	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum **Indikator Kinerja SS** Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum				38,91	82,27	211,43%	
	Program 11.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum **Sasaran Program** Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses terhadap air minum layak	76.139.880.000	5.833.932.973	7,66%	100	67,54	67,54%	881,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program persentase rumah tangga yang terlayani akses terhadap air minum layak							
	Kegiatan 11.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 11.1.1** Meningkatnya sambungan rumah tangga yang terlayani jaringan air minum layak **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum layak	76.139.880.000	5.833.932.973	7,66%	100	67,54	67,54%	881,72%
12	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi **Indikator Kinerja SS** Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Pengolahan Limbah Domestik				25	72,68	290,72%	
	Program 12.1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah **Sasaran Program** Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak **Indikator Kinerja Program** persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	13.136.479.744	6.637.586.141	50,52%	100	98,59	98,59%	195,15%
	Kegiatan 12.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.1.1** Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	13.136.479.744	6.637.586.141	50,52%	100	98,59	98,59%	195,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak							
13	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kualitas Perumahan **Indikator Kinerja SS** Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni				98,85	23,77	24,04%	
	Program 13.1 Program Kawasan Permukiman **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman **Indikator Kinerja Program** Persentase luas kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	7.200.000.000	6.923.508.917	96,16%	23,77	23,77	100%	104%
	Kegiatan 13.1.1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sasaran Kegiatan 13.1.2** Tersedianya permukiman yang layak huni, sehat, aman dan terencana dan berkelanjutan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani	1.950.000.000	1.859.323.200	95,35%	100	100	100%	105%
	Kegiatan 13.1.2 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman **Sasaran Kegiatan 13.1.2** Tersedianya data pengembang/pemohon yang dilayani	200.000.000	103.302.317	51,65%	23,77	23,77	100%	194%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan							
	Kegiatan 13.1.3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sasaran Kegiatan 13.1.2** Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Indikator Kinerja Kegiatan** Indikator Kinerja Kegiatan Presentasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha berkualitas	5.050.000.000	4.960.883.400	98,24%	100	100	100%	102%
	Program 13.2 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	26.723.402.739	23.858.300.017	89,28%	73,20	73,20	100%	112%
	Kegiatan 13.2.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 13.2.1** Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	26.723.402.739	23.858.300.017	89,28%	73,20	73,20	100%	112%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
14	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang **Indikator Kinerja SS** Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW				97,20	97,20	100%	
	Program 14.1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang **Sasaran Program** meningkatnya ketersediaan dokumen penataan ruang **Indikator Kinerja Program** Persentase wilayah kecamatan atau kawasan strategis yang memiliki RDTR yang ditetapkan	2.893.978.024	2.286.623.245	79,01%	100	98,18	98,18%	124,26%
	Kegiatan 14.1.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.1.1** Tersedianya dokumen penataan ruang yang dihasilkan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase dokumen penataan ruang yang dihasilkan	1.575.709.154	963.389.832	61,14%	100	92,30	92,30%	150,96%
	Kegiatan 14.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.1.2** Meningkatnya dokumen tata ruang yang disetujui **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen tata ruang yang disetujui	1.018.246.870	980.714.372	96,31%	100	100	100%	103,83%
	Kegiatan 14.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.022.000	173.903.189	115,91%	100	100	100%	86,27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 14.1.3 Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang yang di keluarkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen pemanfaatan ruang yang di keluarkan							
	Kegiatan 14.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.10.4** Meningkatnya pelanggaran penataan ruang yang ditangani **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelanggaran penataan ruang yang ditangani	150.000.000	168.615.852	112,41%	100	100	100%	88,96%
15	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa **Indikator Kinerja SS** Indeks Desa Membangun				0,6693	0,7417	110,81%	
	Program 15.1 Program Penataan Desa **Sasaran Program** Meningkatnya Pengentasan Desa Tertinggal **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengentasan Desa tertinggal	176.269.000	90.777.100	51,49%	100	100	100%	194,21%
	Kegiatan 15.1.1 Penyelenggaraan Penataan Desa **Sasaran Kegiatan 15.1.1** Terpenuhinya penataan desa yang terfasilitasi	176.269.000	90.777.100	51,49%	100	100	100%	194,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penataan Desa yang Terfasilitasi							
	Program 15.2 Program Peningkatan Kerjasama Desa **Sasaran Program** Meningkatnya fasilitasi kerjasama desa **Indikator Kinerja Program** Persentase desa yang terfasilitasi kerjasaa	18.865.000	16.229.200	86%	100	100	100%	116,27%
	Kegiatan 15.2.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa **Sasaran Kegiatan 13.2.1** meningkatnya fasilitasi kerjasama antar desa **Indikator Kinerja Kegiatan** peersentase fasilitasi kerjasama antar desa yang dilakukan	18.865.000	16.229.200	86%	100	100	100%	116,27%
	Program 15.3 Program Administrasi Pemerintahan Desa **Sasaran Program** Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa **Indikator Kinerja Program** Persetase fasilitasi pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	3.810.191.214	1.941.483.371	50,9%	100	96,12	96,12%	188,84%
	Kegiatan 15.3.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa **Sasaran Kegiatan 15.3.1** Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.810.191.214	1.941.483.371	50,9%	100	96,12	96,12%	188,84%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Program 15.4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat **Sasaran Program** Meningkatnya status desa mandiri **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan status desa mandiri	988.984.850	765.190.751	77,4%	100	100	100%	129,20%
	Kegiatan 15.4.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah **Sasaran Kegiatan 15.4.1** Meningkatnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	988.984.850	765.190.751	77,4%	100	100	100%	129,20%
16	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup **Indikator Kinerja SS** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				67,73%	80,22	118,44%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 16.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Tercapainya target perencanaan lingkungan hidup terhadap mitigasi dampak KRP **Indikator Kinerja Program** Persentase capaian target perencanaan lingkungan hidup	689.506.361	39.379.361	57,11%	100	100	100%	175,1%
	Kegiatan 16.1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 16.1.1** Terlaksananya arahan-arahan yang termuat dalam RPPLH **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase pelaksanaan RPPLH	689.506.361	39.379.361	57,11%	100	100	100%	175,1%
	Kegiatan 16.1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 16.1.2** Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten Kotabaru **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah dokumen KLHS Kabupaten Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-
	Program 16.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	6.774.630.198	3.124.086.722	46,11%	50	50	100%	216,87%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase titik pantau tanah, air dan udara dengan status memenuhi parameter IKLH							
	Kegiatan 16.2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan hidup kabupaten/kota **Sasaran Kegiatan 16.2.1** Terpenuhinya pemantauan lingkungan terhadap titik pantau air, udara dan tanah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase nilai indeks pencemar yang mengalami penurunan	6.124.630.198	2.848.072.357	46,50%	50	50	100%	215,05%
	Kegiatan 16.2.2 Penanggulangan Pencemaran dam/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten /kota **Sasaran Kegiatan 16.2.2** Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Usaha atau kegiatan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 16.2.3 **Penghentian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup** **Sasaran Kegiatan 16.2.3** **Indikator Kinerja Kegiatan**							
	Kegiatan 16.2.4 Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan hidup kabupaten/kota	650.000.000	276.014.365	42,46%	0,0042	0,0042	100%	235,51%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 16.2.4 Meningkatnya perbaikan ekosistem pesisir **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase luas lahan yang dilakukan pemulihan							
	Program 16.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) **Sasaran Program** Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) **Indikator Kinerja Program** Persentase luas ruang terbuka hijau perkotaan terhadap luas wilayah perkotaan	7.476.477.350	4.388.073.177	58,69%	4,44	4,44	100%	170,38%
	Kegiatan 16.3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 16.3.1** Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Kabupaten/Kota	7.476.477.350	4.388.073.177	58,69%	4,44	4,44	100%	170,38%
	Program 16.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) **Sasaran Program** Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) **Indikator Kinerja Program** Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang mengelola limbah B3	133.052.700	40.630.300	30,54%	70	76	108,57%	355,5%
	Kegiatan 16.4.1 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.052.700	40.630.300	30,54%	80	80	100%	355,5%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 14.4.1 Terpenuhinya komitmen aturan pengumpulan limbah B3 **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B							
	Program 16.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) **Sasaran Program** Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan **Indikator Kinerja Program** Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang masih aktif terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup	145.803.998	144.140.798	98,86%	82	84	102,44%	103,62%
	Kegiatan 16.5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 16.5.1** Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase usaha dan/atau kegiatan yang masih aktif yang dibina/diawasi terkait pengelolaan lingkungan hidup	145.803.998	144.140.798	98,86%	90	90	100%	101,15%
	Program 16.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	27.415.900	27.330.900	99,69%	72	80	111,11%	111,45%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH **Indikator Kinerja Program** Persentase masyarakat hukum adat yang memahami perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
	Kegiatan 16.6.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH **Sasaran Kegiatan 14.6.1** Meningkatnya masyarakat adat yang terfasilitasi terkait PPLH di kabupaten/kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah masyarakat adat yang sudah terpetakan /teridentifikasi lingkup kabupaten/kota	27.415.900	27.330.900	99,69%	1	1	100%	100,31%
	Program 16.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat **Sasaran Program** Meningkatnya kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase entitas yang ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	208.838.950	192.251.850	92,05%	11,78	16,33	138,62%	150,48%
	Kegiatan 16.7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208.838.950	192.251.850	92,05%	11,78	16,33	138,62%	150,48%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 16.7.1 Meningkatnya kapasitas satuan pendidikan formal dalam bidang lingkungan hidup **Indikator Kinerja Kegiatan** Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan							
	Program 16.8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Meningkatnya penyelesaian terhadap pengaduan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	110.848.800	103.167.855	93,07%	90	100	111,11%	119,38%
	Kegiatan 16.8.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 16.8.1** Meningkatnya pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tindak lanjut (penanganan) pengaduan lingkungan hidup	110.848.800	103.167.855	93,07%	90	90	100%	119,38%
	Program 16.9 Program Pengelolaan Persampahan **Sasaran Program** Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan sebagai upaya penurunan emisi GRK Sektor Limbah **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengurangan Sampah	50.393.145.294	34.356.668.506	68,17%	16	19,70	123,13%	180,62%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 16.9.1 Pengelolaan Sampah **Sasaran Kegiatan 16.9.1** Meningkatnya pengelolaan sampah di UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sampah yang diproses di UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	50.393.145.294	34.356.668.506	68,17%	100 100	100 100	100% 100%	146,7%
	Program 16.10 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya **Sasaran Program** Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya **Indikator Kinerja Program** Persentase Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	643.021.000	204.475.277	31,8%	9990	9990	100%	314,5%
	Kegiatan 16.10.1 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.11.1** Terkelolanya Kawasan TAHURA Sebatung **Indikator Kinerja Kegiatan** Luas Kawasan TAHURA yang dikelola	643.021.000	204.475.277	31,8%	6514,95	6514,95	100%	314,5%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
17	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewaspadaan Bencana **Indikator Kinerja SS** Persentase Kelompok Masyarakat Sadar Bencana				80	100	125%	
	Program 17.1 Program Penanggulangan Bencana **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana **Indikator Kinerja Program** Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	3.268.395.200	2.906.840.620	88,94%	100	90,88	90,88%	102,18%
	Kegiatan 17.1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 17.1.1** Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kualitas cakupan wilayah yang diberi informasi rawan bencana kabupaten/kota	254.901.250	239.982.803	94,15%	726	726	100%	106,22%
	Kegiatan 17.1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **Sasaran Kegiatan 17.1.2** Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	515.895.050	370.956.286	71,91%	364	325,9	89,53%	124,51%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiata Persentase kualitas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang tepat waktu dan valid							
	Kegiatan 17.1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Sasaran Kegiatan 17.1.3** Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik korban bencana	1.392.846.900	1.206.370.930	86,61%	400	346	86,5%	99,87%
	Kegiatan 17.1.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Sasaran Kegiatan 17.1.4** Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kualitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana valid dan tepat waktu	1.104.752.000	1.089.530.601	98,62%	5	5	100%	101,40%
18	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan Dasar **Indikator Kinerja SS** Indeks Pendidikan				11,00	9,82	89,27%	
	Program 18.1 Program Pengelolaan Pendidikan **Sasaran Program** Menurunnya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah	584.493.557.118	443.674.966.331	75,90%	8	7,7	96%	126,48%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Angka Rata-Rata Lama Sekolah							
	Kegiatan 18.1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar **Sasaran Kegiatan 18.1.1** Meningkatkan Jumlah anak usia 7–12 tahun yang terdaftar di satuan pendidikan dasar **Indikator Kinerja Kegiatan** Tingkat partisaipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	346.183.947.250	250.013.754.410	72,22%	100	102	102%	141,23%
	Kegiatan 18.1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Kegiatan 18.1.2** Meningkatkan Jumlah anak usia 13–15 tahun yang terdaftar di satuan pendidikan dasar menengah **Indikator Kinerja Kegiatan** Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTS)	127.033.789.210	124.075.228.783	97,67%	100	74	74%	75,76%
	Kegiatan 18.1.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Sasaran Kegiatan 18.1.3** Meningkatkan kualitas standar layanan pendidikan lembaga PAUD **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	92.933.381.533	64.418.255.662	69,32%	38	71	187%	269,76%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 18.1.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Kegiatan 18.1.4** Meningkatnya Jumlah lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B	18.342.439.125	5.167.727.476	28,17%	48	57	119%	423%
19	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat **Indikator Kinerja SS** Usia Harapan Hidup (UHH)				70,40	74,03	105,16%	
	Program 19.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat **Sasaran Program** Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau **Indikator Kinerja Program** Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	171.844.630.872	162.149.098.620	94,35%	 65 100	 65 100	 100% 100%	105,98%
	Kegiatan 19.1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota **Sasaran Kegiatan 19.1.1** Meningkatnya Akses dan Kualitas Sarana dan Sediaan Farmasi Kesehatan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	105.958.334.219	94.167.176.884	88,87%	 40 45	 51 66	 128% 147%	140,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar				68	68	100%	
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan obat dan vaksin terhadap RKO dengan vaksin							
	Kegiatan 19.1.2	65.526.593.653	67.613.045.357	103,18%				83,42%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Sasaran Kegiatan 19.1.2							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Pengembangan Standar Pelayanan Yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan							
	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC				90	70	78%	
	Presentase Ibu Hamil ANC 6 kali				80	46,37	58%	
	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar				91	80,08	88%	
	Persentase Persalinan di Fasyankes				70	62,48	89%	
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita				8,5	5,79	68%	
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan				20	42,45	212%	
	Persentase skrining DM				38,94	9,14	23%	
	Insidensi HIV				0,09	0,05	56%	
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja				20	20	100	
	Persentase lanjut usia yang mandiri				75	62,47	83%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				50	53,10	106%	
	Cakupan skrining kesehatan Jiwa				10	7,21	72%	
	Kegiatan 19.1.3	359.703.000	368.876.379	102,55%	100	100	100%	97,51%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 19.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ketersediaan Data dan informasi Kesehatan di Puskesmas							
20	**Sasaran Strategis** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat **Indikator Kinerja SS** Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial				77,55	91,75	118,31	
	Program 20.1 Program Pemberdayaan Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Pemberdayaan Sosia **Indikator Kinerja Program** Persentase Pemberdayaan Sosial	872.950.650	692.327.750	79,31%	100	100	100%	126,08%
	Kegiatan 20.1.1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) **Sasaran Kegiatan 20.1.1** Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	79.455.150	73.182.250	92,11%	100	100	100%	108,56%
	Kegiatan 20.1.2 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 20.1.2** Terlaksananya Koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.475.000	42.669.000	62,31%	100	100	100%	160,48%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 20.1.3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 20.1.3** Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	750.020.500	576.476.500	76,86%	100	100	100%	130,10%
	Program 20.2 Program Rehabilitasi Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program** Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.353.256.900	1.013.818.710	74,91%	100	100	100%	133,49%
	Kegiatan 20.2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial **Sasaran Kegiatan 20.2.1** Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	1.246.464.900	859.927.050	68,98%	100	100	100%	144,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	Kegiatan 20.2.1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA **Sasaran Kegiatan 20.2.1** Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	106.792.000	153.891.660	144,1%	100	100	100%	69,39%
	Program 20.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program** Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.299.158.220	5.069.461.775	38,11%	100	100	100%	262,39%
	Kegiatan 20.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 20.3.1** Terpenuhinya Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Terdata **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Fakir Miskin yang Terdata yang Mendapatkan Bantuan Sosial	13.299.158.220	5.069.461.775	38,11%	100	100	100%	262,39%
	Program 20.4 Program Penanganan Bencana	422.934.895	328.832.281	77,75%	100	100	100%	128,6%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya Penanganan Bencana **Indikator Kinerja Program** Persentase Kegiatan Penanganan Bencana yang Terlaksana							
	Kegiatan 20.4.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 20.4.1** Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Kegiatan Penanganan Bencana yang Terlaksana	241.600.514	132.744.420	54,94%	100	100	100%	182,01%
	Kegiatan 20.4.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 20.4.2** Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	181.334.381	196.087.861	108,14%	100	100	100%	92,47%
	Program 20.5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan **Sasaran Program** Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	217.303.520	213.763.671	98,37%	100	100	100%	101,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 20.5.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.3.1** Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	217.303.520	213.763.671	98,37%	100	100	100%	101,65%
21	**Sasaran Strategis** Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel **Indikator Kinerja SS** Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				70,1-80 BB	64,80 B	92,43%	
	Program 21.1 **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** **Sasaran Program** Meningkatnya Capaian Kematangan Organisasi Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya kualitas standar layanan public Meningkatnya Kualitas rencana Aksi RB Meningkatnya Kinerja pada koordinasi Administrasi Umum Meningkatnya Ketepatan Waktu Layanan Kesetdaan Sesuai SOP	101.011.469.625	88.798.565.638	87,91%				101,54%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Menurunnya aduan atas layanan kesetdaan Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerjaMeningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerja Meningkatnya kualitas infrastruktur / sarpas dan aset setda Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan							
	Indikator Kinerja Program							
	Indeks Kematangan Organisasi				3	3	100%	
	Nilai komponen laporan kinerja				15	10,32	68,80%	
	Hasil survey SKM/IKM)				80	80	100%	
	Nilai komponen rencana aksi RB General				60	57,94	96,57%	
	Nilai komponen rencana aksi RB Tematik				12	11,45	95,42%	
	Rata-rata Capaian Kinerja pada koordinasi Administrasi Umum				80	80	100%	
	Persentase layanan setda yang diberikan tepat waktu/sesuai SOP				100	100	100%	
	Persentase aduan yang masuk				50	50	100%	
	Persentase Laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP				100 80	100 80	100% 100%	
	Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai standar				85	85	100%	
	Persentase aset setda dalam kondisi baik				85	85	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase sarpras dalam kondisi baik							
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan				100	100	100%	
	Kegiatan 21.1.1 **Penataan Organisasi** **Sasaran Kegiatan 21.1.1** Meningkatnya kepatuhan penyampaian laporan oleh PD Meningkatnya kualitas penyajian dan analisa data kinerja Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi organisasi Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam menyusun anjab, abk, dan dokumen Kelembagaan Meningkatnya kepatuhan OPD dalam menyusun rencana aksi Meningkatnya kualitas evaluasi dan pengendalian rencana aksi Meningkatnya SKM Perangkat Daerah terhadap pelayanan masyarakat Meningkatnya Kesiapan PD dalam penilaian kepatuhan pelayanan public Terlaksananya koordinasi Administrasi Umum	1.063.511.660	907.233.114	85%				117,64%
	Indikator Kinerja Kegiatan							
	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu (%)				100	100	100%	
	Persentase ketepatan perhitungan data kinerja				100	100	100%	
	Persentase konsistensi analisa capaian kinerja				100	100	100%	
	Nilai hasil evaluasi kelembagaan				100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase PD yang memiliki dokumen anjab, abk, dan Dokumen kelembagaan secara lengkap dan tepat waktu				100	100	100%	
	Persentase PD yang menyusun rencana aksi RB sesuai ketentuan dan tepat waktu				100	100	100%	
	Persentase output rencana aksi RB yang tercapai sesuai dengan target				100	100	100%	
	Persentase perangkat daerah yang nilai SKM kategori Baik				100	100	100%	
	Jumlah PD yang siap dalam penilaian kepatuhan pelayanan public				50	50	100%	
	Jumlah koordinasi Administrasi Umum				4	4	100%	
	Sub Kegiatan 21.1.1.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	349.961.900	336.540.640	96,16%				103,99%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi				1	1	100%	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun				5	5	100%	
	Sub Kegiatan 21.1.1.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	199.679.000	171.653.268	85,96%	1	1	100%	116,33%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	Sub Kegiatan 21.1.1.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disusun **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disusun	349.973.080	271.573.594	77,60%	2	2	100%	128,87%
	Sub Kegiatan 21.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	163.897.680	127.465.612	77,77%	1	1	100%	128,58%
	Program 21.2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah **Sasaran Program** Sasaran Program Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	5.096.924.250	4.102.292.983	80,49%	100	100	100%	124,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Indikator Program Persentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan							
	Kegiatan 21.2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan **Sasaran Kegiatan 21.2.1** Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun	2.492.091.800	2.111.736.841	84,74%	100	100	100%	118,01%
	Kegiatan 21.2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Kegiatan 21.2.2** Tersedianya Data Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Data dan Informasi yang terintegrasi	713.328.450	151.395.282	21,22%	100	100	100%	471,17%
	Kegiatan 21.2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Kegiatan 21.2.3** Kegiatan Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Berbasis Hasil **Indikator Kinerja Kegiatan** Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.523.298.500	1.564.899.124	102,73%	100	100	100%	97,34%
	Kegiatan 21.2.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	368.205.500	274.261.736	74,49%	100	100	100%	134,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 21.2.4 Optimalnya Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
	Program 21.3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Program** Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan Manusia, Pemerintahan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan **Indikator Kinerja Program** Indikator Program Keselarasan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan Indikator Keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA Indikator Keselarasan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	6.447.088.450	3.851.333.004	59,74%	 100 100 100	 100 100 100	 100% 100% 100%	167,39%
	Kegiatan 21.3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia **Sasaran Kegiatan 21.3.1** Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	3.375.577.250	2.060.293.232	61,04%	 100 100	 100 100	 100% 100%	163,84%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							
	Kegiatan 21.3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) **Sasaran Kegiatan 21.3.2** Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1.679.922.700	989.029.811	58,87%	 100 100	 100 100	 100% 100%	169,86%
	Kegiatan 21.3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **Sasaran Kegiatan 21.3.3** Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.391.588.500	802.009.961	57,63%	100	100	100%	173,51%
	Program 21.4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah **Sasaran Program** Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase rekomendasi hasil riset yang digunakan dalam dokumen Perencanaan/Pelaksanaan	8.871.840.000	10.300.042.749	116,10%	 65 100	 65 100	 100% 100%	86,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase kajian berbasis bukti yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Persentase fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah				65 100	65 100	100% 100%	
	Kegiatan 21.4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **Sasaran Kegiatan 21.4.1** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	306.632.000	252.542.949	82,36%	100	88	88%	106,85%
	Kegiatan 21.4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan **Sasaran Kegiatan 21.4.2** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3.291.844.500	2.888.509.500	87,75%	100	98,50	98,50%	112,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 21.4.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan **Sasaran Kegiatan 21.4.3** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4.257.686.000	6.404.002.312	150,41 %	100	99,68	99,68%	66,27%
	Kegiatan 21.4.4 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi **Sasaran Kegiatan 21.4.4** Terselenggaranya Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.015.677.500	754.987.988	74,33%	100	94,3	94,3%	126,86%
	Program 21.5 Program Penyelenggaraan Pengawasan **Sasaran Program** Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Indikator Kinerja Program** Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.789.813.350	2.070.546.139	74,21%	100	100	100%	134,75%
	Kegiatan 21.5.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Sasaran Kegiatan 21.5.1** Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.747.758.850	1.357.932.985	77,69%	52	52	100%	128,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
	Kegiatan 21.5.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **Sasaran Kegiatan 21.5.2** Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Auditor Eksternal **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan TLHP Jumlah Penyelesaian TLHP BPK RI dan BPKP	1.042.054.500	712.613.154	68,38%	100	100	100%	146,24%
	Program 21.6 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi **Sasaran Program** Meningkatnya Penilaian Integritas Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Program** Nilai SPI	1.723.775.000	954.088.467	55,34%	100	100	100%	180,70%
	Kegiatan 21.6.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan **Sasaran Kegiatan 21.6.1** Terlaksananya Penyusunan PKPT Berbasis Risiko **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penyusunan Dokumen PKPT yang berbasis risiko	233.760.500	215.608.348	92%	1	1	100%	108,69%
	Kegiatan 21.6.2 Pendampingan dan Asistensi **Sasaran Kegiatan 21.6.2** Terlaksananya Sosialisasi SPI **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi	1.490.014.500	738.480.119	49,56%	51	51	100%	201,77%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
22	**Sasaran Strategis** Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah **Indikator Kinerja SS** Opini BPK terhadap laporan keuangan				WTP	WTP		
	Program 22.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya penyusunan Anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Indikator Kinerja Program** Persentase dokumen peanggaran tepat waktu sesuai ketentuan	12.964.941.100	8.311.074.162	64,10%	100	100	100%	156%
	Kegiatan 22.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Sasaran Kegiatan 22.1.1** Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana anggaran daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	6.296.539.450	4.175.234.230	66,30%	100	100	100%	150,82%
	Kegiatan 22.1.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah **Sasaran Kegiatan 22.1.2** Meningkatnya koordinasi pengelolaan kas Meningkatnya efisiensi dan ketepatan waktu penerbitan SP2D **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3.410.499.000	2.166.700.636	63,53%	100	100	100%	157,41%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Rata-rata waktu diterbitkan SP2D sejak diterimanya SPM SKPD				100	100	100%	
	Kegiatan 22.1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah **Sasaran Kegiatan 22.1.3** Meningkatnya kualitas laporan keuangan Meningkatnya kualitas data dan informasi laporan keuangan perangkat daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase laporan keuangan yang disampaikan/disajikan Perangkat Daerah sesuai SAP Persentase Kualitas Data dan Informasi Laporan Keuangan Perangkat daerah	3.257.902.650	1.969.139.296	60,44%	 100 100	 100 100	 100% 100%	165,45%
	Program 22.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar **Indikator Kinerja Program** Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	7.991.773.250	6.007.322.086	75,16%	90	99	110,54%	147,07%
	Kegiatan 22.2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sasaran Kegiatan 22.2.1** Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib	7.991.773.250	6.007.322.086	75,16%				147,07%

NO	URAIAN			BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
				ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
			Meningkatnya Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tepat waktu				90	99	110,54%	
			Indikator Kinerja Kegiatan							
			Persentase Peningkatan Penertiban Pengelolaan Aset				90	99	110,54%	
			Laporan Penatausahaan BMD secara periodik							

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

TUJUAN 1: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN EKONOMI YANG HANDAL BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata, pemerintah Kabupaten Kotabaru menggunakan 1 (satu) indikator untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini yaitu pertumbuhan ekonomi, yang dapat target dan realisasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,35	4,58	4,29	5,30	5,3-5,97	5,34	100,75%	5,63 -5,91	94,84%

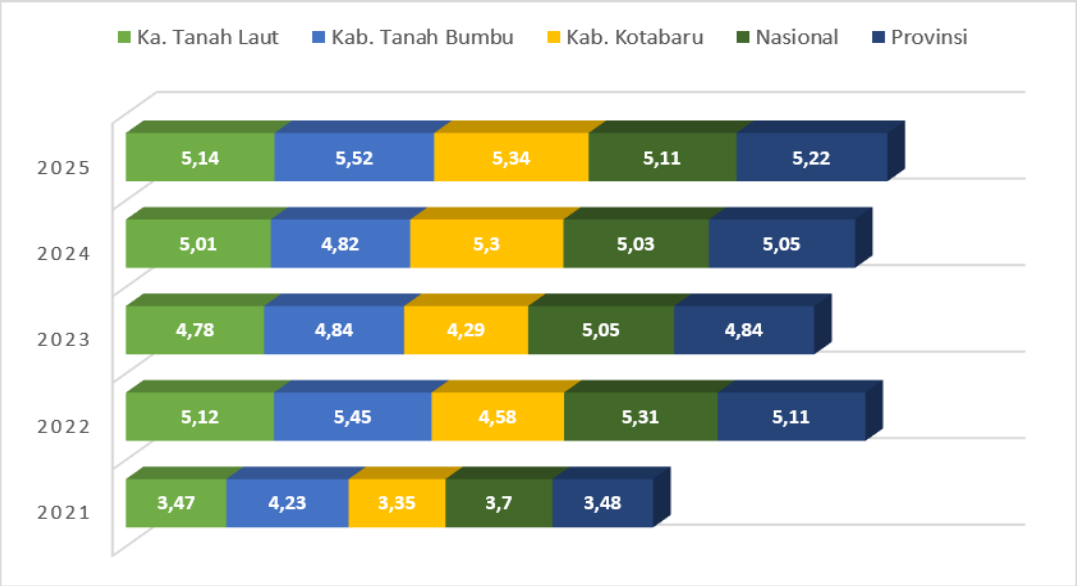
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 5,34% dari target 5,3-5,97%, sehingga persentase laju capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 109,75% atau masuk kategori ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru mencapai 5,34%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 5,30%.

Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 5,34% dibandingkan dari target RPJMD sebesar 5,63-5,91%, sehingga persentase capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 94,84%.

Grafik II.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: BPS Nasional tahun 2026.

Berdasarkan grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hingga 2025, dinamika perekonomian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun berujung pada peningkatan yang sangat progresif. Pada periode awal (2021–2023), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru masih berada pada fase pemulihan dengan capaian yang relatif lebih lambat dibandingkan daerah komparasinya. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 3,35%, kemudian meningkat menjadi 4,58% pada 2022, sebelum akhirnya sedikit terkoreksi ke angka 4,29% pada tahun 2023. Sepanjang tiga tahun tersebut, performa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru secara konsisten masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan maupun pencapaian Nasional.

Namun demikian, kinerja perekonomian Kabupaten Kotabaru mengalami titik balik (turning point) dan akselerasi yang luar biasa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi melesat tajam mencapai angka 5,30%, sekaligus berhasil melampaui capaian Kabupaten Tanah Laut (5,01%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (4,82%), serta memposisikan diri di atas rata-rata pencapaian Nasional (5,03%) dan Provinsi (5,05%). Momentum positif ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun

2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,34%. Meskipun pada tahun 2025 posisinya berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu, capaian Kabupaten Kotabaru tetap mencatatkan performa yang sangat baik karena tetap konsisten berada di atas angka rata-rata pertumbuhan tingkat Provinsi (5,22%) dan Nasional (5,11%).

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 2021–2025 menunjukkan resiliensi dan daya ungkit yang sangat positif. Meskipun sempat mengalami ketertinggalan laju pertumbuhan pada paruh pertama periode (2021–2023), Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil mengeksekusi strategi akselerasi pembangunan dan ekonomi yang terbukti efektif, ditandai dengan lonjakan tajam pada tahun 2024 dan tren keberlanjutan di tahun 2025 yang sukses menembus di atas target rata-rata provinsi dan nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan, stimulus, maupun program prioritas daerah yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat. Fokus Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke depan adalah menjaga stabilitas dan konsistensi momentum pertumbuhan ini, serta terus mengoptimalkan sektor-sektor riil unggulan yang terbukti menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi daerah

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan
2. Peningkatan investasi daerah di Kabupaten Kotabaru yang mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat
3. Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi
4. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
5. Kabupaten Kotabaru menjadi daerah dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Tersedianya kawasan industri di Kabupaten Kotabaru
7. Tersedianya pelabuhan yang dapat digunakan sebagai hub logistik regional

8. Adanya dukungan kebijakan dari level pemerintah pusat hingga kabupaten untuk mendorong peningkatan investasi

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

1. Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
2. Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
3. Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun
4. Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur
5. Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar
6. Sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang kurang baik
7. Adanya perizinan yang rumit dan berbelit-belit sehingga minat investasi rendah
8. Adanya degradasi lingkungan akibat dampak pertambangan dan abrasi garis pantai
9. Kredit usaha belum dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM
10. Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah PulauLaut

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berfokus pada strategi diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan potensi-potensi baru di luar sektor primer, seperti sektor industri pengolahan, jasa, pariwisata, serta optimalisasi sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Upaya ini diperkuat dengan percepatan pengembangan kawasan industri serta penerapan konsep ekonomi biru dan ekonomi sirkuler guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang inovatif. Seluruh langkah pengembangan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan demi menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Guna mendukung akselerasi pertumbuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan perhatian besar pada penyediaan

infrastruktur dasar seperti perbaikan kualitas jalan dan keandalan pasokan listrik yang menjadi urat nadi produktivitas daerah. Sejalan dengan pembangunan fisik, dilakukan pula perbaikan iklim investasi melalui percepatan layanan perizinan dan penyederhanaan regulasi daerah. Strategi investasi ini juga diintegrasikan dengan kebijakan penggunaan tenaga kerja lokal melalui kemitraan strategis dengan para investor, sehingga setiap investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pada sisi penguatan modal manusia dan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan mendorong masyarakat untuk meraih kualifikasi minimal diploma atau sarjana guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, aspek kesetaraan gender turut diperkuat melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita. Sementara itu, daya saing ekonomi lokal dipacu melalui pendampingan intensif pada UMKM lewat pusat inkubasi bisnis daerah serta percepatan digitalisasi produk. Melalui sinergi berbagai kebijakan ini, diharapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru mampu tumbuh secara stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)

Sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat, peningkatan produksi tanaman pangan baik beras maupun non beras terus diupayakan untuk memantapkan swasembada pangan dan seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap pangan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk. Kawasan peruntukan pengembangan pertanian tanaman pangan berdasarkan RTRW Kabupaten Kotabaru Seluas 45,270.96 Ha, berlokasi di Kecamatan Pamukan utara, pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pulau Sebuku, dan Pulau Laut Barat.

Adapun di Kecamatan Kelumpang Hulu seluas 29,024.64 Ha untuk pertanian tanaman pangan, seluas 6,246.32 Ha yang berlokasi di Kecamatan

Hampang, seluas 16,246.32 Ha pertanian lahan kering yang berlokasi di seluruh kecamatan, serta 19,513 Ha lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sasaran “meningkatnya kinerja sector pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)” diukur melalui 1 (satu) indikator yang diperjanjikan yaitu PDRB Sektor Pertanian dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel II.8
Capaian PDRB sektor pertanian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
PDRB Sektor Pertanian	13,45%	11,10%	10,71%	10.63%	10,03%	10,66	106,28%	10,04%	106,17

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026

Pencapaian realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 yaitu sebesar 10,66% dibandingkan target 10,03% yaitu 106,28% atau masuk kategori capaian ***Sangat Tinggi***.

Pada tahun 2025, realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Kotabaru mencapai 10,66%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai sebesar 10,68%.

Pencapaian realisasi sementara PDRB sektor pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 terealisasi dengan angka sebesar 10,66% dibandingkan target akhir RPJMD yaitu 10,04% maka capaiannya sebesar 106,17% yaitu sudah melebihi target yang diharapkan.

Konstribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2025 mencapai 2.306.429,51 Juta Rupiah. Sub Sektor Tanaman Pangan, Peternakan dan Jasa Pertanian serta tanaman perkebunan merupakan kontributor terbesar dalam menciptkan nilai tambah lapangan usaha pertanian. Sub Sektor Tanaman Perkebunan khususnya Perkebunan Tahunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator PDRB sektor pertanian, sebagai berikut:

1. Kebutuhan manusia akan pangan di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah
2. Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai bantuan dan subsidi input
3. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi pada sektor perikanan dan kehutanan
4. Kabupaten Kotabaru memiliki lahan yang luas dan subur untuk pengembangan sektor pertanian
5. Tersedianya infrastuktur pertanian seperti irigasi sehingga lahan lebih produktif
6. Adanya kemajuan teknologi di bidang pertanian
7. Akses pasar yang terbuka dengan adanya pelabuhan dan kemitraan dengan industri pengolahan hasil pertanian

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator PDRB sektor pertanian, sebagai berikut:

1. Teknologi yang digunakan petani masih tradisional dan belum menerapkan smart agriculture untuk peningkatan produktivitas
2. Akses pembiayaan permodalan petani belum optimal karena sifat usaha yang belum bankable
3. Introduksi teknologi produksi pertanian yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha di bidang pertanian
4. Pelaku usaha pertanian didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat
5. Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi
6. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik
7. Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan
8. Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (middlemen)
9. Keterbatasan infrastruktur penyimpanan produk pertanian dan jalan usaha tani dalam kondisi kurang optimal

10. Kurangnya insentif bagi petani kecil untuk pengembangan usaha

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru melaksanakan serangkaian strategi komprehensif yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Fokus utama dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi sumber daya lahan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan pendampingan penggunaan introduksi teknologi pertanian maju serta penguatan basis data melalui pemetaan lahan pertanian berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Langkah ini memastikan setiap intervensi tanam dilakukan secara presisi dan optimal, yang didukung penuh dengan fasilitasi penyediaan benih dan bibit unggul bagi petani untuk menjamin kualitas produksi sejak dini.

Peningkatan infrastruktur juga menjadi pilar utama dalam akselerasi produk pertanian di Kotabaru. Pemerintah secara konsisten melakukan pembangunan prasarana fisik serta rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung lainnya. Guna menjaga stabilitas produksi, pengawasan ketat terhadap peredaran hewan dan produk asal hewan, serta penanggulangan hama dan wabah tanaman dilakukan secara intensif. Upaya perlindungan ini diperkuat dengan penyusunan kebijakan daerah terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), guna memastikan ketersediaan lahan produktif di tengah dinamika pembangunan daerah.

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen pada penguatan kapasitas dari hulu ke hilir. Program peningkatan kapasitas penyuluh, penguatan kelembagaan petani, hingga pelatihan pengelolaan keuangan usaha tani menjadi prioritas untuk mengubah pola pikir petani menjadi lebih bisnis-orientis. Strategi ini dilengkapi dengan program regenerasi pelaku usaha pertanian guna menarik minat generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sektor ini.

Sebagai langkah hilirisasi dan penguatan ekonomi petani, telah didorong pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berfungsi memotong rantai distribusi agar produk dapat terserap pasar secara langsung dengan harga yang adil. Untuk mendukung permodalan, pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan murah melalui Kredit Usaha

Rakyat (KUR). Melalui sinergi seluruh program tersebut, diharapkan sektor pertanian mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang tangguh, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap total PDRB Kabupaten Kotabaru

Berikut progam atau kegiatan yang mendukung faktor pendukung dan factor penghambat sehingga pencapaian PDRB sektor pertanian Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 berjalan dengan lancar dengan melaksanakan program sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

      Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sehingga bisa mendorong peningkatan PDRB sektor pertanian di kabupaten Kotabaru. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan jagung adalah dengan Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi padi sawah seluas 100 ha dilaksanakan di Kec. Pulaulaut Timur, Kec. Pamukan Selatan, Kec. Pulaulaut Tengah, Kec. Kelumpang Utara, dan Kec. Pamukan Utara yang masing–masing kecamatan memperoleh alokasi bantuan seluas 20 ha. Sedangkan lokasi kegiatan PMI jagung seluas 20 ha dilaksanakan di Kec. Kelumpang Hilir dan Pamukan Barat yang masing – masing Kecamatan alokasi seluas 10 ha. Untuk mendukung kegiatan tersebut juga diadakan bantuan berupa sarana produksi berupa benih, pupuk dan obat-obatan sesuai dengan dosis dan kebutuhannya selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan monitoring selama pelaksanaan kegiatan.

      Peningkatan produksi pada komoditas hortikultura berupa pengembangan cabai rawit beserta alat pengolah tanah (Cultivator) di Kec. Kelumpang Selatan, pengembangan aneka sayuran beserta alat pengolah tanah (Cultivator) yang tersebar di Kec. Pulaulaut Utara, Kec. Pulaulaut Sigam, Kec. Pulau Sebuku, Kec. Sungai Durian dan Kec. Pamukan Selatan

Di bidang peternakan dan kesehatan hewan kegiatan yang dilaksanakan dengan pengadaan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang didukung dengan kegiatan pembinaan dan monitoring dalam hal penanamannya sehingga bisa mencukupi kebutuhan pakan ternak yang berkualitas untuk budidaya ternak di Kabupaten Kotabaru. Selain itu untuk meningkatkan produksi ternak juga dilaksanakan pengadaan bibit ternak ayam buras di Kec. Pulaulaut Tengah, pengadaan ayam petelur di Kec. Pulaulaut Timur yang di dukung dengan kegiatan monitoring dan pengawasan produksi daging unggas dan telur ayam ras di Kec. Pulaulaut Tengah dan Kec. Kelumpang Hilir.

Untuk bidang perkebunan peningkatan produksi dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan standarisasi perkebunan, diantaranya dengan melaksanakan fasilitasi kemitraan tentang kebijakan dan perlindungan pemasaran serta Penyelesaian Permasalahan Plasma dan PBS (Perusahaan Besar Swasta) Selain itu dilaksanakan pendampingan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun, Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan sumber daya manusia yang juga mendukung kegiatan Pemerintah Pusat. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan sosialisasi STDB (Standar Tanda Daftar Budidaya) komoditas sawit untuk pekebun, pendataan STDB serta pemetaan dan pemeriksaan lapangan kegiatan STDB di Kec. Kelumpang Hilir, Kec. Pulaulaut Utara dan Kec. Pamukan Barat. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola usaha perkebunan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan.

Dari segi pengawasan untuk sarana produksi dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di kios pupuk yang berada di beberapa kecamatan serta melaksanakan rapat koordinasi dengan komisi pengawasan pupuk bersubsidi yang bertugas untuk mengawasi penyalurannya.

Kegiatan pascapanen untuk menambah nilai hasil jual komoditas hortikultura salah satunya dengan mengadakan pelatihan pengaolahan pisang yang dijadikan keripik di Kec. Pulaulaut Utara.

b. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota.

Kegiatan pengawasan penyediaan benih/ bibit ternak dilaksanakan hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru, sedangkan untuk hijauan pakan ternak ini dalam hal ini bungkil sawit sebagai stok bahan pakan ternak dilaksanakan monitoring di Kec. Kelumpang Hilir dan Kec. Pulaulaut Barat. Pelaksanaan monitoring untuk pengawasan peredaran pakan ternak dilaksanakan di lokasi Kec. Pulaulaut Utara, Kec. Kelumpang Hilir, Kec. Pulaulaut Tengah, Kec. Pamukan Barat.

c. Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi ternak secara langsung melalui Inseminasi Buatan (IB) yang dilaksanakan di Kec. Pulaulaut Tengah, Kec. Kelumpang Hilir, Kec. Pamukan Barat dan Kec. Sampanahan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pelayanan Ternak Terpadu Si Komandan yang dilaksanakan hampir disemua kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan juga didukung dengan monitoring dan pembinaan manajemen sapi di Kebun Sawit. Selain hal tersebut di atas, untuk pengembangan peternakan lebih lanjut dilaksanakan juga identifikasi potensi pengembangan peternakan di Kec.Pamukan Selatan dan Kec. Kelumpang Barat.

d. Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian

Penyesuaian data lahan pertanian (Ground Checking) sesuai yang disusun oleh konsultan perencana pada tahun sebelumnya untuk rencana usulan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta melakukan sosialisasi terkait lahan pertanian panan dan berkelanjutan dengan mengundang perwakilan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang menjadi potensi padi sawah

e. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun Jalan Usaha Tani di kecamatan Pulaulaut Timur, pembangunan Jalan Produksi Perkebunan di kecamatan Pamukan Barat, Kelumpang Barat dan Kelumpang Selatan, Pembangunan Kandang Komunal di Kecamatan Kelumpang Selatan serta pembangunan irigasi tersier di kecamatan Pulaulaut Tengah. Pembangunan prasarana pertanian yang dilaksanakan sangat mendukung peningkatan produksi pertanian, terutama di daerah sentra produksi padi.

2. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

      Kegiatan ini diantaranya adalah pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit Lump Skin Disease (LSD) termasuk kegiatan biosekuriti. Dan juga sosialisasi pencegahan hewan menular dan zoonosis di daerah, monitoring dan pembinaan serta melakukan kegiatan disenfeksi di lokasi kandang dan sekitarnya yang terindikasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di BPP Serongga dan desa Telaga Sari kecamatan Kelumpang Hilir dan Pulaulaut Utara. Melaksanakan surveilans terhadap penyakit Brucellosis, Penyakit Flu Burung an Keamanan Pangan asal hewan (daging sapi dan daging ayam) serta dilakukannya tindaklanjut terhadap hasil tersebut. Selain itu pelaksanaan vaksinasi PMK dan Jembrana pada sapi dan unggas.
   b. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM.

      Dilaksanakan monitoring dan pembinaan Pengawasan Lalu Lintas Ternak di Check Point Sengayam di TPH Sengayam Kec. Pamukan Barat.
3. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peertanian,** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini adalah pengadaan bahan-bahan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit serta melaksanakan Gerakan Pengendalian Pra Tanam Padi Sawah MT Oktober-Maret di kecamatan Pulaulaut Timur dan Pulaulaut Utara, Pengendalian Hama Penyakit dan pelaksanaan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman di Kecamatan Kelumpang Selatan dan Kecamatan Pulaulaut Timur.

4. **Program Penyuluhan Pertanian,** Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai wadah pembelajaran para petani agar selalu mendapatkan informasi terbaru dalam dunia pertanian. Adapun aktivitas sudah dilaksanakan adalah dilaksanakannya Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian dan koordinasi kegiatan penyuluhan se Kabupaten Kotabaru di Kotabaru, Penyusunan Programa Kabupaten Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Latihan dan Konsultasi/Lakon BPP di kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pulaulaut Timur, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kec. Kelumpang Tengah, Kecamatan Tanjung Selayar dan Kecamatan Pulaulaut Barat dan pelaksanaan demplot serta pengadaan prasarana dan sarana BPP di kabupaten Kotabaru berupa Sepeda Motor untuk Penyuluh Pertanian.

 Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi Sawah Kelompok Tani Suka Maju Desa Sungai Hanyar Kecamatan Kelumpang Utara	 Pendampingan/ Pengawalan Distribusi Bibit Durian ke Kelompok Tani Karya Bersama desa Sakalimau Kecamatan Pamukan Selatan	 Pelayanan Ternak Terpadu Sikomandan Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar
 Monitoring Budidaya Cabai dan Sayuran Pada Kelompok Tani Swadaya Poktan Maju Bersama Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat	 Operasi Pasar Dalam rangka pelaksanaan Pasar Murah Menyambut Hari Raya Idul Adha Kecamatan Kelumpang Hulu	 Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi (Agrobisnis Padi Sawah) seluas 100 hektar di Kabupaten Kotabaru
 Kelompok Wanita Tani (KWT) Mentari Desa Sungai Nipah Kecamatan Kelumpang Selatan	 Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan Kegiatan STDB di desa Telaga Sari	 Pendataan STDB di desa Salino

		
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani "Anugerah II" Desa Kulipak Kec. Pulaulaut Timur	Pembangunan Irigasi Tersier Kelompok Tani "Usaha Makmur" Desa Salino Kec. Pulaulaut Tengah	Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Siayuh Kec. Kelumpang Barat

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Sektor perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan karena sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Kotabaru terdiri atas banyak daerah pantai yang memiliki sekitar 110 pulau kecil dengan nelayan laut sebanyak 12.085 jiwa, dengan luas laut yang dimiliki adalah 384.900 Ha dengan panjang garis pantai 923,53 km. Luas hutan mangrove 56.325,08 km, luas padang lamun 1.079,22 km, luas terumbu karang 10.223,02 km, luas KKPD (Kawasan Konsevasi Perairan Daerah) 186.679,28 km dan luas perairan wilayah kelola 5.468,33 km.

Pada Tahun 2023 Produksi Perikanan Tangkap Laut sebesar 65.839,40 Ton dan Produksi perairan umum / sungai sebesar 6.345,08 ton. Kawasan Budidaya air payau (tambak) dengan luas lahan 84.550.250 M^2, Tambak semi intensif dengan luas 20.400 $M^{2,}$ budidaya air tawar (kolam) dengan luas areal 78.757 M^2, Budidaya Keramba Jaring Apung Laut dengan luas 156 M^2, Budidaya Rumput Laut dengan luas 77.000 M^2 dengan Produksi Budidaya Perikanan sebesar 29.733,08 ton

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi

oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya

Pada saat ini, udang masih dijadikan sebagai komoditas eksport andalan di Kabupaten Kotabaru, disamping itu ada komoditas ikan lainnya antar pulau yang pemasarannya ke Banjarmasin, Surabaya, Banyuwangi, Tangerang, Jakarta, Makasar sampai saat ini masih terus dikembangkan, misalnya Tenggiri, Ikan Menangin, kakap merah, cumi, ubur-ubur kering dan ikan-ikan lainnya, serta pakan ternak yang mempunyai nilai ekonomis dan permintaan pasar yang cukup tinggi.

Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya diukur melalui indikator Total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya), dengan target, realisasai dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel. II.9
Capaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	93.450,79 Ton	104.020,98 Ton	101.917,56 Ton	117.802,11 Ton	105.264,16 Ton	121.483,07 Ton	115,40%	105.895,75 Ton	114,71%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Tahun 2025 terealisasi sebesar 121.483,07 Ton dari target 105.264,16 Ton sehingga persentase capaian sebesar 115,40% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Total Produksi Perikanan realisasi mencapai 121.483,07 Ton. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3.680,96 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai sebesar 117.802,11 Ton

Pencapaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Tahun 2025 terealisasi sebesar 121.483,07 Ton terhadap target RPJMD sebesar 105.895,75Ton yaitu mencapai 114,71 %.

Sektor perikanan juga memiliki kontribusi dari produksi perikanan apabila mengalami peningkatan maka berdampak pula pada aspek kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, sumber daya perikanan dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Sehingga peningkatan produksi perikanan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), sebagai berikut:

1. Kebutuhan manusia akan protein di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah
2. Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui berbagai bantuan dan subsidi input
3. Potensi sumber daya laut yang tinggi di WPPNRI 712
4. Kabupaten Kotabaru memiliki lahan yang luas untuk pengembangan tambak
5. Tersedianya infrastruktur pelabuhan perikanan
6. Ketersediaan teknologi modern untuk pengembangan perikanan budidaya
7. Terbukanya akses pemasaran produk perikanan dengan adanya pelabuhan dan kedekatan lokasi dengan IKN

Sedangkan, faktor penghambat capaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), sebagai berikut:

1. Teknologi yang digunakan pembudidaya ikan masih tradisional dan belum menerapkan smart aquaculture untuk peningkatan produktivitas
2. Alat tangkap dan armada kapal yang digunakan nelayan masih tradisional
3. Akses pembiayaan permodalan pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal karena sifat usaha yang belum bankable

4. Introduksi teknologi produksi perikanan yang modern belum tersebar merata pada pelaku usaha
5. Pelaku usaha perikanan didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat
6. Perubahan iklim membuat pola produksi pembudidaya ikan mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi
7. Alih fungsi lahan pesisir menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik
8. Keterbatasan dalam pengelolaan usaha sehingga usaha cenderung stagnan
9. Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan tengkulak (middlemen)
10. Adanya kerusakan terumbu karang dan penurunan luas mangrove yang mengancam habitat ikan

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengintegrasikan strategi pengembangan perikanan tangkap dan budidaya secara simultan. Akselerasi produksi didorong melalui pembangunan infrastruktur perikanan yang merata serta rehabilitasi sarana prasarana pendukung di wilayah-wilayah potensial. Pada sektor perikanan tangkap, fokus utama diarahkan pada modernisasi alat tangkap yang tidak hanya meningkatkan volume tangkapan tetapi juga bersifat ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, pada sektor budidaya, dilakukan perluasan tambak pada lahan produktif yang didukung dengan fasilitasi penyediaan benih unggul dan introduksi teknologi budidaya maju untuk memaksimalkan hasil panen per siklus.

Keberhasilan peningkatan tonase produksi tidak lepas dari intervensi pada kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan sebagai garda terdepan pendampingan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya dilakukan agar para pelaku usaha memiliki daya saing yang lebih kuat. Tidak hanya dari sisi teknis produksi, para nelayan dan pembudidaya juga dibekali dengan kemampuan pengelolaan keuangan usaha dan kemudahan akses terhadap pembiayaan

perbankan, sehingga skala usaha dapat terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Guna meminimalisir kehilangan hasil (post-harvest losses) dan meningkatkan nilai ekonomi produk, Kabupaten Kotabaru membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) modern yang terintegrasi dengan Cold Chain System. Sistem rantai dingin ini memastikan kualitas produksi tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Dari sisi hilirisasi, pembentukan badan usaha milik nelayan dan pembudidaya menjadi solusi strategis dalam memutus rantai distribusi yang panjang, sehingga produk dapat tersalurkan langsung ke pasar dengan harga yang kompetitif. Seluruh upaya peningkatan produksi ini tetap berpijak pada prinsip kelestarian lingkungan melalui program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, guna memastikan bahwa peningkatan produksi perikanan di masa depan tetap didukung oleh daya dukung lingkungan yang sehat.

Dalam menunjang Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota

✓ **Pembinaan Kelembagaan Nelayan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berupaya menggenjot program pemberdayaan nelayan. Pada Kegiatan ini jumlah pengembangan kapasitas nelayan kecil sebanyak 200 orang. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, bertujuan untuk membina para nelayan untuk mendorong agar dapat naik kelas menjadi koperasi nelayan, meningkatkan kemampuan kelompok nelayan agar lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, dengan salah satunya melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan baik itu berbentuk KUB atau bahkan menjadi koperasi nelayan.

✓ **Pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan**

Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan disingkat SEHAT NELAYAN, berguna dalam pemberian kepastian hukum hak atas tanah nelayan, meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Republik Indonesia. Kegiatan sertifikasi hak atas tanah tersebut dimaksudkan untuk menaikkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil agar merubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan maupun non bank. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/ PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan.

Dokumentasi Kegiatan :









Pemberian Bantuan kepada kelompok nelayan

(Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, fishfinder dan mesin kapal)

2. **Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10GT yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota.**
3. **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**

   Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sebagai berikut:

   a) Melaksanakan koordinasi dan monitoring pengawasan perikanan darat, potensi sumberdaya perikanan, Identifikasi, Inventarisasi;
   b) Monitoring Pengawasan terhadap potensi Sumberdaya Perikanan Darat, ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru;
   c) Mendampingi bidang pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kalimantan Selatan melaksanakan pengawasan di Kabupaten Kotabaru;
   d) Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

✓ **Penanganan Konflik Penangkapan Ikan Dan Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan**

Melakukan koordinasi ke beberapa warga dan koordinasi dengan PPL Perikanan setempat, dan mensosialisasikan ke masyarakat tentang penangkapan ikan diwilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainya agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil perikanan tangkap dari sungai,danau, dll yang ada di daerah mereka, juga memberi informasi alat tangkap apa saja yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan. Penanganan Konflik Penangkapan Ikan Dan Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan. Penyebab umum dari munculnya perselisihan nelayan adalah akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang yang operasionalnya pada perairan yang sama-sama dimanfaatkan oleh nelayan lain yang memiliki alat tangkap yang tidak

dilarang, alat tangkap yang satu mengganggu alat tangkap yang lain pada saat sama-sama di operasikan.

Daftar Stakeholder Terkait

No	Uraian	Alamat	Kontak/ Jabatan	Telp
1	Satpolair Polres Kotabaru	Pelabuhan Perry Stagen Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara	Aipda Ponco	081348639540
			Toto	081349652575
2	PSDKP Tarakan	Jalan Aki Balak RT. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	Telpon kantor Hamzah	0551-3816565 081218191018
3	Satwas SDKP Kotabaru	Komplek PPI Kabupaten Kotabaru, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara		
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi	Banjarbaru	Rizal Kabid PSDKP	081348423303
			Singgih Kasi Pengawasan	081255576139
5	TNI AL Kotabaru	Pelabuhan Perry Stagen Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara	Kapten Priyono Pasops	081379687764
			Pelda Yusuf	081337267954
6	Koordinator PPL Kab. Kotabaru	Dinas Perikanan Kotabaru	Arif Rahman Hakim	081328654671

✓ **Pendampingan Kegiatan Pengawasan di perairan baik oleh Pusat, Provinsi maupun oleh instansi terkait lainnya seperti Satpolair dan Angkatan Laut**

Kegiatan yang dilakukan selama pendampingan, sebagai berikut:

a) Patroli bersama satwas PSDKP
b) Pengawasan Kepatuhan kelengkapan dokumen perizinan kapal
c) Sosialisasi mengenai pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumberdaya perikanan .
d) Menghimbau kepada nelayan agar taat dan berkomitmen untuk tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut agar keberlanjutan.





4. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan melaksanakan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan sebanyak 4 dokumen yaitu Laporan Statistik Tangkap (PUD dan LAUT) triwulan I – IV. Jumlah RTP Perikanan Tangkap Laut sebanyak 12.085 orang. RTP Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan sebanyak 1.021 RTP. Total Produksi Tangkap sebesar **72.184,48 Ton**. terdiri dari Produksi Tangkap Laut **65.839,40** Ton dan Produksi Tangkap Perairan Umum Daratan **6.345,08** Ton.





✓ Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, melaksanakan berupa bantuan hibah berupa:

Dokumentasi Serah Terima Bantuan Alat Penangkapan Ikan



Bina Bersama Desa Rampa Kec.Pulau Sebuku
Trammelnet 158 Set



Pamily Group Desa Hilir Muara Kec.Pulaulaut Sigam
Gilnet 11 Set



Jaya Bersama Desa Pantai Kec.Kelumpang Selatan Trammelnet 240 Set



Nelayan Kita Desa Tanjung Pengharapan Kec.Pulaulaut Timur Gillnet 188 Se



Putra Nelayan Desa Pudi Seberang Kec.Kelumpang Utara Gillnet 379 Set



Samudera Bersinar Desa Sekandis Kec.Pamukan Selatan Trammelnet 158 Set



Sumber Usaha Desa Teluk Sirih Kec.Pulaulaut Selatan Waring (Bagang) 46 Roll



Tunas Baru Desa Semayap Kec.Pulaulaut Utara Gillnet 198 Set



Mitra Rampa Desa Rampa Cengal Kec.Pamukan Selatan Gillnet 33 Set



Kakap Merah Desa Pudi Kec.Kelumpang Utara Gillnet 218 Set



Karang Panci Desa Sungai Pinang Kec.Kelumpang Tengah Trammel net 218 Set



Belukun Desa Rampa Kec.Pulaulaut Utara



Bura Sendana Desa Kerasian Kec.Pulaulaut Kepulauan GPS 10 Buah



Kayuh Baimbai Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah Mesin Kapal 11 Buah

5. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota

✓ **Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)**

Tahun 2025 Melaksanakan Sosialisasi/pembinaan sebanyak 5 kali, Dalam Rangka Sosialisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kecamatan Sungai Durian.Kabupaten Kotabaru mengandalkan sektor perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan usaha dari nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasar ikan, yang sebagian besar berskala mikro kecil menengah. Dimana usaha ini dijalankan perseorangan dan hampir rata-rata hanya memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Desa ataupun Kecamatan.





Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)

6. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

✓ **Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan**

Beberapa data yang disediakan melalui sub kegiatan ini adalah Data RTP per jenis budidaya, Data jenis ikan dan Hasil Produksi dari bulan Januari – Desember 2025 dengan total Produksi sebesar **29.733,08 Ton** dan jumlah RTP budidaya sebanyak **1.641** orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Budidaya	RTP (orang)	Luas Lahan (m2)
1	Tambak Sederhana	1,499	84,550,250
2	Tambak Semi Intensif	2	20,400
3	Kolam Air Tenang	107	78,757
4	Jaring Tancap Tawar	4	2,500
5	Karamba	5	600
6	Keramba Jaring Apung Tawar	1	90
7	Keramba Jaring Apung Laut	11	156
8	Rumput Laut	12	77,000



Validasi Data Statistik Budidaya Semester II Tahun 202



Pengumpulan Data Statistik Budidaya di beberapa Kecamatan

✓ **Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan**

Berikut daftar kelompok penerima hibah bantuan pengadaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan TA. 2025 :

Melaksanakan pengadaan belanja modal mesin proses berupa belanja mesin pembuat pakan ikan dan bahan pendukung pembuatan pakan ikan untuk produksi di Balai Benih Kesehatan Ikan (BBKI) di Gedambaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.





Penyerahan Bantuan Ke Kelompok Stagen Bina Abadi Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara



Bantuan Pengadaan Kelompok Berkah Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat



Bantuan Pengadaan Kelompok Pondok Biru, Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara



Belanja Modal Mesin Pembuat Pakan Ikan

No.	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan	Pagu Anggaran
1	Berkah	Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat	Bantuan Pengadaan Budidaya Ikan Air Tawar (Patin)	22,250,000
2	Energi Lestari	Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara	Bantuan Pengadaan Kolam Bioflok	190,000,000
3	Pondok Biru	Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara	Bantuan Pengadaan Kolam Bioflok	95,000,000
4	Stagen Bina Abadi	Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara	Bantuan Pengadaan Kolam Bioflok	16,000,000

No.	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan	Pagu Anggaran
5	Mutiara Laut	Desa Teluk Mesjid Kecamatan Pulau Laut Timur	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana budidaya keramba jaring apung (KJA)	198,000,000

✓ **Penjaminan Ketersediaan Pembudidayaan Ikan**

Berikut disajikan pada tabel kelompok yang menerima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar :

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan	Pagu (Rp)	Keterangan	Dana
1	TPK2D Desa Sang-Sang	Desa Sang-Sang, Kecamatan Kelumpang Tengah	Bantuan Sarana dan Prasarana Ikan Air Tawar Untuk Kegiatan TPK2D di Desa Sang-Sang	16.000.000	1 Paket	APBD sektoral



Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Hibah untuk Kegiatan TPK2D



Monitoring Perkembangan Rumput Laut

✓ **Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat**

Tujuan kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan adalah meningkatkan kemampuan pembudidaya, baik pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya sehingga menjadi pembudidaya yang tangguh dan mandiri yang berarti pembudidaya memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi risiko usaha, mampu memanfaatkan asas skala ekonomi, dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi dunia usaha.

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan dilaksanakan dibeberapa kecamatan dengan melakukan pertemuan dan pelatihan pembudidayaan ikan, seperti :

a) Pelatihan budidaya perikanan sistem bioflok di Desa Sungai Limau Kecamatan Pulaulaut Timur;
b) Pelatihan budidaya ikan air tawar di Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam;
c) Pelatihan budidaya perikanan sistem bioflok ikan bawal dan nila di Desa Bekambit Kecamatan Pulaulaut Timur;
d) Pendampingan Bimbingan Teknis Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Kegiatan Peningkatan Budidaya Ikan Kolam Terpal Milik Desa di Desa Smapanahan Hilir Kecamatan Sampanahan,
e) Pembinaan Kelompok Pembudidaya di Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar;
f) Pembinaan dan Monitoring Kelompok Pembudidaya di Desa Stagen Kecamatan Pulalaut Utara, Kecamatan Pulaulaut Selatan dan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan.

Pelatihan dilakukan kepada kelompok dan perorangan yang ada di desa, pelatihan ini menjelaskan tentang bagaimana cara budidaya ikan sistem bioflok di kolam secara baik dan benar. Selain itu, disampaikan juga tentang persyaratan perizinan usaha di bidang budidaya perikanan dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada pembudidaya.





✓ **Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya**

Dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan Lingkungan budidaya ada beberapa pelaksanaanya yaitu:

a) Optimalisasi Balai Benih dan Kesehatan Ikan;
b) Pembangunan kolam budidaya air payau (bandeng, kepiting, udang);
c) Pembangunan kolam pembesaran di Balai Benih Kesehatan Ikan;
d) Pembelian mesin proses berupa mesin pompa air laut dan pipanisasi;
e) Indukan udang windu untuk BBKI;
f) Pakan-pakan dan Natura;
g) Uji sample udang;
h) Produksi Benih Udang Windu **2.579.650 Ekor dengan Nilai Rp.92.867.400.**


Pembuatan kolam


Indukan dan panen benur udag windu




pakan-pakan dan natura

- ✓ **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.**

  Kegiatan pengawasan dilakukan di 12 tempat (Desa Stagen, Desa Sebelimbingan, Desa Terombong Sari, Desa Manunggal Lama, Desa Tarjun, Desa Langadai, Desa Betung, Desa Karangsari Indah, Desa Teluk Mesjid, Desa Pantai, Desa Sungi Nipah dan Desa Pantai Baru) dengan mengunjungi lokasi kolam dan tambak di Kabupaten Kotabaru dengan beberapa titik yang belum melaksanakan budidaya sesuai peratuan yang sudah di tetapkan

  Adapun rincian kegiatan pengawasan usaha bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya adalah:

  a) Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pada pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
  b) Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut baik darat, payau dan laut;
  c) Pembuangan limbah berbahaya yang belum layak buang ke perairan tawar sungai, danau, dll;
  d) Perlindungan terhadap ikan andemic/local/langka atau adanya kegiatan inroduksi ikan lain yang bersifat predator dan competitor
  e) Melakukan penilaian/pengujian secara kimia pada sarana produksi budidaya;

f) Melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologis lainnya pada pengawasan produksi sarana budidaya;
g) Melakukan pemeriksaan pakan buatan pada pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut.

Kegiatan sosialiasi dilaksanakan pada para pembudidaya di Kecamatan Pulaulaut Timur, Kecamatan Sungai Durian dan Kecamatan Kelumpang Hilir. Kegiatan ini bertujuan agar, sebagai berikut:

a) Masyarakat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan perairan tawar, meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah penggunaan bahan kimia yang merusak lingkungan budidaya.
b) Kegiatan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perikanan yang berlaku, seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
c) Melalui pembinaan dan monitoring, diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan sumber daya perikanan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan:





Sasaran 3: Meningkatnya Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitive dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Kotabaru dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik.

Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen produksi pertanian yang digunakan. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kotabaru diukur dengan membandingkan jumlah produksi pangan utama beras yang berasal dari produksi pangan domestik (produksi padi di Kabupaten Kotabaru).

Tabel II.10
Capaian Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks ketahanan pangan	78,85	77,03	69,84	75,34	81,50	75,34*	92,44%	82	91,87%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Indeks ketahanan pangan tahun 2025 terealisasi sebanyak 75,34* , apabila dibandingkan dengan target sebanyak 81,50, sehingga capaian Indeks ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar 93,01% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada Tahun 2025, Realisasi Indeks ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencapai 75,34* Angka ini tidak mengalami perubahan poin dibandingkan dengan Tahun 2024 yang sebesar 75,34.

Pencapaian realisasi Indeks ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencapai 75,34* dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 82 mencapai 91,87%.

Peningkatan indeks ketahanan pangan pada periode 2021-2026 juga dipengaruhi oleh capaian pembangunan ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam megakses pangan, baik dari sisi ases ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan. Selain itu pengeluaran pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat. Peningkatan keterjangkauan salah satunya terlihat pada peningkatan daya beli masyarakat yang firefleksikan dengan peningkatan produk domestik bruto (PDRB).

Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kotabaru menurun secara nilai, baik itu kualitas maupun kuantitas. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) dalam periode 2019-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 mencapai 4.13 %, menurun tahun 2020 sebesar -1.87% dan meningkat tahun 2021 menjadi 3.36 % pada tahun 2020. Walaupun porsinya sempat menurun tahun 2019-2020. Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Akan tetapi meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Kotabaru belum meningkatkan ke arah konsumsi makanan.

Pola pangan harapan adalah salah satu indikator Pemanfaatan Pangan yang dapat menggambarkan kualitas konsumsi pangan perseorangan dan rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan dan pengetahuan pangan dan gizi. Untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimula dari keluarga . Indikator Kualitas Pemanfaatan Pangan disajikan berikut :

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

7. Kabupaten Kotabaru menjadi produsen pangan yang besar didukung ketersediaan lahan pertanian yang luas

8. Kebutuhan manusia akan pangan di masa mendatang akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kondisi ekonomi daerah
9. Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk memeratakan distribusi pangan bagi seluruh rakyat
10. Adanya fasilitas pelabuhan yang mendukung kelancaran distribusi pangan
11. Ketersediaan teknologi yang mendukung informasi mengenai pasar dan stabilitas harga pangan
12. Daya beli masyarakat yang tinggi sehingga memiliki kemudahan akses terhadap sumber pangan
13. Peningkatan teknologi yang mendorong tingginya kualiitas dan keamanan pangan

Sedangkan, faktor penghambat capaian Indeks Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Teknologi yang digunakan petani masih tradisional dan belum menerapkan smart agriculture untuk peningkatan produktivitas
2. Stok atau cadangan pangan daerah belum terpetakan dengan baik
3. Perubahan iklim membuat pola tanam petani mengalami perubahan yang mengakibatkan penurunan produksi
4. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, sarana dan prasarana publik
5. Distribusi pangan masih terkendala kondisi infrastruktur daerah yang belum optimal
6. Manajemen stok pangan belum dikelola dengan baik
7. Pola dan keanekaragaman konsumsi masyarakat belum optimal

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan melalui penguatan pilar ketersediaan secara komprehensif dari sisi hulu. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan pendampingan teknologi pertanian maju dan fasilitasi penyediaan benih serta bibit unggul untuk menjamin produktivitas hasil tani. Guna mendukung akselerasi produksi, pemerintah melakukan pembangunan serta rehabilitasi prasarana pertanian secara masif di wilayah-wilayah sentra. Langkah preventif juga menjadi prioritas, yang mencakup

penanggulangan hama dan wabah pada tanaman maupun hewan, serta pengawasan ketat terhadap peredaran produk asal hewan. Sinergi ini memastikan bahwa pasokan pangan daerah tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga terjaga kualitas dan keamanannya dari potensi risiko biologis.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani. Pilar ketahanan pangan diperkuat dengan peningkatan kapasitas aktor utama di sektor pertanian, yaitu petani dan penyuluh. Kabupaten Kotabaru secara konsisten melaksanakan program peningkatan kapasitas penyuluh pertanian agar mampu menjadi jembatan transfer teknologi yang efektif kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, penguatan kapasitas kelembagaan petani terus dipacu agar para petani memiliki daya tawar dan manajemen usaha yang lebih solid. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan kelembagaan yang kuat, proses introduksi inovasi pertanian dapat berjalan lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada stabilitas produksi pangan lokal sebagai fondasi utama dalam menjaga skor Indeks Ketahanan Pangan daerah.

Stabilitas Distribusi, Harga, dan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Pada aspek hilir, fokus utama diarahkan pada kelancaran distribusi pangan dan stabilisasi pasokan serta harga di pasar untuk menjamin keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan perbaikan manajemen stok dan cadangan pangan daerah sebagai langkah antisipatif terhadap fluktuasi musiman maupun gangguan distribusi. Selain memastikan akses fisik dan ekonomi, aspek pemanfaatan pangan juga ditingkatkan melalui program perbaikan pola dan penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui edukasi diversifikasi berbasis sumber daya lokal, masyarakat didorong untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), sehingga peningkatan Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotabaru tidak hanya mencerminkan kecukupan stok, tetapi juga perbaikan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Kotabaru yang menunjang tercapainya Indeks Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan gabah untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Ujung Kec. Pulau Sebuku.

2. **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan koordinasi dan sinkoronisasi distribusi pangan pokok di kecamatan Pamukan Barat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di kecamatan Pulaulaut Sigam, Pamukan Barat, Pulaulaut Utara, Sungai Durian, Kelumpang Selatan, Pamukan Selatan, Hampang dan Pamukan Utara. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyusunan neraca bahan makanan (NBM) untuk memuat informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan bahan makanan bagi penduduk kabupaten Kotabaru. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan di Pasar Kemakmuran Kab. Kotabaru setiap 1 minggu sekali dan juga pasar di beberapa kecamatan.

Tabel. II.11
Data Harga Rata-rata Pangan Strategis

No	Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)
1	Beras Medium	10.000	10.000	15.000	13.200	13.200	12.200
2	Jagung	7.000	6.500	8.000	7.000	9.850	4.450
3	Kedelai	9.000	9.000	16.000	10.000	13.250	10.950
4	Cabe Merah	77.500	25.000	85.000	28.750	46.550	22.500
5	Bawang Merah	28.800	20.500	66.250	25.500	76.450	37.100

No	Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)
6	Minyak Goreng	17.025	11.000	25.000	14.667	17.000	14.000
7	Gula Pasir	13.000	11.000	15.000	14.000	18.900	17.200
8	Daging Sapi	135.000	135.000	160.000	140.000	180.000	160.000
9	Daging Ayam	31.500	24.600	41.000	35.500	41.650	37.550
10	Telur	24.750	19.750	32.750	25.250	32.000	28.100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

Dari data diatas dapat dilihat untuk harga rata-rata pangan strategis selain beras dan minyak goreng dan hampir semua komoditas mengalami kenaikan terutama bawang merah dikarenakan pada tahun 2025 mengalami cuaca ekstrem atau yang disebut El-Nino mengakibatkan gagalnya panen di beberapa tempat dan adanya kenaikan bahan bakar sehingga mengalami kenaikan.

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan kabupaten/Kota

Kegiatan Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berupa beras berdasarkan Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Penyaluran Cadangan Pangan Tahun 2025 dapat dlihat pada tabel berikut :

Tabel II.12
Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

No.	Lokasi Penyaluran Beras CPP		Jumlah Jiwa	Jumlah Beras CPP yang disalurkan (Kg)
	Desa	Kecamatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Teluk Aru	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	913	9.130
2	Desa Oka-oka	Kecamatan Pulaulaut Kepulauan	203	2.030
3	Desa Muara Urie	Kecamatan Hampang	784	7.840
4	Desa Karang Sari Indah	Kecamatan Pulaulaut Timur	170	1.700
5	Desa Sungai Pinang	Kecamatan Kelumpang Tengah	183	1.830
6	Desa Senakin Seberang	Kecamatan Kelumpang Tengah	168	1.680
7	Desa Sebuli	Kecamatan Kelumpang Tengah	291	2.910
6	Desa Sembilang	Kecamatan Kelumpang Tengah	190	1.900
8	Desa Tanjung Selayar	Kecamatan Kelumpang Tengah	381	3.810
9	Desa Sangsang	Kecamatan Kelumpang Tengah	145	1.450
10	Desa Tamiang Bakung	Kecamatan Kelumpang Tengah	185	1.850
11	Desa Tapian Balai	Kecamatan Pulaulaut Barat	531	5.310
12	Desa Lontar Timur	Kecamatan Pulaulaut Barat	374	3.740
13	Desa Sepagar	Kecamatan Pulaulaut Barat	488	4.880
		Total	5.006	50.060

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten kotabaru ini berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/442/KUM/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Muara Urie Kecamatan Hampang dan Desa Karang Sari Indah Kecamatan Pulaulaut Timur, Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/443/KUM/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Oka-Oka dan Desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/444/KUM/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Tapian Balai. Desa Lontar Timur dan Desa Sepagar Kecamatan Pulaulaut Barat dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/445/KUM/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah

di Desa Sungai Pinang, Desa Sebuli, Desa Senakin Seberang, Desa Sembilang, Desa Sangsang, Desa Tamiang Bakung dan Desa Tanjung Selayar Kecamatan Kelumpang Tengah.

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun.

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita per tahun tentang penyusunan laporan akhir skor pola pangan harapan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel. II.13
Konsumsi Energi dan Protein serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2016-2024.

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein per kapita per hari								Rekomendasi WNPG	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	s.d 2012	2013
Energi	1413.3	1378.2	1437.5	1408.2	2165.1	2.158	2.056	2.197	2150	2100
Protein	45.5	44.9	45.7	44.3	66.3	69.7	65,7	68,5	57	57
PPH	74.5	66.7	75.2	75.6	83.8	84.9	84,3	92,1		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

Pemenuhan Konsumsi pangan tidak hanya pemenuhan dalam hal kuantitas saja, yang dicerminkan dengan total energi dan protein, namun juga harus memperhatikan aspek keberagaman dan keseimbangan zat gizi, yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dari segi kualitas yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) terjadi peningkatan yang signifikan dari skor PPH 84,9 pada tahun 2023 menjadi 92,1 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 skorskor PPH hampir memenuhi kaidah ideal sesuai dengan anjuran.

Dalam hal ini kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah promosi atau sosialisasi serta mengadakan lomba dengan TP PKK Kabupaten Kotabaru mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) diharapkan akan menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi sumber karbohidrat dari pangan lain selain beras dan tepung terigu.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyusunan data (Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan). Hasil analisis FSVA tahun 2025 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotabaru terdapat 32 desa dari 202 desa yang rentan terhadap kerawanan pangan. Yang terdiri atas 1 desa dengan tingkat kerentanan tinggi, 9 desa dengan tingkat kerentanan sedang dan 22 desa dengan tingkat kerentanan rendah. Hal ini merupakan suatu tantangan dan bagi Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan Kabupaten Kotabaru yang tahan terhadap kerentanan pangan.

b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan identifikasi dan pengumpulan data Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di kecamatan Sampanahan dan kecamatan Pulaulaut Timur. Kegiatan penanganan nya adalah disalurkannya cadangan pangan berdasarkan hasil data Kerentangan dan Ketahanan Pangan yaitu di Kec. Pulau Sembilan (Desa Tengah, Tanjung Nyiur, Maradapan, Teluk Sungai dan Labuan Barat dimana penyaluran Cadangan Pangan berupa Bantuan Pangan dari BAPANAS.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan d iantaranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan melakukan penerbitan ijin edar Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Label Putih dan Label Hijau, melakukan pengujian kandungan dalam baha pangan segar asal tumbuhan dengan 38 komoditas dengan menggunakan rapid tes dari hasilnya ada 1 komoditas yang tidak memenuhi syarat aman. Kemudian kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Komitmen Ijin Edar Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan di kecamatan Pulaulaut Tengah, kecamatan Pamukan Barat, kecamatan Sungai Durian.



melaksanakan Gerakan Pangan Murah menjelang hari raya Idul Adha di Kecamatan Kelumpang Hulu



serah terima UV Drayer di Desa Ujung Kecamatan Pulau Sebuku



Festival Pangan B2SA



Pengawasan Post Market Keamanan Pangan Segar



Pengujian sampel pangan segar



Identifikasi Data Retail dan Pasar Tradisional

Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal

Kabupaten Kotabaru memiliki kontribusi PDRB sebesar 28%. Salah satu factor pendukung atau pendorongnya adalah kinerja sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang mampu mendorong perekonomian. Sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Kotabaru. Pada tahun 2017 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 34,93 persen terhadap PDRB Kabupaten Kotabaru, yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Produk lokal yang ada di Kabupaten Kotabaru terdiri dari Anyaman Pandan Laut, Kerajinan Kerang, Anyaman Purun, Sasirangan Saijaan Khas Kotabaru, Kerajinan dari Bambu/Kayu/Kayu Ulin/Paralon/Pelepah Pisang, Amplang, Kerupuk, Terasi, Gula Aren, Anyaman dari Mananlitu, Ikan Asin, Cumi-Cumi Asin, Udang Asin, Jahe Merah, Pakis, Buah Mangroove, Madu dan Keripik.

Adapun subkategori yang mendominasi kinerja kategori ini adalah industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 80,48 persen. Dalam hal ini produk utamanya adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak goreng. Kontribusi ini terus meningkat dari tahun ke tahun didukung oleh ketersediaan komoditas yang menjadi bahan baku yaitu kelapa sawit. Industri makanan dan minuman Kabupaten Kotabaru juga menghasilkan produk yang menjadi ciri khas daerah ini yaitu amplang, kerupuk ikan, dan ikan asin/kering.

Di samping industri makanan dan minuman, subkategori lain yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu 19,19 persen adalah industri barang galian bukan logam. Produk akhir utama dari industri ini adalah semen, yang mendapat dukungan ketersediaan bahan baku melimpah di Kabupaten Kotabaru yaitu batu kapur.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan sektor industry pengolahan ini adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. II.14
Capaian PDRB sektor Industri

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
PDRB sektor industri	33,03%	28,57%	28,06%	28%	34,50%	28,9	83,45%	35%	82,25%

Sumber : Diolah oleh Penulis,2026.

Capaian Tahun 2025 untuk Pencapaian PDRB sektor Industri sebesar 28,79% dari target 34,50% sehingga persentase capaian PDRB sektor Industri sebesar 83,45% termasuk dalam kategori ***Tinggi.***

Pada tahun 2025, PDRB sektor Industri sebesar 28,79% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 28 % mengalami peningkatan sebesar 0,79 poin. Capaian tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD (35%) sebesar 82,25%.

Industri Pengolahan merupakan kategori yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Kotabaru. Besarnya industri pengolahan di Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari dukungan Kinerja Industri Pengolahan Makanan dan Minuman khususnya Industri Pengolahan Kelapa Sawit dan lapangan usaha perkebunan sawit yang terbesar di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu dan Kelumpang Selatan.

Pada tahun 2021 ada 6 IKM yang tercatat di Kabupaten Kotabaru, sampai dengan tahun 2021 jumlah Industri Formal/yang memiliki izin sebanyak 229 IKM, sedangkan Industri Informal /yang belum memiliki izin sebanyak 1.893 IKM. Industri Formal yang ada di Kabupaten Kotabaru terdiri dari Jasa Percetakan, Pembuatan Perbaikan Kapal, Jasa Pengepakan, Krupuk Ikan, Makanan Ternak, Es Batu, Limun, Kue Kering, Tempe/Tahu, Meubel kayu, Air Minum, Minuman Penyegar, Reparasi Mobil, Rumah Potong.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator PDRB sektor Industri, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi di sektor industri pengolahan melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien
2. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
3. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi di sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, dan perikanan
4. Tersedianya kawasan industri yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah

5. Dukungan kebijakan investasi oleh pemerintah berkaitan dengan perizinan
6. Tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan listrik
7. Adanya akses permodalan dengan bunga rendah dari pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat
8. Tersedianya akses pasar regional ke kota-kota di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa
9. Adanya inisiatif hilirisasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai tambah produk

Sedangkan, faktor penghambat capaian PDRB sektor Industri, sebagai berikut:

1. Sektor industri di Kabupaten Kotabaru didominasi industri pertambangan yang menjadi penopang utama PDRB
2. Kualitas SDM pelaku industri kecil belum memadai
3. Manajemen pengelolaan usaha belum berjalan efektif dan efisien
4. Akses permodalan pelaku industri kecil belum memadai
5. Penerapan teknologi pengolahan yang terkini belum sepenuhnya dijalankan sehingga kualitas produk belum baik
6. Sentra kawasan industri kecil belum direncanakan dengan baik sehingga belum tertata
7. Belum terintegrasinya pengembangan industri berbasis potensi sumber daya lokal
8. Kualitas produk yang dihasilkan industri kecil belum mampu menembus pasar luar daerah
9. Terbatasnya akses pemasaran produk industri kecil
10. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan dalam kondisi rusak dan kebutuhan air industri yang tinggi
11. Adanya kondisi ekonomi nasional dan global yang kurang baik dapat mengurangi permintaan dan menurunkan output industri

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk melakukan penguatan kontribusi industri kecil terhadap PDRB masih terkendala oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan usaha yang belum efektif maupun

efisien. Pelaku industri kecil di Kabupaten Kotabaru masih menghadapi keterbatasan akses permodalan serta belum sepenuhnya mengadopsi teknologi pengolahan terkini. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas produk yang dihasilkan, di mana produk lokal belum mampu memenuhi standar kompetisi untuk menembus pasar luar daerah. Terbatasnya akses pemasaran dan rendahnya inovasi produk menyebabkan industri kecil masih bergerak di skala lokal, sehingga akselerasi terhadap peningkatan porsi distribusi PDRB sektor industri manufaktur berjalan cukup lambat.

Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Kawasan Industri. Faktor determinan lainnya yang menghambat laju sektor industri adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti kondisi jalan yang rusak di beberapa titik strategis serta tingginya kebutuhan air untuk operasional industri yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, sentra kawasan industri kecil di Kabupaten Kotabaru belum direncanakan secara terpadu, sehingga pengembangan kawasan belum tertata secara optimal untuk mendukung efisiensi logistik. Ke depan, fokus pemerintah daerah diarahkan pada perbaikan infrastruktur penunjang, penataan kawasan industri yang berbasis keunggulan lokal, serta penyediaan fasilitas pendukung yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri yang kondusif, meningkatkan daya saing produk lokal, dan pada akhirnya mampu meningkatkan persentase distribusi PDRB dari sektor industri secara signifikan.

Dalam rangka Peningkatan nilai PDRB sektor industri terhadap PDRB dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui beberapa program dan kegiatan yaitu:

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Nilai Pagu Rp 7.318.060.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 2.154.732.090 29.44% dan Capaian Kinerja 68.77%.
    - Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Nilai Pagu Rp 7.318.060.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 2.154.732.090 29.44% dan Capaian Kinerja 68.77%.

- Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan Nilai Pagu Rp 65.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 28.703.700 44.16% dan Capaian Kinerja 48.46%.
    - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem dengan Nilai Pagu Rp 65.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 28.703.700 44.16% dan Capaian Kinerja 48.46%.
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Naasional dengan Nilai Pagu Rp 249.880.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 149.314.752 59.75% dan Capaian Kinerja 72%.
    - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri intuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Nilai Pagu Rp 249.880.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 149.314.752 59.75% dan Capaian Kinerja 72%.



Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Kelompok Penerima Hibah Bantuan Peralatan Industri Kecil Menengah



Pelaksaan Konsultasi dan Koordinasi untuk Sertifikasi HALAL





Pelaksanaan Pendataan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di Kecamatan Pulau Laut Utara



Pelaksanaan Pameran Tourism & Trade Invesment Expo



Pelaksanaan HUT Dekranasda ke 44 di Surakarta Solo



Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengusulan IKM OVOP pada Lokasi Sentra bagi aparat Kab/Kota se Kalimantan Selatan di Banjarmasin



Pelaksanaan Pameran Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke 74 di Siring Laut Kotabaru



Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perindustrian di Surabaya
Kegiatan Audit Halal



Pelaksanaan Pendataan IKM
Kegiatan Juru Sembelih Halal

Sasaran 5: Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting yang memberi dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Pariwisata sebagai salah satu sektor andalan, mampu menggerakkan sektor lain yang terkait atau memiliki *multiplayer effect*. Disamping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam, seni dan budaya berbasis kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini memberikan arti bahwa pengembangan pariwisata di suatu daerah tidak

terlepas dari potensi yang dimiliki untuk mendukung pariwisata tersebut. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak kemajuan bagi daerah tersebut dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu daerah dan salah satu destinasi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 9.422,46 km^2 yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan segala potensi terutama keberagaman sumber daya wisata yang dimiliki sangat memungkinkan pengembangannya dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemandirian dan yang mampu mengemban peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat serta diharapkan mampu menjadi daerah tujuan wisata Kalimantan Selatan khususnya dan daerah tujuan nasional dan internasional.

Dari 145 Identifikasi Potensi Destinasi Wisata yang dimiliki Kabupaten Kotabaru yang tersebar di beberapa wilayah kepulauan Kabupaten Kotabaru, diperlukan pemetaan Kawasan potensi wisata dalam upaya penentuan skala prioritas pengembangan kepariwisataan daerah secara berkelanjutan yang tertuang dalam PERDA No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotabaru Tahun 2018-2025.

Hasil pemetaan Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Kotabaru kemudian di Prioritaskan pada 6 KPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata) yang kemudian ditentukan 10 Destinasi Wisata Unggulan untuk menjadi obyek sampel perhitungan jumlah kunjungan wisatawan sebagai *center growth* kepariwisataan daerah.





Adapun Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II.15
Capaian Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	4,36%	5,11%	6,12%	6,42%	6,63%	18,28%	275,71%	6,62%	276,13%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

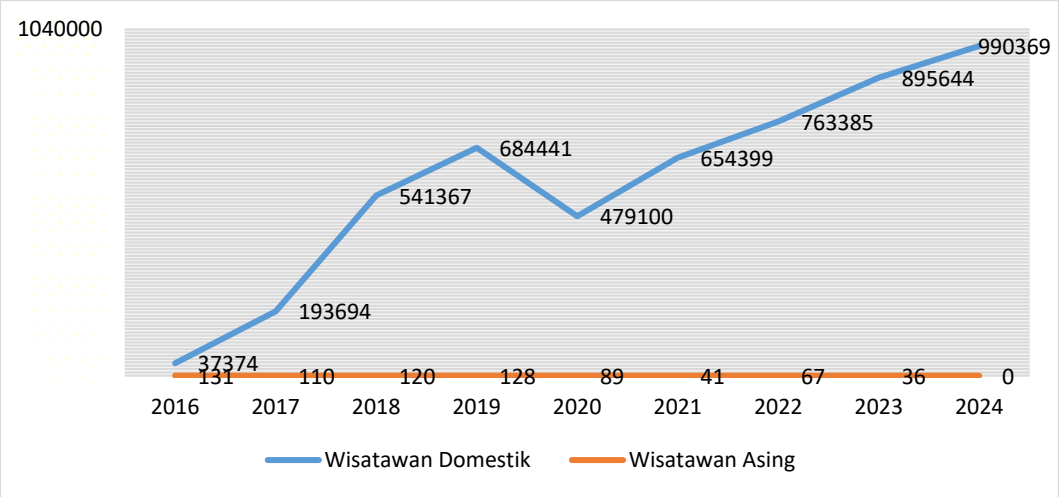
Pencapaian Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2025 terealisasi sebesar 18,28% dari target 6,63% sehingga persentase capaian sebesar 275,71% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata mencapai 18,28% Angka ini mengalami peningkatan sebesar 11,86 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 6,42%.

Pencapaian Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2025 terealisasi sebesar 18,28% dibandingkan terhadap target RPJMD 6,62% sehingga persentase capaian sebesar 276,13%

Adapun faktor yang sangat mendukung peningkatan ini yaitu dari kunjungan wisman dan wisnus dengan melakukan perbandingan antara jumlah wisman dan wisnus dilihat pada grafik tiap tahun berikut:

Grafik II.
Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat dari kondisi awal pada tahun 2016 sebanyak 37.505 orang wisatawan dan pada tahun 2017 naik cukup signifikan sebanyak 193.804 orang wisatawan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebanyak 541.487 orang wisatawan dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebanyak 684.569 orang wisatawan.

Dari grafik tersebut diatas juga diketahui pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan,

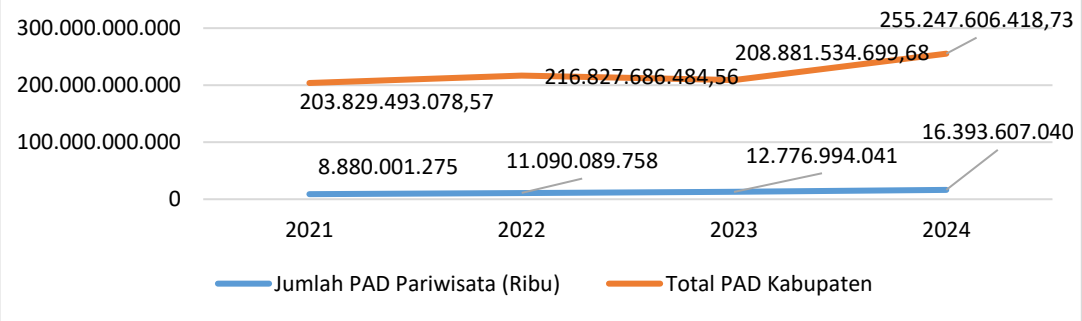
tercatat sebanyak 479.100 orang wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotabaru. Hal ini dikarenakan pada kondisi tahun tersebut seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami wabah Pandemi *Covid-19* yang mewajibkan seluruh tempat wisata memberlakukan protokol kesehatan yang ketat serta pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung/wisatawan pada obyek wisata dengan penerapan *social distancing*.

Setelah melewati pasca wabah Pandemi *Covid-19* dengan upaya Pemerintah dalam pemulihan ekonomi dampak Pandemi, pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebanyak 654.440 orang wisatawan, pada tahun 2022 meningkat lagi sebanyak 763.452 orang wisatawan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 895.680 orang wisatawan, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai 990.369 orang wisatawan.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotabaru secara langsung berpengaruh pada jumlah PAD Kabupaten Kotabaru. Kontribusi berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah (*penyewaan tanah dan bangunan*), retribusi tempat rekreasi, tempat pariwisata dan tempat khusus parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Adapun jumlah realisasi PAD dari sektor pariwisata (*dalam rupiah*) dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik II.
PAD dari Sektor Pariwisata



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Dari grafik dapat diketahui PAD dari sektor Pariwisata pada tahun 2024 mencapai **Rp.16.393.607.040,-** dan mengalami kenaikan PAD sejumlah Rp.3.616.612.999,- dibandingkan tahun 2023 (**Rp12.776.994.041**,-).

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotabaru yang memberi dampak terhadap peningkatan persentase kontribusi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2024 tidak terlepas dari Program dan Kegiatan dalam

upaya meningkatnya kinerja sektor pariwisata dengan arah strategi & kebijakan dalam pencapaian tujuan sebagai berikut :

- ✓ 10 ODTW Unggulan Menerapkan Standar Sapta Pesona (Pengembangan Infrastruktur Pariwisata, Pengelolaan ODTW, Bina SDM dan Usaha Pariwisata)
- ✓ 10 ODTW Unggulan didukung Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17 Sub Sektor Ekraf di kolaborasikan dalam Penyelenggaraan Event Seni Pertunjukan berbasis Kearifan Lokal sebagai Pendukung Kepariwisataan Daerah)
- ✓ Penguatan Promosi Wisata melalui pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan kerjasama pariwisata (Promosi melalui berbagai Kerjasama Media didukung Tim Kreatif, Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pameran serta Cinderamata Khas Daerah).

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotabaru memiliki destinasi wisata alam unggulan seperti pantai, pegunungan, dan pulau-kecil
2. Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan festival tahunan yang ramai menjadi magnet wisatawan
3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan daya tarik destinasi wisata prioritas
4. Aksesibilitas yang meningkat dengan adanya rencana pengembangan bandara
5. Berkembangnya digitalisasi promosi pariwisata dengan kolaborasi dengan influencer lokal dan internasional
6. Kabupaten Kotabaru menjadi andalan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
7. Ketersediaan produk kreatif berbasis kearifan lokal seperti kain sasirangan dan kuliner berbasis produk ikan
8. Adanya dukungan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi bagi pemandu wisata lokal
9. Adanya kolaborasi stakeholder melalui kemitraan dengan pelaku usaha (hotel, biro perjalanan) maupun dukungan komunitas wisata lokal

10. Adanya pembangunan hotel-hotel baru di Kabupaten Kotabaru

Sedangkan, faktor penghambat capaian Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata, sebagai berikut:

1. Akses menuju destinasi belum memadai dengan kondisi jalan yang rusak
2. Adanya isu lingkungan berupa sampah di pantai yang mengurangi estetika wisata air
3. Banyak terjadi alih fungsi lahan pantai untuk permukiman
4. Adanya persaingan dengan destinasi domestik lainnya di Provnsi Kalimantan Selatan
5. Kualitas akomodasi di Kabupaten Kotabaru belum merata
6. Adanya kerusakan lingkungan karena berbagai aktivitas industri, permukiman
7. Sistem pemungutan retribusi belum sepenuhnya online dan masih ada yang manual Pengembangan wisata air terintegrasi melalui pembangunan fasilitas modern

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara progresif meningkatkan daya tarik daerah melalui pengembangan paket wisata unggulan "Kotabaru Beach Expedition" yang didukung oleh armada kapal wisata unik untuk memperkuat citra bahari. Upaya ini disinergikan dengan kampanye pemasaran strategis bertajuk "The Hidden Paradise of Borneo" serta kolaborasi aktif dengan Online Travel Agent (OTA) skala nasional guna memperluas jangkauan pasar. Kehadiran kalender wisata musiman (seasonal tourism calendar) dan pengemasan ulang festival tradisional dengan konsep kontemporer terbukti efektif dalam menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Strategi ini tidak hanya meningkatkan volume wisatawan, tetapi juga memperpanjang durasi kunjungan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan retribusi dan pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Akselerasi Digitalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Penunjang. Pilar utama dalam mengoptimalkan kontribusi PAD adalah melalui efisiensi sistem penerimaan daerah yang berbasis teknologi. Pemerintah telah meluncurkan platform digital "Kotabaru Tourism Hub" serta

mengimplementasikan sistem pembayaran nontunai (cashless payment) dan sistem retribusi digital yang terintegrasi di seluruh objek wisata utama. Digitalisasi ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan dan memberikan kemudahan transaksi bagi pengunjung. Langkah tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata unggulan serta fasilitasi pembangunan akomodasi penunjang untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang nyaman dan mudah diakses. Peningkatan konektivitas dan kemudahan pembayaran ini menjadi faktor determinan dalam mendongkrak realisasi pendapatan dari sektor pariwisata secara signifikan.

Peningkatan Kualitas SDM dan Komitmen Pariwisata Berkelanjutan. Keberlanjutan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah juga ditentukan oleh kualitas layanan dan kelestarian lingkungan. Melalui pembentukan pusat pelatihan pariwisata berbasis kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi massal bagi tenaga kerja pariwisata, Kabupaten Kotabaru memastikan standar pelayanan yang unggul bagi wisatawan. Selain itu, diluncurkannya Green Tourism Initiative melalui program "Plastic Free Beach Tourism" memberikan nilai tambah kompetitif bagi destinasi lokal di mata wisatawan mancanegara maupun domestik yang peduli lingkungan. Dengan membekali UMKM pariwisata melalui pelatihan digital marketing dan promosi bersama daerah sekitar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil membangun ekosistem pariwisata yang mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga sektor ini mampu menjadi kontributor yang semakin tangguh bagi PAD daerah.

Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun 2025, antara lain:

1. **Bidang Pemasaran Pariwisata**, dengan program:
    1) **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,** dengan Kegiatan:
        a) **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mempromosikan dan mempublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik ataupun melalui media lainnya kepada

masyarakat secara luas akan berbagai macam ragam potensi wisata, seni dan budaya berbasis kearifan lokal yang dimiliki daerah dalam kerangka promosi dan pemasaran daya tarik wisata, Sub Kegiatan meliputi :

- **Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**, terealisasi 100%, meliputi :

1. Endorse Wisata Lokal




Kerjasama promosi wisata daerah dengan lembaga/dunia usaha

2. Launching Calendar of Event 2025





Promosi Wisata Sport Tourism Kabupaten Kotabaru

- **Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota**,

  Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata melalui pameran promosi pariwisata baik di dalam Kota, Luar Kota (Dalam provinsi), Luar Kota (Luar Provinsi), meliputi:



Pameran Tingkat Kabupaten



Pameran Tingkat Provinsi



Pameran Tingkat Nasional

- **Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, meliputi :**



ıbuatan Profil Kemajuan Pariwisata Ko



Penyelenggaraan Pameran Tunggal Pariw Kotabaru di Mall Banjarmasin

2. **Bidang Destinasi Pariwisata**, dengan Program :
   1) **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,** dengan Kegiatan :
      1. **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**





Penyusunan FS (Feasiblity Study) dan Dokumen Permohonan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut



Penyusunan Kajian akademis dan rancangan peraturan bupati tentang desa wisata



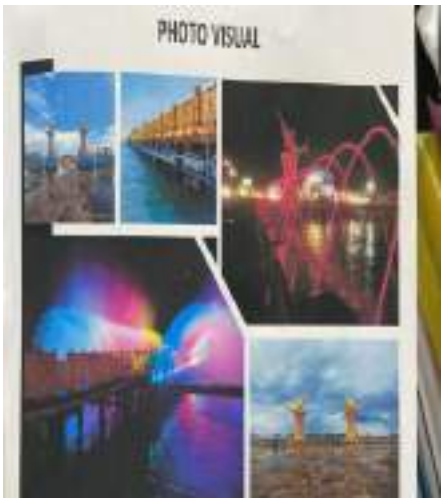
Penyusunan Kajian Teknis Ambang Batas Kawasan Wisata Siring Laut

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menata dan mengelola Obyek Wisata yang tersebar di beberapa kawasan dengan menerapkan Standar Sapta Pesona. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang pariwisata di Obyek Wisata agar dapat memberi keamanan, kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjung Obyek Wisata, Sub Kegiatan meliputi :

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terealisasi 92,68%, antara lain yang sudah dilaksanakan :

Objek Wisata Siring Laut :





Pembangunan Air Mancur Menari Beserta Kelengkapannya di Objek Wisata Siring Laut



*Penataan Garasi dan Workshop di Objek Wisata Siring Laut

Pembangunan Power House di Objek Wisata Siring Laut



Pengadaan dan Pemasangan Videotron indoor, Sound System dan Kelengkapannya di Aula Mesjid Kapal Siring Laut



Pengadaan Genset Berikut Aksesoris di Objek Wisata Siring Laut dan Objek Wisata Pantai Gedambaan



Pengadaan Genset Berikut Aksesoris di Objek Wisata Siring Laut dan Objek Wisata Pantai Gedambaan



Pengadaan Tambahan dan Pemasangan Perangkat Keamanan CCTV



Pengadaan Toilet Portable dan Kelengkapannya



Perbaikan dan Peningkatan Air Mancur Tugu Pahlawan



Peremajaan Sarana Meja,Kursi & Hiasan Dekorasi Siwalk



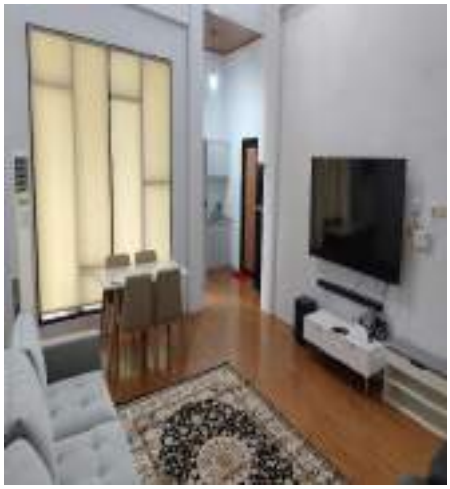
Peremajaan Taman Pagar Depan Siring Laut



Rehab Area Wisata Kuliner



Pemeliharaan Objek Wisata Pantai Gedambaan



Pengadaan Meubelair Cottage VVIP Beserta Kelengkapannya di Objek Wisata Pantai Gedambaan



Pembangunan Taman Area Masuk Pantai Gedambaan Desa Gedambaan Kec. Pulau Laut Sigam



Perbaikan Jalan Masuk Pantai Gedambaan



Pembuatan Tempat Bilas di Objek Wisata Pantai Gedambaan



Pembangunan Gerbang di Objek Wisata Mamake Bapake



Pembangunan Landscape Taman di Objek Wisata Mamake;



Pengadaan Rumput Sintesis di Objek Wisata Mamake Bapake



Pembangunan Area Kuliner Puncak Mamake di Objek Wisata Mamake



Pemeliharaan Objek Wisata Air Terjun Tumpang Dua



Pemeliharaan Rutin



Pengecatan Mural Pagar Objek Wisata Hutan Meranti

3. **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**

   Sub Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, meliputi kegiatan pembinaan usaha pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kotabaru.

3. **Bidang Pertunjukan, Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, dengan Program :

   1) **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, dengan Kegiatan :

      1. **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota,** Sub Kegiatan meliputi :

         - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, meliputi pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Kreatifitas,
           a. Pemeliharaan Sound System, Lighting dan Videotron,
           b. Perencanaan Pembangunan Sentra Ekraf,
           c. Pengadaan Sound System Panggung Apung,
           d. Pengadaan Lighting Panggung Apung,
           e. Pengadaan bantuan Bus Pusaka Saijaan Kotabaru,
           f. Pengadaan Videotron Portable Creative Hub
           g. Pengadaan Peralatan Studio Rekaman Creative Hub
           h. Pengadaan Peralatan Video dan Fotografy Creative Hub

      2. **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif,** dengan Sub Kegiatan :

         - Fasilitasi PendaftaranKekayaan Intelektual,



Katir Race dan Malasuang Manuk Kepulauan



Festival Meranti Putih



Pesona Gebyar Ramadhan
Lomba Kreatif Kuliner Khas Kotabaru



Pesta Adat Mappandretasi Pulau Manti
Event Kreatif Putra Putri Pariwisata





Festival Budaya Saijaan




Batu Balingkun Jazz Fest

- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, meliputi Workshop Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota




3. **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif,** Sub Kegiatan meliputi :

- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, meliputi:



Bimbingan Teknis Strategi Distribusi dan Pemasaran Ekraf



Bimbingan Teknis Proses Kreatifitas Fashion Khas Kotabaru



Bimbingan Teknis Produksi Souvenir Khas Kotabaru



Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Fotografi Digital



Bimbingan Teknis Pelestarian Musik Tradisional



Bimbingan Teknis Kreasi Keragaman Kuliner Daerah Penunjang Pariwisata

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN INVESTASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG BERDAYASAING DAN PRO RAKYAT, BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Tingkat pendapatan suatu kelompok masyarakat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Tingkat pendapatan masyarakat ini akan menunjukkan seberapa kuat perekonomian yang ada dalam masyarakat suatu wilayah. Selain itu untuk mengetahui perkembangan tingkat pendapatan dapat didekati dengan rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduknya sebagai pengukuran yang paling efektif sehingga dapat menggambarkan kekuatan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan meningkatkan investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdayasaing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. II.16
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57	6,7	6,08	6,05	4,45%	5,93	66,74%	4,35	63,67%

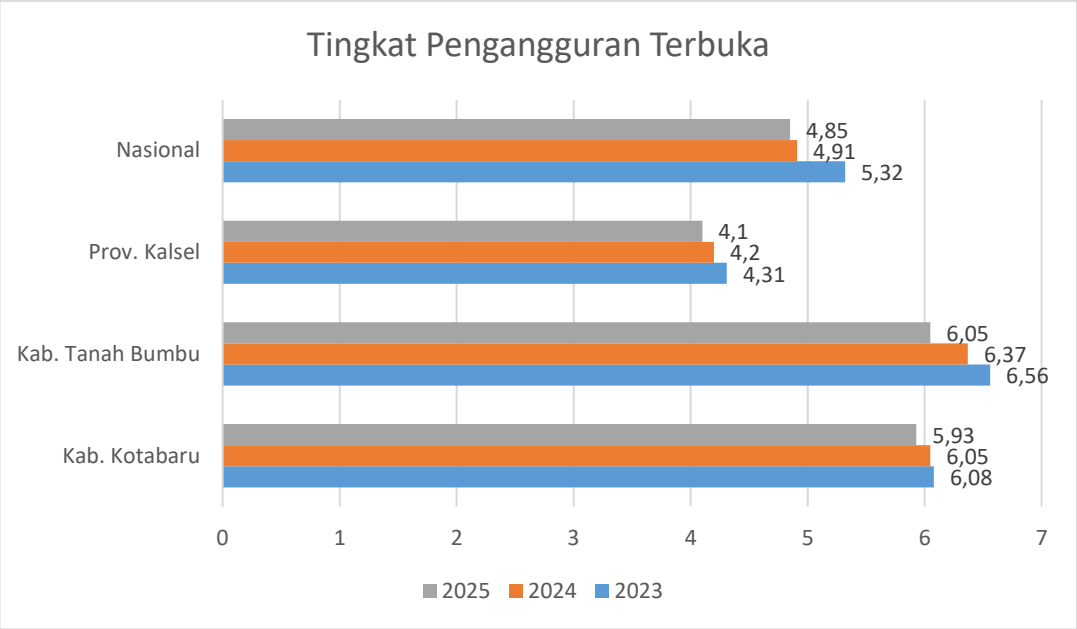
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Dari tabel di atas diketahui realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sejumlah 5,93 jika dibandingkan dari target 4,45% maka capaiannya sebesar 66,74% atau masuk kategori ***Sedang***.

Pada tahun 2025, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,93. Nilai ini mengalami penurunan sebanyak 0,12 poin dibanding dengan tahun 2024 sebesar 6,05%.

Pencapaian realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 5,93 jika dibandingkan dari target RPJMD sebesar 4,35% maka capaian sebesar 63,67%.

Grafik II.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten di seluruh wilayah pengamatan, mulai dari level Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,93%, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024 (6,05%) dan 2023 (6,08%). Meskipun trennya menurun, angka pengangguran di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (4,1%) dan rata-rata Nasional (4,85%) pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten masih lebih besar dibandingkan skala provinsi maupun nasional.

Kabupaten Kotabaru berhasil menjaga tren positif dalam menekan angka pengangguran selama periode 2023–2025 dengan total penurunan sebesar 0,15 poin persentase. Pencapaian angka 5,93% di tahun 2025 mencerminkan adanya efektivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan atau pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja baru. Namun, pemerintah daerah perlu tetap waspada dan meningkatkan program penguatan kompetensi SDM, mengingat angka TPT Kotabaru masih cukup jauh melampaui angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan upaya ekstra agar daya saing tenaga kerja lokal dapat setara atau bahkan lebih baik dari rata-rata provinsi.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai berikut:

1. Adanya pembukaan lahan baru atau peningkatan kapasitas produksi di sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
2. Pengembangan destinasi wisata unggulan di Kotabaru mulai menciptakan ekosistem ekonomi baru (seperti perhotelan, kuliner, dan jasa transportasi) yang menyerap angkatan kerja produktif.
3. Program bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri (wirausaha baru).

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja dari luar daerah untuk posisi spesialis/teknis karena keterbatasan sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal.
2. Masih rendahnya penguasaan teknologi digital dalam mencari kerja serta preferensi sebagian angkatan kerja muda yang hanya terpaku pada sektor formal (pegawai/karyawan).

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerinntah Kabupaten Kotabaru berupaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan relevansi lulusan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara aktif memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan (SMK dan Universitas lokal) dengan sektor

industri. Langkah ini diwujudkan melalui fasilitasi program pemagangan (internship) yang terstruktur dan terukur dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan pola link and match, di mana kurikulum dan keahlian praktis yang diajarkan selaras dengan standar industri, sehingga program magang tersebut dapat berujung pada penyerapan tenaga kerja lokal secara langsung dan berkelanjutan.

Selain penguatan pada sektor industri konvensional, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan terobosan untuk menjawab tantangan era disrupsi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Hal ini dilakukan dengan membangun wadah kreatif berupa Co-working Space yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan inkubasi bisnis bagi pemuda Kotabaru. Melalui fasilitas ini, para pemuda dibekali dengan keterampilan ekonomi digital dan literasi teknologi tingkat lanjut, dengan target mengubah pola pikir dari sekadar pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator). Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem wirausaha baru yang mandiri di bidang digital, sehingga dapat memperluas struktur lapangan kerja di daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi generasi muda.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan investasi, usaha kecil menengah dan koperasi yang berdayasaing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, digunakan 3 (tiga) sasaran yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 6: Meningkatnya Kuantitas dan Besaran Investasi di Kabupaten Kotabaru

Tabel II.17
Capaian Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2024 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai Investasi	1.635.360.215.721,72	2.236.753.410.000	2.848.793.930.000	4.610.415.170.000	1.457.417 000.000	4.713.191 .000.000	323,39%	1.603.158.000.000	293,99%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Dari tabel di atas diketahui realisasi nilai investasi pada tahun 2025 sejumlah Rp 4.713.191 .000.000,- apabila dibandingkan dari target Rp. 1.457.417.000.000,- maka capaian sebesar 323,39% atau masuk kategori ***Sangat Tinggi***.

Pada tahun 2025, realisasi nilai investasi mencapai Rp 4.713.191 .000.000,- Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak Rp1.965.707.000.000,- dibanding dengan tahun 2024 yang mencapai Rp4.610.415.170.000,- .

Pencapaian realisasi nilai investasi pada tahun 2025 sejumlah Rp 4.713.191 .000.000,- jika dibandingkan dari target RPJMD sejumlah Rp.1.603.158.000.000,- maka capaian sebesar 293.99%

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Nilai Investasi, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien
2. Stabilitas yang tinggi terkait dengan keamanan di Kabupaten Kotabaru
3. Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan dan perikanan
4. Layanan investasi sudah berbasis online

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Nilai Investasi, sebagai berikut:

1. Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi

2. Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanan secara online masih mengalami kendala
3. Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerinntah Kabupaten Kotabaru berkomitmen upaya mengakselerasi pencapaian target indikator nilai investasi pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen melakukan serangkaian langkah strategis yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini diawali dengan pembuatan peta potensi investasi daerah yang akurat sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian data bagi calon investor, yang kemudian diintegrasikan ke dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal yang lebih terarah dan kompetitif.

Guna menjamin kelancaran realisasi investasi, pemerintah melakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik demi menciptakan birokrasi yang cepat dan transparan. Transformasi digital ini didukung secara paralel melalui penambahan serta penguatan SDM yang mumpuni dalam fasilitasi pelayanan perizinan untuk memberikan asistensi yang profesional bagi pelaku usaha.

Selain kemudahan prosedur, daya tarik investasi diperkuat melalui aspek regulasi melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Kebijakan ini dipastikan berjalan efektif di lapangan melalui mekanisme koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian kemudahan serta insentif daerah antar instansi terkait, sehingga tercipta keselarasan kebijakan yang mampu mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru secara berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja Peningkatan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru didukung program dan kegiatan sebagai berikut :

✓ **Program Promosi penanaman modal dengan**

1. Koordinasi Potensi Sektor Unggulan: Melibatkan koordinasi antara potensi sektor unggulan di wilayah Kabupaten Kotabaru dan kecamatan-kecamatan di dalamnya, kecuali kecamatan Pulau

Sembilan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan potensi investasi yang ada.

2. Pengendalian Investasi PMA/PMDN: Upaya pengendalian investasi asing (PMA) dan domestik (PMDN) yang belum terkoordinasi dengan baik perlu ditingkatkan. Ini melibatkan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
3. Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan: Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai peluang usaha di sektor-sektor unggulan. Ini dapat membantu menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Jaminan Investasi dan Kemudahan Informasi: Memastikan bahwa investor mendapatkan jaminan investasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait investasi di Kabupaten Kotabaru.
5. Pemantauan dan Pelaporan Investasi: Melakukan pemantauan terus menerus terhadap investasi PMA dan PMDN, termasuk pelaporan berkala per triwulan. Hal ini bertujuan untuk mengukur perkembangan investasi serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat lokal.



Melaksanakan koordinasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT.SMART, Tbk.


Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





- Melaksanakan Pameran ke luar daerah / ikut serta dengan DPMPTSP Provinsi Kalsel di Semarang - Melaksanakan Pameran ke luar daerah di Yogyakarta	Rapat Fasilitasi Kemitraan antara Perusahaan Besar dan UMKM Tahun 2024 untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghasilkan Memitrakan antara PT. Langgeng Muara Makmur/ PT. Laguna Mandiri dengan UMKM Catering Luluk Sulastri

Program ini merupakan langkah yang komprehensif dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kotabaru dengan fokus pada penanaman modal, pengendalian investasi, penyediaan informasi, dan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan investasi serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal.

✓ **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program pelayanan penanaman modal meliputi pelaksanaan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemantauan pemenuhan komiten perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan. Didukung oleh Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang penanaman modal serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Program ini pun tentunya mendukung pada pencapaian nilai pencapaian penilaian terhadap pelayanan publik, selain pelaksanaan kegiatan rutin yaitu dengan melakukan pelayanan perijinan secara langsung kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotabaru akan terus berusaha menyajikan pelayanan terbaik sebagai pintu terdepan Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap pelayanan kepada masyarakat maupun pengusaha daerah maupun nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah izin yang diterbitkan dan selalu memperhatikan kepuasan masyarakat melalui evaluasi monitoring dalam segala pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. di tahun 2024 ini

pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Buku Profil Pelayanan Perizinan telah dibuat untuk lebih memantapkan kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. Adapun pencapaian kinerja kita diukur mampu diukur dari jumlah izin yang diterbitkan.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus membangun dan mengembangkan sistem aplikasi perizinan online yang berintegrasi, sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memiliki aplikasi perizinan untuk memudahkan layanan perizinan terhadap pemohon sekaligus mempercepat proses pelayanan maupun penerbitan izin. Sistem aplikasi ini juga mampu difungsikan melalui hp android demi kemudahan pemohon.

- ✓ **Program peningkatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**

  Melalui Pengembangan atau penyempurnaan regulasi terkait penanaman modal di Kabupaten Kotabaru. Hal ini termasuk penyusunan atau revisi peraturan-peraturan yang mendukung investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelaksanaan pelayanan terkait perizinan dan nonperizinan dalam bidang penanaman modal. Ini termasuk proses pemberian izin, fasilitasi, serta layanan pendukung lainnya bagi para investor. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi ketentuan yang berlaku serta untuk mendeteksi perubahan iklim investasi. Pengumpulan dan analisis data mengenai kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kotabaru. Laporan ini dapat disampaikan melalui sistem pelaporan seperti SPIPISE atau secara manual kepada DPMPTSP Kabupaten Kotabaru. Kegiatan rapat yang melibatkan tim teknis untuk membahas produk perizinan dan nonperizinan dalam bidang penanaman modal. Rapat ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan komitmen oleh perusahaan serta untuk memastikan kualitas pelayanan kepada investor. Diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kotabaru, yang akan

berdampak pada peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengawasan yang baik serta pelayanan yang efisien dan berkualitas, diharapkan para investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Kotabaru.

- ✓ **Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**

  Cara pembinaan Dilaksanakannya bimbingan teknis dan sosialisasi OSS–RBA Tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan sebanyak 2 kali yang diikuti oleh para pelaku usaha, notaris, asosiasi, dan aparat kecamatan yang terkait Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Total peserta sebanyak 58 orang.

  Melakukan pemantauan dengan cara melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek pelaku usaha diseluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kotabaru, dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan identitas pelaku usaha / perusahaan dan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

  Berdasarkan Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada pasal 46. Melakukan Pengawasan dengan cara melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek pelaku usaha diseluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kotabaru. Untuk meningkatkan para pelaku usaha dengan melakukan pelaporan LKPM jika dalam tempo waktu per triwulan tidak melaporan LKPM maka akan memperoleh teguran berupa lisan dan tertulis. Apabila berturut turut selama per 3 triwulan secara otomatis melalui aplikasi OSS-RBA akan membekukan ijin.









Pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah izin yang diterbitkan dan selalu memperhatikan kepuasan masyarakat melalui evaluasi monitoring dalam segala pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. di tahun 2025 ini pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Buku Profil Pelayanan Perizinan telah dibuat untuk lebih memantapkan kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. Adapun pencapaian kinerja kita diukur mampu diukur dari jumlah izin yang diterbitkan.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 jumlah penebitan perizinan dan non perizinan sebanyak 4092, mengalami pengurangan sejumlah 320 ijin dari Tahun 2023 yang berjumlah 4.412 ijin, Tahun 2022 sebanyak 2.150 ijin yang terbit yang melalui Aplikasi OSS dan SAIDINA. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru itu adalah sebagai wujud percepatan pelaksanaan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru. Tentunya dengan adanya perkembangan sistem aplikasi perizinan yang telah diterapkan dan sarana media informasi yang telah di kembangkan untuk masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan bahwa mengurus perizinan sendiri itu mudah.





Sasaran 7: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Besarnya penduduk yang berada pada kelompok usia muda (15-65 tahun) menyebabkan tingkat produktivitas wilayah tinggi jika SDM yang ada dikelola dengan baik. Pemerintah harus mendorong iklim usaha yang positif sehingga masyarakat dan pihak swasta dapat menciptakan usaha yang kompetitif. Pada gilirannya akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap angkatan kerja.

Angka/Tingkat Kesempatan Kerja adalah Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap Angkatan kerja. Angka Kesempatan Kerja di Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.18
Capaian Angka Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Angka Kesempatan Kerja	94,43%	93,30%	93,92%	93,95%	95,55%	94,07	98,45%	95,65%	98,34%

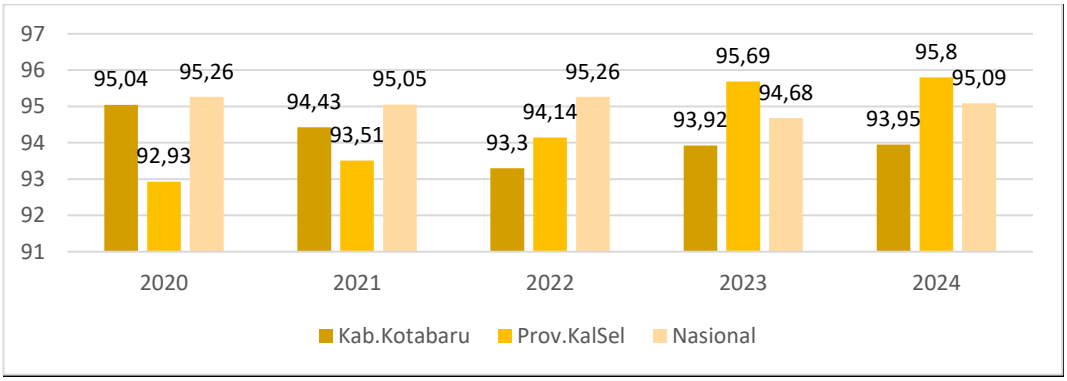
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Dari tabel tersebut dapat diketahui realisasi Angka Kesempatan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 sebesar 94,07% dibandingkan dari target 95,55%, sehingga nilai capaian Angka Kesempatan Kerja sebesar 98,45% masuk kategori ***Sangat Tinggi***.

Data Angka Kesempatan Kerja capaian realisasi 94,07% di tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 93,95% yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin.

Pencapaian realisasi Angka Kesempatan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 sebesar 94,07% dibandingkan dari target RPJMD sebesar 95,65%, sehingga nilai capaian Angka Kesempatan Kerja sebesar 98,34%. Adapun perbandingan Angka Kesempatan Kerja antara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.
Perbandingan Angka Kesempatan Kerja antara Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional.



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat Angka Kesempatan Kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru semakin tahun semakin meningkat namun peningkatannya sangat kecil dibandingkan dengan angka kesempatan kerja Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, angka kesempatan kerja kabupaten kotabaru sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat meningkatnya angka pengangguran. Setelah berakhir masa pamdemi covid 19 mulai tahun 2023 angka kesempatan kerja mulai mengalami peningkatan dan berimbas pada menurunnya angka pengangguran. Kenaikan prosentasi Angka Kesempatan Kerja kabupaten kotabaru terlihat pada grafik diatas dimana pada tahun 2022 sebesar 93,3%; tahun 2023 (93,92%) dan tahun 2024 (93,95%) sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan Angka Kesempatan Kerja nya yaitu Tahun 2022 (94,14%), Tahun 2023 (95,69) dan Tahun 2024 (95,80%)

serta Pemerintah Pusat juga mengalami naik turun Angka Kesempatan Kerja yaitu pada Tahun 2020 (95,26%) sedangkan Tahun 2021 mengalami penurunan (95,05%), mulai Tahun 2022 Angka Kesempatan Kerja nasional juga mengalami kenaikan ini dapat dilihat pada tahun 2022 (95,26%), ,Tahun 2023 (94,68) dan Tahun 2024 (95,09).

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Angka Kesempatan Kerja, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk
2. Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi
3. Peningkatan investasi daerah akan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat
4. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
5. Adanya keberpihakan dari pemerintah kabupaten melalui program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat lokal
6. Adanya program pembangunan daerah yang mengarah pada industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Angka Kesempatan Kerja, sebagai berikut:

1. Banyak penduduk perempuan yang memilih keluar dari pasar tenaga kerja untuk menjadi ibu rumah tangga
2. Kapasitas sumber daya yang ada pada saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kualifikasi pasar tenaga kerja
3. Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur
4. Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar
5. Ketersediaan lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi rendah
6. Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh wilayah
7. Para calon tenaga kerja yang dibina kurang memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal

8. Adanya perubahan iklim yang mengancam lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan perikanan

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerinntah Kabupaten Kotabaru berfokus pada penguatan aspek ketenagakerjaan sebagai pilar utama iklim investasi yang kondusif. Langkah ini diawali dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat agar lebih kompetitif di sektor formal, yang didukung secara teknis melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan kompetensi. Guna memusatkan seluruh layanan pendukung, pemerintah melaksanakan pembangunan pusat ketenagakerjaan terpadu serta menyediakan bursa tenaga kerja tingkat kabupaten untuk menjembatani kebutuhan antara investor dan pencari kerja.

Sinergi dengan pelaku usaha diperkuat melalui pembuatan kerja sama dengan investor untuk memprioritaskan penggunaan pekerja lokal, serta didorong oleh pengembangan industri padat karya yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagi masyarakat yang belum memenuhi kriteria kompetensi formal, pemerintah mengambil langkah preventif dengan penumbuhan minat wirausaha dan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda melalui program inkubasi untuk membangun ekosistem ekonomi mandiri. Seluruh rangkaian strategi ini ditutup dengan penyediaan layanan hubungan industrial yang efektif guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas sosial, sehingga para investor merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya secara berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru

Jika dibandingkan dengann tahun sebelumnya angkat kesempatan kerja kabupaten kotabaru mengalami kenaikan walaupaun sangat kecil. Namun demikian jika dibangdingkan dengan yang ditargetkan pada Tahun 2025 maka prosentasi angka kesempatan kerja tersebut belum tercapai 100 %. Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui program dan kegiatan :

- ✓ **Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja**

  Dalam Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pencari kerja local dilaksanakanlah kegiatan Pelatihan calon pencari kerja di BLK dengan melatih calon pencari kerja sebanyak 336 orang. Pelatihan yang diberikan di bidang Las sebanyak 64 orang, bidang Komputer sebanyak

32 orang, bidang Otomotif Roda 4 (empat) sebanyak 64 orang, Otomotif Roda 2 (dua) sebanyak 64 orang, Listrik sebanyak 32 oranga dan pembuatan roti dan kue sebanyak 32 orang. Diisamping pelatihan yang bersifat rutin dalam rangka mengikuti kebutuhan pasar kerja pada tahun 2024 juga diadakan pelatihan alat berat berupa Operator Exavator sebanyak 16 orang, Operator Buldozer sebanyak 16 orang dan Operator Du mp Truck sebanyak 16 orang.



Pelatihan Operator Buldozer



Pelatihan Operator Exavator

- ✓ **Program Penempatan Tenaga Kerja**

Dalam upaya melayani pencari kerja dengan pelaksanaan penerbitan Kartu Kuning/ Kartu Pencari Kerja tahun 2025 sebanyak 846 kartu. Dari Jumlah 846 orang yang mendapatkan pelayanan kartu Kuning (AK1) sebanyak 686 orang atau sebesar 81,08 % telah mendapat pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pemagangan calon pencari kerja baik dana yang bersumberkan APBD sebanyak 10 orang.



Kegiatan Pemagangan



Kegiatan Softskill

Selain kegiatan pemagang juga dilaksanakan kegiatan softskill dengan kerjasama dengan dunia usaha.

- ✓ **Program Hubungan Industrial**

Sebagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas dan hamonisasi hubungan industrial ketenaga kerja telah dilaksanakn beberapa kegiatan antara lain dengan dengan melaksanakan Koordinasi dan pembinaan ke beberapa Perusahaan yang ada di Kabupaten Kotabaru sebagai upaya agar tidak terjadinya perselisihan hubungan industrial yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Selain melaksakan pembinaan ke Perusahaan di Kabupaten Kotabaru, bidang hubungan industrial agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Peserta dialog hubunghan industril di hadiri beberapa Perusahaan seperti Sinar Mas Grup (Perusahaan Sawit), *Eagle Grup* Perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (Perusahaan Semen).



Rapat Dialog Hubungan Industrial



Rapat Penyusunan UMSK

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target angaka prosentase kesempatan kerja pada tahun 2025. Namum dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja juga tidak terlepas dari peran bebepa SKPD terumatama yang berhubungan dengan penanaman modal dan investasi, peningkatan UMKM dan lain sebagainya.

Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif yang dimilki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sampai saat ini Usaha Mikro, Kecil masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui inas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru berupaya berupaya dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. II.19
Capaian Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	4,94%	1,21%	1,41%	8,38%	90%	9%	10%	100%	9%

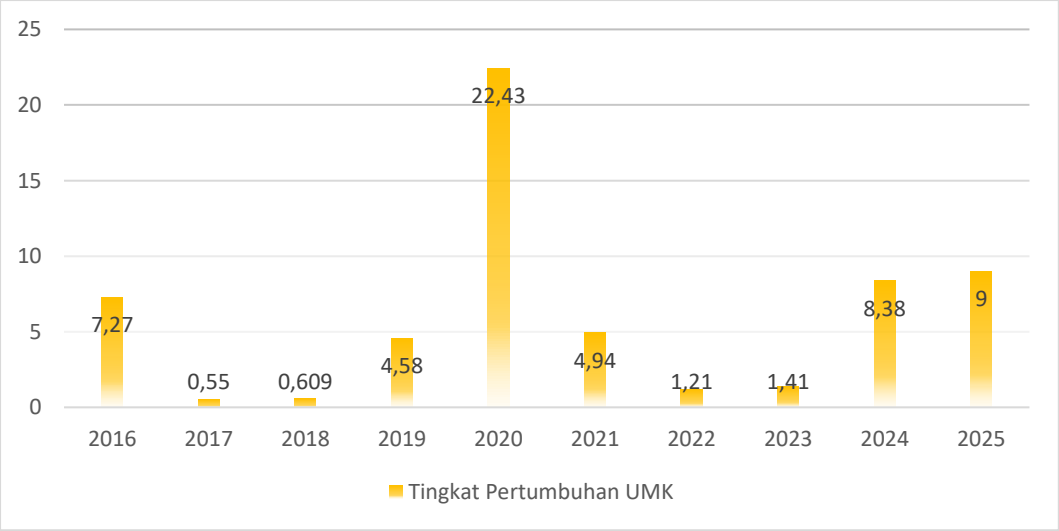
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Tingkat pertumbuhan UMK tahun 2025 terealisasi sebesar 9% dari target 90% sehingga persentase capaian sebesar 10% dapat dikategorikan ***Sangat Rendah.***

Pada tahun 2025, Tingkat pertumbuhan UMK realisasi mencapai 9% Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 8,38%.

Pencapaian Tingkat pertumbuhan usaha mikro kecil Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 9% dari target RPJMD sebesar 100% sehingga persentase capaian sebesar 9%. Perkembangan Tingkat pertumbuhan UMK dari tahun 2016 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. II.
Perkembangan Tingkat pertumbuhan UMK dari tahun 2016 s/d 2024



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026

Grafik menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam pada pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) selama periode 2016 hingga 2021, di mana titik puncaknya terjadi secara mengejutkan pada tahun 2020 dengan angka 22,43%. Namun, setelah lonjakan tersebut, tren pertumbuhan mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 (4,94%) dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2022 di angka 1,21%. Meskipun mulai tahun 2023 hingga 2025 terlihat adanya tren pemulihan yang positif secara bertahap dengan pertumbuhan meningkat dari 1,41% menjadi 9% di tahun 2025 akselerasi ini masih tergolong lambat jika dibandingkan dengan volatilitas yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Kesimpulannya, performa pertumbuhan UMK dalam empat tahun terakhir (2022–2025) berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan karena gagal memenuhi target ambisius yang telah ditetapkan. Dengan capaian riil yang hanya berkisar di angka 1,21% hingga 9%, angka-angka tersebut terpaut sangat jauh dari target tahunan yang dipatok pada angka 40, 60, 80, hingga 90. Kesenjangan yang sangat lebar ini menunjukkan bahwa meskipun ada pergerakan naik, strategi pengembangan yang diterapkan belum mampu memberikan dampak yang signifikan secara eksponensial, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memperkecil jarak antara realitas di lapangan dengan target kebijakan yang ada.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kewirausahaan, seperti pelatihan, akses pembiayaan, dan insentif pajak
2. Kemajuan teknologi mempermudah wirausahawan untuk mengembangkan bisnis mereka, seperti melalui e-commerce
3. Adanya kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi atau komunitas bisnis dapat memberikan peluang baru usaha
4. Adanya program pelatihan kewirausahaan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausahawan
5. Tingginya permintaan terhadap produk atau jasa tertentu mendorong pertumbuhan usaha

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil, sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan menjadi hambatan utama bagi banyak wirausahawan
2. Minimnya pengalaman dalam manajemen bisnis dapat menghambat perkembangan usaha
3. Kompetisi yang tinggi di pasar sering kali menjadi tantangan besar
4. Proses perizinan dan regulasi yang kompleks dapat menghambat operasional usaha
5. Kurangnya akses terhadap fasilitas seperti transportasi atau teknologi dapat menghambat efisiensi usaha

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerinntah Kabupaten Kotabaru telah merumuskan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh. Langkah ini dimulai dengan melakukan simplifikasi regulasi guna menyederhanakan proses perizinan bagi wirausahawan baru, yang didukung secara finansial melalui peningkatan akses pembiayaan lewat perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Untuk memastikan keberlanjutan usaha, pemerintah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup pengembangan soft skills maupun hard skills, serta memberikan edukasi manajemen keuangan agar para pelaku usaha mampu mengelola modal dengan lebih profesional. Penguatan kapasitas ini diperkokoh melalui pendampingan intensif bagi wirausahawan pemula guna membantu mereka mengatasi berbagai tantangan teknis pada tahap awal bisnis.

Sejalan dengan transformasi ekonomi modern, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mengoptimalkan pemasaran dan operasional bisnis, yang didukung secara struktural melalui peningkatan infrastruktur transportasi dan fasilitas teknologi di berbagai wilayah. Guna memperluas jangkauan pasar, dilakukan pula promosi produk lokal melalui kampanye masif untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global. Strategi ini semakin diperkuat dengan membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas bisnis, serta membantu para pelaku usaha dalam penguatan jaringan bisnis yang lebih luas. Melalui integrasi seluruh langkah tersebut, diharapkan tercipta

pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil yang signifikan dan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru.

Capaian realisasi Tingkat Pertumbuhan UMKM didukung dari, sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) nilai pagu Rp 4.206.261.513,- dan realisasi Rp.1.692.341.466,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- Program Pengembangan UMKM nilai pagu Rp. 410.059.838,- dan realisasi Rp. 399.319.746,-
  - Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Skala Kecil
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Rp.290.000.000,- dan reallisasi Rp. 289.389.109,-
  - Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
- Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi nilai pagu Rp. 0,- dan realisasi Rp. 0,-
  - Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kab/kota
- Program pendidikan dan latihan perkoperasian nilai pagu Rp. 257.108.068,- dan realisasi Rp. 256.261.600,-.
  - Kegiatan peningkatan dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 257.108.068- dan realisasi Rp. 256.261.600,-.
  - Kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam satu daerah kab/kota Rp. 0,- realisasi Rp. 0,-
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi Rp. 90.000.000 dan realisasi Rp. 89.984.7u00,-

- Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

➢ Program perizinan dan pendaftaran perusahaan nilai pagu Rp. 100.000.000 realisasi Rp.121.071.830,-.

- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang nilai pagu Rp. 100.000.000 realisasi Rp.80.541.130,-.
- Kegiatan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) nilai pagu Rp. 100.000.000 realisasi Rp.40.530.700,-.

➢ Program peningkatan sarana distribusi perdagangan nilai pagu Rp. 3.436.778.887,- dan realisasi Rp. 3.069.150.839,-.

- Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan nilai pagu Rp. 3.313.779.929,- dan realisasi Rp. 2.954.251.881,-.
- Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya nilai pagu Rp. 122.998.958 dan realisasi Rp.144.898.958,-.

➢ Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting nilai pagu Rp. 237.380.967,- dan realisasi Rp.163.096.967,-.

- Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota nilai pagu Rp. 237.380.967,- dan realisasi Rp.163.096.967,-.

➢ Program standardisasi dan perlindungan konsumen nilai Pagu Rp.324.999.756- dan realisasi Rp. 265.673.027,-.

- Kegiatan pelaksanaan metologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan nilai Pagu Rp. 324.999.756- dan realisasi Rp. 265.673.027,-.

Penyerahan Hibah Barang Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer





Penyerahan Hibah Barang Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer





Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan, Pengolahan Produksi UMKM dan SOP PLUT KUMKM di Banjarbaru





Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Aparat Pembina & UMKM di Kabupaten Kotabaru





Monitoring terkait kelengkapan perizinan pelaku UMKM Sembako & Tempe “Mama Wahyu” (Konsultan PLUT) di Kecamatan Kelumpang Barat



Pendataan Terkait Perijinan Usaha Pelaku UMKM Amplang Ikan Bulan



TUJUAN 3: MENINGKATKAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN AIR

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah dan Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Capaian Indeks Gini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 20
Capaian Indeks Gini

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Gini	0,306	0,331	0,316	0,296	0,274	0,275	99,63%	0,268	97,38%

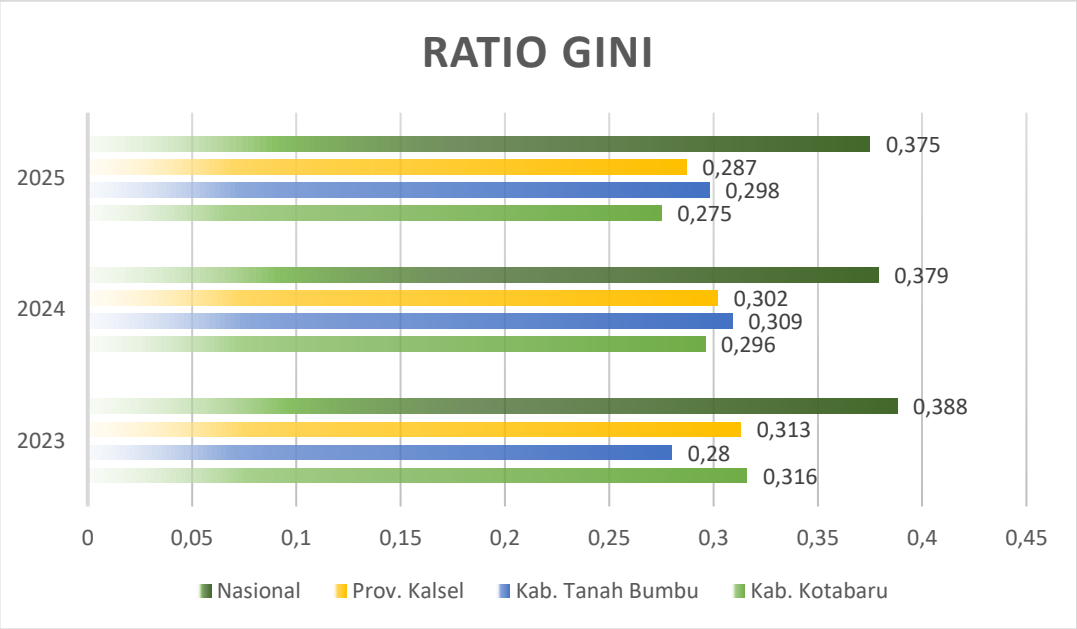
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Indeks Gini Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 0,275 dari target 0,274 sehingga persentase capaian sebesar 99,63% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Pencapaian Indeks Gini Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencapai 0,275 Angka ini mengalami peningkatan 0,021 poin poin dibandingkan Pencapaian Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,296.

Pencapaian Indeks Gini Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 0,275 dari target RPJMD sebesar 0,268 sehingga persentase capaian sebesar 97,38%. Semakin tinggi nilai indeks gini menunjukkan semakin tinggi pula kesenjangan pendapatan antar penduduk. Jika nilai indeks gini mencapai 1 menunjukkan terjadinya ketidakmerataan sempurna.

Grafik II.
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk yang positif di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru selama periode 2023 hingga 2025. Secara umum, angka Gini Ratio Nasional merupakan yang tertinggi (berkisar antara 0,388 hingga 0,375), sementara wilayah lingkup daerah menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yang mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan angka Gini Ratio yang konsisten di hampir seluruh wilayah ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerataan pendapatan dan akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, wilayah ini menunjukkan performa pemerataan ekonomi yang sangat impresif dan konsisten. Meskipun sempat berada di angka 0,316 pada tahun 2023 (lebih tinggi dari Kabupaten Tanah Bumbu saat itu), Kotabaru berhasil menekan angka ketimpangannya secara signifikan menjadi 0,296 pada tahun 2024, dan mencapai level terendah sebesar 0,275 pada tahun 2025. Dengan angka

tersebut, Kabupaten Kotabaru tidak hanya berhasil melampaui capaian nasional dan provinsi, tetapi juga resmi menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dibandingkan wilayah lainnya yang tertera dalam grafik pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di masyarakat Kotabaru semakin merata.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Rasio Gini, sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi daerah akan mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk
4. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatan PDRB per kapita
6. Adanya kebijakan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
7. Adanya kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha (ekonomi)Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Rasio Gini, sebagai berikut:

1. Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
2. Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
3. Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun
4. Adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan modalDiversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya melakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama dalam mencapai produktivitas daerah yang kompetitif dan berkeadilan. Upaya ini diakselerasi melalui penguatan sektor pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualifikasi akademik masyarakat agar mampu mencapai jenjang pendidikan tinggi atau sarjana. Dengan meningkatnya standar pendidikan, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang signifikan, sehingga masyarakat Kotabaru memiliki daya saing yang lebih kuat dalam mengisi peluang kerja profesional maupun dalam menciptakan inovasi ekonomi secara mandiri.

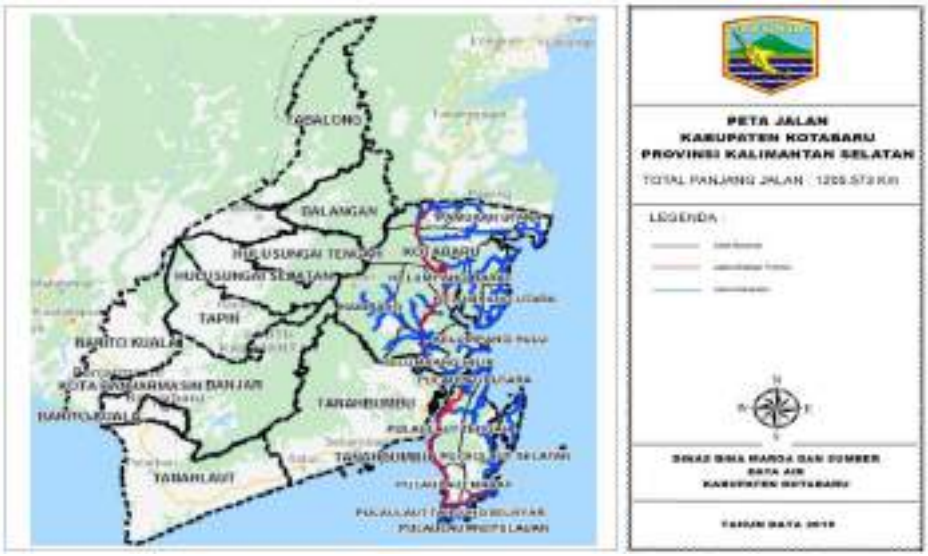
Paralel dengan pengembangan kapasitas individu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem jaring pengaman sosial melalui penyediaan jaminan sosial yang komprehensif bagi masyarakat miskin untuk melindungi mereka dari guncangan ekonomi. Langkah ini dibarengi dengan pelaksanaan kebijakan afirmasi yang sistematis guna memastikan masyarakat kelompok rentan mendapatkan akses yang setara di bidang pendidikan, layanan kesehatan, hingga permodalan usaha. Selain itu, dimensi keadilan gender menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan, di mana pemerintah mendorong kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita. Melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Kotabaru berupaya menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan daerah.

Peningkatan infrastruktur dasar yang layak untuk kesejahteraan rakyat dengan tingkat pemenuhan infrastruktur dasar menjadi tujuan adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik dengan membangun Komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah, PLN dan Dunia Usaha; rehabilitasi perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Perbankan dan Dunia Usaha; penuntasan dan pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan dermaga pendarat dan penyebrangan, penyediaan fasilitas armada laut berupa kapal Ferry untuk penyeberangan antar pulau sehingga dapat

menunjang kepentingan dan aktifitas masyarakat dan diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, Penyediaan Rumah Sakit Umum yang baik dan melayani, Puskesmas induk, Puskesmas Perawatan, Puskesmas keliling (Mobil dan Kapal), Puskesmas Siaga dan Pembantu serta Puskesdes/Puskeskam

Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

Agar peran infrastruktur dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan infrastruktur harus terkait dengan bangkitan-bangkitan pembangunan yang lainnya, pembangunan pertanian, perkebunan, budi daya pantai, kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan sebagainya serta masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan infrastruktur tersebut.



Infrastruktur jalan sangat penting dalam rangka menunjang perekonomian dan pelayanan pemerintahan. Kabupaten Kotabaru mempunyai panjang jalan sepanjang 1.330.952 Km, namun jalan dalam kondisi baik sepanjang 335.723 Km, sehingga diperlukan anggaran yang sangat besar dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut. Sasaran pertama dalam tujuan ini yaitu terpenuhinya peningkatan akses dan

konektifitas jalan indikator cakupan panjang jalan Kabupaten Kotabaru dalam kondisi mantap pada tahun 2023 dengan target sebesar 32,85%.

Sasaran kedua dari tujuan ini yaitu Mewujudkan konektivitas Kabupaten dengan indikator Rasio konektivitas Kabupaten dikatakan masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah Kecamatan dan desa yang belum baik kondisi jalannya dan juga karena Kecamatan di Kabupaten Kotabaru sebagian berada di pulau-pulau kecil. Pembangunan Infrastruktur perhubungan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kotabaru, melihat kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang merupakan daerah kepulauan dan wilayahnya tersebar serta luasan wilayah yang cukup besar tentu saja diperlukan infrastruktur dan sistem perhubungan yang cukup memadai.

Pembangunan infrastruktur perhubungan difokuskan pada penyediaan transportasi massa yang aman dan nyaman serta pemenuhan sarana prasaraanya, diantaranya pembangunan sarana pehubungan laut meliputi pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan antar pulau, perhubungan darat meliputi pengadaan sarana dan prasarana keselamatan jalan dan perhubungan udara meliputi peningkatan bandara Kabupaten Kotabaru.

Sasaran ketiga dari tujuan ini yaitu Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum. pembangunan sarana dan prasarana air bersih dalam rangka Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum. Untuk peningkatan layanan penyediaan air tentunya dimulai dari penyediaan air baku yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyediaan air baku difokuskan pada pembangunan dan perluasan waduk serta pencarian sumber air lainnya, termasuk pemanfaatan air bawah tanah dalam rangka pemenuhan air baku terutama pada saat musim kemarau yang setiap tahunnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih serta kebutuhan lainnya termasuk untuk irigasi pertanian.

Sasaran keempat untuk tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang yaitu Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi

dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik.

Sasaran kelima untuk tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang yaitu Meningkatnya kualitas perumahan dengan melaksanakan Penyedian rumah dan lingkungan yang layak merupakan tugas Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas hidup layak bagi masyarakat. Sasaran ini difokuskan pada terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menekan jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Kotabaru, untuk mewujudkan sasaran tersebut langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui penataan lingkungan kumuh serta pembangunan rumah susun pada kawasan kumuh dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk mengukur keberhasilan dalam sasaran ini diukur dengan Persentase peningkatan rumah layak huni.

Sasaran keenam untuk tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang yaitu Meningkatnya kualitas penataan ruang dengan lanjutan pembangunan perkantoran di kawasan Sebelimbingan yang diharapkan dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023, pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kotabaru, Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman kota serta pembangunan fasilitas umum lainya.

Sasaran ketujuh untuk tujuan ini Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan ukuran keberhasilannya Indeks Desa Membangun meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Sasaran kedelapan untuk tujuan ini Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan ukuran keberhasilannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan penjumlahan dari 30% indeks pencemaran air (IKA), 30 % indeks pencemaran udara (IKU), dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang ada 8 sasaran yang dinilai dengan 8 indikator kinerja utama. Secara rinci untuk indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 9: Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi

Pembangunan dan pembukaan jalan serta peningkatan kondisi jalan dan jembatan kondisi baik adalah kondisi jalan yang memang baik dan kondisi sedang. Indikator kondisi jalan baik salah satunya adalah kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 60 Km/Jam, sedangkan untuk Indikator kondisi jalan sedang salah satunya adalah kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 40 Km/Jam. Sasaran “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat kegiatan ekonomi” diukur melalui 1 indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut.

Tabel II.21
Capaian Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	32,19%	25,00%	27,85%	28,79%	33,18%	42,40%	127,78%	35,09%	120,83%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap tahun 2025 terealisasi sebesar 42,40% dari target 33,18% sehingga persentase capaian sebesar 127,78% dapat dikategorikan ***Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap realisasi mencapai 42,40%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 13,61 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 28,79%

Pencapaian Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap tahun 2025 terealisasi sebesar 42,40% dari target RPJMD sebesar 35,09% sehingga persentase capaian sebesar 120,83%.

Untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kotabaru didukung program Penyelenggaraan Jalan, kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi Jembatan. Pembangunan Jalan Review kondisi jalan sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II.22
Review dan Grafik Kondisi Jalan Tahun 2018 – 2024

Tahun	Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
2018	232.920	54.410	318.210	600.03
2019	194.785	85.566	294.106	641.116
2020	261.566	91.319	265.534	587.154
2021	254.921	133.101	566.905	250.646
2022	176.703	124.792	65.156	838.922
2023	210.372	125.351	48,140	821,710
2024	176.625	170.468	48,710	809.770
2025*	185.700*	170.000*	48.500*	801,373*

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Kondisi jalan pada tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami pergeseran tipis yang mencerminkan upaya pemeliharaan berkelanjutan, di mana kategori jalan dengan kondisi Baik diperkirakan meningkat sedikit menjadi 180,200 km dan kategori Sedang melanjutkan tren kenaikannya menuju 175,500 km. Di sisi lain, kategori Rusak Ringan diprediksi tetap stabil di angka 48,500 km, sementara kategori Rusak Berat diharapkan mengalami penurunan bertahap menjadi 801,373 km sebagai hasil dari konversi

perbaikan jalan yang rusak menjadi kategori sedang atau baik. Secara keseluruhan, narasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat progres dalam pengurangan jalan rusak berat, fokus utama di tahun 2025 kemungkinan besar tetap pada stabilisasi kondisi jalan agar tidak mengalami degradasi lebih lanjut, mengingat porsi jalan rusak berat masih mendominasi total panjang infrastruktur yang ada.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, sebagai berikut:

1. Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas masyarakat
2. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat melaporkan kondisi jalan yang rusak
3. Ketersediaan teknologi untuk pembangunan jalan di wilayah yang sulit

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan yang terluas di Provinsi Kalimantan Selatan
2. Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal
3. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten
4. Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat dikerjakan
5. Kendaraan yang melewati jalan banyak yang melebih kapasitas kemampuan jalan (ODOL)
6. Pembangunan utilitas sering merusak kondisi jalan
7. Ketergantungan pasokan material untuk pembangunan jalan dari luar daerah

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya menetapkan strategi penguatan infrastruktur jalan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah strategis ini diawali dengan pemetaan ruas jalan kewenangan kabupaten dan pemetaan digital kondisi jalan berbasis SIG guna menentukan prioritas penanganan berdasarkan dampak ekonomi yang

paling signifikan. Dari sisi pelaksanaan, dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan administrasi proyek guna memastikan proses konstruksi berjalan tepat mutu dan waktu, sehingga tercipta peningkatan kualitas jalan sesuai standar pada jalur penghubung pusat pertumbuhan serta penambahan jalan baru yang mengoneksikan wilayah produksi dengan pusat pemasaran.

Guna menjaga keberlanjutan kondisi jalan yang telah terbangun, pemerintah melakukan penguatan road maintenance management system dengan mekanisme respon cepat terhadap kerusakan, yang didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi pelaporan kerusakan jalan secara real-time. Selain aspek pemeliharaan, aspek pengawasan menjadi fokus utama melalui penindakan tegas dengan denda tinggi pada truk yang melebihi batas beban (ODOL) untuk mencegah kerusakan dini pada struktur jalan. Melalui kombinasi antara perencanaan berbasis data, kualitas konstruksi yang optimal, dan pengawasan beban jalan yang ketat, diharapkan target kemantapan jalan di Kabupaten Kotabaru dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah kabupaten kotabaru dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan beberapa program kegiatan guna pemenuhan target dengan mengikuti program pemerintah pusat berupa usulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Program Penyelenggaraan Jalan dengan sub kegiatan:

- Survei Kondisi Jalan/Jembatan, dengan melaksanakan Konsultansi Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan, serta Konsultansi Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan.
- Pembangunan Jalan, dengan melaksanakan Perkerasan Lapis Pondasi Agregat Kelas B (TMMD).
- Rekonstruksi Jalan, dengan melaksanakan
    1) Pemasangan Paving Block Jalan Gg.Borneo Desa Sungai Taib Kec.Pulau Laut Utara
    2) Pemasangan Paving Block Jalan Padat Karya RT.8 Desa Dirgahayu di Muka/Samping SDIT AL-IZZAH Kec Pulau Laut Utara.

3) Pemasangan Paving Block Jalan Padat Karya RT.9 Desa Dirgahayu di Muka/Samping SDIT AL-IZZAH Kec Pulau Laut Utara
4) Pemasangan Paving Block Jalan Borneo Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara
5) Pemasangan Paving Block Jalan Padat Karya Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara
6) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau - Sekayu Baru (K18-001)
7) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Laburan (K09-010) & Jalan Bangkalaan Dayak - Simpang Tiga Muara Urie (K09-012)
8) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Malangkayan - Muara Urie (K11-003)
9) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Malangkayan - Muara Urie (K11-003) Lanjutan
10) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Mangka (K16-006)
11) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Pelajau Baru - Pantai (K08-013)
12) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Pondok Labu (K18-005)
13) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Siayuh - Sampanahan (K12-001)
14) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Banian - Sungai Durian (K17-001)
15) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sulangkit - Tanjung Samalantakan (K14 - 005) & Jalan Sepapah - Sakalimau (K15-003)
16) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13-002)
17) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tarjun - Serongga (K08-001) (Putus Kontrak)
18) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Telaga Sari (K08-011)
19) Review Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Lontar - Tanjung Seloka (K5-001)
20) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Lontar - Tanjung Seloka (K5-001) (DAK Fisik Penugasan)
21) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bangkalaan Dayak - Simpang Tiga Muara Urie (K09-012)
22) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Hilir Muara Sigam (K01-036)
23) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Magalau Hilir - Sampanahan (K12-002)

24) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Poltek - Gunung Ulin (via Waduk gunung ulin) (K01-104)
25) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sahapi - Swarga (K08-009)
26) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sisimangaraja (K01-010)
27) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sungai Durian - Rantau Jaya (K17-005)
28) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sungai Durian - Trombongsari (K17-004)
29) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sungai Kupang - Mangkirana (K09-003)
30) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Batu - Sangsang (K13-001)
31) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13-002) Lanjutan
32) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau - Sekayu Baru (K18-001)
33) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Lalapin (K11-008)
34) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Lintang Jaya - Mulyoharjo (K18-004)
35) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Malangkayan - Gadang - Cantung Kiri (K11-001)
36) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Malangkayan - Muara Urie (K11-003) Lanjutan
37) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Pelajau Baru - Pantai (K08-013)
38) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Sepapah- Sakalimau (K15-003)
39) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Siayuh - Sampanahan (K12-001)
40) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Banian - Sungai Durian (K17-001)
41) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Tiga Tanjung Lalak - Tanjung LalakUtara (K06-001)

42) Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Seloka - Berangas - Kotabaru (K07-005) (DAK)
43) Perencanaan Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Seloka - Berangas - Kotabaru (K07-005)

- Rehabilitasi Jalan dengan melakukan pemeliharaan jalan kabupaten
- Pemeliharaan Rutin Jalan dengan melakukan pemeliharaan jalan reaksi cepat PUPR
- Pembangunan Jembatan dengan melakukan
  A. Pembangunan Box Culvert Desa Balamea Kecamatan Pamukan Utara
  B. Pembangunan Jembatan Banjarsari - Basuang 4 (63.02.K15-002.04) Kecamatan Sampanahan
  C. Pembangunan Jembatan Banjarsari - Basuang 7 (63.02.K15-002.07) Kecamatan Sampanahan
  D. Pembangunan Jembatan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara
  E. Pembangunan Jembatan Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara
  F. Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian
  G. Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kalian Kecamatan Pamukan Utara
  H. Pembangunan Jembatan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
  I. Pembangunan Jembatan Sungai Bulan - Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan
  J. Pembangunan Jembatan Tanjung Batu - Sulangkit 10 (63.02.K13-002.10) Kec. Kelumpang Utara (Relokasi Jembatan Simbuang)
  K. Pembangunan Jembatan Tanjung Batu - Sulangkit 8 (63.02.K13-002.08) Kec. Kelumpang Utara
  L. Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sang-Sang Kecamatan Kelumpang Tengah
  M. Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan

N. Perencanaan Pembangunan Jembatan Malangkayan - Muara Urie Kecamatan Hampang
O. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sei Mandin 01 (63.02.203.03) Kecamatan Pulau Sebuku
P. Perencanaan Pembangunan Jembatan Silver Blok F Kecamatan Pulau Laut Utara
Q. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 10 (63.02.K14-005.10) Kecamatan Pamukan Selatan (reviu)
R. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 2 (63.02.K14-005.02) Kecamatan Pamukan Selatan
S. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 3 (63.02.K14-005.03) Kecamatan Pamukan Selatan
T. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 6 (63.02.K14-005.06) Kecamatan Pamukan Selatan
U. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 8 (63.02.K14-005.08) Kecamatan Pamukan Selatan (reviu)
V. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 9 (63.02.K14-005.09) Kecamatan Pamukan Selatan (reviu)
W. Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Kupang - Mangkirana Kecamatan Kelumpang Hulu
X. Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Batu - Sulangkit 5 (63.02.K13-002.05) Kecamatan Kelumpang Tengah
Y. Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Batu - Sulangkit 6 (63.02.K13-002.06) Kecamatan Kelumpang Tengah

- Rehabilitasi Jembatan dengan melaksanakan :
  1) Rehabilitasi Jembatan Gantung Magalau
  2) Rehabilitasi Jembatan Gantung Muara Urie
  3) Rehabilitasi Jembatan Tanjung Serudung
  4) Rehabilitasi Jembatan



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Bakau - Sekayu Baru (K18-001)



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Seloka - Berangas - Kotabaru (K07-005) (DAK)



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Lontar - Tanjung Seloka (K5-001) (DAK Fisik Penugasan)



Pemasangan Paving Block Jalan Borneo Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara



Pemasangan Paving Block Jalan Padat Karya RT.8 Desa Dirgahayu di Muka/Samping SDIT AL-IZZAH Kec Pulau Laut Utara



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Magalau Hilir - Sampanahan (K12-002)



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Malangkayan - Muara Urie (K11-003) Lanjutan



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Pelajau Baru - Pantai (K08-013)



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Banian - Sungai Durian (K17-001)



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Tanjung Batu - Sulangkit (K13- 002) Lanjutan



Peningkatan Struktur Ruas Jalan Simpang Tiga Tanjung Lalak - Tanjung LalakUtara (K06-001)



Pembangunan Jembatan Desa Sang-Sang Kecamatan Kelumpang Tengah



Pembangunan Jembatan Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara



Perencanaan Pembangunan Jembatan Sei Mandin 01 (63.02.203.03) Kecamatan Pulau Sebuku



Pembangunan Jembatan Silver Blok F Kecamatan Pulau Laut Utara



Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 2 (63.02.K14-005.02) Kecamatan Pamukan Selatan



Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 3 (63.02.K14-005.03) Kecamatan Pamukan Selatan



Pembangunan Jembatan Sulangkit - Tanjung Samalantakan 6 (63.02.K14-005.06) Kecamatan Pamukan Selatan



Pembangunan Jembatan Tanjung Batu - Sulangkit 6 (63.02.K13-002.06) Kecamatan Kelumpang Tengah



Rehabilitasi Jalan Hasanudin



Rehabilitasi Jalan Hidayah



Rehabilitasi Jembatan Pulau Laut Timur



Rehabilitasi Jembatan Tanjung Selayar



Rehabilitasi Jembatan Pamukan Utara

Sasaran 10: Mewujudkan Konektivitas Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan Tujuan “Meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang” dengan indikator “Indeks Gini” maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru, salah satu sasaran yang akan dicapai dalam “Mewujudkan konektivitas Kabupaten” dapat dilihat dari hasil realisasi, target pada tabel berikut.

Tabel. II.23
Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Rasio Konektivitas Kabupaten	0,66%	0,66%	0,69%	0,896	0,94%	0,60%	63,82%	1,00%	60%

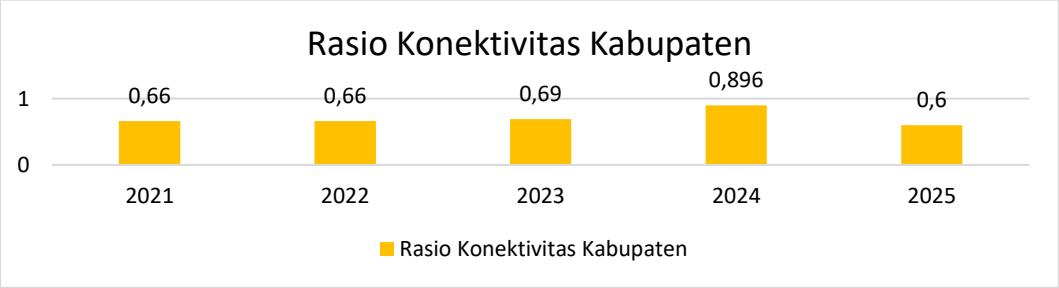
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2025 terealisasi sebesar 0,60 dari target 0,88% sehingga persentase capaian sebesar 63,82% dapat dikategorikan ***Sedang***

Pada tahun 2025, persentase rasio konektivitas Kabupaten Kotabaru realisasi mencapai 0,60. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,296 dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,896.

Pencapaian target persentase rasio konektivitas tahun 2024 terealisasi sebesar 0,60 dari target RPJMD sebesar 1,00% sehingga persentase capaian sebesar 60%.

Grafik
Perkembangan Rasio Konektivitas Kabupaten



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, sebagai berikut:

1. Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat
2. Tersedianya pelabuhan angkutan laut, udara, dan darat di Kabupaten Kotabaru
3. Posisi strategis Kabupaten Kotabaru di wilayah ALKI II
4. Adanya investasi dari pihak swasta yang juga turut membangun jalan
5. Adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk penyelesaian jembatan penghubunga Pulaulaut dan Pulau Kalimantan

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten Kotabaru merupakan yang terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki pulau-pulau kecil

2. Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal sehingga masih banyak jalan dalam kondisi rusak
3. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten
4. Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat dikerjakan
5. Pembangunan utilitas sering merusak kondisi jalan
6. Ketergantungan pasokan material untuk pembangunan jalan dari luar daerah
7. Sebagian besar infrastruktur yang baik hanya berada di wilayah perkotaan

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan strategi penguatan infrastruktur transportasi yang terintegrasi secara multimoda. Langkah ini diawali dengan pemetaan ruas jalan kewenangan kabupaten dan pemetaan digital kondisi jalan berbasis SIG untuk menetapkan prioritas penanganan berdasarkan dampak ekonomi yang paling signifikan. Melalui perbaikan manajemen pengelolaan administrasi proyek, pemerintah memastikan peningkatan kualitas jalan sesuai standar pada pusat pertumbuhan serta penambahan jalan baru yang menghubungkan wilayah produksi dengan wilayah pemasaran. Upaya pemeliharaan aset juga diperkuat melalui penguatan road maintenance management system dengan mekanisme respon cepat, yang didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi pelaporan kerusakan jalan secara real-time.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan geografis wilayah kepulauan, fokus tindak lanjut diarahkan pada pengembangan konektivitas jaringan transportasi darat dan laut yang lebih solid. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan dermaga penyeberangan serta pembukaan rute kapal ferry baru guna memperlancar arus barang dan orang antarwilayah. Mengingat besarnya kebutuhan investasi infrastruktur, pemerintah melakukan optimalisasi anggaran dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendanai proyek-proyek strategis daerah. Dengan mengintegrasikan keunggulan konektivitas darat dan laut yang didukung

pembiayaan kreatif, diharapkan aksesibilitas seluruh wilayah di Kabupaten Kotabaru dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Program/ Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut pada Tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang leding sektornya Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ):
    a. Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, berupa pengadaan perlengkapan jalan seperti rambu dan marka jalan. Pada tahun 2023.
    b. Kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, hanya berupa bantuan operasional terminal dan evaluasi serta monitoring kegiatan kantor terminal.
    c. Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Yaitu pengawasan dan pengendalian parkir di wilayah Kabupaten Kotabaru.
    d. Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, untuk operasional UPT PKB) dan pengadaan system informasi pengujian kendaraan bermotor *smartcard* pemeliharaan dan kalibrasi alat PKB serta melaksanakan koordinasi sebanyak 1 kali laporan.
    e. Kegiatan Audit dan inspeksi, melaksanakaan sosialisasi ke kecamatan dalam lingkup wilayah kabupaten Kotabaru tentang keselamatan angkutan barang sebanyak 3 kali.
    f. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dilaksanakan koordinasi dan pengawasan angkutan umum trayek angkutan pedesaan setiap bulannya.
    g. Kegiatan angkutan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu wilayah kabupaten/kota, koordinasi dan pengendalian rencana trayek perkotaan, contohnya angkutan taxi bandara.
    h. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taxi yang wilayah operasinya dalam satu daerah kabupaten/kota, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin angkutan taxi dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.



2. Program Pengelolaan Pelayaran
   a. Kegiatan Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pengumpan lokal, yang melingkupi pengadaaan dermaga apung dan rambu lalu lintas laut dan pengawasan angkutan laut dilaksanakan sebanyak 12 kali.
   b. Kegiatan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, hanya terfokus pada pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan teluk gosong selama 12 bulan.
   c. Di program Pengelolaan Pelayaran, pada program ini bagaimana mengawasi terhadap jalur transportasi laut, sungai dan danau sesuai dengan kondisi daerah yang terbentang antara pulau – pulau yang tidak bisa ditempuh dengan hanya menggunakan transportasi darat. Untuk itu dari berbagai fasilitas penunjang yang mana juga didalam nya ada kegiatan masyarakat khususnya nelayan yang sangat memerlukan dermaga-dermaga itu juga yang tidak luput dari

pengawasan Dinas Perhubungan bagaimana bisa bermanfaat seluas-luasnya terhadap program dan kegiatan yang dijalankan.

Untuk itu kedepan bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru agar bisa bergerak kedepan berdasarkan baseline data atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "Teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program, antara lain:

- Melaksanakan perencanaan dibidang perhubungan seperti penyusunan Tatanan Transportasi Lokal, Penyusunan Dokumen Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum, Melaksanakan Kajian Keterhubungan Antarmoda, Melaksanakan Kajian Penataan Fasilitas Angkutan Umum Serta Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perencanaan Lainnya dibidang Perhubungan.
- Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan, Zebra Cross, Penerangan Jalan Umum, Alat Pengendali Insyarat Lalu Lintas, Warning Light, halte angkutan umum, Dermaga yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana tranportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.





Sasaran 11: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum

Air bersih yaitu salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari hari dan memenuhi persyaratan pengairan, untuk treatment air minum dan sanitasi.

Tabel. II.24
Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	46,60	49,04%	37,21%	37,81%	38,91%	82,27	211,43%	41,31%	199,15%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kotabaru terealisasi sebesar 82,27% dari target 38,91% sehingga persentase capaian sebesar 211,43% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih realisasi mencapai 82,27%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 44,46 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 37,81%.

Pencapaian Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kotabaru terealisasi sebesar 82,27% dari target RPJMD sebesar 41,31% sehingga persentase capaian sebesar 199,15%.

Program yang mendukung IKU ini akan terus dilaksanakan sehingga dapat memenuhi target IKU yang direncanakan dan semakin bertambahnya masyarakat yang terlayani air bersih yang aman di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru. Dan IKU ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kotabaru.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, sebagai berikut:

1. Komitmen tinggi investasi pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur penyedia air bersih dan minum
2. Kabupaten Kotabaru memiliki sungai yang dapat menjadi sumber air baku bagi masyarakat
3. Peningkatan kebutuhan rumah tangga yang signifikan akan air bersih dan minum
4. Adanya dukungan penyediaan air minum dari perusahaan daerah

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Rasio Konektivitas Kabupaten, sebagai berikut:

1. Kondisi cuaca kemarau mengakibatkan kapasitas air baku mengalami penurunan yang signifikan
2. Kapasitas embung yang menjadi penampung tidak bertambah signifikan dibanding dengan peningkatan masyarakat

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan strategi penguatan infrastruktur air baku dari sisi kuantitas maupun jangkauan distribusi. Langkah strategis ini diawali dengan mengoptimalkan sumber air yang ada melalui normalisasi embung yang menjadi penopang persediaan air baku guna mengembalikan fungsi

tampung maksimal, yang dibarengi dengan pembangunan embung baru untuk peningkatan kapasitas air baku secara keseluruhan. Penguatan fisik ini didukung penuh oleh aspek tata kelola melalui perbaikan manajemen sumber daya air baik oleh pemerintah maupun PDAM, guna memastikan efisiensi pemanfaatan air dan keberlanjutan layanan bagi masyarakat.

Untuk memastikan air baku tersebut sampai ke pemukiman warga, pemerintah memprioritaskan pembangunan intake air baku melalui jaringan perpipaan sebagai langkah nyata dalam perluasan pelayanan distribusi air minum. Melalui integrasi antara pembenahan sarana penampungan (embung), penguatan manajemen operasional, dan perluasan jaringan perpipaan hingga ke unit terkecil rumah tangga, diharapkan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Kotabaru dapat meningkat secara signifikan dan merata, sekaligus menjamin ketahanan air bagi masyarakat di masa mendatang

Upaya pemerintah kabupaten kotabaru dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan beberapa program kegiatan guna pemenuhan target dengan mengikuti program pemerintah pusat berupa usulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Program Pengelolaan dan Pengembangan system penyediaan air minum (Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota) dengan sub kegiatan:

A. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan melaksanakan:
    1) Inventarisasi Data SPAM Kabupaten Kotabaru
    2) Pengadaan Instalasi Air Bersih (WTP)
    3) Pembangunan Pipanisasi Desa Cantung Kanan RT.02 Kec Hampang
    4) Pembangunan Pipanisasi Desa Gunung Batu Besar Kec. Sampanahan
    5) Pembangunan Pipanisasi Menara air dan Tandon Air 3000 L Desa Rantau Jaya Kec. Sungai Durian
    6) Pembangunan Pipanisasi Rehab Bak Air Desa Gunung Ulin RT.06 RW.02 Kec. Pulau Laut Utara

7) Pembangunan Pipanisasi RT.3 Desa Batu Tunau Kec. Pulau Laut Timur (Jl. Sungai Sembilang)
8) Pembangunan SPAM Desa Sungai Betung Kec. Sampanahan
9) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200L) Desa Bakau Kec. Pamukan Utara
10) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200 L) Desa Balamea Kec. Pamukan Utara
11) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200L) Desa Gunung Batu Besar Kec. Sampanahan
12) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200L) Desa Mayang Sari Kec. Pamukan Barat
13) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200L) Desa Rampa Cengal Kec. Pamukan Selatan
14) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200 L) Desa Sungai Kupang RT.10 Kec. Kelumpang Hulu
15) Pengadaan Tandon Air Bersih (1200L) Desa Wonorejo Kec. Pamukan Utara
16) Pengadaan Tandon Air Bersih (600 L) RT.06 Desa Pondok Labu Kec. Pamukan Selatan
17) Pengadaan Tandon Air Bersih Desa Sakalimau Kec. Pamukan Selatan
18) Pengadaan Tandon Air Bersih RT.01, RT.02, dan RT.03 Desa Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar
19) Pengadaan Tandon Air Bersih RT.01, RT.02, dan RT.03 Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar
20) Pengadaan Tandon Air Bersih RT.04, RT.05, dan RT.06 Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar
21) Pengadaan Tandon 1200 Liter Kab Kotabaru
22) Pengadaan Tandon Air (1200L) Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang
23) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu
24) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Banua Lawas Kec. Kelumpang Hulu

25) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Kalian Kec. Pamukan Utara
26) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Karang Payau Kec. Kelumpang Hulu
27) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Langkang Baru Kec. Pulau Laut Timur
28) Pengadaan Tandon Air (1200) Liter Desa Lontar Timur Kec. Pulau Laut Barat
29) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Mangkirana Kec. Kelumpang Hulu
30) Pengadaan Tandon Air (1.200 Liter) Desa Mayang Sari Kec. Pamukan Barat
31) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Pudi Seberang Kec. Kelumpang Utara
32) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Rampa Cengal Kec. Pamukan Selatan
33) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Sangsang Kec. Kelumpang Tengah
34) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu
35) Pengadaan Tandon Air (1200 Liter) Dusun Kaar Desa Batuah Kec. Pamukan Barat
36) Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Desa Baharu Utara RT. 11 Kec. Pulau Laut Sigam
37) Pengadaan Water Treatment Plant (WTP) Kabupaten Kotabaru
38) Perencanaan Teknik Pembangunan SPAM Desa Cantung Kanan Kec. Hampang
39) Perencanaan Teknik Perluasan SPAM Desa mangga kec. Kelumpang Utara Perencanaan Teknik Perluasan SPAM Desa Telaga Sari Kec. Kelumpang Hilir
40) Perencanaan Teknis DAK Intergasi 2024 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara
41) Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Perpipaan IKK Hampang Kecamatan Hampang

B. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
   Dengan melaksanakan:
   1) Pemeliharaan Jaringan Perpipaan IKK
   2) Peningkatan SPAM IKK Sengayam
   3) Peningkatan SPAM IKK Serongga

C. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan,
   Dengan melaksanakan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Hampang Kec. Hampang (DAK Penugasan) dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pudi Kec. Kelumpang Utara.

D. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
   Dengan melaksanakan belanja bahan pelumas dan bahan bakar solar dan pembayaran tagihan Listrik serta pemeliharaan jaringan.


Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Desa Baharu Utara RT. 11 Kec. Pulau Laut Sigam


Pembangunan SPAM Desa Cantung Kanan Kec. Hampang


DAK Intergasi 2024 Desa Stagen Kec. Pulau Laut Utara


DAK Pipanisasi Desa Telaga sari


SPAM Berangas


SPAM Sarang Tiung

Sasaran 12: Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi

Dalam rangka mewujudkan Tujuan “Meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang” dengan indikator “Indeks Gini” maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru, salah satu sasaran yang akan dicapai dalam “Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Layanan Sanitasi” dapat dilihat dari hasil realisasi, target pada tabel berikut.

Tabel. II.25
Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengolahan Limbah Domestik

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik	15,32%	23,51%	24,75%	24,86%	25%	72,68	290,72%	25,14%	289,10%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik tahun 2025 terealisasi sebesar 72,68% dari target 25% sehingga persentase capaian sebesar 290,72% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik realisasi mencapai 24,86%. Angka ini mengalami peningkatan 47,82 poin dibandingkan dengan tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik tahun 2025 terealisasi sebesar 72,68% dari target RPJMD sebesar 25,14% sehingga persentase capaian sebesar 289,10%.

Capaian Persentase rumah tangga yang memiliki akses Pengolahan Limbah Domestik didukung dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan.

Upaya pemerintah kabupaten kotabaru dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan beberapa program kegiatan guna pemenuhan target dengan mengikuti program pemerintah pusat berupa usulan kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dengan melakukan :
  a. Perencanaan Teknis Tangki Septik individual DAK Sanitasi
  b. Pembangunan Bilik WC Skala Individual
  c. Pembangunan MCK 2 x 2 M2 RT.01 s/d 05 Desa Teluk Sirih Kecamatan Pulau Laut Selatan
  d. Pembangunan MCK Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam
  e. Pembangunan dan Penambahan SR IPAL Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara
  f. Pengadaan Tangki Septik Skala Indiviual
  g. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Geronggang Kec.Kelumpang Tengah (DAK Sanitasi)
  h. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Pembelacanan Kec. Kelumpang Selatan (DAK Sanitasi)
  i. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Sebanti Kec. Pulau laut Barat (DAK Sanitasi)
  j. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Sepagar Kec. Pulau Laut Barat (DAK Sanitasi)
  k. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Sungai Punggawa Kec. Kelumpang Tengah (DAK Sanitasi)
  l. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Tamiang Bakung Kec. Kelumpang Tengah (DAK Sanitasi)
  m. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Tanjung Batu Kec. Kelumpang Tengah (DAK Sanitasi)

n. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Tanjung Pangga Kec. Kelumpang Selatan (DAK Sanitasi)
o. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar (DAK Sanitasi)
p. Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Tanjung Sungkai Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar (DAK Sanitasi)

- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan melakukan Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan KSM DAK Sanitasi
- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT dengan melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Kelembagaan dan Operasional IPLT Kab. Kotabaru serta Pembangunan IPLT Kabupaten Kotabaru

		
DAK Pipanisasi Desa Telaga sari	MCK gedambaan	MCK Sarng Tiung
		
Bilik WC Langadai	Bilik WC Pondok Labu	Bilik WC Tarjun

Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Perumahan

Rumah Adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No.04 thn 1992 tentang perumahan dan permukiman), Berdasarkan Permenpera No.22 Tahun 2008 Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah diukur melalui Persentase peningkatan rumah Rumah Layak Huni yang terjangkau dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut

Tabel. II.26
Capaian Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026 Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase peningkatan rumah layak Huni	96%	96%	99,16%	88,53%	98,85%	23,77	24,04%	99,53%	23,88%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Persentase peningkatan rumah layak huni tahun 2025 terealisasi sebesar 23,77% dari target 98,85% sehingga persentase capaian sebesar 24,04% dapat dikategorikan ***Sangat Rendah.*** Capaian ini berdasarkan sisa dari kegiatan peningkatan rumah layak huni yang belum terealisasi pada target yang telah ditentukan, sehingga persentase terhadap total rumah layak huni telah 100%

Pada tahun 2025, Persentase peningkatan rumah layak huni realisasi mencapai 23,77%, angka ini mengalami penurunan sebesar 64,76 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 88,53%.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja (23,77%) dengan target akhir RPJMD pada tahun 2026 (99,53%) maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 23,88%. Angka ini bearti kinerja Kabupaten Kotabaru hampir mencapai target akhir di RPJMD melalui peningkatan ketersediaan rumah layak huni.

Adapun data hasil pelaksanaan dari pembangunan dan rehab rumah di Kabupaten Kotabaru, adalah sebagai berikut:

Tabel II.28
Jumlah Rehab Rumah dengan menggunakan
anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Tahun	JUMLAH REHAB RUMAH			Jumlah
	APBN/DAK	APBD PROV /BSPS	APBD Kabupaten	
2016	-	400	-	400 Unit
2017	-	250	79	329 Unit
2018	163	152	-	315 Unit
2019	136	125	12	273 Unit
2020	204	11	-	215 Unit
2021	262	-	118	380 unit
2022	142	10	156	308 unit
2023	-	-	692	692 unit
2024	160	-	946	1.106 unit

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Pencapaian tujuan maka pada tahun 2024 dilaksanakan pembangunan stimulasi bedah rumah yang didukung oleh APBD Kabupaten sebanyak 1.106 unit.

Realisasi kinerja dalam rangka mendukung ketersediaan rumah layak huni dilakukan melalui 3 program yaitu:

- ✓ **Program pengembangan perumahan**

  Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, Pada tahun 2025 Dinas Perumahan rakyat, permukiman dan pertanahan Kabupaten Kotabaru hanya memberikan rekomendasi siteplan untuk pengembangan perumahan, sebagai pengendali/monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan dengan memenuhi dokumen pengembangan pembangunan perumahan yang diberikan sebanyak 19 developer.



Rapat koordinaasi tetang perumahan



Konsultasi tentang pengendalian pembanguan perumahan



Tinjau lapangan pelaksanaan pembanguan perumahan oleh pengembang



Monev pelaksanaan pengawasan pengembang



Cek Lapangan



Gambar hasil pelaksanaan pengembang perumahan subsidi

✓ **Program kawasan permukiman**

1) Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

   Pembangunan kawasan permukiman kawasan kumuh diluar Surat Keputusan Kawasan Kumuh mengacu pada Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/550/kum/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 sebanyak 118, 35 Hektar, Kecamatan Pulaulaut Sigam dan Pulaulaut Utara., terletak di 12 Desa/Kelurahan.

2) Kegiatan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar.

Sebagai monitoring evaluasi dalam pendataan terhadap wilayah layak huni untuk update data wilayah kumuh di perkotaan / ibukota kabupaten yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan pulaulaut Utara dan Pulaulaut Sigam.

3) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektar.

Hal ini diwujudkan pada pembangunan di kawasan permukiman kumuh yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/550/KUM/2020.



Penyerahan buku rekening bantuan RTLH



Tinjau lapangan beserta aparat dari TNI



Verifikasi data penerima bantuan



Contoh rumah penerima bantuan RTLH

✓ **Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**

1) Kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan.

Penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan melalui perbaikan jalan yang berada di daerah perumahan masyarakat dengan memperhatikan Surat Keputusan Jalan Kabupaten, yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Cek Lapangan pembanguan Jalan lingkungan



Pengawasan Realisasi Fisik Jalan Lingkungan



Tinjau lapangan pelaksanaan pekerjaan fisik



Pengecekan Hasil Pekerjaan



Pekerjaan pemasangan dak Jembatan



Surve hasil pekerjaan PSU

Stakeholder yang terlibat dalam penyediaan rumah layak huni terjangkau, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

   Dalam hal ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. Kementerian PUPR berkontribusi besar dalam meningkatkan jumlah ketersediaannya melalui beberapa program pembangunan yang dilaksanakan di daerah yaitu :

   a) Pembangunan Rumah Khusus Nelayan;
   b) Pembangunan Rumah Susun MBR;
   c) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan dana APBN maupun DAK.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel

Dinas PKP Provinsi Kalsel bertindak sebagai Koordinator dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan Kementerian PUPR. Usulan-usulan yang bersumber dari Kabupaten dikumpulkan ke Dinas PKP provinsi Kalsel untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian PUPR. Setelah kegiatan disetujui maka Dinas PKP Kalsel bertugas memantau perkembangan pembangunannya sampai dengan selesai dan termanfaatkan dengan baik. Di Dinas ini pula terdapat sebuah institusi yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR yang berkedudukan di Provinsi yaitu SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) penyediaan perumahan provinsi Kalsel. Institusi ini yang mengawal dan melakukan pengawasan melekat terhadap proyek-proyek Kementerian PUPR di Propinsi Kalsel

3. Pengembang Perumahan (Developer)

   Pengembang Perumahan (Developer) menjadi pelaku utama dalam melaksanakan peran pembangunan Rumah Layak Huni Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Sejuta Rumah yang didukung oleh Kementerian PUPR dengan penyediaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar MBR yang belum memiliki rumah.

4. Pemerintah Daerah/Kabupaten

   Dalam rangka percepatan peningkatan jumlah ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. Pemerintah Daerah/Kabupaten melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan dapat mengambil peran dalam mendukung pertumbuhannya melalui program-program pendukung yang bersumber dari APBD

5. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu).

   Pelayanan Perizinan oleh DPMPTSP yang terkait dengan ketersediaan rumah layak huni terjangkau adalah pelayanan IMB (Izin Mendirikan bangunan). Namun pelayanan IMB ini tidak terbatas hanya pada rumah MBR saja namun pembangunan rumah secara umum yang dalam prakteknya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu, misalnya orang yang memang taat hukum/aturan perundang-undangan atau orang yang mengurus ijin IMB untuk keperluan persyaratan pembiayaan perumahan melalui pinjaman di Bank.

Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Lokasi kegiatan pembangunan harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruangnya. Pemanfaatan ruang di kabupaten Kotabaru berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032.

Tabel. II.28
Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	100%	97,20%	100%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 pada indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) terealisasi sebesar 97,20% dari target 97,20% sehingga persentase capaian sebesar 100% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW realisasi mencapai 97,20%. Angka ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 97,20% karena tidak adanya pengalihan fungsi lahan cagar alam, KBTTP dan kawasan lindung.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 pada indikator Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) terealisasi sebesar 97,20% dari target RPJMD sebesar 97,20% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, pola ruang dibagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan pola tata ruang RTRW Kabupaten Kotabaru tahun 2012-2031 luas kawasan lindung ditetapkan seluas 214.669,48 Ha dan kawasan budidaya ditetapkan seluas 733.214,21 Ha. Total luas seluruh kawasan adalah 947.883,69 Ha.

Tabel Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025

No.	Pola Ruang		Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (Ha)	Luas (Ha)	Persentase	
	Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya				Sesuai	Tidak Sesuai
1	Cagar Alam		40,654.88	9,849.80	50,504.68	80.50	19.50
2	KSA		89.68	0.00	89.68	100.00	0.00
3	Kwsn Lindung		123,951.43	40,123.69	164,075.12	75.55	24.45
4		KBHP	229,928.88	2,967.92	232,896.80	98.73	1.27
5		KBPD	4,414.86	1,023.88	5,438.74	81.17	18.83
6		KBPLB	23,035.29	5,989.35	29,024.64	79.36	20.64
7		KBTPLK	14,478.28	1,768.04	16,246.32	89.12	10.88
8		KBTTP	365,710.59	59,018.14	424,728.73	86.10	13.90
9		KIN Besar	3,104.24	76.87	3,181.11	97.58	2.42
10	4	KIN Menengah	3,306.73	213.56	3,520.29	93.93	6.07
11		Kpem Perdesaan	7,314.09	754.63	8,068.72	90.65	9.35
12		Kpem Perkotaan	9,555.38	430.21	9,985.59	95.69	4.31
13		Pelsus	29.13	5.01	34.14	85.33	14.67
14		Ferry	54.48	34.65	89.13	61.12	38.88
JUMLAH			**825,627.94**	**122,255.75**	947,883.69	87.10	12.90

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan melaksanakan Program/Kegiatan:

✓ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang.
- Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan koordinasi fasilitasi persetujuan substansi sebanyak 1 kali.
- Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan sub

kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang yaitu melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas PUPT Pemerintah Kota Banjarmasin sebanyak 1 kali.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung diwilayah Kab/Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat fungsi bangunan gedung. Penataan Bangunan gedung ini bertujuan meningkatkan pegelolaan, pembangunan dan penataan bangunan berdasarkan RTRW. Tahun 2023 ini kegiatan yang dilakukan adalah penataan bangunan gedung dengan cara memberikan rekomendasi pembangunan gedung dari pihak pemohon yang disesuaikan dengan dokumen RTRW, disamping itu melakukan pemabangunan yang bersifat prioritas di daerah.

✓ Program Penyelengaraan Penataan Ruang

- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tataruang daerah kabupaten/kota

  Kegiatan yang dilakukan pada kewenangan ini adalah menyusun revisi dokumen RTRW yang ada mengingat kondisi pemanfaatan ruang yang ada mengalami perubahan fungsi.
- Koordinasi koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten /kota.

  Kegiatan yang dilakukan adalah memverifikasi dokumen permohonan pembangunan bangunan yang disesuaikan dengan dokumen RTRW.
- Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten /kota

  Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan ruang yang seharusnya serta memberikan peringatan-peringatan jika terjadi pembangunan yang berada pada area tertentu pada dokumen RTRW.

Dengan melaksanakan lanjutan perubahan Dokumen rencana Tata Ruang yang disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada, meliputi 3 unsur, yaitu : pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis. Penyusunan Perubahan dimaksud ada beberapa tahapan, untuk tahun 2020 baru dalam tahap materi teknis pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Kotabaru, pada tahun 2021 tersusun draft revisi RTRW.

Dengan melaksanakan lanjutan perubahan Dokumen rencana Tata Ruang yang disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada, meliputi 3 unsur, yaitu : pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
  a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruangdengan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Penataan Ruang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :
  a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
  b. Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :
  a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan Menyusun Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
  b. Sistem Informasi Penataan Ruang



Persetujuan Substansi Tata Ruang



Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang



Koordinasi Penyusunan Penataan Ruang

Sasaran 15: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Percepatan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong menjadi salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka memajukan adat, tradisi, budaya masyarkat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat Desa guna pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat. Indeks Desa Membangun merupakan salah satu cara untuk Mengukur/Mengetahui Perkembangan, Status Kemandirian suatu desa, melalui Analisis Data dan Nilai Skoring yang bertujuan untuk Mensejahterakan masyarakat desa di dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta berguna untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di desa. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun yaitu :

a. Komponen Indeks Desa Membangun
b. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa; dan
c. Penggunaan dan Pengelolaan data indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) ditetapkan klasifikasi desa, sebagai berikut :

a. Desa Mandiri (Desa Sembada) : IDM > 0,8155
b. Desa Maju (Desa Pra sembada) : 0,7072< IDM ≤ 0,8155
c. Desa Berkembang : 0,5989< IDM ≤ 0,7072
d. Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) : 0,4907< IDM ≤ 0,5989
e. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) : IDM ≤ 0,4907

Tabel. II.29
Capaian Indeks Desa Membangun

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026(%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Desa Membangun	0,66520	0,68208	0,72246	0,7417	0,6693	0,7417*	110,81%	0,66990	110,71%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026,

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Desa Membangun tahun 2025 terealisasi sebesar 0,7417

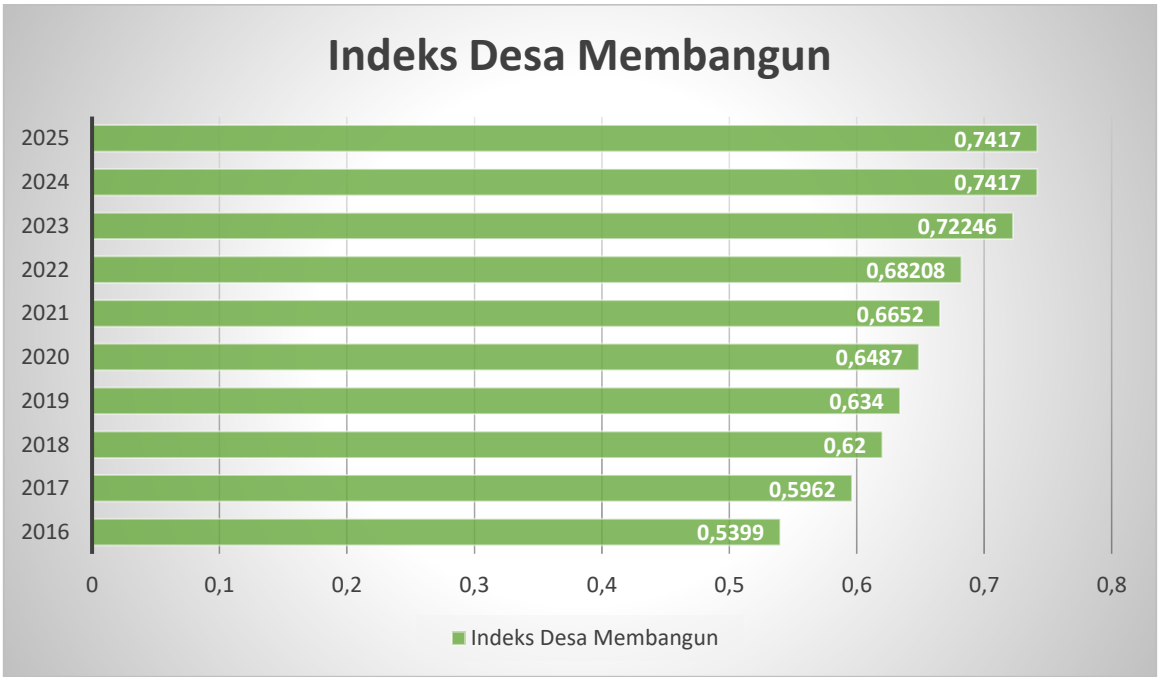
dari target 0,6693 sehingga persentase capaian sebesar 110,81% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2024, Indeks Desa Membangun realisasi mencapai 0,7417. Angka ini tidak mengalami perubahan poin dibandingkan dengan tahun 2024.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Desa Membangun tahun 2025 terealisasi sebesar 0,7417 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,6699 sehingga persentase capaian sebesar 110,71% mempunyai arti bahwa sudah melampaui dari target yang diharapkan selama 5 tahun.

Berdasarkan grafik Indeks Desa Membangun Kabupaten Kotabaru terlihat mengalami kenaikan pada tahun 2016 hingga 2024. Dari sini terlihat peningkatan kesejahteraan tiap tahunnya.

Grafik II.
Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016 s/d 2025



Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Dalam rangka mencapai tujuan Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 melalui Program/Kegiatan:

- ✓ Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
  - Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat melaksanakan Pendataan dan Pembinaan lembaga adat desa (LAD) di 5 (lima) kecamatan wilayah Kabupaten Kotabaru, terdiri dari Kec. Hampang,

Kec, Kelumpang Hilir, Kec. Kelumpang Hulu, Kec. Sampanahan, dan Kecamatan Sungai Durian yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Bulan Maret tahun 2024.





- Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
  - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di 5 (lima) Kecamatan wilayah Kabupaten Kotabaru, yaitu Kec. Pamukan Selatan, Kec. Pulaulaut Barat, Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar, Kec. Pulaulaut Kepulauan, Kec. Pulaulaut Selatan
  - Melaksanakan Bimbingan Teknis KPM di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kec. Pulaulaut Tanjung Selayar 20 orang, terdiri kader KPM dan kader posyandu, Kec. Pulaulaut Kepulauan 18 orang, terdiri kader KPM dan kader posyandu. Hal ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Desa yang baik dan benar.
  - Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) P3MD Se kabupaten Kotabaru dengan jumlah peserta sebanyak 100 Orang Tenaga Ahli (TA) yang ada di desa dan di kecamatan.
  - Melaksanakan Rakor Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Kotabaru dan Koordinasi dalam menentukan strategi dan Langkah-langkah kebijaksanaan, pembinaan, monitoring dan pengembangan Posyandu Pelayanan Terpadu dengan peserta berjumlah 45 orang.



Rakor Pokjanal Posyandu di Gedung Ratu Intan, tanggal 13 November 2024



Monitoring dan Evaluasi Posyandu di Kecamatan Pulaulaut Kepulauan dan Pulaulaut Selatan

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2024 di 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru yaitu :
  1. Kecamatan Kelumpang Barat Jumlah Peserta 12 Orang
  2. Kecamatan Kelumpang Selatan Jumlah Peserta 18 Orang
  3. Kecamatan Pamukan Barat Jumlah Peserta 10 Orang
  4. Kecamatan Pamukan Selatan Jumlah Peserta 22 Orang
  5. Kecamatan Pamukan Utara Jumlah Peserta 26 Orang
  6. Kecamatan Sampanahan Jumlah Peserta 20 Orang
  7. Kecamatan Sungai Durian Jumlah Peserta 14 Orang

  dengan Jumlah Total Peserta sebanyak 122 orang, Nara Sumber berasal dari Dinas PMD Kotabaru (1 Orang) Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kotabaru sebanyak (4 orang)
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan RT/RW di 9 Kecamatan dalam Wilayah Kotabaru Yaitu :
  1. Kecamatan Hampang
  2. Kecamatan Kelumpang Barat
  3. Kecamatan Kelumpang Hulu
  4. Kecamatan Pamukan Barat
  5. Kecamatan Pulau Laut Barat
  6. Kecamatan Pulau Laut Selatan
  7. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar

8. Kecamatan Sampanahan
9. Kecamatan Sungai Durian





b. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna

Sebagai wujud ikut mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut, pada tahun 2024 ini Pemerintah kabupaten Kotabaru kembali menyediakan anggaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebesar **Rp. 37.999.000**,-. Namun karena ada Kegiatan Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (PINDESKEL) dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan di Atrium Qmall Banjarbaru yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 10 November 2024, sehingga mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp. 37.577.000,- menjadi **Rp. 75.576.000,-**.

Adapun lokasi kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024, yang telah direncanakan sebagai tempat pelaksana kegiatan sosialisasi dan diseminasi, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	
1	Sungai Durian	1	Manunggul Lama
		2	Manunggul Baru
		3	Rantau Jaya
		4	Terombong Sari
		5	Buluh Kuning
		6	Gendan Timburu
		7	Rantau Buda

No	Kecamatan	Desa	
2	Pamukan Selatan	1	Tanjung Samalantakan
		2	Talusi
		3	Gunung Calang
		4	Sakadoyan
		5	Mulyodadi
		6	Sesulung
		7	Rampa Cengal
		8	Sakalimau
		9	Pondok Labu
		10	Sukadana

Pada mulanya tahun 2024 ini hanya dapat mengalokasikan 2 kali sosialisasi atau 2 (dua) kecamatan saja, dengan **17 (tujuh belas)** desa dan 2 kali Pembinaan, Namun karena adanya perubahan anggaran maka tahun ini dapat diselesaikan 2 (dua) kecamatan lagi, dengan jumlah desa sebanyak **24 (dua puluh empat)**, yaitu :

No	Kecamatan	Desa	
1	Sampanahan	1	Sukamaju
		2	Sunai Betung
		3	Banjarsari
		4	Basuang
		5	Sampanahan Hilir
		6	Sepapah
		7	Sampanahan
		8	Gunung Batu Besar
		9	Rampa Manunggul
		10	Papa'an
2	Pamukan Utara	11	Binturung
		12	Harapan Baru
		13	Sekayu Baru
		14	Bakau
		15	Kalian
		16	Tamiang

No	Kecamatan	Desa	
		17	Bepara
		18	Pamukan Indah
		19	Mulyoharjo
		20	Tamiang
		21	Balaimea
		22	Wonorejo
		23	Lintang Jaya
		24	Betung

Dengan anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 56.247.000,- (74,42%)** ini, telah dilaksanakan sesuai dengan target yaitu sebanyak **1 Dokumen (100%)** dan berdampak pada tumbuhnya lembaga Posyantek Desa dikecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu sebanyak **41 Posyantekdes,** sehingga total seluruh posyantek desa yang terbentuk di kabupaten kotabaru adalah berjumlah **196** posyantekdes **(98,98%).**



Sosialisasi TTG di Kecamatan Sungai Durian (06 s.d 08 Agustus 2024

c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

- Pelaksanaan Rapat Konsultasi (Rakon) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024, di Gedung Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, dengan peserta pengurus TP-PKK kecamatan masing-masing terdiri dari 7 orang

- Pameran Ekspose Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke-74
- Pelaksanaan jamboree kader pada tanggal 12 November 2024, di lapangan siring laut kotabaru
- Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kompetensi kader dasawisma yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024
- Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring (SPEM) menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan 10 program PKK di Kabupaten Kotabaru.
- Melaksanakan Lomba Kelompok Dasawisma Tingkat Kecamatan dan Desa dan Lomba Tertib Administrasi Tingkat Kecamatan





✓ Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan melaksanakan:

  Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan pembinaan/ fasilitasi adminstrasi pemertintahan desa dengan membentuk Tim Pelaksana kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar pembinaan/fasilitasi kepada Desa menjadi lebih optimal. Pembinaan/ Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa dalam rangka Sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa.



Kegiatan Sosialisasi ke Aparatur Desa di Grand Surya Hotel pada tanggal 15 Oktober 2024

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

  Penyusunan Produk Hukum Desa ini akan membantu Mengarahkan Proses Perancangan Peraturan Desa menggunakan pendekatan Strategis dengan tetap mengikuti Prosedur perancangan Peraturan Perundang-Undanggan yang ditetapkan oleh Pemerintah. kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kec Sungai Durian (Desa Buluh Kuning), Kec. Kelumpang Hulu (Desa Sungai Kupang), Kec. Kelumpang Selatan (Desa Sungai Kupang Jaya), Kec. Sampanahan (Desa Suka Maju), Kec.Kelumpang Utara (Desa Pudi Seberang).



Kegiatan Pembinaan/ Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa di Desa Sungai Kupang Jaya, Kecamatan Kelumpang Selatan

- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - Melaksanakan pendampingan Desa dalam penyusunan perencanaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) satu kali setiap tahun. Untuk Tahun 2024 ada 198 Desa yang dikukuhkan kembali Kepala Desanya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memuat perubahan masa kerja Kepala Desa yang semula hanya 6 tahun menjadi 8 tahun, sehingga perlu dilakukan juga perubahan dan penyesuaian dokumen RPJM Desa. Untuk tahun 2024 ada 41 Desa yang sudah difasilitasi dan wajib melakukan penyesuaian dokumen RPJM Desa karena sudah habis di tahun 2024 sedangkan sisanya yang lain melakukan penyusunan dokumen perubahan RPJM Desa di tahun 2025.
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa. Dengan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program-program yang sudah direncanakan dan dianggarkan dan juga laporan setelah program kegiatan dilaksanakan baik program yang bersifat fisik maupun non fisik. Dengan realisasi anggaran di tahun 2024 yaitu **Rp. 102.138.000,-** atau **(63,89%)** ini, telah dilaksanakan sesuai dengan target yaitu fasilitasi perencanaan desa untuk **198 Desa** dan monitoring evaluasi pembangunan desa untuk **50 desa (100%)** dan berdampak pada tertibnya administrasi desa dan terpenuhinya dokumen desa dalam kegiatan perencanaan desa juga dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan perencanaannya.



Bimtek Penyusunan RKP Desa dan Tupoksi PKA dalam Penyusunan APB desa di Hotel Grand surya tanggal 17 – 20 September 2024



Bimtek Penyusunan RKP Desa dan Tupoksi PKA dalam Penyusunan APB desa di Hotel Grand surya tanggal 17 – 20 September 2024

- Kegiatan **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
  - Dokumen Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada seluruh desa se kabupaten kotabaru sebanyak 198 desa dengan target keluaran sebanyak 3 dokumen :
    1. Dokumen Pelaksanaan Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2023;
    2. Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2024; dan
    3. Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2025.
  - Melakukan pembinaan/pendampingan dan sekaligus monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di beberapa kecamatan meliputi :
    1. Pemeriksaan kelengkapan SPJ BTL DD;
    2. Pemeriksaan kelengkapan SPJ DD Tahap II, DAD Tahap I TA. 2024;
    3. Pemeriksaan kuitansi yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa yang dikeluarkan kaur keuangan langsung kepada penyedia;
    4. Pemeriksanaan kuitansi yang dilakukan melalui swakelola dikeluarkan kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan; dan

5. Pemeriksaan kuitansi belanja pegawai dikeluarkan kaur keuangan kepada penerima yang bersangkutan.

- Sosialisasi Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2025, dibentuk panitia pelaksana dan narasumber dari bidang bina pembangunan desa Dinas PMD Kabupaten Kotabaru.




Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2024 di Kecamatan Pamukan Barat

- Kegiatan **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

  pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ini dapat membantu kepentingan Masyarakat pada umumnya dalam rangka pembangunan didesa sekaligus membantu Pemerintah Desa. kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kec. Kelumpang Utara, Kec. Sungai Durian, Kec. Kelumpang Hulu, Kec. Kelumpang Selatan, Kec. Kelumpang Tengah, Kec. Sampanahan. kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Hukum serta Pengatahuan Hukum Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Kotabaru dilaksanakan di 19 Kecamatan terdiri dari 171 Desa.




Kegiatan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Kejaksaan di Kecamatan Pulaulaut Barat dan Pulaulaut Kepulauan

- **Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa**

  kegiatan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dilaksanakan di 4 (enpat) Kecamatan, yaitu :, Kec. Kelumpang Hulu, Kec. Kelumpang Selatan, Kec. Sampanahan, Kec. Sungai Durian.

- **Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa**

  Untuk tahun 2024 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Kerjasama Antar Desa adalah sebagai berikut:

  1. BUMDesa Barokah Desa Kulipak dan Bumdesa Tirtasari desa Karang Sari Indah Kecamatan Pulau Laut Timur
  2. BUMDesa Barokah Desa Teluk Tamiang Kecamatan Pulau Laut Tg. Selayar.
  3. BUM Desa Cahaya Abadi Desa Gendang Timburu kecamatan Sungai Durian.
  4. Kecamatan Hampang.
  5. Kecamatan Pulau Laut Barat
  6. BUMDesa Amanah Sang-sang Desa Sang-sang Kecamatan Kelumpang Tengah.
  7. Kecamatan Sungai Durian.

8. Kecamatan Kelumpang Selatan.
9. Kecamatan Panukan Barat dan BUMDesa Batuan Maju Bersama Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat.
10. Kecamatan Sampanahan.
11. Kecamatan Kelumpang Barat.
12. Kecamatan Pulau Laut Selatan dan BUMDesa Nyiur Melambai Desa Tanjung Seloka Serta BUMDesa Marasa Tanjung Seloka Utara.
13. DPMD Provinsi Kalimantan Selatan.
14. KEMENDES PDTT
15. Expo BUMDesa di Lapangan Murjani Banjarbaru



Kegiatan Penilaian Lomba Bumdes Tingkat Provinsi, untuk Kotabaru diwakili oleh bumdes cahaya abadi di Desa Gendang Timburu, Sungai Durian

a. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Melaksanakan Pengukuhan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD se kabupaten kotabaru.





Kegiatan Pengukuhan serta penambahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD di Kecamatan Masing-Masing

b. Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pembentukan perangkat desa dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu : Kec. Sampanahan, Kec. Kelumpang Selatan dan Kec. Kelumpang Hilir. ,



b. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan maka dilaksanakanlah fasilitasi penyusunan profil desa di 3 kecamatan sebanyak 25 Desa. Dengan adanya Fasilitasi penyusunan profil desa ini dapat membantu kepentingan Masyarakat

pada umumnya dalam rangka pembangunan didesa sekaligus membantu Pemerintah Desa.



c. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

- Pembinaan/ fasilitasi manajemen pemerintahan desa dalam rangka Sosialisasi Peraturan Bupati kotabaru nomor 07 tahun 2018 tentang susunan organisasi tata pemerintahan desa bagi Kasi Pemerintah
- Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa bagi Kasi Pemerintahan





Kegiatan Sosialisasi

d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

- Pembinaan/fasilitasi Penyelenggaran Pengelolaan Aset Desa dalam rangka Sosialisasi Aplikasi SIPADES DiKantor Kecamatan Kelumpang Barat 04 April 2024

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa Bagi Aparatur Kabupaten dan Desa se Kalimantan Selatan 1 Agustus 2024

e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD





Kegiatan Pertemuan Anggota BPD pada triwulan IV di kecamatan Pulaulaut Utara.

f. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

- Melakukan Pembinaan/ Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa khususnya di lingkup Bidang Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar pembinaan/fasilitasi kepada Desa menjadi lebih optimal.
- Pembinaan/ Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bagi Kepala Desa se Kabupaten Kotabaru 13 November 2024.
-

g. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

- Melakukan Pembinaan/ Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintah baik PNS maupun Non PNS. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar pembinaan/fasilitasi kepada Desa menjadi lebih optimal.

- Pembinaan/ Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam rangka Pelaksanaan Lomba Desa di Desa SAHAPI 07 Mei 2024.





Kegiatan Penilaian Lomba Desa Kabupaten Kotabaru di Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir.

Sasaran 16: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan sebagai bentuk pertanggungjawabkan kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di Kabupaten Kotabaru, sektor industry mempengaruhi kualitas udara dan kebisingan, dengan terbukanya lahan dan asap hasil pembakaran industry. Meningkatnya sektor industri juga berpengaruh pada kualitas air yang apabila pada

hasil akhir pengolahan dalam bentuk limbah yang dialirkan ke IPAL terjadi kebocoran atau kerusakan maka dapat mencemari lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan penjumlahan dari 30% indeks pencemaran air (IKA), 30 % indeks pencemaran udara (IKU), dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.30
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026(%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capain (%)		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50	72,20	74,47	76,09	67,73	80,22	118,44%	67,86	118,21%

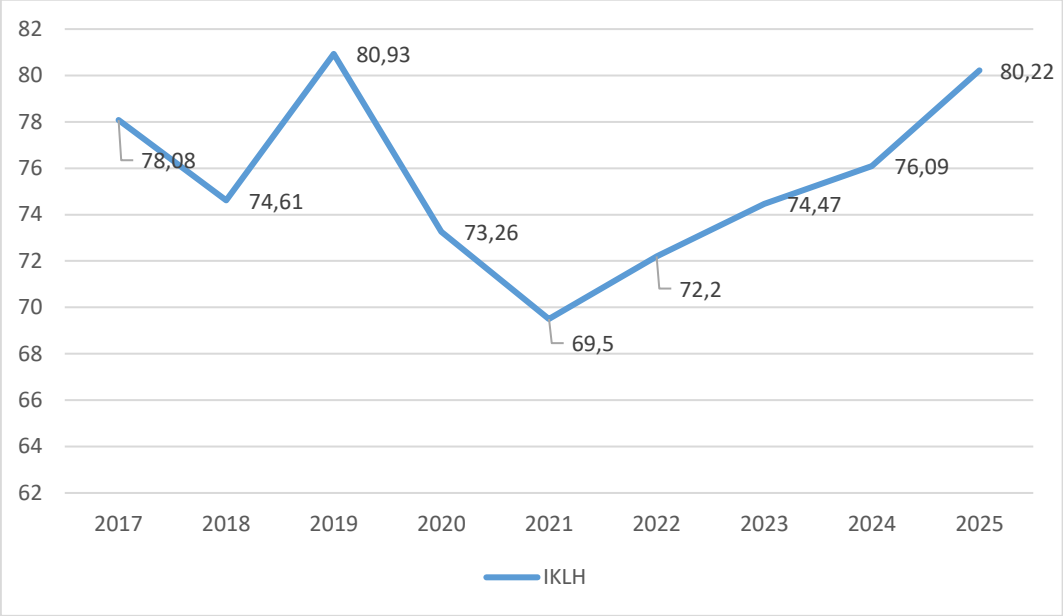
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 80,22% dari target 67,73% sehingga persentase capaian kualitas lingkungan pada tahun 2025 sebesar 118,44% atau masuk kategori ***Sangat Tinggi,*** dalam perpektif IKLH angka indeks tersebut menunjukan kinerja lingkungan hidup harus lebih ditingkatkan dan memerlukan usaha terakselerasi dalam pemeliharaan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran lingkungan. Walaupun dengan kondisi kebutuhan data dalam perhitungannya masih kurang memenuhi untuk sampel pengujian kualitas air.

Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 sebesar 80,22 ini mengalami peningkatan sebesar 4,13 poin dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 76,09. Dan apabila capaian realisasi indeks kualitas lingkungan tersebut sebesar 80,22 dibandingkan target akhir RPJMD sebesar 67,86 sudah mencapai 118,21%.

Perkembangan IKA, IKU, IKTL, IKLH dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s.d 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Berdasarkan grafik II.14 diatas, menunjukkan IKLH Kabupaten Kotabaru dari tahun 2017 hingga 2025, terlihat fluktuasi yang cukup dinamis namun menunjukkan tren pemulihan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan skor 69,5, pemerintah daerah berhasil melakukan berbagai intervensi lingkungan yang efektif sehingga angka tersebut terus merangkak naik secara konsisten hingga mencapai skor 80,22 pada tahun 2025.

Peningkatan tajam dari tahun 2023 (74,47) ke tahun 2025 (80,22) mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan sumber daya alam, pengawasan terhadap limbah industri, serta upaya rehabilitasi lahan di Kabupaten Kotabaru telah berjalan dengan optimal. Angka 80,22 ini juga melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai rekor tertinggi di tahun 2019 (80,93), yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian alam.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha/industri terhadap dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sehingga limbah hasil aktivitas industri lebih terkendali.

2. Penambahan luasan taman kota dan area hijau di wilayah Kotabaru yang berkontribusi pada kualitas udara dan estetika kota
3. Peningkatan jangkauan pelayanan sampah dan penguatan Bank Sampah yang mengurangi beban pencemaran pada tanah dan air.
4. Keberhasilan dalam penanaman kembali dan pemulihan lahan kritis

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Risiko kebakaran lahan pada musim kemarau yang sewaktu-waktu dapat menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara drastis akibat kabut asap

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekosistem. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong sektor industri di wilayah Kotabaru untuk mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi industri hijau dan penggunaan teknologi produksi bersih. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan emisi gas buang, limbah cair, dan residu produksi lainnya langsung dari sumbernya, sehingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas industri dapat dikurangi secara signifikan sejalan dengan target pencapaian kualitas udara dan air yang lebih baik.

Selain fokus pada sektor industri, pemerintah daerah juga mengoptimalkan sinergi dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang difokuskan pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem lokal. Program ini tidak hanya bersifat teknis-konservatif, tetapi juga menyasar pada aspek sosiologis melalui edukasi perubahan perilaku masyarakat secara masif, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang bertanggung jawab. Dengan memadukan komitmen kepatuhan industri dan partisipasi aktif masyarakat melalui dukungan kemitraan swasta, diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru dapat terus meningkat, sekaligus menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan melaksanakan Program/Kegiatan:

- ✓ **Program perencanaan lingkungan hidup**, Kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, yaitu dengan melaksanakan

inventarisasi dan penyusunan dokumen IKPLHD serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH

- ✓ **Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**, Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan melakukan pembelian botol sampel, tiang, passive sampler, melakukan pemasangan tiang sampler passive di Kecamatan Pamukan Barat, pengambilan dan pengujian sampel air sebanyak 100 sampel dan pengujian sampel udara sebanyak 16 sampel, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



- ✓

- ✓ **Program pemulihan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**

Kegiatan penanaman dibagi menjadi 3 (tiga) program *Mangrove for banua*, penghijauan Sempadan Sungai dan Kotabaru Hijau. Kegiatan *Mangrove for banua* dilaksanakan di Semisir Kec. Pulaulaut Tengah. Melaksanakan Survei calon lokasi penanaman mangrove dan penanaman mangrove di Desa Semisir Kecamatan

Pulaulaut Tengah Bersama dengan mahasiswa KKN Fakultas Perikanan dan Kelautan serta penanaman mangrove di Desa Seratak Kecamatan Pulaulaut Timur sebanyak ±8.200 bibit, dapat dilihat pada gambar berikut:



✓ **Program pengelolaan keanekaragaman hayati**.

Kegiatan pengelolaan keankaragaman hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati dengan melakukan penyerahan bibit, melaksanakan konsultasi pengawas rehab Gedung Kantor Persemaian Permanen, Rehab Gedung Kantor Persemaian Permanen pembayaran jasa pengelolaan lingkungan di Persemaian Permanen, melaksanakan koordinasi dan permintaan data pengelolaan keanegaragaman hayati pada Balai Konservasi, melaksanakan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati, dapat dilihat pada gambar berikut:



✓ **Program Pengendalian bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah beracun berbahaya (Limbah B3)**

Kegiatan penyimpanan Sementara Limbah B3, sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Sementara Limbah B3 pada 8 (delapan) Pelaku Usaha, sebagai berikut:

1. PT Fas, Kecamatan Kelumpang Hulu

2. CV. ANUGERAH MOTOR, Kec. Pulaulaut Utara
3. PT. Pesonalintas, Kec. Kelumpang Barat
4. PT. Silo, Kec. Pulau Sebuku
5. Hotel Grand Surya, Kec. Pulaulaut Utara
6. CV. Bamega Motor, Kec. Pulaulaut Utara
7. CV. Cahaya Indah, Kec. Pulaulaut Utara
8. PT. Abadi Mineral Resources, Kec. Pulaulaut Tengah





✓ **Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).**

kegiatan terkait permohonan izin PPLH yang saat ini disebut Persetujuan Teknis (Perstek) dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) yang terbagi menjadi kategori pembuangan air limbah domestik, pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Hingga 13 Desember 2021, tercatat pengajuan Perstek dan SLO PPLH yang masuk dan telah dikeluarkan persetujuan teknis sebanyak 10 (sepuluh) buah dan SLO sebanyak 9 (sembilan) buah.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.Kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup.

✓ **Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**

Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah dan Penghargaan Adiwiyata (Peningkatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan) Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Sekolah yang telah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah dengan standar tertentu akan mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Yang dilakukan pada 16 (enam belas) sekolah.



- ✓ **Program penanganan pengaduan lingkungan hidup**

  Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota. Pengelolaan Pengaduan Masyakarat terhadap PPLH Kab/Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru menerima 7 laporan pengaduan. Yang terdapat di 4 (empat) lokasi kecamatan, antara lain: Kecamatan Pulaulaut Tengah, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pulaulaut Utara, dan Kecamatan Kelumpang Hilir.

- ✓ **Program pengelolaan persampahan**

  Kegiatan pengelolaan sampah, sub kegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali dengan melaksanakan Koordinasi Terkait Adipura ke DLH Prov Kalimantan Selatan serta melaksanakan Pengelolaan sampah dan pelestarian Lingkungan. Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakuukan pemilahan, pengumpulan, pengangkatan pengolahan dan pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota dengan melaksanakan Pemeliharan Tanah Lapangan Penimbunan Barang di Tempat Pemrosesan Akhhir Sampah. Kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan Koordinasi terkait Usulan TPS3R pada BP2WKS. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA dengan 2 TPS3R dan Rapat Evaluasi Penanganan sampah dengan Petugas Kebersihan dan Pengawas Kebersihan.

TUJUAN 4: MENINGKATNYA KEWASPADAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

Dalam mencapai tujuan 4 (empat) yaitu meningkatnya kewaspadaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non alam menggunakan indikator Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:

Tabel. II.31
Capaian Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Risiko Bencana	Indeks	172,71	162,17	147,79	152,79	153,79	108,02	129,76%	152,99	129,39%

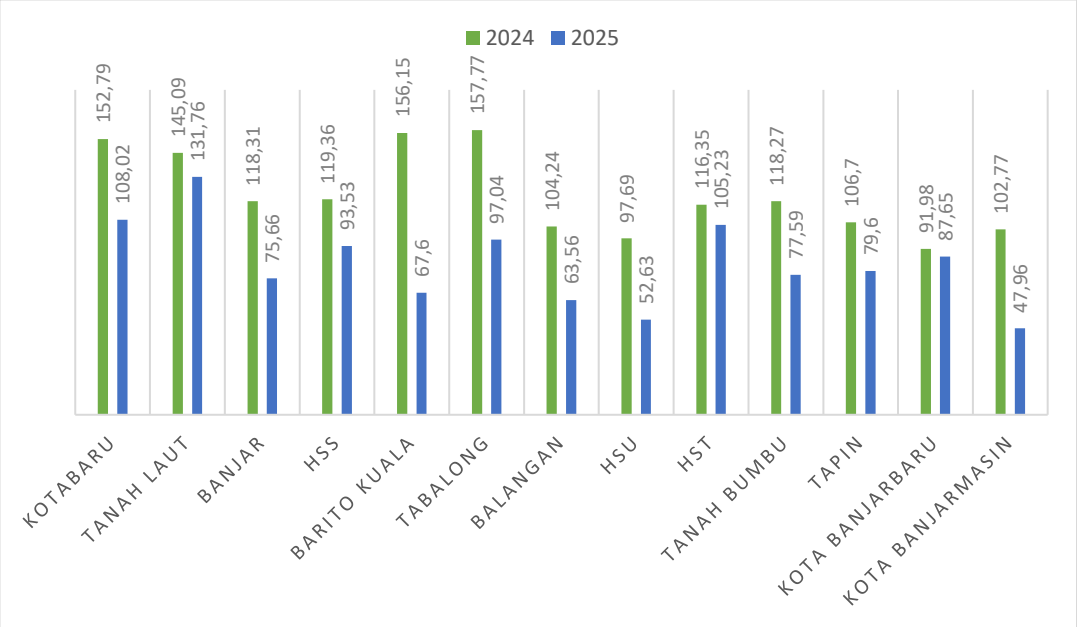
Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Risiko Bencana tahun 2025 terealisasi sebesar 152,79 dari target 108,02 sehingga persentase capaian sebesar 129,76% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Risiko Bencana terealisasi mencapai 108,02 Angka ini mengalami peningkatan sebesar 44,77 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 152,79 yang mempunyai arti bahwa Kabupaten Kotabaru kurang berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana dari tahun sebelumnya.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Risiko Bencana tahun 2025 terealisasi sebesar 108,02 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 152,99 sehingga persentase capaian sebesar 129,39%.

Grafik II.13
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota dan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik II.13 tersebut, Berdasarkan data grafik perbandingan tahun 2024 dan 2025 di Kalimantan Selatan, terlihat tren positif di seluruh wilayah di mana nilai indeks mengalami penurunan yang signifikan. Mengingat prinsip bahwa semakin rendah nilai indeks maka semakin baik kualitas atau performa daerah tersebut, hampir seluruh kabupaten dan kota menunjukkan keberhasilan dalam melakukan perbaikan. Kota Banjarmasin muncul sebagai wilayah dengan performa terbaik pada tahun 2025 dengan angka terendah (47,96), disusul oleh HSU (52,63) dan Balangan (63,56). Secara umum, tahun 2025 menjadi tahun pencapaian bagi Kalimantan Selatan karena mayoritas daerah berhasil menekan angka indeks mereka hingga di bawah angka 100.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, terdapat catatan penting mengenai progres yang telah dicapai. Pada tahun 2024, Kotabaru memiliki indeks yang cukup tinggi yaitu sebesar 152,79, namun pada tahun 2025 angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan menjadi 108,02. Penurunan sebesar 44,77 poin ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang sangat efektif dan konsisten di wilayah tersebut. Meskipun demikian, secara komparatif, Kotabaru masih menempati posisi tertinggi kedua di antara

seluruh daerah pada tahun 2025, hanya berada di bawah Tanah Laut (131,76). Kesimpulannya, Kotabaru telah menunjukkan arah perkembangan yang sangat baik dan progresif, namun tetap memerlukan akselerasi kebijakan yang lebih kuat agar dapat menyamai pencapaian daerah lain yang sudah berhasil mencapai angka indeks di bawah 100.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Risiko Bencana, sebagai berikut:

1. Penguatan peran BPBD dan forum relawan lintas sektor dalam koordinasi penanggulangan bencana yang lebih responsif.
2. Penyelesaian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi yang lebih akurat dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah.
3. Keberhasilan sosialisasi mitigasi bencana di tingkat sekolah (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang aktif.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Risiko Bencana, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan hutan menjadi area terbuka atau perkebunan yang tidak terkendali dapat meningkatkan potensi risiko banjir bandang dan tanah longsor secara mendadak.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya memperluas cakupan program Desa Tangguh Bencana (Destana) ke seluruh desa yang masuk dalam kategori "Bahaya Tinggi". Upaya ini didukung melalui kebijakan pengalokasian anggaran dana desa yang lebih terarah untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, serta pembangunan infrastruktur mitigasi skala lokal. Dengan mengarusutamakan manajemen bencana ke dalam tata kelola desa, diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri dan responsif dalam menghadapi potensi ancaman bencana di lingkungannya masing-masing.

Selain penguatan di level masyarakat, pemerintah daerah juga mempertegas regulasi terhadap sektor usaha dengan mewajibkan setiap investasi skala besar, seperti di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri, untuk memiliki sistem manajemen risiko bencana mandiri yang tersertifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki standar keamanan operasional yang tinggi dan mampu melakukan penanggulangan darurat secara mandiri. Sinergi antara ketangguhan masyarakat di tingkat desa dan akuntabilitas sektor swasta dalam pengelolaan risiko ini merupakan strategi kunci Kabupaten Kotabaru untuk secara konsisten menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana dan menciptakan ruang pembangunan yang aman dan berkelanjutan

Sasaran 17: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana

Adapun capaian indikator Persentase kelompok masyarakat sadar bencana dari sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewaspadaan bencana adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel. II.32
Capaian Persentase Kelompok Masyarakat Sadar Bencana

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase kelompok masyarakat sadar bencana	-	20%	30,58%	60%	80%	100%	125%	100%	100%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase kelompok masyarakat sadar bencana tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target 80% sehingga persentase capaian sebesar 125% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase kelompok masyarakat sadar bencana realisasi mencapai 125% Angka ini mengalami peningkatan sebesar 40 poin dibandingkan dengan tahun 2024 hanya mencapai 60%.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase kelompok masyarakat sadar bencana tahun 2025 terealisasi

sebesar 100% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian Persentase kelompok masyarakat sadar bencana Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan melaksanakan Program/ Kegiatan:

✓ **Program Penanggulangan Bencana,**

- Kegiatan Pelayanan Informasi Bencana, melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Perjenis Bencana), dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui Sosialisasi Tatap Muka maupun melalui Media Sosial terhadap 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Timur dan Kecamatan Pulau Laut Sigam sebanyak 700 Orang serta memberikan Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi sebanyak 30 Rambu di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sigam.
- **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.**
  1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2024
  2. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kotabaru kepada beberapa Kelompok Masyarakat seperti Anak-anak Sekolah, Pegawai ASN, para wartawan serta Aparat Desa di lingkungan Kabupaten Kotabaru.
  3. Melaksanakan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kotabaru, dengan:
  4. Melakukan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BNPB Pusat di Jakarta;
  5. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BPBD Provinsi Kalsel;
  6. Melakukan Koordinasi BPBD, PUPR dan Komisi I, II & III di Dewan Pembahasan Penanganan Bencana Banjir di Kab.Kotabaru.

7. Melaksanakan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten Kotabaru
8. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- **Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**

1. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan melakukan Koordinasi Bersama BPBD, Basarnas, Kepolisian, TNI Penangnan Pasca Longsor di Kecamatan Sungai Durian sebanyak 1 kali;
2. Melaksanakan Penyiapan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota;
3. Melakukan Koordinasi ke BPBD Propinsi Kalsel Penanganan Bantaun Logistik Korban Bencana;
4. Melakukan Koordinasi dan Sherring Penggunaan Peralatan Pusdalops dengan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Melakukan Koordinasi Bantuan Logistik Peralatan Kebencanaan dan Peralatan Pusdalops bi BPBD Propinsi Kalsel;
6. Melakukan Koordinasi Bantuan Peralatan untuk Pusdalops di BNPB Pusat Di Jakarta.

Tabel II.33
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2025

Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga yang harus Dilayani	Jumlah Warga yang Dilayani	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Hampang	13.117	13.117	Kegiatan yang dilaksanakan melalui Sosialisasi tatap muka dengan Penduduk didaerah rawan bencana, Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, (Radio, WA, Fecebook, Instagram) Penyediaan dan Pemasangan Papan
Kelumpang Barat	7.930	7.930	
Kelumpang Hilir	25.455	25.455	
Kelumpang Hulu	16.350	16.350	
Kelumpang Selatan	10.446	10.446	
Kelumpang Tengah	13.447	13.447	
Kelumpang Utara	5.738	5.738	
Pamukan Barat	10.597	10.597	
Pamukan Selatan	12.972	12.972	
Pamukan Utara	16.325	16.325	
Pulau Laut Barat	10.341	10.341	
Pulau Laut	14.284	14.284	

Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga yang harus Dilayani	Jumlah Warga yang Dilayani	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan			Informasi Publik (Baleho,Spanduk, Pamflet Stiker dan Peta Rawan Bencana)
Pulau Laut Selatan	10.578	10.578	
Pulau Laut Tanjung Selayar	10.701	10.701	
Pulau Laut Tengah	11.883	11.883	
Pulau Laut Timur	14.550	14.550	
Pulau Laut Utara	55.291	55.291	
Pulau Sebuku	7.290	7.290	
Pulau Sembilan	6.337	6.337	
Sampanahan	11.099	11.099	
Sungai Durian	12.022	12.022	
Jumlah	334.158 Jiwa	334.158 Jiwa	

1. Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

   BPBD Kabupaten Kotabaru dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana diuraikan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

   a. Melaksanakan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
   b. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
   c. Melaksanakan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kotabaru, dengan:
      i. Melakukan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BNPB Pusat di Jakarta;
      ii. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BPBD Provinsi Kalsel;

iii. Melakukan Koordinasi BPBD, PUPR dan Komisi I, II & III di Dewan Pembahasan Penanganan Bencana Banjir di Kab.Kotabaru.

d. Melaksanakan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota;

e. Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Tabel II.34
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2025

Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga yang harus Dilayani	Jumlah Warga yang Dilayani	Keterangan
Kelumpang Barat	275	275	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan. Melalui Leaflet Kesiapsiagaan Bencana dan Leaflet keluarga Tangguh bencana.
Kelumpang Hilir	791	791	
Kelumpang Tengah	437	437	
Pulau Laut Barat	346	346	
Pulau Laut Selatan	352	352	
Pulau Laut Utara	1670	1670	
Pulau Laut Tengah	390	390	
Pulau Laut Timur	469	469	
Jumlah	**4.731 Jiwa**	**4.731 Jiwa**	

2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

BPBD Kabupaten Kotabaru dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana diuraikan dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan melakukan Koordinasi Bersama BPBD, Basarnas, Kepolisian, dan TNI.

b. Melaksanakan Penyiapan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan:
   i. Melakukan Koordinasi ke BPBD Propinsi Kalsel Penanganan Bantaun Logistik Korban Bencana;
   ii. Melakukan Koordinasi dan Sherring Penggunaan Peralatan Pusdalops dengan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu;
   iii. Melakukan Koordinasi Bantuan Logistik Peralatan Kebencanaan dan Peralatan Pusdalops bi BPBD Provinsi Kalsel;
   iv. Melakukan Koordinasi Bantuan Peralatan untuk Pusdalops di BNPB Pusat Di Jakarta.

Tabel II.35
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2025

Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga yang harus Dilayani	Jumlah Warga yang Dilayani	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pulau Laut Utara	44 Jiwa	44 Jiwa	Penentuan status keadaan darurat bencana, membantu kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar Korban terdampak bencana
Sampanahan	3 Jiwa	3 Jiwa	
Pulau Laut Barat	5 Jiwa	5 Jiwa	
Pulau Laut Tengah	2 Jiwa	2 Jiwa	
Pulau Laut Timur	8 Jiwa	8 Jiwa	
Pulau Laut Selatan	Nihil	Nihil	
Kelumpang Tengah	34 Jiwa	34 Jiwa	
Kelumpang Hulu	151 Jiwa	151 Jiwa	
Sungai Durian	Nihil	Nihil	
Hampang	Nihil	Nihil	
Pulau Sebuku	Nihil	Nihil	
Pulau Laut Sigam	6 Jiwa	6 Jiwa	
Pulau Laut Kepulauan	10 Jiwa	10 Jiwa	
Pulau Laut Tanjung Selayar	21 Jiwa	21 Jiwa	
Kelumpang Barat	Nihil	Nihil	
Kelumpang Hilir	4 Jiwa	4 Jiwa	
Kelumpang Selatan	6 Jiwa	6 Jiwa	
Kelumpang Utara	1 Jiwa	1 Jiwa	
Pamukan Barat	3 Jiwa	3 Jiwa	

Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga yang harus Dilayani	Jumlah Warga yang Dilayani	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pamukan Selatan	2 Jiwa	2 Jiwa	
Pamukan Utara	Nihil	Nihil	
Pulau Sembilan	Nihil	Nihil	
Jumlah	**300 Jiwa**	**300 Jiwa**	

TUJUAN 5: MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI KABUPATEN KOTABARU SEHINGGA MEMILIKI KARAKTER MENTAL, SPIRITUAL DAN FISIK AGAR MAMPU BERPERAN DAN MEMPUNYAI DAYA SAING YANG TINGGI DI SEGALA BIDANG, BAIK DI TATARAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MAUPUN NASIONAL

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator tujuan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kotabaru, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang, baik di tataran Propinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia yang negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Tabel II.36
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,13	69,74	70,18	70,61	71,01-71,48	73,03	102,16%	71,01-71,95	101,50%

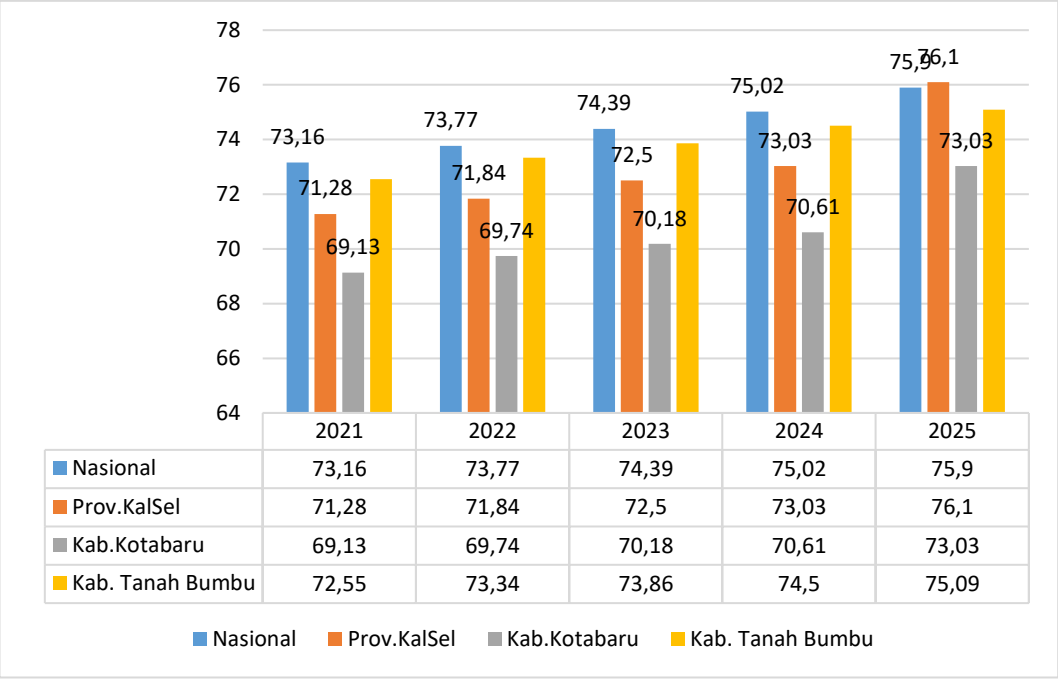
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 terealisasi sebesar 73,03 apabila dibandingkan dengan target 71,01-71,48 sehingga capaiannya sebesar 102,16% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) realisasi mencapai 73,03 Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,42 poin dibandingkan dengan tahun 2024 IPM sebesar 70,61.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 terealisasi sebesar 73,03 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 71,01-71,95 sehingga capaian sebesar 101,50%. Adapun perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru, Prov. Kal Sel dan Nasional Tahun 2021 – Tahun 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,9
Prov.KalSel	71,28	71,84	72,5	73,03	76,1
Kab.Kotabaru	69,13	69,74	70,18	70,61	73,03
Kab. Tanah Bumbu	72,55	73,34	73,86	74,5	75,09

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotabaru selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, meskipun secara angka masih berada di posisi terendah dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Tanah Bumbu. Dimulai dari angka 69,13 pada tahun 2021, Kotabaru secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusianya hingga menembus angka 73,03 pada tahun 2025, dengan lonjakan yang cukup signifikan terlihat pada transisi tahun 2024 ke 2025. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut,

meskipun tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi dan nasional masih cukup besar.

Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka IPM paling rendah di antara pembanding lainnya dalam grafik tersebut, wilayah ini berhasil mempertahankan pertumbuhan yang progresif setiap tahunnya dan mencapai tonggak penting di tahun 2025 dengan melampaui angka 73.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren positif yang didukung oleh beberapa faktor pendorong utama:

1. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya standar hidup layak yang dipengaruhi oleh sektor komoditas unggulan di Kotabaru
2. Adanya perbaikan pada akses pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan kesehatan (Usia Harapan Hidup) yang mulai terakumulasi hasilnya pada angka IPM di tahun-tahun terakhir.

Meskipun mengalami tren kenaikan, terdapat beberapa tantangan mendasar yang menjadi faktor penghambat optimalisasi capaian IPM:

1. Luasnya wilayah yang terfragmentasi oleh laut membuat distribusi tenaga pengajar dan medis tidak merata, sehingga menghambat capaian pendidikan dan kesehatan di pelosok.
2. Terdapat jarak (gap) yang cukup lebar antara Kotabaru (73,03) dengan rata-rata Nasional (75,9) di tahun 2025, menunjukkan bahwa kecepatan akselerasi masih perlu ditingkatkan.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan sejumlah strategi tindak lanjut yang berfokus pada pemerataan layanan. Di sektor pendidikan, penguatan jaringan internet di pulau-pulau terpencil menjadi prioritas agar akses terhadap modul pembelajaran setara dengan wilayah pusat kota. Untuk layanan kesehatan, dilakukan optimalisasi layanan kesehatan bergerak secara rutin guna menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang stabil, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur jembatan serta dermaga

modern untuk menurunkan biaya logistik dan mempermudah aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu memprioritaskan transformasi digital dalam sektor pendidikan agar anak-anak di pulau terluar mendapatkan kualitas materi yang setara dengan di pusat kota. Selain itu, penguatan layanan kesehatan bergerak seperti puskesmas terapung dan pemberian insentif khusus bagi tenaga profesional di wilayah terpencil sangat krusial untuk menutup celah ketimpangan layanan. Dengan mengoptimalkan konektivitas wilayah dan melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, Kotabaru memiliki peluang besar untuk memperkecil jarak ketertinggalannya terhadap capaian IPM Provinsi maupun Nasional.

Sasaran 18: Meningkatnya Aksesbilitas dan Pemerataan Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan Dasar

Sasaran Meningkatnya Aksesbilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar diukur melalui indikator Indeks Pendidikan dengan target, realisasai dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel. II.37
Capaian Indeks Pendidikan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Pendidikan	Indeks	9,70	9,765	9,81	9,82	11,00	9,82*	89,27%	11,25	87,28%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2025.

Pencapaian Indeks Pendidikan tahun 2025 terealisasi sebesar 9,82* dari target 11,00 sehingga persentase capaian sebesar 89,27% dapat dikategorikan ***Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Pendidikan realisasi mencapai 9,82* Angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 9,82.

Pencapaian Indeks Pendidikan tahun 2025 terealisasi sebesar 9,82* dari target RPJMD sebesar 11,25 sehingga persentase capaian sebesar

87,28%. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mempertahankan Indeks Pendidikan dengan didukung oleh:

a. Dengan melaksanakan program kurikulum Merdeka yang didalamnya ada P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila sehingga menarik minat anak usia belajar untuk sekolah.
b. Dengan mengimplementasikan program belajar.id sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan pembejaran.
c. Dengan melaksanakan assessment, yang didukung oleh peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
d. Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) untuk anak usia dini, penyediaan fasilitas yang mendukung pendidikan antara lain: alat-alat laboratorium, penyediaan ruang, perpustakaan, dan UKS;
e. Sosialisasi pelaksanaan assessment (sarana harus didukung antara lain: SDM para pendidik, komputer, Jaringan internet, laboratorium computer);
f. Dilaksanakan Pra assesment sebelum pelaksanaan ujian nasional.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui program/kegiatan berikut:

✓ Program pengelolaan pendidikan, meliputi kegiatan:
- Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar

  Melaksanakan pembangunan di 8 kecamatan wilayah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yaitu:
  - Pembangunan RKB Kelas Jauh SDN Tanjung Mahkota Desa Sulangkit Kec. Kelumpang Utara.
  - Pembangunan RKB SD Alam Islam Al QUDWAH Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Sigam.
  - Pembangunan RKB SD ISLAM SOLUSI Kec. Kelumpang Hilir.
  - Pembangunan RKB SDN 2 Stagen Kec. Pulau Laut Utara.
  - Pembangunan RKB SDN Betung Pulau Laut Timur Kec. Pulau Laut Timur.
  - Pembangunan RKB SDN Mantam Kec. Pamukan Barat.

- Lanjutan Pemasangan Keramik Ruang Kelas SDN Tanjung Sungkai Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar.
- Pemasangan Keramik Ruang Kelas dan Kantor SDN Tanjung Samalantakan Kec. Pamukan Selatan.
- Pemasangan Keramik SDN 2 Bekambit Asri Kec. Pulau Laut Timur.
- Pembangunan RKB SDN 7 Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara.
- Penyempurnaan Ruang Kelas Sekolah SD Negeri 2 Hilir Muara Kec. Pulau Laut Sigam.

Menyediakan prasana di 6 kecamatan wilayah Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yaitu:

- Pengadaan Meubelair Siswa SD Alam Islam AL QUDWAH Kotabaru.
- Pengadaan Mebel SD Negeri 1 Batuah Kec. Pulau Laut Sigam.
- Pengadaan Mebel SD Negeri 1 Semayap Kec. Pulau Laut Utara.
- Pengadaan Meubelair Siswa SDN 1 Baharu Utara.
- Pengadaan Meubelair Siswa SDN 2 Rantau Buda.
- Pengadaan Meubelair Siswa SDN Pelajau Baru.
- Pengadaan Meubelair Siswa SDN Pudi Seberang.
- Pengadaan Meubelair Siswa SDN Tanjung Kunyit.

- Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama

  Melaksanakan pembangunan di 11 (sebelas) Kecamatan:

  - Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Jihadut Tholibin Pulau Kerumputan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan (Kelas Jauh).
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 7 Kotabaru.
  - Pembangunan Ruang UKS besertaPerabotnya SMPN 1 Pulau Sembilan (DAK).
  - Pembangunan Ruang UKS besertaPerabotnya SMPN 2 Hampang (DAK).
  - Pembangunan Ruang UKS besertaPerabotnya SMPN 2 Kelumpang Selatan (DAK).
  - Pembangunan Ruang UKS besertaPerabotnya SMPN 2 Sampanahan (DAK).
  - Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Kelumpang Hilir

- Pembangunan Ruang Laboratorium IPAbeserta Perabotnya SMPN 1 Hampang (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium IPAbeserta Perabotnya SMPN 7 Kotabaru (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 1 Hampang (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 1 Kelumpang Utara (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 2 Hampang (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 2 Kelumpang Hilir (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 2 Kelumpang Tengah (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 2 Sampanahan (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 3 Kelumpang Selatan (DAK)
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMPN 3 Kotabaru (DAK).
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputerbeserta Perabotnya SMP Laut Timur (DAK).

- Pengelolaan pendidikan sekolah anak usia dini
  - Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD sebanyak 2 unit, pembangunan sarana,prasarana dan utilitas PAUD sebanyak 15 unit, rehabilitasi sedang/berat gedung PAUD sebanyak 4 unit, pengadaan alat ptraktek dan peraga siswa sebanyak 3 paket, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD 12 kali pembayaran (gaji insentif daerah(insenda) PAUD), Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3 Sekolah,pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD sebanyk 6 Kegiatan/fasilitasi lembaga PAUD, pengelolaan dana BOP PAUD sebanyak 12 kali pembayaran.

- Pengelolaan pendidikan non formal atau kesetaraan
  - pengelolaan dana BOP sekolah non formal/ kesetaraansebanyak 4 kali pembayaran dana BOP.

Dokumentasi Kegiatan Tahun



Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dokum Ranwa Renja Tahun 2025 Dinas,



Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah di SDIT Al-Izzah

;;



Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 5 Kotabaru



Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Pulau Laut Timur



Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Pulau Laut Timur



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SDN Berangas



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SMPN 3 Pulaulaut Tengah



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SMPN 7 Kotabaru



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SDN 2 Tarjun



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SMPN 1 Kelumpang Selatan



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SMPN Hampang



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 di SDN1 Sungai Nyamuk



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 SMPN 1 Pulaulaut Kepulauan



Sosialisasi peraturan pemerintah terkait bidang Pendidikan Angka Tidak Sekolah Tahun 2024 SMPN 1 Pulaulaut Barat



Peringatan Hari Anak Nasional Laut

Sasaran 19: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat dapat diukur dengan tingginya usia harapan hidup sehingga menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaannya.

Untuk mengukur keberhasilan dan sejauh mana capaian terhadap sasaran tersebut maka disusunlah indicator yaitu usia harapan hidup (UHH) dengan formulasi atau cara perhitungannya yaitu :

1. Angka Kematian Ibu / 100.000 Kelahiran.
2. Angka Kematian Bayi / 1.000 Kelahiran.

Adapun capaian dari sasaran ini adalah sebagaimana tabel tersebut dibawah ini:

Tabel. II.38
Capaian Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2024 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Usia Harapan Hidup (UHH)	69,32 Thn	69,56 Thn	69,77 Thn	69,83 Thn	70,40 Thn	74,03 Thn	105,15%	70,70 Thn	104,71%

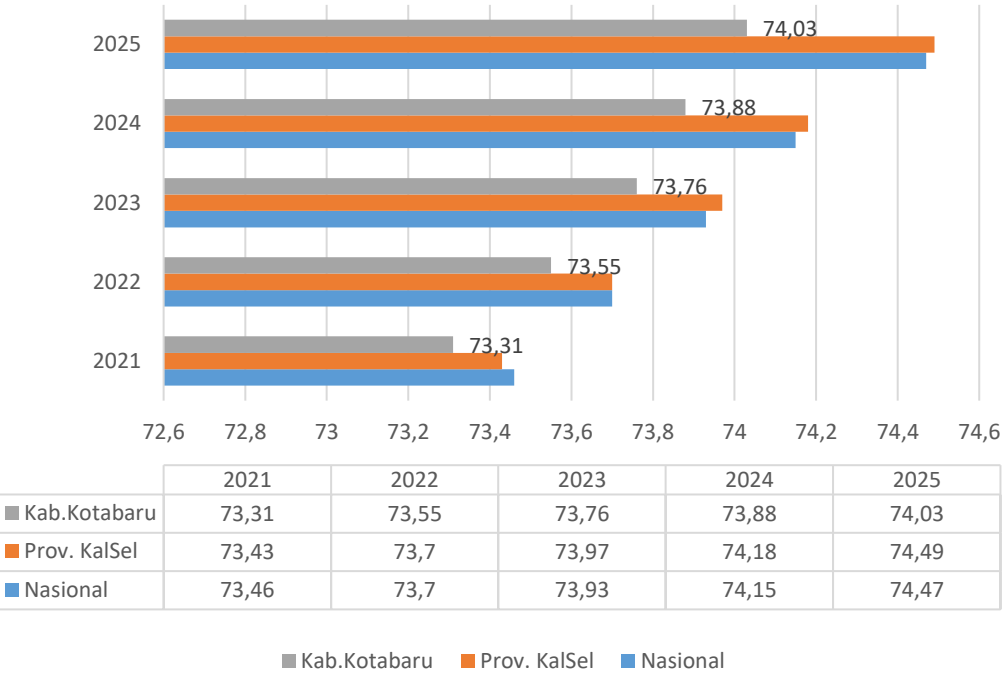
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 74,03 Tahun dari target 70,40 Tahun sehingga persentase capaian sebesar 105,15% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Umur Harapan Hidup (UHH) Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebesar 74,03 Tahun meningkat sebanyak 4,2 poin dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 sebesar 69,83 Tahun. Pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 terealisasi sebesar 74,03 Tahun dari target RPJMD sebesar 70,70 Tahun sehingga persentase capaian sebesar 104,71%.

Grafik II

Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Kotabaru, Provins Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2021 s.d 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab.Kotabaru	73,31	73,55	73,76	73,88	74,03
Prov. KalSel	73,43	73,7	73,97	74,18	74,49
Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian UHH di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tingkat nasional menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Kotabaru meningkat dari 73,31 tahun pada 2021 menjadi 74,03 tahun pada 2025. Pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Selatan naik dari 73,43 tahun menjadi 74,49 tahun, sedangkan nasional meningkat dari 73,46 tahun menjadi 74,47 tahun. Meskipun capaian Kabupaten Kotabaru masih sedikit berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, laju peningkatannya relatif stabil dan konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya perbaikan dalam derajat kesehatan masyarakat.

Kabupaten Kotabaru menunjukkan kinerja positif dalam peningkatan Umur Harapan Hidup selama periode 2021–2025. Kenaikan yang konsisten ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Ke depan, diperlukan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan akses dan mutu fasilitas kesehatan, serta intervensi preventif dan promotif

agar kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH), sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Posyandu) di wilayah kepulauan dan pedalaman Kotabaru
2. Penurunan angka stunting secara konsisten berkontribusi langsung pada kualitas kesehatan balita yang menjadi fondasi angka harapan hidup.
3. Peningkatan jumlah penduduk yang ter-cover BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi ragu berobat karena kendala biaya.
4. Peningkatan akses terhadap air minum layak dan sanitasi lingkungan yang menekan angka penyakit menular (seperti diare dan ISPA).
5. Hubungan positif antara daya beli masyarakat dengan kemampuan pemenuhan gizi keluarga di Kabupaten Kotabaru.Sebagai bentuk tindak lanjut

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH), sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau (kepulauan) menyulitkan distribusi tenaga medis spesialis dan kecepatan penanganan darurat (*emergency response*).
2. Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat lokal.

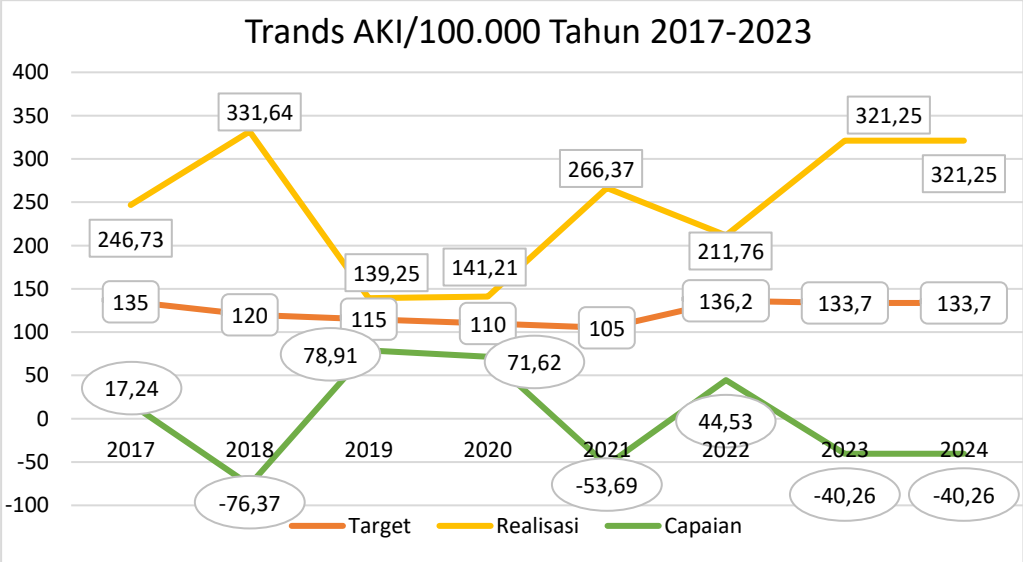
Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berupaya mengakselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 memprioritaskan penguatan aksesibilitas dan kualitas layanan melalui tiga pilar transformasi strategis. Pertama, guna mengatasi tantangan keterbatasan tenaga medis ahli di wilayah kepulauan dan pedalaman, pemerintah daerah telah mengimplementasikan skema insentif progresif berupa tunjangan khusus serta program beasiswa ikatan dinas bagi dokter spesialis. Langkah ini merupakan investasi strategis untuk memastikan kehadiran tenaga spesialis

yang menetap dan berdedikasi di Bumi Saijaan, sehingga disparitas layanan kesehatan antarwilayah dapat diminimalisir.

Sejalan dengan semangat modernisasi birokrasi, pilar kedua difokuskan pada optimalisasi sistem informasi kesehatan. Digitalisasi data kesehatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memberikan basis data akurat bagi pengambilan kebijakan intervensi kesehatan yang lebih presisi. Melengkapi infrastruktur dan teknologi tersebut, pilar ketiga menekankan pada promotif-preventif melalui edukasi berbasis komunitas. Dengan menyinergikan pesan kesehatan dengan kearifan lokal, pemerintah berupaya mengubah pola hidup masyarakat secara organik untuk menekan prevalensi penyakit degeneratif, memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Kotabaru berjalan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun data capaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk kegiatan tersebut adalah:

1. **Angka kematian ibu/AKI (jumlah ibu yang meninggal karena proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas per-100.000 kelahiran hidup).** Faktor yang mempengaruhi AKI adalah “4 terlalu dan 3 terlambat” (terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu banyak anak, terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan penanganan).



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, Angka Kematian Ibu pencapaian kinerja pada tahun 2023 dengan dilatar belakangi oleh rencana target RPJMD 133,71

per 100.000 kelahiran hidup, maka realisasi 321,25 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja –40,26%. Capaian AKI di Kabupaten Kotabaru ini mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun 2016 ataupun 2017 dari jumlah kematian ibu meningkat dari 13 orang (2016/2017), 17 orang pada tahun 2018, 7 orang pada tahun 2019, 7 orang pada tahun 2020, meningkat di tahun 2021 menjadi 12 orang, menurun menjadi 9 orang pada tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 14 orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebijakan yang masih belum berjalan secara maksimal, yaitu:

a) Pembiayaan Terhadap Program dan Kegiatan Yang Mendukung

- **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil,** kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  1. Dilaksanakannya kelas ibu hamil, kelas ibu balita, Kunjungan lapangan bumil Kurang Energi Kronik, Anemia, Bumil risti, bayi Berat Lahir, rendah, dan Bayi Balita dengan masalah Gizi. Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu oleh 28 Puskesmas.
  2. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), Pendampingan pasien di RTK, Transport Bidan Desa / Puskesmas Dalam Rangka Edukasi P4K Kerumah Keluarga Ibu Hamil.
  3. Pemeriksaan kasus KIA oleh Dokter Spesialis Kandungan/SPOG di Puskesmas Pudi, Tanjung Batu, Lontar dan Tanjung Seloka..
- **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan**

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pemantauan RTK di Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kaltim (Paser).
2. Tersedianya biaya transport rujukan Persalinan dan Neonatal ke RSUD Andi Abdurahman Tanah Bumbu, RSUD Pangeran Sebaya Kabupaten Paser KalTim, RSUD PJS Kotabaru ke RS Ulin Banjarmasin & RSUD Ratu Zaleha Kab Banjar, RSUD Kotabaru ke RSUD Andi Abdurahman Tanah Bumbu.

b) Faktor Resiko

- **Manusia**

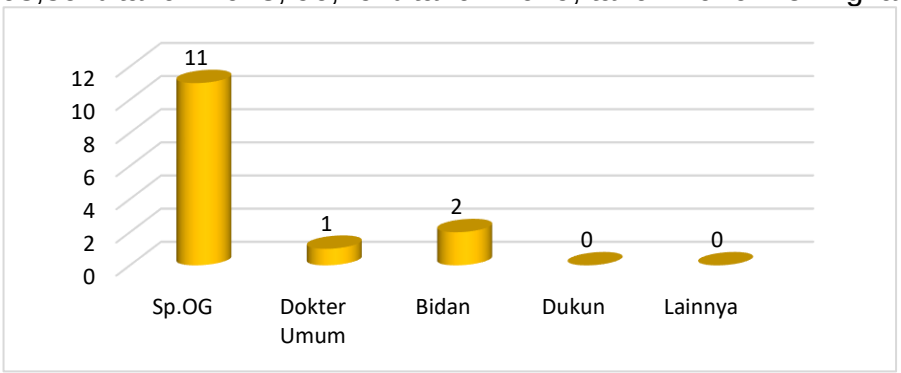
  Pelayanan Antenatal belum optimal diberikan pada semua jenis fasilitas kesehatan, mulai dari Posyandu, Poskeskes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit serta fasilitas kesehatan swasta sesuai standar nasional, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 kali kehamilan. Dengan adanya kebijakan ini, Cakupan Kunjungan Bumil K1 pada tahun 2016 mencapai 76,20% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 74,41% meningkat pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 menjadi 100%. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2016 mencapai 61.93% dan pada tahun 2017 sebesar 83.18% dan 63,63% pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 76.67%, tahun 2020 sebesar 77,67%, tahun 2021 sebesar 76,03%, tahun 2022 menurun menjadi 73.9% dan tahun 2023 menurun menjadi 73,6%. Hal ini berarti masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas secara lengkap akibat kurangnya pengetahuan dan sikap ibu serta keluarga tentang pemeriksaan kehamilan dengan demikian resiko komplikasi resiko ibu hamil tidak dapat dideteksi secara dini sampai 100% pada seluruh ibu hamil serta kurangnya *skill and knowledge* dari petugas kesehatan khususnya bidan pada screening ibu hamil resiko tinggi ikut menyumbang kematian ibu sehingga target untuk menurunkan AKI menjadi 133,71/100.000 KH sehingga

masih terdapat komplikasi kebidanan pada ibu hamil yaitu dari 741 orang pada tahun 2016 menurun menjadi 671 orang pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 886 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 795 pada tahun 2019 menurun menjadi 615 orang tahun 2020, 2021 menjadi 598 orang, 2022 meningkat 2 kali lipat sebanyak 1.166 orang, pada 2023 meningkat sebanyak 1.543 orang.

Jumlah resiko kematian setelah persalinan meningkat karena masih terdapat jumlah ibu bersalin usia < 20 tahun sebesar 350 tahun dan ibu bersalin usia > 35 tahun sebanyak 481 orang dari 4.398 ibu bersalin/nifas. Serta terdapat 528 ibu hamil KEK dan 457 anemia sehingga resiko persalinan normal semakin besar.

- **Metode**

  Persalinan tidak semuanya ditangani oleh petugas kesehatan yang terampil dan kewenangan Bidan sesuai Permenkes 572/1996 untuk menangani komplikasi kehamilan maupun persalinan belum maksimal dilaksanakan. Selain itu juga disebabkan situasi pandemi & sosio kultural di masyarakat yang masih percaya adanya gangguan makhluk gaib pada ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan (eklampsia) dengan pengobatan melalui upacara adat. Hal tersebut juga menyumbang kematian pada ibu hamil dan cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan (PN) yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kotabaru mencapai 58.86% pada tahun 2016 dan 96.01% pada tahun 2017 dan 63,59% tahun 2018, 96,29% tahun 2019, tahun 2020 meningkat



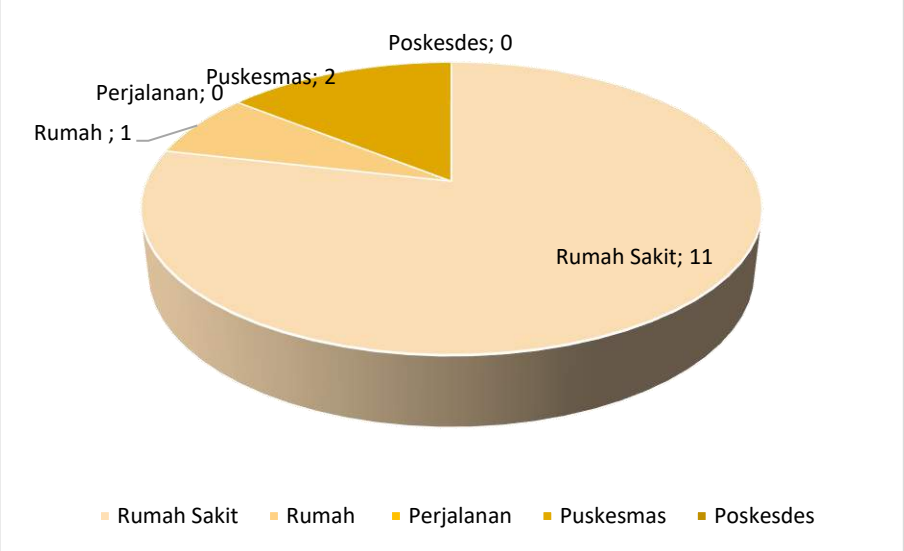
menjadi 96,45%, tahun 2021 menurun menjadi 96,30%, tahun

2022 menurun menjadi 96,27% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 95,57%.

- **Material**

  Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin di FKTP tersedia biaya rujukan ke Rumah Sakit karena situasi pandemic serta faktor geografis dengan medan yang sulit dan sarana transportasi masih terbatas yang menyebabkan sedikit sekali dari jumlah ibu hamil resiko tinggi sebanyak 1.543 orang yang dirujuk menuju fasilitas kesehatan terutama RSUD Kotabaru yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit di Kabupaten Kotabaru sebanyak 164 orang.

  Dilihat dari tempat kematian terbanyak adalah di RS, artinya Puskesmas telah mengambil keputusan untuk merujuk pasien yg tidak mampu ditangani di puskesmas, namun tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut kapan waktu dilakukan rujukan tersebut. Tidak menutup kemungkinan keterlambatan dalam mengambil keputusan merujuk berakibat keterlambatan dilakukan penanganan di RS, apalagi masih banyak budaya masyarakat yg meletakkan pengambil keputusan dalam keluarga adalah orang yang dituakan sehingga tenaga kesehatan harus menunggu sampai keputusan diambil oleh orang yang dituakan tersebut.



Kematian ibu tersebut kebanyakan terjadi periode/masa nifas sebanyak 8 orang dan masa kehamilan sebayak 3 orang dan masa bersalin sebanyak 3 orang.



- **Lingkungan**
  1. Adanya pengaruh budaya dan kepercayaan masyarakat kepada Dukun beranak terkait pertolongan persalinan.
  2. Ada beberapa daerah dengan medan yang sulit.

Dari beberapa penyebab AKI belum mencapai target yaitu 133,71/100.000 KH diatas dalam hal ini perlu di lihat bahwa dalam hal untuk mencapai target tentunya ada beberapa usaha/upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) No.10 Tahun 2018.
2. Kelas ibu hamil di setiap Puskemas Kabupaten Kotabaru.



3. Konseling Calon Penganten.
4. Untuk menangani masalah deteksi resiko tinggi pada daerah terpencil khususnya wilayah kerja Puskemas Marabatuan, Hampang, Lontar,

Sengayam & Tanjung Lalak bagi ibu hamil Dinas kesehatan Kabupaten Kotabaru menggelar pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi dan pertolongan persalinan. Dinas Kesehatan mendatangkan secara langsung Dokter Spesialis Kandungan dan Asisten Dokter Spesialis dari RS Apung Lie Darma II dan RS PJS Kabupaten Kotabaru sehingga ibu hamil resiko tinggi dapat memeriksakan diri.



5. Khusus untuk ibu hamil KEK diberikan PMT.
6. Rapat Pembentukan & Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil, ANC, Stunting



7. Pelatihan Pelayanan USG Di Puskesmas Bagi Dokter & Bidan



8. Pertemuan Pengkajian Kasus Kematian Ibu & Anak



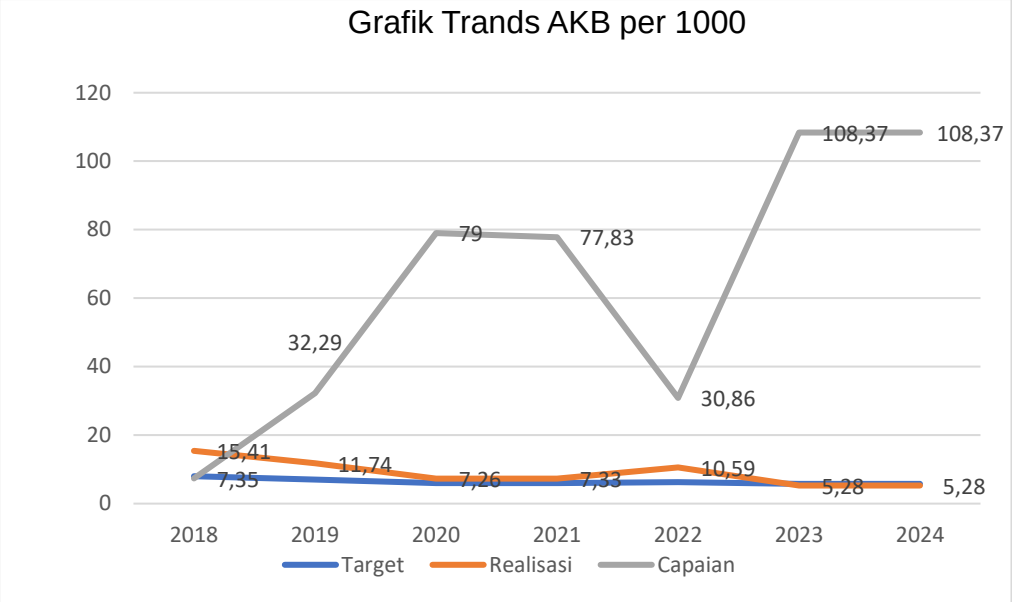
9. Bimbingan teknis dan evaluasi pendampingan ibu hamil (AMP) ke Puskesmas.



10. Untuk mengantisipasi masalah rujukan pada ibu hamil , Dinas Kesehatan telah menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Paser. Serta tenaga kesehatan yang menjadi petugas di Rumah Tunggu.
11. Tersedianya jaminan persalinan rujukan ke RSUD Panglima Jaya Sumitra sebanyak 85 ibu bersalin.
12. Tersedianya biaya transport untuk pendamping rujukan bagi ibu hamil/bersalin/nifas/neonatus resiko tinggi.
13. Pemberian TTD, Imunisasi, pemeriksaan tripel eliminasi pada setiap ibu hamil (Hepatitis, Siphilis, HIV).
14. Pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Gunung Batu Besar dan Desa Sekandis, ambulance puskesmas.
15. Pemasangan dan pencabutan implant secara gratis.

2. Angka Kematian bayi/AKB (Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun per-1000 kelahiran hidup)

AKB Kabupaten Kotabaru tahun 2024 sebesar 44,9% katagori meningkat dari tahun sebelumnya dan dari realisasi 5,28 per 1000 kelahiran hidup sudah mencapai target 5,76 per 1000 kelahiran hidup. Dari segi jumlah kematian bayi juga menurun dari 95 bayi pada tahun 2016 menjadi 75 bayi pada tahun 2017 menjadi 79 bayi pada tahun 2018, 59 bayi pada tahun 2019, 36 bayi pada tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 33 orang, tahun 2022 menjadi 45 orang bayi dan pada tahun 2023 menurun menjadi 23 orang bayi. Adapun tercapainya target **disebabkan** ada beberapa hal, yaitu:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Capaian Kinerja AKB dalam mencapai target disebabkan ada beberapa hal, yaitu:

a) Pembiayaan Terhadap Program dan Kegiatan Yang Mendukung

Ada beberapa program dan kegiatan yang ikut memberikan dukungan pada pelayanan kesehatan terhadap bayi yaitu :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 173.500.000 dengan realisasi anggaran program sebesar Rp 143.745.500 (82.85%) dan realisasi kinerja program sebesar 98,05%.

b) Faktor Resiko

- **Manusia**

1) Cakupan kunjungan bayi KN Lengkap pada tahun 2016 sebesar 5.128 dari 5.222 bayi lahir hidup (98%) sedang kan pada tahun 2017 5.147 dari 5.269 bayi lahir hidup (98%). Pada tahun 2018 cakupan kunjungan bayi lengkap sebesar 5.063 dari 5.126 bayi lahir hidup (98,77%). Pada tahun 2019 sebesar 4.985 dari 5.027 bayi lahir hidup (99.17%). Pada tahun 2020 sebessar 4.915 dari

4.957 bayi baru lahir hidup (99.15%). Pada tahun 2021 sebesar 4.480 dari 4.505 bayi baru lahir hidup (99.45%). Pada tahun 2022 sebesar 4.222 dari 4.250 bayi lahir hidup (99,3%). Pada tahun 2023 sebesar 4.332 dari 4.358 bayi lahir hidup (99,4%) (Artinya hampir sudah semua bayi mendapat pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, yaitu: pada usia 29 hari-2 bulan, usia 3-5 bulan, usia 6-8 bulan, dan usia 9-11 bulan sesuai standar di Kabupaten). Dengan demikian dapat diketahui efektifitas, continum of care dan kualitas pelayanan kesehatan Bayi.

2) Penanganan komplikasi Neonatus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara definitif pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di Kabupaten Kotabaru. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatus. Tahun 2016 sebesar 246 dari 1.132 perkiran neonatus sedangkan pada tahun 2017 berkurang menjadi 189 dari 1.186 perkiraan neonatus dan pada tahun 2018 sebesar 177 dari 1.112 bayi resiko tinggi dan pada tahun 2019 sebesar 271 dari 1.103 bayi . Tahun 2020 sebesar 182 dari 1.095 perkiraan bayi resiko tinggi tertangani. Tahun 2021 sebesar 231 dari 1.005 perkiraan bayi resiko tinggi tertangani. Tahun 2022 sebesar 209 dari 638 perkiraan bayi resiko tinggi tertangani. Tahun 2023 sebesar 225 dari 654 perkiraan bayi resiko tinggi tertangani.
3) Kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang MTBS.
4) Kurangnya pengetahuan bidan untuk penanganan kasus BBLR dan Asfiksia sehingga kematian pada bayi kebanyakan pada usia 0-7 hari.

- **Metode**
  1) Kurang optimalnya pelaksanaan kemitraan Bidan dengan Dukun Beranak.
- **Material**
  1) Kurangnya alat-alat kesehatan untuk penanganan komplikasi pada bayi di Puskesmas dan Poskesdes.

2) Kurangnya transportasi (ambulance desa) untuk rujukan bayi yang mengalami komplikasi dari Desa ke Fasilitas Kesehatan.

- **Lingkungan**
  1) Adanya pengaruh budaya dan kepercayaan masyarakat kepada Dukun beranak terkait pertolongan Bayi Baru Lahir.
  2) Ada beberapa daerah dengan medan yang sangat sulit.

Dari beberapa penyebab AKB belum mencapai target yaitu 8,16/1000 KH diatas dalam hal ini perlu di lihat bahwa dalam hal untuk mencapai target pada tahun 2024 tentunya ada beberapa **usaha/upaya** yang sudah dilakukan untuk menekan sekecil mungkin jumlah kematian pada bayi diantaranya:

1. Pelatihan AMP.
2. Pemberian makanan tambahan dan Pendampingan untuk keluarga gizi buruk dan Investigasi gizi buruk.
3. Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang bayi dan balita di Puskesmas dan Pemberian kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus.
4. Pemeriksaan garam beriodium di masyarakat. Pemantauan status gizi bayi dan balita.
5. Jaminan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir yang dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan pembiayaan dari sumber lain (DAK).

Adapun **rencana aksi** yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk menurunkan jumlah kematian bayi yaitu :

1. Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 100% bagi bidan dan dokter di Puskesmas yang telah dilatih.
2. Pemeriksaan bayi/balita resiko tinggi oleh Dokter Spesialis di Puskesmas.
3. Pemberian makanan tambahan.
4. Pendampingan untuk keluarga gizi buruk
5. Investigasi gizi buruk.
6. Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang bayi dan balita di Puskesmas, PAUD dan TK.
7. Pemberian kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus.

8. Pemeriksaan garam beriodium di masyarakat.
9. Pemantauan status gizi bayi dan balita.
10. Workhsop penanganan asfiksia bagi bidan.
11. Penambahan Sarana dan Prasarana Kesehatan melalui dana DAK maupun APBD.
12. Penigkatan Optimalisasi Kemitraan Bidan dan Dukun.

a. Prevalensi Stunting

CapCapaian kinerja prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 85,14% katagori karena realisasi 20,1 dan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 23,2 maka program dan kegiatan yang mendukung indikator tersebut, yaitu:

1) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**

   Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   a. Dilaksanakannya Kegiatan MTBS bagi Bidan, Dokter atau Perawat
   b. Pertemuan orientasi tumbuh kembang balita
   c. Pelaksanaan Kelas Balita, SDIDTK ke PAUD/Taman Bermain/Posyandu

2) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**

   Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   a. Dilaksanakannya pemberian makanan tambahan berbahan pangan local pada balita gizi kurang dan Ibu Hamil KEK.
   b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi program gizi/PMT.

3) Dukungan dari sector terkait yaitu

   - Pembentukan Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting yang melibatkan Bappeda, Dinkes, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan, P3AKP2KB, PUPR, Dinas Sosial dan Ketahan Pangan.

- Orientasi dari kader posyandu
- Pembentukan Tim SKPG Kecamatan di 22 Kecamatan yang terdiri dari petugas gizi dan penyuluh pertanian yang dibentuk oleh Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan untuk tingkat Kabupaten ada Tim SKPG Kabupaten yang terdiri dari berberapa SKPD terkait. Adanya deteksi dini gizi buruk melalui Posyandu maupun Puskesmas dan jejaringnya yang terlaksana dengan baik. Tugas Tim tersebut melakukan pelacakan di wilayah yang dilaporkan oleh Bidan Desa yang menemukan aadanya kasus gizi buruk di wilayahnya, melakukan identifikasi kasus apakah harus diberikan perawatan intensif di rujuk ke Rumah Sakit atau dilakukan perawatan di Puskesmas Perawatan atau jika tidak klinis bias rawat jalan dengan terus di pantau perkembangannya dan diberikan PMT serta edukasi cara penanganan dan pemberian makannya.
- Meningkatnya fungsi sistem kewaspadaan pangan dan gizi melalui kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan mengadakan kampanye pangan tanpa 3p (pemanis, pewarna dan pengawet).

  Dari beberapa penyebab prevalensi stunting turun menjadi 9 diatas dalam hal ini perlu di lihat bahwa dalam hal untuk mencapai target pada tahun 2024 tentunya ada beberapa **usaha/upaya** yang sudah dilakukan untuk menekan sekecil mungkin jumlah stunting diantaranya:

  1. Intervensi gizi spesifik

     Untuk sasaran ibu hamil yaitu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita kurus, mengonsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pengadaan obat gizi (stunting) dari Dana DAK Non Fisik, pemberian vitamin A pada balita dan ibu nifas,

kelas ibu hamil, dan pencegahan kecacingan dan malaria. Untuk Sasaran Anak remaja yaitu pemberian tablet tambah darah pada remaja putri SLTP dan SLTA 1 tablet per mmg, posyandu remaja, pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Untuk Sasaran anak baru lahir hingga 23 bln yaitu ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI, pemantauan pertumbuhan bayi 0-59 bulan, pemberian makanan tambahan pada anak kurus umur 6-23 bulan dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Untuk Sasaran Keluarga yaitu Penyediaan air bersih skala desa (PAMSIMAS), sanitasi lingkungan skala desa (MKC, pembuangan sampah dan pengelolaan limbah) melalui STBM, kelas ibu balita dan pendidikan gizi.

2. Intervensi gizi sensitif yaitu penyediaan operasional posyandu, kecamatan saying ibu dan penyuluhan bagi remaja putri.

Ada beberapa **permasalahan** dalam penanganan stunting diantaranya:

1. Kurangnya atau keterbatasan sanitasi air bersih.
2. Kurang gizi yang lama (sejak di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun).
3. Anak sering sakit (diare, campak, TBC dan Cacingan)
4. Perkawinan usia muda.
5. Pola asuh kurang memadai.
6. Rendahnya ketersediaan pangan.
7. Asupan makanan keluarga kurang, dan Kurangnya akses pelayanan kesehatan.

Adapun **rencana aksi** yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk menurunkan stunting yaitu :

1. Penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Penguatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kotabaru.

3. Penguatan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) Kabupaten Kotabaru.
4. Pembiayaan melalui sumber selain APBD yaitu DAK penguatan intervensi stunting.

b. Insidensi TB per 100.000 penduduk

Pencapaian indikator ini disebabkan ada beberapa solusi yang dilakukan:

1) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis**

Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 904.184.800 dengan realisasi anggaran program sebesar Rp. 814.760.700 (90,11%) dan realisasi kinerja program sebesar 100%. Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TBC, pemantauan minum obat TBC ke Desa.

2) Langkah-Langkah Yang Dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan kapasitas petugas pengelola Program TB Puskesmas
b. Screening Program TB di Lapas Kelas 2 Kotabaru Kerjasama dengan Puskesmas Dirgahayu.
c. Melakukan penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di daerah-daerah yang berpotensi TB.
d. Investigasi Kontak erat TB.
e. Penyediaan TCM Rujukan (RS PJS, Puskesmas Serongga dan Puskesmas Sengayam)
f. Penyediaan Slide TB

e. Persentase Peserta JKN/KIS

Capaian kinerja Persentase Peserta JKN/KIS tahun 2024 sebesar 93,07% meskipun realisasi 95,57% meningkat dari pada tahun 2023. Dalam mencapai indikator kinerja maka ditetapkan program dan kegiatan agar pencapaian target tepat sasaran. Untuk mencapai misi

mewujudkan masyarakat yang sehat dan diarahkan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan diharapkan pada akhirnya menuju UHC maka ditetapkan dengan indikator kinerja persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pada sumber dana APBD Bantuan Keuangan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan indikator persentase PBI yang terkover Jaminan Kesehatan. Kegiatan ini secara umum merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Secara khusus tujuannya adalah agar tersedianya biaya pelayanan kesehatan bagi Penerima bantuan Iuaran (PBI) Daerah Kabupaten Kotabaru. Pencapain indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) **Dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**

   Anggaran Rp 34.468.076.476 dan realisasi Rp 32.585.058.189 (94.54%). Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah : Dilaksanakannya intergasi Jamkesda ke JKN/KIS/BPJS Kesehatan sebanyak 24.176 Orang dan tersedianya biaya jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang tidak tercover menjadi peserta JKN/KIS/BPJS.

Dinas Kesehatan telah melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran. Hal ini terlihat dari rata-rata tercapainya target kinerja 72,59% dan rata-rata serapan anggaran 70,098% dengan tingkat efisiensi rata-rata 2,496%. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran ini, antara lain:

1. Penghematan anggaran dengan pembatasan penggunaan hotel, dan mengalihkan kegiatan di dalam kantor;
2. Pengurangan jumlah SDM yang melakukan perjalanan dinas;

3. Mengurangi kegiatan seremonial, mengefektivkan kegiatan prioritas dan utama.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Kesehatan memiliki 1 sasaran strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama dengan capaian 69,06% katagori **Kurang Berhasil**. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan tersebut dapat diuraikan, bahwa dari 5 (Lima) indikator kinerja utama sasaran berkategori **Sangat Berhasil** 2 (dua), indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil** 1 (satu), indikator kinerja sasaran berkategori **Cukup Berhasil** 0 (nol) dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori **Kurang Berhasil**. Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani kurang lebih 4.000 penduduk. Rasio ketersediaan tenaga dokter umum di Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan dari 40/100.000 pada tahun 2024. Demikian juga dengan tenaga Perawat 158/100.000 penduduk. Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah Kabupaten Kotabaru disajikan pada grafik 12.

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kotabaru mencapai lebih dari 100%, Hal ini menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas. Adapun cakupan puskesmas di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024 adalah 133%, dengan jumlah puskesmas 28 unit pada 22 kecamatan. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sudah mencakup seluruh (100%) masyarakat miskin yang terdaftar di Kabupaten

Kotabaru berdasarkan BPS, karena Pemerintah Daerah melaksanakan program pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya.

TUJUAN 6: MENINGKATNYA PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SEHINGGA MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN

Tujuan dari meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menurunkan angka kemiskinan adalah upaya dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menjawab isu – isu strategis dari dunia internasional (SDGs) yaitu *mengurangi Jumlah Penduduk Miskin dan Kelaparan*, Isu Strategis dari Kebijakan Nasional (Nawacita) yaitu *menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,* Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *Keamanan, Kemiskinan, pengangguran dan* ketenagakerjaan, maka Kabupaten Kotabaru menetapkan isu strategis *Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.* Realisasi, target dari indikator Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

*T*abel II.39
Capaian Angka Kemiskinan

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Angka Kemiskinan	4,86	4,30	4,32	4,45	4,03	4,39	91,06%	3,97	90,31%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

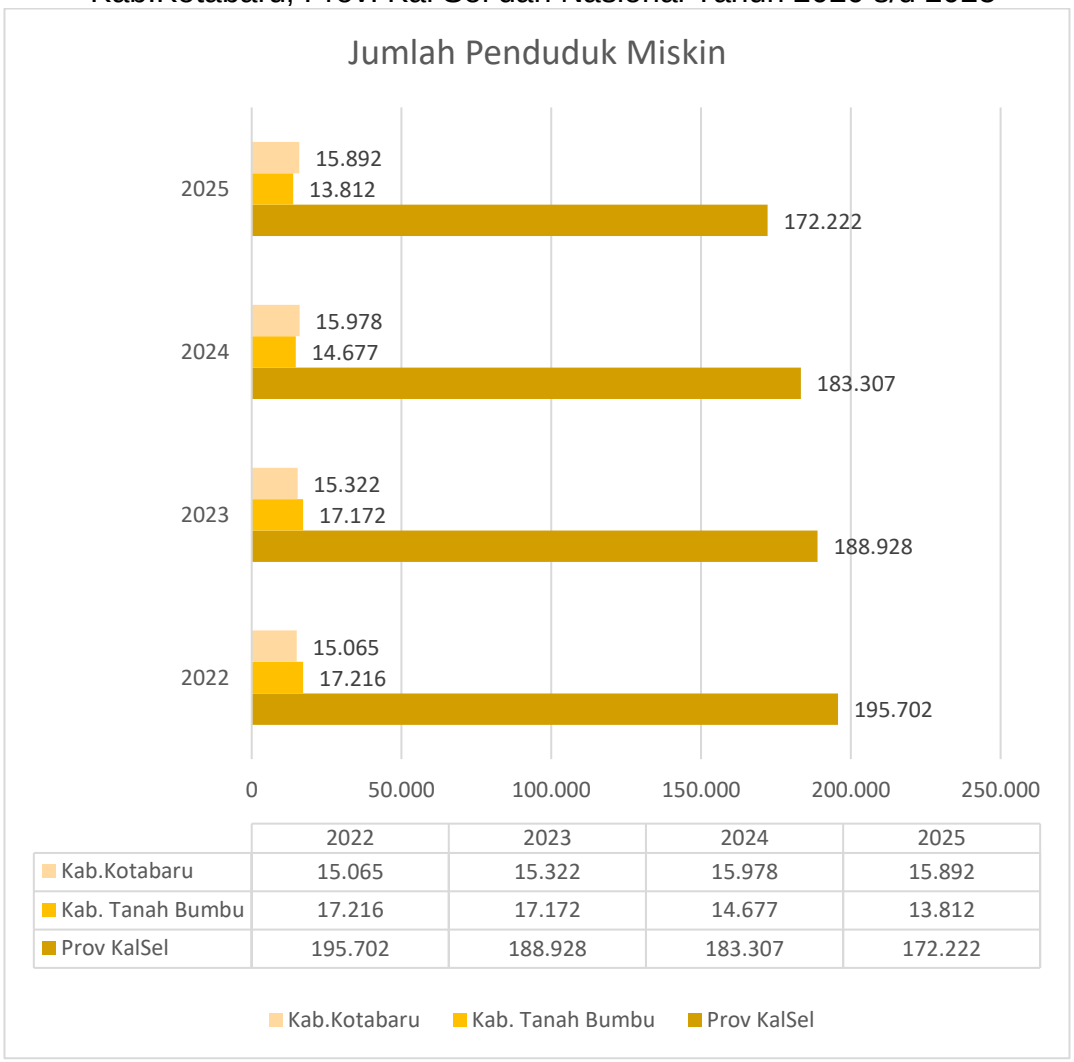
Pencapaian Angka Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2025 terealisasi sebesar 4,39 dari target 4,03 yaitu sebesar 91,06% dengan kategori ***Sangat Tinggi***.

Pada tahun 2025, Angka Kemiskinan sebesar 4,39 mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,45 yang

berarti pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Angka Kemiskinan tahun 2025 terealisasi sebesar 4,39 dari target RPJMD sebesar 3,97 yaitu sebesar 90,31%.

Grafik II.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Kab.Kotabaru, Prov. Kal Sel dan Nasional Tahun 2020 s/d 2025



	2022	2023	2024	2025
Kab.Kotabaru	15.065	15.322	15.978	15.892
Kab. Tanah Bumbu	17.216	17.172	14.677	13.812
Prov KalSel	195.702	188.928	183.307	172.222

Sumber : BPS Nasional, 2026.

Data menunjukkan dinamika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2022 hingga 2025. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan tren penurunan yang positif dan konsisten setiap tahunnya; di mana angka kemiskinan provinsi menyusut dari 195.702 jiwa menjadi 172.222 jiwa, sementara Tanah Bumbu berhasil menekan angka dari 17.216 jiwa menjadi 13.812 jiwa. Sebaliknya, grafik Kabupaten Kotabaru menunjukkan anomali dengan tren yang cenderung meningkat di saat wilayah lainnya mengalami penurunan, sebelum akhirnya menunjukkan sedikit perbaikan di tahun terakhir.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa upaya penekanan angka kemiskinan masih menghadapi tantangan yang cukup berat dan fluktuatif. Selama periode empat tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di wilayah ini justru mengalami kenaikan berturut-turut dari 15.065 jiwa pada 2022 menjadi 15.978 jiwa pada 2024. Meskipun terdapat penurunan tipis pada tahun 2025 menjadi 15.892 jiwa, angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan posisi awal di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru belum berhasil mencapai tren penurunan kemiskinan yang konsisten sebagaimana yang dicapai oleh wilayah tetangganya, Tanah Bumbu, maupun rata-rata provinsi.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Angka Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Sektor pertambangan dan perkebunan besar menyediakan lapangan kerja formal yang stabil bagi sebagian besar penduduk usia produktif.
2. Sebagai wilayah kepulauan, akses masyarakat terhadap pangan protein (ikan) relatif mudah dan murah, yang menjaga garis kemiskinan dari sisi pengeluaran makanan.
3. Efektivitas penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa) yang tepat waktu mampu menahan masyarakat di garis bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Angka Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Warga miskin di pulau-pulau terpencil memiliki biaya transaksi yang besar untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga sisa pendapatan untuk tabungan menjadi nihil.
2. Kabupaten Kotabaru memiliki tantangan logistik yang membuat intervensi program kemiskinan menjadi lebih mahal dan lambat sampai ke sasaran

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru mengedepankan pendekatan yang presisi dan integratif dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui penguatan basis data dan intervensi fisik yang tepat sasaran. Langkah fundamental diawali dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala untuk menjamin validitas sasaran penerima manfaat. Melalui data yang akurat, pemerintah memastikan bahwa bantuan modal usaha dialokasikan secara selektif kepada keluarga miskin yang memiliki potensi produktif, sehingga bantuan yang diberikan tidak lagi bersifat konsumtif jangka pendek, melainkan menjadi stimulus kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga.

Guna mengatasi hambatan geografis yang sering menjadi akar kemiskinan di wilayah pesisir dan pedalaman, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan di kantong-kantong kemiskinan. Pembangunan dermaga rakyat dan jalan lingkungan dilakukan secara intensif untuk memangkas biaya logistik rumah tangga dan mempermudah akses warga terhadap pusat pasar serta layanan publik. Selain intervensi melalui APBD, pemerintah daerah juga mengoptimalkan peran sektor swasta dengan memetakan perusahaan besar di sekitar wilayah terdampak. Melalui kebijakan yang terukur, perusahaan diwajibkan melakukan intervensi khusus pada desa-desa dengan angka kemiskinan tertinggi di wilayah operasionalnya, baik melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi sehat, maupun pemberian alat kerja. Sinergi antara akurasi data, penguatan konektivitas, dan kolaborasi dunia usaha ini diharapkan dapat mempercepat graduasi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru secara signifikan

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut ditetapkan satu sasaran, yaitu *"Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat"* dengan indikator *"Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial".*

Sasaran 20: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Meningkatnya jumlah pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan penanganannya dilakukan melalui pemberian layanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan semakin berkurang. Untuk mengukur keberhasilan dan sejauh mana capaian terhadap sasaran tersebut maka disusunlah indikator yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan social dapat dilihat pada tabel, yaitu:

Tabel II.40
Capaian Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial

Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026 (%)	Capaian Realisasi 2024 terhadap 2026 (%)
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	-	73,68%	70,45%	91,66%	77,55%	91,75%	118,31%	77,55	118,31%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Pencapaian Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar 91,75% dari target 77,55% yaitu sebesar 118,31% dapat dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial baru dilaksanakan dalam menunjang sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan social sebesar 91,75%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 91,66%.

Pencapaian Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Bantuan Sosial tahun 2025 terealisasi sebesar 91,75% dari target RPJMD sebesar 77,55% yaitu sebesar 118,07%.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan :

- ✓ Melaksanakan Koordinasi sebanyak 7 kali, Ke Instansi lain (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), dalam rangka dan Kegiatan.
  - o Koordinasi kedinas Sosial Provinsi Kalsel (Pemantapan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dalam rangka untuk mendukung IKU).
  - o Koordinasi dengan Balai Besar Pendidikan dan Latihan Kesejahteraan Sosial Kemensos (Pemenuhan SPM pada pelaksanaan peningkatan pelayanan untuk mendukung IKU Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru).
  - o Koordinasi dengan Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Provinsi Kalsel (Peningkatan pelayanan untuk pemenuhan SPM Dinas Sosial Kotabaru IKU).
  - o Koordinasi dengan Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari Provinsi Kalsel(Peningkatan pelayanan untuk pemenuhan SPM Dinas Sosial Kotabaru IKU).
  - o Koordinasi Program Panti Anak dan Remaja antara Kepala Panti dengan Kepala Dinas dan Bidang terkait di Kotabaru (Peningkatan SDM untuk mendukung indikator Kinerja Utama Dinas Sosial KTB).
  - o Koordinasi dan Konsultasi tentang Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas Kabupaten Kotabaru di Sentra Budi Luhur Kemensos RI (Peningkatan Pelayanan Dinas Sosial Kab. KTB untuk pemenuhan SPM pada IKU).

- Koordinasi dengan ombusman analisis Beban Kerja Dinas Sosial sekaligus peningkatan pelayanan (Pemenuhan SPM untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kab. KTB).

✓ Melaksanakan rapat sebanyak 3 kali, yaitu :

- Program PKH (Pemenuhan SPM untuk mendukung peningkatan pelayanan Dinas Sosial pada IKU Dinas Sosial).
- Rapat Koordinasi di Balai Besar Pendidikan dan latihan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Percepatan Realisasi Program BPNT dan PKH,
- Rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan tentang Kesehatan Lanjut Usia (LANSIA).

✓ Melaksanakan Sosialisasi sebanyak 3 kali, yaitu :

- Menghadiri sosialisasi dari Kementerian Sosial di Jakarta;
- Melaksanakan Sosialisasi Bimbingan Lanjutan bagi wanita rawan sosial dirumah singgah Kotabaru;
- Melaksanakan Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan Se Kecamatan Pulaulaut Barat;
- Melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESSOS).

Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Persentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan didukung Program/ kegiatan yaitu:

✓ **Program Pemberdayaan Sosial**

- Kegiatan Pemberdayaan sosial komunitas Adat Terpencil (KAT)
  - Fasilitasi PemberdayaanSosial KAT

    Pada kegiatan ini pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan dalam bidang, permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan social dan lingkungan hidup. Meliputi 2 kecamatan Hampang dan Kecamatan Sengayam.
- Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/kota.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

  Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial Daerah Provinsi dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

  Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di ditempatkan di 22 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

  Adapun Program Kegiatan adalah:

  - Adanya Lomba Pilar – pilar Sosial yang berprestasi yang setiap tahun di adakan seleksi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
  - Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
  - Verifikasi dan Validasi Data PPKS.
  - Pendataan untuk mengidentifikasi penerima manfaat program-program kesejahteraasn sosial. Hal ini guna memastikan bahwa bantuan sosial dan dukungan tepat sasaran.
  - Mengkoordinasikan berbagai program kesejahteraan sosial yang tersedia di kecamatan masing-masing.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

  Dasar Peraturan Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk

generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip :

a. Berjiwa Sosial;
b. Kemandirian;
c. Kebersamaan;
d. Partisipasi;
e. Lokal dan otonom; dan
f. Nonpartisan.

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permensos Nomor 25 Tahun 2019, Karang Taruna bekerja sama denganPemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha, atau masyarakat.

Program kegiatan Karang Taruna sebagai berikut :

1. Kegiatan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna (KKBWKT) tingkat Kabupaten. Kegiatan ini akan mengundang seluruh pengurus Karang Taruna Desa di setiap Kecamatan seluruh Kabupaten. Kegiatan dilaksanakan diruang terbuka (Out Door) dengan tema Wisata.
2. Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Karang Taruna. Untuk menambah wawasan terhadap anggota Karang Taruna maka perlu adanya semacam sosialisasi secara tatap muka langsung kepada anggota Karang Taruna dengan adanya kegiatan ini akan membantu dan mempermudah dalam mengali pengetahuan terhadap ke Karang Tarunaan.
3. Kegiatan lomba pilar – pilar sosial tingkat Kabupaten dan Provinsi. Karang Taruna adalah salah satu pilar – pilar sosial yang terakomudir di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dari itu Karang Taruna juga ikut serta berpartisipasi

dalam kegiatan Lomba pilar – pilar sosial tingkat Kabupaten dan Provinsi.

4. Kegiatan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna (KKBWKT) se Provinsi Kalimantan Selatan. Sama halnya dengan tingkat Kabupaten namun kegiatan ini berskala besar karena mengundang seluruh Karang Taruna di Desa maupun Pengurus Kabupaten se Kalimantan Selatan.

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan latihan mengenai masalah yang ditangani LK3 antara lain: masalah sosial psikologis, kekeraan dalam rumah tangga, anak terlantar dan masalah sosial lainnya. Kesemua permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam penyelesaian masalahnya.



Sosialisasi Puskesos kecamatan Pamukan Barat



Peresmian PUSKESOS di Sarang



Sosialisasi Puskesos di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar



Pembukaan Acara Karang Taruna di Sarang Tiung





✓ **Program Rehabilitasi sosial**

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

    Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan kepanitiaan diklat pendampingan keluarga dalam perawatan lansia. Kegiatan ini sasarannya adalah para keluarga lansia yang kesehariannya bersama sama lansia tersebut, sehingga merekalah yang punya andil kuat dalam perawatan para lansia. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di gedung dengan kepanitian dan kepesertaan dari beberapa kecamatan yang ditunjuk serta nara sumber yang sudah ahli dibidangnya.
  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

    Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan kepanitiaan diklat pendampingan keluarga dalam perawatan lansia. Kegiatan ini sasarannya adalah para keluarga disabilitas yang kesehariannya bersama sama para disabilitas tersebut, sehingga merekalah yang punya andil kuat dalam perawatan para disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di gedung atau tempat yang ditemtukan dengan kepanitian dan kepesertaan dari beberapa kecamatan yang ditunjuk.
  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

    Hal ini diwujudkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan memberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar, melakukan pembinaan dan pendidikan. Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “MULIA SATRIA” di Banjarbaru adalah panti khusus untuk pelatihan dengan target utama remaja putus

sekolah dari keluarga tidak mampu. Pembukaan disebarkan keseluruh Kecamatan Kabupaten Kotabaru dengan kuota maksimal sebanyak 8 orang yang diterima peserta pendaftaran pertama-tama melengkapi persyaratan yaitu mengisi Formulir Peserta, Kartu Keluarga, Foto Ukuran 3x4, Surat Keterangan Kesehatan dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Desa. Jenis pelatihan yang diadakan dengan jurusan Tata Busana (Menjahit), Komputer, Tata Rias (Salon), Potong Rambut Pria (Babershop), Otomotif, Bengkel Sepeda Motor, Elektro/Service HP, Meubel Aluminium, Barista (Meracik minuman kopi dan lain-lain secara professional). Semua jurusan dapat diikuti semua calon klien baik laki-laki maupun wanita. Kemudian diadakan seleksi peserta calon panti satu persatu melalui tes wawancara dengan berbagai pertanyaan salah satunya tentang jurusan apa yang akan diambil pada pelatihan di panti tersebut. Beberapa minggu kemudian akan diumumkan peserta yang lulus seleksi panti dengan dikirimkan surat hasil seleksi dari Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “MULIA SATRIA” dengan daftar nama terlampir, peserta yang lulus kemudian dipanggil untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk pengantaran ke Panti. Setelah ditentukan tanggal keberangkatan, peserta diantar ke Panti dengan didampingi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Setelah sampai di Panti, peserta didampingi untuk Registrasi serta kamar yang akan ditempati selama pelatihan. Pelatihan diadakan selama 6 (enam) bulan dengan monitoring sebanyak 1 (satu) kali kemudian terakhir dilakukan penjemputan setelah kegiatan pelatihan berakhir. Pelatihan keterampilan ini diadakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, Peserta dari Kabupaten Kotabaru sebanyak 13 (tiga belas) orang pada tahun 2021, Pada tahun 2022 Peserta terdiri dari 16 (enam belas) orang, Pada tahun 2023 Peserta terdiri dari 20 (dua puluh) Orang, pada tahun 2024 peserta terdiri dari 18 (delapan belas) orang yang peserta terdiri dari beberapa perwakilan Kecamatan.

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

  Sasaran dari kegiatan ini adalah anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan lansia terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya serta penyandang disabilitas (cacat) dalam bentuk bantuan sosial, Bantuan Sosial ini berdasarkan atas usulan – usulan dari desa maupun kecamatan yang telah diverifikasi oleh dinas sosial , setelah nya akan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk penetapan nama nama penerima bantuan sosial tersebut, dalam hal penyaluran masing masing penerima harus memiliki rekening untuk menyerap bantuan sosial dari pemerintah daerah. Dalam Proses pencairan Dinas Sosial bekerja sama dengan bank kalsel dengan membuka rekening khusus bagi penerima tanpa biaya admin dan tanpa saldo minimum yang ditinggalkan. Dengan bantuan ini diharapkan penerima bansos dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- Pemberian Layanan Kedaruratan

  Pemberian layanan kedaruratan diperuntukkan bagi orang terlantar, eks napi maupun pengemis dan orang hasil razia satpol PP. Layanan ini sebagai sarana transportasi bagi mereka untuk kembali ketempat asalnya untuk berkumpul kepada keluarga.

- Pemberian Layanan Rujukan

  Layanan rujukan ini ditujukan untuk penyandang disabilitas mental yang memiliki keluarga tidak mampu, layanan rujukan tersebut berupa pendampingan penyandang disabilitas mental untuk berobat ke rumah sakit rujukan. Disamping melakukan pendampingan juga memfasilitasi transportasi bagi pasien dan keluarga. melaksanakan/ mengantarkan pasien gangguan jiwa ke RS Sambanglihum BJB Tahun 2017 sebanyak 12 orang terdiri 8 Orang Laki-laki dan 4 orang perempuan. Tahun 2018 sebanyak 13 Orang terdiri dari 9 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan. Tahun 2019 sebanyak 7 Orang terdiri dari 3 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan. Tahun 2020 sebanyak 11 Orang terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 3 Orang Perempuan. Tahun 2021 sebanyak

15 Orang terdiri dari 9 Orang Laki-laki dan 6 Orang Perempuan dan Tahun 2022 sebanyak 17 Orang terdiri dari 14 Orang Laki-laki dan 3 Orang Perempuan. Tahun 2023 sebanyak 9 terdiri 7 Orang laki-laki, dan 2 Orang Perempuan. Tahun 2024 sebanyak 8 terdiri dari 8 orang laki-laki. Proses dari usulan Kepala Desa/Lurah kepada Dinas Sosial Kab. Kotabaru selanjutnya peninjauan kerumah ODGJ oleh staf atau kasi Rehabilitasi sosial yang selanjutnya apabila dinyatakan siap pengantaran kesambang lihum dapat melengkapi berkasnya dengan menyertakan KTP, Kartu Keluarga, KTP Pendamping, BPJS Kesehatan, rujukan dari puskesmas setempat/Rumah Sakit ke RSJ Sambang Lihum.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

    Pelayanan pada rumah singgah untuk semua ppks selama 3 hari atau lebih sebelum diproses sesuai permasalahan PPKS seperti orang terlantar, Orang Hasil razia satpol PP, Odgj terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum, Exs Napi, korban bencana dan PPKS lainnya. Mereka selain mendapatkan konsumsi juga diinapkan di rumah singgah.
  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

    dengan melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan, melaksanakan pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar. Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) “BARAKAT CANGKAL BACARI” di Banjarbaru adalah panti khusus untuk pelatihan dengan target utama wanita rawan sosial dan Tuna Sosial. Pembukaan disebarkan keseluruh Kecamatan Kabupaten Kotabaru dengan kuota maksimal sebanyak 7 orang, peserta pendaftaran pertama-tama melengkapi persyaratan yaitu mengisi Formulir Peserta, Kartu Keluarga, Foto Ukuran 3x4, Surat Keterangan Kesehatan.

Jenis pelatihan yang diadakan dengan jurusan Tata Boga, Tata Rias, dan Tata Busana (Menjahit) khusus calon klien wanta dan jurusan bengkel sepeda motor khusus untuk calon klien laki-laki. Kemudian diadakan seleksi peserta calon panti satu persatu melalui tes wawancara dengan berbagai pertanyaan salah satunya tentang jurusan apa yang akan diambil pada pelatihan di panti tersebut. Beberapa minggu kemudian akan diumumkan peserta yang lulus seleksi panti dengan dikirimkan surat dari Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) “BARAKAT CANGKAL BACARI” dengan daftar nama terlampir, peserta yang lulus kemudian dipanggil untuk melengkapi persyaratan untuk pengantaran ke Panti. Setelah ditentukan tanggal keberangkatan ,peserta diantar ke Panti dengan didampingi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Setelah sampai di Panti, peserta didampingi untuk Registrasi nama serta kamar yang akan ditempati selama pelatihan. Pelatihan diadakan selama 6 (enam) bulan dengan monitoring sebanyak 1 (satu) kali kemudian terakhir dilakukan penjemputan Siswi. Pelatihan keterampilan ini diadakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, Peserta dari Kabupaten Kotabaru sebanyak 7 (tujuh) orang pada tahun 2021 dan Pada tahun 2022 Peserta terdiri dari 14 (empat belas) orang dan Pada tahun 2023 Peserta terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan Pada tahun 2024 Peserta terdiri dari 0 (nol) orang, peserta terdiri dari beberapa perwakilan Kecamatan.

- Pemberian Layanan Rujukan

  Pemberian layanan rujukan untuk lansia terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak ada lagi keluarga yang peduli kepadanya sehingga menyebabkan keterlantaran, lansia tersebut akan difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk rujukan ke panti sosial yang dapat menampungnya.





Homevisit Anak



Pengamanan Pengamen



Pengamanan ODGJ



Sidang Pengadilan Hak Asuh Anak



Sosialisasi PRSPDNF di Dinas Sosial Provinsi



Pemeriksaan ODGJ



Penyaluran Bantuan Sosial Lansia





Penyaluran Bantuan Sosial Disabilitas

✓ **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

4) Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

➢ Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan social. Ciri – ciri anak terlantar antara lain:

- Anak berusia 5 – 18 Tahun
- Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
- Salah satu dari orang tuanya atau keduanya akit.
- Salah seorang atau keduanya meninggal
- Keluarga tidak harmonis
- Tidak ada pengasuh / pengampu sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik jasmani, rohani dan sosial.

5) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

➢ Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, memberikan fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga, memberikan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Verifikasi dan validasi data usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilakukan diseluruh kecamatan yang berpusat di desa masing-masing melalui Pusat Terpadu Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) ataupun bisa dilakukan secara mandiri oleh

KPM langsung dengan melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial yang berbasis android dengan mengunggah Kartu Tanda Penduduk yang niknya sudah dilakukan pemadanan data di dukcapil, Kartu Keluarga yang nomornya sudah dilakukan pembeharuandi dukcapil, Foto rumah tampak depan dan tampak dalam. Setelah dilakukan validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel berdasarkan kecamatan masing-masing. Untuk memvalidasi kelengkapan yang harus di validasi berupa Berita Acara Musdes/Muskel, Dokumentasi Pelaksanaan Musdes/Muskel, Foto Publikasi Hasil Musdes/Muskel yang bisa ditampilkan melalui sosial media atau pengumuman desa masing-masing, Daftar Hadir pelaksanaan Musdes/Muskel. Kemudian dilakukan finalisasi berdasarkan hasil validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel. Kemudian sebelum dapat mengupload surat pengesahan dan lampiran pengesahan yang ditanda tangani oleh Bupati Kotabaru harus mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial. Untuk Finalisasi usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu sendiri dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember. Melaksanakan Sosialisasi Penguatan SDM Puskesos Desa sebanyak 7 kali dalam setahun di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Selatan.

6) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Bantuan Sosial Bersyarat,

PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil, anak 0 tahun sampai 5 tahun, anak sekolah dari SD, SMP, SMA, Disabilitas, Lansia untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (Fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dikabupaten Kotabaru Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada 4 tahap penyaluran pada tahun 2024, penyaluran bantuan secara non tunai melalui HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) serta melalui PT. Pos Indonesia. Tugas Pendamping PKH :

- Menyusun Rencana kerja PKH di wilayah dampingannya.
- Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
- Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
- Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mendiri.
- Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya.
- Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH.
- Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala.
- Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten atau kota secara berkala.
- Memastikan Bantuan PKH sampai ke tangan KPM PKH.

Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2024 (Rp)/Tahun adalah sebagai berikut :

- Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp. 3.000.000,-
- Kategori Anak Usia Dini 0 s.d 5 Tahun : Rp. 3.000.000,-
- Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp. 900.000,-
- Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp. 1.500.000,-
- Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp. 2.000.000,-
- Kategori Penyandang Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
- Kategori Lanjut Usia : Rp. 2.400.000,-

7) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

KUBE adalah Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari berbagai macam usaha, dengan anggota sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota. Bantuan untuk KUBE berupa barang-barang yang diperlukan untuk menunjang usaha mereka, usulan pertama dari masing-masing Kabupaten Kota dengan mengajukan proposal beserta nama usaha yang dilengkapi dengan RAB usaha. Proposal diajukan oleh pendamping lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten kemudian diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian dari Dinas Sosial Provinsi akan melakukan verifikasi calon Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama dengan didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping Dinas dan 1 (satu) orang pendamping lapangan. Setelah diverifikasi , dalam waktu 3-4 bulan akan dilakukan Bimbingan Teknis untuk kelompok didampingi oleh Pendamping Dinas Sosial yang diadakan di Dinas Sosial Provinsi selama 3 (tiga) hari. Setelah pelatihan selesai, bantuan akan dikirimkan melalui pemborong. Setelah bantuan diterima kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi bantuan dari Dinas Sosial Provinsi dan didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Pendamping lapangan. Besar harapan semua bantuan yang diberikan agar dapat berkembang dan menjadikan usaha, Kelompok Usaha Bersama Tahun 2018 untuk wilayah perkotaan sebanyak 3

(tiga) kelompok, Pesisir sebanyak 5 (lima) kelompok, Pedesaan sebanyak 4 (empat) kelompok. Total bantuan di Tahun 2018 adalah 12 (Dua Belas) Kelompok. Tahun 2019 KUBE wilayah Pedesaan sebanyak 4 (Empat) Kelompok, Wilayah Perkotaan sebanyak 2 (dua) Kelompok, dan Pesisir sebanyak 5 (lima) Kelompok dengan Total bantuan 11 (Sebelas) kelompok. Tahun 2020 untuk bantuan KUBE ditiadakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran untuk covid-19. Tahun 2021 bantuan KUBE sebanyak 1 (satu) kelompok. Tahun 2022 bantuan KUBE tidak ada bantuan Tahun 2023 bantuan KUBE tidak ada bantuan. Tahun 2021 bantuan UEP sebanyak 105 Orang. Tahun 2022 bantuan UEP sebanyak 54 Orang dan Tahun 2023 bantuan UEP sebanyak 149 Orang dan Tahun 2024 bantuan UEP sebanyak 221 orang.



Bantuan Sosial RUTILAHU



Sosialisasi Pendampingan Sosial

Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni





Penyaluran Bantuan Sosial UEP-P

✓ **Program Penanganan Bencana**

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. (Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi).

  pada tahun 2017 s/d 2024 Bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun bencana sosial yang sudah ditangani Penanganan masalah – masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat dengan kerjasama instansi terkait dalam pelaksanaan jika terjadi sesuatu kejadian Bencana baik tingkat kecamatan, desa dengan instansi terkait BPBD, Dinas Pemanadam Kebakaran, Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Data bencana dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :

  - Data bencana Tahun 2017 sebanyak 12 Bencana;
  - Data bencana Tahun 2018 sebanyak 22 Bencana;
  - Data bencana Tahun 2019 sebanyak 29 Bencana;
  - Data bencana Tahun 2020 sebanyak 20 Bencana;
  - Data bencana Tahun 2021 sebanyak 34 Bencana;
  - Data bencana Tahun 2022 sebanyak 36 Bencana.
  - Data bencana Tahun 2023 sebanyak 34 Bencana.
  - Data bencana Tahun 2024 sebanyak 57 Bencana.

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana).

  Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana karena Kejadian tidak dapat diduga atau diprididiksi kapan pun dimanapun kita tidak dapat mengetahuinya namun kesiapsiagaan kita semua harus waspada. Apabila terjadi

Bencana Dinas Sosial akan membantu dengan berupa barang sandang maupun pangan (sembako).

Koordinasi hubungan dengan instansi terkait yang mana apabila terjadi bencana Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan instansi terkait BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar dan Kecamatan yang ada dikabupaten Kotabaru sebanyak 22 Kecamatan juga dengan Desa/Kelurahan apabila ada terjadi Bencana Desa bisa secara langsung menghubungi pihak kecamatan atau kedinas sosial baru surat menyusul laporan kejadian bencana. Dinas Sosial mempunyai relawan TAGANA (TARUNA SIAGA BENCANA) merakalah yang akan membantu bila terjadi bencana, baik bencana alam maupun sosial. Mobil dapur umum yang siap stanbey setiap saat baik bahan bakar, oli mobil dan peralatan lainnya yang ada di mobil dapur umum. Sembako untuk bahan masak yang ada di dapur umum. Bafferstock dari anggaran daerah setiap tahun tidak mencukupi dikarnakan kejadian Bencana ini tidak dapat diprediksi setiap Tahunnya akibatnya sering kekurangan barang bantuan sembako dengan ini. Dari kami tinggal mengeturkan sembako agar dapat terealisasi bantuan kemasyarakataan agar dapart menata dalam pembagian sembakonya, dikarnakan bencana banjirlah yang sering terjadi kita susah mengatur pembagian sembakonya dengan jumlah KK yang banyak dan serempak di beberapa Kecamatan dengan jumlah jiwa yang banyak, mengakibatkan pembagian sering kekurangan bahan yang dapat dibagikan walaup[un semua dapat pembagiannya. Untuk bencana kebakaran dapat kita atasi dengan jumlah kejadian dimana jumlah KK sudah pasti dan jumlah jiwa hanya terpokus di satu tempat, beda dengan kejadian banjir yang serempak terjadi di beberapa kecamatan mengakibatkan bafferstock sering habis. mobil dapur umum apabila Korban Bencana yang banyak dengan jumlah jiwanya harus disiapkan makan dan minumnya sesuai dengan SK Bupati tentang Tanggap Darurat kejadian luar biasa juga ada Tenda Pengungsi dan tenda keluarga, Vabed serta peralatan masak

lainnya. Semuanya untuk membantu korban bencana alam dan bencana sosial.

Menyalurkan bantuan Dinas Sosial Kabupaten berupa Paket Permakanan dan Paket Sandang yang bersumber dari dana APBN dan APBD yang diserahkan kepada korban bencana. Tahun 2017 sebanyak 12 kali kejadian bencana dengan rincian jumlah 24 KK yaitu sebanyak 68 Jiwa. Tahun 2018 sebanyak 22 kali bencana dengan rincian Jumlah 315 KK yaitu sebanyak 1115 Jiwa. Tahun 2019 sebanyak 29 kali kejadian dengan rincian jumlah 319 KK yaitu sebanyak 1199 Jiwa. Tahun 2020 sebanyak 20 kali kejadian dengan rincian Jumlah KK 454. yaitu sebanyak 1702 Jiwa. Tahun 2021 sebanyak 34 Kali Kejadian dengan rincian Bencana Alam 14 kali dan Bencana Sosial 20 Kali dengan Jumlah 207 KK yaitu sebanyak 780 Jiwa. Tahun 2022 sebanyak 36 Kali kejadian dengan rincian Bencana Alam 14 Kali dengan Jumlah 101 KK yaitu sebanyak 359 Jiwa dan Bencana Sosial 22 Kali dengan Jumlah 40 KK yaitu sebanyak 136 Jiwa. Tahun 2023 sebanyak 34 Kali kejadian dengan rincian Bencana Alam 2 Kali dengan Jumlah 19 KK yaitu sebanyak 75 Jiwa dan Bencana Sosial 32 Kali dengan Jumlah 61 KK yaitu sebanyak 240 Jiwa. Tahun 2024 sebanyak 57 Kali kejadian dengan rincian Bencana Alam 24 Kali dengan Jumlah 24 KK yaitu sebanyak 95 Jiwa dan Bencana Sosial 33 Kali dengan Jumlah 33 KK yaitu sebanyak 93









Penyerahan Bantuan Kepada Korban Terdampak Bencana Sosial Kebakaran

- ✓ **Program pengelolaan taman makam pahlawanan**
  - Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/kota

    Pemberian Tali asih berupa sembako ke para janda - janda Veteran sebanyak 26 orang, Pemberian diserahkan pada saat hari Pahlawan 10 Nopember 2024. (foto penyerahan bantuan dilampirkan). Paket Per sembako sebesar Rp. 400.000,-. Adapun isi paket sembako (Beras 5 Kg, Gula 2 Kg, Minyak Goreng 2 liter, Mie Instan 5 Bungkus, Kecap Manis 2 Botol, Susu 2 Kaleng, Teh 1 Kotak, Kopi 2 Bungkus, Sarden 5 Kaleng dan Biskuit 2 Bungkus, Bawang Merah ½ Kg, Telur 10 Butir).




Panyerahan Tali Asih dan Sembako untuk Keluarga Veteran

TUJUAN 7 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG JUJUR, RESPONSIVE, TERBUKA, AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN BAIK

Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsive, terbuka, akuntabel, transparan dan baik adalah upaya dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk menjawab isu – isu strategis dari dunia internasional (SDGs) yaitu *mengembangkan kemitraan untuk pembangunan*, Isu Strategis dari Kebijakan Nasional (Nawacita) yaitu *membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,* Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan yaitu *peningkatan kualitas layanan public yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi*

system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, maka Kabupaten Kotabaru menetapkan isu strategis *Peningkatan pelayanan public dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.*

Indikator Tujuan dari terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dalam usaha mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah 2 (dua) sasaran, yaitu sasaran pertama *"*Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani*"*, Sasaran Kedua *"*Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah*".*

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sasaran meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi birokrasi baru ditetapkan pada tahun 2019 berdasarkan masukan dari hasil pendampingan terhadap SAKIP Kabupaten Kotabaru dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 72 tahun 2019 tentang Penyempurnaan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Adapun capaian dari sasaran ini adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel.II.41
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Predikat)	56,83 (CC)	58,64 (CC)	58,64 (CC)	69,39 (B)	67,50 (B)	76,22 (BB)	112,91%	70 (B)	108,88%

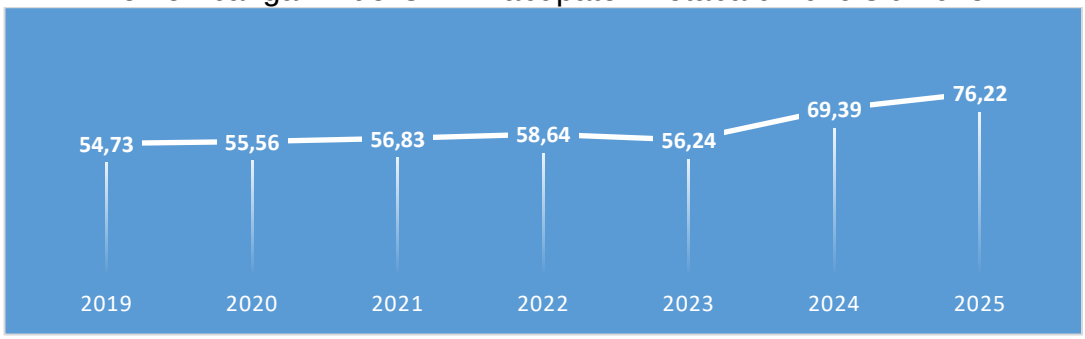
Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 terealisasi sebesar 76,22 (BB) apabila dibandingkan dengan target 67,50 (B) sehingga capaiannya sebesar 112,91% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi realisasinya mencapai 76,22 (BB) angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,83 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 69,39 (B)

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 terealisasi sebesar 76,22 (BB) apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 70 (B) sehingga capaian sebesar 108,88%

Grafik II.
Perkembangan Indeks RB Kabupaten Kotabaru 2019 s.d 2025



Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan progresif, terutama pada periode transisi menuju tahun 2025. Setelah mengalami fluktuasi ringan pada tahun 2023 di angka 56,24, pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi signifikan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 69,39. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan skor mencapai 76,22, yang mengindikasikan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan pada jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata terhadap performa birokrasi daerah secara keseluruhan.

Keberhasilan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru yang mencapai angka 76,22 pada tahun 2025 didorong oleh fondasi manajerial yang kuat. Faktor pendukung utama dalam capaian ini adalah adanya komitmen pimpinan yang tinggi serta penyelarasan kebijakan yang harmonis di seluruh lini perangkat daerah. Selain itu, perumusan rencana aksi yang disusun telah dikonstruksikan agar relevan dengan indikator penilaian, sehingga setiap program kerja memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Sinergi antara kebijakan strategis dan implementasi teknis

inilah yang menjadi mesin penggerak utama dalam menjaga tren positif performa birokrasi di Bumi Saijaan.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan yang impresif, proses evaluasi internal mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian serius. Masih ditemukan adanya rencana aksi pada beberapa unit kerja yang kurang mendukung pencapaian target makro RB secara optimal, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam terhadap kaitan antara aktivitas rutin dengan indikator kinerja utama. Di samping itu, proses evaluasi yang belum konsisten pada setiap tahapan capaian menyebabkan potensi deviasi kinerja tidak dapat terdeteksi lebih dini, sehingga memerlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat agar setiap hambatan di lapangan dapat segera teratasi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan memprioritaskan penyempurnaan kualitas dokumen rencana aksi melalui asistensi teknis yang lebih intensif di setiap SKPD. Fokus utama tindak lanjut adalah memastikan seluruh program kerja memiliki keterkaitan logis (cascading) yang kuat terhadap indikator RB dan digitalisasi tata kelola. Selain itu, akan diterapkan mekanisme evaluasi berkala yang sistematis di setiap triwulan untuk memantau progress capaian secara real-time. Dengan melakukan penguatan pada aspek monitoring dan perbaikan kualitas rencana aksi, Kabupaten Kotabaru optimis dapat mempertahankan predikat kinerja unggul dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang baik dan terus meningkat dalam mendukung Indeks RB bersama dengan OPD yang bersangkutan
2. Capaian dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang hampir sempurna di angka 99% mencerminkan komitmen kuat terhadap pemulihan ekonomi melalui produk lokal.
3. Tingkat digitalisasi arsip yang mencapai 89,2% menunjukkan kesiapan infrastruktur administrasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern

4. Efektivitas dalam mencapai indikator kinerja utama makro yang berada di angka 92%

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Penetapan target IKU dan Rencana Aksi belum sepenuhnya selaras dengan target "Baik" yang ditetapkan dalam Kepmen 182 Tahun 2024.
2. Belum dijadikannya manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan serta kurangnya monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3. Masih ditemukan sasaran strategis yang tidak selaras antara level Pemda dan OPD, serta indikator yang bersifat output saja (bukan outcome).
4. Masih adanya risiko hubungan kedekatan antara penyedia jasa dengan pejabat dan belum optimalnya mekanisme pencegahan gratifikasi.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam mengakselerasi pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) melalui penguatan integritas dan tata kelola organisasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah ini diwujudkan dengan membentuk Komite atau Satgas Pengelola Risiko Korupsi serta melaksanakan probity audit secara berkala guna mendeteksi serta memitigasi potensi penyimpangan sejak dini, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk memperkuat transparansi, pemerintah daerah mengembangkan inovasi digital berupa aplikasi e-catalog lokal dan dashboard transparansi anggaran yang mengintegrasikan daftar hitam (blacklist) vendor, guna menutup celah nepotisme dan memastikan akuntabilitas belanja publik. Upaya ini dibarengi dengan internalisasi budaya antikorupsi yang masif kepada seluruh stakeholders, di mana pimpinan daerah menempatkan diri sebagai role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi.

Dalam aspek birokrasi yang berorientasi hasil, Kabupaten Kotabaru melakukan penyempurnaan rencana aksi RB Tematik, khususnya pada fokus penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Strategi ini melibatkan kolaborasi multipihak yang menyatukan akademisi, sektor

swasta melalui program CSR, dan komunitas dalam satu peta jalan (roadmap) yang logis dan terintegrasi. Sebagai bagian dari perbaikan manajemen kinerja, pemerintah daerah melakukan reviu total untuk memastikan seluruh target rencana aksi telah selaras dengan standar nasional, termasuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru seperti Kepmen 182/2024. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen rencana aksi tersebut diperbaiki agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) yang berorientasi pada hasil nyata (outcome-based), sehingga Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, melainkan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabar:

1. Melakukan koordinasi dan diskusi dalam persiapan pengisian rencana aksi yang terdapat dalam portal RB





2. Melaksanakan FGD dalam Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik





3. Melakukan rapat capaian rencana aksi yang telah ditetapkan secara berkala yaitu triwulan I s.d IV





4. Melakukan Finalisasi Capaian Rencana Aksi tahun 2025





Sasaran 21: Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel yang Melayani

Adapun capaian inidkator Nilai SAKIP dari sasaran Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel. II.42
Capaian Nilai SAKIP Kab.Kotabaru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	BB (70,1-80)	B (64,80)	92,43%	BB	92,43%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi sebesar

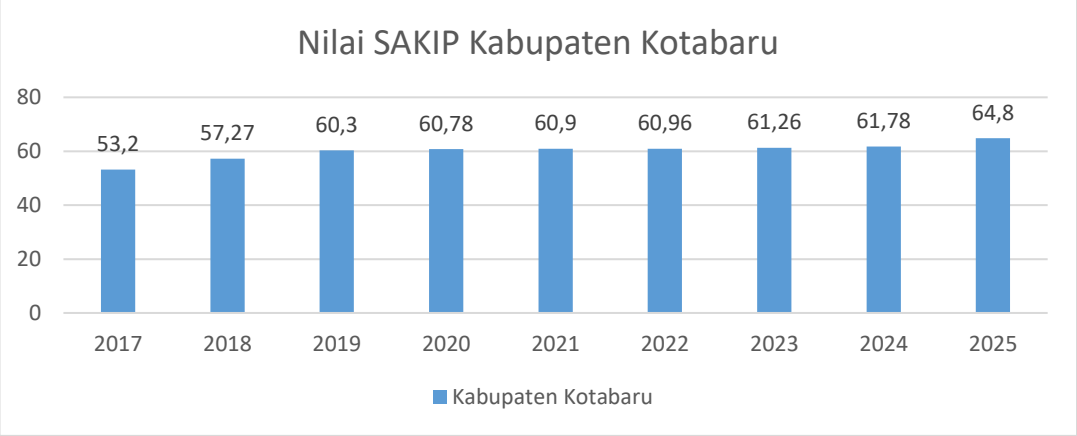
64,80 (B) apabila dibandingkan dengan target 70,01-80 (B) sehingga capaiannya sebesar 92,43% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Nilai SAKIP realisasinya mencapai 64,80 (B) angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,02 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 61,78 (B).

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi sebesar 64,80 (B) apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 70,1-80 (B) sehingga capaian sebesar 92,53%.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 memperoleh Nilai 60,30 (B); 60,78 (B); 60,9 (B); 60,96 (B); 61,26 (B), 61,78 (B), dan 64,80 (B) berdasarkan Laporan hasil Evaluasi dari KemenPAN-RB RI, hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan Skor dan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dapat digambarkan melalui trend pencapaian adalah sebagai berikut:

Grafik II.
Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2025.



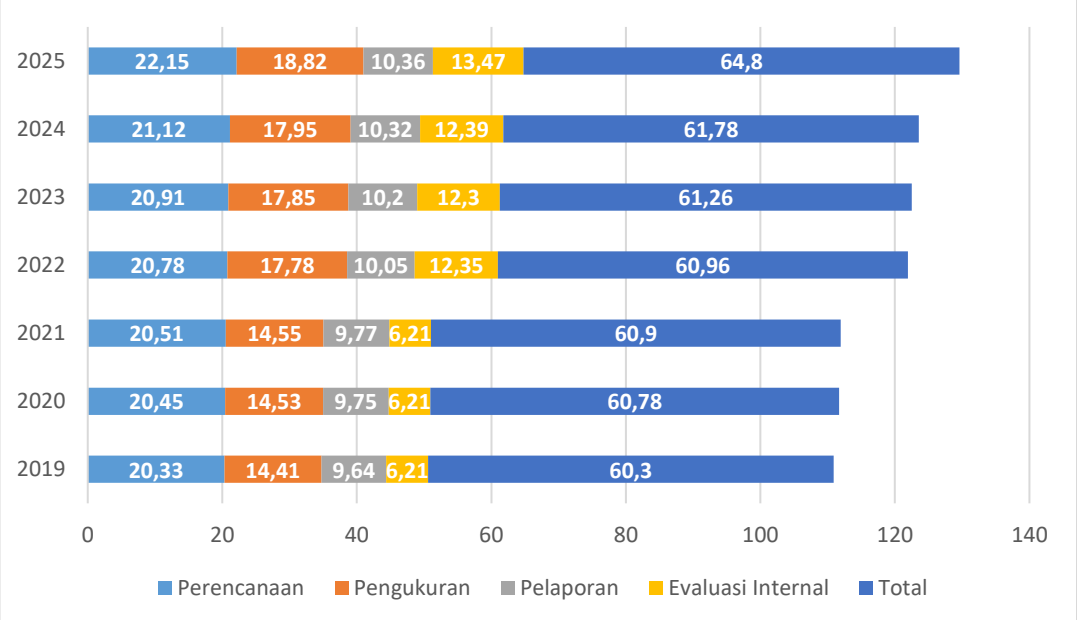
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan Grafik II.10, perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten dalam periode tahun 2017 hingga 2025. Dimulai dari angka 53,2 pada tahun 2017, nilai ini mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya hingga mencapai nilai sebesar 64,8 pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup signifikan

terlihat pada periode awal antara tahun 2017 ke 2019, sementara pada tahun-tahun berikutnya kenaikan terjadi secara gradual namun tetap menunjukkan performa yang positif dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rincian Nilai Komponen SAKIP Yang Dinilai berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana terlampir pada grafik berikut:

Grafik II.
Perkembangan Nilai Komponen SAKIP Tahun 2019 s.d 2025

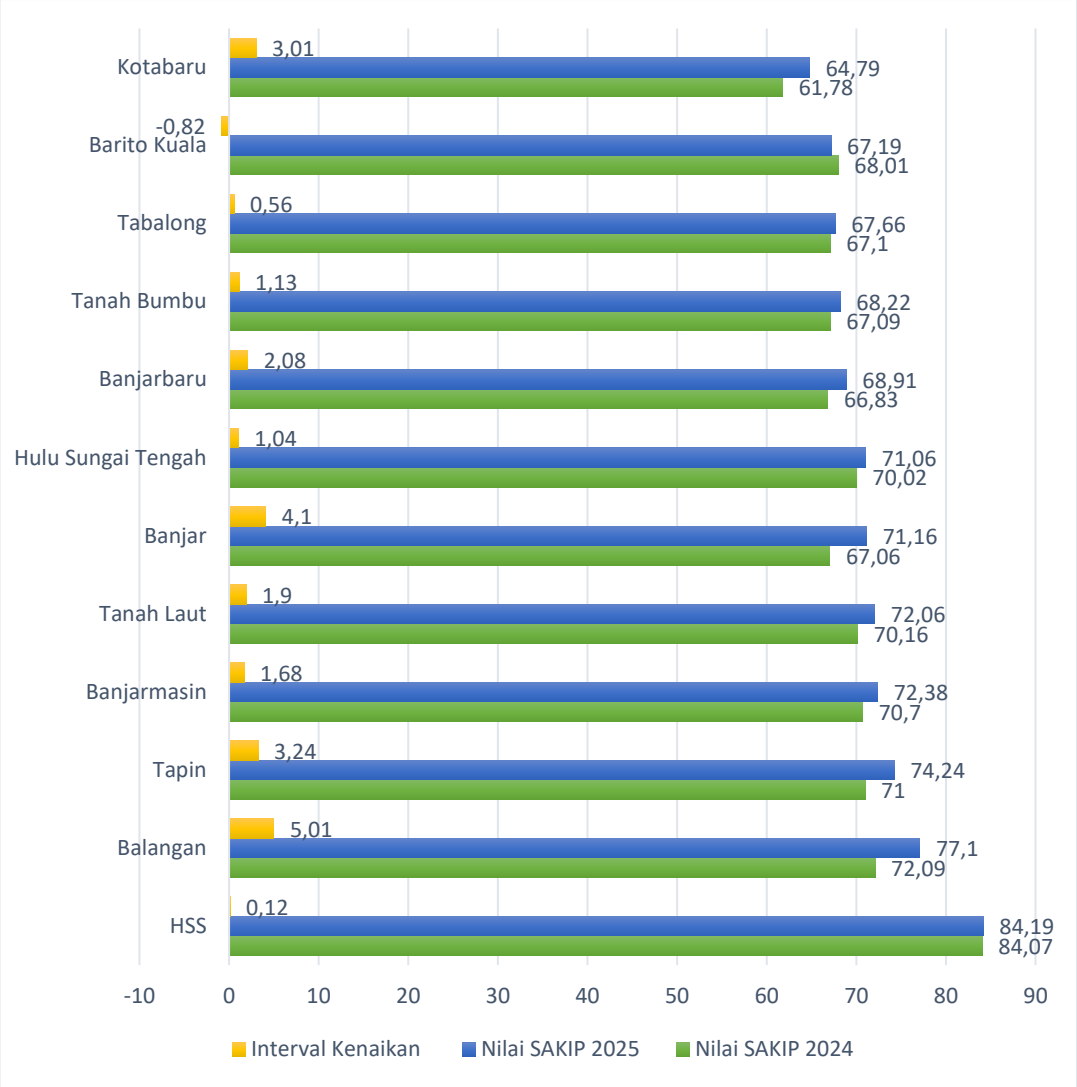


Sumber: Diolah oleh Penulis,2026.

Berdasarkan tren data yang disajikan, Berdasarkan rincian data pada tabel, perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan tren penguatan yang konsisten di seluruh lini

penilaian. Keberhasilan ini didorong oleh kontribusi komponen Perencanaan yang meningkat hingga mencapai 22,15, komponen Pengukuran sebesar 18,82, komponen Pelaporan yang stabil di angka 10,36, serta lonjakan signifikan pada komponen Evaluasi Internal yang diproyeksikan menyentuh angka 13,47 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, akumulasi peningkatan dari keempat komponen tersebut membawa nilai total SAKIP Kabupaten Kotabaru pada titik tertinggi sebesar 64,8 di tahun 2025. Capaian ini menjadi kesimpulan penting bahwa transformasi manajemen kinerja di daerah tersebut telah berjalan secara komprehensif dan terukur menuju tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.

Grafik II.
Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten dan Kota
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik II.12 dijelaskan bahwa Kabupaten Kotabaru menunjukkan performa yang cukup progresif dengan mencatatkan kenaikan nilai SAKIP yang signifikan sebesar 3,01 poin, meningkat dari skor 61,78 pada tahun 2024 menjadi 64,79 di tahun 2025. Meskipun secara posisi administratif berada di urutan terakhir dalam daftar ini, tren pertumbuhan Kotabaru merupakan salah satu yang paling kompetitif dibandingkan daerah lainnya, membuktikan adanya upaya perbaikan manajemen kinerja yang serius di lingkungan pemerintah daerah. Kesimpulannya, Kotabaru sedang berada dalam jalur penguatan akuntabilitas yang positif, namun tetap memerlukan akselerasi yang lebih konsisten agar dapat mengejar ketertinggalan nilai dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan yang rata-rata sudah menyentuh angka di atas 67 hingga 70.

Tabel II.30
Nilai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup OPD Tahun 2025

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	81,5	A
2	Dinas Perikanan	81,5	A
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,85	BB
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	78,15	BB
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75,45	BB
6	Inspektorat	75,15	BB
7	Sekretariat Daerah	74,85	BB
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	73,95	BB
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	73,95	BB
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,65	BB
11	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	73,5	BB
12	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	73,3	BB
13	Dinas Sosial	73,2	BB
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu	72,65	BB
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,55	BB
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72,45	BB
17	Dinas Lingkungan Hidup	72,3	BB
18	Badan Pendapatan Daerah	70,65	BB
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70,35	BB
20	Dinas Kesehatan	70,25	BB
21	Dinas Perhubungan	70,2	BB
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66,55	B
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,35	B
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	66,1	B
25	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	64,6	B
26	Sekretariat DPRD	62,85	B
27	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	61	B
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	51,7	CC

Sumber: Diolah oleh Penulis berdsarkan data Inspektorat Kabupaten, 2026.

Berdasaran tabel diatas, proses evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) difokuskan pada empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi menunjukkan sebaran capaian yang cukup variatif, di mana dua instansi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Perikanan berhasil meraih nilai tertinggi sebesar 81,5 dengan predikat A (Sangat Memuaskan). Dominasi capaian terlihat pada predikat BB (Sangat Baik) yang diraih oleh 19 OPD, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (79,85) hingga Dinas Perhubungan (70,2). Namun, masih terdapat 6 OPD yang berada pada kategori predikat B (Baik), dan 1 OPD yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang masih memperoleh predikat CC (Cukup) dengan nilai 51,7.

Secara keseluruhan, kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang positif dengan mayoritas instansi (75%) telah mencapai kategori BB ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di sebagian besar OPD sudah berjalan secara sistematis dan selaras dengan tujuan daerah.

Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan dari Inspektorat, terutama bagi OPD yang masih berpredikat B dan CC. Fokus perbaikan harus diarahkan pada sinkronisasi indikator kinerja utama serta kualitas evaluasi internal agar seluruh perangkat daerah mampu berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan nilai SAKIP Kabupaten secara kolektif.

Tabel II.31
Nilai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Kecamatan
Tahun 2025

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
1	Pulau Laut Utara	76.50	BB

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
2	Pulau Laut Sigam	74.00	BB
3	Pulau Laut Tengah	61.85	B
4	Pulau Laut Timur	61.85	B
5	Pulau Sebuku	61.85	B
6	Pulau Sembilan	61.85	B
7	Sampanahan	61.85	B
8	Sungai Durian	61.85	B
9	Pulaulaut Tanjung Selayar	61.85	B
10	Pulau Laut Kepulauan	61.85	B
11	Pulaulaut Barat	61.85	B
12	Pamukan Utara	61.85	B
13	Pamukan Selatan	61.85	B
14	Pamukan Barat	61.85	B
15	Kelumpang Utara	61.85	B
16	Kelumpang Tengah	61.85	B
17	Kelumpang Selatan	61.85	B
18	Kelumpang Hulu	61.85	B
19	Kelumpang Hilir	61.85	B
20	Kelumpang Barat	61.85	B
21	Hampang	61.85	B
22	Pulau Laut Selatan	61.73	B

Sumber: Diolah oleh Penulis berdsarkan data Inspektorat Kabupaten, 2026.

Berdasarkan data tersebut, profil capaian kinerja di tingkat kecamatan menunjukkan pemusatan nilai yang sangat signifikan. Terdapat dua kecamatan yang berhasil menonjol dengan predikat BB (Sangat Baik), yaitu Pulau Laut Utara dengan nilai tertinggi 76,50 dan Pulau Laut Sigam dengan nilai 74,00.

Namun, fenomena yang menarik terlihat pada sisa 20 kecamatan lainnya, di mana mayoritas besar (19 kecamatan) memiliki nilai yang identik di angka 61,85 dengan predikat B (Baik). Hanya Pulau Laut Selatan yang memiliki sedikit selisih tipis di angka 61,73, namun tetap berada pada kategori predikat B. Kesamaan nilai yang dominan ini mengindikasikan adanya standar kualitas implementasi SAKIP yang setara di tingkat kewilayahan, namun sekaligus menunjukkan adanya ruang yang luas untuk diferensiasi dan peningkatan kualitas dokumen kinerja antar-kecamatan.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Kualitas pohon kinerja di level Pemerintah Daerah dinilai telah cukup baik, ditandai dengan penetapan Critical Success Factor (CSF) yang relevan untuk mencapai hasil akhir (ultimate outcome). Ini memudahkan penarikan benang merah sasaran dalam laporan kinerja.
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebenarnya sudah difasilitasi dengan aplikasi manajemen kinerja untuk pelaporan progres, yang jika dioptimalkan, akan sangat membantu penyediaan data LKJIP secara real-time dan akurat

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Pada dokumen laporan kinerja, analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja tidak disampaikan secara lengkap dan kurang mendalam. Kebanyakan laporan justru hanya berisi penjelasan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
2. Satuan pada beberapa indikator kinerja belum dirumuskan dengan jelas, dan banyak indikator belum mendefinisikan sumber datanya dengan pasti. Hal ini menyulitkan evaluasi dan menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menghitung capaian kinerja yang akan dilaporkan
3. Pengukuran kinerja secara periodik dan berjenjang belum dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat Daerah yang tidak melaporkan progres capaian kinerja triwulanan pada aplikasi manajemen kinerja, sehingga menyulitkan rekapitulasi data historis untuk penyusunan LKJIP tahunan. dokumen laporan kinerja dengan menyampaikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara detail. Analisis ini krusial untuk dijadikan dasar merumuskan solusi atau mempertahankan strategi guna meningkatkan capaian kinerja di masa depan.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya akan melakukan penyempurnaan teknis dan peningkatan

komitmen yang lebih mendalam pada beberapa aspek. Sebagai langkah strategis menuju predikat yang lebih tinggi, pemerintah daerah mewajibkan setiap dokumen pelaporan untuk menyertakan informasi benchmarking terhadap indikator capaian kinerja tertentu. Dengan membandingkan capaian daerah terhadap level nasional, provinsi, maupun daerah sekitar, diharapkan tercipta gambaran keberhasilan pembangunan yang lebih objektif dan kompetitif sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Dalam upaya memperkuat validitas pelaporan, dilakukan pula pembenahan pada aspek administrasi kinerja dengan memperjelas satuan ukur pada seluruh indikator agar lebih spesifik dan konsisten di setiap jenjang. Seluruh indikator kinerja kini wajib dilengkapi dengan definisi sumber data yang jelas serta mekanisme pengumpulan data yang terstandarisasi untuk menjamin akuntabilitas informasi yang disajikan. Lebih jauh lagi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menekankan peningkatan komitmen berjenjang, mulai dari kepala perangkat daerah hingga level staf, untuk melaksanakan pengukuran kinerja periodik secara disiplin. Melalui pendekatan ini, identifikasi terhadap kendala dan hambatan pembangunan dilakukan secara real-time di setiap periode berjalan, bukan sekadar menjadi evaluasi di akhir tahun, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran demi peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kotabaru

Kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah adalah kegiatan Penataan Organisasi pada tahun 2025 mempunyai anggaran sebesar Rp1.063.511.660,00 dengan Realisasi Rp907.233.114,00 atau 85,31% dengan tingkat efisiensi sebesar 117,30 %

Faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terintegrasi dengan sasaran strategis.
b. Meningkatnya konsistensi dalam pelaporan kinerja secara periodik.
c. Koordinasi antarperangkat daerah mulai membaik dalam mendukung pencapaian sasaran SAKIP.

Dalam mendukung program tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

a. Melaksanakan Melaksanakan koordinasi ke SKPD dan kecamatan terkait monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja SKPD dan kecamatan






b. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Kecamatan Kabupaten Kotabaru




c. Melaksanakan FGD dalam penyusunan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah untuk OPD dan kecamatan



d. Melaksanakan rapat koordinasi dan persamaan persepsi



e. Evaluasi SAKIP bersama dengan MenPANRB yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD





f. Melaksanakan asistensi penyusunan LKjIP





g. Melaksanakan evaluasi LkjIP bersama dengan Inspektorat



h. Melaksanakan koordinasi LKjIP dengan Biro Organisasi Prov Kalsel







i. Melaksanakan asistensi tindak lanjut evaluasi SAKIP TW2 bersama MenPANRB





Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 4.312.948.250 dengan

realisasi sebesar Rp. 4.102.292.983, atau tingkat serapan keuangan sebesar 95.12%. Dari sisi kinerja, capaian indikator menunjukkan hasil sangat baik, yaitu:

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (Target 100%, Realisasi 100%).
b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Target 100%, Realisasi 100%).
c. Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target (Target 65%, Realisasi 83,33%, capaian kinerja 128%).

Realisasi indikator prioritas pembangunan yang melampaui target menunjukkan efektivitas proses pengendalian dan evaluasi pembangunan. Konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan juga tercapai secara penuh, yang mencerminkan tata kelola perencanaan yang sistematis dan terintegrasi.

FOTO	PENJELASAN
ASISTENSI SAKIP KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 	Kotabaru, Sabtu 30 Agustus 2025 melalui Bapperida Kabupaten Kotabaru melaksanakan tindak lanjut Perbaikan SAKIP yaitu Asistensi SAKIP Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 antara seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru dengan Asesor dari Kementerian PAN & RB melalui Zoom Meeting di Kantor masing-masing. Acara dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kotabaru dan menyampaikan agar seluruh Perangkat Daerah berkomitmen dalam Upaya peningkatan Nilai SAKIP di Kabuaten Kotabaru. Pelaksanaan Asistensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kabupaten Kotabaru dan menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting dibagi menjadi 3 kelas dan didampingi Kemenpan RB dengan melakukan perbaikan isi Pohon Kinerja berserta indikatornya SKPD dalam aplikasi E-Sakip Pro, Kemenpan RB membantu perbaikan indicator kinerja lebih spesifik, terukur dan relevan dengan visi Pembangunan daerah. Asistensi mencakup peninjauan ulang terhadap tujuan, sasaran

FOTO	PENJELASAN
	strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
Rapat Penyelarasan Renstra dan E-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 	Selasa, 02 September 2025, diselenggarakan Rapat Penyelarasan Renstra dan E-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru di Ruang Rapat Zona Kolaborasi Lt. 3 Bapperida Kabupaten Kotabaru. Rapat Penyelarasan Renstra dan e-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru di buka oleh Kepala Bapperida yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bersama Tim Sakip dari Bapperida Kabupaten Kotabaru yang mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah kabupaten kotabaru berkomitmen untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi perbaikan dari Tim Kemenpan RB. Dalam rangka menindaklanjuti hasil asistensi SAKIP dengan Kemenpan RB maka dilakukan rapat yang didampingi oleh Tim Pengembangan aplikasi e-Sakip Pro yang dipimpin oleh Bapak Andi Erwing dari Pusbangsim melelui Zoom Meeting. Rapat dilaksanakan menyelaraskan hasil inputan dalam aplikasi e-Sakip Pro dengan Renstra yang berfokus pada teknis apliaksi e-Sakip Pro mulai dari memperbaiki POhon Kinerja, memperbaiki indicator kinerja disertai target Triwulan (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan), Tagging Perangkat Daerah dan Kabupaten, Perjanjian Kinerja hingga Renaksi.
Rapat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 dilaksanakan Selasa, 06 Mei 2025, pukul 09.00 Wita,

FOTO	PENJELASAN
 	bertempat Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru Lt. III. Peserta kegiatan yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, Unsur Vertikal di Kabupaten Kotabaru. Hasil yang di capai yaitu yang tercantum dalam berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029.  BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025-2029 Pada hari Selasa Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru, telah diselenggarakan Musrenbang RPJMD Kabupaten yang dihadiri oleh perangkat kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah mendengarkan, mempelajari dan mempertimbangkan : • Sambutan-sambutan dengan materi yang disampaikan oleh para Pembicara dan Narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029; • Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber sebagaimana telah dirangkum, maka pada: Hari, Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025 Jam : 09.00 WITA Tempat : Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru , Sebelimbingan Seluruh peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru MENYEPAKATI KESATU : rancangan Visi dan Misi jangka menengah daerah, dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini. KEDUA : rancangan program prioritas dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini. KETIGA : Perbaikan Rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. KEEMPAT : Hasil dari Musrenbang RPJMD Kabupaten ini sebagai bahan penentapan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kotabaru, 06 Mei 2025 Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pimpinan sidang musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru H. ERA SAPRUDIN, AP., M.AP Berita Acara Musrenbang Hal - 1 - dari 3
Rapat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dilaksanakan Kamis, 17 April 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru Lt. III.

FOTO	PENJELASAN
  	Peserta kegiatan yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, Unsur Vertikal di Kabupaten Kotabaru. Hasil yang di capai yaitu yang tercantum dalam berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025. 

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2025

Pada hari Kamis Tanggal 17 Bulan April Tahun 2025 bertempat di Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru, telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

- Sambutan-sambutan dengan materi yang disampaikan oleh para Pembicara dan Narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025,
- Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber sebagaimana telah diuraikan, maka pada:
  Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
  Jam : 09.00 WITA
  Tempat : Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru , Sebelimbingan

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru

MENYEPAKATI

KESATU : Perbaikan Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEDUA : Hasil dari Musrenbang RKPD Kabupaten ini sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, 17 April 2025

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru
selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD
Kabupaten Kotabaru

HUSKA SAHRUDIN, AP, M.AP

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 4.621.723.850 dengan realisasi sebesar Rp. 3.851.333.004, atau tingkat serapan keuangan sebesar 83.33%. Dari sisi kinerja, capaian indikator menunjukkan hasil baik, yaitu:

a. Keselarasan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan (Target 100%, Realisasi 100%).
b. Keselarasan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (Target 100%, Realisasi 100%)..
c. Keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Target 100%, Realisasi 100%)..

Capaian ini menunjukkan bahwa proses koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan optimal. Meskipun tingkat serapan anggaran relatif moderat, substansi keselarasan dokumen tetap tercapai sepenuhnya sehingga mendukung integrasi perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

FOTO	PENJELASAN
Rapat Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 	Pelaksanaan Rapat Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstr) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada Jum'at, 12 September 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru. Tujuan Rapat Adalah untuk memastikan kualitas keselarasan dan kepatuhan Dokumen Renstra Perangkat Daerah terhadap kaidah perencanaan yang berlaku sebelum memasuki tahapan penetapan akhir Renstra Perangkat Daerah.
Rapat Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 	Pelaksanaan Rapat Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 05 Agustus 2025, pukul 08.30 Wita, bertempat di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru. Tujuan Rapat adalah untuk memastikan kualitas keselarasan, kepatuhan sesuai Sistematika Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah terhadap dokumen RKPD, Renstra serta sesuai kaidah perencanaan yang berlaku sebelum

FOTO	PENJELASAN
	memasuki tahapan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Sasaran 22: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemeritah Daerah

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Dimana setiap program dan kegiatan dari instansi penyelenggara Pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan hasil kepada Masyarakat, hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Untuk mengukur keberhasilan dan sejauh mana capaian terhadap sasaran tersebut disusunlah **Indikator Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Tabel II.43
Capaian Opini BPK Kab.Kotabaru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian Realisasi 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian		
Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	100*	WTP	100*

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP berhasil dicapai Pemerintah Kotabaru selama 8 (Delapan) tahun berturut-turut dari tahun 2016-2023 Sedangkan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kotabaru tahun anggaran 2023 masih dalam proses audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dapat diketahui hasilnya pada bulan Mei pada tahun anggaran berikutnya.

Bila dibandingkan dengan target WTP maka pencapaian dari Opini BPK sebesar 100%. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian terhadap indikator Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2016,

tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dapat digambarkan melalui trend pencapaian terhadap Ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Opini BPK tahun 2025 terealisasi WTP* apabila dibandingkan dengan target WTP sehingga capaiannya sebesar 100% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi***

Pada tahun 2025, Opini BPK realisasinya WTP dan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Opini BPK tahun 2025 terealisasi WTP apabila dibandingkan dengan target RPJMD yaitu WTP sehingga capaian sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan target WTP maka pencapaian dari Opini BPK sebesar 100%. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian terhadap indikator Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 sampai dengan 2025 mendapatkan predikat WTP secara terus menerus. Faktor Pendorong dalam capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Adanya kemauan kuat dari Bupati dan jajaran kepala SKPD untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
2. Penggunaan sistem terintegrasi yang meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat konsolidasi data
3. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan review laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK, sehingga temuan-temuan kecil dapat diperbaiki lebih awal.
4. Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Mengadakan workshop berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Kecepatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya

2. Penyesuaian terhadap aturan baru dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri yang terkadang membutuhkan waktu adaptasi teknis di lapangan

Tabel.33
Opini BPK RI Perwakilan Kalsel T.A 2015-2025*
Kabupaten Kotabaru

NO.	TAHUN	NO. SURAT	OPINI BPK
1	2015	04.B/LHP/XIX.BJM/05/2017	WTP
2	2016	04.B/LHP/XIX.BJM/05/2017	WTP
3	2017	3.b/S-LHP/XIX.BJM/05/2018	WTP
4	2018	14.b/S-LHP/XIX.BJM/05/2019	WTP
5	2019	9.b/ S-LHP/XIX.BJM/06/2020	WTP
6	2020	6b/S-LHP/XIX.BJM/05/2021	WTP
7	2021	6.B/LHP/XIX.BJM/05/2022	WTP
8	2022	11.B/LHP/XIX.BJM/05/2023	WTP
9	2023	6.b/ S-LHP/XIX.BJM/05/2024	WTP
10	2024	10.B/LHP/XIX.BJM/05/2025	WTP
11	2025	*(data resmi belum diterbitkan)*	WTP*

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, Kabupaten Kotabaru kembali meraih predikat WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 10.B/LHP/XIX.BJM/05/2025. Capaian ini menjadi landasan kuat bagi penyusunan LKjIP Tahun 2025, di mana pemerintah daerah memproyeksikan keberlanjutan predikat WTP (WTP*) melalui penguatan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu. Konsistensi perolehan opini WTP selama sebelas tahun terakhir ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat

Bila dibandingkan dengan target WTP maka pencapaian dari Opini BPK sebesar 100%. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian terhadap indikator Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 sampai dengan 2025 mendapatkan predikat WTP secara terus menerus. Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mempertahankan predikat WTP, yaitu:

1. Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
2. Mengadakan workshop berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.
3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD fungsi akuntansi dan pelaporan terkait data penerimaan kas dan pengeluaran kas.
4. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
5. Mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Pemda Kabupaten Kotabaru dan input saldo awal Laporan Keuangan.
6. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru.
7. Melaksanakan input saldo awal Laporan Keuangan SKPD Tahun ini dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan.
8. Melaksanakan pembinaan terhadap BLUD.

Berikut ini Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD untuk mendukung indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan keuangan yang mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah meliputi:

   1. Koordinasi dan kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

      Kegiatan Koordinasi dan kegiatan penyusunan rencana anggaran daerah merupakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan keuangan, kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan keuangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan keuangan telah berhasil mencapai target kinerja secara sempurna, yang dibuktikan dengan indikator persentase RAPBD tepat waktu yang mencapai realisasi **100%** (100 dari target 100). Keberhasilan kinerja fisik ini didukung oleh pengelolaan anggaran yang sangat efisien, di mana dari total pagu sebesar Rp 6.296.531.300,-, realisasi belanja hanya terserap sebesar Rp 4.175.234.230,- atau sekitar 66,31%. Dengan terpenuhinya seluruh target kinerja menggunakan biaya yang lebih rendah dari anggaran yang disediakan, organisasi ini mencatatkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, yakni sebesar 150,80%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS

   Koordinasi penyusunan KUA-PPAS adalah tahap penting untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah selaras dengan kemampuan fiskal, sebelum masuk ke tahap penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD.

Indikator Kegiatan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Target	2 Kali Kegiatan Koordinasi (2 Dokumen)
Realisasi	2 Kegiatan Koordinasi (2 Dokumen)
Pagu Kegiatan	Rp.395.834.400,-
Realisasi Keuangan	Rp. 238.503.846,00,- (60,25%)
Realisasi Kinerja	100%



2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Proses penyelarasan antara perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dan selama penyusunan RKA, dan verifikasi RKA untuk memastikan kesesuaian dengan plafon PPAS, konsistensi dengan RKPD, Ketepatan kode rekening, Kewajaran volume dan harga satuan dan Kesesuaian indikator kinerja.

Indikator Kegiatan	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
Target	51 Dokumen
Realisasi	51 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.123.404.500,00
Realisasi Keuangan	Rp.102.488.275,00 (83,05%)
Realisasi Kinerja	100%



3) Kegiatan Koordinasi DPA SKPD

Kegiatan koordinasi DPA SKPD adalah aktivitas rapat koordinasi antar SKPD untuk membahas dan menyelaraskan pelaksanaan DPA SKPD Agar pelaksanaan anggaran sesuai aturan, menghindari kesalahan administrasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai target.

Indikator Kegiatan	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi
Target	51 Dokumen
Realisasi	51 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.85.925.000,00
Realisasi Keuangan	Rp.75.688.500,00 (88,08%)
Realisasi Kinerja	100%



4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan proses pelaksanaan mulai perencanaan bulan Januari sampai dengan bulan Desember penetapan APBD tahun berikutnya dilaksanakan agar anggaran daerah sesuai aturan perundang-undangan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, menyelaraskan program daerah dengan kemampuan keuangan dan menghindari kesalahan administrasi dan hokum

Indikator Kegiatan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Target	2 Dokumen
Realisasi	2 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.1.678.576.500,00
Realisasi Keuangan	Rp.1.366.277.863,00 (81,39 %)

Realisasi Kinerja	100%



2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan arus kas keuangan daerah agar penerimaan dan pengeluaran APBD berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan.

Sasaran strategis untuk Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan Daerah telah mencapai target kinerja secara optimal dengan realisasi indikator 100%, di mana layanan yang terlayani dengan baik atau sesuai ketentuan mencapai angka 100 dari target 100. Dari sisi keuangan, program ini didukung oleh pagu sebesar Rp 3.410.499.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.166.700.636,- atau setara dengan 63,53%. Keberhasilan dalam memenuhi seluruh target kinerja fisik dengan penggunaan anggaran yang hanya sekitar dua pertiga dari pagu menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat signifikan, yakni sebesar 157,41%.

1) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten



2) Mempersiapkan Pelayanan Penatausahaan Keuangan Secara Digital



3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan laporan keuangan daerah telah menunjukkan performa yang optimal dengan tercapainya seluruh target fisik secara sempurna. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan Daerah" berhasil mencapai capaian kinerja 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 63,53% dari pagu Rp 3.410.499.000,-. Secara paralel, sasaran "Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah" juga

mencatatkan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran yang sama, yakni sebesar Rp 2.166.700.636,-, namun dengan angka penyerapan yang tertulis sebesar 60,70%. Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua indikator ini mencatatkan tingkat efisiensi yang identik tinggi sebesar 157,41%, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output layanan dan pelaporan berkualitas tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

1) Kegiatan Pengadaan Cetak Buku Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



2) Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2025



3) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2025



4) Melaksanakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah program pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh aset/barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar tertib administrasi, aman secara hukum, dan optimal pemanfaatannya.

kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja 96,83% meskipun dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2025 mengalami efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah mampu melaksanakan kegiatan dengan kategori sangat baik dengan tingkat efisiensi mencapai 138,86%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

a. Melaksanakan Workshop Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ASN Penatausahaan Aset Daerah



b. Melakukan Inovasi Penatausahaan Aset Secara Digital



Hambatan dalam mempertahankan predikat WTP, diantaranya:

1. Tidak hadirnya SKPD tepat waktu dengan jadwal pelaksanaan koordinasi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bahan rekonsiliasi.
2. Kurangnya pemahaman SKPD dalam melakukan rekonsiliasi antar SPJ yang diiinput pada SIMDA Keuangan dengan BKU manual sehingga sering terjadi selisih, bahkan salah akun dan kode rekening.
3. Kurangnya pemahaman SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai akun dan rekening.
4. Kesalahan pengentryan Belanja ke Dalam Aplikasi Simda Keuangan, penyesuaian terhadap kesalahan input rekening pendapatan dan belanja.

5. Kurangnya pemahaman SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai akun dan rekening.
6. Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemecahan masalah terhadap kendala/hambatan yang terjadi diantaranya:

1. Perlunya ketepatan waktu dan kedisiplinan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam input data ke Simda Keuangan.
2. Pentingnya dilaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan input data sudah benar, sebagai bahan penyampaian LRA bulanan.
3. Pentingya rekonsiliasi agar tidak terjadi selisih antara BKU manual, SIMDA FMIS dan SPJ Fungsional yang ada di SKPD.
4. Rekonsiliasi pemahaman SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai akun dan rekening.
5. Rekonsiliasi antara LRA, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan SKPD dengan data yang disampaikan ke BPKAD Akuntansi dan Pelaporan.
6. Rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang.
7. Pentingnya rekonsiliasi agar tidak terjadi selisih antara saldo awal dengan Laporan Keuangan SKPD LRA, Neraca, LOP dan LPE.
8. Pentingya pembinaan untuk meminimalisir kesalahan.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Opini BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Target WTP adalah sebagai berikut:

1. Keaktifan para Bendahara SKPD dalam proses input data dan rekonsiliasi data.
2. Peran Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan dalam proses pengendalian dan pengawasan realisasi sub kegiatan.
3. Membuat surat edaran terkait asistensi penyusunan laporan keuangan.
4. Membuat surat permintaan data bahan neraca sebagai data awal penyusunan kertas kerja laporan keuangan.

5. Melaksanakan pembinaan akuntansi ke pelaksana fungsi akuntansi dan pelaporan SKPD.

Setelah hasil audit BPK RI tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Segera menindaklanjuti hasil temuan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
2. Meminimalisir temuan, baik berupa Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana aksi yang dilakukan di tahun selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengefektifkan tugas PPK SKPD.
2. Mengoptimalkan fungsi akuntansi dan pelaporan pada SKPD agar perbaikan dan koreksi yang diberikan Tim BPK RI dapat segera dilakukan penyesuaian.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja (Setelah Perubahan)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025
(Setelah Perubahan)

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**IPM=(Indeks UHH+Indeks Pendidikan +Indeks Pengeluaran)/3**	**72,8**
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	RLS=Total tahun sekolah penduduk usia ≥ 25 tahun/Jumlah penduduk usia ≥ 25 tahun	7,6 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	HLS = Σ (Angka Partisipasi Sekolah menurut umur × lama waktu pada jenjang pendidikan tertentu)	12,2 Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	UHH = Σ (Lx / l0) Lx = jumlah tahun yang dijalani oleh suatu kelompok umur tertentu. l0 = jumlah bayi yang lahir hidup	74 Tahun
		Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting = (Jumlah balita stunting / Jumlah balita yang diukur) × 100% Balita stunting: balita dengan nilai Z-score TB/U < -2 SD. Jumlah balita yang diukur: seluruh balita yang datanya tersedia pada survei.	22,6 %
3	Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	IPK-Keluarga = ((Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) / 3) × 100 - Indeks Ketentraman = (Σ skor indikator ketentraman) / (jumlah indikator ketentraman) - Indeks Kemandirian = (Σ skor indikator kemandirian) / (jumlah indikator kemandirian) - Indeks Kebahagiaan = (Σ skor indikator kebahagiaan) / (jumlah indikator kebahagiaan)	42,99

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Ketimpangan Gender	IKG = 1 - GII atau dalam beberapa literatur dinyatakan langsung sebagai Gender Inequality Index (GII) dengan rentang 0 – 1, dimana semakin tinggi nilainya berarti ketimpangan gender semakin besar.	0,52
B	**Terwujudnya penguatan daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**LPE=((PDRBt−PDRBt−1)/ PDRBt−1)×100%** **PDRBt = nilai PDRB riil pada tahun t** **PDRBt−1 = nilai PDRB riil pada tahun sebelumnya**	**5,35 %**
		Laju Inflasi	**Inflasi=((IHKt−IHKt−1)/IHKt−1)×100%** **IHKt = Indeks Harga Konsumen pada periode t** **IHKt−1 = Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya**	**3,50 %**
		Angka PDRB Perkapita	**PDRB Per Kapita=PDRB Atas Dasar Harga Berlaku / Jumlah Penduduk** **Jika ingin ditampilkan dalam Rp Juta, maka hasil pembagian dibagi 1.000.000 (untuk mengkonversi rupiah ke juta rupiah)**	**111,10 (Rp Juta)**
4	Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Pertanian=((PDRB Pertanian,t−PDRB Pertanian,t−1) / PDRB Pertanian,t−1) × 100%	3,23 %
		Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Industri= ((PDRB Industri,t −PDRB Industri,t−1) / PDRB Industri,t−1) × 100%	4,14 %
		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan PDRB Perdagangan = ((PDRB Perdagangan,t−PDRB Perdagangan,t−1) / PDRB Perdagangan,t−1) x 100%	5,40 %
		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	Pertumbuhan PDRB Akomodasi = ((PDRB Akomodasi,t−PDRB Akomodasi,t−1)/ PDRB Akomodasi,t−1) x 100%	9,25 %
5	Menurunya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT= (Jumlah Penganggur/ Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	6,02 %
6	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan	Pertumbuhan Investasi Daerah = ((Investasi −Investasi−1) / Investasit−1) ×100%	5,10 %

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Investasi Daerah		
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan=(Jumlah Penduduk Miskin /Jumlah Penduduk) ×100%	4,23 %
		Rasio Gini	Gini=1−2×Luas(Kurva Lorenz) $Gini - 1 - \sum_{i-1}^{n}(Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$	0,290
C	**Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi birokrasi**	**Indeks**	**72.00 (BB)**
8	Meningkatnya pelayanan kualitas publik	Indeks pelayanan publik	IPP= Skor Total / Jumlah Indikator Indikator: terdiri dari aspek input, proses, output, outcome pelayanan publik. Setiap indikator diberi skor (misalnya 1–4 atau 1–5). Hasil IPP biasanya dinyatakan dalam skala 0 – 100. Nilai IPP lebih tinggi → kualitas pelayanan publik semakin baik.	2,85
9	Meningkatnya digitalisasi tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	$Nilai\ Domain = \frac{\sum_{j=1}^{m} Nilai\ Indikator_j}{m}$ Indeks SPBE diperoleh dari rata-rata nilai domain, di mana setiap domain merupakan rata-rata dari indikator yang ada di dalamnya. Domain → kumpulan aspek besar (misalnya: Kebijakan Internal, Tata Kelola, Manajemen SPBE, Layanan SPBE). Indikator → terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dinilai (skala 0 – 5).	2,60
		Indeks Pemerintah Digital	IPD= (Nilai Dimensi 1 +Nilai Dimensi 2 +⋯+Nilai Dimensi n) /n $Nilai\ Dimensi = \frac{\sum_{j=1}^{m} Nilai\ Indikator_j}{m}$	0
10	Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP=(30%×Skor Perencanaan)+ (25%×Skor Pengukuran)+(15%× Skor Pelaporan)+(10%×Skor Evaluasi)+ (20%×Skor Capaian)	63 (B)
		Opini BPK	Predikat	WTP
11	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	Indeks Sistem Merit	$Indeks\ Sistem\ Merit = \frac{\sum_{i=1}^{n} Skor\ Aspek_n}{n}$ Skor Aspek$_i$ = nilai dari masing-masing aspek yang dinilai. n = jumlah aspek penilaian.	0.4

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D	**Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata**	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**	$Indeks\ Infrastruktur = \frac{\sum_{i=1}^{n} Indikator_i}{n}$ **Indikator$_i$ = nilai setiap indikator infrastruktur (misalnya jalan, listrik, air bersih, internet, transportasi, dll.) n = jumlah indikator yang dinilai**	**3,00**
		Indeks Desa	**IDM=(IKS+IKE+IKL) / 3**	**75,00**
12	Meningkatnya sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur dasar	$IID = \frac{\sum_{i=1}^{n} Indikator_i}{n}$ jika indikator memiliki bobot berbeda : $IID = \sum_{i=1}^{n} (Bobot_i \times Nilai\ Indikator_i)$	0,40
13	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	IDM=(IKS+IKE+IKL) / 3	18,20 %
E	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)** $\frac{IE_{t0} - IE_t}{IE_{t0}} \times 100\%$	**1,92**
		Indeks Risiko Bencana	**IRB= (Hazard×Vulnerability) / Capacity** **Hazard (H) = Tingkat bahaya atau ancaman bencana (misalnya gempa bumi, banjir, longsor, tsunami).** **Vulnerability (V) = Tingkat kerentanan masyarakat, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan.** **Capacity (C) = Tingkat kapasitas atau kemampuan suatu wilayah dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana.**	**150**
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH= (IKU+IKA+IKT) / 3	75,72
15	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	IKD= $\frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Nilai Prioritas}_i}{n}$	0,50

Tabel II.2
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
(Setelah Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**72,8**	**73,03**	**100,31%**	**Sangat Tinggi**
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,6 Tahun	7,71	101,44%	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2 Tahun	12,23	100,24%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74 Tahun	74,03	100,04%	Sangat Tinggi
		Prevalensi Stunting	%	22,6	23,2	97,34%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	42,99	64,23	149,40%	Sangat Tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,52	0,554	93,46%	Sangat Tinggi
B	**Terwujudnya penguatan daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,35 %**	**5,34**	**99,81%**	**Sangat Tinggi**
		Laju Inflasi	**%**	**3,50 %**	**3,03**	**113,42%**	**Sangat Tinggi**
		Angka PDRB Perkapita	**Rp Juta**	**111,10 (Rp Juta)**	**115,04 (Rp Juta)**	**103,54%**	**Sangat Tinggi**
4	Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian,	%	3,23 %	4,94	152,94 %	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Kehutanan, dan Perikanan					
		Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	4,14 %	7,52	181,64 %	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,40 %	7,29	135%	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	%	9,25 %	11,68	126,27%	Sangat Tinggi
5	Menurunya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,02 %	5,93	101,49%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	5,10 %	-29,43%	-577,06%	Sangat Rendah
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,23 %	4,39	96,21%	Sangat Tinggi
		Rasio Gini	Rasio	0,290	0,275	105,17%	Sangat Tinggi
C	**Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi birokrasi**	**Indeks**	**72.00 (BB)**	**76,22 (BB)**	**105,86%**	**Sangat Tinggi**
8	Meningkatnya pelayanan kualitas publik	Indeks pelayanan publik	Indeks	2,85	3,36	117,89%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9	Meningkatnya digitalisasi tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Indeks	2,60	2,43	93,46%	Sangat Tinggi
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0	0**	0%	Sangat Rendah
10	Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintah	Nilai SAKIP	Predikat	63 (B)	64,80 (B)	102,85%	Sangat Tinggi
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP*	100%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.4	0**	0%	Sangat Rendah
D	**Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata**	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**	**Indeks**	**3,00**	3,02	100,66%	Sangat Tinggi
		Indeks Desa	**Skor**	**75,00**	73,95	98,6%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur dasar	Indeks	0,40	0,40*	100%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	%	18,20	22,44	123,30%	Sangat Tinggi
E	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**%**	**1,92**	**0,004**	**0,20%**	Sangat Rendah
		Indeks Risiko Bencana	**Angka**	**150**	**108,02**	**127,98%**	**Sangat Tinggi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,1	80,22	105,41%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,50	0,50	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026.

Tabel II.3
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.
(Setelah Perubahan)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2024	2025		
1	2	3	4	5	6	10	11
A	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**70,61**	**73,03**	**2,42 poin**	
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,56	7,71	0,15 poin	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,08	12,23	0,15 poin	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,88	74,03	0,15 poin	
		Prevalensi Stunting	%	23,2	23,2	-	-
3	Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	61,43	64,23	2,80 poin	
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,551	0,554	-	0,003 poin
B	**Terwujudnya penguatan daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,30**	**5,34**	**4 poin**	**-**
		Laju Inflasi	**%**	**0,26**	**3,03**		**2,77 poin**
		Angka PDRB Perkapita	**Rp Juta**	**108,03**	**115,04**	**7,01 poin**	**-**
4	Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,22	4,94	1,72 poin	-
		Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	4,13	7,52	3,39 poin	-
		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,31	7,29	1,98 poin	-
		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan	%	9,24	11,68	2,44 poin	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2024	2025		
1	2	3	4	5	6	10	11
		Akomodasi dan Makanan Minum					
5	Menurunya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05	5,93	0,12 poin	
6	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	3,68	-29,43%		25,75 poin
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,45	4,39	0,06 poin	
		Rasio Gini	Rasio	0,296	0,275	0,021 poin	
C	**Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi birokrasi**	**Indeks**	**B (69,39)**	**76,22 (BB)**	**6,83 poin**	
8	Meningkatnya pelayanan kualitas publik	Indeks pelayanan publik	Indeks	2,55	3,36	0,81 poin	
9	Meningkatnya digitalisasi tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Indeks	2,43	2,43	-	-
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0	0**	-	-
10	Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintah	Nilai SAKIP	Predikat	61,78 (B)	64,80 (B)	3,02 poin	
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP*	WTP*	
11	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	0**	-	-
D	**Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata**	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**	**Indeks**	**2,99**	3,02	**0,03 poin**	**-**
		Indeks Desa	**Skor**	**-**	73,95	**73,95**	
12	Meningkatnya sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur dasar	Indeks	-	0,40*	0,40 poin	-
13	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	%	18,18	22,44	4,26 poin	-
E	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**%**	**-**	**1,92***	**0,004**	
		Indeks Risiko Bencana	**Angka**	**152,79**	**108,02**	**44,77 poin**	**-**
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,09	80,22	4,13 poin	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		REALISASI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR	REALISASI MENGALAAMI PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR
				2024	2025		
1	2	3	4	5	6	10	11
15	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,50	0,50	-	-

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.4
Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah
(Setelah Perubahan)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
A	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**75**	**73,03**	**97,37%**
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,9	7,71	86,62%
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	12,23	92,37%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,13	74,03	98,53%
		Prevalensi Stunting	%	16,63	23,2	60,49%
3	Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	52,24	64,23	122,95%
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,46	0,554	79,56%
B	**Terwujudnya penguatan daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,90**	**5,34**	**90,50%**
		Laju Inflasi	**%**	**3,10**	**3,03**	**102,25%**
		Angka PDRB Perkapita	**Rp Juta**	**145,00**	**115,04**	**79,34%**
4	Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,32	4,94	148,79%
		Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	4,18	7,52	179,90%
		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,85	7,29	124,61%
		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	%	9,29	11,68	125,72%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
5	Menurunya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,25	5,93	87,04%
6	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	5,75	-29,43%	-511,82%
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	3,50	4,39	74,57%
		Rasio Gini	Rasio	0,250	0,275	90%
C	**Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi birokrasi**	**Indeks**	**A (82.00)**	**76,22 (BB)**	**92,95%**
8	Meningkatnya pelayanan kualitas publik	Indeks pelayanan publik	Indeks	3,40	3,36	98,82%
9	Meningkatnya digitalisasi tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Indeks	0	2,43	0%
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1,50	0**	0%
10	Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintah	Nilai SAKIP	Predikat	72 (BB)	64,80 (B)	90%
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP*	WTP*
11	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.48	0**	0%
D	**Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata**	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**	**Indeks**	**3,40**	**3,02**	**88,82%**
		Indeks Desa	**Skor**	**79,00**	73,95	**93,60**
12	Meningkatnya sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur dasar	Indeks	0,48	0,40*	83,33%
13	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	%	36,36	22,44	61,71%
E	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**%**	**1,52**	**0,004**	**0,26%**
		Indeks Risiko Bencana	**Angka**	**142**	**108,02**	**123,92%**
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,73	80,22	104,54%
15	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,58	0,50	86,20%

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel II.5
Faktor- Faktor Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja Serta Tindak Lanjut Yang Dilakukan (Setelah Perubahan)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	❖ Kenaikan ini didorong oleh membaiknya standar hidup layak yang dipengaruhi oleh sektor komoditas unggulan di Kotabaru ❖ Adanya perbaikan pada akses pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan kesehatan (Usia Harapan Hidup) yang mulai terakumulasi hasilnya pada angka IPM di tahun-tahun terakhir.	❖ Luasnya wilayah yang terfragmentasi oleh laut membuat distribusi tenaga pengajar dan medis tidak merata, sehingga menghambat capaian pendidikan dan kesehatan di pelosok. ❖ Terdapat jarak (*gap*) yang cukup lebar antara Kotabaru (73,03) dengan rata-rata Nasional (75,9) di tahun 2025, menunjukkan bahwa kecepatan akselerasi masih perlu ditingkatkan.	❖ Memperkuat jaringan internet di pulau-pulau terpencil agar akses modul pendidikan setara dengan di pusat kota. ❖ Mengoptimalkan layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah pesisir/kepulauan secara rutin. ❖ Mengembangkan industri pengolahan hasil laut dan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang stabil. ❖ Pembangunan jembatan atau dermaga yang lebih modern untuk menurunkan biaya logistik dan mempermudah akses ke fasilitas pelayanan publik
Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	**Rata-Rata Lama Sekolah**	❖ Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi dan etos kerja yang mendukung produktivitas sektor pendidikan. ❖ Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang efektif dalam mengelola sumber daya serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. ❖ Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan modern.	❖ -	❖ Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat guna memastikan tidak ada warga yang terhambat dalam menempuh pendidikan. ❖ Memperkuat implementasi program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas. ❖ Mengoptimalkan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C sebagai solusi bagi penduduk dewasa yang

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Optimalisasi kinerja pelayanan publik dalam memberikan layanan administrasi dan pendukung pendidikan yang cepat serta responsif. ❖ Adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui kebijakan pendidikan yang strategis dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.		belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. ❖ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan serta memperbarui metode pembelajaran agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. ❖ Menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat, dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. ❖ Melakukan kampanye sosialisasi secara masif mengenai pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. ❖ Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap capaian angka rata-rata lama sekolah untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan secara dini.
	Harapan Lama Sekolah	❖ Terjaminnya ketersediaan dan sebaran satuan pendidikan yang merata di seluruh wilayah guna mempermudah akses siswa pada setiap jenjang. ❖ Adanya kebijakan yang meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk menjaga keberlanjutan sekolah. ❖ Distribusi guru yang proporsional serta peningkatan kualitas kompetensi pendidik secara berkelanjutan. ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan	❖ -	❖ Melakukan perluasan akses pendidikan di semua jenjang, terutama di wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah rendah. ❖ Mengawal implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun secara ketat melalui pemantauan berbasis kewilayahan. ❖ Mengoptimalkan peran pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat. ❖ Menggencarkan sosialisasi kepada orang tua mengenai urgensi pendidikan demi memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		mendukung terciptanya ekosistem belajar yang kondusif. ❖ Manajemen pendidikan yang transparan berbasis data yang akurat guna pengambilan keputusan yang tepat sasaran. ❖ Dukungan kebijakan daerah melalui RPJMD dan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. ❖ Efektivitas intervensi sosial dan pendampingan khusus bagi siswa yang berisiko tinggi putus sekolah. ❖ Tingginya kesadaran serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung wajib belajar. ❖ Kondisi ekonomi makro dan PAD yang stabil yang memungkinkan alokasi anggaran pendidikan yang lebih kuat. ❖ Aksesibilitas pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.		❖ Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan kompetensi guru yang berbasis pada teknologi dan metode terkini. ❖ Memperluas cakupan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa dari keluarga rentan. ❖ Memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga sosial dalam mendeteksi dan menangani anak tidak sekolah (ATS). ❖ Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian HLS secara berkala untuk memetakan kendala lapangan secara tepat.
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Usia Harapan Hidup**	❖ Perluasan jangkauan Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Posyandu) di wilayah kepulauan dan pedalaman Kotabaru ❖ Penurunan angka stunting secara konsisten berkontribusi langsung pada kualitas kesehatan balita yang menjadi fondasi angka harapan hidup. ❖ Peningkatan jumlah penduduk yang ter-cover BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi ragu berobat karena kendala biaya.	❖ Karakteristik wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau (kepulauan) menyulitkan distribusi tenaga medis spesialis dan kecepatan penanganan darurat (emergency response). ❖ Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat lokal.	❖ Memberikan skema tunjangan khusus atau beasiswa ikatan dinas bagi dokter spesialis agar bersedia menetap dan bertugas di Kotabaru. ❖ Optimalisasi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk memantau riwayat kesehatan penduduk secara real-time (sinkronisasi dengan SatuSehat). ❖ Edukasi berbasis komunitas yang fokus pada kearifan lokal untuk mengubah pola

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Peningkatan akses terhadap air minum layak dan sanitasi lingkungan yang menekan angka penyakit menular (seperti diare dan ISPA). ❖ Hubungan positif antara daya beli masyarakat dengan kemampuan pemenuhan gizi keluarga di Kabupaten Kotabaru.	❖ Belum meratanya kualitas fasilitas kesehatan antara wilayah pusat kota dengan wilayah kecamatan terluar/terjauh. ❖ Pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini (early detection) dan pemeriksaan kesehatan rutin yang masih perlu ditingkatkan.	hidup sehat dan pencegahan penyakit degeneratif.
	Prevalensi Stunting	❖ Adanya kenaikan harga komoditas pangan protein hewani di wilayah kepulauan yang memengaruhi daya beli keluarga sasaran (ibu hamil dan balita). ❖ Masih tingginya konsumsi makanan olahan instan pada anak-anak di daerah pesisir dibandingkan konsumsi ikan segar lokal ❖ Dinamika penduduk masuk (migrasi) ke wilayah tambang atau perkebunan di Kotabaru yang membawa balita dengan kondisi gizi kurang dari luar daerah.	❖ Karakteristik wilayah kepulauan menyulitkan pembangunan infrastruktur sanitasi layak dan akses air minum aman secara merata. ❖ Masih adanya mitos atau praktek tradisional dalam pemberian makan bayi (MP-ASI) yang tidak sesuai dengan standar gizi medis.	❖ Memastikan anggaran prioritas untuk intervensi stunting (sanitasi dan pemberian makanan tambahan). ❖ Pelatihan intensif bagi bidan desa dan kader posyandu dalam melakukan deteksi dini melalui alat antropometri yang terstandar. ❖ Melakukan audit mendalam pada wilayah (kecamatan/desa) yang mengalami kenaikan paling signifikan untuk mencari solusi spesifik per kasus.
Sasaran 3: Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	**Indeks Pembangunan Kualitas keluarga**	❖ Adanya sinergi lintas sektor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) dalam mengawal program keluarga berencana dan ketahanan keluarga ❖ Keaktifan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai tempat konsultasi dan pengasuhan anak yang mulai menjangkau tingkat kecamatan ❖ Tingginya modal sosial dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di	❖ Wilayah Kotabaru yang terdiri dari kepulauan menyulitkan standarisasi layanan kualitas keluarga dan distribusi informasi hingga ke pelosok desa terpencil ❖ Masih ditemukannya kasus pernikahan di usia dini di beberapa titik, yang secara langsung mengoreksi nilai pada dimensi legalitas dan kesiapan berkeluarga.	❖ Mengintensifkan sosialisasi UU Perkawinan dan dampak pernikahan dini melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat ❖ ntegrasi program peningkatan kualitas keluarga dengan pelatihan UMKM berbasis keluarga untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		Kotabaru, yang memperkuat dimensi ketahanan sosial-budaya		
	Indeks Ketimpangan Gender	❖ Adanya upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah	❖ Rendahnya jumlah perempuan di kursi legislatif (DPRD) atau posisi pengambilan keputusan di pemerintahan daerah	❖ Melakukan program pelatihan atau pelatihan dalam pengarusutamaan gender pada instansi dan OPD ❖ Melakukan Pelatihan kewirausahaan untuk perempuan di sektor UMKM agar mereka bisa bekerja mandiri
Tujuan 2: Terwujudnya penguatan daerah	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	❖ Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan ❖ Peningkatan investasi daerah di Kabupaten Kotabaru yang mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat ❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Kabupaten Kotabaru menjadi daerah dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan ❖ Tersedianya kawasan industri di Kabupaten Kotabaru ❖ Tersedianya pelabuhan yang dapat digunakan sebagai hub logistik regional ❖ Adanya dukungan kebijakan dari level pemerintah pusat hingga kabupaten untuk mendorong peningkatan investasi	❖ Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun ❖ Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur ❖ Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar ❖ Sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang kurang baik ❖ Adanya perizinan yang rumit dan berbelit-belit sehingga minat investasi rendah	❖ Diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian ❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja ❖ Pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab terhadap lingkungan agar berkelanjutan ❖ Perbaikan kualitas berbagai infrastruktur daerah (jalan, listrik) ❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar memiliki kualifikasi minimal diploma/sarjana ❖ Peningkatan kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan ❖ Pembuatan kerjasama dengan investor untuk menggunakan pekerja lokal ❖ Peningkatan percepatan layanan investasi dan penyederhanaan regulasi di daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
			❖ Adanya degradasi lingkungan akibat dampak pertambangan dan abrasi garis pantai ❖ Kredit usaha belum dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM ❖ Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah PulauLaut	❖ Pengembangan ekonomi biru dan sirkuler ekonomi ❖ Pendampingan intensif pada UMKM melalui pusat inkubasi bisnis daerah ❖ Digitalisasi produk UMKM daerah ❖ Percepatan pengembangan kawasan industri
	Laju Inflasi	❖ Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen dalam menjaga laju inflasi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah tim yang dibentuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan gejolak harga bahan pokok di daerah ❖ Melaksanakan operasi pasar tematik pada momen rawan (Hari Besar Keagamaan Nasional) dengan mensubsidi biaya angkut komoditas pangan.	❖ Banyaknya perantara dalam rantai pasok dari pelabuhan hingga ke kecamatan terpencil (seperti Pulau Sembilan atau Geronggang) menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi. ❖ Sebagai wilayah kepulauan, inflasi di Kotabaru sangat sensitif terhadap harga BBM dan tarif angkutan laut yang berdampak langsung pada distribusi barang pokok. ❖ Fluktuasi harga pangan seperti beras, cabai, dan bawang yang dipengaruhi oleh anomali cuaca (El Nino/La Nina) yang mengganggu produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah.	❖ Melakukan high-level meeting secara rutin dan pemantauan harga harian melalui sistem informasi harga pasar secara real-time. ❖ Mendorong masyarakat dan kelompok tani memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan sayuran guna mengurangi ketergantungan pasar (kemandirian pangan tingkat rumah tangga). ❖ Mengalokasikan anggaran untuk menyubsidi ongkos angkut barang pokok dari pelabuhan menuju wilayah pedalaman/kepulauan saat terjadi kenaikan harga yang ekstrim.
	Angka PDRB Perkapita	❖ Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit) tetap menjadi tulang punggung utama yang menjaga level PDRB tidak merosot di tengah ketidakpastian global. ❖ Adanya realisasi investasi pada industri pengolahan (hilirisasi) yang mulai	❖ Sangat tingginya ketergantungan ekonomi Kotabaru pada harga batu bara dan CPO. Penurunan atau stagnasi harga komoditas ini di pasar internasional berdampak langsung pada nilai PDRB ❖ Angka PDRB Per Kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jika laju pertumbuhan ekonomi	❖ Mendorong sektor industri pengolahan agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah hasil tambang dan kebun di dalam daerah, nilai tambah (value added) yang tercipta akan jauh lebih besar ❖ Mengoptimalkan potensi maritim (perikanan) dan pariwisata bahari sebagai sumber

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		memberikan nilai tambah pada produk domestik daerah ❖ Membangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta optimalisasi pelabuhan yang memperlancar arus barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi tetap berputar.	tidak mampu melampaui laju pertumbuhan penduduk, maka nilai per kapitanya akan cenderung melambat atau stagnan.	pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan sektor tambang. ❖ Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha lokal agar mampu menembus pasar nasional dan internasional, sehingga memperkuat struktur PDRB dari sisi non-pemerintah. ❖ Melakukan koordinasi intensif dengan BPS untuk memastikan seluruh potensi ekonomi baru (new growth engine) di Kotabaru terdata dan masuk dalam penghitungan PDRB secara akurat
Sasaran 4: Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	**Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	❖ Optimasi lahan perkebunan (khususnya kelapa sawit dan karet) yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kotabaru ❖ Adanya dukungan bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani yang meningkatkan efisiensi produksi pangan ❖ Pemanfaatan wilayah pesisir Kotabaru yang luas untuk produksi perikanan guna memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor. ❖ Kondisi harga jual produk pertanian dan perikanan yang relatif terjaga sehingga memotivasi produsen untuk mempertahankan kapasitas produksi	❖ Anomali cuaca yang sulit diprediksi berdampak pada siklus tanam dan produktivitas hasil tangkapan nelayan di laut ❖ Masih perlunya peningkatan infrastruktur jalan usaha tani	❖ Mendorong pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di Kotabaru agar daerah mendapatkan nilai tambah lebih tinggi daripada sekadar menjual bahan mentah. ❖ Mengimplementasikan teknologi informasi untuk pemetaan lahan dan jadwal tanam guna memitigasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim ❖ Mengembangkan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu hutan atau tanaman sela yang dapat meningkatkan nilai PDRB sektor kehutanan tanpa merusak ekosistem.
	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	❖ Operasional pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) dan industri pengolahan hasil tambang yang tetap stabil memberikan kontribusi besar pada nilai tambah industri.	❖ Masih terdapat celah antara ketersediaan tenaga kerja lokal dengan kualifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri manufaktur modern	❖ Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung (listrik, air bersih, dan akses jalan) di kawasan industri untuk menarik minat investor industri hilir baru.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		❖ Penambahan mesin atau pembaruan teknologi pada beberapa lini industri manufaktur lokal yang meningkatkan efisiensi output ❖ kelancaran distribusi bahan baku dari sektor pertanian dan pertambangan lokal menuju pabrik-pabrik pengolahan di dalam daerah		❖ Mendorong industri untuk tidak hanya menghasilkan produk setengah jadi (seperti CPO), tetapi mulai merambah ke produk turunan akhir (seperti minyak goreng atau produk kimia) agar nilai tambah PDRB meningkat signifikan ❖ Mengadakan kerjasama antara pemerintah daerah, SMK/Universitas, dan sektor industri untuk menciptakan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri.
	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	❖ Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat mendorong aktivitas transaksi di pasar tradisional maupun ritel modern di Kotabaru ❖ Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor meningkatkan permintaan jasa reparasi dan suku cadang secara konsisten ❖ Aktivitas ekonomi dari sektor tambang dan industri pengolahan menciptakan multiplier effect bagi perdagangan lokal untuk menyuplai kebutuhan operasional perusahaan dan karyawan	❖ Kendala distribusi barang ke wilayah pelosok atau kepulauan di Kotabaru yang menyebabkan biaya angkut tinggi, sehingga menghambat ekspansi perdagangan besar. ❖ Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang tahan lama yang terkadang menekan margin laba pedagang eceran	❖ Memberikan kemudahan perizinan bagi distributor besar untuk membangun gudang logistik di Kotabaru guna memotong rantai distribusi dan menurunkan harga barang. ❖ Mengadakan program pelatihan bagi pemilik bengkel kecil dan pedagang eceran terkait manajemen stok dan layanan pelanggan agar lebih profesional. ❖ Mengintegrasikan *event* pariwisata daerah dengan bazar perdagangan/ekspo UMKM untuk meningkatkan volume transaksi perdagangan eceran secara musiman.
	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	❖ Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan di Kotabaru secara langsung meningkatkan tingkat hunian hotel (akomodasi) dan omzet usaha rumah makan/restoran ❖ Pergeseran pola konsumsi masyarakat lokal yang semakin gemar melakukan aktivitas	❖ Masih terdapat variasi kualitas pelayanan dan fasilitas pada akomodasi kelas menengah ke bawah yang dapat memengaruhi daya saing terhadap tuntutan wisatawan modern. ❖ kendala geografis dan infrastruktur pendukung di beberapa lokasi wisata	❖ Membangun kemitraan antara pengusaha hotel/restoran dengan petani dan nelayan lokal untuk menjamin stabilitas pasokan bahan baku segar dengan biaya logistik yang lebih rendah ❖ Mendorong sistem pemesanan akomodasi dan pembayaran digital (QRIS) di desa-

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		makan di luar rumah (*dining out*) serta meningkatnya tren jasa pesan-antar makanan digital ❖ Tumbuhnya usaha mikro dan menengah (UMKM) baru di bidang makanan dan minuman yang semakin variatif dan tersebar di titik-titik strategis wilayah Kotabaru. ❖ Penyelenggaraan berbagai acara formal pemerintahan, festival budaya, maupun kegiatan korporasi yang mendorong permintaan jasa boga dan penyediaan penginapan.	terpencil masih membatasi distribusi pasokan bahan baku dan kunjungan tamu secara masif.	wisata untuk mencatat transaksi sektor Akomodasi dan Makan Minum secara lebih akurat dan *real-time* ❖ Memberikan fasilitasi sertifikasi bagi tenaga kerja lokal di bidang industri pengolahan agar standar produktivitas meningkat sesuai kebutuhan investor
Sasaran 5; Menurunya Pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	❖ Adanya pembukaan lahan baru atau peningkatan kapasitas produksi di sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. ❖ Pengembangan destinasi wisata unggulan di Kotabaru mulai menciptakan ekosistem ekonomi baru (seperti perhotelan, kuliner, dan jasa transportasi) yang menyerap angkatan kerja produktif. ❖ Program bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri (wirausaha baru).	❖ Masih tingginya ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja dari luar daerah untuk posisi spesialis/teknis karena keterbatasan sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal. ❖ Masih rendahnya penguasaan teknologi digital dalam mencari kerja serta preferensi sebagian angkatan kerja muda yang hanya terpaku pada sektor formal (pegawai/karyawan).	❖ Memperkuat kerja sama antara SMK/Universitas lokal dengan perusahaan besar melalui program magang (internship) yang terstruktur dan berujung pada penyerapan kerja. ❖ Membangun wadah kreatif (Co-working space) untuk melatih pemuda Kotabaru dalam ekonomi digital, agar tidak hanya mencari kerja tetapi mampu menciptakan lapangan kerja di bidang digital
Sasaran 6: Meningkatnya investasi daerah	**Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah**	❖ Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien	❖ Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi ❖ Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanan secara online masih mengalami kendala	❖ Pembuatan peta potensi investasi daerah ❖ Penambahan SDM yang mumpuni dalam fasilitasi pelayanan perizinan ❖ Penyusunan strategi promosi penanaman modal

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		❖ Stabilitas yang tinggi terkait dengan keamanan di Kabupaten Kotabaru ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan dan perikanan ❖ Layanan investasi sudah berbasis online	❖ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal ❖ Pemberian kemudahan dan insentif yang diberikan belum menarik minat investor untuk menanamkan modal ❖ Potensi unggulan daerah belum teridentifikasi dan terpetakan dengan baik ❖ Pelayanan perizinan belum baik sesuai standar pelayanan ❖ Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas ❖ Pertumbuhan Investasi Daerah disebabkan oleh capaian nilai investasi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 yang berarti pertumbuhan investasi daerah tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan	❖ Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik ❖ Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal ❖ Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian kemudahan dan insentif daerah
Sasaran 7: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	**Tingkat Kemiskinan**	❖ Sektor pertambangan dan perkebunan besar menyediakan lapangan kerja formal yang stabil bagi sebagian besar penduduk usia produktif. ❖ Sebagai wilayah kepulauan, akses masyarakat terhadap pangan protein (ikan) relatif mudah dan murah, yang menjaga garis kemiskinan dari sisi pengeluaran makanan. ❖ Efektivitas penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa) yang tepat waktu mampu menahan masyarakat di garis	❖ Warga miskin di pulau-pulau terpencil memiliki biaya transaksi yang besar untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga sisa pendapatan untuk tabungan menjadi nihil. ❖ Kabupaten Kotabaru memiliki tantangan logistik yang membuat intervensi program kemiskinan menjadi lebih mahal dan lambat sampai ke sasaran	❖ Melakukan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan bantuan modal usaha hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar produktif, bukan sekadar bantuan konsumtif. ❖ Memprioritaskan pembangunan dermaga rakyat dan jalan lingkungan di kantong-kantong kemiskinan untuk memangkas biaya logistik rumah tangga. ❖ Memetakan perusahaan besar di sekitar wilayah kantong kemiskinan dan mewajibkan mereka melakukan intervensi khusus (misal:

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem.		bedah rumah, sanitasi, dan pemberian alat kerja) di desa-desa dengan angka kemiskinan tertinggi di wilayah operasionalnya.
	Rasio Gini	❖ Peningkatan investasi daerah akan mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat ❖ Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi ❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk ❖ Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang ❖ Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatan PDRB per kapita ❖ Adanya kebijakan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ❖ Adanya kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha (ekonomi)	❖ Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan ❖ Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru ❖ Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun ❖ Adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan modal	❖ Diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian ❖ Peningkatan produktivitas tenaga kerja ❖ Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kotabaru agar memiliki kualifikasi minimal sarjana ❖ Penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin ❖ Pelaksanaan kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha ❖ Peningkatan kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan
Tujuan 3: Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan	**Indeks Reformasi birokrasi**	❖ Kolaborasi yang baik dan terus meningkat dalam mendukung Indeks RB bersaa dengan OPD yang bersangkutan ❖ Capaian dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang hampir sempurna di angka 99% mencerminkan komitmen kuat	❖ Penetapan target IKU dan Rencana Aksi belum sepenuhnya selaras dengan target "Baik" yang ditetapkan dalam Kepmen 182 Tahun 2024. ❖ Belum dijadikannya manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan	❖ Melakukan reviu total agar target Rencana Aksi minimal setara dengan standar nasional Kepmen 182/2024 dan memastikan adanya keabsahan formal atas dokumen tersebut. ❖ Memperbaiki setiap indikator kinerja agar memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound*

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		terhadap pemulihan ekonomi melalui produk lokal. ❖ ingkat digitalisasi arsip yang mencapai 89,2% menunjukkan kesiapan infrastruktur administrasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern ❖ Efektivitas dalam mencapai indikator kinerja utama makro yang berada di angka 92%	serta kurangnya monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ❖ Masih ditemukan sasaran strategis yang tidak selaras antara level Pemda dan OPD, serta indikator yang bersifat *output* saja (bukan *outcome*). ❖ Masih adanya risiko hubungan kedekatan antara penyedia jasa dengan pejabat dan belum optimalnya mekanisme pencegahan gratifikasi.	(SMART) yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat ❖ Membentuk komite/satgas pengelola risiko korupsi dan melaksanakan *probity audit* secara berkala untuk mendeteksi masalah dalam pengadaan ❖ Mengembangkan aplikasi *e-catalog* lokal dan *dashboard* transparansi anggaran yang memuat daftar hitam (*blacklist*) vendor untuk mencegah nepotisme. ❖ Menyempurnakan rencana aksi RB Tematik (Kemiskinan dan Stunting) dengan melibatkan akademisi, sektor swasta (CSR), dan komunitas dalam satu peta jalan yang logis ❖ Meningkatkan sosialisasi antikorupsi kepada *stakeholders* dan menjadikan pimpinan sebagai *role model* dalam penegakan pengelolaan gratifikasi
Sasaran 8: Meningkatnya pelayanan kualitas publik	**Indeks pelayanan publik**	❖ Kabupaten Kotabaru meraih skor 93,97% dalam tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, yang menunjukkan secara administratif prosedur pelayanan sudah tersedia. ❖ Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan angka 84,52%, menandakan bahwa meskipun indeks sektoral rendah, masyarakat pengguna layanan merasa cukup puas dengan interaksi layanan saat ini ❖ Adanya capaian 89,2% pada digitalisasi arsip menjadi modal penting untuk	❖ Hasil Survei Kepuasan Masyarakat belum dioptimalkan sebagai dasar utama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada unit layanan. ❖ Tantangan geografis Kabupaten Kotabaru menyebabkan standar kualitas layanan di pusat kota sulit direplikasi secara merata di kecamatan terpencil	❖ Melakukan sosialisasi masif kepada pengguna layanan untuk menggunakan kanal pengaduan resmi dan memastikan setiap aduan diberikan penilaian (*rating*) setelah diselesaikan. ❖ Mewajibkan setiap OPD teknis untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang konkret berdasarkan poin-poin ketidakpuasan masyarakat dalam survei. ❖ Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi petugas garda terdepan (*frontliner*)

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		mempercepat transisi menuju layanan publik berbasis digital (e-services).		mengenai standar layanan prima yang terukur dan profesional.
Sasaran 9 Meningkatnya digilisasi tata Kelola pemerintahan	**Indeks SPBE**	❖ Adanya regulasi setingkat Peraturan Bupati (Perbup) mengenai SPBE yang menunjukkan dasar hukum formal sudah terbentuk. ❖ Kepemilikan pusat data (Data Center) atau penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah mulai terintegrasi. ❖ Adanya beberapa aplikasi unggulan di sektor perizinan atau kependudukan yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.	❖ Banyak aplikasi yang berdiri sendiri antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tidak saling "berbicara" (kurangnya integrasi/interoperabilitas). ❖ Kurangnya tenaga ahli spesifik seperti *data scientist*, *security analyst*, atau arsitek sistem informasi di tingkat kabupaten.	❖ Melakukan penyesuaian dengan Indikator yang baru yaitu Indeks Pemerintah Digital ❖ Melakukan konsolidasi aplikasi untuk menghindari pemborosan anggaran dan tumpang tindih data. ❖ Peningkatan mitigasi risiko melalui pembentukan tim keamanan informasi untuk menjaga integritas data pemerintah ❖ Membuka lowongan untuk tenaga ahli spesifik seperti *data scientist*, *security analyst*, atau arsitek sistem informasi di tingkat kabupaten.
	Indeks Pemerintah Digital	❖ *(Indeks Pemerintah Digital masih daam tahap validasi dan finalisasi oleh Kementerian/lembaga terkait.)*	❖ (Indeks Pemerintah Digital masih daam tahap validasi dan finalisasi oleh Kementerian/lembaga terkait.)	❖ (Indeks Pemerintah Digital masih daam tahap validasi dan finalisasi oleh Kementerian/lembaga terkait.)
Sasaran 10: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintah	**Nilai SAKIP**	❖ Kualitas pohon kinerja di level Pemerintah Daerah dinilai telah cukup baik, ditandai dengan penetapan *Critical Success Factor* (CSF) yang relevan untuk mencapai hasil akhir (*ultimate outcome*). Ini memudahkan penarikan benang merah sasaran dalam laporan kinerja. ❖ Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebenarnya sudah difasilitasi dengan aplikasi manajemen kinerja untuk pelaporan progres, yang jika dioptimalkan, akan sangat membantu	❖ Pada dokumen laporan kinerja, analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja tidak disampaikan secara lengkap dan kurang mendalam. Kebanyakan laporan justru hanya berisi penjelasan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. ❖ Satuan pada beberapa indikator kinerja belum dirumuskan dengan jelas, dan banyak indikator belum mendefinisikan sumber datanya dengan pasti. Hal ini	❖ Perangkat Daerah harus menyempurnakan dokumen laporan kinerja dengan menyampaikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara detail. Analisis ini krusial untuk dijadikan dasar merumuskan solusi atau mempertahankan strategi guna meningkatkan capaian kinerja di masa depan. ❖ Dokumen pelaporan wajib menyertakan informasi *benchmarking* atas indikator capaian kinerja tertentu yang memungkinkan untuk dibandingkan dengan capaian level

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		penyediaan data LKJIP secara *real-time* dan akurat ❖ Dengan raihan nilai 64,80 dan predikat "B" , ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah masuk kategori "Baik" , sehingga perbaikan yang dibutuhkan lebih bersifat penyempurnaan teknis dan peningkatan komitmen	menyulitkan evaluasi dan menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menghitung capaian kinerja yang akan dilaporkan ❖ Pengukuran kinerja secara periodik dan berjenjang belum dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat Daerah yang tidak melaporkan progres capaian kinerja triwulanan pada aplikasi manajemen kinerja, sehingga menyulitkan rekapitulasi data historis untuk penyusunan LKJIP tahunan.	nasional, provinsi, atau daerah sekitar. Ini berguna untuk memberikan gambaran level keberhasilan yang lebih objektif ❖ Memperjelas satuan ukur pada seluruh indikator agar spesifik dan konsisten. Selain itu, seluruh indikator wajib dilengkapi dengan definisi sumber data dan mekanisme pengumpulan data yang tersedia ❖ Meningkatkan komitmen seluruh level jabatan (dari Kepala Dinas hingga staf) untuk melakukan pengukuran kinerja periodik secara disiplin. Identifikasi kendala dan hambatan harus dilakukan setiap periode, bukan hanya di akhir tahun
	Opini BPK	❖ Adanya kemauan kuat dari Bupati dan jajaran kepala SKPD untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan. ❖ Penggunaan sistem terintegrasi yang meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat konsolidasi data ❖ Peran aktif Inspektorat dalam melakukan *review* laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK, sehingga temuan-temuan kecil dapat diperbaiki lebih awal. ❖ Kecepatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.	❖ Penyesuaian terhadap aturan baru dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri yang terkadang membutuhkan waktu adaptasi teknis di lapangan.	❖ Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. ❖ Mengadakan *workshop* berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	**Indeks Sistem Merit**	❖ (Indeks Sistem Merit mengalami perubahan paradigma berdasarkan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit)	❖ (Indeks Sistem Merit mengalami perubahan paradigma berdasarkan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit)	❖ (Indeks Sistem Merit mengalami perubahan paradigma berdasarkan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit)
Tujuan 4: Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur**	❖ Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi dengan wilayah pelosok/pesisir. ❖ Perluasan jangkauan jaringan internet dan infrastruktur digital hingga ke tingkat desa yang meningkatkan skor pilar infrastruktur pendukung. ❖ Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan (APBD, APBN, maupun Dana Alokasi Khusus) secara terintegrasi untuk proyek infrastruktur strategis daerah.	❖ Wilayah Kotabaru yang merupakan kepulauan luas menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur per kilometer menjadi lebih mahal dibandingkan wilayah daratan. ❖ Masih terdapat perbedaan kualitas infrastruktur yang cukup mencolok antara wilayah perkotaan dengan wilayah kecamatan terluar/terpencil.	❖ Mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur strategis (seperti pelabuhan atau pasar) melalui skema konsesi untuk mengurangi beban APBD. ❖ Memperbanyak titik akses Wi-Fi publik dan digitalisasi layanan publik di tempat umum sebagai langkah murah untuk meningkatkan indeks pilar infrastruktur digital. ❖ Memastikan setiap pembangunan infrastruktur baru telah mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim (seperti banjir rob), guna menjaga daya tahan dan usia pakai aset daerah.
	Indeks Desa	❖ Pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik yang tepat sasaran. ❖ Perbaikan infrastruktur jalan desa dan jembatan yang menghubungkan ❖ Pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana PAUD/TK di tingkat desa	❖ Masih adanya desa-desa di wilayah kepulauan atau pedalaman yang memiliki akses komunikasi dan transportasi terbatas, sehingga skor infrastrukturnya rendah.	❖ Melakukan pendampingan intensif dan bantuan modal untuk BUMDes agar mampu mengelola potensi lokal ❖ Berkolaborasi dengan sektor swasta (CSR) guna mendukung ekonomi ❖ Mendorong setiap desa untuk menciptakan minimal satu produk unggulan
Sasaran 12: Meningkatnya sarana dan prasarana	**Indeks Infrastruktur dasar**	❖ Penerapan standar teknis yang ketat dalam setiap proyek infrastruktur memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan indikator penilaian indeks infrastruktur dasar.	❖ Pertumbuhan area pemukiman baru yang sangat cepat terkadang lebih mendahului kesiapan penyediaan infrastruktur dasar (drainase dan pengelolaan limbah)	❖ Mendorong perusahaan-perusahaan besar di Kotabaru untuk mengarahkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka pada pembangunan fasilitas

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	(5)
		(3)	(4)	
		❖ Adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar di pemukiman warga ❖ Efektivitas penggunaan Dana Desa yang disinergikan dengan APBD untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase di tingkat desa ❖ Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor vital	❖ Infrastruktur lama yang mulai mengalami kerusakan memerlukan alokasi anggaran pemeliharaan yang cukup besar, yang seringkali bersaing dengan anggaran pembangunan baru	infrastruktur dasar di desa-desa sekitar lingkar tambang dan perkebunan. ❖ Melakukan survey pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas
Sasaran 13: Meningkatnya kemandirian desa	**Persentase Desa Mandiri (%)**	❖ Penggunaan Dana Desa yang mulai beralih dari sekadar pembangunan fisik ke pemberdayaan ekonomi dan penguatan BUMDes ❖ Desa yang telah berstatus Mandiri mampu menjaga kualitas tata kelola dan kemandirian ekonominya sehingga tidak terjadi penurunan status	❖ Tantangan dalam meningkatkan kapasitas manajerial perangkat desa untuk memenuhi indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih kompleks.	❖ Mendorong BUMDes untuk bekerja sama dengan sektor industri pengolahan atau perdagangan besar di Kotabaru agar memiliki unit usaha yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan PADes ❖ Meningkatkan skor pilar lingkungan pada IDM melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), mengingat kondisi geografis wilayah yang luas.
Tujuan 5: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	❖ Implementasi kebijakan daerah yang mendorong efisiensi energi pada sektor industri pengolahan dan bangunan perkantoran pemerintah ❖ Peningkatan sistem pengelolaan sampah di TPA dan pengolahan limbah industri yang mengurangi pelepasan gas metana ke atmosfer ❖ Adanya kesadaran perusahaan besar di Kotabaru (pertambangan dan perkebunan)	❖ Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, emisi dari sektor transportasi terus meningkat dan menjadi tantangan dalam menekan total emisi daerah. ❖ Faktor cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko karhutla dapat menyebabkan lonjakan emisi GRK secara mendadak dalam skala besar. ❖ Masih terdapat data-data yang belum lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup	❖ Mendorong pemanfaatan energi surya atau biomassa untuk penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas publik guna mengurangi beban emisi sektor energi ❖ Mengkampanyekan kebiasan untuk hemat energi

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
		untuk mulai menggunakan teknologi rendah karbon dalam operasionalnya	sehingga belum dapat menggambarkan nilai penurunan intensitas GRK secara optimal.	
	Indeks Risiko Bencana	❖ Penguatan peran BPBD dan forum relawan lintas sektor dalam koordinasi penanggulangan bencana yang lebih responsif. ❖ Penyelesaian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi yang lebih akurat dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah. ❖ Keberhasilan sosialisasi mitigasi bencana di tingkat sekolah (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang aktif.	❖ Alih fungsi lahan hutan menjadi area terbuka atau perkebunan yang tidak terkendali dapat meningkatkan potensi risiko banjir bandang dan tanah longsor secara mendadak.	❖ Memperluas cakupan Destana ke seluruh desa kategori "Bahaya Tinggi" dengan dukungan anggaran dana desa yang terarah. ❖ Mewajibkan setiap investasi besar (tambang / perkebunan / industri) untuk memiliki sistem manajemen risiko bencana mandiri yang tersertifikasi.
Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	❖ Peningkatan kepatuhan pelaku usaha/industri terhadap dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sehingga limbah hasil aktivitas industri lebih terkendali. ❖ Penambahan luasan taman kota dan area hijau di wilayah Kotabaru yang berkontribusi pada kualitas udara dan estetika kota ❖ Peningkatan jangkauan pelayanan sampah dan penguatan Bank Sampah yang mengurangi beban pencemaran pada tanah dan air. ❖ Keberhasilan dalam penanaman kembali dan pemulihan lahan kritis	❖ Risiko kebakaran lahan pada musim kemarau yang sewaktu-waktu dapat menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara drastis akibat kabut asap	❖ Mendorong industri di Kotabaru untuk menerapkan sertifikasi industri hijau dan teknologi produksi bersih ❖ Melibatkan sektor swasta melalui CSR untuk program perlindungan keanekaragaman hayati dan edukasi perubahan perilaku masyarakat dalam membuang sampah.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja		Tindak Lanjut yang dilakukan
(1)	(2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)	(5)
Sasaran 15: Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	**Indeks Ketahanan Daerah**	❖ Adanya regulasi daerah yang mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai fondasi ketahanan daerah ❖ Ketersediaan anggaran operasional untuk instansi terkait (seperti BPBD) yang memastikan program pencegahan tetap berjalan setiap tahunnya ❖ Tingginya modal sosial dan gotong royong masyarakat pesisir dan kepulauan di Kotabaru dalam menghadapi ancaman bencana alam.	❖ Luasnya wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan distribusi logistik dan pemerataan infrastruktur ketahanan secara cepat.	❖ Memperbanyak pembentukan dan pembinaan Destana secara masif agar ketahanan daerah terbangun dari level paling bawah (grassroots). ❖ Melakukan bedah indikator IKD bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi variabel mana yang masih rendah dan memerlukan intervensi kebijakan khusus. ❖ Melakukan pelatihan teknis berkelanjutan bagi aparatur dan relawan dalam hal manajemen risiko bencana yang terukur

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel. II.6
Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai (Setelah Perubahan)

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat **Indikator Kinerja SS** Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah				 7,6 12,08	 7,71 12,23	 101,44% 100,24%	
	Program 1.1 Program Pembinaan Perpustakaan **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan **Indikator Kinerja Program** Persentase Perpustakaan yang terstandardisasi	9.595.081.850	9.511.636.177	99,13%	20,6	20,6	100%	100,87%
	Kegiatan 1.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 1.1.1** Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Meningkatnya Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Meningkatnya Koleksi Bahan Pustaka **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan Persentase Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang ditingkatkan Kualitasnya Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka yang lengkap	8.093.611.250	8.071.106.877	99,72%	 17,48 0,85 49	 17,48 0,85 49	 100% 100% 100%	100,28%
	Sub Kegitan 1.1.1.1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	149.122.000	142.415.800	95,50%	65	65	100%	104,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan **Sasaran Sub Kegiatan** Meningkatnya Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							
	Sub Kegitan 1.1.1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Meningkatnya Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya	5.295.107.000	5.291.428.123	99,93%	4	4	100%	100%
	Sub Kegitan 1.1.1.3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terwujudnya Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	95.631.350	94.332.850	98,64%	1	1	100%	101,37%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi							
	Sub Kegitan 1.1.1.4 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	287.826.000	285.789.806	99,29%	15	15	100%	100,7%
	Sub Kegitan 1.1.1.5 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) yang dimanfaatkan oleh Masyarakat **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) yang dimanfaatkan oleh Masyarakat	120.260.500	119.984.500	99,77%	1500	1500	100%	100,2%
	Sub Kegitan 1.1.1.6 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi							
	Sub Kegitan 1.1.1.7 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegatan** Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	386.798.500	380.619.856	98,40%	100	100	100%	101,6%
	Sub Kegitan 1.1.1.8 Pengelolaaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	1.503.692.400	1.501.953.521	99,88%	2000	2000	100%	100,1%
	Sub Kegitan 1.1.1.9 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektroknik **Sasaran Sub Kegiatan**	255.173.500	254.582.421	99,77%	1	1	100%	100,2%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Layanan Perpustakaan Elektroknik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Layanan Perpustakaan Elektroknik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK							
	Kegiatan 1.2.1 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 1.2.1** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan Meningkatnya Literasi dan Minat Baca **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik/sesuai standar	1.501.470.600	1.440.529.300	95,94%	100	100	100%	104,23%
	Sub Kegitan 1.1.2.1 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	83.179.000	70.860.000	85,19%	1	1	100%	117,38%
	Sub Kegitan 1.1.2.2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya layanan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	314.843.000	304.746.000	96,79%	6	6	100%	103,31%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah layanan perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan							
	Sub Kegitan 1.1.2.3 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Meningkatnya Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	789.905.700	786.049.900	99,51%	1	1	100%	100,5%
	Sub Kegitan 1.1.2.4 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca **Sasaran Sub Kegiatan** Meningkatnya orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegatan** Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	107.972.900	95.135.900	88,11%	18	18	100%	113,5%
	Sub Kegitan 1.1.2.5 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan**	205.570.000	183.737.500	89,38%	3	3	100%	111,8%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan Masyarakat **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan Masyarakat							
	Program 1.2 Program Pengelolaan Pendidikan **Sasaran Program** Menurunnya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah **Indikator Kinerja Program** Angka Rata-Rata Lama Sekolah	571.980.554.121	443.674.966.331	77,57%	7,7	7,7	100%	128,91%
	Kegiatan 1.2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar **Sasaran Kegiatan 1.2.1** Meningkatkan Jumlah anak usia 7–12 tahun yang terdaftar di satuan pendidikan dasar **Indikator Kinerja Kegiatan** Tingkat partisaipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	343.147.629.259	250.013.754.410	72,86%	100	102	102%	139,99%
	Sub Kegitan 1.2.1.1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	696.258.000	689.407.903	99,02%	4	4	99,92%	100,91%
	Sub Kegitan 1.2.1.2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan**	218.344.000	215.966.500	98,91%	1	1	99,09%	100,18%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun							
	Sub Kegitan 1.2.1.3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Perpustakaan Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	993.121.000	988.758.750	100%	5	5	99,75%	100,19%
	Sub Kegitan 1.2.1.4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekola **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10.693.814.300	10.560.874.275	98,75%	52	52	98,18%	99,42%
	Sub Kegitan 1.2.1.5 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2.596.937.000	2.549.036.200	98,16%	12	12	100%	101.88%
	Sub Kegitan 1.2.1.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Sasaran Sub Kegiatan**	496.973.000	492.625.400	99,12%	3	3	100%	100.88%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terehabilitasinya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
	Sub Kegitan 1.2.1.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terehabilitasinya Ruang Unit Kesehatan Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	370.071.000	366.418.000	99,01%	2	2	100%	100.99%
	Sub Kegitan 1.2.1.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terehabilitasinya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	7.146.737.000	5.006.587.056	70,05%	36	36	99%	141.32%
	Sub Kegitan 1.2.1.9 Pengadaan Mebel Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Telaksananya Pengadaan Mebel Sekolah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	10.482.164.698	10.467.031.824	99,85%	103	103	97%	97,14%
	Sub Kegitan 1.2.1.10 Pengadaan Perlengkapan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5.310.213.000	3.711.923.280	69,90%	157	157	70%	100.14%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia							
	Sub Kegitan 1.2.1.11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	169.520.000	49.930.500	29,45%	250	100	40%	135.82%
	Sub Kegitan 1.2.1.12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	33.893.445.350	33.153.342.607	97,81%	12	12	100%	102.23%
	Sub Kegitan 1.2.1.13 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.906.729.854	2.859.574.899	98,37%	125	125	100%	101.65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 1.2.1.14 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Kompetensi dan Kualifikasi	652.860.500	191.491.073	29,33%	10	8	80%	272.75%
	Sub Kegitan 1.2.1.15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Terkelolanya Dana BOS Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	31.184.206.000	30.990.053.060	99,37%	258	258	100%	100.63%
	Sub Kegitan 1.2.1.16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.941.484.357	1.643.526.357	84,65%	2500	2500	100%	118.13%
	Sub Kegitan 1.2.1.17 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Laboratorium Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	598.476.000	394.736.000	65,95%	3	2	66%	100.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun							
	Sub Kegitan 1.2.1.18 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	190.345.500	63.940.000	33,59%	50	50	100%	297.70%
	Sub Kegitan 1.2.1.19 Pengembangan konten digital untuk pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	37.861.800	22.755.200	60,10%	1	1	100%	166.38%
	Sub Kegitan 1.2.1.20 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	32.238.000	23.528.000	72,98%	50	50	100%	137.02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 1.2.1.21 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	13.976.000	12.345.000	88,32%	4	4	100%	113.22%
	Sub Kegitan 1.2.1.22 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	44.000.000	42.370.000	96,29%	4	4	100%	103.85%
	Sub Kegitan 1.2.1.23 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	91.879.500	44.575.500	48,51%	2	1	50%	103.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 1.2.1.24 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	3.173.704.000	3.023.654.100	95,27%	366	366	100%	104.96%
	Sub Kegitan 1.2.1.25 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	77.066.000.000	73.956.473.565	95,96%	83	83	100%	104.21%
	Sub Kegitan 1.2.1.26 Pembangunan Ruang Kelas Baru **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Ruang Kelas Baru **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2.480.703.000	2.445.377.150	98,57%	10	10	99%	100.43%
	Sub Kegitan 1.2.1.27 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terehabilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.766.414.500	1.745.888.700	98,83%	3	3	99%	100.17%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 1.2.1.28 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5.022.007.400	5.012.206.500	99,8%	100	100	100%	100.20%
	Sub Kegitan 1.2.1.29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terehabilitasinya Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8.196.674.000	7.900.698.575	96,38%	24	24	97%	100.64%
	Sub Kegitan 1.2.1.30 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	118.441.512.750	36.144.217.500	30,51%	1390	1390	100%	327.76%
	Sub Kegitan 1.2.1.31 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	16.238.957.750	15.244.440.936	93,87%	4	4	94%	100.13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia							
	Kegiatan 1.2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Kegiatan 1.2.2** Meningkatkan Jumlah anak usia 13–15 tahun yang terdaftar di satuan pendidikan dasar menengah **Indikator Kinerja Kegiatan** Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTS)	139.081.457.210	124.075.228.783	89,21%	100	74	74%	82,95%
	Sub Kegiatan 1.2.2.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	999.233.000	376.514.111	37,68%	1	1	100%	265.39%
	Sub Kegiatan 1.2.2.2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	630.208.500	424.650.236	67,38%	3	1	35%	51.94%
	Sub Kegiatan 1.2.2.3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan** Terbangunnya Perpustakaan Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	665.576.000	463.940.316	69,70%	3	2	67%	96.12%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun							
	Sub Kegiatan 1.2.2.4 Pembangunan Laboratorium **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.4** Terbangunnya Laboratorium **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1.789.639.000	934.312.250	52,20%	8	4	50%	95.78%
	Sub Kegiatan 1.2.2.5 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.5** Terbangunnya Ruang Serba Guna/Aula **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	542.932.000	331.615.200	61,07%	3	2	67%	109.71%
	Sub Kegiatan 1.2.2.6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.6** Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8.204.108.500	6.320.091.085	77,03%	37	23	72%	93.47%
	Sub Kegiatan 1.2.2.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.7** Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3.584.457.650	2.891.410.529	80,66%	19	9	78%	96.70%
	Sub Kegiatan 1.2.2.8 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.8**	177.000.000	176.104.867	99,49%	2	2	100%	100.51%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terehabilitasinya Perpustakaan Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
	Sub Kegiatan 1.2.2.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.9** Terehabilitasinya Laboratorium **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	717.672.000	714.913.411	99,6%	4	4	100%	100.40%
	Sub Kegiatan 1.2.2.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.10** Terehabilitasinya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4.052.029.000	3.982.854.005	98,29%	23	21	97%	98.68%
	Sub Kegiatan 1.2.2.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.11** Terehabilitasinya Kantin Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99.999.250	99.751.951	99,75%	1	1	100%	100.25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.2.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.12** Terehabilitasinya Kantin Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	294.614.250	288.441.425	97,90%	2	2	99%	101.12%
	Sub Kegiatan 1.2.2.13 Pengadaan Mebel Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.13** Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5.535.736.000	5.302.769.056	95,79%	60	59	96%	100.21%
	Sub Kegiatan 1.2.2.14 Pengadaan Perlengkapan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.14** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2.008.268.000	1.416.512.065	70,53%	7	5	71%	100.66%
	Sub Kegiatan 1.2.2.15 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.15** Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25.186.123.950	21.036.663.950	83,52%	1345	1345	100%	119.73

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.2.16 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.16** Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	472.491.300	47.381.600	10,02%	100	100	100%	998%
	Sub Kegiatan 1.2.2.17 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.17** Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.370.114.950	11.321.427.950	99,57%	12	12	100%	100.43%
	Sub Kegiatan 1.2.2.18 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.18** Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	951.960.000	917.552.474	96,38%	481	481	100%	103.75%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.2.19 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.19** Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	254.553.360	81.721.440	32,10%	15	15	100%	311.52%
	Sub Kegiatan 1.2.2.20 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.20** Terkelolanya Dana BOS Sekolah Menengah Pertama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	13.299.292.000	13.077.811.805	98,33%	64	64	100%	101.69%
	Sub Kegiatan 1.2.2.21 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.21** Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.116.309.000	1.069.434.000	95,80%	11453	16453	144%	150.31%
	Sub Kegiatan 1.2.2.22 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.22** Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	39.952.000	19.404.000	48,56%	180	180	100%	205.93%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
	Sub Kegiatan 1.2.2.23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.23** Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	42.404.000	-	-	1	-	-	
	Sub Kegiatan 1.2.2.24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.24** Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50.000.000	19.392.500	38,78%	50	50	100%	257.86%
	Sub Kegiatan 1.2.2.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.25** Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38.781.700	29.277.000	75,49%	4	4	100%	132.46%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.2.26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.26** Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	38.781.700	21.082.000	54,36%	4	2	50%	91.97%
	Sub Kegiatan 1.2.2.27 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.27** Terlaksananya Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	27.775.750	22.339.750	80,42%	2	1	50%	62.17%
	Sub Kegiatan 1.2.2.28 Pembangunan Ruang Kelas Baru **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.28** Terbangunnya Ruang Kelas Baru **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.571.679.000	788.476.278	50,16%	9	5	50%	99.68%
	Sub Kegiatan 1.2.2.29 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.29**	9.962.989.850	9.948.154.850	99,85%	100	100	100%	100.15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan							
	Sub Kegiatan 1.2.2.30 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.30** Terlaksananya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.200.000.000	1.199.718.415	99,97%	600	600	100%	100.03%
	Sub Kegiatan 1.2.2.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.31** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	37.287.500.000	33.892.501.607	90,89%	100	100	100%	110.02%
	Sub Kegiatan 1.2.2.32 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.32** Terehabilitasinya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	396.885.500	394.088.455	99,73%	2	2	100%	100.27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.2.33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.2.33** Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6.472.390.000	6.464.920.202	4,87%	7	7	100%	205.33%
	Kegiatan 1.2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Sasaran Kegiatan 1.2.3** Meningkatkan kualitas standar layanan pendidikan lembaga PAUD **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	83.390.031.308	64.418.255.662	77,25%	38	71	187%	242%
	Sub Kegiatan 1.2.3.1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.1** Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5.385.716.890	4.371.071.767	81,16%	29	24	82%	101,03%
	Sub Kegiatan 1.2.3.2 Pengadaan Mebel PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.2** Terlaksananya Pengadaan Mebel PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	550.000.000	545.573.669	99,19%	152	152	100%	100,8%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.3.3 Pengadaan Perlengkapan PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.3** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	300.000.000	299.197.150	99,73%	1	1	100%	100,3%
	Sub Kegiatan 1.2.3.4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.4** Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13.354.648.000	-	-	150	-	0%	0%
	Sub Kegiatan 1.2.3.5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.5** Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	24.973.995.680	24.959.995.680	99,94%	12	12	100%	100%
	Sub Kegiatan 1.2.3.6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.6** Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	918.694.950	869.659.280	94,66%	50	50	100%	105,64%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
	Sub Kegiatan 1.2.3.7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.7** Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.113.689.000	879.534.104	78,97%	17	17	100%	126,63%
	Sub Kegiatan 1.2.3.8 Pengelolaan Dana BOP PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.8** Terkelolanya Dana BOP PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	7.672.872.000	4.992.797.400	65,07%	300	300	100%	153,68%
	Sub Kegiatan 1.2.3.9 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.9** Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	67.499.650	55.999.650	82,96%	100	150	150%	180,8%
	Sub Kegiatan 1.2.3.10 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.10**	46.886.000	-	-	4	-	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
	Sub Kegiatan 1.2.3.11 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.11** Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	49.999.680	41.345.000	82,69%	4	4	100%	120,9%
	Sub Kegiatan 1.2.3.12 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.12** Tersedianya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20.000.000	-	-	2	-	0%	0%
	Sub Kegiatan 1.2.3.13 Pembangunan Ruang Kelas Baru **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.13** Terbangunnya Ruang Kelas Baru **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3.018.278.500	2.437.266.467	80,75%	12	9	81%	100,3%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.3.14 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.14** Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	99.999.958	-	-	100	-	0%	0%
	Sub Kegiatan 1.2.3.15 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.15** Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	22.364.000.000	22.129.173.975	98,94%	1	1	100%	101,07%
	Sub Kegiatan 1.2.3.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.16** Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	197.932.000	197.160.600	99,61%	2	2	100%	100,4%
	Sub Kegiatan 1.2.3.17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.17**	1.081.890.000	790.431.000	73,06%	9	7	74%	101,28%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia							
	Sub Kegiatan 1.2.3.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.3.18** Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.173.929.000	1.849.049.920	85,05%	14	12	84%	98,76%
	Kegiatan 1.2.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Kegiatan 1.2.4** Meningkatnya Jumlah lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase lembaga PKBM yang terakreditasi minimal B	6.361.436.344	5.167.727.476	81,24%	48	57	119%	146,47%
	Sub Kegiatan 1.2.4.1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.1** Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50.000.000	-	-	40	-	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.4.2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.2** Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.999.550	40.499.550	57,85%	20	-	0%	0%
	Sub Kegiatan 1.2.4.3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.3** Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	39.999.950	-	-	30	-	0%	0%
	Sub Kegiatan 1.2.4.4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.4** Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20.000.000	-	-	10	-	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 1.2.4.5 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.5** Terkelolanya Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3.797.300.000	3.211.383.000	84,57%	17	17	100%	118,24%
	Sub Kegiatan 1.2.4.6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.6** Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.984.844	32.429.800	79,12%	4	4	100%	126,39%
	Sub Kegiatan 1.2.4.7 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.7** Terehabilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	510.886.000	301.948.346	59,10%	1	1	61%	103,21%
	Sub Kegiatan 1.2.4.8 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.8** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	389.400.000	375.133.880	96,33%	5	3	99.87%	102,63%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan							
	Sub Kegiatan 1.2.4.9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 1.2.4.9** Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.442.866.000	1.206.332.900	83,60%	4	4	86%	102,87%
	Program 1.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan **Sasaran Program** Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan **Indikator Kinerja Program** Persentase Penurunan Pemuda NEET (Not in Employment, Education, or Training)	6.770.699.626	5.947.493.343	87,84%	2,50	2,04	81,60%	92,89%
	Kegiatan 1.3.1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 1.3.1** Terwujudnya kemandirian pemuda melalui pemenuhan hak dan kewirausahaan pemuda **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pemuda yang mandiri	3.547.884.976	3.264.587.267	92,02%	3	3	100%	108,67%
	Sub Kegiatan 1.3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha	714.433.174	494.598.800	69,23%	300	358	119,33%	172,36%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	pemula Tingkat Kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 1.3.1.1** Terlaksananya Workshop/Bimtek/Pelatihan Wirausahawan Muda Pemula **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.							
	Sub Kegiatan 1.3.1.2 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota. **Sasaran Sub Kegiatan 1.3.1.2** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak pemuda di Tingkat Kabupaten. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi.	-	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan 1.3.1.3 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota. **Sasaran Sub Kegiatan 1.3.1.3** Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia.	2.833.451.802	2.769.988.467	97,76%	4	4	100%	102,3%
	Kegiatan 1.3.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.222.814.650	2.682.906.076	83,25%	18	18	100%	120,12%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 1.3.2 Terselenggaranya peningkatan kapasitas manajerial pemuda dan organisasi kepemudaaan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang meningkat kapasitasnya							
	Sub Kegiatan 1.3.2.1 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 1.3.2.1** Telaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	764.780.500	347.790.600	45,48%	1.500	1.500	100%	219,8%
	Sub Kegiatan 1.3.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda ingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 1.3.2.2** Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda ingkat Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	2.458.034.150	2.335.115.476	95,00%	1.500	1.500	100%	105,26%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan kepemudaan							
	Program 1.4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Kepramukaan **Indikator Kinerja Program** Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif	2.333.052.500	2.223.670.630	95,31%	18,18	18,18	100%	104,92
	Kegiatan 1.4.1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan **Sasaran Kegiatan 1.4.1** Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah organisasi Kepramukaan yang mengikuti pelatihan manajemen organisasi	2.333.052.500	2.223.670.630	95,31%	5	4	80%	83,94%
	Sub Kegiatan 1.4.1.1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 1.4.1.1** Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan Daerah **Indikator Kinerjas Sub Kegiatan** Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	981.638.000	882.886.490	89,94%	4	4	100%	111%
	Sub Kegiatan 1.4.1.2 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 1.4.1.2**	1.351.414.500	1.340.784.140	99,21	5	5	100%	100,8%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan							
2	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat **Indikator Kinerja SS** Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting				74 22,6	74,03 23,2	100,04% 97,34%	
	Program 2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan **Sasaran Program** Meningkatnya Jangkauan dan Edukasi Bidang Kesehatan **Indikator Kinerja Program** Persentase FKTP yang Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	2.681.548.600	2 .584.147.740	96,37%	100 17	100 40	100% 235%	173,8%
	Kegiatan 2.1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 2.1.1** Meningkatkan jangkauan dan efektivitas jangkauan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Media Promosi Kesehatan (Cetak, Elektronik dll) Persentase Posyandu Aktif Yang Dibina	2 .217.732.500	2 .161.210.090	97,45%	5 90,48%	5 99%	100% 109%	107,23%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.1.1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat. **Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1.1** Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.	2.217.732.500	2.161.210.090	97,45%	1	1	100%	102,6%
	Kegiatan 2.1.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.2.1** Meningkatnya pelaksanaan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat **Indikator Kinerja Kegiatan** Cakupan Indikator PHBS Puskesmas Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas) Persentase Puskesmas Yang Dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	20.564.000	20.501.000	99,69%	 15% 28 100	 40 28 100	 267% 100% 100%	156,15%
	Sub Kegiatan 2.1.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat. **Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2.1** Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	20.564.000	20.501.000	99,69%	3	3		

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.1.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.3.1** Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Puskesmas Yang Dilakukan Pembinaan UKBM	443.252.100	422.937.650	95,42%	100	100	100%	104,8%
	Sub Kegiatan 2.1.3.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). **Sasaran Sub Kegiatan 2.1.3.1** Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	443.252.100	422.937.650	95,42%	1	1	100%	104,8%
	Program 2.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat **Sasaran Program** Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau **Indikator Kinerja Program** Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	197.260.483.277	162.149.098.620	82,20	 65 100	 65 100	 100% 100%	121,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota **Sasaran Kegiatan 2.2.1** Meningkatnya Akses dan Kualitas Sarana dan Sediaan Farmasi Kesehatan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar Persentase faskes lanjutan dengan SPA kesehatan sesuai standar Persentase kesesuaian realisasi pengadaan obat dan vaksin terhadap RKO dengan vaksin	117.220.491.524	94.167.176.884	80,33	 40 45 68	 51 66 68	 128% 147% 100%	155,60%
	Sub Kegiatan 2.2.1.1 Pembangunan Puskesmas **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.1** Terlaksananya Pembangunan Puskesmas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	27.743.179.000	27.376.280.673	98,68%	4	4	100%	101,3%
	Sub Kegiatan 2.2.1.2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.2** Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	23.720.368.000	23.328.123.068	98,35%	3	3	100%	101,67%
	Sub Kegiatan 2.2.1.3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.3**	3.336.671.000	3.264.082.768	97,82%	5	5	100%	102,22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas Tenaga Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun							
	Sub Kegiatan 2.2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.4** Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.979.702.000	20.411.964.021	97,29%	3	3	100%	102,78%
	Sub Kegiatan 2.2.1.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.5** Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4.338.960.000	3.979.628.695	91,72%	10	10	100%	109,02%
	Sub Kegiatan 2.2.1.6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.6** Terlaksananya Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5.333.833.000	5.244.290.457	98,32%	8	8	100%	101,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.2.1.7 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.7** Terlaksananya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17.706.880.961	17.218.331.906	97,24%	1406	1406	100%	102,83%
	Sub Kegiatan 2.2.1.8 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.8** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	786.470.613	644.468.335	81,94%	28	28	100%	122,04%
	Sub Kegiatan 2.2.1.9 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.9** Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasiliats Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	12.799.132.500	12.700.062.432	99,23%	6	6	100%	100,77%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
	Sub Kegiatan 2.2.1.10 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan. **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1.10** Terdistribusinya Alat Kesehatan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Mimuman ke Fasilitas Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan yang disediakan	475.294.450	411.908.550	86,66%	198	198	100%	115,4%
	Kegiatan 2.2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.2.2** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Pengembangan Standar Pelayanan Yang Berkualitas **Indikator Kinerja Kegiatan**	79.660.027.103	67.613.045.357	84,88%				101,41%
	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC				90	70	78%	
	Presentase Ibu Hamil ANC 6 kali				80	46,37	58%	
	Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar				91	80,08	88%	
	Persentase Persalinan di Fasyankes				70	62,48	89%	
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita				8,5	5,79	68%	
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan				20	42,45	212%	
	Persentase skrining DM				38,94	9,14	23%	
					0,09	0,05	56%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Insidensi HIV Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Cakupan skrining kesehatan Jiwa				20 75 50 10	20 62,47 53,10 7,21	100 83% 106% 72%	
	Sub Kegiatan 2.2.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.1** Terlaksananya pelayanan Ibu hamil sesuai standar Di FKTP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.777.068.310	1.710.590.000	96,26	6050	6050	100%	103,89%
	Sub Kegiatan 2.2.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.2** Terlaksananya pelayanan Ibu bersalin sesuai standar Di FKTP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357.619.300	277.001.000	77,46	5775	5775	100%	129,10%
	Sub Kegiatan 2.2.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.3** Terlaksananya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Di FKTP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244.462.300	158.701.145	64,92	5500	5500	100%	154,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.2.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.4** Terlaksananya pelayanan kesehatan balita sesuai standar Di FKTP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.502.987	97.807.000	85,42	26436	26436	100%	117,07%
	Sub Kegiatan 2.2.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.5** Terlaksananya pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.264.767.879	1.143.177.000	90,39	3807	3807	100%	110,63%
	Sub Kegiatan 2.2.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.6** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104.322.350	99.978.350	95,84	75000	75000	100%	104,34%
	Sub Kegiatan 2.2.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.7** Terlaksananya skrining kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar Di FKTP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	150.513.640	135.986.000	90,35	18481	18481	100%	110,68%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							
	Sub Kegiatan 2.2.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.8** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90.763.800	88.076.300	97,04	3000	3000	100%	103,05%
	Sub Kegiatan 2.2.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.9** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.976.600	25.547.600	98,35	3000	3000	100%	101,68%
	Sub Kegiatan 2.2.2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.10** erlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	604.977.800	579.903.800	95,86	347	347	100%	104,32%
	Sub Kegiatan 2.2.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.11**	582.884.356	445.080.300	76,36	850	850	100%	130,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
	Sub Kegiatan 2.2.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.12** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penemuan orang yang beresiko terinfeksi HIV yang ditangani sesuai standar	181.654.508	125.754.000	69,23	4835	4835	100%	144,45%
	Sub Kegiatan 2.2.2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.13** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	14.564.300	12.892.300	88,52	28	28	100%	112,97%
	Sub Kegiatan 2.2.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.14** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.322.382.374	4.039.674.833	75,90	28	28	100%	131,75%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
	Sub Kegiatan 2.2.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.15** Terlaksananya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	493.884.357	474.128.857	96,00	28	28	100%	104,17%
	Sub Kegiatan 2.2.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.16** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lingkungan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	998.211.625	979.304.842	98,11	28	28	100%	101,93%
	Sub Kegiatan 2.2.2.17 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.17** Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	557.236.000	543.224.500	97,49	28	28	100%	102,57%
	Sub Kegiatan 2.2.2.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.18**	235.952.900	94.692.330	40,13	28	28	100%	249,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya							
	Sub Kegiatan 2.2.2.19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.19** Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.414.184.652	988.140.450	69,87	28	28	100%	143,12%
	Sub Kegiatan 2.2.2.20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.20** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	317.868.609	291.705.300	91,77%	347	347	100%	108,97%
	Sub Kegiatan 2.2.2.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.21** Terkelolanya Sistem Informasi KesehatanTerlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA **Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	124.054.850	117.028.350	94,34%	347	347	100%	106,00%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.2.2.22 Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.22** Terkelolanya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	18.679.500	17.007.500	91,05%	1	1	100%	109,83%
	Sub Kegiatan 2.2.2.23 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.23** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.653.737.211	4.027.618.988	86,55%	28	28	100%	115,54%
	Sub Kegiatan 2.2.2.24 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.24** Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	44.437.746.984	40.307.567.625	90,71%	4	4	100%	110,24%
	Sub Kegiatan 2.2.2.25 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Di Fasyankes dan Sekolah **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.25**	5.284.850	5.223.350	98,84%	347	347	100%	101,17%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah							
	Sub Kegiatan 2.2.2.26 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.26** Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	178.808.102	100.410.081	56,16%	12	12	100%	178,06%
	Sub Kegiatan 2.2.2.27 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.27** Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	132.298.440	131.946.694	99,73%	1	1	100%	100,27%
	Sub Kegiatan 2.2.2.28 Operasional Pelayanan Puskesmas **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.28** Terselenggaranya Operasional Pelayanan Puskesmas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9.770.751.891	7.954.134.629	81,41%	28	28	100%	122,84%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.2.2.29 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.29** Terselenggaranya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	752.405.000	587.783.899	78,12%	1	1	100%	128,01%
	Sub Kegiatan 2.2.2.30 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.30** Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	375.838.000	363.775.834	96,79%	28	28	100%	103,32%
	Sub Kegiatan 2.2.2.31 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.31** Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	77.794.204	72.407.000	93,08%	1	1	100%	107,43%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.2.2.32 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.32** Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	64.928.610	60.593.000	93,32%	1	1	100%	107,16%
	Sub Kegiatan 2.2.2.33 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.33** Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	333.310.000	325.513.000	97,66%	1	1	100%	102,40%
	Sub Kegiatan 2.2.2.34 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.34** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang dengan Tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	44.238.507	31.153.500	70,42	350	350	100%	142,01%
	Sub Kegiatan 2.2.2.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.35**	87.756.411	61.925.900	70,57%	12	12	100%	141,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
	Sub Kegiatan 2.2.2.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.35** Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Malaria **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	201.261.758	165.414.400	82,19%	32	32	100%	121,67%
	Sub Kegiatan 2.2.2.36 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.36** Terlaksananya Kawasan tanpa Rokok **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	74.905.700	69.825.200	93,22%	5	5	100%	107,27%
	Sub Kegiatan 2.2.2.37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.37** Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	741.382.158	730.497.000	98,53%	1	1	100%	101,49%
	Sub Kegiatan 2.2.2.38 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.38**	262.399.280	171.853.500	65,49%	1	1	100%	152,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak							
	Sub Kegiatan 2.2.2.39 Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.39** Terlaksananya pengelolaanpPelayanan kelanjutusiaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	863.124.000	851.905.500	98,70%	1	1	100%	101,32%
	Sub Kegiatan 2.2.2.40 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2.40** Terlaksananya pengelolaan layanan imunisasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	1.605.523.000	1.605.523.000	100%	1	1	100%	100,00%
	Kegiatan 2.2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi **Sasaran Kegiatan 2.2.3** Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ketersediaan Data dan informasi Kesehatan di Puskesmas	379.964.650	3 68.876.379	97,08%	100	100	100%	103%
	Sub Kegiatan 2.2.3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.2.3.1**	379.964.650	3 68.876.379	97,08%	1	1	100%	103%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
	Program 2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan **Sasaran Program** Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan **Indikator Kinerja Program** Persentase Fasyankes dengan Jenis SDMK Sesuai Standar	29.472.332.950	23.990.602.975	81,40%	75	100	133%	163,40%
	Kegiatan 2.3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.3.1** Teregistrasinya Tenaga Kesehatan Sesuai dengan Kompetensi Yang Dimiliki **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Tenaga Kesehatan yang Teregistasi Aktif dan Memiliki SIP	93.739.000	78.303.652	83,53%	18,54	18,54	100%	119,71%
	Sub Kegiatan 2.3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.1.1** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	93.739.000	78.303.652	83,53%	9	9	100%	119,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.3.2** Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan Kompetensi sesuai Standart di Fasilitas Layanan Kesehatan **Indikator Kinerja Kegiatan** Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	27.746.189.000	22.646.231.541	81,62%	8:1000	8:1000	100%	122,51%
	Sub Kegiatan 2.3.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.2.1** Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	27.670.713.000	22.573.169.095	81,58%	1200	1080	90%	110,32%
	Sub Kegiatan 2.3.2.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.2.2** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.476.000	73.062.446	96,80%	1	1	100%	103,30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.3.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah **Sasaran Kegiatan 2.3.3** Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Standar **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	1.632.404.950	1.266.067.782	77,56%	 10,04% 50% 60%	 10,04% 50% 60%	 100% 100% 100%	128,93%
	Sub Kegiatan 2.3.3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.3.1** Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.632.404.950	1.266.067.782	77,56%	65	65	100%	128,93%
	Program 2.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman **Sasaran Program** Meningkatnya Pengelolaan dan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	878.444.004	322.897.411	36,76%				272%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase Fasyankes Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai standar				90 83 75	90 83 75	100% 100% 100%	
	Kegiatan 2.4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) **Sasaran Kegiatan 2.4.1** Meningkatnya Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pemberian surat rekomendasi untuk izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	306.420.504	244.162.000	79,68%	100	100	100%	125,50%
	Sub Kegiatan 2.4.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) **Sasaran Sub Kegiatan 2.4.1.1** Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	306.420.504	244.162.000	79,68%	100	100	100%	125,50%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga **Sasaran Kegiatan 2.4.2** Meningkatnya Mutu Sediaan Makanan Minuman Sesuai Standar **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaku Usaha Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang Diberikan Sertifikat Keamanan Pangan	445.051.300	322.897.411	72,55%	100	100	100%	137,83%
	Sub Kegiatan 2.4.2.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga **Sasaran Sub Kegiatan 2.4.2.1** Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	445.051.300	322.897.411	72,55%	100	100	100%	137,83%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.4.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga **Sasaran Kegiatan 2.4.3** Meningkatnya Mutu Sediaan Makanan Minuman Melalui Pemeriksaan Post Market **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penilaian Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	126.972.200	87.372.669	68,81%	80	90	113%	
	Sub Kegiatan 2.4.3.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan **Sasaran Sub Kegiatan 2.4.3.1** Terlaksananya Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	126.972.200	87.372.669	68,81%	15	14	93%	135,15%
	Program 2.5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan **Sasaran Program** Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga **Indikator Kinerja Program** Persentase Atlet Berprestasi	48.590.715.561	30.863.436.680	63,52%	16,67	21,80	130,77%	205,89%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 2.5.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.5.1** Tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi sarana prasarana olahraga yang disediakan dan difungsikan	18.547.997.500	8.543.071.292	46,06%	7	7	100%	217,11%
	Sub Kegiatan 2.5.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.1.1** Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan terpelihara (Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia)	18.547.997.500	8.543.071.292	46,06%	21	19	90,48%	196,43%
	Kegiatan 2.5.2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.5.2** Terselenggaranya kompetisi pekan dan kejuaraan olahraga **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	16.140.669.080	12.426.550.897	76,99%	5	5	100%	129,89%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 2.5.2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.2.1** Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.219.753.300	1.089.874.660	89,35 %	5	5	100,00%	111,92%
	Sub Kegiatan 2.5.2.2 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.2.2** Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	14.920.915.780	11.336.676.237	75,98 %	950	808	85,05%	111,94%
	Kegiatan 2.5.3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi **Sasaran Kegiatan 2.5.3** Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah cabang olahraga beserta pelatih yang dibina	319.865.000	188.138.000	58,82%	5	5	100%	170,02%
	Sub Kegiatan 2.5.3.1 Seleksi Atlet Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.3.1** Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi							
	Sub Kegiatan 2.5.3.2 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.3.2** Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penerima Penghargaan olahraga	319.865.000	188.138.000	58,82%	56	59	105,36%	179,12
	Kegiatan 2.5.4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga **Sasaran Kegiatan 2.5.4** Terselenggaranya kerjasama organisasi keolahragaan daerah secara berkelanjutan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah kerja sama/kemitraan organisasi olahraga yang difasilitasi	3.250.000.000	3.096.559.750	95,28%	5	4	80%	83,96%
	Sub Kegiatan 2.5.4.1 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.4.1** Terlaksananya Kemitraan Organisasi Keolahragaan Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3.250.000.000	3.096.559.750	95,28%	4	4	100,00%	104,96
	Kegiatan 2.5.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	10.332.183.981	6.609.116.741	63,97%	10	10	100%	156,33%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 2.5.5 Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan olahraga rekreasi tingkat daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah kegiatan olahraga rekreasi yang diselenggarakan							
	Sub Kegiatan 2.5.5.1 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.5.1** Terlaksananya Pemasyarakatan Olahraga **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	963.077.831	962.343.831	99,92%	2	2	100%	100,08%
	Sub Kegiatan 2.5.5.2 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.5.2** Terlaksananya Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	8.590.032.950	4.870.478.010	56,70%	9	7	100%	137,18%
	Sub Kegiatan 2.5.5.3 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.5.3** Terlaksananya Olahraga Tradisional dalam Masyarakat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	278.791.700	276.133.700	99,05%	2	2	100%	100,96%
	Sub Kegiatan 2.5.5.4	500.281.500	500.161.200	99,98%	11	11	100%	100,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan **Sasaran Sub Kegiatan 2.5.5.4** Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Olahraga Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan							
3.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender Dimasyarakat **Indikator Kinerja SS** Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks Ketimpangan Gender				42,99 0,52	64,23 0,554	149,40% 93,46%	
	Program 3.1 Program Peningkatan Kualitas Keluarga **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, Pemenuhak Hak, serta Perlindungan perempuan dan Anak **Indikator Kinerja Program** Persentase keluarga yang terlayani dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di lembaga PUSPAGA	347.996.100	303.446.895	87,20%	100	100	100%	114,67%
	Kegiatan 3.1.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 2.1.1** Meningkatnya pemahaman keluarga mengenai kesetaraan	347.996.100	303.446.895	87,20%	100	100	100%	114,67%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	gender dalam kehidupan rumah tangga, pengasuhan, dan pengambilan keputusan keluarga **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah							
	Sub Kegiatan 2.3.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.1.1** Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	250.026.000,00	209.937.795,00	83,97%	3	3	100%	
	Sub Kegiatan 2.3.1.2 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 2.3.1.2** Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	97.970.100,00	93.509.100,00	95,45%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 3.2 Program Pengendalian Penduduk **Sasaran Program** Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun **Indikator Kinerja Program** kelahiran hidup per 1000 perempuan	1.459.450.410	1.340.282.497	91,83%	31,80	31,80	100%	108,89%
	Kegiatan 3.2.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk **Sasaran Kegiatan 3.2.1** Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan lintas wilayah, dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	256.849.500	218.443.500	85,05%	100	100	100%	117,57%
	Sub Kegiatan 3.2.1.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.1.1** Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota.	256.849.500,00	218.443.500,00	85,05	100	100	100%	
	Kegiatan 3.2.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	256.849.500	1.121.838.997	93,28%	100	100	100%	107,20%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 3.2.2 Meningkatnya keterpaduan data kependudukan dan data keluarga, sebagai dasar dalam perencanaan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk **Indikator Kinerja Kegiatan** Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga (SIGA)							
	Sub Kegiatan 3.2.2.1 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan. **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.2.1** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.	124.846.910,00	89.971.000,00	72,07%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.2.2.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.2.2** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.	60.000.000,00	47.309.500,00	78,85%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.2.2.3 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.2.3** Terlaksanannya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga. **Indikator Sub Kegiatan**	121.200.000,00	119.400.000,00	98,51%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan.							
	Sub Kegiatan 3.2.2.4 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.2.4** Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	90.654.500,00	79.419.500,00	87,61%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.2.2.5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. **Sasaran Sub Kegiatan 3.2.2.5** Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.	738.000.000,00	737.918.497,00	99,99%	100	100	100%	
	Program 3.3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak **Sasaran Program** Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak **Indikator Kinerja Program** Persentase ketersediaan data dasar gender dan anak tingkat kota	48.715.500	43.299.123	88,88%	100	100	100%	112,51%
	Kegiatan 3.3.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.3.1** Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan	48.715.500	43.299.123	88,88%	100	100	100%	112,51%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	kelompok umur secara lengkap, akurat, dan terkini pada berbagai sektor pembangunan di tingkat kabupaten **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Tersedianya Updating Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola							
	Sub Kegiatan 3.3.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 3.3.1.1** Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia.	48.715.500	43.299.123	88,88%	1	1	100%	
Program 3.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) **Sasaran Program** Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB) **Indikator Kinerja Program** Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern		3.448.411.000	2.907.578.301	84,32%	100	100	100%	118,59%
	Kegiatan 3.4.1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal **Sasaran Kegiatan 3.4.1** Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan program KB melalui pendekatan budaya lokal yang mudah diterima	1.579.912.000	1.286.518.700	81,43%	100	100	100%	122,80%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Sub Kegiatan 3.4.1.1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.1.1** Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	525.000.000,00	512.200.000,00	97,56%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.4.1.2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok). **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.1.2** Terlaksananya Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), RapatKoordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok). **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui RapatKoordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	420.000.000,00	259.335.000,00	61,75%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
	Sub Kegiatan 3.4.1.3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.1.3** Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Lokal	355.408.500,00	322.785.200,00	90,82%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.4.1.4 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.1.4** Terlaksananya Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepadaStakeholders dan Mitra Kerja	279.503.500,00	192.198.500,00	68,76%	100	100	100%	
	Kegiatan 3.4.2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) **Sasaran Kegiatan 3.4.2** Meningkatnya kinerja dan profesionalisme PKB/PLKB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan	693.563.000	630.838.831,00	90,96%	100	100	100%	109,93%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terhadap Jumlah Desa/Kelurahan							
	Sub Kegiatan 3.4.2.1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.2.1** Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).	693.563.000,00	630.838.831,00	90,96%	100	100	100%	
	Kegiatan 3.4.3 Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terhadap Jumlah Desa/Kelurahan **Sasaran Kegiatan 3.4.3** Tersedianya alat dan obat kontrasepsi (alokon) secara cukup, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu sesuai kebutuhan pelayanan KB di Kabupaten **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Faskes yang menerima alokon serta pelaksanaan pelayanan KB Daerah	451.436.000	398.340.770	88,24%	100	100	100%	113,32%
	Sub Kegiatan 3.4.3.1 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.3.1** Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	290.021.500,00	245.449.270,00	84,63%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 3.4.3.2 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.3.2** Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.	161.414.500,00	152.891.500,00	94,72%	100	100	100%	
	Kegiatan 3.4.4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB **Sasaran Kegiatan 3.4.4** Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	723.500.000	591.880.000	81,81%	100	100	100%	122,23%
	Sub Kegiatan 3.4.4.1 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.4.1** Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB **Indikator Sub Kegiatan**	168.000.000,00	146.730.000,00	87,34%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
	Sub Kegiatan 3.4.4.2 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas **Sasaran Sub Kegiatan 3.4.4.2** Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	555.500.000,00	445.150.000,00	80,14%	100	100	100%	
	Program 3.5 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas penyelanggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan **Indikator Kinerja Program** Persentase ARG pada APBD	877.417.000	767.043.538	87,42%	100	100	100%	114,39%
	Kegiatan 3.5.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.5.1** Meningkatnya Persentase OPD yang melaksanakan PPRG **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Lembaga Pemerintah yang melaksanakan PUG	145.096.000	116.526.934	80,31%	100	100	100%	124,51%
	Sub Kegiatan 3.5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG **Sasaran Sub Kegiatan 3.5.1.1**	145.096.000	116.526.934	80,31%	1	1	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG							
	Kegiatan 3.5.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.5.2** Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penguatan dan Pengembangan	732.321.000	650.516.604	88,83%	100	100	100%	112,57%
	Sub Kegiatan 3.5.2.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 3.5.2.1** Terlaksananya Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.	732.321.000	650.516.604	88,83%	3	3	100%	
	Program 3.6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.407.695.700	1.174.146.310	83,41%	60	60	100%	199,88%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif **Indikator Kinerja Program** Indeks Pemenuhan Hak Anak							
	Kegiatan 3.6.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.6.1** Meningkatnya jumlah lembaga ramah anak, seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, kantor pelayanan publik ramah anak, serta dunia usaha yang mendukung perlindungan anak **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Jumlah Forum Anak daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang sudah terbentuk	1.243.774.200	1.044.709.329	84%	100	100	100%	106,38%
	Sub Kegiatan 3.6.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 3.6.1.1** Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah SDM embaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek.	1.243.774.200	1.044.709.329	84%	2	2	100%	106,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 3.6.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.6.2** Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan anak yang layak, aman, inklusif, dan ramah anak **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Jumlah Forum Anak daerah yang terfasilitasi	163.921.500	129.436.981	78,96%	100	100	100%	126,64%
	Sub Kegiatan 3.6.2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 3.6.2.1** Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	163.921.500	129.436.981	78,96%	1	1	100%	126,64%
	Program 3.7 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) **Sasaran Program** Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) **Indikator Kinerja Program** Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	2.154.169.600	2.029.648.102	94,22%	100	100	100%	106,13%
	Kegiatan 3.7.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	583.369.600	459.448.102	78,76%	100	100	100%	126,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 3.7.1 Terbentuknya kelompok kegiatan bina keluarga (seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang aktif di tingkat desa/kelurahan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Sub Kegiatan 3.7.1.1 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.1.1** Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).	182.400.000,00	138.525.000,00	75,95%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.7.1.2 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.1.2** Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	74.921.600,00	60.173.100,00	80,31%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS))							
	Sub Kegiatan 3.7.1.3 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)). **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.1.3** Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia).	155.063.000,00	119.950.001,00	77,36%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 3.7.1.4 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.1.4** Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UsahaPeningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	103.087.000,00	89.951.001,00	87,26%	100	100	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).							
	Sub Kegiatan 3.7.1.5 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.1.5** Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)). **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk).	67.898.000,00	50.849.000,00	74,89%	100	100	100%	
	Kegiatan 3.7.2 aksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.570.800.000	1.570.200.000	99,96%	100	100	100%	100,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 3.7.2 Terintegrasinya peran Pemerintah dan Organisasi Masyarkat dalam strategi pembinaan keluarga berisiko, termasuk keluarga miskin, keluarga berisiko stunting, dan keluarga dengan permasalahan sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase TPK dalam Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting							
	Sub Kegiatan 3.7.2.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). **Sasaran Sub Kegiatan 3.7.2.1** Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)). **Indikator Sub Kegiatan** Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)).	714.000.000,00	714.000.000,00	100%	100	100	100%	100,04%
	Program 3.8 Program Perlindungan Khusus Anak **Sasaran Program** Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekspoitasi, penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	213.958.600	164.063.926	77%	0,03	0,03	100%	129,87%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif							
	Kegiatan 3.8.1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.8.1** Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.958.600	164.063.926	77%	0,03	0,03	100%	129,87%
	Sub Kegiatan 3.8.1.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 3.8.1.1** Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegiatan** Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	213.958.600	164.063.926	77%	0,03	0,03	100%	129,87%
	Program 3.9 Program Perlindungan Perempuan **Sasaran Program**	251.783.300	197.923.196	78,61%	85	85	100%	127,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO **Indikator Kinerja Program** Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif							
	Kegiatan 3.9.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 3.9.1** Terlaksanya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan	251.783.300	197.923.196	78,61%	85	85	100%	127,21%
	Sub Kegiatan 3.9.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasasaran Kegiatan 3.9.1.1** Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Persentase advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	251.783.300,00	197.923.196,00	78,61%	85	85	100%	127,21%
4.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah **Indikator Kinerja SS** Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				 3,23 4,14 5,4	 4,94 7,52 7,29	 152,94% 181,64% 135%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				9,25	11,68	126,27%	
	Program 4.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap **Sasaran Program** Meningkatnya produksi perikanan tangkap **Indikator Kinerja Program** Jumlah produksi perikanan nelayan tangkap (ton)	31.410.178.654	26.179.561.440	83,35%	85.535,24	85.779,00	100.28%	120.32%
	Kegiatan 4.1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 4.1.1** Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan yang baik **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase sarana prasarana penangkapan ikan (%)	30.591.652.650	25.454.662.864	83,21%	100	97,21	97,21%	116,83%
	Sub Kegiatan 4.1.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1** Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen).	85.327.900	82.245.626	96,39%	4	4	100%	103.74%
	Sub Kegiatan 4.1.1.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.2** Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	8.076.678.750	5.651.959.102	69,98%	120	114	95%	135.75%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit).							
	Sub Kegiatam 4.1.1.3 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.3** Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (unit).	22.429.646.000	19.720.458.136	87,92%	30	29	98%	111.38%
	Kegiatan 4.1.2 Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.1.2** Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kelompok nelayan yang eningkat kapasitasnya	300.215.250	229.180.005	76,34%	100	100	100%	131%
	Sub Kegiatan 4.1.2.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.1** Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (orang).	60.155.850	54.841.614	91,17%	200	200	100%	109.68%
	Sub Kegiatan 4.1.2.2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.2** Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	60.182.500	42.355.000	70,38%	1	1	100%	142.08%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok).							
	Sub Kegiatam 4.1.2.3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.3** Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha).	78.081.500	63.066.500	80,77%	2	2	100%	123.80%
	Sub Kegiatan 4.1.2.4 Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (unit usaha). **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.4** Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit Usaha)	101.795.400	68.916.891	67,70%	2	2	100%	147.71%
	Kegiatan 4.1.3 Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) **Sasaran Kegiatan 4.1.3** Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	126.048.150	124.078.854	98.44%	100	100	100%	101,59%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiata Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan							
	Sub Kegiatan 4.1.3.1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.3.1** Tersedianya layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	126.048.150	124.078.854	98,44%	1	1	100%	101.58%
	Kegiatan 4.1.4 Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota **Sasaran Kegiatan 4.1.4** Meningkatnya kepemilikan tanda daftar kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kapal perikanan berukuran sampai 10 GT yang memiliki tanda daftar kapal perikanan	293.956.604	279.597.834	95.12%	100	100	100%	105,14%
	Sub Kegiatan 4.1.4.1 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.4.1** Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	136.733.604	129.871.844	94,98%	500	500	100%	105.28%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (rekomendasi).							
	Sub Kegiatan 4.1.4.2 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.4.2** Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (rekomendasi)	92.247.000	89.527.990	97,05%	8000	8000	100%	103.03%
	Sub Kegiatan 4.1.4.3 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap. **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.4.3** Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (dokumen).	64.976.000	60.198.000	92,65%	1	1	100%	107.93%
	Kegiatan 4.1.5 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota **Sasaran Kegiatan 4.1.5** Meningkatnya kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki buku kapal perikanan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase persentase kapal perikanan berukuran sampai 10GT yang memiliki tanda daftar kapal perikanan	98.306.000	92.041.883	93,63%	100	100	100%	106,81%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.1.5.1 Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP). **Sasaran Sub Kegiatan 4.1.5.1** Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (rekomendasi).	98.306.000	92.041.883	93,63	2000	2000	100%	106.80%
	Program 4.2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya **Sasaran Program** Meningkatnya produksi perikanan budidaya **Indikator Kinerja Program** Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	47.034.870.789	36.289.374.087	77,15%	35.702,98	35.702,98	100%	129,61%
	Kegiatan 4.2.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 4.2.1** Meningkatnya sarana prasarana penangkapan ikan yang baik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sarana prasarana penangkapan ikan (%)	83.836.000	83.358.000	99,43%	100	100	100%	100,57%
	Sub Kegiatan 4.2.1.1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	48.925.500	48.471.500	99,07%	50	50	100%	100.93%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 4.2.1.1 Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (rekomendasi).							
	Sub Kegiatan 4.2.1.2 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.1.2** Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak	34.910.500	34.886.500	99,93%	50	50	100%	100.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.							
	Kegiatan 4.2.2 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil **Sasaran Kegiatan 4.2.2** Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	357.085.500	350.251.600	98,09%	100	100	100%	101,95%
	Sub Kegiatan 4.2.2.1 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.2.1** Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok).	61.260.000	59.737.096	97,51%	3	3	100%	102.55%
	Sub Kegiatan 4.2.2.2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.2.2**	53.809.500	53.758.204	99,90%	3	3	100	100.10

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok).							
	Sub Kegiatan 4.2.2.3 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.2.3** Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (kelompok).	78.210.000	78.063.400	99,81%	3	3	100%	100.19%
	Sub Kegiatan 4.2.2.4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.2.4** Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok).	163.806.000	158.692.900	96,88%	3	3	100%	103.22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.2.3 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.2.3** Meningkatnya kepemilikan tada daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pembudidaya ikan kecil yang memiliki tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	73.477.000	71.392.000	97,16%	100	100	100%	102,92%
	Sub Kegiatan 4.2.3.1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.3.1** Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (rekomendasi).	39.063.000	36.982.000	94,67%	50	50	100%	105.63
	Sub Kegiatan 4.2.3.2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.3.2**	34.414.000	34.410.000	99,99%	50	50	100%	100.01%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (rekomendasi).							
	Kegiatan 4.2.4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan **Sasaran Kegiatan 4.2.4** Meningkatnya sarana prasarana pembudidayaan ikan yang baik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sarana prasarana pembudidayaan ikan	46.520.472.289	35.784.372.487	76,92%	100	95,56	95,56%	124,23%
	Sub Kegiatan 4.2.4.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.1** Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen).	179.636.000	179.053.842	99,68%	4	4	100%	100.32%
	Sub Kegiatan 4.2.4.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	41.273.682.289	30.965.757.838	75,03%	10	9	95%	126.61%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.2 Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit).							
	Sub Kegiatan 4.2.4.3 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.3** Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen).	391.844.500	385.190.232	98,30%	2	2	100%	101.72%
	Sub Kegiatan 4.2.4.4 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.4** Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen).	64.505.500	59.382.000	92,06%	1	1	100%	108.62%
	Sub Kegiatan 4.2.4.5 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.578.107.000	2.557.208.536	99,19%	2	2	100%	100.81%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.5 Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit).							
	Sub Kegiatan 4.2.4.6 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.6** Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	27.053.000	22.635.000	83,67%	3	3	100%	119.51%
	Sub Kegiatan 4.2.4.7 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.7** Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (unit).	56.800.000	51.871.180	91,32%	3	3	100%	109.50%
	Sub Kegiatan 4.2.4.8 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.8**	60.931.000	56.200.500	92,24%	1	1	100%	108.41%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (dokumen).							
	Sub Kegiatan 4.2.4.9 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan. **Sasaran Sub Kegiatan 4.2.4.9** Tersedianya Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia.	1.887.913.000	1.507.073.359	79,83%	2	2	100%	125.26%
	Program 4.3 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan **Sasaran Program** Terjaganya kelestarian ekosistem perairan umum daratan serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengawasan yang optimal **Indikator Kinerja Program** Jumlah perairan umum daratan/sungai, danau, waduk dan perairan lainnya yang di awasi (Ha) Jumlah lahan budidaya perikanan yang di awasi (Ha)	240.247.500	118.524.613	49,33%	 42,946 8.455	 42,946 8.455	 100% 100%	202,71%
	Kegiatan 4.3.1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	240.247.500	118.524.613	49,33%				202,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.3.1 Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan secara efektif, tepat waktu sesuai ketentuan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelaksanaan pengawasan perikanan tangkap Persentase pelaksanaan pengawasan perikanan budidaya				100 100	100 100	100% 100%	
	Sub Kegiatan 4.3.1.1 Operasi Kapal Pengawas Perikanan. **Sasaran Sub Kegiatan 4.3.1.1** Operasi Kapal Pengawas Perikanan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan (hari).	120.625.000	71.908.000	59,61%	2	2	100%	167.75%
	Sub Kegiatan 4.3.1.2 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.3.1.2** Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (pelaku usaha).	43.142.500	42.635.690	98,83%	30	30	100%	101.18%
	Sub Kegiatan 4.3.1.3 Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat. **Sasaran Sub Kegiatan 4.3.1.3** Tersedianya Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (unit).	76.480.000	3.980.923	5,21%	2	2	100%	1919.38%
	Program 4.4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.208.451.000	3.166.383.933	98,69%	73,13	72,11	98,61%	99,92%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya konsumsi ikan **Indikator Kinerja Program** Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)							
	Kegiatan 4.4.1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil **Sasaran Kegiatan 4.4.1** Meningkatnya kepemilikan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase usaha skala mikro kecil yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	233.910.000	213.605.043	91,32%	100	100	100%	109,51%
	Sub Kegiatan 4.4.1.1 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.1.1** Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** umlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (rekomendasi).	25.000.000	25.000.000	100%	12	12	100%	100%
	Sub Kegiatan 4.4.1.2 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.1.2**	65.000.000	64.538.130	99,29%	12	12	100%	100.71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (rekomendasi).							
	Sub Kegiatan 4.4.1.3 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.1.3** Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (dokumen).	143.910.000	124.066.913	86,21%	4	4	100%	115.99%
	Kegiatan 4.4.2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil **Sasaran Kegiatan 4.4.2** Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase hasil perikanan yang lulus uji	992.223.000	985.454.494	99,32%	100	100	100%	100,69%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.4.2.1 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.2.1** Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (unit usaha).	992.223.000	985.454.494	99,32%	5	5	100%	100.68%
	Kegiatan 4.4.3 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 4.4.3** Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan di wilayah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase data penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	1.982.318.000	1.967.324.396	99,24%	100	100	100%	100,76%
	Sub Kegiatan 4.4.3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.3.1**	518.200.000	510.997.254	98,61%	2100	2100	100%	101.40%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton).							
	Sub Kegiatan 4.4.3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 4.4.3.2** Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha).	1.464.118.000	1.456.327.142	99,47%	100	100	100%	100.53%
	Program 4.5 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Produktivitas Pertanian Meningkatnya Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian **Indikator Kinerja Program** Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Persentase Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Pertanian dan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian	12.342.690.690	8.154.765.913	66,07	 4,73 100 100	 4,57 100 100	 96,62% 100% 100%	149,64%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.5.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian **Sasaran Kegiatan 4.5.1** Meningkatnya Penggunaan Sarana Produksi Pertanian yang Tepat Guna **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tersedianya Sarana produksi Pertanian	7.029.745.690	4.055.968.264	57,70%	100	100	100%	173,31%
	Sub Kegiatan 4.5.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.1.1** Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.942.468.000	3.714.475.264	62,51%	4	4	100%	159,98%
	Sub Kegiatan 4.5.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.1.2** Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	484.903.000	341.493.000	70,43%	1	1	100%	142%
	Sub Kegiatan 4.5.1.3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	602.374.690	268.225.550	44,53%	300	300	100%	224,58%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 4.5.1.3 Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah benih bersertifikat tanaman hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak							
	Kegiatan 4.5.2 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.5.2** Meningkatnya Penyediaan Pakan Ternak yang Berkualitas **Indikator Kinerja Kegiatan** Kegiatan Persentase Jumlah Pakan Ternak yang Berkualitas	504.211.000	428.789.700	85,04%	100	100	100%	117,59%
	Sub Kegiatan 4.5.2.1 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.2.1** Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	504.211.000	428.789.700	85,04%	1	1	100%	117,59%
	Kegiatan 4.5.3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain **Sasaran Kegiatan 4.5.3** Meningkatnya Penyediaan Ternak	4.808.734.000	3.670.007.949	76,32%	4,5	4,5	100%	131,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Populasi Ternak							
	Sub Kegiatan 4.5.3.1 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.3.1** Tersedianya Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	362.139.000	286.708.100	79,17	2	2	100%	126,31%
	Sub Kegiatan 4.5.3.2 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah **Kabupaten/Kota Lain** **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.3.2** Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3.020.010.000	2.538.709.720	84,06	700	8.163	1.230,43 %	1.463,70%
	Sub Kegiatan 4.5.3.3 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain **Sasaran Sub Kegiatan 4.5.3.3** Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	1.426.585.000	844.590.129	59,20	1000	2500	250%	422,27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
	Program 4.6 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Perluasan Areal Tanam Pertanian Meningkatnya Produktivitas Pertanian Meningkatnya Kualitas Produk Olahan Hasil Pertanian **Indikator Kinerja Program** Rasio antara target dan realisasi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	51.700.721.000	20.290.672.654	39,25%	 50 3,8 	 50 3,8 	 100% 100% 	253,03%
	Kegiatan 4.6.1 Pengembangan Prasarana Pertanian **Sasaran Kegiatan 4.6.1** Meningkatnya Luas Tanam Pertanian Meningkatnya Standarisasi Perkebunan Meningkatnya kualitas produk Olahan Hasil pertanian **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah peningkatan Luas tanam pertanian Persentase Kebun Yang Terstandarisasi Persentase Kebun Yang Terstandarisasi	1.323.368.500	1.178.663.600	89,07%	 280,84 100 100	 280,84 100 100	 100% 100% 100%	112,27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.6.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.1.1** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.323.368.500	1.178.663.600	89,07%	1	1	100%	112,28%
	Kegiatan 4.6.2 Pembangunan Prasarana Pertanian **Sasaran Kegiatan 4.6.2** Meningkatkan Infrastruktur Prasarana Pertanian **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tersedianya infrastruktur Prasarana Pertanian	23.266.447.000	15.377.456.299	66,09%	100	90,32	90,32%	136,66%
	Sub Kegiatan 4.6.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.1** Terkelolanya Embung Pertanian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Embung Pertanian yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 4.6.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.2** Terkelolanya Jalan Usaha Tani **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	24.935.935.000	2.771.874.344	11,12%	1	0	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.6.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.3** Terkelolanya DAM PARIT **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah DAM PARIT yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 4.6.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.4** Terkelolanya Pintu Air **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pintu Air yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 4.6.2.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.5** Terkelolanya Balai Penyuluhan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Balai Penyuluhan yang dikelola	1.113.915.500	653.537.200	58,67%	4	4	100%	170,44%
	Sub Kegiatan 4.6.2.7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.7** Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Prasarana Petanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22.152.531.500	14.723.919.099	66,47%	51	46	90,20%	135,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.6.2.8 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.8** Terbangunnya dan Terehabilitasinya prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan yang dibangun dan yang direhabilitasi	854.635.500	256.828.256	30,05%	3	3	100%	332,77%
	Sub Kegiatan 4.6.2.9 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.2.9** Terbangunnya Terehabilitasinya Pemeliharaan dan Operasionalisasi Puskeswan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1.010.134.000	566.802.273	56,11%	3	3	100%	178,22%
	Kegiatan 4.6.3 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum **Sasaran Kegiatan 4.6.3** Meningkatnya Perluasan Areal Peternakan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Peningkatan Perluasan Areal Peternakan	310.201.000	139.047.882	44,83%	20,46	10,46	50%	111,53%
	Sub Kegiatan 4.6.3.1 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.3.1** Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	310.201.000	139.047.882	44,83%	20,46	10,46	50%	111,53%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan							
	Sub Kegiatan 4.6.3.2 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.3.2** Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 4.6.3.3 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum **Sasaran Sub Kegiatan 4.6.3.3** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	-	-	-	-	-	-	-
	Program 4.7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner **Sasaran Program** Meningkatnya Pengendalian Penyebaran Penyakit Hewan **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	373.446.000	348.282.890	93,26%	 2,54 12	 2,54 2,3	 100% 180%	150,11%
	Kegiatan 4.7.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	322.211.500	300.011.890	93,11%	14	10	71,43%	76,71%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.7.1** Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan							
	Sub Kegiatan 4.7.1.1 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.7.1.1** Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	322.211.500	300.011.890	93,11%	1	1	100%	107,40%
	Kegiatan 4.7.2 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner **Sasaran Kegiatan 4.7.2** Meningkatnya Pelayanan Keamanan Produk Hewan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pelayanan Keamanan Produk Hewan	51.234.500	48.271.000	94,22%	10	10	100%	106,13%
	Sub Kegiatan 4.7.2.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan **Sasaran Sub Kegiatan 4.7.2.1** Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	51.234.500	48.271.000	94,22%	1	1	100%	106,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 4.8 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian **Indikator Kinerja Program** Persentase penanganan bencana pertanian yang diselesaikan Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	981.481.750	857.343.775	87,35%	 25,4 -	 25,4 -	 100% -	114,4%
	Kegiatan 4.8.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.8.1** Luas Pengendalian Serangan OPT dan DPI Tanaman **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Luas Pengendalian Serangan OPT dan DPI Tanaman	981.481.750	857.343.775	87,35%	100	100	100%	114,48%
	Sub Kegiatan 4.8.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan **Sasaran Sub Kegatan 4.8.1.1** Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	981.481.750	857.343.775	87,35%	1	1	100%	114,48%
	Program 4.9 Program Penyuluh Pertanian **Sasaran Program** Meningkatnya Kelembagaan Pertanian	3.139.172.000	2.449.864.661	78,04%				128,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya Regenerasi Petani **Indikator Kinerja Program** Persentase SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi Persentase petani muda terhadap jumlah petani				 100 100 100	 100 100 100	 100% 100% 100%	
	Kegiatan 4.9.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian **Sasaran Kegiatan 4.9.1** Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh Pertanian Meningkatnya Kelembagaan Petani **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Kenaikan Klasifikasi Kelembagaan Penyuluh Pertanian Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Persentase Kelembagaan Ekonomi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.139.172.000	2.449.864.661	78,04%	 - 28 20	 - 28 20	 - 100% 100%	128,13%
	Sub Kegiatan 4.9.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa **Sasaran Sub Kegiatan 4.9.1.1** Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	481.096.650	345.090.650	71,73%	1	1	100%	139,41%
	Sub Kegiatan 4.9.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa **Sasaran Sub Kegiatan 4.9.1.2**	772.181.500	590.518.500	76,47%	5	5	100%	130,76%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
	Sub Kegiatan 4.9.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian **Sasaran Sub Kegiatan 4.9.1.3** Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.554.675.850	1.183.869.311	76,15%	50	50	100%	131,32%
	Sub Kegiatan 4.9.1.4 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian **Sasaran Sub Kegiatan 4.9.1.4** Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	331.218.000	330.386.200	99,75%	40	47	117,50%	117,80%
	Program 4.10 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam **Sasaran Program** Meningkatnya rekomendasi ijin Kantor cabang dan ijin usaha simpan pinjam **Indikator Kinerja Program** Persentase Rekomendasi Ijin Kantor Cabang dan Ijin Usaha Simpan Pinjam	35.026.000	33.842.000	96,6%	67	20	29,86%	30,90%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.10.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.10.1** Terselenggaranya fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	15.425.000	14.836.000	96,18%	26,67	26,67	100%	103,96%
	Sub Kegiatan 4.10.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.10.1.1** Validasi dan Verifikasi Dokumenn permohonan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil validasi dan verifikasi permohonan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	15.425.000	14.836.000	96,18%	4	4	100%	103,97%
	Program 4.11 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT **Indikator Kinerja Program** Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT	719.316.000	716.660.536	99,63%	39	28,2	72,32%	72,59%
	Kegiatan 4.11.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	719.316.000	716.660.536	99,63%	9,5	6	62,9%	63,2%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.11.1 Terselenggaranya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam							
	Sub Kegiatan 4.11.1.1 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi **Sasaran Sub Kegiatan 4.11.1.1** Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	629.475.000	627.827.036	99,74%	4	9	225%	225,59%
	Sub Kegiatan 4.11.1.2 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.11.1.2** Terselenggaranya Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	89.841.000	88.833.500	98,88%	4	7	175%	176,98%
	Program 4.12 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya KSP / USP Koperasi yang dinilai kesehatannya **Indikator Kinerja Program** Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	118.955.000	105.094.500	88,35%	6	6	100%	113,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.12.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.12.1** Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah KSP/ USP yang diberikan penilaian	118.955.000	105.094.500	88,35	25	25	100%	113,19%
	Sub Kegiatan 4.12.1.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.12.1.1** Terlaksananya survei lapangan untuk pengumpulan data **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha Koperasi yang disurvei untuk dinilai	79.700.000	69.970.500	87,79%	25	25	100%	113,91%
	Sub Kegiatan 4.12.1.2 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan **Sasaran Sub Kegiatan 4.12.1.2** Terlaksananya penilaian awal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah unit usaha yang diberikan penilaian awal	39.255.000	35.124.000	89,48%	25	25	100%	117,76%
	Program 4.13 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian **Sasaran Program** Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **Indikator Kinerja Program** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	317.279.000	316.164.496	99,65%	151	175	99,65%	116,30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.13.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.13.1** Meningkatnya Pengurus Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pengurus Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	317.279.000	316.164.496	99,65%	180	292	162,22%	167,29%
	Sub Kegiatan 4.13.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **Sasaran Sub Kegiatan 4.13.1.1** Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	317.279.000	316.164.496	99,65%	6	6	100%	100,35%
	Program 4.14 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi **Indikator Kinerja Program** Pertumbuhan volume usaha koperasi	718.594.000	607.420.730	84,53%	19	34,69	182,59%	216,01%
	Kegiatan 4.14.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	718.594.000	607.420.730	84,53%	5,5	47	860,12%	1.017,55%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.14.1 Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan							
	Sub Kegiatan 4.14.1.1 Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.14.1.1** Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Koperasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	616.100.000	505.000.000	81,97%	2	202	10.100%	12.322%
	Sub Kegiatan 4.14.1.2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha **Sasaran Sub Kegiatan 4.14.1.2** Meningkatnya Fasilitasi Akses Pembiayaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Akses Pembiayaan	102.494.000	102.420.730	99,93%	8	8	100%	100,07%
	Program 4.15 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro **Sasaran Program** Meningkatnya pembinaan kapasitas UMKM **Indikator Kinerja Program** Persentase pembinaan kapasitas UMKM	4.603.582.150	3.988.864.314	86,65%	2	2	100%	115,41%
	Kegiatan 4.15.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	4.603.582.150	3.988.864.314	86,65%	50	43	86	99,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan **Sasaran Kegiatan 4.15.1** Terlaksananya Pengadaan bantuan Alat Produksi **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan alat produksi							
	Sub Kegiatan 4.15.1.1 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.15.1.1** Terfasilitasinya kemitraan usaha mikro **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah fasilitasi kemitraan usaha mikro	47.537.150	44.696.150	94,2%	10	10	100%	106,3%
	Sub Kegiatan 4.15.1.2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.15.1.2** Terfasilitasinya pelatihan keamanan pangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan keamanan pangan	179.764.000	145.701.514	81,05%	30	30	100%	123,38%
	Sub Kegiatan 4.15.1.3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.15.1.3** Terlaksananya Sosialisasi Perizinan UMKM Terfasilitasinya perizinan bagi UMKM **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha yang mengikuti sosialisasi perizinan UMKM Jumlah usaha mikro yang difasilitasi izin	94.390.000	89.333.000	94,64%	60	60	100%	105,66%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.15.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.15.1.4** Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan Hukum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah UMKM yang memahami kepatuhan terhadap perlindungan hukum	218.801.500	176.284.000	80,57%	30	58	19,33%	239,94 %
	Sub Kegiatan 4.15.1.5 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.15.1.5** Terlaksananya Pendataan Usaha Mikro **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	4.063.089.500	3.532.849.650	86,95%	150	109	72,67%	83,57%
	Program 4.16 Program Pengembangan UMKM **Sasaran Program** Meningkatnya pemasaran produk UMKM **Indikator Kinerja Program** Jumlah produk umkm yang meningkat pemasarannya	578.026.000	574.141.934	99,33%	6	6	100%	100,68%
	Kegiatan 4.16.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil **Sasaran Kegiatan 4.16.1** Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran UMKM **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah umkm yang dipasarkan produknya	578.026.000	574.141.934	99,33%	20	20	100%	100,68%
	Sub Kegiatan 4.16.1.1 Pengemabangan Usaha Makro **Sasaran Sub Kegiatan 4.16.1.1**	578.026.000	574.141.934	99,33%	2	5	250%	251,69%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya pameran produk bagi UMKM **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelaksanaan Pameran							
	Program 4.17 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan **Sasaran Program** Meningkatnya rekomendasi izin usaha perdagangan **Indikator Kinerja Program** Persentase rekomendasi izin usaha perdagangan	194.838.500	125.945.062	64,64%	95,62	98,9	103,46%	160,05%
	Kegiatan 4.17.1 Penerbitan Tanda Daftar Gudang **Sasaran Kegiatan 4.17.1** Meningkatnya Rekomendasi TDG yang diterbitkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rekomendasi TDG yang diterbitkan	100.104.500	73.572.000	73,50%	91	76	82,42%	112,14%
	Sub Kegiatan 4.17.1.1 Pengembangan Usaha Mikro **Sasaran Sub Kegiatan 4.17.1.1** Terlaksananya pameran produk bagi umkm **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelaksanaan pameran	100.104.500	73.572.000	73,50%	8	3	37,50%	51,02%
	Program 4.18 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas sarana perdagangan **Indikator Kinerja Program** Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	5.561.767.100	4.725.743.945	84,97%	11,7	11,11	94,97%	111,77%
	Kegiatan 4.18.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.335.668.000	4.540.660.545	85,10%	2	4,17	208,33%	244,81%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.18.1 Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
	Sub Kegiatan 4.18.1.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Sub Kegiatan 4.18.1.1** Terlaksananya Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5.145.730.000	4.362.731.245	84,78%	4	8	200%	235,89%
	Sub Kegiatan 4.18.1.2 Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan **Sasaran Sub Kegiatan 4.18.1.2** Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	189.938.000	177.929.300	93,68%	48	48	100%	106,75%
	Program 4.19 Program Pengembangan Ekspor **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan Net Ekspor Barang dan Jasa **Indikator Kinerja Program** Pertumbuhan Net Ekspor Barang dan Jasa	170.000.000	116.863.370	68,74%	6,72	5,61	83,48%	121,44%
	Kegiatan 4.19.1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	116.863.370	68,74%	100	100	100%	145,47

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.19.1 Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							
	Sub Kegiatan 4.19.1.1 Pameran Dagang Lokal **Sasaran Sub Kegiatan 4.19.1.1** Terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang local **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	170.000.000	116.863.370	68,74%	2	10	500%	727,35%
	Program 4.20 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen **Sasaran Program** Teratasinya penanganan pengaduan konsumen **Indikator Kinerja Program** Persentase penanganan pengaduan konsumen	299.909.350	277.100.445	93,39%	100	100	100%	108,23%
	Kegiatan 4.20.1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan **Sasaran Kegiatan 4.20.1** Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	299.909.350	277.100.445	93,39%	36	36,07	100,19%	108,43%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.20.1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang **Sasaran Sub Kegiatan 4.20.1.1** Terselenggaranya Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	136.172.850	130.906.245	96,13%	650	774	119,08%	123,87%
	Program 4.21 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri **Sasaran Program** Meningkatnya produk lokal yang difasilitasi dalam kegiatan promosi **Indikator Kinerja Program** Persentase produk lokal yang difasilitasi dalam kegiatan promosi	73.308.500	63.014.500	85,96%	0,36	0,54	154,44%	179,67%
	Kegiatan 4.21.1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri **Sasaran Kegiatan 4.21.1** Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	73.308.500	63.014.500	85,96%	100	100	100%	116,34%
	Sub Kegiatan 4.21.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.21.1.1** Terlaksananya Bazar Dagang	38.643.500	31.613.500	81,81%	12	20	166,67%	203,73%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi bazar dagang							
	Sub Kegiatan 4.21.1.2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.21.1.2** Terlaksananya FGD dalam rangka akses pemasaran produk UMKM melalui kemitraan dengan Retail dan Perhotelan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah UMKM yang mengikuti FGD pemasaran produk melalui kemitraan dengan retail dan perhotelan	34.665.000	31.401.000	90,58%	12	26	216,67%	239,19%
	Program 4.22 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri **Sasaran Program** Meningkatnya Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah **Indikator Kinerja Program** Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	7.258.619.000	6.356.879.969	87,58%	4,1	6,31	163,90%	175,74%
	Kegiatan 4.22.1 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.22.1** Terfasilitasinya pengadaan bantuan alat produksi **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan alat produksi	7.258.619.000	6.356.879.969	87,58%	35	35	100%	190,31%
	Sub Kegiatan 4.22.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	53.270.000	28.302.000	53,13%	1	1	100%	188,22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.1 Tersedianya bahan penyusunan rencana pembangunan industri **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen potensi industri daerah							
	Sub Kegiatan 4.22.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.2** Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Industri **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah koordinasi pengembangan industri	21.400.000	0	0,00%	2	0	0%	0%
	Sub Kegiatan 4.22.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.3** Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Produk Industri **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengolahan produk industri	300.845.000	180.998.282	60,16%	10	10	100%	166,21%
	Sub Kegiatan 4.22.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.4** Terlaksananya verifikasi kelompok IKM penerima bantuan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kelompok IKM yang diverifikasi	3.196.163.000	3.037.667.681	95,04%	35	35	100%	105,22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.22.1.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.5** Terselenggaranya Pelatihan Kerajinan Tangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Kerajinan Tangan	1.742.148.000	1.489.335.903	85,49%	30	60	200%	233,95
	Sub Kegiatan 4.22.1.6 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.6** Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	27.721.000	0	0,00%	1	0	0%	0%
	Sub Kegiatan 4.22.1.7 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.22.1.7** Terfasilitasinya Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal Terfasilitasinya sertifikasi halal Tempat Pemotongan Hewan Terfasilitasinya Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Juru sembelih yang mendapat sertifikat penyembelihan halal	1.917.072.000	1.620.576.103	84,53%	20 20	20 20	100% 100%	118,30% 118,30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah tempat pemotongan hewan yang mendapat sertifikat halal Jumlah Produk pelaku usaha yang mendapat sertifikat halal				50	110	220%	260,25%
	Program 4.23 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota **Sasaran Program** Meningkatnya rekomendasi izin usaha industri kecil yang diterbitkan **Indikator Kinerja Program** Persentase rekomendasi izin usaha industri kecil yang diterbitkan	74.193.000	12.478.500	16,82%	47	23,84	50,73%	301,60%
	Kegiatan 4.23.1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) **Sasaran Kegiatan 4.23.1** Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri	74.193.000	12.478.500	16,82%	46	23,84	51,83%	308%
	Sub Kegiatan 4.23.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.23.1.1** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian	57.761.000	1.271.000	2,20%	1	0	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah							
	Sub Kegiatan 4.23.1.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) **Sasaran Sub Kegiatan 4.23.1.2** Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	16.432.000	11.207.500	68,21%	1	1	100%	146,62%
	Program 4.24 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional **Sasaran Program** Tersedianya data dan infromasi industri secara lengkap, akurat dan terkini di tingkat daerah berbasis elektronik **Indikator Kinerja Program** Persentase Ketersediaan data dan infromasi industri secara lengkap, akurat dan terkini di tingkat daerah berbasis elektronik	89.209.500	65.591.500	73,53%	25	3	11,96%	16,27%
	Kegiatan 4.24.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.24.1** Terfasilitasinya penyediaan Informasi Industri	89.209.500	65.591.500	73,53%	24,5	3	12,21%	16,60%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitasi Penyediaan Informasi Industri							
	Sub Kegiatan 4.24.1.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **Sasaran Sub Kegiatan 4.24.1.1** Pengumpulan / Pengolahan Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	86.745.500	63.211.500	72,87	1	1	100%	137,23%
	Sub Kegiatan 4.24.1.2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas **Sasaran Sub Kegiatan 4.24.1.2** Terdiseminasi, Publikasi Data Informasi Industri Melalui SIINas Indikator Kinerja Sub Kegiatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Melalui SIINas	1.539.000	1.531.000	99,48	1	1	100%	100,52%
	Sub Kegiatan 4.24.1.3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas **Sasaran Sub Kegiatan 4.24.1.3** Terpantaunya Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	925.000	849.000	91,78	1	1	100%	108,95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas							
	Program 4.25 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata **Sasaran Program** Meningkatnya Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase Lama Tinggal Wisatawan	30.027.165.200	25.582.174.779	85,20%	42,86	42,86	100%	117,38%
	Kegiatan 4.25.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.25.1** Terlaksananya perancangan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi obyek dan daya tarik wisata yang dirancang untuk dikembangkan	1.011.223.000	405.855.792	40,14%	10	10	100%	249,16%
	Sub Kegiatan 4.25.1.1 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.1.1** Terlaksananya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan **Indikato Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.011.223.000	405.855.792	40,14%	2	1	50,00%	124,58%
	Kegiatan 4.25.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	28.611.643.700	24.800.950.487	86,68%	4	4	100%	115,37%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 4.25.2 Terlaksananya penataan kawasan pengelolaan destinasi pariwisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi penataan Kawasan destinasi pariwisata yang dikelola							
	Sub Kegiatan 4.25.2.1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.2.1** Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	27.136.843.500	23.383.897.769	86,17 %	48	44	91,67%	106,385%
	Sub Kegiatan 4.25.2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.2.2** Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.474.800.200	1.417.052.718	96,08%	2	2	100,00%	104,08%
	Sub Kegiatan 4.25.2.3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.2.3**	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **Indikato Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 4.25.3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.25.3** Terlaksananya peningkatan kepatuhan terhadap standar usaha pariwisata **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah usaha pariwisata yang mematuhi standar usaha pariwisata	404.298.500	375.368.500	92,84%	10	10	100%	107,71%
	Sub Kegiatan 4.25.3.1 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.3.1** Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	404.298.500	375.368.500	92,84%	143	143	100,00%	107,71%
	Sub Kegiatan 4.25.3.2 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.25.3.2** Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 4.26 Program Pemasaran Pariwisata **Sasaran Program** Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan jangkauan audiens promosi pariwisata	7.102.687.100	6.695.728.152	94,2%	5	5	100%	106,08%
	Kegiatan 4.26.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.26.1** Terlaksananya promosi destinasi wisata daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah destinasi wisata daerah yang dipromosikan	7.102.687.100	6.695.728.152	94,2%	18	18	100%	106,08%
	Sub Kegiatan 4.26.1.1 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri **Sasaran Sub Kegiatan 4.26.1.1** Terlaksananya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3.778.213.500	3.748.953.920	99,23%	18	18	100,00%	100,78%
	Sub Kegiatan 4.26.1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 4.26.1.2** Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.431.941.350	1.382.604.336	96,55 %	6	6	100,00%	103,57%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.26.1.3 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri **Sub Kegiatan 4.26.1.3** Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.778.213.500	3.748.953.920	99,23%	18	18	100,00%	100,78%
	Program 4.27 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah	1.502.981.070	1.500.924.413	99,86%	5	5	100%	100,14%
	Kegiatan 4.27.1 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 4.27.1** Tersedianya sarana dan prasarana ruang kreatif daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah lokasi sarana dan prasarana ruang kreatif daerah yang disediakan dan difungsikan	683.736.220	681.727.160	99,71%	1	1	100%	100,29%
	Sub Kegiatan 4.27.1.1 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif **Sasaran Sub Kegiatan 4.27.1.1**	683.736.220	681.727.160	99,71 %	5	5	100,00%	100,29%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana Kota Kreatif yang tersedia dan terpelihara (Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia)							
	Kegiatan 4.27.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif **Sasaran Kegiatan 4.27.2** Terlaksananya fasilitasi pendaftaran HAKI Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	819.244.850	819.197.253	99,99%	40	40	100%	100%
	Sub Kegiatan 4.27.2.1 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual **Sasaran Sub Kegiatan 4.27.2.1** Terlaksananya Fasilitasi Kekayaan Intelektual **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	819.244.850	819.197.253	99,99%	5	5	100,00%	100,01%
	Program 4.28 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif **Sasaran Program** Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif **Indikator Kinerja Program** Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	8.313.395.900	8.136.570.244	97,87%	20	20	100%	102,17%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 4.28.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar **Sasaran Kegiatan 4.28.1** Terselenggaranya peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi guna memperkuat daya saing dan inovasi pelaku ekonomi kreatif di daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapat Penguatan Kapasitas	7.835.018.750	7.658.196.094	97,74%	2	2	100%	102,31%
	Sub Kegiatan 4.28.1.1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif **Sasaran Sub Kegiatan 4.28.1.1** Terselenggaranya Event dan Pameran Produk Ekonomi Kreatif **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	7.677.516.200	7.504.804.244	97,75 %	5	5	100,00%	102,30%
	Kegiatan 4.28.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif **Sasaran Kegiatan 4.28.2** Terselenggaraanya peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM tingkat dasar yang diselenggarakan	478.377.150	478.374.150	100%	5	5	100%	100%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 4.28.1.2 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata **Sasaran Sub Kegiatan 4.28.1.2** Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	157.502.550	153.391.850	97,39%	50	50	100,00%	102,68%
5.	**Sasaran Startegis** Menurunnya Pengangguran **Indikator Kinerja SS** Tingkat Pengangguran Terbuka				6,02	5,93	101,49%	
	Program 5.1 Program Perencanaan Tenaga Kerja **Sasaran Program** Terlaksananya perencanaan tenaga kerja **Indikator Kinerja Program** Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana	75.573.252	62.902.719	83,23%	100	100	100%	120,14%
	Kegiatan 5.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) **Sasaran Kegiatan 5.1.1** Terlaksananya penyusunan dokumen rencan tenaga kerja **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	75.573.252	62.902.719	83,23%	100	100	100%	120,14%
	Sub Kegiatan 5.1.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	75.573.252	62.902.719	83,23%	1	1	100%	120,14%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 5.1.1.1 Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro							
	Program 5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja **Sasaran Program** Terlaksananya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Program** Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Komptensi	6.572.077.140	6.370.422.022	96,93%	55	24	43,64%	45,02%
	Kegiatan 5.2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi **Sasaran Kegiatan 5.2.1** Terlaksananya pengukuran Komptensi dan Produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelaksanaan pelatihan	6.444.434.090	6.277.460.994	97,41%	100	100	100%	102,65%
	Sub Kegiatan 5.2.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi **Sasaran Sub Kegiatan 5.2.1.1** Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2.109.845.790	1.972.017.120	93,47	236	236	100%	107%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 5.2.1.2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **Sasaran Sub Kegiatan 5.2.1.2** Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	92.555.900	91.928.340	99,32	10	10	100%	100,7%
	Sub Kegiatan 5.2.1.3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 5.2.1.3** Terlaksananya Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4.242.032.400	4.213.515.534	99,33	17	17	100%	100,7%
	Kegiatan 5.2.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta **Sasaran Kegiatan 5.2.2** Terlaksanannya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53.308.545	29.920.545	56,13%	100	100	100%	178,15%
	Sub Kegiatan 5.2.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	53.308.545	29.920.545	56,13%	10	10	100%	178,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 5.2.2.1 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina							
	Kegiatan 5.2.3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.2.3** Terlaksananya pengukuran Komptensi dan Produktivitas tenaga kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	74.334.505	63.040.483	84,81%	100	100	100%	117,91%
	Sub Kegaiatan 5.2.3.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja **Sasaran Sub Kegiatan 5.2.3.1** Terlaksananya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	74.334.505	63.040.483	84,81%	2	2	100%	117,91%
	Program 5.3 Program Penempatan Tenaga Kerja **Sasaran Program** Terlaksananya penempatan tenaga kerja **Indikator Kinerja Program** Persentase Tenagakerja yang ditempatkan	702.931.696	484.778.732	68,96%	100	100	100%	145,01%
	Kegiatan 5.3.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	399.115.146	250.779.145	62,83%	100	72,34	72,34%	115,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 5.3.1 Terlaksananya Pelayanan Antarkerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan							
	Sub Kegiatan 5.3.1.1 Pelayanan antar Kerja **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.1.1** Tersedianya Pelayanan antar Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	143.004.830	87.758.830	61,37%	2000	1345	67,25%	109,5%
	Sub Kegiatan 5.3.1.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.1.2** Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	95.630.930	40.235.430	42,07%	300	170	56.67%	134,7%
	Sub Kegiatan 5.3.1.3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.1.3** Terlaksananya Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	56.854.930	40.755.430	71,68%	5	4	80%	111,6%
	Sub Kegiatan 5.3.1.4 Perluasan Kesempatan Kerja	103.624.456	82.029.455	79,16%	30	28	93,33%	117,9%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 5.3.1.4 Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja							
	Kegiatan 5.3.2 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.3.2** Teraksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah LPTKS yang diberi Izin Operasionalnya (Lembaga)	57.217.880	38.975.880	68,12%	1	1	100%	146,79%
	Sub Kegiatan 5.3.2.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.2.1** Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	57.217.880	38.975.880	68,12%	3	2	66,67%	97,87%
	Kegiatan 5.3.3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Sasaran Kegiatan 5.3.3** Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Infomasi Pasar Kerja Yang dikelola	197.451.790	161.065.627	81,57%	12	12	100%	122,59%
	Sub Kegiatan 5.3.3.1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.3.1**	125.620.960	114.263.801	90,96%	12	12	100%	109,93%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online							
	Sub Kegiatan 5.3.3.2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.3.2** Tersediannya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	71.830.830	46.801.826	65,16%	50	33	66%	101,28%
	Kegiatan 5.3.4 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.3.4** terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani	49.146.880	33.958.080	84,81%	100	72	72%	84,89%
	Kegiatan 5.3.4.1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) **Sasaran Sub Kegiatan 5.3.4.1** Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	49.146.880	33.958.080	84,81%	25	18	72%	84,89%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 5.4 Program Hubungan Industrial **Sasaran Program** Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan **Indikator Kinerja Program** Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	2.183.112.700	2.018.502.005	92,45%	15	40,24	268,27%	290,17%
	Kegiatan 5.4.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.4.1** Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peaturan yang berlaku	268.520.000	185.181.956	68,96%	100	73,62	73,62%	106,75%
	Sub Kegiatan 5.4.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.1.1** Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	65.555.500	46.167.846	70,43%	30	22	73,33%	104,11%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 5.4.1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.1.2** Terlaksananya Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	94.324.500	67.634.498	71,70%	30	22	73,33%	102,27%
	Sub Kegiatan 5.4.1.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.1.3** Terlaksananya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	108.640.000	71.379.612	65,70%	12	9	75%	114,15%
	Kegiatan 5.4.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 5.4.2** Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Kasus Yang diselesaikan dengan PB Jumlah Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	1.914.592.700	1.833.320.049	95,75%	100	98,38	98,38%	102,74%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 5.4.2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.2.1** Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perselisihan yang Dicegah	125.406.000	113.089.088	90,18%	10	10	100%	110,8%
	Sub Kegiatan 5.4.2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.2.2** Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	71.221.700	52.943.193	74,34%	10	8	80%	107,61%
	Sub Kegiatan 5.4.2.3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.2.3**	48.975.000	24.024.000	49,05%	30	15	50%	101,9%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi							
	Sub Kegiatan 5.4.2.4 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Sasaran Sub Kegiatan 5.4.2.4** Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.668.990.000	1.643.263.768	98,46%	1000	1000	100%	101,56%
6.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Investasi Daerah **Indikator Kinerja SS** Persentase Pertumbuhan investasi daerah				5,10	-29,43	-577,06%	
	Program 6.1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya daya tarik investasi daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kotabaru (PMDN dan PMA)	1.051.837.000	1.007.239.800	95,76%	0,50%	-29,43%	-58,86%	-61,47%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 6.1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.1.1** Tersusunnya peraturan/kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang tersusun	235.758.000	206.811.200	87,72%	100	100	100%	113,9%
	Sub Kegiatan 6.1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal **Sasaran Sub Kegiatan 6.1.1.1** Tersusunnya peraturan tentang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	--	-	-
	Sub Kegiatan 6.1.1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 6.1.1.2** Terfasilitasinya Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA dan PMDN) dengan UMKM di daerah	235.758.000	206.811.200	87,72%	1	1	100%	114%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 6.1.1.3 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Prizinan Berusaha Berbasis Resiko **Sasaran Sub Kegiatan 6.1.1.3** Tersusunnya draf rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	-	-	-	-	-	--	-
	Kegiatan 6.1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.1.2** Tersusunnya dokumen penanaman modal yang komprehensif dan termutakhirkan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase Dokumen Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru yang termutakhirkan	816.079.000	800.428.600	98,08%	100	100	100%	101,95%
	Sub Kegiatan 6.1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 6.1.2.1** Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	419.806.000	406.863.100	96,92%	1	1	100%	103,17%
	Sub Kegiatan 6.1.2.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	396.273.000	393.565.500	99,32%	1	1	100%	100,7%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 6.1.2.2 Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
	Program 6.2 Program Promosi Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya Minat investor yang masuk ke Kabupaten kotabaru **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan minat investor yang masuk ke Kabupaten Kotabaru (PMDN dan PMA)	1.207.119.950	1.164.685.216	96,48%	100	100	100%	103,64%
	Kegiatan 6.2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.2.1** Terlaksananya promosi dan fasilitasi investasi yang terarah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan	1.207.119.950	1.164.685.216	96,48%	100	100	100%	103,64%
	Sub Kegiatan 6.2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 6.2.1.1** Tersusunnya Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	683.816.000	649.114.666	94,93%	1	1	100%	105,35%
	Sub Kegiatan 6.2.1.2	523.303.950	515.570.550	98,52%	1	1	100%	101,5%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 6.2.1.2** Tersusunnya dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota							
	Program 6.3 Program Pelayanan Penanaman Modal **Sasaran Program** Meningkatnya efisiensi pelayanan perizinan berbasis risiko Meningkatnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelayanan publik **Indikator Kinerja Program** Persentase izin yang selasai sesuai SOP Persentase peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi pada bidang pelayanan. Persentase penurunan jumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan publik	743.384.650	700.046.978	94,17%	 100 100 100	 100 100 100	 100% 100% 100%	106,19%
	Kegiatan 6.3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 6.3.1** Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kotabaru **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberian Fasilitasi kepada Perusahaan	743.384.650	700.046.978	94,17%	 100 100	 100 100	 100% 100%	106,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase pelayanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi secara elektronik yang tersedia. Persentase layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik yang tersedia.				100	100	100%	
	Sub Kegiatan 6.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. **Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1.1** Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Fasilitasi ke Perusahaan. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan Koordinasi Fasilitasi ke perusahaan	88.997.850	71.470.100	80,31%	1	1	100%	124,5%
	Sub Kegiatan 6.3.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. **Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1.2** Terlaksananya Pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha kepada pelaku usaha. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	302.753.500	301.621.000	99,63%	2500	5854	234%	234,86%
	Sub Kegiatan 6.3.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis Risiko **Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1.3** Terlaksananya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha terhadap pelaku usaha. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	269.013.300	255.086.878	94,82%	350	373	107%	112,84%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
	Sub Kegiatan 6.3.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis Risiko. **Sasaran Sub Kegiatan 6.3.1.4** Terlaksananya Pemantauan Kepada Kegiatan Usaha lintas daerah dari Pelaku Usaha. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	82.620.000	71.869.000	86,99%	12	12	100%	114,95%
	Program 6.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal **Sasaran Program** Terciptanya kepatuhan pelaku usaha penanaman modal terhadap regulasi (LKPM) **Indikator Kinerja Program** Persentase kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap regulasi	658.232.700	585.459.976	88,94%	100	100	100%	112,43%
	Kegiatan 6.4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.4.1** Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko.	658.232.700	585.459.976	88,94%	100	100	100%	112,43%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko yang terlaksana.							
	Sub Kegiatan 6.4.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. **Sasaran Sub Kegiatan 6.4.1.1** Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha dalam Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha dalam Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	90.462.700	67.765.600	74,91%	6	6	100%	133,49%
	Sub Kegiatan 6.4.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha **Sasaran Sub Kegiatan 6.4.1.2** Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	449.960.500	419.586.076	93,25%	500	500	100%	107,23%
	Sub Kegiatan 6.4.1.3 Pengawasan Penanaman Modal **Sasaran Sub Kegiatan 6.4.1.3** Terlaksananya Analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	117.809.500	98.108.300	83,28%	12	12	100%	120,07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusah							
	Program 6.5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal **Sasaran Program** Peningkatan kualitas data penanaman modal dan perizinan **Indikator Kinerja Program** Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan yang akurat dan real-time.	289.266.800	253.855.108	87,76%	100	100	100%	113,94%
	Kegiatan 6.5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 6.5.1** Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal. **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pembinaan dan pendampingan optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terlaksana.	289.266.800	253.855.108	87,76%	100	100	100%	113,94%
	Sub Kegiatan 6.5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. **Sasaran Sub Kegiatan 6.5.1.1.** Tersedianya Data Perizinan Berbasis Digital.	289.266.800	253.855.108	87,76%	9	9	100%	113,94%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.							
7.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat **Indikator Kinerja SS** Tingkat Kemiskinan Rasio Gini				 4,23 0,290	 4,39 0,275	 96,21% 105,17%	
	Program 7.1 Program Pemberdayaan Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Pemberdayaan Sosia **Indikator Kinerja Program** Persentase Pemberdayaan Sosial	897.950.650	692.327.750	77,10%	100	100	100%	129,70%
	Kegiatan 7.1.1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) **Sasaran Kegiatan 7.1.1** Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	79.455.150	73.182.250	92,11%	100	100	100%	108,56%
	Sub Kegiatan 7.1.1.1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.1.1.** Terlaksananya FasilitasiPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).	79.455.150	73.182.250	92,11%	100	100	100%	108,56%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan KAT							
	Kegiatan 7.1.2 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.1.2** Terlaksananya Koordinasi Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.475.000	42.669.000	62,31%	100	100	100%	160,48%
	Sub Kegiatan 7.1.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.2.1.** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.	68.475.000	42.669.000	62,31%	100	100	100%	160,48%
	Kegiatan 7.1.3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.1.3** Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	750.020.500	576.476.500	76,86%	100	100	100%	130,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 7.1.3.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.3.1.** Terlaksananya Orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	20.158.000	80,63%	100	100	100%	124.02%
	Sub Kegiatan 7.1.3.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.3.2.** Terlaksananya Orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.	511.094.500	426.451.000	83,44%	100	100	100%	119.84%
	Sub Kegiatan 7.1.3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.3.3.** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	99.425.500	75.725.000	76,16%	100	100	100%	131.30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							
	Sub Kegiatan 7.1.3.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Sasaran Sub Kegiatan 7.1.3.4.** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	114.500.500	54.142.500	47,29%	100	100	100%	211.46%
	Program 7.2 Program Rehabilitasi Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program** Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.323.645.750	1.013.818.710	76,59%	100	100	100%	130,56%
	Kegiatan 7.2.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial **Sasaran Kegiatan 7.2.1** Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	1.150.014.750	859.927.050	74,78%	100	100	100%	133,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	Sub Kegiatan 7.2.1.1 Penyediaan Permakanan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.1** Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25.782.800	3.078.400	11,94%	100	100	100%	837.52%
	Sub Kegiatan 7.2.1.2 Penyediaan Sandang. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.2** Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota.	49.850.000	-	0,00%	100	100	100%	-
	Sub Kegiatan 7.2.1.3 Penyediaan Alat Bantu. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.3** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	7.757.900	-	0,00%	100	100	100%	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.							
	Sub Kegiatan 7.2.1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.4** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	25.714.000	-	0,00%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 7.2.1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.5** Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.	106.730.200	90.376.500	84,68%	100	100	100%	
	Sub Kegiatan 7.2.1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.6** Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Kegiatan**	119.406.850	109.320.850	91,55%	100	100	100%	109.22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.							
	Sub Kegiatan 7.2.1.7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.7** Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota.	5.000.000	1.503.000	30,06%	100	100	100%	332.66%
	Sub Kegiatan 7.2.1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.8** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota.	154.515.500	119.560.500	77,38%	100	100	100%	129.23%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 7.2.1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.9** Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	430.425.000	367.551.000	85,39%	100	100	100%	117.10%
	Sub Kegiatan 7.2.1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.10** Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.	143.745.000	121.373.800	84,44%	100	100	100%	118.42%
	Sub Kegiatan 7.2.1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.11** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	22.671.000	5.971.500	26,34%	100	100	100%	379.65%
	Sub Kegiatan 7.2.1.12 Pemberian Layanan Rujukan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.1.12** Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota.	58.416.500	41.191.500	70,51%	100	100	100%	114.82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Orang Mendapatkan							
	Kegiatan 7.2.1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA **Sasaran Kegiatan 7.2.1** Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	173.631.000	153.891.660	88,63%	100	100	100%	112,82%
	Sub Kegiatan 7.2.2.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.2.1** Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.683.550	29.124.250	77,29%	100	100	100%	129.38%
	Sub Kegiatan 7.2.2.2 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.2.2** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	78.938.450	75.210.410	95,28%	100	100	100%	104.95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota.							
	Sub Kegiatan 7.2.2.3 Pemberian Layanan Rujukan. **Sasaran Sub Kegiatan 7.2.2.3** Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota.	57.009.000	49.557.000	86,93%	100	100	100%	115.03%
	Program 7.3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial **Sasaran Program** Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program** Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.295.676.880	5.069.461.775	38,13%	100	100	100%	262,26%
	Kegiatan 7.3.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.3.1** Terpenuhinya Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Terdata **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Fakir Miskin yang Terdata yang Mendapatkan Bantuan Sosial	13.295.676.880	5.069.461.775	38,13%	100	100	100%	262,26%
	Sub Kegiatan 7.3.1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 7.3.1.1**	3.039.430.009	2.948.829.000	97,02%	100	100	100%	103.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata							
	Sub Kegiatan 7.3.1.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 7.3.1.2** Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.	80.294.505	77.646.500	96,70%	100	100	100%	103.41%
	Sub Kegiatan 7.3.1.3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. **Sasaran Sub Kegiatan 7.3.1.3** Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.	9.482.149.866	1.401.034.238	14,78%	100	100	100%	676.58%
	Sub Kegiatan 7.3.1.4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. **Sasaran Sub Kegiatan 7.3.1.4** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	693.802.500	641.952.037	92,53%	100	100	100%	108.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.							
	Program 7.4 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan **Sasaran Program** Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Ketahanan Pangan	3.549.402.000	3.498.189.959	98,56%	50	67,5	135%	136,97%
	Kegiatan 7. 4.1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.4.1** Penguatan Infrastruktur Cadangan Pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah peningkatan infrastruktur cadangan pangan	3.549.402.000	3.498.189.959	98,56%	8	8	100%	101,46%
	Sub Kegiatan 7.4.1.1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.1.1** Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3.549.402.000	3.498.189.959	98,56%	23	23	100%	101,46%
	Program 7.5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	3.653.396.950	3.078.138.690	84,25%				122,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Masyarakat **Sasaran Program** Meningkatnya Ketersediaan Pangan Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Terciptanya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok **Indikator Kinerja Program** Skor PPH Ketersediaan Persentase Cadangan Pangan Skor PPH Konsumsi Jumlah angka kecukupan gizi (AKE) Jumlah angka kecukupan protein (AKP) Indeks Perkembangan Harga (IPH) Pangan Pokok				72 2 92,20 2198 68,7 100	91 2 89,27 2132 66,99 100	126,39% 100% 96,82% 97% 97,51% 100%	
	Kegiatan 7.5.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan **Sasaran Kegiatan 7.5.1** Meningkatnya Akses Pasokan Pangan Pokok **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Peningkatan Gerakan Pangan Murah	1.665.547.500	1.556.378.800	93,45%	12	23	191,67%	205,10%
	Sub Kegiatan 7.5.1.1 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.1.1** Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	1.460.767.000	1.358.575.800	93,00%	12	12	100%	107,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 7.5.1.2 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.1.2** Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	204.780.500	197.803.000	96,59%	1	1	100%	103,53%
	Kegiatan 7.5.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.5.2** Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Persentase Cadangan Pangan) **Indikator Kinerja Kegiatan** Volume Cadangan Pangan	1.536.669.000	1.141.377.800	74,28%	100	83,71	83,71%	112,69%
	Sub Kegiatan 7.5.2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.2.1** Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.536.669.000	1.141.377.800	74,28%	60	60	100%	134,62%
	Kegiatan 7.5.3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi **Sasaran Kegiatan 7.5.3** Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka	451.180.450	380.382.090	84,31%	4	8	200%	237,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	pemenuhan konsumsi pangan yang ragam dan bergizi seimbang **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah sosialisasi dan edukasi B2SA							
	Sub Kegiatan 7.5.3.1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.3.1** Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per tahun	193.847.700	137.159.140	70,76%	1	1	100%	141,33%
	Sub Kegiatan 7.5.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal **Sasaran Sub Kegiatan 7.5.3.2** Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	257.332.750	243.222.950	94,52%	1	1	100%	105,80%
	Program 7.6 Program Penanganan Kerawanan Pangan **Sasaran Program** Menurunnya Daerah Rawan Pangan	395.946.500	372.646.182	94,11%	15,80	16,83	106,52%	113,18%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase penurunan Desa/ Kelurahan Rentan Rawan Pangan							
	Kegiatan 7.6.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.6.1** Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penurunan Desa Rawan Pangan	99.230.500	85.694.000	86,35%	-2	4	-200%	-231,61
	Sub Kegiatan 7.6.1.1 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.6.1.1** Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.803.500	40.434.000	78,05%	1	1	100%	128,12%
	Sub Kegiatan 7.6.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.6.1.2** Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	47.427.000	45.260.000	95,43%	1	1	100%	104,78%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota							
	Kegiatan 7.6.2 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan **Sasaran Kegiatan 7.6.2** Pemantauan dan pengawasan desa rawan pangan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	296.716.000	286.952.182	96,71%	4	4	100%	103,40%
	Sub Kegiatan 7.6.2.1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan **Sasaran Sub Kegiatan 7.6.2.1** Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuktahirkan	296.716.000	286.952.182	96,71%	1	1	100%	103,40%
	Program 7.7 Program Pengawasan Keamanan Pangan **Sasaran Program** Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan **Indikator Kinerja Program** Persentase Pangan segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	308.341.000	260.753.495	84,57%	90	90	100%	118,24%
	Kegiatan 7.7.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	308.341.000	260.753.495	84,57%	64	70,8	110,63%	130,81%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 7.8.1 Memastikan PSAT aman dari cemaran kimia, biologis dan fisik **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah PSAT yang memenuhi Persyaratan mutu dan Keamanan Pangan							
	Sub Kegiatan 7.7.1.1 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.7.1.1** Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	172.812.000	141.513.245	81,89%	1	1	100%	122,12%
	Sub Kegiatan 7.7.1.2 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan **Sasaran Sub Kegiatan 7.7.1.2** Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	135.529.000	119.240.250	87,98%	1	1	100%	113,66%
	Program 7.8 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	563.566.950	442.514.463	78,52%	14	14,2	101,73%	129,55%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Stabilnya harga barang pokok dan penting **Indikator Kinerja Program** Persentase stabilisasi harga barang pokok dan penting							
	Kegiatan 7.8.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota **Sasaran Kegiatan 7.8.1** Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	42.152.000	33.770.500	80,12%	42,42	42,42	100%	124,48%
	Sub Kegiatan 7.8.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat **Sasaran Sub Kegiatan 7.8.1.1** Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	42.152.000	33.770.500	80,12%	2	2	100%	124,82%
	Kegiatan 7.8.2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 7.8.2** Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang	411.170.500	300.653.863	73,12%	100	100	100%	136,76%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 7.8.2.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan **Sasaran Sub Kegiatan 7.8.2.1** Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	7.000.000	4.861.500	69,45%	98	365	372,45%	536,28%
	Sub Kegiatan 7.8.2.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 7.9.2.2** Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	404.170.500	295.792.363	73,19%	4	27	675%	922,32%
8.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik **Indikator Kinerja SS** Indeks Pelayanan Publik				2,85	3,36	117,89%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 8.1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum **Sasaran Program** Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Trantibum **Indikator Kinerja Program** Persentase penurunan pelanggaran Perda / perkada Persentase Penurunan Jumlah Gangguan Trantibum	3.471.347.780	2.360.575.660	68%	 72,43 27,36	 49,52 20,77	 68% 75,9%	105,80%
	Kegiatan 8.1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.1.1** Meningkatnya Cakupan Penyebarluasan Area Patroli **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase cakupan area patroli dalam kabupaten kota yang dilaksanakan	2.928.967.000	1.985.531.610	67,8%	72,43	49,52	68%	100,29%
	Sub Kegiatan 8.1.1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.1** Terlaksananya Kegiatan Patroli dan Pembinaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan hasil kegiatan patroli dan pembinaan	35.130.000	5.600.000	25%	25	3,99	15,94%	63,76%
	Sub Kegiatan 8.1.1.2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.2** Terlaksananya Sosialisasi Trantibum kepada Satlinmas di wilayah Kecamatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	172.669.000	135.457.500	83,33%	83,33	65,37	78,45%	94,14%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah kegiatan Sosialisasi Trantibum kepada sanlinmas di kecamatan							
	Sub Kegiatan 8.1.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.3** Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan dan pengembangan kompetensi	200.000.000	187.907.500	97,75%	97,65	91,74	93,95%	96,11%
	Sub Kegiatan 8.1.1.4 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.4** Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Dini Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan penyuluhan dan dialog masyarakat tentang pencegahan gangguan trantibum	90.200.000	63.351.000	87,5%	87,5	61,45	70,23%	80,26%
	Sub Kegiatan 8.1.1.5 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.5** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif	50.007.000	16.239.000	32%	75	24,35	32,47%	101,47%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.1.1.6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.6** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif	2.212.538.000	1.526.205.260	86,67%	86,67	59,78	68,98%	79,59%
	Sub Kegiatan 8.1.1.7 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.7** Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Dini Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan penyuluhan dan dialog masyarakat tentang pencegahan gangguan trantibum	62.050.000	1.934.000	3%	25	0,78	3,12%	104,00%
	Sub Kegiatan 8.1.1.8 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.8**	25.733.000	1.696.000	7%	25	1,65	6,59%	94,14%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Sosialisasi Trantibum kepada Satlinmas di wilayah Kecamatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan Sosialisasi Trantibum kepada sanlinmas di kecamatan							
	Sub Kegiatan 8.1.1.9 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.9** Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	30.764.000	12.065.350	39%	61,54	24,14	39,22%	100,56%
	Sub Kegiatan 8.1.1.10 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.1.10** Terlaksananya Sosialisasi Trantibum kepada Satlinmas di wilayah Kecamatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan Sosialisasi Trantibum kepada sanlinmas di kecamatan	49.876.000	35.076.000	70%	80	56,26	70,33%	100,4%
	Kegiatan 8.1.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota **Sasaran Kegiatan 8.1.2** Meningkatnya Pemberian Informasi Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Kegiata** Jumlah Penyediaan layanan aduan trantibum	356.489.574	270.576.193	75,90%	27,36	20,77	75,9%	100%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.1.2.1 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.1** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif	54.990.945	48.381.004	88%	90	79,18	90%	102,27%
	Sub Kegiatan 8.1.2.2 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.2** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif	24.975.000	24.152.800	97%	100	96,71	96,71%	99,7%
	Sub Kegiatan 8.1.2.3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti). **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.3** Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana	82.866.748	79.327.918	96%	100	95,73	95,73%	99,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.1.2.4 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.4** Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana	24.939.037	19.916.847	80%	95	75,87	79,86%	99,83%
	Sub Kegiatan 8.1.2.5 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.5** Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Kegiatan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana	19.007.457	17.779.397	94%	100	93,54	93,54%	99,51%
	Sub Kegiatan 8.1.2.6 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.6** Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Dini Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan penyuluhan dan dialog masyarakat tentang pencegahan gangguan trantibum.	64.961.000	29.738.700	46%	52,5	24,03	45,78%	99,52%
	Sub Kegiatan 8.1.2.7	49.828.995	23.168.395	46%	62,5	29,06	46,5%	101,09%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.7** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif							
	Sub Kegiatan 8.1.2.8 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.2.8** Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Informasi dan Aduan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan pelayanan publik dan komunikasi efektif	34.920.392	28.111.132	81%	92,5	80,5	80,5%	99,38%
	Kegiatan 8.1.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.1.3** Meningkatnya SDM Satpol PP yang berkompeten **Indikator Kinerja Kegiata** Jumlah sertifikasi yang dimiliki petugas Satpol PP	185.891.206	104.467.857	56,2%	59,41	33,39	56,2%	100%
	Sub Kegiatan 8.1.3.1 Pembentukan Sekretariat PPNS **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.3.1**	36.470.635	9.969.850	27%	50	13,67	27,34%	101,26%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan dan pengembangan kompetensi							
	Sub Kegiatan 8.1.3.2 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.3.2** Terlaksananya Kegiatan Patroli dan Pembinaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan hasil kegiatan patroli dan pembinaan	15.928.767	10.131.267	64%	70	44,52	63,6%	99,38%
	Sub Kegiatan 8.1.3.3 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.3.3** Tersusunnya Dokumen Kajian dan Pemetaan Daerah Rawan Trantibum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen kajian dan pemetaan daerah rawan trantibum	61.219.434	52.952.120	84%	97,5	84,34	86,5%	102,98%
	Sub Kegiatan 8.1.3.4 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS **Sasaran Sub Kegiatan 8.1.3.4** Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelatihan dan pengembangan kompetensi	72.272.370	31.414.620	43%	45	19,56	43,47%	101,09%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 8.2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran **Sasaran Program** Meningkatnya Daya Tanggap Kebakaran **Indikator Kinerja Program** Persentase penanganan kebakaran sesuai standart tingkat waktu tanggap (respon time)	2.934.035.500	2.247.169.014	76,6%	100	100	100%	130,54%
	Kegiatan 8.2.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.2.1** Meningkatnya Penyebaran Informasi Daerah Rawan Kebakaran **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan Penyusunan peta sebaran titik rawan kebakaran	2.536.346.500	2.018.190.438	79,6%	79,15	62,98	79,57%	99,96%
	Sub Kegiatan 8.2.1.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.1** Tersedianya Papan Informasi Tentang Area Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pemasangan papan di titik strategis dan mudah diakses masyarakat	60.176.000	34.959.500	58%	80	46,48	58,1%	100,17%
	Sub Kegiatan 8.2.1.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.2**	325.000.000	221.877.500	68%	100	68,27	68,27%	100,40%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Papan Informasi Tentang Area Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pemasangan papan di titik strategis dan mudah diakses masyarakat.							
	Sub Kegiatan 8.2.1.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.3** Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat terkait Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelatihan terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran	200.000.000	180.228.000	90%	100	90,11	90,11%	100,12%
	Sub Kegiatan 8.2.1.4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.4** Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat terkait Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelatihan terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran	62.500.000	31.337.000	50%	57,5	28,83	50,14%	100,28%
	Sub Kegiatan 8.2.1.5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.5**	51.449.000	38.807.873	75%	77,5	58,46	75,43%	100,57%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan							
	Sub Kegiatan 8.2.1.6 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.6** Peningkatan Kapasitas Jumlah Petugas dan Relawan Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah petugas pemadam dan relawan kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	144.471.500	39.251.008	27%	33,33	9,06	27,17%	100,63%
	Sub Kegiatan 8.2.1.7 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.7** Tersedianya Posko-posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pos sektor yang terbentuk	78.000.000	40.567.152	52%	75	39,01	52,01%	100,02%
	Sub Kegiatan 8.2.1.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.8** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi	1.519.082.000	1.372.631.405	90%	91,26	82,46	90,36%	100,40%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi yang berhasil diadakan							
	Sub Kegiatan 8.2.1.9 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.9** Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat terkait Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelatihan terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran	41.108.000	23.604.000	57%	70	40,19	57,42%	100,74%
	Sub Kegiatan 8.2.1.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.1.10** Peningkatan Kapasitas Jumlah Petugas dan Relawan Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah petugas pemadam dan relawan kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	54.560.000	34.927.000	64%	70	44,81	64,02%	100,03%
	Kegiatan 8.2.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran **Sasaran Kegiatan 8.2.2** Meningkatnya Kualitas Layanan Pertolongan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	30.045.000	14.429.000	48,02%	70	33,61	48,02%	100%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan pertolongan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran							
	Sub Kegiatan 8.2.2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.2.1** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi yang berhasil diadakan	30.045.000	14.429.000	48,02%	70	33,61	48,02%	100%
	Kegiatan 8.2.3 Investigasi Kejadian Kebakaran **Sasaran Kegiatan 8.2.3** Tersedianya Sarana dan Prasarana yang menunjang Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standart	52.643.000	26.245.000	49,8%	57,5	28,66	49,85%	100,1%
	Sub Kegiatan 8.2.3.1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.3.1** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi yang berhasil diadakan	52.643.000	26.245.000	49,8%	57,5	28,66	49,85%	100,1%
	Kegiatan 8.2.4 Investigasi Kejadian Kebakaran	315.001.000	188.304.576	59,7%	74,94	44,80	59,78%	100,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 8.2.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang menunjang Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standart							
	Sub Kegiatan 8.2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.4.1** Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat terkait Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelatihan terkait pencegahan dan pemadaman kebakaran	101.036.000	72.440.070	73,33%	73,33	52,58	71,7%	97,78%
	Sub Kegiatan 8.2.4.2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran **Sasaran Sub Kegiatan 8.2.4.2** Peningkatan Kapasitas Jumlah Petugas dan Relawan Kebakaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah petugas pemadam dan relawan kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	183.860.000	94.472.072	75%	75	38,54	51,38%	68,51%
	Sub Kegiatan 8.2.4.3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	30.105.000	21.392.434	80%	80	56,85	71,06%	88,83%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 8.2.4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertolongan dan Evakuasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi yang berhasil diadakan							
	Program 8.3 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan **Sasaran Program** Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Program** Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	217.303.520	213.763.671	98,37%	100	100	100%	101,65%
	Kegiatan 8.3.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.3.1** Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	217.303.520	213.763.671	98,37%	100	100	100%	101,65%
	Sub Kegiatan 8.3.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.3.1.1** Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	217.303.520	213.763.671	98,37%	100	100	100%	101,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota							
	Program 8.4 Program Pendaftaran Penduduk **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk **Indikator Kinerja Program** Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	405.323.772	307.746.634	75,93%	100	100	100%	131,71%
	Kegiatan 8.4.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Sasaran Kegiatan 8.4.1** Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	321.703.772	245.859.083	76,42%	100	100	100%	130,85%
	Sub Kegiatan 8.4.1.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Sasaran Sub Kegiatan 8.4.1.1** Terlaksananya Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	321.703.772	245.859.083	76,42%	100,00	100,00	100,00%	130,85%
	Kegiatan 8.4.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk **Sasaran Kegiatan 8.4.2** Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	83.620.000	61.887.551	74,01%	100	100	100%	135,12%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.4.2.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Sasaran Sub Kegiatan 8.4.2.1** Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83.620.000	61.887.551	74,01%	100,00	100,00	100,00%	135,12%
	Program 8.5 Program Pencatatan Sipil **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil **Indikator Kinerja Program** Persentase Akta Pencatatan Sipil Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	336.933.028	271.969.410	80,72%	100	100,14	100,14%	124,06%
	Kegiatan 8.5.1 Pelayanan Pencatatan Sipil **Sasaran Kegiatan 8.5.1** Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	265.200.978	213.491.510	80,50%	100	100,18	100,18%	124,44%
	Sub Kegiatan 8.5.1.1 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Sasaran Sub Kegiatan 8.5.1.1**	265.200.978	213.491.510	80,50%	100,00	100,18	100,18%	124,44%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** umlah Layanan Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan							
	Kegiatan 8.5.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk **Sasaran Kegiatan 8.5.2** Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	71.732.050	58.477.900	81,52%	100	100	100%	122,67%
	Sub Kegiatan 8.5.2.1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil **Sasaran Sub Kegiatan 8.5.2.1** Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	71.732.050	58.477.900	81,52%	100,00	100,00	100,00%	122,67%
	Program 8.6 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sasaran Program** Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan **Indikator Kinerja Program** Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	202.958.200	169.214.580	83,37%	100	93,55	93,55%	112,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.6.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan **Sasaran Kegiatan 8.6.1** Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	69.283.200	55.202.985	79,68%	100	81,10	81,10%	101,79%
	Sub Kegiatan 8.6.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan **Sasaran Sub Kegiatan 8.6.1.1** Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	43.099.000	38.053.635	88,29%	100,00	100,00	100,00%	113,26%
	Sub Kegiatan 8.6.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan **Sasaran Sub Kegiatan 8.6.1.2** Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	26.184.200	17.149.350	65,50%	100,00	50,00	50,00%	76,34%
	Kegiatan 8.6.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.675.000	114.011.595	85,29%	100	100	100%	117,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 8.6.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Sub Kegiatan 8.6.2.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Sasaran Sub Kegiatan 8.6.2.1** Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.675.000	114.011.595	85,29%	100,00	100,00	100,00%	117,25%
	Program 8.7 Program Pengelolaan Profil Kependudukan **Sasaran Program** Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan **Indikator Kinerja Program** Persentase Penyusunan Dokumen Profil Kependudukan	191.710.800	148.308.141	77,36%	100	100	100%	129,27%
	Kegiatan 8.7.1 Penyusunan Profil Kependudukan **Sasaran Kegiatan 8.7.1** Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Profil Kependudukan Yang Sesuai Standar	191.710.800	148.308.141	77,36%	100	100	100%	129,27%
	Sub Kegiatan 8.7.1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.7.1.1**	139.355.300	103.210.583	74,06%	100,00	100,00	100,00%	135,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 8.7.1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain **Sasaran Sub Kegiatan 8.7.1.2** Tersedianya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	52.355.500	45.097.558	86,14%	100,00	100,00	100,00%	116,09%
	Program 8.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral **Sasaran Program** Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berbasis Data Statistik **Indikator Kinerja Program** Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	439.466.728	356.568.950	81,14%	52	52	100%	123,24%
	Kegiatan 8.8.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.8.1** Tersedianya Data Statistik yang Siap Pakai **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Data Statistik Sektoral yang Siap Pakai	439.466.728	356.568.950	81,14%	52	42	80,76%	99,53%
	Sub Kegiatan 8.8.1.1 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral **Sasaran Sub Kegiatan 8.8.1.1**	58.766.950	48.411.000	82,38%	180	180	100%	121,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksanya Bimtek/Workshop Statistik Sektoral **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Statistik Sektoral (pokin) (renstra) Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Statistik Sektoral (renstra							
	Sub Kegiatan 8.8.1.2 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional **Sasaran Sub Kegiatan 8.8.1.2** Tersusunnya Publikasi dan Dashboard Statistik Sektoral **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Publikasi Statistik Sektoral yang tersedia (pokin) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (renstra)	94.693.330	91.079.550	96,18%	35	35	100%	103,97%
	Sub Kegiatan 8.8.1.3 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral **Sasaran Sub Kegiatan 8.8.1.3** Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Data Statistik Sektoral **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Persentase Data Statistik Sektoral yang telah divalidasi dan diverifikasi (pokin) Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (renstra)	131.464.595	108.145.100	82,26%	70	70	100%	121,57%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.8.1.4 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia **Sasaran Sub Kegiatan 8.8.1.4** Terlaksananya Koordinasi yang lebih efektif antar instansi penghasil data **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah OPD yang Melakukan Koordinasi sesuai Jadwal yang telah di tetapkan (pokin) Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (renstra)	118.310.661	106.969.300	90,41%	1	1	100%	110,61%
	Sub Kegiatan 8.8.1.5 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar **Sasaran Sub Kegiatan 8.8.1.5** Tersusunnya Publikasi dan Dashboard Statistik Sektoral **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Publikasi Statistik Sektoral yang tersedia (pokin) Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (renstra)	36.231.192	1.964.000	5,42	1	-	-	0%
	Program 8.9 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi **Sasaran Program** Meningkatnya Keamanan Informasi Perangkat Daerah yang Efektif **Indikator Kinerja Program** Jumlah OPD dengan Unit Pengelolaan Keamanan Informasi Aktif	189.146.089	173.285.750	91,61%	2	5	250%	272,89%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.9.1 Jumlah OPD dengan Unit Pengelolaan Keamanan Informasi Aktif **Sasaran Kegiatan 8.9.1** Terlaksananya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai SOP Keamanan Informasi	104.806.250	89.264.250	85,17%	9,8	9,8	100%	117,41%
	Sub Kegiatan 8.9.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik **Sasaran Sub Kegiatan 8.9.1.1** Terlaksananya Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada OPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah OPD yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (pokin) Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (renstra)	104.806.250	89.264.250	85,17%	1	1	100%	117,41%
	Kegiatan 8.9.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.9.2** Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar SKPD **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase OPD yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	84.339.839	84.021.500	99,62%	100	100	100%	100,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.9.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.9.2.1** Terlaksananya Sistem Komunikasi Sandi antar OPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah OPD yang Terhubung dalam Sistem Sandi (pokin) Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (renstra)	84.339.839	84.021.500	99,62%	51	51	100%	100,38%
	Program 8.10 Program Pengembangan Kebudayaan **Sasaran Program** Meningkatnya partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan lokal **Indikator Kinerja Program** Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	1.174.577.500	957.724.750	81,54%	16	24	150%z	183,95%
	Kegiatan 8.10.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.10.1** Meningkatnya Jumlah kebudayaan yang di kelola oleh masyarakat **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kebudayaan yang dikelola masyarakat	267.960.000	177.243.109	66,15%	30	45	100%	151,17%
	Sub Kegiatan 8.10.1.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **Sasaran Sub Kegiatan 8.10.1.1**	267.960.000	177.243.109	66,15%	10	15	150%	226,7%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan							
	Kegiatan 8.10.2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.10.2** Meningkatnya Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan masyarakat **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan masyarakat	906.617.500	780.481.641	86,09%	60	100	166,67%	193,59%
	Sub Kegiatan 8.10.2.1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya **Sasaran Sub Kegiatan 8.10.2.1** Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	550.251.500	487.019.500	88,51%	3	3	100%	112,98%
	Sub Kegiatan 8.10.2.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional **Sasaran Sub Kegiatan 8.10.2.2** Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	279.679.000	241.535.141	86,36%	7	7	100%	115,79%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional							
	Sub Kegiatan 8.10.2.3 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan **Sasaran Sub Kegiatan 8.10.2.3** Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	76.687.000	51.927.000	67,71%	7	7	100%	147,68%
	Program 8.11 Program Pengembangan Kesenian Tradisional **Sasaran Program** Meningkatnya kesenian tradisional yang dikembangkan dan dilestarikan **Indikator Kinerja Program** Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan dilestarikan	1.528.145.500	1.314.665.051	86,03%	10	9,7	97%	112,75%
	Kegiatan 8.11.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.11.1** Meningkatnya Jumlah kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.528.145.500	1.314.665.051	86,03%	10	9,7	97%	112,75%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 8.11.1.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional **Sasaran Sub Kegiatan 8.11.1.1** Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya	812.373.000	646.432.988	79,57%	1500	1500	100%	125,67%
	Sub Kegiatan 8.11.1.2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional **Sasaran Sub Kegiatan 8.11.1.2** Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	715.772.500	668.232.063	93,36%	7	6	93,59%	100,25%
	Program 8.12 Program Pembinaan Sejarah **Sasaran Program** Meningkatnya kesadaran terhadap sejarah **Indikator Kinerja Program** Cakupan Sejarah yang di bina	45.216.500	44.955.000	99,42%	25	100	400%	402,33%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.12.1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.12.1** Meningkatnya Jumlah kegiatan kekayaan sejarah yang dibina **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kegiatan kekayaan sejarah yang dibina	45.216.500	44.955.000	99,42%	25	100	400%	402,33%
	Sub Kegiatan 8.12.1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah **Sasaran Sub Kegiatan 8.12.1.1** Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	45.216.500	44.955.000	99,42%	1	1	100%	100,58%
	Program 8.13 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya **Sasaran Program** Cagar budaya terawat dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk edukasi dan pelestarian identitas daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola	667.623.500	342.471.000	51,30%	100	76	76%	148,14%
	Kegiatan 8.13.1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.13.1** Meningkatnya Jumlah cagar budaya yang memiliki perlindungan hukum dari pemerintah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Cagar Budaya yang memiliki perlindungan hukum dari pemerintah	667.623.500	342.471.000	51,30%	29	76	263%	512,67%
	Sub Kegiatan 8.13.1.1 Pelindungan Cagar Budaya	222.381.500	113.101.000	50,86%	7	6	85,71%	168,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 8.13.1.1 Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi							
	Sub Kegiatan 8.13.1.2 Pengembangan Cagar Budaya **Sasaran Sub Kegiatan8.13.1.2** Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	445.242.000	229.370.000	51,52%	3	2	66,67%	129,41%
	Program 8.14 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno **Sasaran Program** Meningkatnya Pelestrian Bahan Pustaka yang bernilai sejarah **Indikator Kinerja Program** Persentase Bahan Pustaka bernilai sejarah yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 8.14.1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.14.1** Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 8.14.2 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.14.2** Meningkatnya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koleksi Budaya Etnis yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 8.15 Program Pengelolaan Arsip **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip **Indikator Kinerja Program** Persentase OPD yang mengelola Arsip sesuai ketentuan	479.662.710	457.160.360	95,31%	78	52,27	67,013%	70,31%
	Kegiatan 8.15.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.15.1** Meningkatnya Arsip Dinamis yang dikelola **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Arsip Dinamis yang dikelola dan dirawat	250.223.000	236.111.204	94,36%	74	74	100%	105,97%
	Sub Kegiatan 8.15.1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis **Sasaran Sub Kegiatan 8.15.1.1** Meningkatnya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	69.707.000	65.011.856	107,22%	25200	25200	100%	100%
	Sub Kegiatan 8.15.1.2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 8.15.1.2** Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	180.516.000	171.099.348	105,50%	235	235	100%	100%
	Kegiatan 8.15.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	86.242.210	85.677.581	99,35%	90	90	100%	100,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 8.15.2 Meningkatnya Arsip Statis yang dikelola **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dirawat							
	Sub Kegiatan 8.15.2.1 Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis **Sasaran Sub Kegiatan 8.15.2.1** Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	86.242.210	85.677.581	100,65%	500	500	100%	100%
	Kegiatan 8.15.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.15.3** Meningkatnya SDM Pengelola Kearsipan Meningkatnya Digitalisasi Arsip **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pengelola kearsipan yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi kearsipan Persentase Dokumen yang sudah di Digitalisasi	143.197.500	135.371.575	94,53%	 18,18 76,67	 18,18 76,67	 100% 100%	100,65%
	Sub Kegiatan 8.15.3.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN **Sasaran Sub Kegiatan 8.15.3.1** Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	54.021.000	51.278.875	105,34%	60	60	100%	100%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
	Sub Kegiatan 8.15.3.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatn 8.15.3.2** Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	89.176.500	84.092.700	106,04%	100	100	100%	100%
	Program 8.16 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Penyelamatan Arsip **Indikator Kinerja Program** Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	237.150.500	217.936.984	91,90%	100	130,41	130,41%	141,90%
	Kegiatan 8.16.1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun **Sasaran Kegiatan 8.16.1** Meningkatnya Pemusnahan Arsip **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Arsip yang dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA)	97.549.500	92.950.022	95,28%	100	100	100%	104,95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 8.16.1.1 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun **Sasaran Sub Kegiatan 8.16.1.1** Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan.	97.549.500	92.950.022	104,94%	100	100	100%	100%
	Kegiatan 8.16.2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.16.2** Meningkatnya Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan Akibat Bencana **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Arsip yang Diselamatkan Akibat Bencana	55.271.000	45.558.300	82,43%	100	100	100%	121,31
	Sub Kegiatan 8.16.2.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana **Sasaran Sub Kegiatan 8.16.2.1** Meningkatnya Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	55.271.000	45.558.300	121,31%	53	53	100%	100%
	Kegiatan 8.16.3 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.16.3** Meningkatnya Autentikasi Arsip	56.004.000	52.611.062	93,94%	100	100	100%	106,45%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Arsip yang diautentikasi							
	Sub Kegiatan 8.16.3.1 Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip **Sasaran Sub Kegiatan 8.16.3.1** Meningkatnya Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	56.004.000	52.611.062	106,44%	53	53	100%	100%
	Kegiatan 8.16.4 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang **Sasaran Kegiatan 8.16.4** Meningkatnya Pencarian Arsip yang dinyatakan Hilang **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase arsip yang berhasil ditemukan kembali dari arsip yang dinyatakan hilang	28.326.000	26.817.600	94,67%	37,74	37,74	100%	105,63%
	Sub Kegiatan 8.16.4.1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) **Sasaran Sub Kegiatan 8.16.4.1** Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	28.326.000	26.817.600	105,62%	53	53	100%	100%
	Program 8.17 Program Perizinan Penggunaan Arsip	50.246.000	35.442.200	70,54%	100	100	100%	141,76%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Arsip yang bersifat tertutup **Indikator Kinerja Program** Persentase arsip tertutup yang diakses sesuai izin resmi							
	Kegiatan 8.17.1 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 8.17.1** Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase arsip yang diberikan izin penggunaan sesuai klasifikasi akses arsip	50.246.000	35.442.200	70,54%	40	40	100%	141,76%
	Sub Kegiatan 8.17.1.1 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup **Sasaran Sub Kegiatan 8.17.1.1** Meningkatnya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Daftar arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	50.246.000	35.442.200	141,76%	5	5	100%	100%
	Program 8.19 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan **Sasaran Program** Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa **Indikator Kinerja Program** Survei Pemahaman Masyarakat Akan Pancasila	2.564.006.361	1.705.248.775	66,51%	100	100	100%	150,36%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.19.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan **Sasaran Kegiatan 8.19.1** Pembinaan Paskibraka **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan terkait nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	2.564.006.361	1.705.248.775	66,51%	100	100	100%	150,36%
	Sub Kegiatan 8.19.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.1** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	241.111.352	120.728.576	50,07%	12	12	100%	199,71%
	Sub Kegiatan 8.19.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.2** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	159.653.712	84.300.376	52,8%	105	105	100%	189,39%
	Sub Kegiatan 8.19.1.3 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.3**	183.283.350	5.892.500	3,21%	1	1	100%	3110,45%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	- **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -							
	Sub Kegiatan 8.19.1.4 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.4** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 8.19.1.5 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.5** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 8.19.1.6 Pembentukan Paskibraka **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.6** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	709.092.945	461.190.324	65,04%	1	1	100%	153,75%
	Sub Kegiatan 8.19.1.7 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.7**	1.270.865.002	1.033.136.999	81,29%	32	32	100%	123,01%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	- **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -							
	Sub Kegiatan 8.19.1.8 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila **Sasaran Sub Kegiatan 8.19.1.8** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	-	-	-	-	-	-	-
	Program 8.20 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik **Sasaran Program** Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dan Masyarakatndikator Kinerja Program **Indikator Kinerja Program** Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dan Masyarakat	3.374.618.527	2.292.197.427	67,92%	100	98,42	98,42	144,90%
	Kegiatan 8.20.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik **Sasaran Kegiatan 8.20.1** Partisipasi Aktif Pemahaman Partai Politik Dalam Pendidikan Politik	3.374.618.527	2.292.197.427	67,92%	100	98,42	98,42	144,90%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan bagi partai politik dan masyarakat							
	Sub Kegiatan 8. 20.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 20.1.1** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	19.511.700	-	-	1	1	100%	-
	Sub Kegiatan 8. 20.1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.2** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	16.767.635	4.409.735	26,30%	10	3	30%	114,07%
	Sub Kegiatan 8. 20.1.3 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.3** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	2.894.066.833	2.119.389.683	73,23%	100	100	100%	136,55%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	-							
	Sub Kegiatan 8. 20.1.4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.4** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	355.669.004	148.047.504	41,63%	10	10	100%	240,24%
	Sub Kegiatan 8. 20.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 20.1.5** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	88.603.355	20.350.505	22,97%	21	16	75%	326,54%
	Program 8.21 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan **Sasaran Program** Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan **Indikator Kinerja Program** Persentase Ormas Yang Aktif Dan Berbadan Hukum	518.362.772	408.696.861	78,84%	100	98,76	98,76%	125,25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.21.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan **Sasaran Kegiatan 8.22.1** Terlaksananya Pembinaan Ormas **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terbina	518.362.772	408.696.861	78,84%	100	98,76	98,76%	125,25%
	Sub Kegiatan 8.21.1.1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.1** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	100.268.000	91.786.000	91,54%	2	2	100	109,24%
	Sub Kegiatan 8. 21.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.2** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	25.715.000	-	-	2	2	100	-
	Sub Kegiatan 8. 21.1.3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.3**	278.809.000	209.362.730	75,09%	10	10	100	133,17%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	- **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -							
	Sub Kegiatan 8. 21.1.4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.4** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	68.311.000	68.308.609	100%	10	10	100	100%
	Sub Kegiatan 8. 21.1.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8. 21.1.5** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	45.259.772	39.239.522	86,7%	10	10	100	115,34%
	Program 8.22 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya **Sasaran Program** Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat **Indikator Kinerja Program** Persentase Kebijakan di Bidang Kethanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	836.129.612	648.394.260	77,55%	100	96,13	96,13%	123,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 8.22.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya **Sasaran Kegiatan 8.22.1** Pembinaan Masyarakat Yang Mendapatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya **Indikator Kinerja Kegiatan** Pembinaan Masyarakat Yang Mendapatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.129.612	648.394.260	77,55%	100	96,13	96,13%	123,96%
	Sub Kegiatan 8.22.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.22.1.1** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	27.924.000	1.424.000	5,1%	2	1	50%	980,48
	Sub Kegiatan 8.22.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.22.1.2** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	40.673.000	40.016.000	98,38%	2	2	100%	101,64%
	Sub Kegiatan 8.22.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	364.542.000	258.757.200	70,98%	100	100	100%	140,88%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.22.1.3** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -							
	Sub Kegiatan 8.22.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.22.1.4** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	329.291.000	318.422.448	96,7%	100	100	100%	103,41%
	Sub Kegiatan 8.22.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.22.1.5** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	73.699.612	29.774.612	40,4%	5	4	75%	185,64%
	Program 8.23 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial **Sasaran Program**	2.383.303.124	897.794.787	37,67%	100	83,81	83,81%	222,48%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya Deteksi Dini Dalam Pencegahan Munculnya Konflik Sosial **Indikator Kinerja Program** Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan							
	Kegiatan 8.23.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial **Sasaran Kegiatan 8.23.1** Meningkatnya Deteksi Dini Dalam Pencegahan Munculnya Konflik Sosial **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Konflik Sosial Yang Terdeteksi	2.383.303.124	897.794.787	37,67%	100	83,81	83,81%	222,48%
	Sub Kegiatan 8.23.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.23.1.1** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	536.602.620	360.546.290	67,19	20	20	100%	100%
	Sub Kegiatan 8.23.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.23.1.2** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	273.411.363	107.919.041	39,47	20	18	91,67%	91,67%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	-							
	Sub Kegiatan 8.23.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.23.1.3** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	181.700.674	108.650.396	59,8	20	18	91,67%	91,67%
	Sub Kegiatan 8.23.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 8.23.1.4** - **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** -	1.391.588.467	320.679.060	23,04	1	1	100%	100%
9.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan **Indikator Kinerja SS** Indeks SPBE Indeks Pemerintahan Digital				2,60 0	2,43 0	93,46% 0%	
	Program 9.1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika **Sasaran Program** Meningkatnya Penerapan Teknologi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1.222.956.310	998.342.559	81,63%	50	87,5	175%	214,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi							
	Kegiatan 9.1.1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 9.1.1** Terlaksananya Keamanan TIK **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Keamanan TIK	534.094.860	366.704.252	68,66%	58,82	58,82	100%	145,64%
	Sub Kegiatan 9.1.1.1 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa **Sasaran Sub Kegiatan 9.1.1.1** Terlaksananya Penerapan Otentikasi Dua Faktor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sistem TIK yang Menerapkan Otentikasi Dua Faktor (pokin) Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Renstra)	534.094.860	366.704.252	68,66%	58,82	58,82	100%	145.64%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 9.1.2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 9.1.2** Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola Diskominfo	688.861.450	631.638.307	91,69%	7,84	7,84	100%	109,06%
	Sub Kegiatan 9.1.2.1 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda **Sasaran Sub Kegiatan 9.1.2.1** Terlaksananya Fasilitasi Penempatan Server Fisik Perangkat Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Server Fisik Perangkat Daerah (pokin) Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Renstra)							
	Kegiatan 9.1.3 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 9.1.3** Terlaksananya Interoperabilitas Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah Sesuai Arsitektur SPBE **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah yang sudah Interoperable	278.563.450	236.237.870	84,81%	3,44	3,44	100%	117,91%
	Sub Kegiatan 9.1.3.1 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE **Sasaran Sub Kegiatan 9.1.3.1**							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah SPLP yang tersedia (pokin) Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Renstra)							
	Program 9.2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik **Sasaran Program** Meningkatkan Kualitas Informasi Publik yang Akurat Tepat Waktu dan Relevan **Indikator Kinerja Program** Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	15.761.817.412	15.467.069.496	98,13%	90,45	100	110,55%	112,65%
	Kegiatan 9.2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 9.2.1** Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Informasi Publik yang diakses Masyarakat Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	15.761.817.412	15.467.069.496	98,13%	85,9 95	100 95	116,41% 100%	110,26%
	Sub Kegiatan 9.2.1.1 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 9.2.1.1**							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Kemitraan antara Pemerintah dan Komunitas Masyarakat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kemitraan yang Terbentuk (pokin) Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendesiminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo (renstra)							
	Sub Kegiatan 9.2.1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik **Sasaran Sub Kegiatan 9.2.1.2** Terlaksananya Layanan Informasi Publik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Media Informasi yang dikelola (pokin) Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Juknis (renstra) **Sub Kegiatan 9.2.1.3** Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik **Sasaran Sub Kegiatan 9.2.1.3** Terlaksananya Pelatihan SDM ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan SDM (pokin) Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang diFasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan (renstra)							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
10.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Pemerintahan **Indikator Kinerja SS** Nilai SAKIP Opini BPK				 63 (B) WTP	 64,80 (B) WTP*	 102,85% 100%*	
	Program 10.1 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas perencanaan peraturan Daerah Meningkatnya Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya kinerja SDM perencana kebijakan Meningkatnya kualitas standar layanan publik Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat yang terukur Meningkatnya Kinerja pada koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan	90.338.835.672	67.690.016.951	74,93%				130,78%
	Indikator Kinerja Program Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan standar penerbitan kebijakan Persentase kebijakan yang terbit sesuai dengan perencanaan Nilai EPPD Persentase SDM perencana kebijakan yang bersertifikat Hasil Pemenuhan SPM Urusan Pemerintahan				75 75 2,9 40 75 80	75 75 2,7 40 70 80	100% 100% 93% 100% 93% 100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Rata-rata Capaian Kinerja pada koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan				80	80	100%	
	Kegiatan 10.1.1 Administrasi Tata Pemerintahan **Sasaran Kegiatan 10.1.1** Meningkatnya Kualitas administrasi tata kewilayahan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Otonomi Daerah Meningkatnya kepatuhan pemenuhan SPM Meningkatnya Kinerja pada koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Tercapainya Target IKK Indikator Kunci daerah	3.393.295.300	3.313.884.708	97,66%				88,74%
	Indikator Kinerja Kegiatan				100	80	80%	
	Persentase Kecamatan yang memiliki adm. wilayah yang lengkap/sesuai standar (%)				100	80	80%	
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki adm. wilayah yang lengkap/sesuai standar (%)				100	80	80%	
	Persentase pemahaman perangkat daerah (PD) terhadap peraturan otonomi daerah				100	100	100%	
	Persentase OPD yang telah memiliki SPM yang up to date				100	100	100%	
	Jumlah koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat				100	80	80%	
	Persentase IKK yang tercapai target							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.1.1.1 Penataan Administrasi Pemerintahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.1.1** Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintaha **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1.948.111.300	1.601.816.598	82,22%	1	1	100%	121.62%
	Sub Kegiatan 10.1.1.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.1.2** Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	675.188.000	622.270.260	92,16%	1	1	100%	108,50%
	Sub Kegiatan 10.1.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.1.3** Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	769.996.000	754.707.300	98,01%	1	1	100%	102,03%
	Kegiatan 10.1.2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat **Sasaran Kegiatan 10.1.2** Terlaksananya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan	63.132.826.672	51.595.507.160	81,73%				172,35%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersalurnya pemberian hibah sesuai aturan berlaku **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Persentase hibah yang disalurkan sesuai aturan berlaku				4 100	4 81,73%	100 81,73%	
	Sub Kegiatan 10.1.2.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.2.1** Terpenuhinya data pemberian hibah sesuai aturan berlaku Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah data pemberian hibah yang dipenuhi sesuai aturan berlaku Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	47.024.719.390	39.129.392.866	83,21%	2	2	100%	120,18%
	Sub Kegiatan 10.1.2.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.2.2** Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	13.676.259.600	10.514.215.105	76,88%	20	18	90,00%	117,07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)							
	Sub Kegiatan 10.1.2.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.2.3** Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	2.431.847.682	1.951.899.189	80,26%	15	12,79	85,27%	106,23%
	Kegiatan 10.1.3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum **Sasaran Kegiatan 10.1.3** Meningkatnya Kualitas Kebijakan Peraturan Daerah Terlaksananya koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Meningkatnya keselarasan kebijakan daerah Tersedianya SDM perencana kebijakan yang ditempatkan sesuai ANJB/ABK Meningkatnya kualitas SDM perencana kebijakan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Produk Hukum yang dibuat, dievaluasi, dan didokumentasikan (%) Jumlah koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat (Kali)	8.284.280.700	7.466.967.764	90,13%	 100 4	 100 4	 100% 100%	110,95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase kebijakan yang telah diharmoniskan/ selaras				100	100	100%	
	Jumlah SDM perencana kebijakan yang ditempatkan sesuai ANJB/ABK (Orang)				1	1	100%	
	Jumlah SDM perencana kebijakan yang bersertifikat				1	1	100%	
	Sub Kegiatan 10.1.3.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.3.1** Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	5.984.060.000	5.623.913.634	93,98%	30	30	100,00%	106,40%
	Sub Kegiatan 10.1.3.2 Fasilitasi Bantuan Hukum **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.3.2** Terfasilitasinya Bantuan Hukum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	2.082.222.800	1.665.118.730	79,97%	5	5	100,00%	125,05%
	Sub Kegiatan 10.1.3.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.3.3** Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	217.997.900	177.935.400	81,62%	12	12	100,00%	122,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)							
	Kegiatan 10.1.4 Fasilitasi Kerjasama Daerah **Sasaran Kegiatan 10.1.4** Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama daerah Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi kerjasama daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti sesuai standar Persentase Laporan Evaluasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti sesuai standar	15.528.433.000	5.313.657.319	34,22%	 100 100	 100 100	 100% 100%	 292,24% 292,24%
	Sub Kegiatan 10.1.4.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.4.1** Tersedianya dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	15.278.433.000	5.124.530.719	33,54%	4	4	100,00%	298,14%
	Sub Kegiatan 10.1.4.2 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama **Sasaran Sub Kegiatan 10.1.4.2** Tersusunnya Laporan Evaluasi Kerja Sama **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	250.000.000	189.126.600	75,65%	4	4	100,00%	132,19%
	Program 10.2 Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.206.659.800	5.728.074.804	79,48%				125,82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program							
	Meningkatnya fasilitasi Koordinasi Penanganan Inflasi							
	Meningkatnya kepatuhan SKPD dalam pelaporan administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku							
	Meningkatnya kualitas tata kelola BUMD daerah							
	Meningkatnya realisasi pengadaan Produk Dalam Negeri							
	Meningkatnya kematangan UKPBJ							
	Meningkatnya pemanfaatan sistem Pengadaan Barang dan Jasa							
	Meningkatnya Kinerja pada koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan							
	Meningkatnya kinerja SDM pelaksana PBJ				100	100	100%	
	Indikator Kinerja Program							
	Persentase Koordinasi Penanganan Inflasi (%)				100	100	100%	
	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan administrasi pembangunan sesuai ketentuan (%)				20	20	100%	
	Persentase Pertumbuhan BUMD yang sehat (%)				40	40	100%	
	Persentase Realisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri (%)				Level 3 (75,03)	Level 3 (75,03)	100%	
	Tingkat kematangan UKPBJ (Angka)				75	75	100%	
	Persentase pengadaan dengan menggunakan e-proc (%)				80	80	100%	
	Rata-rata Capaian Kinerja pada koordinasi Perekonomian dan Pembangunan				40	40	100%	
	Persentase SDM pelaksana PBJ yang bersertifikat (%)							

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 10.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian **Sasaran Kegiatan 10.2.1** Meningkatnya Fasilitasi Rumusan Kebijakan Penanganan Inflasi Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian terkait BUMD Terlaksananya koordinasi Perekonomian dan Pembangunan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan Penanganan Inflasi (%) Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian terkait BUMD (%) Jumlah koordinasi Perekonomian dan Pembangunan (Kali)	1.617.143.000	1.518.106.397	93,88%	 100 100 4	 100 100 4	 100% 100% 100%	106,52%
	Sub Kegiatan 10.2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.1.1** Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	299.420.500	242.487.797	80,99%	12	11	91,67%	113,19%
	Sub Kegiatan 10.2.1.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1.317.722.500	1.275.618.600	96,80%	12	12	100,00%	103,30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 10.2.1.2 Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)							
	Kegiatan 10.2.2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan **Sasaran Kegiatan 10.2.2** Meningkatnya kepatuhan SKPD dalam pelaporan administrasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku Terlaksananya koordinasi Perekonomian dan Pembangunan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Persentase (%)) Jumlah koordinasi Perekonomian dan Pembangunan (kali)	990.123.300	761.801.700	76,94%	 100 4	 100 4	 100% 100%	129,97%
	Sub Kegiatan 10.2.2.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.2.1** Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	251.611.300	228.701.000	90,89%	1	1	100,00%	110,02%
	Sub Kegiatan 10.2.2.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.2.2**	385.231.000	296.201.600	76,89%	12	12	100,00%	130,06%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)							
	Sub Kegiatan 10.2.2.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.2.3** Tersedianya Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	353.281.000	236.899.100	67,06%	12	12	100,00%	149,13%
	Kegiatan 10.2.3 Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa **Sasaran Kegiatan 10.2.3** Meningkatnya penggunaan transaksi PDN melalui Katalog Elektronik Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Layanan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Tersedianya SDM pelaksana PBJ yang ditempatkan sesuai ANJAB / ABK Meningkatnya kualitas SDM pelaksana PBJ **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase penggunaan transaksi PDN melalui Katalog Elektronik (%)	4.199.903.500	3.147.022.290	74,93%	100 100 100	100 97,84 100	100% 97,84% 100%	132,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%) Persentase Layanan Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik (%) Jumlah koordinasi Perekonomian dan Pembangunan (Kali) Jumlah SDM pelaksana PBJ yang ditempatkan sesuai ANJAB/ABK (Orang) Jumlah pelaksana PBJ yang bersertifikat (Orang)				4 20 20	4 20 20	100% 100% 100%	
	Sub Kegiatan 10.2.3.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.3.1** Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2.515.860.000	1.665.617.132	66,20%	12	12	100,00%	151,05%
	Sub Kegiatan 10.2.3.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.3.2** Tersedianya Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	543.205.000	478.577.391	88,10%	12	12	100,00%	113,50%
	Sub Kegiatan 10.2.3.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.140.838.500	1.002.827.767	87,90%	150	138	92,00%	104,66%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 10.2.3.3 Terlaksanya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)							
	Kegiatan 10.2.4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam **Sasaran Kegiatan 10.2.4** Meningkatnya Fasilitasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Fasilitasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	399.490.000	301.144.417	75,38%	100	100	100%	132,66%
	Sub Kegiatan 10.2.4.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **Sasaran Sub Kegiatan 10.2.4.1** Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	399.490.000	301.144.417	75,38%	12	12	100,00%	132,66%
	Program 10.3 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	52.757.737.928,00	38,847,414,179,33	76,63%	100	89,96	89,96%	122,17%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya **Indikator Kinerja Program** Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran							
	Kegiatan 10.3.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD **Sasaran Kegiatan** Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.776.004.250,00	1.561.331.433,00	87,91%	100	93,72	93,72%	106,61%
	Sub Kegitan 10.3.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	993.745.750	938.922.953	94,48%	1	1	100%	105,84%
	Sub Kegitan 10.3.1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Indikator Sub Kegatan**	299.976.850	210.324.930	70,11%	20	16	80%	114,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
	Sub Kegitan 10.3.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	53.456.500	2.440.000	4,56%	3	1	33,33%	730,28%
	Sub Kegitan 10.3.1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yg di fasilitasi	412.950.350	409.643.550	99,20%	1	1	100%	100,81%
	Sub Kegitan 10.3.1.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Tata Tertib DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yg di susun	15.874.800	-	-	1	-	-	-
	Kegiatan 10.3.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran **Sasaran Kegiatan** Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	203.352.693	116.379.000	57,23%	100	96,81	96,81%	169,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 10.3.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	46.809.593	33.891.000	72,40%	1	1	100%	138,12%
	Sub Kegitan 10.3.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.537.350	9.927.000	40,46%	1	1	100%	247,18%
	Sub Kegitan 10.3.2.3 Pembahasan APBD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan APBD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	54.744.518	38.092.000	69,58%	1	1	100%	143,72%
	Sub Kegitan 10.3.2.4 Pembahasan APBD Perubahan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	44.429.950	17.964.000	40,43%	1	1	100%	247,33%
	Sub Kegitan 10.3.2.5 Pembahasan Laporan Semester **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	6.494.480	-	-	1	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Sub Kegatan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester							
	Sub Kegitan 10.3.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26.336.802	16.505.000	62,67%	1	1	100%	159,57%
	Kegiatan 10.3.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan **Sasaran Kegiatan** meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	181.369.296	69.917.000	38,55%	100	85,07	85,07%	220,68%
	Sub Kegitan 10.3.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum **Indikator Sub Kegatan** Jumlah laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	46.044.733	11.780.000	25,58%	1	1	100%	390,87%
	Sub Kegitan 10.3.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur **Indikator Sub Kegatan**	35.733.052	17.774.000	49,74%	1	1	100%	201,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur							
	Sub Kegitan 10.3.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24.781.000	14.150.000	57,10%	1	1	100%	175,13%
	Sub Kegitan 10.3.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	31.264.594	17.643.000	56,43%	1	1	100%	177,21%
	Sub Kegitan 10.3.3.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	22.095.000	8.570.000	38,79%	1	0,75	75%	193,36%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 10.3.3.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	21.450.917	-	-	1	-	-	-
	Kegiatan 10.3.4 Peningkatan Kapasitas DPRD **Sasaran Kegiatan** meningkatnya Kapasitas DPRD **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	7.681.389.548	5.851.383.262	76,18%	100	100	100%	131,27%
	Sub Kegitan 10.3.4.1 Pendalaman Tugas DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.803.551.850	1.568.416.298	55,94%	3	3	100%	178,75%
	Sub Kegitan 10.3.4.2 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli **Indikator Sub Kegatan** Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	975.000.000	972.500.000	99,74%	36	36	100%	100,26%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegitan 10.3.4.3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1.710.000.000	1.495.000.000	87,43%	96	96	100%	114,38%
	Sub Kegitan 10.3.4.4 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.053.141.528	804.155.214	76,36%	12	12	100%	130,96%
	Sub Kegitan 10.3.4.5 Penyusunan Program Kerja DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Program Kerja DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	148.351.170	42.511.750	28,66%	1	1	100%	348,97%
	Sub Kegitan 10.3.4.6 Publikasi dan Dokumentasi DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	991.345.000	968.800.000	97,73%	1	1	100%	102,33%
	Kegiatan 10.3.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat **Sasaran Kegiatan** Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	19.239.132.416	9.480.592.303	49,28%	100	73,79	73,79%	149,74%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
	Sub Kegitan 10.3.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	508.738.600	342.015.503	67,23%	17	14	82,35%	122,50%
	Sub Kegitan 10.3.5.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD yg disusun	131.353.174	48.808.300	37,16%	1	1	100%	269,12%
	Sub Kegitan 10.3.5.3 Pelaksanaan Reses **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Reses **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	5.598.148.790	3.364.728.650	60,10%	1	1	100%	166,38%
	Sub Kegitan 10.3.5.4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah orang yg mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	13.000.891.852	5.725.039.850	44,04%	21	13	61,90%	140,58%
	Kegiatan 10.3.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	31.379.250	-	-	100	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
	Sub Kegitan 10.3.6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Kode Etik DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	31.379.250	-	-	1	-	-	-
	Kegiatan 10.3.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah **Sasaran Kegiatan** Meningkatnya Pembahasan Kerja Sama Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah	50.324.000	-	-	100	99,62	99,62%	-
	Sub Kegitan 10.3.7.1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	50.324.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 10.3.8 Fasilitasi Tugas DPRD **Sasaran Kegiatan** Meningkatnya Fasilitasi Tugas DPRD	23.594.786.475	21.767.811.181	92,26%	100	99,88	99,88%	108,26%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Fasilitas Tugas DPRD							
	Sub Kegitan 10.3.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.307.204.310	12.621.835.806	94,85%	28	27,96	99,86	105,28%
	Sub Kegitan 10.3.8.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan DPRD yg di susun	6.401.410	-	-	1	-	-	-
	Sub Kegitan 10.3.8.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	799.867.511	795.169.872	99,41%	6	6	100%	100,59%
	Sub Kegitan 10.3.8.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD **Indikator Sub Kegatan**	6.303.714.724	5.213.109.143	82,70%	1	1	100%	120,92%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
	Sub Kegitan 10.3.8.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus **Indikator Sub Kegatan** Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3.177.598.520	3.137.696.360	98,74%	45	45	100%	101,27%
	Program 10.4 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah **Sasaran Program** Sasaran Program Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan **Indikator Kinerja Program** Indikator Program Persentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4.312.948.250	4.102.292.983	95,12%	100	100	100%	105,14%
	Kegiatan 10.4.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan **Sasaran Kegiatan 10.4.1** Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun	2.209.610.300	2.111.736.841	95,57%	100	100	100%	104,63%
	Sub Kegiatan 10.4.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.1**	76.071.000	67.441.000	88,66%	1,00	1,00	100,00%	112,80%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik							
	Sub Kegiatan 10.4.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.2** Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	392.948.000	366.130.290	93,18%	2,00	2,00	100,00%	107,32%
	Sub Kegiatan 10.4.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.3** Terlaksananya Konsultasi Publik **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	89.480.000	88.820.000	99,26%	1,00	1,00	100,00%	100,74%
	Sub Kegiatan 10.4.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.4** Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah **Indikator Sub Kegiatan**	53.658.000	52.108.000	97,11%	1,00	1,00	100,00%	102,97%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan 10.4.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.5** Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	423.539.300	408.922.032	96,55	1,00	1,00	100,00	103,57
	Sub Kegiatan 10.4.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.6** Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	199.901.500	193.609.500	96,85	1,00	1,00	100,00	103,25
	Sub Kegiatan 10.4.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.1.7** Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	974.012.500	934.706.019	95,96%	3,00	3,00	100,00%	104,21%
	Kegiatan 10.4.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	156.913.950	151.395.282	96,48%	100	100	100%	103,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 10.4.2 Tersedianya Data Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Data dan Informasi yang terintegrasi							
	Sub Kegiatan 10.4.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.2.1** Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	99.942.450	95.428.782	95,48	1,00	1,00	100,00%	104,73%
	Sub Kegiatan 10.4.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.2.2** Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	56.971.500	55.966.500	98,24%	55,00	55,00	100,00%	101,80%
	Kegiatan 10.4.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Kegiatan 10.4.3** Kegiatan Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Berbasis Hasil	1.645.884.500	1.564.899.124	95,08%	100	100	100%	105,18%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Sub Kegiatan 10.4.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.3.1** Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	627.819.500	578.916.506	92,21%	2,00	2,00	100,00%	108,45%
	Sub Kegiatan 10.4.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.3.2** Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1.018.065.000	985.982.618	96,85%	4,00	4,00	100,00%	103,25%
	Kegiatan 10.4.4 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah **Sasaran Kegiatan 10.4.4** Optimalnya Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik	300.539.500	274.261.736	91,26%	100	100	100%	109,58%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
	Sub Kegiatan 10.4.4.1 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.4.1** Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Daerah	112.186.500	90.916.000 %	81,04%	1,00	1,00	100,00%	123,40%
	Sub Kegiatan 10.4.4.2 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota **Sasaran Sub Kegiatan 10.4.4.2** Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan KabupatenKota	188.353.000	183.345.736	97,34%	1,00	1,00	100,00%	102,73%
	Program 10.5 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah **Sasaran Program** Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan	4.621.723.850	3.851.333.004	83,33%				120%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Manusia, Pemerintahan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan				100	100	100%	
	Indikator Kinerja Program							
	Indikator Program Keselarasan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan				100	100	100%	
	Indikator Keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA				100	100	100%	
	Indikator Keselarasan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan							
	Kegiatan 10.5.1	2.411.779.000	2.060.293.232	85,43%				117,06%
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
	Sasaran Kegiatan 10.5.1							
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
	Indikator Kinerja Kegiatan							
	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan				100	100	100%	
	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia				100	100	100%	
	Sub Kegiatan 10.5.1.1	248.341.800	246.108.824	99,10%	1,00	1,00	100,00%	100,91%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.1							
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
	Sub Kegiatan 10.5.1.2	40.795.200	38.654.700	94,75%	1,00	1,00	100,00%	105,54%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.2** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
	Sub Kegiatan 10.5.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.3** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	194.966.100	119.694.100	61,39%	1,00	1,00	100,00%	162,89%
	Sub Kegiatan 10.5.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.4** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	448.398.900	398.180.166	88,80%	1,00	1,00	100,00%	112,61%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan							
	Sub Kegiatan 10.5.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.5** Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	278.964.000	278.416.100	99,80%	1,00	1,00	100,00%	100,20%
	Sub Kegiatan 10.5.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.6** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	134.566.400	105.766.400	78,60%	1,00	1,00	100,00%	127,23%
	Sub Kegiatan 10.5.1.7	339.839.700	317.521.700	93,43%	1,00	1,00	100,00%	107,03%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.7** Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
	Sub Kegiatan 10.5.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.1.8** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	725.906.900	555.951.242	76,59%	1,00	1,00	100,00%	130,57%
	Kegiatan 10.5.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) **Sasaran Kegiatan 10.5.2** Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.154.625.550	989.029.811	85,65%				116,47%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)				100 100	100 100	100% 100%	
	Sub Kegiatan 10.5.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.1** Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	182.744.700	105.450.399	57,70%	1,00	1,00	100,00%	173,30%
	Sub Kegiatan 10.5.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.2** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30.749.200	30.521.200	99,26%	1,00	1,00	100,00%	100,75%
	Sub Kegiatan 10.5.2.3	69.071.800	67.872.800	98,26%	1,00	1,00	100,00%	101,77%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.3** Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
	Sub Kegiatan 10.5.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.4** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	367.444.100	351.941.617	95,78%	1,00	1,00	100,00%	104,40%
	Sub Kegiatan 10.5.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.5**	109.801.750	99.875.010	90,96%	1,00	1,00	100,00%	109,94%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)							
	Sub Kegiatan 10.5.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.6** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.081.000	18.793.000	78,04%	1,00	1,00	100,00%	128,14%
	Sub Kegiatan 10.5.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.7** Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	42.761.100	33.256.100	77,77%	1,00	1,00	100,00%	128,58%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
	Sub Kegiatan 10.5.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.2.8** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	327.971.900	281.319.685	85,78%	1,00	1,00	100,00%	116,58%
	Kegiatan 10.5.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **Sasaran Kegiatan 10.5.3** Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.055.319.300	802.009.961	75,99%	100	100	100%	131,58%
	Sub Kegiatan 10.5.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.3.1**	219.170.000	155.837.132	71,10%	1,00	100,00	140,64%	1,00%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)							
	Sub Kegiatan 10.5.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.3.2** Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55.127.000	37.987.000	68,91%	1,00	1,00	100,00%	145,12%
	Sub Kegiatan 10.5.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.3.3** Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur **Indikator Kinerja Sub** Kegiatan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	204.189.350	148.422.350	72,69%	1,00	1,00	100,00%	137,57%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.5.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.3.4** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	350.861.850	296.533.278	84,52%	3,00	3,00	100,00%	118,32%
	Sub Kegiatan 10.5.3.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.5.3.5** Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	225.971.100	163.230.201	72,23%	1,00	1,00	100,00%	138,44%
	Program 10.6 Program Riset Dan Inovasi Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan Persentase fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait inovasi daerah	-	-	-	 35 60	 57 100	 163% 167%	
	Program 10.7 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	10.955.863.000	10.300.042.749	94,01%				106,37%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase rekomendasi hasil riset yang digunakan dalam dokumen Perencanaan/Pelaksanaan Persentase kajian berbasis bukti yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah Persentase fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Daerah Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah				65 100 65 100	65 100 65 100	100% 100% 100% 100%	
	Kegiatan 10.7.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan **Sasaran Kegiatan 10.7.1** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	312.691.000	252.542.949	80,76%	100	88	88%	108,96%
	Sub Kegiatan 10.7.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.1.1** Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	312.691.000	252.542.949	80,76%	1,00	1,00	100,00%	123,82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 10.7.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan **Sasaran Kegiatan 10.7.2** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3.238.988.500	2.888.509.500	89,18%	100	98,50	98,50%	110,45%
	Sub Kegiatan 10.7.2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.2.1** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	1.907.927.000	1.857.986.800	97,38%	8,00	8,00	100,00%	102,69%
	Sub Kegiatan 10.7.2.2 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.2.2** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	346.794.500	251.323.700	72,47%	1,00	1,00	100,00%	137,99%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.7.2.3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.2.3** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	378.520.000	376.175.000	99,38%	1,00	1,00	100,00%	100,62%
	Sub Kegiatan 10.7.2.4 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.2.4** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	605.747.000	403.024.000	66,53%	2,00	2,00	100,00%	150,30%
	Kegiatan 10.7.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan **Sasaran Kegiatan 10.7.3** Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai standar dan tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6.507.169.000	6.404.002.312	98,41%	100	99,68	99,68%	101,29%
	Sub Kegiatan 10.7.3.1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.1**	120.000.000	119.900.000	99,92%	1,00	100,00	100,08%	1,00%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Sub Kegiatan 10.7.3.2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.2** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	882.587.000	871.789.200	98,78%	3,00	3,00	100,00%	101,24%
	Sub Kegiatan 10.7.3.3 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.3** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	538.660.500	534.047.477	99,14%	1,00	1,00	100,00%	100,86%
	Sub Kegiatan 10.7.3.4 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.4** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	649.925.000	624.045.200	96,02%	2,00	2,00	100,00%	104,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup							
	Sub Kegiatan 10.7.3.5 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.5** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3.417.367.000	3.406.727.100	99,69%	11,00	11,00	100,00%	100,31%
	Sub Kegiatan 10.7.3.6 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.6** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	489.943.500	473.502.071	96,64%	1,00	1,00	100,00%	103,47%
	Sub Kegiatan 10.7.3.7 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.7** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	208.686.000	174.091.264	83,42%	1,00	1,00	100,00%	119,87%
	Sub Kegiatan 10.7.3.8	200.000.000	199.900.000	99,95	1,00	1,00	100,00%	100,05%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.3.8** Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							
	Kegiatan 10.7.4 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi **Sasaran Kegiatan 10.7.4** Terselenggaranya Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	897.014.500	754.987.988	84,17%	100	94,3	94,3%	112,04%
	Sub Kegiatan 10.7.4.1 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.4.1** Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	120.000.000	119.900.000	99,92%	1,00	100,00	100,08%	1,00%
	Sub Kegiatan 10.7.4.2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.4.2**	882.587.000	871.789.200	98,78%	3,00	3,00	100,00%	101,24%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi							
	Sub Kegiatan 10.7.4.3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.4.3** Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	538.660.500	534.047.477	99,14%	1,00	1,00	100,00%	100,86%
	Sub Kegiatan 10.7.4.4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.4.4** Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan	649.925.000	624.045.200	96,02%	2,00	2,00	100,00%	104,15%
	Sub Kegiatan 10.7.4.5	3.417.367.000	3.406.727.100	99,69%	11,00	11,00	100,00%	100,31%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual **Sasaran Sub Kegiatan 10.7.4.5** Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual							
	Program 10.8 Program Pengelolaan Keuangan Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya penyusunan Anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Indikator Kinerja Program** Persentase dokumen peanggaran tepat waktu sesuai ketentuan	12.950.925.500	8.311.074.162	64,17%	100	100	100%	155,83%
	Kegiatan 10.8.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah **Sasaran Kegiatan 10.8.1** Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana anggaran daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran daerah	6.296.531.300	4.175.234.230	66,31%	100	100	100%	150,81%
	Sub Kegiatan 10.8.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya KUA dan PPAS **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	395.834.400	238.503.846	60,25%	2	2	100%	165,97%
	Sub Kegiatan 10.8.1.2	356.679.300	229.512.480	64,35%	2	2	100%	155,41%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun							
	Sub Kegiatan 10.8.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	123.404.500	102.488.275	83,05%	51	51	100%	120,41%
	Sub Kegiatan 10.8.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	85.925.000	75.688.500	88,09	51	51	100%	113,52%
	Sub Kegiatan 10.8.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	85.925.000	75.688.500	88,09	51	51	100%	113,52%
	Sub Kegiatan 10.8.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD **Sasaran Sub Kegiatan**	108.530.000	75.688.500	69,74	51	51	100%	143,39%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi							
	Sub Kegiatan 10.8.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.678.576.500	1.366.277.863	81,40%	2	2	100%	122,86%
	Sub Kegiatan 10.8.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.129.922.500	826.917.768	73,18%	2	2	100%	136,64%
	Sub Kegiatan 10.8.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran **Sasaran Sub Kegiatan**	809.611.600	361867000	44,70%	15	15	100%	223,73%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
	Sub Kegiatan 10.8.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	71.666.900	9.326.250	13,01%	5	5	100%	768,44%
	Sub Kegiatan 10.8.1.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	906.648.500	655.405.213	72,29%	51	1,53	3%	4,15%
	Sub Kegiatan 10.8.1.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	27.361.850	9.237.300	33,76%	5	5	100%	296,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.8.1.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	437.623.500	96.326.500	22,01%	2	2	100%	165,97%
	Kegiatan 10.8.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah **Sasaran Kegiatan 10.8.2** Meningkatnya koordinasi pengelolaan kas Meningkatnya efisiensi dan ketepatan waktu penerbitan SP2D **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Rata-rata waktu diterbitkan SP2D sejak diterimanya SPM SKPD	3.410.499.000	2.166.700.636	63,53%	 100 100	 100 100	 100% 100%	157,41%
	Sub Kegiatan 10.8.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	421.924.000	364.686.589	86,43%	48	48	100,00%	115,69%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.8.2.2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.736.000	132.382.000	94,06%	2	2	100,00%	106,31%
	Sub Kegiatan 10.8.2.3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD **Sasaran Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	198.671.000	191.491.800	96,39%	206	206	100,00%	103,75%
	Sub Kegiatan 10.8.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak Ketiga (PFK) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	234.305.000	207.283.250	88,47%	36	36	100,00%	113,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
	Sub Kegiatan 10.8.2.5 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	132.180.000	113.840.000	86,12%	5	5	100,00%	116,11%
	Sub Kegiatan 10.8.2.6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	169.013.000	153.899.000	91,06%	30	30	100,00%	109,82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
	Sub Kegiatan 10.8.2.7 Penatausahaan Pembiayaan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	37.220.000	22.943.600	61,64%	2	2	100,00%	162,22%
	Sub Kegiatan 10.8.2.8 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	111.506.000	104.335.400	93,57%	1	1	100,00%	106,87%
	Sub Kegiatan 10.8.2.9 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	978.367.000	708.974.697	72,47%	2	2	100,00%	138,00%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
	Sub Kegiatan 10.8.2.10 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	986.577.000	166.864.300	16,91%	104	104	100,00%	591,25%
	Kegiatan 10.8.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah **Sasaran Kegiatan 10.8.3** Meningkatnya kualitas laporan keuangan Meningkatnya kualitas data dan informasi laporan keuangan perangkat daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase laporan keuangan yang disampaikan/disajikan Perangkat Daerah sesuai SAP	3.243.895.200	1.969.139.296	60,70%	100	100	100%	164,74%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Kualitas Data dan Informasi Laporan Keuangan Perangkat daerah				100	100	100%	
	Sub Kegiatan 10.8.3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72.597.800	16.141.750	22,23	1	1	100,00%	449,75%
	Sub Kegiatan 10.8.3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	528.883.800	401.936.900	76,00	1	1	100,00%	131,58%
	Sub Kegiatan 10.8.3.3 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan**	27.167.500	23.058.500	84,88	1	1	100,00%	117,82%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
	Sub Kegiatan 10.8.3.4 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	26.262.350	25.163.000	95,81	1	1	100,00%	104,37%
	Sub Kegiatan 10.8.3.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	425.513.000	233.122.700	54,79	120	120	100,00%	182,53%
	Sub Kegiatan 10.8.3.6 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan**	157.857.500	88.386.000	55,99	1	1	100,00%	178,60%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina							
	Sub Kegiatan 10.8.3.7 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 10.8.3.8 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	524.084.700	333.288.150	63,59	1	1	100,00%	157,25%
	Sub Kegiatan 10.8.3.9 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan**	442.359.000	288.736.000	65,27	1	1	100,00%	153,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi							
	Sub Kegiatan 10.8.3.10 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	761.809.600	436.583.346	57,31	1	1	100,00%	174,49%
	Sub Kegiatan 10.8.3.11 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	277.382.950	122.722.950	44,24	1	1	100,00%	226,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
	Program 10.9 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar **Indikator Kinerja Program** Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	8.341.773.250	6.007.322.086	72,01%	90	99	110,54%	153,50%
	Kegiatan 10.9.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sasaran Kegiatan 10.9.1** Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib Meningkatnya Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tepat waktu **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Peningkatan Penertiban Pengelolaan Aset Laporan Penatausahaan BMD secara periodik	8.341.773.250	6.007.322.086	72,01%	90 90	99 99	110,54% 110,54%	153,50%
	Sub Kegiatan 10.9.1.1 Penyusunan Standar Harga **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Standar Harga yang Disusun	1.243.759.000	1.061.874.869	85,38%	1	1	100,00%	117,13%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.9.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	449.019.000	266.921.037	59,45%	2	2	100,00%	168,22%
	Sub Kegiatan 10. 9.1.3 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.646.125.000	1.962.655.684	74,17%	5	4	80,00%	107,86%
	Sub Kegiatan 10. 9.1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	759.351.000	629.786.137	82,94%	4	4	100,00%	120,57%
	Sub Kegiatan 10. 9.1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan**	497.883.500	299.583.950	60,17%	208	208	100,00%	166,19%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah							
	Sub Kegiatan 10. 9.1.6 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	599.983.000	202.785.896	33,80%	208	208	100,00%	295,87%
	Sub Kegiatan 10. 9.1.7 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah **Sasaran Sub Kegiatan** Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	600.272.500	424.774.421	70,76%	52	52	100,00%	141,32%
	Sub Kegiatan 10. 9.1.8 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	421.607.500	310.190.750	73,57%	153	153	100,00%	135,92%
	Program 10.10 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.711.564.988	5.815.332.457	87%				163,48%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah **Indikator Kinerja Program** Persentase Realisasi Pendapatan asli daerah pada Pajak Daerah I Persentase Realisasi Pendapatan asli daerah pada Pajak Daerah II Persentase Realisasi Opsen Pajak Persentase Realisasi Piutang yang Tertagih terhadap total Piutang Tahunan				100 100 100 16,08	124,13 99,89 96,52 15,50	124,13% 99,89% 96,52% 96,39%	
	Kegiatan 10.10.1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah **Sasaran Kegiatan 10.10.1** Terselenggaranya pemungutan Pajak Daerah secara efektif dan efisien Optimalisasi pembinaan dan pengawasan retribusi daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan asli daerah	6.711.564.988	5.815.332.457	87%	100	97,49%	97,49%	112,05%
	Sub Kegiatan 10.10.1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.1** Tersedianya rencana pengelolaan Pajak Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	353.238.200	316.498.617	90%	2	2	100%	111.11%
	Sub Kegiatan 10.10.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	342.736.708	317.880.591	93%	4	4	100%	107.52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.2 Terlaksananya penyusunan laporan analisis data pajak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah Kebijakan Pajak							
	Sub Kegiatan 10.10.1.3 Penyusluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.3** Terlaksananya sosialisasi terhadap Wajib Pajak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pelakasanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	326.583.700	148.818.500	46%	12	12	100%	217.39%
	Sub Kegiatan 10.10.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.4** Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	889.464.000	860.132.353	97%	6	6	100%	103.09%
	Sub Kegiatan 10.10.1.5 Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.5** Terlaksananya Inventarisasi dan verifikasi data Pajak Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pendapatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	350.750.000	264.756.597	75%	12	12	100%	133.33%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.10.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.6** Terlaksananya Inventarisasi dan verifikasi data Pajak Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.084.690.940	971.913.236	90%	12	12	100%	111.11
	Sub Kegiatan 10.10.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.7** Terlaksananya insentif bagi Wajib Pajak patuh **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	745.850.500	737.066.396	99%	1000	1000	100%	101.01%
	Sub Kegiatan 10.10.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.8** Terlaksananya pendataan dan penetapan pajak daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	406.429.870	402.765.964	99%	12	12	100%	101.01%
	Sub Kegiatan 10.10.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.9** Terlaksannya pelayanan konsultasi kepatuhan pajak	422.670.700	410.749.200	97%	12	12	100%	103.09%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah							
	Sub Kegiatan 10.10.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.10** Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi data Pajak Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Virifikasi	128.421.100	127.445.100	99%	12	12	100%	101.01%
	Sub Kegiatan 10.10.1.11 Penagihan Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.11** Terlaksananya penagihan pajak daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	214.866.220	209.265.120	97%	12	12	100%	103.09%
	Sub Kegiatan 10.10.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.12** Terlaksananya penyelesaian keberatan Pajak Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	267.090.200	264.928.726	99%	12	12	100%	101.01%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.10.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya pengawasan kepatuhan Wajib Pajak **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	564.645.000	199.784.600	35%	12	12	100%	285.71%
	Sub Kegiatan 10.10.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.14** Terlaksananya pembinaan dan pengasawan retribusi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	87.479.600	87.301.250	100%	12	12	100%	100%
	Sub Kegiatan 10.10.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.10.1.15** Tersedianya layanan transaksi pajak berbasis digital **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	526.648.250	496.026.207	94%	4	4	100%	106.38%
	Program 10.11 Program Penyelenggaraan Pengawasan **Sasaran Program** Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Indikator Kinerja Program** Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.857.700.950	2.070.546.139	81%	100	100	100%	123,45%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 10.11.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Sasaran Kegiatan 10.11.1** Tercapainya Penyelenggaraan Pengawasan Internal **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.677.319.850	1.357.932.985	81%	52	52	100%	123,45%
	Sub Kegiatan 10.11.1.1 Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.1** Mingkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengasawan Kinerja Pemerintah Daerah	374.676.850,00	286.136.850,00	76%	52	52	100%	131.57%
	Sub Kegiatan 10.11.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.2** Meningkatnya Keuangan Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	145.239.000,00	140.797.000,00	97%	19	19	100%	103.09%
	Sub Kegiatan 10.11.1.3 Reviu Laporan Kinerja **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.3** Meningkatnya Reviu Laporan Kinerja **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	85.528.500,00	55.093.500,00	64%	20	20	100%	156.25

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 10.11.1.4 Reviu Laporan Keuangan **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.4** Meningkatnya Reviu Laporan Keuangan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	542.705.000,00	448.325.000,00	83%	71	68	96%	115.66%
	Sub Kegiatan 10.11.1.5 Pengawasan Desa **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.5** Meningkatnya Pengawasan Desa **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	111.600.000,00	90.377.000,00	81%	4	4	100%	123.45%
	Sub Kegiatan 10.11.1.6 Kerjasama Pengawasan Internal **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.6** Meningkatnya Kerjasama Pengawasan Internal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	86.651.000,00	58.647.179,00	68%	1	1	100%	147.05%
	Sub Kegiatan 10.11.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.1.7** Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	330.919.500,00	278.556.456,00	84%	68	68	100%	119.04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.							
	Kegiatan 10.11.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **Sasaran Kegiatan 10.11.2** Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Auditor Eksternal **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Laporan TLHP Jumlah Penyelesaian TLHP BPK RI dan BPKP	1.180.381.100	712.613.154	60%	100	100	100%	166,67%
	Sub Kegiatan 10.11.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.2.1** Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	186.806.850,00	167.107.154,00	89%	5	5	100%	112.35%
	Sub Kegiatan 10.11.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **Sasaran Sub Kegiatan 10.11.2.2** Meningkatnya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **Indikator Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	993.574.250,00	545.506.000,00	55%	36	36	100%	181.81%
	Program 10.12 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.368.436.800	954.088.467	70%	100	100	100%	142,85%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya Penilaian Integritas Pemerintah Daerah **Indikator Kinerja Program** Nilai SPI							
	Kegiatan 10.12.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan **Sasaran Kegiatan 10.12.1** Terlaksananya Penyusunan PKPT Berbasis Risiko **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penyusunan Dokumen PKPT yang berbasis risiko	233.760.500	215.608.348	92%	1	1	100%	108,69%
	Sub Kegiatan 10.12.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan **Sasaran Sub Kegiatan 10.12.1.1** Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomenadi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun.	233.760.500,00	215.608.348,00	92%	1	1	100%	108.69%
	Kegiatan 10.12.2 Pendampingan dan Asistensi **Sasaran Kegiatan 10.12.2** Terlaksananya Sosialisasi SPI **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi	1.134.676.300	738.480.119	65%	51	51	100%	153,48%
	Sub Kegiatan 10.12.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	224.961.000,00	183.541.000,00	82%	32	32	100%	121.95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 10.12.2.1 Meningkatnya Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah.							
	Sub Kegiatan 10.12.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi **Sasaran Sub Kegiatan 10.12.2.2** Meningkatnya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	277.985.500,00	148.255.566,00	53%	51	51	100%	188.67%
	Sub Kegiatan 10.12.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi **Sasaran Sub Kegiatan 10.12.2.3** Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	385.210.800,00	276.308.752,00	72%	6	6	100%	138.88%
	Sub Kegiatan 10.12.2.4	246.519.000,00	130.374.801,00	53%	51	51	100%	188.67%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas **Sasaran Sub Kegiatan 10.12.2.4** Meningkatnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.							
10.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara **Indikator Kinerja SS** Indeks Sistem Merit				0,4	0	0%	
	Program 11.1 Program Kepegawaian Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya Kebutuhan ASN sesuai formasi Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan **Indikator Kinerja Program** Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	3.098.524.600	1.261.514.688	40,71%	 85 2.5	 100 2	 117,65% 80%	242,73%
	Kegiatan 11.1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN **Sasaran Kegiatan 11.1.1** Ketersediaan perencanaan kebutuhan ASN **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase jumlah ASN sesuai dengan formasi yang telah disusun	592.085.600	520.667.566	87,94%	85	73.9	86,94%	98,87%
	Sub Kegiatan 11.1.1.1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	2,056,950	1,918,000	93.24%	1	1	100.00%	107.25%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 11.1.1.1 Tersedianya dokumen perumusan kebijakan pengadaan ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN							
	Sub Kegiatan 11.1.1.2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **Sasaran Sub Kegiatan 11.1.1.2** Tersedianya dokumen usulan perencanaan kebutuhan pegawai **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan jenis dan Jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	35,394,850	30,916,000	87.35%	1	1	100.00%	114.49%
	Sub Kegiatan 11.1.1.3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **Sasaran Sub Kegiatan 11.1.1.3** Terlaksananya seleksi pengadaan ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah seleksi pengadaan PNS dan PPPK	554,633,800	487,833,566	87.96%	1	1	100.00%	113.69%
	Sub Kegiatan 11.1.1.4 Pengembangan Kompetensi ASN **Sasaran Sub Kegiatan 11.1.1.4** Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	2,506,439,000	740,847,122	29.56%	70	57	81.43%	275.49%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan							
	Sub Kegiatan 11.1.1.5 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN **Sasaran Sub Kegiatan 11.1.1.5** Tersedianya pengelolaan Pendidikan Lanjutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	2,506,439,000	740,847,122	29.56%	49	49	100.00%	338.32%
	Kegiatan 11.1.2 Pengembangan Kompetensi ASN **Sasaran Kegiatan 11.1.2** Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan	2.506.439.000	740.847.122	29,56%	70	57	81,43%	275,49%
	Sub Kegiatan 11.1.2.1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN **Sasaran Sub Kegiatan 11.1.2.1** Tersedianya pengelolaan Pendidikan Lanjutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	2,506,439,000	740,847,122	29.56%	49	49	100.00%	338.32%
	Program 11.2 Program Kepegawaian Daerah **Sasaran Program** Meningkatnya ASN yang menjabat sesuai kualifikasi dan kompetensi Meningkatnya Kepatuhan penyampaian SKP ASN Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian **Indikator Kinerja Program** Persentase ASN yang menduduki Jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	3.031.245.544	2.677.849.341	88,34%	72 90	66,42 90	92,25% 100%	110,27

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persentase Informasi Kepegawaian yang berkualitas Persentase SKP ASN yang terverifikasi				90	90	100%	
	Kegiatan 11.2.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN **Sasaran Kegiatan 11.2.1** Meningkatnya kualitas mutasi dan promosi ASN sesuai kompetensi Meningkatnya kualitas pengembangan karir pegawai Meningkatnya kualitas layanan pemberhentian dan usul pensiun Meningkatnya disiplin ASN Meningkatnya kepatuhan ASN dalam pelaporan kinerja Meningkatnya kalitas data informasi kepegawaian Meningkatnya kualitas sistem informasi kepegawaian **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase ASN yang mendapatkan layanan Pemberhentian dan usul Pensiun Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang berkualitas Persentase data kepegawaian yang berkualitas				100 83 90	161 83 90	161% 100% 100%	122,22%
	Sub Kegiatan 11.2.1.1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya dokumen perumusan kebijakan pengadaan ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	186,323,550	185,916,321	99.78%	100	100	100.00%	100.22%
	Sub Kegiatan 11.2.1.2	603,855,920	597,213,360	98.90%	1	1	100.00%	101.11%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya dokumen usulan perencanaan kebutuhan pegawai **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN							
	Sub Kegiatan 11.2.1.3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya seleksi pengadaan ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah seleksi pengadaan PNS dan PPPK	24,877,100	19,320,500	77.66%	1	1	100.00%	128.76%
Kegiatan 11.2.2 Mutasi dan Promosi ASN **Sasaran Kegiatan 11.2.2** Meningkatnya kualitas mutasi dan promosi ASN sesuai kompetensi **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase mutasi dan promosi ASN sesuai kompetensi		838.699.150	652.055.108	77.75%	75	85	113,33%	145,77%
	Sub Kegiatan 11.2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Mutasi ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	838,699,150	652,055,108	77.75%	75	85	113.33%	145.77%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 11.2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Kenaiakan Pangkat ASN secara berkala **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kenaikan pangkat ASN	346,388,000	286,993,651	82.85%	1	1	100.00%	120.70%
	Sub Kegiatan 11.2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Jabatan administrasi dan JPT sesuai kebutuhan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN	466,140,000	362,243,957	77.71%	1	1	100.00%	128.68%
	Kegiatan 11.2.3 Pengembangan Kompetensi ASN **Sasaran Kegiatan 11.2.3** Meningkatnya kualitas pengembangan Karir **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase ASN yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karier	92.742.000	92.721.453	99,98%	70	66,42	94,89%	94,91%
	Sub Kegiatan 11.2.3.1 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Pengembangan Karir	92,742,000	92,721,453	99.98%	1000	532	53.20%	53.21%
	Kegiatan 11.2.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.284.747.284	1.130.622.599	88%				113,80%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 11.2.4 Meningkatnya Disiplin ASN Meningkatnya Kepatuhan ASN dalam Pelaporan Kinerja **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase ASN yang menyampaikan Laporan kinerja tepat waktu Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN				 98 98	 99 97,3	 101,02% 99,29%	
	Sub Kegiatan 11.2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur **Sasaran Sub Kegiatan** Tervalidasinya Penilaian Kinerja ASN **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen hasil penyusunan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	1,005,362,374	955,530,278	95.04%	3	3	100.00%	105.22%
	Sub Kegiatan 11.2.4.2 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pemberian Tanja Jasa Pegawai **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	72,369,700	42,517,140	58.75%	300	244	81.33%	138.44%
	Sub Kegiatan 11.2.4.3 Pembinaan Disiplin ASN **Sasaran Sub Kegiatan** Tegaknya Disiplin Pegawai **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	87,442,100	39,211,000	44.84%	1095	780	71.23%	158.85%
	Sub Kegiatan 11.2.4.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **Sasaran Sub Kegiatan**	119,573,650	93,364,181	78.08%	10	10	100.00%	128.07%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya pengelolaan Pendidikan Lanjutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin							
	Program 11.3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia **Sasaran Program** Ketersediaan Talent Pool Ketersediaan Perencanaan Peletihan Meningkatnya ASN yang mengikuti Manajerial Meningkatnya ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis **Indikator Kinerja Program**	11.114.377.100	7.650.728.288	68,84%				109%
	Persentase ASN yang mengikuti Assesment Kompetensi				5	7	140%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan				1	0	0%	
	Persentase ASN yang mengikuti Kompetensi Manajerial				30	25	83,83%	
	Persentase ASN yang mengikuti Kompetensi Teknis				2,5	1,92	76,80%	
	Kegiatan 11.3.1 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional **Sasaran Kegiatan 11.3.1** Tersedianya Dokumen Perencanaan Pelatihan Pelaksanaan Kompetensi Manajerial **Indikator Kinerja Kegiatan**	1.284.747.284	1.130.622.599	88%				134,88%
	Persentase Data dukung penyusunan Dokumen Perencananan Pelatihan				100	0	0%	
	Jumlah ASN yan mengikuti Kompetensi Manajerial				40	37	92,50%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 11.2.1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional **Sasaran Sub Kegiatan 11.2.1.1** Tersusunnya kebijakan teknis pengembangan kompetensi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	567,821,500	377,927,410	66.56%	1	1	100.00%	150.25%
	Sub Kegiatan 11.2.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. **Sasaran Sub Kegiatan 11.2.1.2** Terselenggaranya diklat pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan Terselenggaranya pengembangan kompetensi teknis, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	10,546,555,600	7,272,800,878	68.96%	6	6	100.00%	145.01%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
12.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar **Indikator Kinerja SS** Indeks Infrastruktur Dasar				0,40	0,40*	100%	
	Program 12.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) **Sasaran Program** Meningkatnya Sawah yang terlayani jaringan irigasi **Indikator Kinerja Program** Persentase luas sawah yang terlayani jaringan irigasi	30.654.572.000	11348.717.165	37,02%	100	45,50	45,50%	122,90%
	Kegiatan 12.1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.1.1** Meningkatnya infrastruktur pengelolaan SDA dalam kondisi baik **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase infrastruktur pengelolaan SDA dalam kondisi baik	23.185.804.000	9.545.008.506	41,17%	100	47,75	47,75%	115,98%
	Sub Kegiatan 12.1.1.1 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1.000.000.000	756.564.350	75,66%	100	78,96	78,96%	154,61%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)							
	Sub Kegiatan 12.1.1.2 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	12.635.000	-	0,00	100	0	0	0
	Sub Kegiatan 12.1.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sungai **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai **Indikator** Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	772.550.000	685.354.017	88,71%	100	100	100%	188,71%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **Indikator** Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	200.000.000	184.592.887	92,30%	100	100	100%	192,29%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai **Indikator** Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya **Indikator** Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	150.000.000	118.091.490	78,73%	100	100	100%	178,72%
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	1.200.000.000	-	0,00	100	0	0	0

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi							
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku **Indikator** Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Unit Air Baku **Indikator** Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	2.500.000.000	223.673.449	8,95%	100	13,67	13,67%	22,61%
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing **Indikator** Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.100.000.000	176.746.457	16,07%	100	22,11	22,11%	38,17%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya **Indikator**	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Embung atau Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi							
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya **Indikator** Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	11.532.523.000	6.176.542.870	53,56%	100	61,21	61,21%	114,76%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku **Indikator** Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	2.820.000.000	472.894.730	16,77%	100	26,7	26,7%	43,46%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai **Indikator** Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	998.096.000	-	0,00	100	0	0	0

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun **Indikator** Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku **Indikator** Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	900.000.000	750.548.256	83,39%	100	84,76	84,76%	168,15%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku **Indikator** Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.000.000.000	756.564.350	75,66%	100	78,96	78,96%	154,61%
	Kegiatan 12.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	7.468.768.000	1.803.708.659	24,15%	100	38,50	38,50%	159,42%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.1.2** Meningkatnya panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik							
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa **Indikator** panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	5.620.297.000	863.773.184	15,37%	100	25,92	25,92%	41,28%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa **Indikator** panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	400.000.000	2.562.000	0,64%	100	10	10%	10,64%
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator** jumlah lembaga pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota yang diperkuat kapasitasnya	100.000.000	49.619.895	49,62%	100	100	100%	149,61%
	Sub Kegiatan	70.000.000	-	0,00	100	0	0	169,43%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi **Indikator** Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya (DI)							
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa **Indikator** jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	1.278.471.000	887.753.580	69,44%	100	100	100%	54,18%
	Program 12.2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum **Sasaran Program** Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses terhadap air minum layak **Indikator Kinerja Program** persentase rumah tangga yang terlayani akses terhadap air minum layak	10.767.586.110	5.833.932.973	54,18%	100	67,54	67,54%	124,65%
	Kegiatan 12.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.767.586.110	5.833.932.973	54,18%	100	67,54	67,54%	124,65%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 12.2.1 Meningkatnya sambungan rumah tangga yang terlayani jaringan air minum layak **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan air minum layak							
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **Indikator** Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.511.085.000	843.078.078	55,79%	100	63,60	63,60%	119,39%
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan **Indikator** Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1.955.384.000	1.928.538.630	98,63%	100	99,75	99,75%	198,37%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.849.606.385	788.466.162	20,48%	100	23,61	23,61%	44,09%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun							
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **Indikator** Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.482.400.000	734.808.449	49,57%	100	100	100%	149,56%
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan **Indikator** Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.969.110.725	1.539.041.654	78,16%	100	100	100%	178,16%
	Program 12.3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional **Sasaran Program** Terkendalinya pengelolaan sampah di TPA/TPSP **Indikator Kinerja Program** persentase pengolahan sampah di TPA/TPSP	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 12.3.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.3.1** Meningkatnya kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS ditingkatkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-
	Program 12.4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah **Sasaran Program** Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak **Indikator Kinerja Program** persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	7.102.065.094	6.637.586.141	93,46%	100	98,59	98,59%	105,48%
	Kegiatan 12.4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.4.1** Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	7.102.065.094	6.637.586.141	93,46%	100	98,59	98,59%	105,48%
	Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) **Indikator**	490.983.594	222.084.767	45,23%	100	100	100%	145,23%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi							
	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat **Indikator** Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	5.650.000.000	5.650.000.000	100%	100	100	100%	200%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) **Indikator** Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	861.081.500	765.501.374	88,90%	100	100	100%	188,89%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	-	0,00	100	0	0	0

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun							
	Program 12.5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase **Sasaran Program** Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase **Indikator Kinerja Program** persentase sistem drainase perkotaan dalam kondisi baik	14.618.355.766	4.264.659.808	29,71%	100	32,55	32,55%	109,55%
	Kegiatan 12.5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.5.1** Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi baik **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	14.618.355.766	4.264.659.808	29,71%	100	32,55	32,55%	109,55%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan **Indikator** Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	12.163.121.535	2.528.912.645	20,79%	100	21,50	21,50%	42,29%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	582.510.620	186.428.807	32,00%	100	46,52	46,52%	78,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara							
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan **Indikator** Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	620.000.000	619.192.646	99,87%	100	100	100%	199,86%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan **Indikator** Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	224..522.874	219.012.254	97,55%	100	100	100%	197,54%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan **Indikator** Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	381.638.870	342.661.200	89,79%	100	100	100%	189,78%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan **Indikator**	646.561.867	368.452.256	56,99%	100	100	100%	156,98%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara							
	Program 12.6 Program Penataan Bangunan Gedung **Sasaran Program** Meningkatnya bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) **Indikator Kinerja Program** Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF)	42.760.154.901	36.818.903.465	86,11%	100	91,21	91,21%	105,92%
	Kegiatan 12.6.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung **Sasaran Kegiatan 12.6.1** Meningkatnya dokumen SLF yang dikeluarkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen SLF yang dikeluarkan	42.760.154.901	36.818.903.465	86,11%	100	91,21	91,21%	105,92%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung **Indikator** Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	89.072.000	57.200.400	64,22%	100	100	100%	164,21%
	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan StrategisKabupaten/Kota	49.995.790	29.642.000	59,29%	100	100	100%	159,28%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan StrategisKabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	42.157.318.411	36.536.175.765	86,67%	100	91,09	91,09%	177,75%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	463.768.700	195.885.300	42,24%	100	100	100%	142,23%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG **Indikator** Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							
	Program 12.7 Program Penataan Bangunan Gedung **Sasaran Program** Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan **Indikator Kinerja Program** Persentase penataan bangunan dan lingkungan	56.580.000	53.019.634	93,71%	100	100	100%	106,71%
	Kegiatan 12.7.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.7.1** Tersedianya dokumen RTBL Kabupaten **Indikator Kinerja Kegiatan** persentase wilayah yang memiliki RTBL	56.580.000	53.019.634	93,71%	100	100	100%	106,71%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan **Indikator**	56.580.000	53.019.634	93,71%	100	100	100%	193,70%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan							
	Program 12.8 Program Penyelenggaraan Jalan **Sasaran Program** Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap **Indikator Kinerja Program** Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	357.405.662.180	258.906.886.487	72,44%	100	80,34	80,34%	110,90%
	Kegiatan 12.8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.8.1** Meningkatnya panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan kondisinya **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan kondisinya	357.405.662.180	258.906.886.487	72,44%	100	80,34	80,34%	110,90%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **Indikator** Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	200.000.000	-	0,00	100	0	0	0

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Jalan **Indikator** Panjang Jalan Yang Dibangun	9.762.772.995	5.073.733.713	51,97%	100	56,32	56,32%	108,29%
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rekonstruksi Jalan **Indikator** Panjang Jalan Yang Direkonstruksi	271.771.138.327	197.014.658.509	72,49%	100	79,36	79,36%	151,85%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan **Indikator** Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.000.000.000	894.922.348	89,49%	100	100	100%	189,49%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan **Indikator** Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4.944.972.000	3.836.419.411	77,58%	100	74,72	74,72%	152,30%
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembangunan Jembatan **Indikator** Jumlah Jembatan yang Dibangun	60.226.778.858	42.919.943.924	71,26%	100	85,94	85,94%	157,20%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Survei Kondisi Jalan/Jembatan **Indikator** Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.200.000.000	1.035.037.147	86,25%	100	100	100%	186,25%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Rehabilitasi Jalan **Indikator** Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.000.000.000	956.286.523	95,63%	100	100	100%	195,62%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan **Indikator** Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	7.300.000.000	7.175.8874.912	98,30%	100	100	100%	198,29%
	Program 12.9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi **Sasaran Program** Meningkatnya SDM bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi **Indikator Kinerja Program** Persentase SDM bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi	401.591.000	322.866.815	80,40%	100	100	100%	124,37%
	Kegiatan 12.9.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi **Sasaran Kegiatan 12.9.1** Meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengikuti pelatihan	199.761.000	125.543.815	62,85%	100	100	100%	159,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi							
	Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi JabatanOperator dan Teknisi atau Analis **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi JabatanOperator dan Teknisi atau Analis **Indikator** Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	100.000.000	35.179.242	35,18%	100	100	100%	135,17%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi **Indikator** Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	99.761.000	90.364.573	90,58%	100	100	100%	190,58%
	Kegiatan 12.9.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.9.2** meningkatnya ketersediaan dokumen penataan ruang	201.830.000	197.323.000	97,77%	100	100	100%	102,28%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Program Persentase wilayah kecamatan atau kawasan strategis yang memiliki RDTR yang ditetapkan							
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah dokumen data dan infromasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang disediakan	201.830.000	197.323.000	97,77%	100	100	100%	197,76%
	Program 12.10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang **Sasaran Program** meningkatnya ketersediaan dokumen penataan ruang **Indikator Kinerja Program** Persentase wilayah kecamatan atau kawasan strategis yang memiliki RDTR yang ditetapkan	6.558.761.274	2.286.623.245	34,86%	100	98,18	98,18%	281,64%
	Kegiatan 12.10.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.10.1** Tersedianya dokumen penataan ruang yang dihasilkan **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase dokumen penataan ruang yang dihasilkan	1.547.813.804	963.389.832	62,24%	100	92,30	92,30%	148,29%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan**	1.039.481.894	562.899.601	54,15%	100	90,82	90,82%	144,97%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang **Indikator** Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penetapan RDTR Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penetapan RTRW Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	508.331.910	400.490.231	78,79%	100	95,32	95,32%	174,10%
	Kegiatan 12.10.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.10.2** Meningkatnya dokumen tata ruang yang disetujui	4.639.526.670	980.714.372	21,14%	100	100	100%	473,03%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase dokumen tata ruang yang disetujui							
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan Peta Dasar **Indikator** Jumlah data SHP Peta Dasar	1.939.780.170	414.720.534	21,38%	100	100	100%	121,37%
	Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota **Indikator** Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2.699.746.500	565.993.838	20,96%	100	100	100%	120,96%
	Kegiatan 12.10.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.10.3** Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang yang di keluarkan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase dokumen pemanfaatan ruang yang di keluarkan	183.000.000	173.903.189	95,03%	100	100	100%	105,22%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang **Indikator**	183.000.000	173.903.189	95,03%	100	95,32	95,32%	195,02%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku							
	Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **Sasaran Sub Kegiatan** Tersedianya Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang **Indikator** Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 12.10.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.10.4** Meningkatnya pelanggaran penataan ruang yang ditangani **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pelanggaran penataan ruang yang ditangani	188.420.800	168.615.852	89,49%	100	100	100%	111,74%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang **Indikator** Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	78.745.800	64.944.492	82,47%	100	100	100%	182,47%
	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK **Sasaran Sub Kegiatan** Terlaksananya Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	109.675.000	103.671.360	94,53%	100	100	100%	194,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang							
	Program 12.11 Program Pengembangan Perumahan **Sasaran Program** Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah **Indikator Kinerja Program** Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2.570.019.673	798.835.936	31,08%	24,19	11,10	45,89%	147,63%
	Kegiatan 12.11.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.11.1** Tersedianya Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang telah di data **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	402.703.630	390.935.009	97,08%	24,19	11,10	45,89%	47,27%
	Sub Kegiatan 12.11.1.1 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani **Sasaran Sub Kegiatan 12.11.1.1** Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	402.703.630	390.935.009	97,08%	2	2	100%	100,3%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 12.11.2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.11.2** Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1.924.261.043	170.332.127	8,85%	100%	0%	0%	0,00%
	Sub Kegiatan 12.11.2.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **Sasaran Sub Kegiatan 12.11.2.1** Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	36.955.070	-	0,00%	18	0	0%	0%
	Sub Kegiatan 12.11.2.2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana **Sasaran Sub Kegiatan 12.11.2.2** Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	35.313.922	-	0,00%	20	0	0%	0%
	Sub Kegiatan 12.11.2.3	1.851.992.051	170.332.127	9,20%	253	0	0%	0%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.11.2.3** Persentase rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang tertangani **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 12.11.3 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan **Sasaran Kegiatan 12.11.3** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentase Jumlah pengembang/pemohon yang dilayani	243.055.000	237.568.800	97,74%	100%	100%	100%	102,31%
	Sub Kegiatan 12.11.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan **Sasaran Sub Kegiatan 12.11.3.1** Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	243.055.000	237.568.800	97,74%	1	1	100%	102,31%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Program 12.12 Program Kawasan Permukiman **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman **Indikator Kinerja Program** Persentase luas kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	7.487.018.900	7.457.949.317	99,61%	23,77	14,77	62,14%	62,38%
	Kegiatan 12.12.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman **Sasaran Kegiatan 12.12.1** Tersedianya data pengembang/pemohon yang dilayani **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	104.991.300	103.302.317	98,39%	23,77	14,77	62,14%	63,15%
	Sub Kegiatan 12.12.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman **Sasaran Sub Kegiatan 12.12.1.1** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	104.991.300	103.302.317	98,39%	1	1	100%	102 %
	Kegiatan 12.12.2 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sasaran Kegiatan 12.12.2** Tersedianya permukiman yang layak huni, sehat, aman dan terencana dan berkelanjutan	2.421.144.200	2.393.763.600	98,87%	100	100	100%	101,14%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani							
	Sub Kegiatan 12.12.2.1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP **Sasaran Sub Kegiatan 12.12.2.1** Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2.310.741.000	2.284.440.400	98,86%	9	9	100%	101%
	Sub Kegiatan 12.12.2.2 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh **Sasaran Sub Kegiatan 12.12.2.2** TerlaksananyaSurvei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	110.403.200	109.323.200	99,02%	1	1	100%	101%
	Kegiatan 12.12.3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sasaran Kegiatan 12.12.1** Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha berkualitas	4.960.883.400	4.960.883.400	100%	100	100	100%	100%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 12.12.3.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni **Sasaran Sub Kegiatan 12.12.3.1** Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Kegiatan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4.960.883.400	4.960.883.400	100%	153	153	100%	100%
	Program 12.13 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh **Sasaran Program** Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	24.991.378.713	24.308.243.813	97,27%	73,20	13,63	18,62%	19,14%
	Kegiatan 12.13.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.13.1** Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	24.991.378.713	24.308.243.813	97,27%	73,20	13,63	18,62%	19,14%
	Sub Kegiatan 12.13.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Sasaran Sub Kegiatan 12.13.1.1** Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	22.390.838.693	21.758.307.793	97,18%	1134	1023	90,21%	93 %

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaik							
	Sub Kegiatan 12.13.1.2 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru **Sasaran Sub Kegiatan 12.13.1.2** Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2.600.540.020	2.549.936.020	98,05%	51	51	100%	102 %
	Program 12.14 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) **Sasaran Program** Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) **Indikator Kinerja Program** Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	139.322.050.530	83.442.289.168	59,89%	67,82	51,22	75,52%	126,10%
	Kegiatan 12.14.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan **Sasaran Kegiatan 12.14.1** Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	139.322.050.530	83.442.289.168	59,89%	67,82	51,22	75,52%	126,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara							
	Sub Kegiatan 12.14.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan **Sasaran Sub Kegiatan 12.14.1.1** Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	553.296.500	547.523.594	98,96%	15	15	100%	101%
	Sub Kegiatan 12.14.1.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian **Sasaran Sub Kegiatan 12.14.1.2** Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	138.665.985.030	82.800.582.983	59,71%	314	314	100%	167 %
	Sub Kegiatan 12.14.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan **Sasaran Sub Kegiatan 12.14.1.3** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	58.258.000	52.916.591	90,83%	1	1	100%	110 %

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							
	Sub Kegiatan 12.14.1.4 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang **Sasaran Sub Kegiatan 12.14.1.4** Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	44.511.000	41.266.000	92,71%	1	1	100%	108%
	Program 12.15 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan **Sasaran Program** Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan **Indikator Kinerja Program** Presentase Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	59.467.250	22.375.250	37,63%	100	100	100%	265,77%
	Kegiatan 12.15.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.15.1** Tersedianya Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentase Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.467.250	22.375.250	37,63%	100	100	100%	265,77%
	Sub Kegiatan 12.15.1.1	59.467.250	22.375.250	37,63%	3	3	100%	266%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.15.1.1** Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Program 12.16 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan **Sasaran Program** Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah tanah untuk pembangunan **Indikator Kinerja Program** Presentasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah tanah untuk pembangunan	173.502.029.000	146.982.111.408	84,71%	100	100	100%	118,04%
	Kegiatan 12.16.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.16.1** Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentase pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	173.502.029.000	146.982.111.408	84,71%	100	100	100%	118,04%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	yang telah dilaksanakan dari total target Untuk Pembangunan							
	Sub Kegiatan 12.16.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.16.1.1** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	173.502.029.000	146.982.111.408	84,71%	2	2	100%	118 %
	Program 12.17 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee **Sasaran Program** Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) **Indikator Kinerja Program** Tersedianya tanah objek landerform (TOL) yang siap di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absante	36.228.500	11.989.000	33,09%	1	1	100%	302,18%
	Kegiatan 12.17.1 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absenteedalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.17.1** Tersedianya dokumen Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	36.228.500	11.989.000	33,09%	1	1	100%	302,18%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Maksimum dan Tanah Absenteedalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Dokumen/Surat Keputusan penetapan subjek dan objek yang di terbitkan							
	Sub Kegiatan 12.17.1.1 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah **Sasaran Sub Kegiatan 12.17.1.1** Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36.228.500	11.989.000	33,09%	1	1	100%	302 %
	Program 12.18 Program Penatagunaan Tanah **Sasaran Program** Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahMeningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah **Indikator Kinerja Program** Presentase jumlah sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan	820.575.700	492.935.584	60,07%	100	100	100%	166,47%
	Kegiatan 12.18.1 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.18.1** Tersedianya Data Bidang Tanah Pemerintah **Indikator Kinerja Kegiatan** Presentase bidang tanah pemerintah daerah yang telah di daftarkan	820.575.700	492.935.584	60,07%	100	100	100%	166,47%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 12.18.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah **Sasaran Sub Kegiatan 12.18.1.1** Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	820.575.700	492.935.584	60,07%	1	1	100%	166,47%
	Program 12.19 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) **Sasaran Program** Optimalisasi Pelayanan Transportasi Darat Meningkatnya Keselamatan Angkutan Jalan **Indikator Kinerja Program** Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang) Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	137.452.261.684	135.276.245.913	98,42%	 100 100	 100 100	 100% 100%	101,61%
	Kegiatan 12.19.1 Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota **Sasaran Kegiatan 12.19.1** Terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia di ajalan kabupaten/kota	126.250.744.200	124.939.575.315	98,96%			100%	101,05%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 12.19.1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.1.1** TerlaksananyaPembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	105.044.796.350	-	0,00%	6	6	100%	0%
	Sub Kegiatan 12.19.1.2 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.1.2** Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	105.044.796.350	103.786.334.420	98,80%	330	330	100%	101,21%
	Sub Kegiatan 12.19.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.1.3** Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	297.499.050	289.557.725	97,33%	300	300	100%	102,74%
	Sub Kegiatan 12.19.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	20.908.448.800	20.863.683.170	99,79%	1310	1310	100%	100,21%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 12.19.1.4 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara							
	Kegiatan 12.19.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C **Sasaran Kegiatan 12.19.2** Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C	274.102.736	252.963.400	92,29%			93,45%	101,26%
	Sub Kegiatan 12.19.2.1 Pengawasan operasional terminal penumpang tipe C **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.2.1** Pengawasan operasional terminal penumpang tipe C **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara.	216.725.324	195.837.550	90,36%	1	1	100%	110,67%
	Sub Kegiatan 12.19.2.2 Revitalisasi terminal tipe C (Fasilitas utama dan penunjang). **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.2.2** Terlaksananya Revitalisasi terminal tipe C (Fasilitas utama dan penunjang). **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	11.603.710	11.493.700	99,05%	1	1	100%	100,96%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 12.19.2.3 Pembangnan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.2.3** Pembangnan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	27.373.776	27.373.750	100,00%	2	2	100%	100,00%
	Sub Kegiatan 12.19.2.4 Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.2.4** Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas	18.399.926	18.258.400	99,23%	4	4	100%	100,78%
	Kegiatan 12.19.3 Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir **Sasaran Kegiatan 12.19.3** Terlaksananya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.433.075.204	1.327.458.940	92,63%			100%	107,95%
	Sub Kegiatan 12.19.3.1	1.005.906.464	1.001.603.424	99,57	1	1	100%	100,43%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.3.1** Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
	Sub Kegiatan 12.19.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.3.2** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	427.168.740	325.855.516	76,28%	12	12	100%	131,09%
	Kegiatan 12.19.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.476.789.270	1.372.100.316	92,91%			97,15%	104,56%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 12.19.4 Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah pengujian berkalah kendaraan bermotor yang telah dilakukan							
	Sub Kegiatan 12.19.4.1 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.1** Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	429.874.440	380.019.132	88,40%	18	18	100%	113,12%
	Sub Kegiatan 12.19.4.2 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.2** Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.315.000	7.000.000	95,69%	1300	1300	100%	104,50%
	Sub Kegiatan 12.19.4.3 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.3**	80.093.450	66.647.000	83,21%	2	2	100%	120,18%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	TerlaksananyaSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
	Sub Kegiatan 12.19.4.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.4** Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	845.228.480	821.249.018	97,16%	18	18	100%	102,92%
	Sub Kegiatan 12.19.4.5 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.5** Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	79.489.000	77.616.166	97,64%	1	1	100%	102,41%
	Sub Kegiatan 12.19.4.6 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.4.6**	34.788.900	19.569.000	56,25%	1	1	100%	177,78%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
	Kegiatan 12.19.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota **Sasaran Kegiatan 12.19.5** Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	1.085.613.000	1.038.140.476	95,63%			100%	104,56%
	Sub Kegiatan 12.19.5.1 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.5.1** Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	182.861.500	175.404.254	95,92%	12	12	100%	104,25%
	Sub Kegiatan 12.19.5.2 Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.5.2**				4	4	100%	

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 12.19.5.3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.5.3** Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	66.148.000	27.700.000	41,88%	2	2	100%	238,80%
	Sub Kegiatan 12.19.5.4 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.5.4** Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	836.603.500	835.036.222	99,81%	12	12	100%	100,19%
	Kegiatan 12.19.6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untukk jalan Kabupaten/Kota)	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 12.19.6 Terciptanya Persetujuan Hasil Analis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Persetujuan Hasil Analis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 12.19.6.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.6.1** Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1	1	100%	
	Kegiatan 12.19.8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.19.8** Terlakasananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	3.804.769.500	3.329.681.906	87,51%			100%	114,27%
	Sub Kegiatan 12.19.8.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.8.1**	111.942.000	111.611.000	99,70%	12	12	100%	100,30%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 12.19.9.2 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.9.2** Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.692.827.500	3.218.070.906	87,14%	4	4	100%	114,75%
	Kegiatan 12.19.9 Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.19.9** Terlaksananya Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota antar Kota	2.917.130.554	2.874.070.740	98,52%			100%	101,5%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penetapan Rencana umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 12.19.9.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.9.1** Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.868.595.254	2.850.171.440	99,36%	2	2	100%	100,65%
	Sub Kegiatan 12.19.9.2 Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.9.2** Terlaksananya Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.535.300	23.899.300	49,24%	1	1	50%	101,54%
	Kegiatan 12.19.10 Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	97.649.520	57.314.520	58,69%			90,75%	154,62%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.19.10** Terlaksananya Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah							
	Sub Kegiatan 12.19.10.1 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.10.1** Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	61.047.870	42.700.870	69,95%				
	Sub Kegiatan 12.19.10.2 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.10.2** Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	36.601.650	14.613.650	39,93%	150	150	75,33%	188,67%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
	Kegiatan 12.19.11 Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah **Sasaran Kegiatan 12.19.11** Terlaksananya Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah	32.261.000	13.858.000	42,96%			100%	232,78%
	Sub Kegiatan 12.19.11.1 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaran angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.11.1** Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaran angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	32.261.000	13.858.000	42,96%	311	311	96,46%	224,56%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
	Kegiatan 12.19.12 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 12.19.12** Terlaksananya Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.126.700	71.082.300	88,71%			100%	112,72%
	Sub Kegiatan 12.19.12.1 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.19.12.1** Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	80.126.700	71.082.300	88,71%	1	1	100%	112,72%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Program 12.20 Program Pengelolaan Pelayaran **Sasaran Program** Optimalnya Layanan Angkutan Laut dan Penyeberangan **Indikator Kinerja Program** Konektivitas Laut dan Penyeberangan (Nilai)	5.848.043.856	4.246.483.772	72,61%	100	100	100%	137,71%
	Kegiatan 12.20.1 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Sasaran Kegiatan 12.20.1** Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	15.773.020	5.768.000	36,57%			20,50%	56,05%
	Sub Kegiatan 12.20.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan trayek sungai, danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.1.1** Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Jaringan trayek sungai, danau dan Penyeberangan dan	463.768.700	195.885.300	42,24%	1	1	100%	236,76%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Persetujuan Pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 12.20.1.2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.1.2** Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.180.500	60.725.404	99,26%	12	12	100%	100,75%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 12.20.2 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Sasaran Kegiatan 12.20.2** Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.000.000	3.314.000	82,85%			100%	120,7%
	Sub Kegiatan 12.20.2.1 Analis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.2.1** Terlaksananya Analis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten / Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	3.314.000	82,85%	1	1	100%	120,70%
	Kegiatan 12.20.3 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5.179.210.340	3.641.077.974	70,30%			100%	142,24%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 12.20.3 Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							
	Sub Kegiatan 12.20.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.3.1** Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.556.079.840	1.547.373.396	99,44%	4	4	100%	100,56%
	Sub Kegiatan 12.20.3.2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.3.2** Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	3.538.766.000	2.010.197.426	56,81%	6	6	100%	176,04%
	Sub Kegiatan 12.20.3.3 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	84.364.500	83.507.152	98,98%	12	12	100%	101,03%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 12.20.3.3 Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun							
	Kegiatan 12.20.4 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Sasaran Kegiatan 12.20.4** Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	587.879.996	535.598.394	91,11%			100%	109,75%
	Sub Kegiatan 12.20.4.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.4.1** Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	302.331.610	274.568.444	90,82%	2	2	100%	110,11%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 12.20.4.2 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Sasaran Sub Kegiatan 12.20.4.2** Terlaksananya asilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	285.548.386	261.029.950	91,41%	2	2	100%	109,39%
13.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Kemandirian Desa **Indikator Kinerja SS** Persentase Desa Mandiri (%)				18,20	22,44	123,30%	
	Program 13.1 Program Penataan Desa **Sasaran Program** Meningkatnya Pengentasan Desa Tertinggal **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengentasan Desa tertinggal	226.323.000	90.777.100	44,1%	100	100	100%	226,75%
	Kegiatan 13.1.1 Penyelenggaraan Penataan Desa **Sasaran Kegiatan 13.1.1** Terpenuhinya penataan desa yang terfasilitasi **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase Penataan Desa yang Terfasilitasi	226.323.000	90.777.100	44,1%	100	100	100%	226,75%
	Program 13.2 Program Peningkatan Kerjasama Desa	18.865.000	16.229.200	86%	100	100	100%	116,27%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya fasilitasi kerjasama desa **Indikator Kinerja Program** Persentase desa yang terfasilitasi kerjasaa							
	Kegiatan 13.2.1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa **Sasaran Kegiatan 13.2.1** meningkatnya fasilitasi kerjasama antar desa **Indikator Kinerja Kegiatan** peersentase fasilitasi kerjasama antar desa yang dilakukan	18.865.000	16.229.200	86%	100	100	100%	116,27%
	Program 13.3 Program Administrasi Pemerintahan Desa **Sasaran Program** Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa **Indikator Kinerja Program** Persetase fasilitasi pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	3.354.252.812	1.941.483.371	57,88%	100	96,12	96,12%	166,06%
	Kegiatan 13.3.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa **Sasaran Kegiatan 13.3.1** Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.354.252.812	1.941.483.371	57,88%	100	96,12	96,12%	166,06%
	Program 13.4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	988.984.850	765.190.751	77,4%	100	100	100%	129,20%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Program Meningkatnya status desa mandiri **Indikator Kinerja Program** Persentase peningkatan status desa mandiri							
	Kegiatan 13.4.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah **Sasaran Kegiatan 13.4.1** Meningkatnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	988.984.850	765.190.751	77,4%	100	100	100%	129,20%
	Program 13.5 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi **Sasaran Program** Tersedianya Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang disahkan **Indikator Kinerja Program** Jumlah Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang disahkan	431.476.450	269.814.920	62,5%	1	1	100%	160%
	Kegiatan 13.5.1 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	431.476.450	269.814.920	62,5%	1	1	100%	160%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 13.5.1 Meningkatnya Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya							
	Program 13.6 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi **Sasaran Program** Meningkatnya kawasan transmigrasi yang dibangun **Indikator Kinerja Program** Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibangun	148.576.780	3.754.522	2,5%	1	1	14,45%	5,78%
	Kegiatan 13.6.1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 13.6.1** Meningkatnya pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	148.576.780	3.754.522	2,5%	1	1	14,45%	5,78%
	Program 13.7 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi **Sasaran Program** Meningkatnva pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdavaan warga kawasan transmigrasi **Indikator Kinerja Program** Jumlah kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	80.737.000	36.002.800	44,6%	1	1	70%	156,95%
	Kegiatan 13.7.1 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	80.737.000	36.002.800	44,6%	3	2	70%	156,95%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 13.7.1 Meningkatnya permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya							
14.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup **Indikator Kinerja SS** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				76,1	80,22	105.41%	
	Program 14.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Tercapainya target perencanaan lingkungan hidup terhadap mitigasi dampak KRP **Indikator Kinerja Program** Persentase capaian target perencanaan lingkungan hidup	39.506.361	39.379.361	99,68%	100	100	100%	100,32%
	Kegiatan 14.1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.1.1** Terlaksananya arahan-arahan yang termuat dalam RPPLH **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase pelaksanaan RPPLH	39.506.361	39.379.361	99,68%	75	75	100%	100,32%
	Sub Kegiatan 14.1.1.1 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.1.1.1**	39.506.361	39.379.361	99,68%	1	1	100,00%	100,32%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota							
	Kegiatan 14.1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.1.2** Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KRP **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang terjamin kualitasnya	833.571.959	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 14.1.2.1 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang **Sasaran Sub Kegiatan 14.1.2.1** Tersedianya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	453.844.761	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 14.1.2.2 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup **Sasaran Sub Kegiatan 14.1.2.2**	379.727.198	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Tersedianya Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun							
	Program 14.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase titik pantau tanah, air dan udara dengan status memenuhi parameter IKLH	3.281.797.383	3.124.086.722	95,19%	50	50	100%	105,05%
	Kegiatan 14.2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan hidup kabupaten/kota **Sasaran Kegiatan 14.2.1** Terpenuhinya pemantauan lingkungan terhadap titik pantau air, udara dan tanah **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase nilai indeks pencemar yang mengalami penurunan	2.975.706.383	2.848.072.357	95,71%	50	50	100%	104,48%
	Sub Kegiatan 14.2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.1**	20.000.000	19.980.000	99,90%	2	2	100%	100,10%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan							
	Sub Kegiatan 14.2.1.2 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.2** Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	6.146.150	6.141.192	99,92%	1	1	100%	100,08%
	Sub Kegiatan 14.2.1.3 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.3** Tersedianya Laporan Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan, pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, Air Udara dan laut di susun	248.893.000	223.160.431	89,66%	8	8	100%	111,53%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 14.2.1.4 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.4** Tersedianya data hasil uji sampel Air, Udara dan Tanah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	238.846.719	228.178.040	95,53%	13	13	100%	104,68%
	Sub Kegiatan 14.2.1.5 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim Tingkat kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.5** Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	59.651.450	59.600.290	99,91%	1	1	100,00%	100,09%
	Sub Kegiatan 14.2.1.6 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.6** Tersedianya dokumen status lingkungan hidup daerah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	5.071.524	4.996.524	98,52%	1	1	100,00%	101,50%
	Sub Kegiatan 14.2.1.7 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	488.696.840	471.626.200	96,51%	179	215	120,11%	124,46%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.7 Terlaksananya pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan							
	Sub Kegiatan 14.2.1.8 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.8** Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1.242.830.930	1.197.500.451	96,35%	5	5	100,00%	103,79%
	Sub Kegiatan 14.2.1.9 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.1.9** Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	665.569.770	636.889.229	95,69%	1	1	100,00%	104,50%
	Kegiatan 14.2.2 Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan hidup kabupaten/kota **Sasaran Kegiatan 14.2.2** Meningkatnya perbaikan ekosistem pesisir	306.091.000	276.014.365	90,17%	0,0042	0,0042	100%	110,90%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase luas lahan yang dilakukan pemulihan							
	Sub Kegiatan 14.2.2.1 Pelaksanaan rehabilitasi **Sasaran Sub Kegiatan 14.2.2.1** Perbaikan kualitas ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan lamun) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	306.091.000	276.014.365	90,17%	1	1	100,00%	110,90%
	Program 14.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) **Sasaran Program** Meningkatnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) **Indikator Kinerja Program** Persentase luas ruang terbuka hijau perkotaan terhadap luas wilayah perkotaan	4.970.856.750	4.388.073.177	88,28%	4,44	4,44	100%	113,27%
	Kegiatan 14.3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.3.1** Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Kabupaten/Kota	4.970.856.750	4.388.073.177	88,28%	0,005	0,007	140%	158,58%
	Sub Kegiatan 14.3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) **Sasaran Sub Kegiatan 14.3.1.1** Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	4.216.299.000	3.643.032.213	86,40%	1	0,9	90,00%	104,16%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 14.3.1.2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati **Sasaran Sub Kegiatan 14.3.1.2** Terkelolanya Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	754.557.750	745.040.964	98,74%	1	1	100,00%	101,28%
	Program 14.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) **Sasaran Program** Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) **Indikator Kinerja Program** Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Kegiatan yang mengelola limbah B3	133.052.700	40.630.300	30,54%	70	76	108,57%	355,5%
	Kegiatan 14.4.1 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.4.1** Terpenuhinya komitmen aturan pengumpulan limbah B3 **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B	133.052.700	40.630.300	30,54%	80	80	100%	355,5%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 14.4.1.1 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.4.1.1** Terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	133.052.700	40.630.300	30,54%	10	10	100%	355,5%
	Program 14.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) **Sasaran Program** Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan **Indikator Kinerja Program** Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang masih aktif terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup	145.803.998	144.140.798	98,86%	82	84	102,44%	103,62%
	Kegiatan 14.5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.5.1** Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase usaha dan/atau kegiatan yang masih aktif yang dibina/diawasi terkait pengelolaan lingkungan hidup	145.803.998	144.140.798	98,86%	90	90	100%	101,15%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 14.5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH **Sasaran Sub Kegiatan 14.5.1.1** Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	23.001.998	22.245.998	96,71%	1	1	100,00%	103,40%
	Sub Kegiatan 14.5.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **Sasaran Sub Kegiatan 14.5.1.2** Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	122.802.000	121.894.800	99,26%	20	20	100,00%	100,74%
	Program 14.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH **Sasaran Program**	27.415.900	27.330.900	99,69%	72	80	111,11%	111,45%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH **Indikator Kinerja Program** Persentase masyarakat hukum adat yang memahami perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
	Kegiatan 14.6.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH **Sasaran Kegiatan 14.6.1** Meningkatnya masyarakat adat yang terfasilitasi terkait PPLH di kabupaten/kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Jumlah masyarakat adat yang sudah terpetakan /teridentifikasi lingkup kabupaten/kota	27.415.900	27.330.900	99,69%	1	1	100%	100,31%
	Sub Kegiatan 14.6.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH **Sasaran Sub Kegiatan 14.6.1.1** Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan	27.415.900	27.330.900	99,69%	1	1	100%	100,31%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH							
	Program 14.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat **Sasaran Program** Meningkatnya kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase entitas yang ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	197.587.300	192.251.850	97,30%	11,78	16,33	138,62%	142,46%
	Kegiatan 14.7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.7.1** Meningkatnya kapasitas satuan pendidikan formal dalam bidang lingkungan hidup **Indikator Kinerja Kegiatan** Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan	197.587.300	192.251.850	97,30%	10	13	130%	133,60%
	Sub Kegiatan 14.7.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat **Sasaran Sub Kegiatan 14.7.1.1** Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan	197.587.300	192.251.850	97,30%	10	10	100,00%	102,78%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH							
	Program 14.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat **Sasaran Program** Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase entitas yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan 14.8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.8.1** Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang mengikuti penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Persen) Partisipasi penilaian penghargaan lingkungan hidup (peserta)	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan 14.8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Sub Kegiatan 14.8.1.1 Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
	Program 14.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup **Sasaran Program** Meningkatnya penyelesaian terhadap pengaduan lingkungan hidup **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan	110.848.800	103.167.855	93,07%	90	100	111,11%	119,38%
	Kegiatan 14.9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 14.9.1** Meningkatnya pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase tindak lanjut (penanganan) pengaduan lingkungan hidup	110.848.800	103.167.855	93,07%	90	90	100%	119,38%
	Sub Kegiatan 14.9.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.9.1.1** Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	110.848.800	103.167.855	93,07%	5	5	100%	119,38%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani							
	Program 14.10 Program Pengelolaan Persampahan **Sasaran Program** Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan sebagai upaya penurunan emisi GRK Sektor Limbah **Indikator Kinerja Program** Persentase Pengurangan Sampah	36.828.444.844	34.356.668.506	93,29%	16	19,70	123,13%	131,98%
	Kegiatan 14.10.1 Pengelolaan Sampah **Sasaran Kegiatan 14.10.1** Meningkatnya pengelolaan sampah di UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase sampah yang diproses di UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pembuangan Akhir Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	36.828.444.844	34.356.668.506	93,29%	100 100	100 100	100% 100%	107,19%
	Sub Kegiatan 14.10.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan **Sasaran Sub Kegiatan 14.10.1.1** Meningkatnya pemahaman kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	9.487.030.500	9.127.682.506	96,21%	6	6	100,00%	103,94%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat							
	Sub Kegiatan 14.10.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan **Saasaran Sub Kegiatan 14.10.1.2** Terlaksananya koordinasi dan sikronisasi penyediaan prasarana dan sarana ersama Pemerintah untuk pengelolaan sampah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	589.696.800	587.154.814	99,57%	1	1	100,00%	100,43%
	Sub Kegiatan 14.10.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.10.1.3** Tersediannya Sarana dan Prasarana penanganan sampah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	21.806.432.400	20.553.901.222	94,26%	5	5	100,00%	106,09%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir							
	Sub Kegiatan 14.10.1.4 Penanganan sampah melalui pengangkutan **Sasaran Sub Kegiatan 14.10.1.4** Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	4.771.121.700	4.008.032.520	84,01%	91.406	91.406	100,00%	119,04%
	Sub Kegiatan 14.10.1.5 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah **Sasaran Sub Kegiatan 14.10.1.5** Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	174.163.444	79.897.444	45,87%	16.393	9.562,5	58,33%	127,16%
	Program 14.11 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya **Sasaran Program** Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya **Indikator Kinerja Program** Persentase Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	212.634.000	204.475.277	96,16%	9990	9990	100%	103,99%
	Kegiatan 14.11.1 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	212.634.000	204.475.277	96,16%	6514,95	6514,95	100%	103,99%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 14.11.1 Terkelolanya Kawasan TAHURA Sebatung **Indikator Kinerja Kegiatan** Luas Kawasan TAHURA yang dikelola							
	Sub Kegiatan 14.11.1.1 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 14.11.1.1** Terlaksananya kerjasama penyelenggaraan TAHURA Sebatung **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	212.634.000	204.475.277	96,16%	1	1	100%	103,99%
15.	**Sasaran Startegis** Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim **Indikator Kinerja SS** Indeks Ketahanan Daerah				0,50	0,50	100%	
	Program 15.1 Program Penanggulangan Bencana **Sasaran Program** Meningkatnya Kualitas Layanan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana **Indikator Kinerja Program** Persentase Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	3.268.395.200	2.906.840.620	88,94%	100	90,88	90,88%	102,18%
	Kegiatan 15.1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 15.1.1** Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	254.901.250	239.982.803	94,15%	726	726	100%	106,22%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Kegiata Persentase kualitas cakupan wilayah yang diberi informasi rawan bencana kabupaten/kota							
	Sub Kegiatan 15.1.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.1.1** Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi daerah rawan bencana. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan rawan bencana.	254.901.250	239.982.803	94,15%	726	726	100%	106,22%
	Kegiatan 15.1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana **Sasaran Kegiatan 15.1.2** Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kualitas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang tepat waktu dan valid	515.895.050	370.956.286	71,91%	364	325,9	89,53%	124,51%
	Sub Kegiatan 15.1.2.1 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.2.1** Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan	39.415.000	36.415.000	92,39%	200	190	95,00%	102,83%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota							
	Sub Kegiatan 15.1.2.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.2.2** Terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan).	278.805.000	200.803.309	72,02%	3	2	66,67%	92,56%
	Sub Kegiatan 15.1.2.3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.2.3** Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tangap Bencana Alam **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.	122.958.500	106.715.552	86,79%	150	133	88,67%	102,16%
	Sub Kegiatan 15.1.2.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota. **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.2.4** Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	44.190.000	0	0,00%	10	0	0,00%	0,00%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya.							
	Sub Kegiatan 15.1.2.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.2.5** Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun.	30.526.550	27.022.425	88,52%	1	0,9	90,00%	101,67%
	Kegiatan 15.1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Sasaran Kegiatan 15.1.3** Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan, evakuasi, dan distribusi logistik korban bencana	1.392.846.900	1.206.370.930	86,61%	400	346	86,5%	99,87%
	Sub Kegiatan 15.1.3.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.3.1** Terlaksananya Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	1.090.151.900	990.497.100	90,86%	300	274	91,33%	100,52%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana.							
	Sub Kegiatan 15.1.3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.3.2** Terlaksananya distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	302.695.000	215.873.830	71,32%	100	72	72,00%	100,96%
	Kegiatan 15.1.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Sasaran Kegiatan 15.1.4** Meningkatnya Kualitas Layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana **Indikator Kinerja Kegiata** Persentase kualitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana valid dan tepat waktu	1.104.752.000	1.089.530.601	98,62%	5	5	100%	101,40%
	Sub Kegiatan 15.1.4.1 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.4.1** Tersusunnya dokumen penataan kelembagaan bencana **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun.	199.930.000	195.249.000	97,66%	1	1	100,00%	102,40%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sub Kegiatan 15.1.4.2 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.4.2** Terlaksananya kegiatan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	704.822.000	700.279.601	99,36%	3	3	100,00%	100,65%
	Sub Kegiatan 15.1.4.3 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Sub Kegiatan 15.1.4.3** Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.	200.000.000	194.002.000	97,00%	1	1	100,00%	103,09%
	Program 15.2 Program Penanganan Bencana **Sasaran Program** Meningkatnya Penanganan Bencana **Indikator Kinerja Program** Persentase Kegiatan Penanganan Bencana yang Terlaksana	422.037.405	328.832.281	77,92%	100	100	100%	128,34%
	Kegiatan 15.2.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	216.522.024	132.744.420	61,31%	100	100	100%	163,11%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Sasaran Kegiatan 15.2.1 Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Kegiatan Penanganan Bencana yang Terlaksana							
	Sub Kegiatan 15.2.1.1 Penyediaan Makanan **Sasaran Sub Kegiatan 15.2.1.1** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.	205.112.024	125.814.020	61,34%	100	100	100,00%	163,03%
	Sub Kegiatan 15.2.1.2 Penyediaan Sandang. **Sasaran Sub Kegiatan 15.2.1.2** Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.	11.410.000	6.930.400	60,74%	100	100	100,00%	164,64%

NO	URAIAN	BELANJA		%	CAPAIAN KINERJA		%	TINGKAT EFISIENSI
		ANGGARAN	REALISASI		TARGET	REALISASI		
	Kegiatan 15.2.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota **Sasaran Kegiatan 15.2.2** Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Kegiatan** Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	205.515.381	196.087.861	95,41%	100	100	100%	104,81%
	Sub Kegiatan 15.2.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana **Sasaran Sub Kegiatan 15.2.2.1** Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.	205.515.381	196.087.861	95,41%	100	100	100%	104,81%

Sumber: Dilah oleh Penulis, 2026.

TUJUAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diarahkan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Kotabaru yang sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Upaya pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara terpadu melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, perbaikan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pembangunan manusia seperti Indeks, indeks pembangunan kualitas keluarga, dan indeks ketimpangan gender yang secara keseluruhan mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Tabel II.7
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,61	72,8	73,03	100,31%	75	97,37%

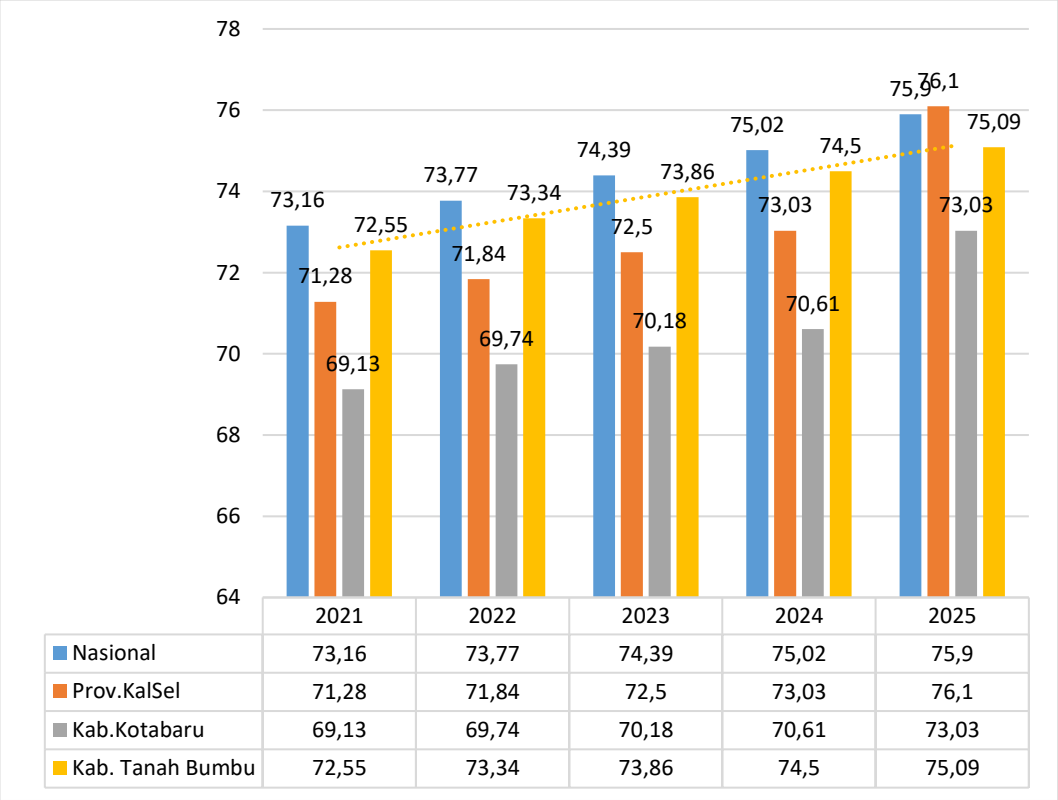
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 terealisasi sebesar 73,03 apabila dibandingkan dengan target 72,8 sehingga capaiannya sebesar 100,31% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) realisasi mencapai 73,03, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,42 poin dibandingkan dengan tahun 2024 IPM sebesar 70,61.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 terealisasi sebesar 73,03 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 75 sehingga capaian sebesar 97,37%. Adapun perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 – Tahun 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,9
Prov.KalSel	71,28	71,84	72,5	73,03	76,1
Kab.Kotabaru	69,13	69,74	70,18	70,61	73,03
Kab. Tanah Bumbu	72,55	73,34	73,86	74,5	75,09

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotabaru selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil, meskipun secara angka masih berada di posisi terendah dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, maupun Kabupaten Tanah Bumbu. Dimulai dari angka 69,13 pada tahun 2021, Kotabaru secara bertahap berhasil meningkatkan kualitas pembangunan manusianya hingga menembus angka 73,03 pada tahun 2025, dengan lonjakan yang cukup signifikan terlihat pada transisi tahun 2024 ke 2025. Peningkatan yang

konsisten ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat di wilayah tersebut, meskipun tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi dan nasional masih cukup besar.

Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka IPM paling rendah di antara pembanding lainnya dalam grafik tersebut, wilayah ini berhasil mempertahankan pertumbuhan yang progresif setiap tahunnya dan mencapai tonggak penting di tahun 2025 dengan melampaui angka 73.

Kenaikan yang signifikan ini dipicu oleh faktor pendorong utama berupa peningkatan standar hidup layak melalui pertumbuhan ekonomi daerah serta perbaikan akses layanan kesehatan yang memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih membayangi adalah kondisi geografis Kotabaru yang didominasi wilayah kepulauan, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik dan sulitnya pemerataan fasilitas pendidikan serta kesehatan ke area terpencil. Tantangan ini terlihat dari pertumbuhan IPM yang cenderung melambat pada periode 2021 hingga 2024 sebelum akhirnya mengalami lonjakan tajam pada proyeksi tahun 2025.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren positif yang didukung oleh beberapa faktor pendorong utama:

1. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya standar hidup layak yang dipengaruhi oleh sektor komoditas unggulan di Kotabaru
2. Adanya perbaikan pada akses pendidikan (Harapan Lama Sekolah) dan kesehatan (Usia Harapan Hidup) yang mulai terakumulasi hasilnya pada angka IPM di tahun-tahun terakhir.

Meskipun mengalami tren kenaikan, terdapat beberapa tantangan mendasar yang menjadi faktor penghambat optimalisasi capaian IPM:

1. Luasnya wilayah yang terfragmentasi oleh laut membuat distribusi tenaga pengajar dan medis tidak merata, sehingga menghambat capaian pendidikan dan kesehatan di pelosok.
2. Terdapat jarak (gap) yang cukup lebar antara Kotabaru (73,03) dengan rata-rata Nasional (75,9) di tahun 2025, menunjukkan bahwa kecepatan akselerasi masih perlu ditingkatkan.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan sejumlah strategi tindak lanjut yang berfokus pada pemerataan layanan. Di sektor pendidikan, penguatan jaringan internet di pulau-pulau terpencil menjadi prioritas agar akses terhadap modul pembelajaran setara dengan wilayah pusat kota. Untuk layanan kesehatan, dilakukan optimalisasi layanan kesehatan bergerak secara rutin guna menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan hasil laut dan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang stabil, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur jembatan serta dermaga modern untuk menurunkan biaya logistik dan mempermudah aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu memprioritaskan transformasi digital dalam sektor pendidikan agar anak-anak di pulau terluar mendapatkan kualitas materi yang setara dengan di pusat kota. Selain itu, penguatan layanan kesehatan bergerak seperti puskesmas terapung dan pemberian insentif khusus bagi tenaga profesional di wilayah terpencil sangat krusial untuk menutup celah ketimpangan layanan. Dengan mengoptimalkan konektivitas wilayah dan melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang, Kotabaru memiliki peluang besar untuk memperkecil jarak ketertinggalannya terhadap capaian IPM Provinsi maupun Nasional.

Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat serta memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat. Sasaran ini

diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan harapan lama sekolah menunjukkan peluang lamanya pendidikan yang dapat diharapkan akan ditempuh oleh anak usia sekolah di masa mendatang.

Melalui peningkatan kedua indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas, meningkatkan partisipasi sekolah, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat Kotabaru yang cerdas, produktif, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Tabel II.8
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,56	7,6	7,71	101,44%	8,9	86,62%

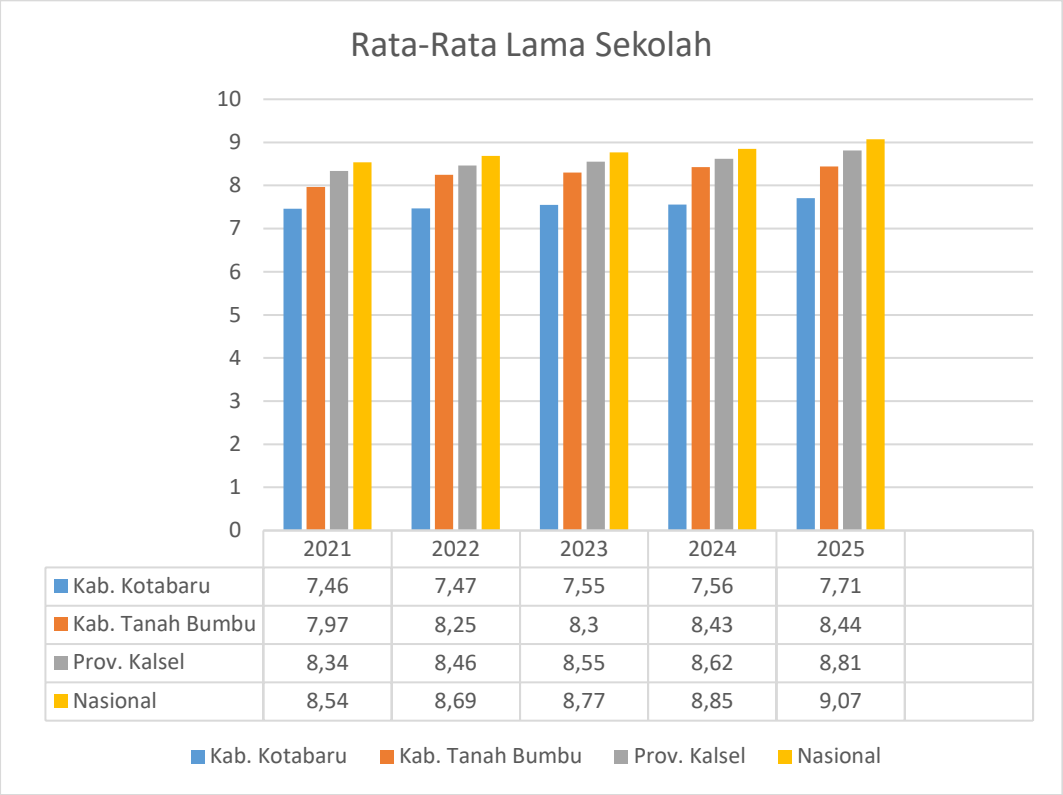
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,71 Tahun, apabila dibandingkan dengan target 7,6 Tahun maka capaiannya sebesar 101,44% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Rata-Rata Lama Sekolah realisasi mencapai 7,71 tahun, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,56 tahun

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2025 terealisasi sebesar 7,71 tahun, apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 8,9 tahun maka capaiannya sebesar 86,62%.

Grafik II.2
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Pada Tahun 2021 s.d 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kotabaru	7,46	7,47	7,55	7,56	7,71
Kab. Tanah Bumbu	7,97	8,25	8,3	8,43	8,44
Prov. Kalsel	8,34	8,46	8,55	8,62	8,81
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BPS Provinsi Kasel, 2026.

Berdasarkan grafik Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian rata-rata lama sekolah di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Secara nasional, angka meningkat dari 8,54 tahun pada 2021 menjadi 9,07 tahun pada 2025. Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan dari 8,34 tahun menjadi 8,81 tahun. Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peningkatan dari 7,97 tahun menjadi 8,44 tahun. Sementara itu, Kabupaten Kotabaru meningkat secara bertahap dari 7,46 tahun pada 2021 menjadi 7,71 tahun pada 2025. Meskipun mengalami kenaikan yang konsisten, posisi Kabupaten Kotabaru masih berada di bawah capaian kabupaten pembanding, provinsi, maupun nasional.

Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren positif dalam peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah selama periode 2021–2025, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam keberlanjutan pendidikan masyarakat. Namun

demikian, masih terdapat kesenjangan dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program wajib belajar, peningkatan akses pendidikan menengah, serta upaya menekan angka putus sekolah agar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotabaru dapat terus meningkat dan mendekati capaian wilayah yang lebih tinggi.

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren positif yang didukung oleh beberapa faktor pendorong utama:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kompetensi dan etos kerja yang mendukung produktivitas sektor pendidikan.
2. Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang efektif dalam mengelola sumber daya serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif.
3. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan modern.
4. Optimalisasi kinerja pelayanan publik dalam memberikan layanan administrasi dan pendukung pendidikan yang cepat serta responsif.
5. Adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui kebijakan pendidikan yang strategis dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kabupaten Kotabaru Pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memastikan tidak ada warga yang terhambat dalam menempuh jenjang pendidikan formal. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan implementasi program wajib belajar 12 tahun yang menjamin setiap anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Selain itu, sebagai solusi bagi penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C terus dioptimalkan. Langkah ini dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan serta pembaruan metode pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Keberhasilan agenda pendidikan ini juga sangat bergantung pada kolaborasi strategis, di mana pemerintah aktif menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak swasta dan organisasi

masyarakat. Untuk membangun kesadaran kolektif, kampanye sosialisasi dilakukan secara masif mengenai pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Sebagai langkah pengawasan, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap capaian angka rata-rata lama sekolah menjadi instrumen vital untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan secara dini, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Tabel II.9
Capaian Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,08	12,2	12,23	100,24%	13,24	92,37%

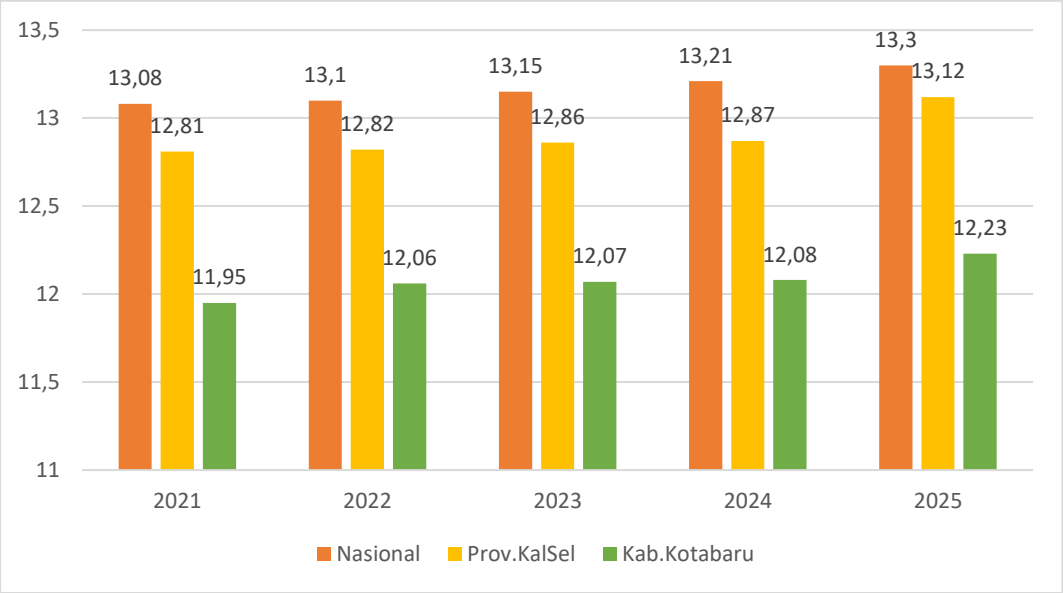
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 terealisasi sebesar 12,23 Tahun, apabila dibandingkan dengan target 12,2 Tahun maka capaiannya sebesar 100,24% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Harapan Lama Sekolah realisasi mencapai 12,23 tahun, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Harapan Lama Sekolah sebesar 12,08 tahun

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2025 terealisasi sebesar 12,23 tahun, apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 13,24 tahun, maka capaiannya sebesar 92,37%.

Grafik II.3
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BPS Nasional, 2026..

Berdasarkan grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah Tahun 2021–2025, terlihat bahwa indikator Harapan Lama Sekolah di tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Secara nasional, angka meningkat dari 13,08 tahun pada 2021 menjadi 13,30 tahun pada 2025. Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan dari 12,81 tahun menjadi 13,12 tahun pada periode yang sama. Sementara itu, Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan bertahap dari 11,95 tahun pada 2021 menjadi 12,23 tahun pada 2025. Meskipun nilainya masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional, tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun.

Kabupaten Kotabaru menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah selama periode 2021–2025. Walaupun masih terdapat selisih dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, peningkatan yang stabil setiap tahun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong

keberlanjutan pendidikan bagi generasi muda. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih optimal dan terarah agar kesenjangan tersebut dapat diperkecil serta derajat pendidikan masyarakat Kotabaru semakin meningkat.

Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren positif yang didukung oleh beberapa faktor pendorong, yaitu:

1. Terjaminnya ketersediaan dan sebaran satuan pendidikan yang merata di seluruh wilayah guna mempermudah akses siswa pada setiap jenjang.
2. Adanya kebijakan yang meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk menjaga keberlanjutan sekolah.
3. Distribusi guru yang proporsional serta peningkatan kualitas kompetensi pendidik secara berkelanjutan.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan mendukung terciptanya ekosistem belajar yang kondusif.
5. Manajemen pendidikan yang transparan berbasis data yang akurat guna pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
6. Dukungan kebijakan daerah melalui RPJMD dan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
7. Efektivitas intervensi sosial dan pendampingan khusus bagi siswa yang berisiko tinggi putus sekolah.
8. Tingginya kesadaran serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung wajib belajar.
9. Kondisi ekonomi makro dan PAD yang stabil yang memungkinkan alokasi anggaran pendidikan yang lebih kuat.
10. Aksesibilitas pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah berkomitmen melakukan perluasan akses pendidikan di semua jenjang, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah yang masih memiliki angka partisipasi sekolah rendah. Upaya ini dibarengi dengan pengawalan ketat terhadap implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui sistem pemantauan berbasis kewilayahan yang lebih presisi. Selain jalur formal, peran pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan terus dioptimalkan sebagai solusi pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, sosialisasi

kepada orang tua mengenai urgensi pendidikan terus digencarkan sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Peningkatan kualitas pembelajaran juga menjadi prioritas melalui pelatihan kompetensi guru yang berbasis pada teknologi dan metode instruksional terkini. Untuk menjamin keberlangsungan studi, cakupan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diperluas bagi siswa berprestasi maupun siswa yang berasal dari keluarga rentan. Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga sosial dalam mendeteksi serta menangani anak tidak sekolah (ATS) secara responsif. Seluruh rangkaian upaya ini ditutup dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) secara berkala guna memetakan kendala di lapangan secara tepat dan akurat.

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

   Program Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Kotabaru dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah. Program ini mencakup empat sub-kegiatan strategis yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan indikator Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat di wilayah tersebut.

   Dari sisi aspek finansial, program ini didukung oleh total anggaran sebesar Rp895.847.000 dengan realisasi belanja mencapai Rp863.050.421. Capaian realisasi keuangan ini menunjukkan angka 96,34%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang sangat optimal dan penyerapan dana yang efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan kinerja pada Sasaran Indikator Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercatat mencapai hasil maksimal sebesar 100%. Dengan perbandingan antara capaian kinerja yang sempurna dan realisasi anggaran sebesar 96,34%, maka program ini berhasil menciptakan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 3,66% tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Faktor pendukung Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 adalah dengan melaksanakan program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan

1) Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

Kegiatan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan, serta mudah dijangkau baik secara langsung melalui koleksi cetak maupun secara daring melalui koleksi digital.

Pemanfaatan koleksi perpustakaan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan indikator Tingkat Kegemaran Membaca, khususnya pada aspek frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah bahan bacaan yang diakses oleh masyarakat. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, perpustakaan diharapkan mampu berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi sebagai pusat pembelajaran masyarakat sepanjang hayat yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Untuk realisasi Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan layanan perpustakaan keliling dan Bercerita untuk Anak TK.

Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Layanan ini ditujukan khususnya bagi masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan perpustakaan menetap, seperti daerah pinggiran, sekolah, desa/kelurahan, serta komunitas masyarakat.

Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling dilakukan melalui kunjungan rutin ke lokasi sasaran seperti sekolah-sekolah ataupun komunitas Masyarakat dengan menyediakan koleksi bahan pustaka yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta disertai kegiatan pendukung seperti membaca bersama, bimbingan literasi, dan promosi budaya gemar membaca.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan perpustakaan keliling telah memberikan dampak positif yang ditunjukkan melalui meningkatnya jumlah pengunjung layanan, peminjaman bahan pustaka, serta partisipasi masyarakat pada kegiatan literasi yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan keliling efektif dalam memperluas jangkauan layanan perpustakaan sekaligus mendorong pembiasaan membaca di masyarakat.



Kegiatan Bercerita untuk Anak TK merupakan salah satu upaya pembudayaan gemar membaca sejak usia dini. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan anak terhadap buku melalui metode yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan dengan metode mendongeng, membaca nyaring (read aloud), permainan literasi, serta pengenalan koleksi buku anak. Pendekatan ini memberikan pengalaman positif kepada

anak terhadap buku dan kegiatan membaca, sehingga diharapkan mampu membentuk kebiasaan membaca sejak dini serta mendorong keterlibatan guru dan orang tua dalam pembiasaan membaca di lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, program bercerita untuk anak TK menunjukkan dampak positif yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan, meningkatnya kunjungan kelompok sekolah ke perpustakaan, serta meningkatnya pemanfaatan koleksi buku anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kontribusi kegiatan terhadap peningkatan komponen pembentuk TKM dalam jangka panjang, khususnya pada aspek pembiasaan membaca dan akses bahan bacaan pada kelompok usia dini.







2) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan secara digital yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses koleksi bahan pustaka tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga mampu meningkatkan frekuensi dan durasi membaca masyarakat, khususnya pada kelompok usia produktif dan generasi muda.

Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk membaca buku secara digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotabaru bekerja sama dengan pihak ketiga

membangun sebuah aplikasi *e-book reader* bernama i-Kotabaru. Aplikasi ini merupakan perpustakaan digital berbasis media social dilengkapi dengan beragam fitur untuk memudahkan membaca ribuan judul *e-book* dengan beragam kategori kapan saja dan dimana saja tanpa batasan ruang dan waktu secara gratis.







b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

1) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar tempat membaca dan meminjam buku, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pembelajaran masyarakat (*community learning center*) yang berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan akibat keterbatasan akses, kurangnya kegiatan menarik, dan persepsi bahwa perpustakaan hanya untuk pelajar.

Melalui pendekatan literasi berbasis inklusi sosial, perpustakaan berupaya memperluas jangkauan dan fungsi layanan dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memperoleh manfaat nyata dari kegiatan literasi. Pendekatan ini tidak hanya mengundang masyarakat untuk datang ke perpustakaan, tetapi juga membuat mereka merasa terlibat, memiliki, dan mendapatkan manfaat langsung.

Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotabaru melaksanakan Kursus Komputer Gratis

bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum sebagai Upaya mendukung literasi inklusi sosial bagi Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dasar teknologi informasi, seperti pengenalan computer, pengolahan dokumen dan akses informasi digital. Melalui kegiatan ini, perpustakaan berperan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif, memberdayakan Masyarakat agar lebih mandiri, produktif dan mampu memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.




2) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus, serta Masyarakat merupakan salah satu upaya strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan serta membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi program pembinaan perpustakaan yang berorientasi pada penguatan minat baca dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi dan pengetahuan.

Selama tahun 2025, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti kunjungan ke sekolah dasar, penyuluhan budaya baca di masyarakat, serta kolaborasi dengan komunitas literasi. Melalui pendekatan ini, perpustakaan tidak hanya hadir sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

Antusiasme masyarakat dan satuan pendidikan terhadap kegiatan sosialisasi meningkat, yang tercermin dari semakin banyaknya sekolah yang bekerja sama dengan perpustakaan untuk menyelenggarakan kegiatan literasi.




2. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, termasuk pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, serta administrasi sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan peningkatan kualitas manajemen sekolah dasar dapat mendorong terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya saing.




b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang menengah pertama. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap berbagai aspek manajemen

sekolah, seperti pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, Pembangunan sarana prasarana, serta administrasi sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sistem pengelolaan SMP yang profesional, transparan, dan akuntabel, guna mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas serta pembentukan peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing.




c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan anak sejak dini. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan PAUD, baik formal maupun nonformal. Fokus utamanya meliputi peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, penguatan kurikulum, penyediaan sarana prasarana yang layak, serta pengelolaan administrasi lembaga secara profesional. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud layanan pendidikan anak usia dini yang holistik, integratif, dan bermutu untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak.





d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pembangunan sarana prasarana, pengawasan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan nonformal, seperti Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan nonformal. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud layanan pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat.



3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

      Kepemudaan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Membangun kepemudaan agar pemuda mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan sekaligus secara proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dalam kerangka rangkaian tersebut, sangat diperlukan sebuah wadah berupa organisasi yang dapat mengakomodir peranannya dalam bidang pembangunan menuju pemuda yang

      berkarakter, inovatif, aspiratif dan berprestasi. Kegiatan ini merupakan wadah bagi Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kotabaru. Sub Kegiatan meliputi :

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi 100%, meliputi Manajemen Pengiriman Pemberdayaan Pemuda dan Workshop Tematik Wirausaha Muda.



2) Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota, terealisasi 100%, yaitu meliputi:

- Bantuan Pengadaan Seperangkat Alat Musik untuk Kegiatan Pemuda Karang Taruna Tarjun Harapan Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir.
- Bantuan Peralatan Musik / Keyboard Kelompok Harapan Muda Desa Tjg. Pengharapan Kec. Pulau Laut Timur.
- Bantuan Peralatan Musik / Keyboard Tunas Muda Kotabaru Desa Batu Tunau Kec. Pulau Laut Timur.
- Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Generasi Muda (Pengadaan Peralatan Jaranan Sekar Arum) Desa Siayuh Kec. Kelumpang Barat.
- Pengadaan Alat Musik Karang Taruna Setya Bhakti Desa Siayuh Kec. Kelumpang Barat.
- Pengadaan Alat Musik Kelompok "Gema Solata Group" Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam.
- Pengadaan Meja, Tenda & Kursi Kelompok Kepemudaan Mandiri Desa Tebing Tinggi Kec. Kelumpang Tengah.
- Pengadaan Sound System Desa Batuah Kec. Pamukan Barat.

- Pengadaan Sound System Gedung Mahligai Pemuda.
- Pengadaan Sound System Kelompok Pemuda Pesona Modiest Desa Bakau RT.02 Kec. Pamukan Utara.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Batu Tunau Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Bekambit Asri Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Kelompok Betung Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Kelompok Sejakah Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Langkang Baru Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Langkang Lama Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Semayap Jaya.
- Pengadaan Tenda Meja Kursi dan Tirai Kelompok Tanjung Pengharapan Jaya Kec. Pulau Laut Timur.
- Pengadaan Tenda, Meja & Kursi Kelompok Pemuda Griya Indor Tarjun Indah RT.05, 10, 11 & 12 Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir.



3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan

kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi 100%, meliputi:

- Bakti Pemuda Nusantara.
- Bazar UMKM Pemuda.
- Imtaq Kepemudaan.
- Pelatihan Kemimpinan Pemuda.
- Pemuda Pelopor.
- Pepelingasih.
- Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP).
- Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN).
- Sosialisasi Lintas Sektor RAD Kepemudaan.
- SP3.
- Wirausaha Muda Pemula (WMP) Kepemudaan.



4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
   a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, Sub Kegiatan meliputi:
      1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah, terealisasi 100%, Pembinaan dan Menumbuhkembangkan kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten/Kota.



2) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah, terealisasi 100%, antara lain:
   - Pembangunan Jembatan Box Culverd Bumi Perkemahan Pulau Laut Sigam.
   - Pembangunan Jembatan Bumper.
   - Pembangunan Kamar Mandi dan WC Permanen Bumper.
   - Pembuatan Pagar Kawat Tinggi 2 Meter Bumper.
   - Pemeliharaan Area Tempat Parkir Bumi Perkemahan.
   - Pemeliharaan Gedung (Gedung Aula, Gedung Mess, WC Mess,
   - WC Aula, Dapur, Mushola, Rumah Jaga) Bumi Perkemahan.
   - Pemeliharaan Lingkungan Bumper.
   - Pengadaan Gazebo Bumper.
   - Pengadaan Meubelair.
   - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat Bumper.
3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi 100%, meliputi :
   - Bakti Pemuda Nusantara.
   - Bazar UMKM Pemuda.
   - Imtaq Kepemudaan.
   - Pelatihan Kemimpinan Pemuda.

- Pemuda Pelopor.
- Pepelingasih.
- Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP).
- Pertukaran Pemuda antar Negara (PPAN).
- Sosialisasi Lintas Sektor RAD Kepemudaan.
- SP3.
- Wirausaha Muda Pemula (WMP) Kepemudaan



Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Usia Harapan Hidup mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara umum, sedangkan prevalensi stunting menggambarkan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berdampak pada kualitas generasi masa depan.

Melalui peningkatan Usia Harapan Hidup dan penurunan prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya memperkuat pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, meningkatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat Kotabaru yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tabel II.10
Capaian Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Usia Harapan Hidup	Tahun	73,88	74	74,03	100,04%	75,13	98,53%

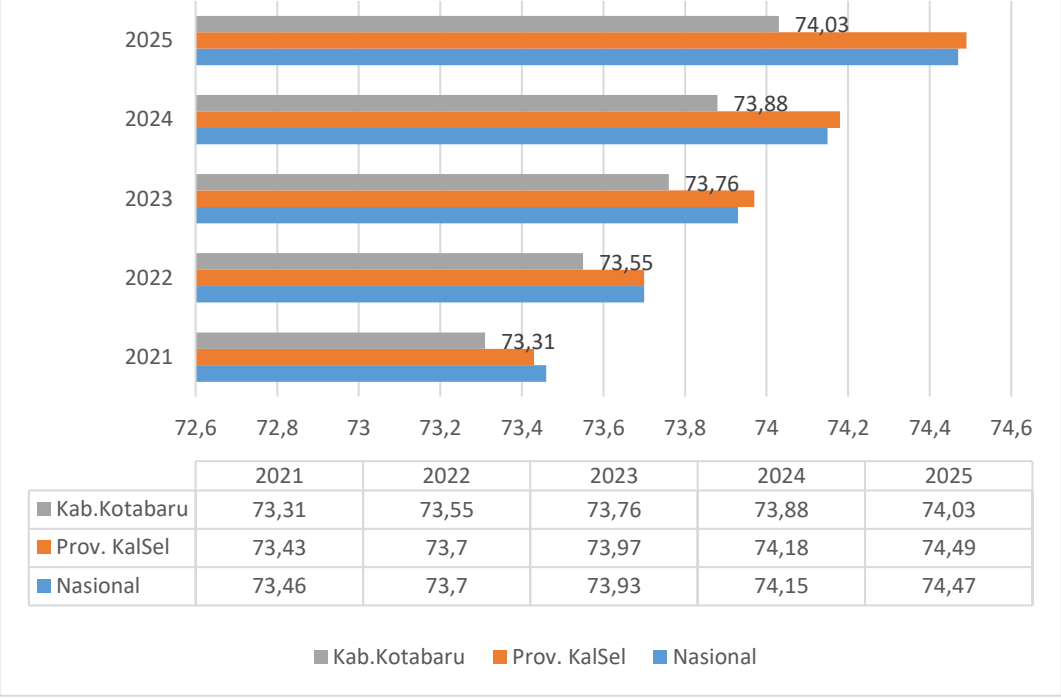
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 terealisasi sebesar 74,03 Tahun, apabila dibandingkan dengan target 74 Tahun, maka capaiannya sebesar 100,24% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Usia Harapan Hidup realisasi mencapai 74,03 tahun, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Usia Harapan Hidup sebesar 73,88 tahun

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Usia Harapan Hidup Sekolah tahun 2025 terealisasi sebesar 74,03 tahun, apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 75,13 tahun maka capaiannya sebesar 98,53%

Grafik II.4
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Kotabaru, Provins Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2021 s.d 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab.Kotabaru	73,31	73,55	73,76	73,88	74,03
Prov. KalSel	73,43	73,7	73,97	74,18	74,49
Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian UHH di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan tingkat nasional menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Kotabaru meningkat dari 73,31 tahun pada 2021

menjadi 74,03 tahun pada 2025. Pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Selatan naik dari 73,43 tahun menjadi 74,49 tahun, sedangkan nasional meningkat dari 73,46 tahun menjadi 74,47 tahun. Meskipun capaian Kabupaten Kotabaru masih sedikit berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, laju peningkatannya relatif stabil dan konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya perbaikan dalam derajat kesehatan masyarakat.

Kabupaten Kotabaru menunjukkan kinerja positif dalam peningkatan Umur Harapan Hidup selama periode 2021–2025. Kenaikan yang konsisten ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Ke depan, diperlukan penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan akses dan mutu fasilitas kesehatan, serta intervensi preventif dan promotif agar kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH), sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan Puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Posyandu) di wilayah kepulauan dan pedalaman Kotabaru
2. Penurunan angka stunting secara konsisten berkontribusi langsung pada kualitas kesehatan balita yang menjadi fondasi angka harapan hidup.
3. Peningkatan jumlah penduduk yang ter-cover BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi ragu berobat karena kendala biaya.
4. Peningkatan akses terhadap air minum layak dan sanitasi lingkungan yang menekan angka penyakit menular (seperti diare dan ISPA).
5. Hubungan positif antara daya beli masyarakat dengan kemampuan pemenuhan gizi keluarga di Kabupaten Kotabaru.Sebagai bentuk tindak lanjut

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH), sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau (kepulauan) menyulitkan distribusi tenaga medis spesialis dan kecepatan penanganan darurat (*emergency response*).

2. Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes yang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat lokal.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berupaya mengakselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 memprioritaskan penguatan aksesibilitas dan kualitas layanan melalui tiga pilar transformasi strategis. Pertama, guna mengatasi tantangan keterbatasan tenaga medis ahli di wilayah kepulauan dan pedalaman, pemerintah daerah telah mengimplementasikan skema insentif progresif berupa tunjangan khusus serta program beasiswa ikatan dinas bagi dokter spesialis. Langkah ini merupakan investasi strategis untuk memastikan kehadiran tenaga spesialis yang menetap dan berdedikasi di Bumi Saijaan, sehingga disparitas layanan kesehatan antarwilayah dapat diminimalisir.

Sejalan dengan semangat modernisasi birokrasi, pilar kedua difokuskan pada optimalisasi sistem informasi kesehatan. Digitalisasi data kesehatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memberikan basis data akurat bagi pengambilan kebijakan intervensi kesehatan yang lebih presisi. Melengkapi infrastruktur dan teknologi tersebut, pilar ketiga menekankan pada promotif-preventif melalui edukasi berbasis komunitas. Dengan menyinergikan pesan kesehatan dengan kearifan lokal, pemerintah berupaya mengubah pola hidup masyarakat secara organik untuk menekan prevalensi penyakit degeneratif, memastikan bahwa pembangunan kesehatan di Kotabaru berjalan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel II.11
Capaian Prevalensi Stunting

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Prevalensi Stunting	Tahun	23,2	22,6	23,2	97,35%	16,63	60,49%

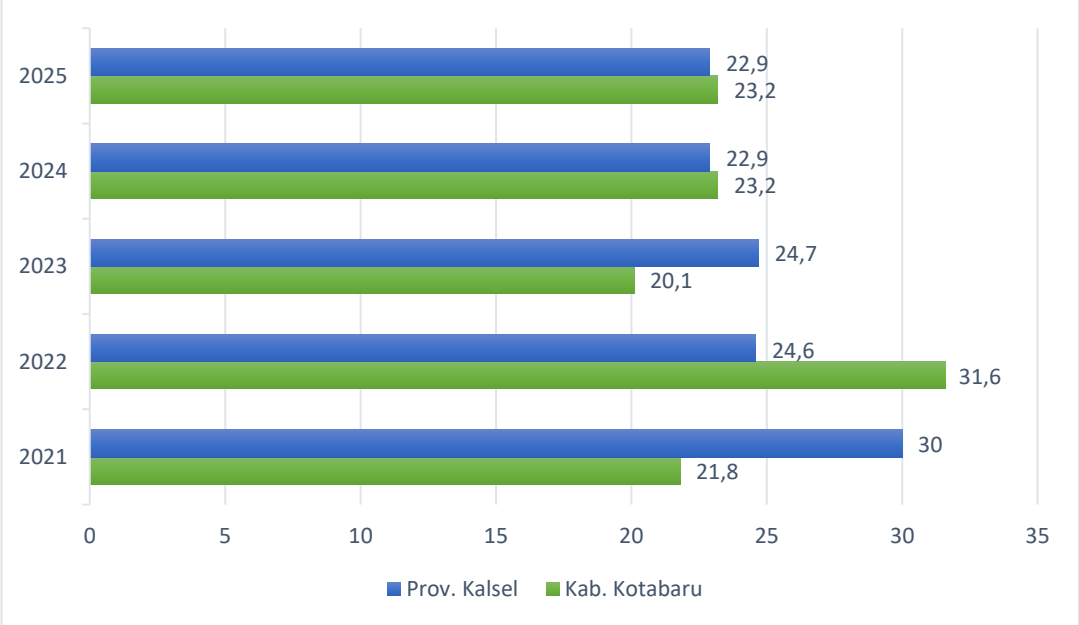
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Prevalensi Stunting pada tahun 2025 terealisasi sebesar 23,2%, apabila dibandingkan dengan target 22,6% Tahun maka capaiannya sebesar 97,35% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Prevalensi Stunting realisasi mencapai 23,2% tahun, angka ini tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Prevalensi Stunting sama yaitu sebesar 23,2%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Prevalensi Stunting tahun 2025 terealisasi sebesar 23,2%, apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 16,63% makanya capaiannya sebesar 60,49%

Grafik II.5
Perbandingan Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kab. Kotabaru, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Kotabaru selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif dan menantang jika dibandingkan dengan tren Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung lebih stabil menurun. Mengawali tahun 2021 dengan angka yang cukup baik di 21,8, Kabupaten Kotabaru sempat mengalami lonjakan tajam hingga menyentuh angka 31,6 pada tahun 2022, melampaui rata-rata provinsi saat itu. Meskipun terdapat keberhasilan besar dalam menekan

angka tersebut secara drastis hingga mencapai titik terendah sebesar 20,1 di tahun 2023, kondisi tersebut kembali mengalami sedikit kemunduran pada tahun 2024 dan 2025 di mana angka prevalensi naik dan tertahan di posisi 23,2.

Upaya penanganan stunting di Kabupaten Kotabaru masih menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi penurunan angka prevalensi secara berkelanjutan. Walaupun Kotabaru pernah mencatatkan prestasi gemilang pada tahun 2023 dengan berada jauh di bawah angka provinsi, namun pada akhir periode pengamatan (2025), angka prevalensi Kotabaru (23,2) justru berakhir sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (22,9). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi mendalam terhadap program-program intervensi agar hasil positif yang telah dicapai tidak bersifat sementara dan target penurunan stunting dapat tercapai lebih efektif di masa mendatang.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Prevalensi Stunting, sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan harga komoditas pangan protein hewani di wilayah kepulauan yang memengaruhi daya beli keluarga sasaran (ibu hamil dan balita).
2. Masih tingginya konsumsi makanan olahan instan pada anak-anak di daerah pesisir dibandingkan konsumsi ikan segar lokal
3. Dinamika penduduk masuk (migrasi) ke wilayah tambang atau perkebunan di Kotabaru yang membawa balita dengan kondisi gizi kurang dari luar daerah.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Prevalensi Stunting, sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah kepulauan menyulitkan pembangunan infrastruktur sanitasi layak dan akses air minum aman secara merata.
2. Masih adanya mitos atau praktek tradisional dalam pemberian makan bayi (MPASI) yang tidak sesuai dengan standar gizi medis.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru memperkuat intervensi penurunan stunting melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan peningkatan kualitas layanan di tingkat tapak. Komitmen ini diwujudkan melalui mandat pengalokasian anggaran yang diprioritaskan khusus untuk

intervensi stunting, mencakup penyediaan sarana sanitasi layak serta pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi. Kebijakan ini memastikan bahwa ketahanan pangan dan kesehatan keluarga menjadi fondasi pembangunan di setiap desa, sehingga sumber daya finansial daerah terserap langsung pada sasaran yang paling membutuhkan.

Guna menjamin akurasi data dan deteksi dini, penguatan anggaran tersebut dibarengi dengan peningkatan kapasitas teknis bagi bidan desa dan kader Posyandu. Melalui pelatihan intensif penggunaan alat antropometri yang terstandar, diharapkan risiko *human error* dalam pengukuran balita dapat diminimalisir, sehingga status gizi anak terpantau secara presisi. Sebagai langkah pamungkas dalam menjaga akuntabilitas program, pemerintah daerah menerapkan mekanisme audit mendalam (Audit Kasus Stunting) pada wilayah kecamatan atau desa yang menunjukkan tren kenaikan prevalensi secara signifikan. Pendekatan audit ini bertujuan untuk memetakan akar masalah secara spesifik baik dari sisi medis maupun lingkungan sehingga solusi yang diberikan bersifat kontekstual dan efektif dalam memutus rantai stunting di Kabupaten Kotabaru.

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 2 (Dua) yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
    a. Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
        1) Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
    b. Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
    c. Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan meliputi:

1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota, terealisasi 90,48%, diantaranya:

- Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Bekambit Kec. Pulaulaut Timur.
- Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Volly Desa Kulipak Kec. Pulaulaut Timur.
- Pemasangan Paving Blok Area Pujasera Desa Sidomulyo RT. Kec. Kelumpang Hulu.
- Pemasangan Paving di Sirkuit Trail Gedambaan Kab. Kotabaru.
- Pemasangan paving halaman GOR bulutangkis Desa Bungkukan Kec. Kelumpang Barat.
- Pembangunan Gedung Pencak Silat PERSINAS ASAD RT 04 Desa Sebelimbingan Kec. Pulaulaut Utara.
- Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Bekambit Asri Kec. Pulaulaut Timur.
- Pembangunan lapangan volley SMPN 2 Pamukan Utara Kec. Pamukan Utara.
- Pembangunan Sekretariat PSHT Ranting Pamukan Utara Rt.006 Desa Mulyoharjo Kec. Pamukan Utara.
- Pembangunan Tribun Lapangan Volly Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir.
- Pembuatan DED Sport Center Kotabaru (Tidak Dikerjakan Karena Pemutusan Kontrak di 20%).

- Pembuatan Drainase Lapangan Sepak Bola Desa Sidomulyo RT. 03 Kec. Kelumpang Hulu
- Pengadaan dan Perlengkapan Tanding PEPARPROV 2025.
- Pengadaan dan Perlengkapan Tanding PORPROV 2025.
- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga Kick Boxing Kotabaru.
- Pengadaan Perlengkapan GOR Bamega Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara (Tidak Dikerjakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi).
- Pengadaan Watersport Kelompok Wirittasi Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar.
- Pengerasan Lapangan Sepak Bola Desa Sidomulyo RT. 03 Kec. Kelumpang Hulu.
- Pengurugan Lapangan Sepak Bola Desa Sidomulyo RT. 03 Kec. Kelumpang Hulu.
- Perlengkapan Kontingen PORPROV dan PEPARPROV 2025.
- Rehab GOR Bamega Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara.

b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan meliputi:

1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, terealisasi 100%, antara lain :

- Kejuaraan Bola Basket.
- Kejuaraan Bola Voli.
- Kejuaraan Bulu Tangkis.
- Kejuaraan Futsal.
- Kejuaraan Sepak Bola.
- Turnamen Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten.
- Turnamen Golf Saijaan.



2) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, terealisasi 85,05%, meliputi :

- Event Porprov 2025.
- Event Peparprov 2025.
- Event Popda 2025.
- Pembinaan dan Pelatihan PGI Kotabaru (Tidak dilaksanakan).





c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan yaitu dengan Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga, terealisasi 105,36% atau 59 Atlit Berprestasi yang menerima penghargaan dari target 56 Orang.

d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Sub Kegiatan yang meliputi Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan lembaga Terkait. Kegiatan ini merupakan fasilitasi hibah dengan organisasi keolahragaan, seperti KONI Kotabaru, KORMI Kotabaru, PERWOSI Kotabaru dan NPCI Kotabaru dengan realisasi 100%.

e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Sub Kegiatan meliputi :

1) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi, terealisasi 100%, terdiri dari:

- Even Olahraga Tradisional dan Rekreasi Dalam Rangka Hari
- Besar.
- Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
- Senam Bersama setiap minggu.
- Senam Lansia setiap minggu.
- Street Soccer.
- Atraksi Titi Tali.



2) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan, terealisasi 77,78% meliputi :
   - Ekshibisi Paralayang dan Gantole.
   - Event Olahraga Pelajar (Batal dilaksanakan).
   - Fun Bike dan Fun Pro, Road Bike dan Criterium Race Kotabaru.
   - Hayau Barait Adventure Offroad.
   - Kejuaraan International Paragliding Accuracy Championship (IPAC) Cup Seri.
   - Pelatihan Paralayang dan Gantole.
   - Saijaan Marathon 2025 (Batal dilaksanakan).
   - Trail Game Hayau Barait 2025.



3) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat, terealisasi 100% dengan terlaksananya Kejuaraan Balogo Sekalsel tahun 2025.



4) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan terealisasi 100%, kegiatan ini khusus untuk pemeliharaan dan operasional seluruh venue olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Anggaran pada kegiatan ini Rp 1.777.068.310 dengan realisasi anggaran program sebesar Rp. 1.710.590.000 (96,26%) dan realisasi kinerja program sebesar 100%.

Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Dilaksanakannya kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kunjungan lapangan bumil kurang energi kronik, anemia, ibu hamil risti, bayi berat lahir, rendah, dan bayi balita dengan masalah gizi, kunjungan pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri, dan Posyandu oleh 28 Puskesmas.
2) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), Pendampingan pasien di RTK, transport bidan desa / puskesmas dalam rangka edukasi P4K kerumah keluarga ibu hamil.
3) Pemeriksaan kasus KIA oleh Dokter Spesialis Kandungan/SPOG.

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 357.619.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.001.000 (77,46%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%. Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Pemantauan RTK di Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kaltim (Paser).
2) Tersedianya biaya transport rujukan persalinan dan neonatal ke RSUD Andi Abdurahman Tanah Bumbu, RSUD Pangeran Sebaya Kabupaten Paser KalTim, RSUD PJS Kotabaru ke RS Ulin Banjarmasin & RSUD Ratu Zaleha Kab Banjar, RSUD Kotabaru ke RSUD Andi Abdurahman Tanah Bumbu, dan RSUD Sengayam.

Dokumentasi:

Pembangunan Puskesmas



Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan



Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
   b. Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
      2) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   c. Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
      1) Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
   a. Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
      1) Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b. Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
      1) Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c. Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1) Sub Kegiatan: Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Food Security pengamanan sample makanan acara puncak Pertida Saka Bakti Husada di Siring Laut




Adapun data capaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk kegiatan tersebut adalah:

a. Angka kematian ibu/AKI (jumlah ibu yang meninggal karena proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas per/100.000 kelahiran hidup).

Data AKI Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan pada tahun 2025 jika dibandingkan tahun 2024, dan angka tersebut masih di atas target Sustainable Development Goals (SDG's) yaitu 122/100.000 kelahiran hidup. Fenomena ini harus segera diintervensi karena dapat mempengaruhi AHH Kab. Kotabaru. Faktor yang mempengaruhi AKI adalah "4 terlalu dan 3 terlambat" (terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak kelahiran, terlalu banyak anak, terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan penanganan)

Tabel AKI (Angka Kematian Ibu) Kabupaten Kotabaru 2012-2025

	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Ibu	211,76	321,25	326,71	210,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

b. Angka Kematian bayi/AKB (Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun per/1000 kelahiran hidup)

AKB Kabupaten Kotabaru tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar tetap menurun kejadiannya. Faktor yang dapat mempengaruhi AKB antara lain kesehatan janin di dalam kandungan, kondisi kesehatan ibu, proses persalinan, kondisi setelah lahir hingga 1 tahun, dan penyakit infeksi.

Tabel AKB (Angka Kematian Bayi) Kabupaten Kotabaru 2022-2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Bayi	10,59	5,28	8,16	6,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Sasaran 3: Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender Dimasyarakat

Pembangunan keluarga dan pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, karakter, serta ketahanan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk memperkuat kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender di Masyarakat, yang diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga menggambarkan tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan.

Melalui peningkatan kualitas keluarga dan penurunan ketimpangan gender, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif, setara, dan berkeadilan, sehingga setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang

dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.12
Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,43	42,99	64,23	149,40%	52,24	122,95%

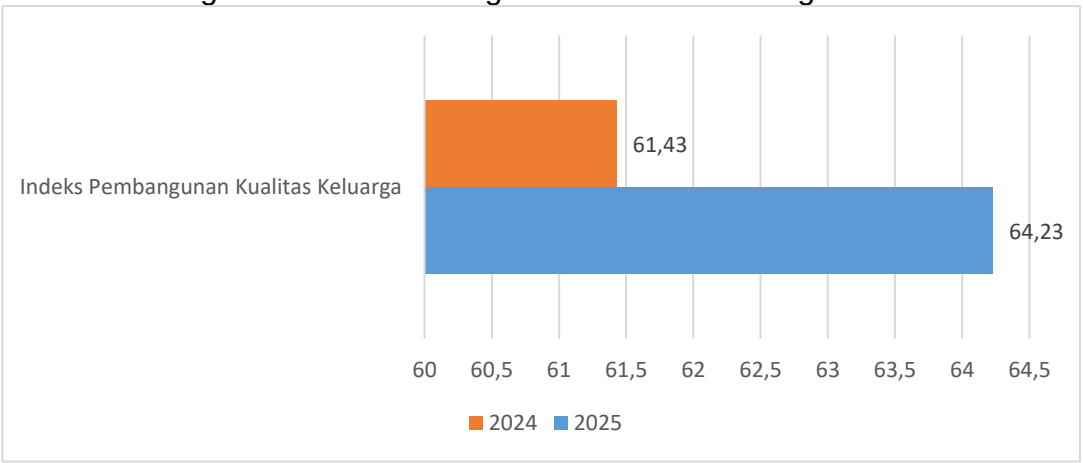
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga pada tahun 2025 terealisasi sebesar 64,23 apabila dibandingkan dengan target 42,99 Tahun, maka capaiannya sebesar 149,40% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga realisasi mencapai 64,23 angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,80 poin dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga sebesar 61,43.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga tahun 2025 terealisasi sebesar 64,23 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 52,24 maka capaiannya sebesar 122,95%

Grafik II.6
Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 2024 s.d 2025



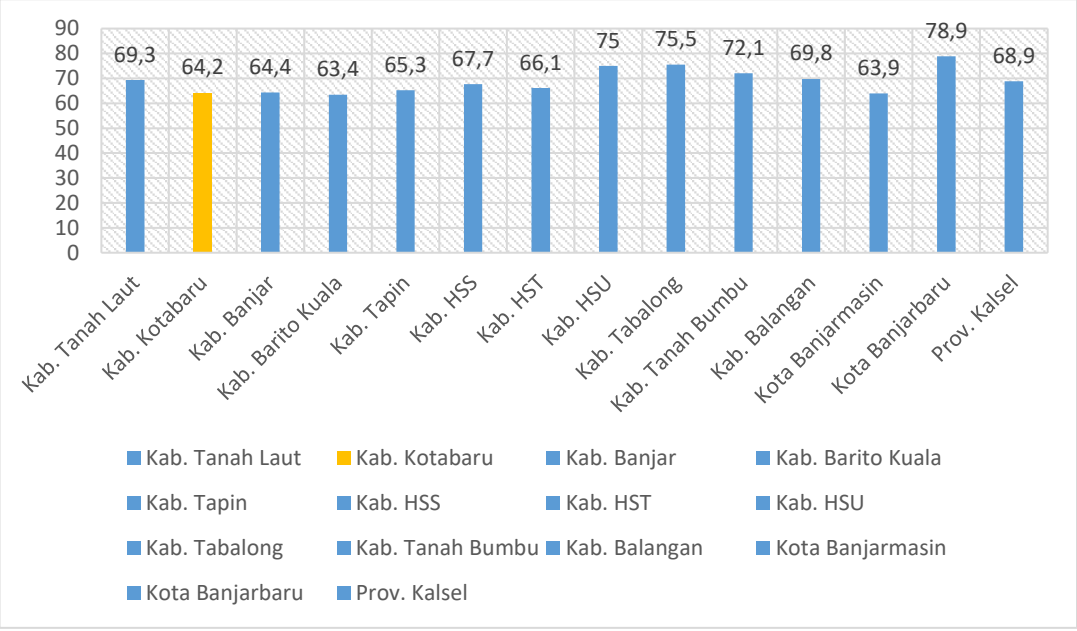
Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data DP3AP2KB, 2026

Narasi Perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Berdasarkan data grafik perkembangan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) periode 2024 hingga 2025, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif dan signifikan. Pada tahun 2024, capaian indeks berada pada angka 61,43. Angka ini kemudian mengalami peningkatan sebesar 2,80 poin pada tahun 2025, sehingga mencapai angka 64,23. Secara visual, batang berwarna biru yang mewakili tahun 2025 menunjukkan progres yang melampaui capaian tahun sebelumnya (batang oranye), mencerminkan adanya keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga di wilayah tersebut.

Peningkatan ini tidak hanya sekadar angka, tetapi menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam dimensi-dimensi yang menyusun kualitas keluarga, baik dari sisi ketahanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Kenaikan sebesar 4,56% dalam kurun waktu satu tahun ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan dan program pemberdayaan keluarga yang dijalankan telah memberikan dampak nyata di masyarakat.

Grafik II.7
Perbandingan Capain Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data IBANGGA, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kategori Normal dalam capaian pembangunan keluarganya, dengan ambang batas skor di atas 61,0. Kabupaten Kotabaru mencatatkan skor sebesar 64,2 pada pendataan PK 25. Meskipun angka ini berada di atas standar minimal kategori normal, posisi Kabupaten Kotabaru berada di peringkat bawah dibandingkan wilayah lainnya. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tingkat provinsi yang berada di angka 68,9, skor Kabupaten Kotabaru masih memiliki selisih sebesar 4,7 poin di bawah rata-rata tersebut.

Capaian Kotabaru tampak tertinggal cukup jauh dari Kota Banjarbaru yang memimpin dengan skor tertinggi sebesar 78,9. Namun, Kotabaru masih menunjukkan performa yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan Kota Banjarmasin (63,9) dan Kabupaten Barito Kuala (63,4) yang menempati posisi terendah di provinsi tersebut.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, sebagai berikut:

1. Adanya sinergi lintas sektor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) dalam mengawal program keluarga berencana dan ketahanan keluarga
2. Keaktifan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai tempat konsultasi dan pengasuhan anak yang mulai menjangkau tingkat kecamatan
3. Tingginya modal sosial dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di Kotabaru, yang memperkuat dimensi ketahanan sosial-budaya

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, sebagai berikut:

1. Wilayah Kotabaru yang terdiri dari kepulauan menyulitkan standarisasi layanan kualitas keluarga dan distribusi informasi hingga ke pelosok desa terpencil

2. Masih ditemukannya kasus pernikahan di usia dini di beberapa titik, yang secara langsung mengoreksi nilai pada dimensi legalitas dan kesiapan berkeluarga

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru memprioritaskan peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga melalui dua pendekatan utama yang saling berintegrasi, yaitu penguatan fondasi hukum keluarga dan pemberdayaan ekonomi domestik. Dalam upaya menekan angka pernikahan dini yang berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang, pemerintah daerah melakukan intensifikasi sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dengan mengedepankan peran strategis tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi di tingkat akar rumput. Keterlibatan para tokoh ini krusial untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi kesiapan fisik, mental, dan legalitas dalam membangun keluarga, sehingga diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap risiko pernikahan usia anak.

Sejalan dengan penguatan aspek legalitas dan sosial tersebut, peningkatan kualitas keluarga juga diakselerasi melalui integrasi program ketahanan keluarga dengan pelatihan UMKM berbasis keluarga. Langkah ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga, khususnya dengan membekali anggota keluarga melalui keterampilan produktif yang memanfaatkan potensi lokal Kotabaru. Dengan adanya sinergi antara kesiapan mental-legal dan kemandirian ekonomi, keluarga di Kabupaten Kotabaru diharapkan tidak hanya memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan standar kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendongkrak capaian IPKK di masa mendatang.

Tabel II.13
Capaian Indeks Ketimpanan Gender

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,551	0,52	0,554	93,46%	0,46	79,56%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,554 apabila dibandingkan dengan target 0,52 maka capaiannya sebesar 93,46% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender realisasi mencapai 0,554 angka ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,551 yang menunjukkan ketimpangan gender di Kabupaten Kotabaru meningkat.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Indeks Ketimpangan Gender tahun 2025 terealisasi sebesar 0,554 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,46 maka capaiannya sebesar 79,56%

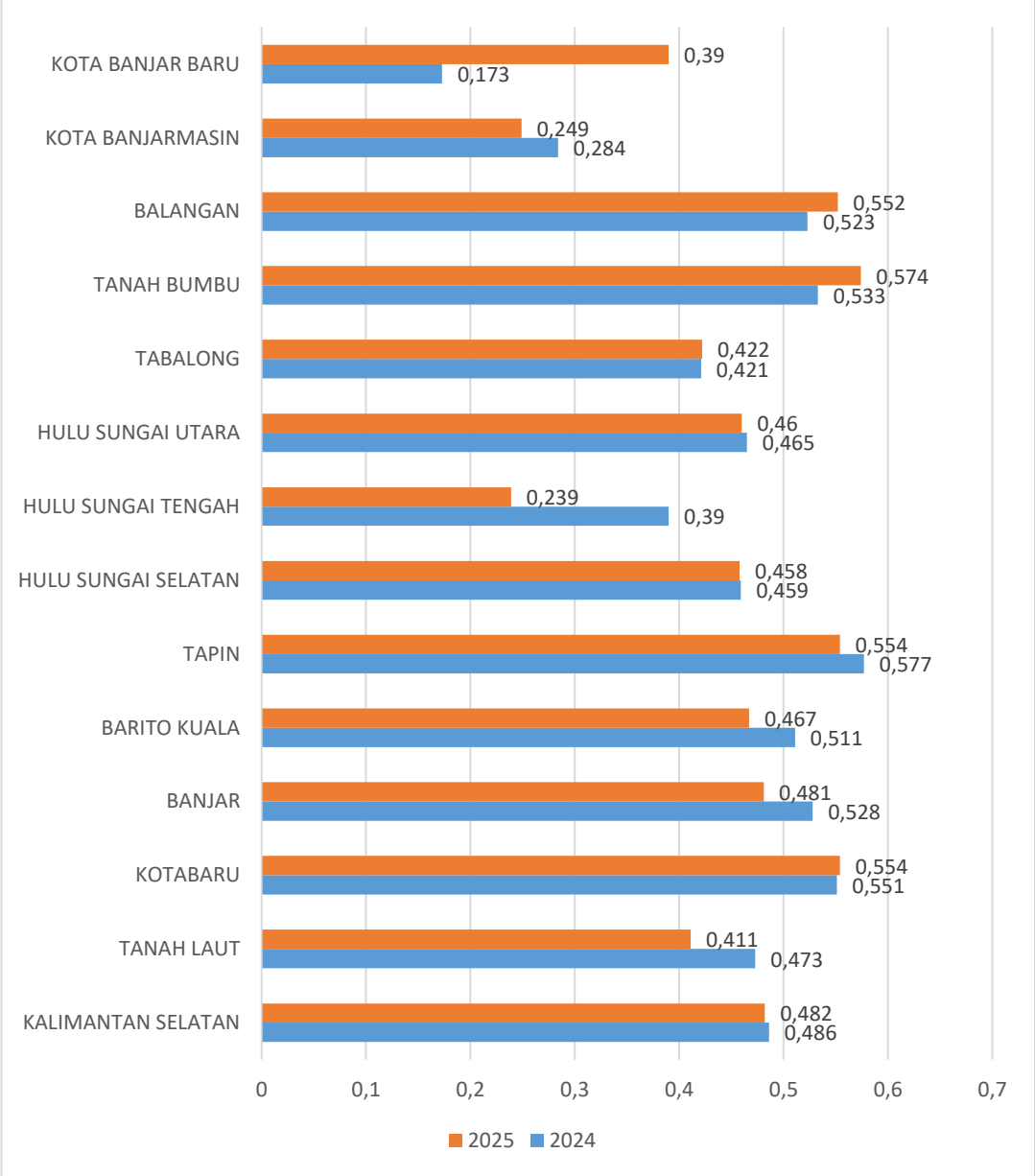
Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,554. Angka ini menunjukkan kondisi yang meningkat dari pada tahun 2024. Mengingat sifat indikator IKG yang bersifat *negative-closeness* (semakin kecil nilainya, semakin baik kualitas kesetaraan gendernya), maka angka 0,554 mengindikasikan bahwa upaya penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Kotabaru masih menghadapi tantangan yang cukup berat untuk mencapai target yang lebih optimal.

Secara teknis, bertahannya angka IKG ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendorong utama adalah konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mengimplementasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah sebagai mandat pembangunan inklusif. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbentur oleh faktor penghambat, yakni masih rendahnya proporsi perempuan yang menduduki kursi legislatif (DPRD) maupun posisi strategis pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah. Hal ini menyebabkan dimensi pemberdayaan perempuan belum memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap penurunan indeks secara keseluruhan.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan solusi alternatif melalui dua jalur utama. Pertama, melakukan penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan PUG yang lebih intensif dan merata pada seluruh instansi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kedua, memperkuat dimensi ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di sektor UMKM. Langkah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yang pada akhirnya akan mengakselerasi penurunan nilai IKG di tahun-tahun mendatang

Grafik II.8
Perbandingan Capaian Indeks Ketimpangan Gender
di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BPS Provinsi Kalsel, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,554. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada pada angka 0,551, terdapat kenaikan indeks sebesar 0,003 poin. Mengingat karakteristik IKG adalah indikator negative sense di mana semakin kecil angka indeks menunjukkan tingkat kesetaraan yang semakin baik kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya menekan disparitas gender di Kabupaten Kotabaru masih menghadapi tantangan yang cukup dinamis. Kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap dimensi pembentuk indeks, baik dari sisi kesehatan reproduksi, pemberdayaan

melalui keterwakilan di parlemen dan tingkat pendidikan, maupun partisipasi dalam pasar tenaga kerja.

Dalam konteks regional, angka IKG Kabupaten Kotabaru sebesar 0,554 masih berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 0,482 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Kabupaten Kotabaru relatif lebih tinggi dibandingkan rerata provinsi maupun beberapa daerah tetangga seperti Tanah Laut (0,411) atau Hulu Sungai Tengah (0,239). Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui program-program yang lebih inklusif dan integratif guna memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya pembangunan, sehingga tren kenaikan indeks ini dapat ditekan dan diturunkan pada periode berikutnya.

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 3 (Tiga) yaitu Meningkatnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender dimasyarakat:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 203.463.095,- atau 81,38% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka untuk untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga agar mampu melindungi, mendidik, dan memenuhi hak anak secara optimal. Melalui layanan informasi, edukasi, dan konsultasi, PUSPAGA diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta

keterampilan orang tua dalam menerapkan pola asuh yang positif, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu memenuhi hak-hak anak. Selain itu, keberadaan PUSPAGA juga bertujuan untuk mencegah berbagai permasalahan dalam keluarga seperti kekerasan, penelantaran, maupun konflik keluarga, serta memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak.

Sosialisasi Puspaga Pencegahan Perkawinan Anak



2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.970.100,- terealisasi sebesar Rp. 93.366.600,- atau 95,30% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan melalui pemberdayaan dan

keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, serta fungsi keluarga dalam kehidupan sosial. Kegiatan ini mencakup pemberian edukasi, pembinaan, pendampingan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Melalui pengembangan kegiatan masyarakat tersebut diharapkan keluarga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang lebih baik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, serta mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas

Monitoring Evaluasi Awal Dan Kunjungan Kerja



Nikah Massal Di Desa Sampanahan Kecamatan Samapanahan



2. Program Pengendalian Penduduk
   a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
      1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
      2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.937.795,- atay 83,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualutas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan.
   b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.937.795,- atay 83,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualutas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan.
      2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.937.795,- atay 83,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualutas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kanupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Penyedia Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.715.500,- terealisasi sebesar Rp. 43.334.923,- atau 88,96% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan. Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan kondisi perempuan dan anak secara terpilah menurut jenis kelamin dan usia. SIGA bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan terpadu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak serta perlindungan anak. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak sehingga kebijakan dan program yang disusun dapat lebih tepat sasaran. Pengembangan dan pemanfaatan SIGA merupakan bagian dari upaya pemerintah.

Rapat Koordinasi Sitem Informasi Gender Dan Anak Kabupaten Kotabaru Tahun 2025



Sosialisasi Peneyediaan Data Gender Dan Anak Desa Sampanahan Kecamatan Sampanahan



b. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 256. 849.500,- terealisasi sebesar Rp. 218.443.500,- atau 85,05 % dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan Sub Kegiatan :Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)Tingkat Kabupaten /Kota, hal ini bertujuan agar Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar dapat di gunakan dalam Dokumen Perencanaan karena termuat didalamnya Target 2025 s/d 2045 terkait Kependudukan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kemendukbangga(BKKBN) berdasarkan 30 Indikator dengan menggunakan metode Presure, State, Respon dan Impact (PSRI) dan di sesuaikan dengan Renstra dan RPJPD 2025-2029 melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Kotabaru agar hasil yang di dapat sebagai acuan dalam Kebijakan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029

Kegiatan Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045





c. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.937.795,- atay 83,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualutas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan.

2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.937.795,- atay 83,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualutas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.654.500,- terealisasi sebesar Rp. 79.419.500,- atau 88% dan capaian kinerja 100%

digunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas pencatatan pelaporan data dan informasi keluarga setiap bulannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) , termasuk didalamnya data pelayanan keluarga berencana dan data pengendalian lapangan serta data keluarga berisiko stunting (KRS) yang tersinkronisasi di Aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA).

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluh KB Tingkat Kabupaten Kotabaru Tahun 2025



Kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluh KB bersama dengan Bidan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir





Kegiatan Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 di Kantor Kecamatan Sigam



Kegiatan Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 di Kecamatan Pulaulaut Selatan



4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67.899.500,- terealisasi sebesar Rp. 47.820.500,- atau 70% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana selama 12 Bulan.

Laporan rutin bulanan pada SIGA adalah capaian program Bangga Kencana selama 1 bulan dilaporkan secara real time dan batas input laporan rutin bulan tertentu semua modul SIGA yaitu Modul Yan KB, Modul Dallap, Modul SIRIKA dan Elsimil di tingkat Kabupaten adalah tanggal 5 bulan berikutnya sehingga OPD setiap bulannya rutin melakukan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporannya bersama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi dan hasil nya di sampaikan melalui rapat Radalgram yang dilakukan setiap akhir bulan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Pelaporan Pelayanan KB di Puskesmas Lontar Kecamatan Pulaulaut Barat



Rapat Posko Pemutakhiran Pendataan keluarga Tahun 2025 di Kecamatan PL Kepulauan



4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (DP3AP2KB)
   a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 290.021.500,- terealisasi sebesar Rp. 245.449.270,- atau 84,63% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang digunakan selama 12 bulan. Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta akses pasangan usia subur terhadap penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, Metode Operasi Wanita (MOW), dan Metode Operasi Pria (MOP). Pada tahun 2024, pelayanan kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP) menunjukkan capaian pemasangan implan sebanyak 289 akseptor dan IUD sebanyak 31 akseptor, sedangkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian pelayanan MKJP, dimana pemasangan implan meningkat menjadi 401 akseptor dan pemasangan IUD menjadi 39 akseptor. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya promosi, edukasi, serta pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan. Selain itu, dukungan tenaga kesehatan, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta kegiatan pembinaan pelayanan KB turut berkontribusi terhadap meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang

Penyuluhan Dan Pelayanan KB Gratis Dalam Rangka Tmmd Ke 123 Tahun 2025



Penyuluhan Dan Pelayanan KB Gratis Dalam Rangka 100 Hari Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2025 – 2029 Di Klinik Kodim 1004 Kotabaru



Penyuluhan Dan Pelayanan Kb Serentak Di Tempat Kerja Dalam Rangka Hari Buruh Internasional Tahun 2025 Di Klinik Sentra Area Pamukan Kecamatan Pamukan Utara





Penyuluhan Dan Pelayanan Kb Serentak Dalam Rangka Hut IBI Ke – 74 Tahun 2025

Di Praktek Mandiri Bidan Hj. Fauziah Olfah

Kecamatan Pulaulaut Sigam



Penyuluhan Dan Pelayanan KB Gratis

Di Puskesmas Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan Tahun 2025





Penyuluhan Dan Pelayanan KB Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2025

Di Fasilitas Kesehatan Lontar Kecamatan Pulaulaut Barat



Penyuluhan Dan Pelayanan KB Dalam Rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2025
Di Puskesmas Tanjung Selayar Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar



Pelayanan KB Gratis Mow Di Rsud Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru





2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 161.414.500,- terealisasi sebesar Rp. 152.891.500,- atau 94,72% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang digunakan selama 12 bulan. Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur melalui penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan koordinasi dengan jejaring pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembinaan dan monitoring ke fasilitas kesehatan untuk memberikan penguatan teknis terkait standar pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta peningkatan koordinasi dengan tenaga kesehatan dan pengelola program di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya

Di Puskesmas Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku



Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya
Di Puskesmas Kelumpang F Kecamatan Pamukan Selatan



Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya
Di Puskesmas Sengayam Kecamatan Sengayam



Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya
Di Klinik Kodim 1004 Kotabaru Kecamatan Pulaulaut Utara



Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya
Di Puskesmas Marabatuan Kecamatan Pulau Sembilan



Pembinaan Pelayanan KB Dan Kespro Di Fasilitas Kesehatan Jaringan Dan Jejaringnya
Di Puskesmas Tg. Selayar Kecamatan Pl Tg. Selayar



5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 145.096.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.026.434,- atau 81 % dan capaian

kinerja 100% digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam membangun Desa selama 12 Bulan. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. PUG dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan perempuan serta laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan.

Melalui penerapan Pengarusutamaan Gender, diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki, serta mengurangi kesenjangan gender yang masih terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan adanya kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi semua pihak.

Workshop Perencanaan Penganggaran Responsif Gender





6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kegiatan ini diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam kebijakan seluruh instansi dan sektor swasta. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah memastikan lingkungan kerja dan layanan publik di Kotabaru berjalan selaras dengan standar perlindungan anak yang seragam.

   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

      Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas sarana, prasarana, serta kualitas sumber daya manusia pengelola layanan. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat rujukan inklusif yang mudah diakses oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Sinergi berkelanjutan antar lembaga penyedia layanan menjadi kunci utama dalam menjamin peningkatan kesejahteraan anak di seluruh wilayah kabupaten.

7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

   Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

      Kegiatan ini bertujuan membekali unit keluarga di Kotabaru dengan pengetahuan manajemen ekonomi dan pola asuh yang sehat. Pembinaan rutin di tingkat desa dilakukan untuk memperkuat ketahanan sosial serta menekan angka kerentanan keluarga terhadap konflik maupun tekanan ekonomi.

   b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

      Kegiatan ini melibatkan ormas sebagai mitra strategis dalam menyosialisasikan program ketahanan keluarga hingga ke pelosok.

Kolaborasi ini mencakup pelatihan kader agar memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat di tingkat daerah. Pemerintah daerah senantiasa membuka ruang aspirasi bagi organisasi kemasyarakatan guna merumuskan kebijakan pembangunan keluarga yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas

8. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:

   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Kegiatan ini mengedepankan langkah preventif melalui kampanye publik dan edukasi mengenai bahaya kekerasan serta perundungan di lingkungan sekolah. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum, pemerintah daerah membangun sistem deteksi dini agar perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pihak

   b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

      Kegiatan ini menjamin respon cepat dalam penanganan medis, psikologis, maupun bantuan hukum bagi anak dalam kondisi darurat. Pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi dan rumah aman yang dikelola secara profesional dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan anak. Pemantauan pasca-layanan juga dilakukan secara intensif untuk memastikan proses reintegrasi sosial anak ke lingkungan keluarga dapat berjalan dengan optimal dan aman

9. Program Perlindungan Perempuan

   Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:

   Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan difokuskan pada pemberdayaan dan pemahaman hak konstitusional guna meminimalkan praktik diskriminasi. Upaya pencegahan ini diperkuat

dengan jaringan perlindungan hingga tingkat kecamatan untuk mendeteksi dan menangani kasus kekerasan domestik secara dini. Pemerintah Kabupaten Kotabaru memfasilitasi pelatihan bagi relawan pendamping agar mampu memberikan pertolongan pertama serta pendampingan yang tepat bagi korban. Sosialisasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terus digalakkan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Sinergi dengan berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu menciptakan budaya lokal yang lebih menghargai, menjunjung tinggi keadilan gender, dan melindungi kaum perempuan.

TUJUAN 2: TERWUJUDNYA PENGUATAN EKONOMI DAERAH

Penguatan ekonomi daerah merupakan pondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing Kabupaten Kotabaru. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan, memperluas kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya Penguatan Ekonomi Daerah sebagai bagian dari komitmen dalam mempercepat transformasi ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Angka PDRB Perkapita. Laju Pertumbuhan Ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah dari tahun ke tahun, Laju Inflasi menggambarkan stabilitas harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat, sedangkan PDRB Perkapita menunjukkan tingkat rata-rata pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan ekonomi. Melalui pengendalian inflasi yang terkendali, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta kenaikan PDRB per kapita, diharapkan struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru semakin kokoh, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II.14
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,35	5,34	99,81%	5,90	90,50%

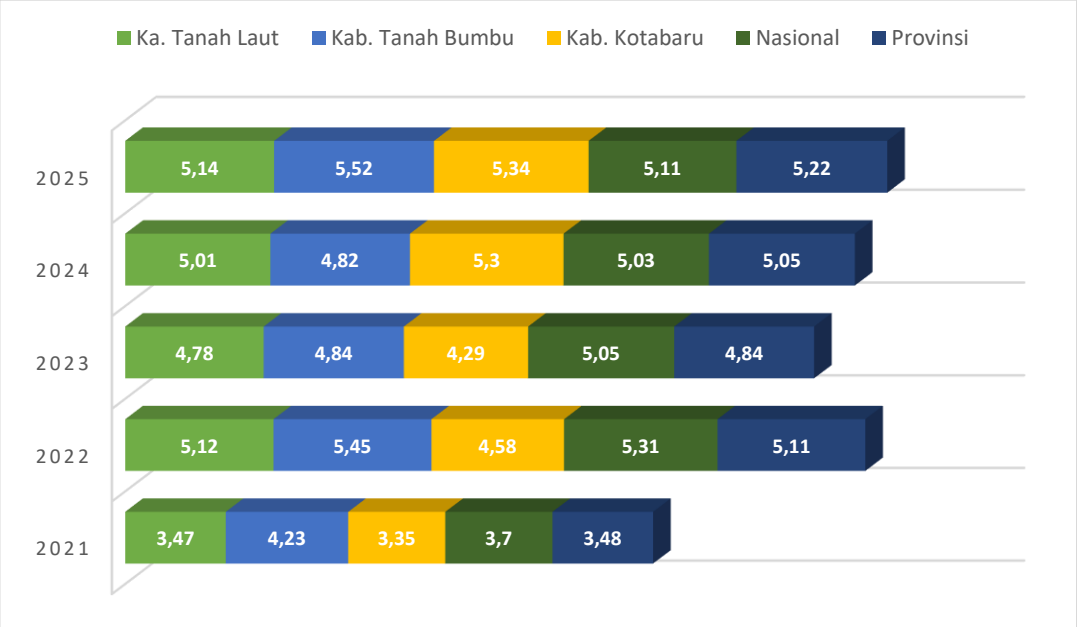
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 terealisasi sebesar 5,34% apabila dibandingkan dengan target 5,35% sehingga capaiannya sebesar 99,81% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi realisasi mencapai 5,34% angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,30%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 terealisasi sebesar 5,34% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 5,90% sehingga capaian sebesar 90,50%

Grafik II.9
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hingga 2025, dinamika perekonomian Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun berujung pada peningkatan yang sangat progresif. Pada periode awal (2021–2023), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru masih berada pada fase pemulihan dengan capaian yang relatif lebih lambat dibandingkan daerah komparasinya. Pada tahun 2021, pertumbuhan tercatat sebesar 3,35%,

kemudian meningkat menjadi 4,58% pada 2022, sebelum akhirnya sedikit terkoreksi ke angka 4,29% pada tahun 2023. Sepanjang tiga tahun tersebut, performa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru secara konsisten masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan maupun pencapaian Nasional.

Namun demikian, kinerja perekonomian Kabupaten Kotabaru mengalami titik balik (turning point) dan akselerasi yang luar biasa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi melesat tajam mencapai angka 5,30%, sekaligus berhasil melampaui capaian Kabupaten Tanah Laut (5,01%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (4,82%), serta memposisikan diri di atas rata-rata pencapaian Nasional (5,03%) dan Provinsi (5,05%). Momentum positif ini mampu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,34%. Meskipun pada tahun 2025 posisinya berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu, capaian Kabupaten Kotabaru tetap mencatatkan performa yang sangat baik karena tetap konsisten berada di atas angka rata-rata pertumbuhan tingkat Provinsi (5,22%) dan Nasional (5,11%).

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru selama kurun waktu 2021–2025 menunjukkan resiliensi dan daya ungkit yang sangat positif. Meskipun sempat mengalami ketertinggalan laju pertumbuhan pada paruh pertama periode (2021–2023), Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil mengeksekusi strategi akselerasi pembangunan dan ekonomi yang terbukti efektif, ditandai dengan lonjakan tajam pada tahun 2024 dan tren keberlanjutan di tahun 2025 yang sukses menembus di atas target rata-rata provinsi dan nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan, stimulus, maupun program prioritas daerah yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat. Fokus Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke depan adalah menjaga stabilitas dan konsistensi momentum pertumbuhan ini, serta terus mengoptimalkan sektor-sektor riil unggulan yang terbukti menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi daerah

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan
2. Peningkatan investasi daerah di Kabupaten Kotabaru yang mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat
3. Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi
4. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
5. Kabupaten Kotabaru menjadi daerah dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan
6. Tersedianya kawasan industri di Kabupaten Kotabaru
7. Tersedianya pelabuhan yang dapat digunakan sebagai hub logistik regional
8. Adanya dukungan kebijakan dari level pemerintah pusat hingga kabupaten untuk mendorong peningkatan investasi

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

1. Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
2. Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
3. Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun
4. Masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga rentan akan potensi menganggur
5. Produktivitas tenaga kerja daerah belum optimal karena sebagian besar berada pada kualifikasi pendidikan dasar
6. Sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi yang kurang baik
7. Adanya perizinan yang rumit dan berbelit-belit sehingga minat investasi rendah
8. Adanya degradasi lingkungan akibat dampak pertambangan dan abrasi garis pantai
9. Kredit usaha belum dinikmati oleh sebagian besar pelaku UMKM
10. Sebagian besar kegiatan ekonomi terkonsentrasi di wilayah PulauLaut

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berfokus pada strategi diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan potensi-potensi baru di luar sektor primer, seperti sektor industri pengolahan, jasa, pariwisata, serta optimalisasi sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja secara masif. Upaya ini diperkuat dengan percepatan pengembangan kawasan industri serta penerapan konsep ekonomi biru dan ekonomi sirkuler guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang inovatif. Seluruh langkah pengembangan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan demi menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Guna mendukung akselerasi pertumbuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan perhatian besar pada penyediaan infrastruktur dasar seperti perbaikan kualitas jalan dan keandalan pasokan listrik yang menjadi urat nadi produktivitas daerah. Sejalan dengan pembangunan fisik, dilakukan pula perbaikan iklim investasi melalui percepatan layanan perizinan dan penyederhanaan regulasi daerah. Strategi investasi ini juga diintegrasikan dengan kebijakan penggunaan tenaga kerja lokal melalui kemitraan strategis dengan para investor, sehingga setiap investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pada sisi penguatan modal manusia dan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan mendorong masyarakat untuk meraih kualifikasi minimal diploma atau sarjana guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, aspek kesetaraan gender turut diperkuat melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita. Sementara itu, daya saing ekonomi lokal dipacu melalui pendampingan intensif pada UMKM lewat pusat inkubasi bisnis daerah serta percepatan digitalisasi produk. Melalui sinergi berbagai kebijakan ini, diharapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru mampu tumbuh secara stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II.15
Capaian Laju Inflasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Inflasi	%	0,26	3,50	3,03	113,42%	3,10	102,25%

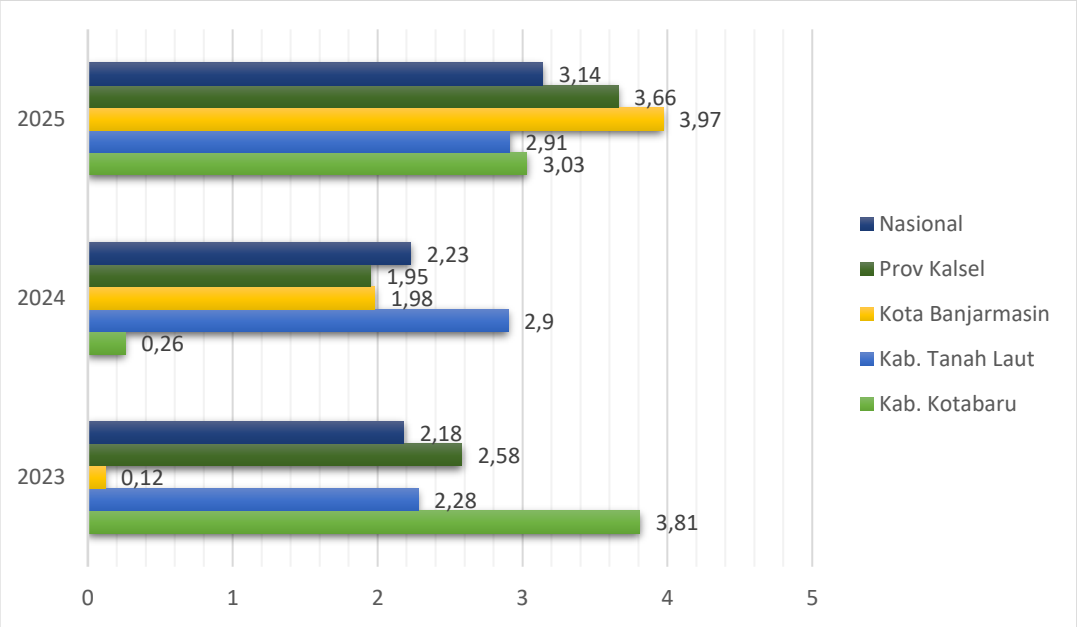
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Inflasi tahun 2025 terealisasi sebesar 3,03% apabila dibandingkan dengan target 3,50% sehingga capaiannya sebesar 113,42% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Inflasi realisasi mencapai 3,03% angka ini mengalami penurunan sebesar 2,77 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,26%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Inflasi tahun 2025 terealisasi sebesar 3,03% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 3,10% sehingga capaian sebesar 102,25%

Grafik II.10
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional
Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan data laju inflasi tahun 2023–2025, terlihat bahwa inflasi di Kabupaten Kotabaru mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain. Pada tahun 2023, inflasi Kabupaten Kotabaru tercatat sebesar 3,81%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tanah Laut (2,28%), Kota Banjarmasin (0,12%), Provinsi Kalimantan Selatan (2,58%), dan nasional (2,18%). Namun pada tahun 2024, inflasi Kotabaru turun drastis menjadi 0,26%, jauh lebih rendah dibandingkan Tanah Laut (2,9%), Banjarmasin (1,98%), Provinsi (1,95%), dan nasional (2,23%). Memasuki tahun 2025, inflasi Kotabaru kembali meningkat menjadi 3,03%, relatif sejalan dengan Tanah Laut (2,91%) dan nasional (3,14%), meskipun masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan (3,66%) dan Kota Banjarmasin (3,97%).

Laju inflasi Kabupaten Kotabaru selama periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang dinamis namun tetap dalam kategori terkendali. Penurunan tajam pada 2024 mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, sementara kenaikan kembali pada 2025 masih berada dalam batas yang wajar dan tidak melampaui tingkat provinsi secara signifikan. Secara umum, stabilitas inflasi di Kabupaten Kotabaru cukup baik dan perlu terus dijaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Inflasi, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen dalam menjaga laju inflasi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah tim yang dibentuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan gejolak harga bahan pokok di daerah
2. Melaksanakan operasi pasar tematik pada momen rawan (Hari Besar Keagamaan Nasional) dengan mensubsidi biaya angkut komoditas pangan.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju Inflasi, sebagai berikut:

1. Banyaknya perantara dalam rantai pasok dari pelabuhan hingga ke kecamatan terpencil (seperti Pulau Sembilan atau Geronggang) menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi.
2. Sebagai wilayah kepulauan, inflasi di Kotabaru sangat sensitif terhadap harga BBM dan tarif angkutan laut yang berdampak langsung pada distribusi barang pokok.
3. Fluktuasi harga pangan seperti beras, cabai, dan bawang yang dipengaruhi oleh anomali cuaca (El Nino/La Nina) yang mengganggu produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berupaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menjalankan strategi pengawasan dan koordinasi intensif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan high-level meeting secara rutin guna merumuskan kebijakan taktis, yang didukung dengan pemantauan harga harian secara real-time melalui sistem informasi harga pasar. Pengawasan berbasis data ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi fluktuasi harga secara dini dan mengambil keputusan yang tepat sasaran dalam menjaga daya beli masyarakat.

Guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat hulu, pemerintah daerah turut mendorong kemandirian pangan rumah tangga dengan menggerakkan masyarakat dan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Melalui program penanaman cabai dan berbagai jenis sayuran secara mandiri, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pasar dapat dikurangi, sehingga stabilitas konsumsi rumah tangga tetap terjaga meskipun terjadi dinamika harga di tingkat pedagang. Langkah preventif ini menjadi pilar penting dalam menciptakan struktur pangan daerah yang lebih mandiri dan tangguh terhadap guncangan pasar.

Menyadari tantangan geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari wilayah pedalaman dan kepulauan, pemerintah melakukan intervensi distribusi melalui alokasi anggaran subsidi ongkos angkut barang pokok. Subsidi ini diaktifkan secara strategis saat terjadi kenaikan harga ekstrim,

terutama untuk memangkas biaya logistik dari pelabuhan menuju wilayah-wilayah terpencil. Melalui kombinasi pengawasan digital, pemberdayaan pangan mandiri, dan intervensi biaya distribusi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata

Tabel II.16
Capaian Angka PDRB Perkapita

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Angka PDRB Perkapita	Rp Juta	108,03	111,10	115,04	103,54%	145,00	79,33%

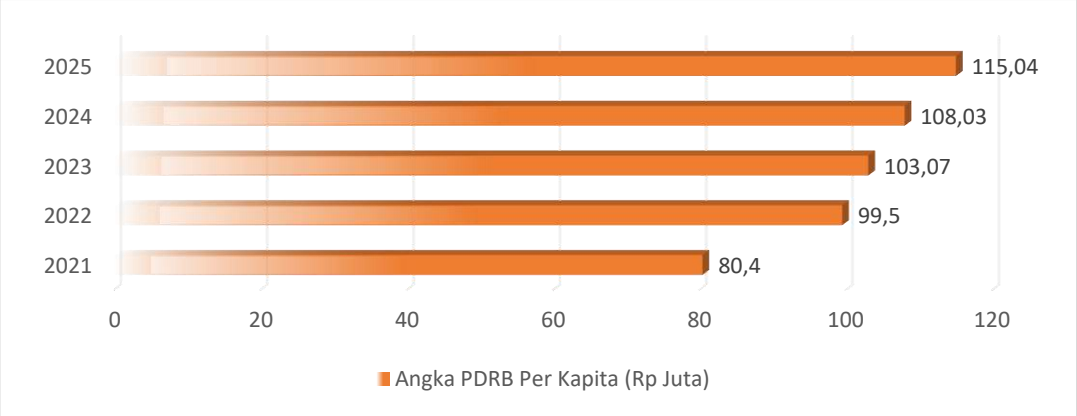
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Angka PDRB Perkapita tahun 2025 terealisasi sebesar 115,04 apabila dibandingkan dengan target 111,10 sehingga capaiannya sebesar 97,23% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Angka PDRB Perkapita realisasi mencapai 115,04 angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,01 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 108,03.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Angka PDRB Perkapita tahun 2025 terealisasi sebesar 115,04 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 145,00 sehingga capaian sebesar 79,33%

Grafik II.11
Perkembangan Angka PDRB Per Kapita Tahun 2021 s.d 2025

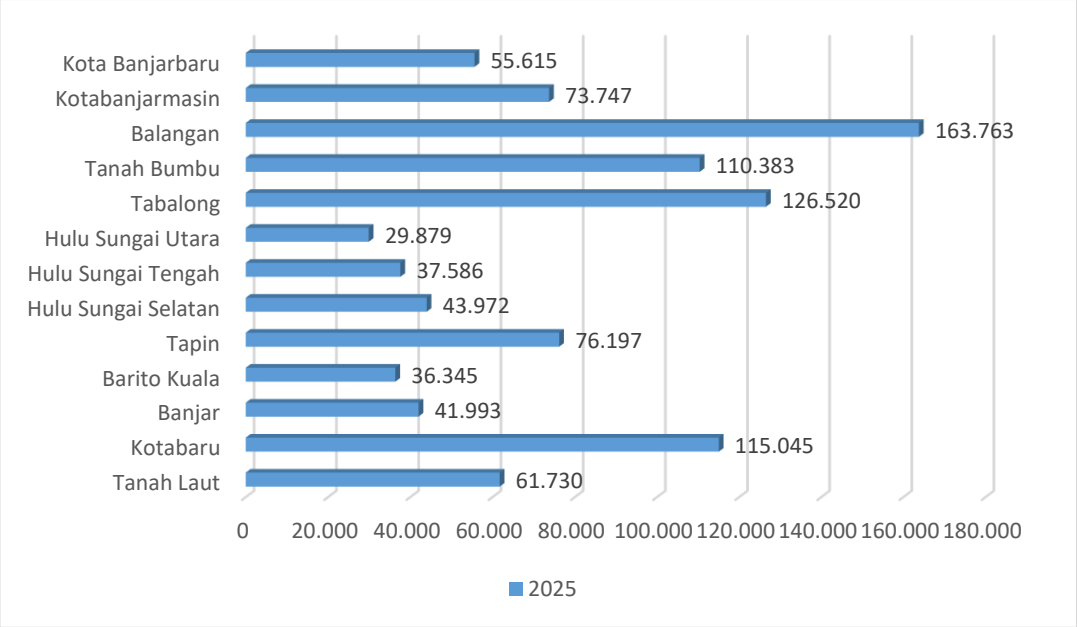


Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa tren Angka PDRB Per Kapita dalam satuan juta rupiah menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dan progresif sejak tahun 2021 hingga 2024. Perjalanan kenaikan ini dimulai dari angka Rp80,4 juta pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi Rp99,5 juta di tahun 2022, hingga akhirnya berhasil menembus angka seratus juta pada tahun 2023 dengan raihan Rp103,07 juta. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 yang mencapai angka Rp108,03 juta, mencerminkan adanya penguatan ekonomi yang cukup stabil di wilayah tersebut.

Memasuki tahun 2025, angka yang tercatat meningkat yaitu Rp115,04 juta. Data fina pada tahu 2025 ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi per kapita di wilayah Kabupaten Kotabaru ini akan mencatatkan rekor kenaikan lima tahun berturut-turut tanpa jeda.

Grafik II.12
Perkembangan Angka PDRB Per Kapita Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BPS Prov. Kalsel, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan variasi ekonomi yang cukup signifikan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Kota Baru mencatatkan angka PDRB per kapita sebesar 115. Angka ini menempatkan Kotabaru sebagai salah satu wilayah dengan produktivitas ekonomi per kapita tertinggi di dalam daftar tersebut.

Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, Kota Baru berada di posisi ke-3 tertinggi, hanya kalah dari Kabupaten Balangan (163.763) dan Kabupaten Tabalong (126.520). Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Baru memiliki basis ekonomi yang sangat kuat, yang kemungkinan besar didorong oleh sektor industri skala besar atau kekayaan sumber daya alam (seperti pertambangan atau perkebunan) yang mampu memberikan nilai tambah tinggi bagi wilayahnya.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Angka PDRB Per Kapita, sebagai berikut:

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit) tetap menjadi tulang punggung utama yang menjaga level PDRB tidak merosot di tengah ketidakpastian global.
2. Adanya realisasi investasi pada industri pengolahan (hilirisasi) yang mulai memberikan nilai tambah pada produk domestik daerah.

3. Membangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta optimalisasi pelabuhan yang memperlancar arus barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi tetap berputar.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Angka PDRB Per Kapita, sebagai berikut:

1. Sangat tingginya ketergantungan ekonomi Kotabaru pada harga batu bara dan CPO. Penurunan atau stagnasi harga komoditas ini di pasar internasional berdampak langsung pada nilai PDRB
2. Angka PDRB Per Kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk. Jika laju pertumbuhan ekonomi tidak mampu melampaui laju pertumbuhan penduduk, maka nilai per kapitanya akan cenderung melambat atau stagnan

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya menjalankan strategi integratif yang dimulai dari penguatan konektivitas wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta optimalisasi fungsi pelabuhan menjadi prioritas utama untuk memangkas biaya logistik dan memperlancar arus distribusi barang maupun jasa. Dengan infrastruktur yang handal, efisiensi aktivitas ekonomi terjaga, yang pada akhirnya memberikan stimulus positif terhadap pertumbuhan nilai tambah bruto di tingkat masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah melakukan pergeseran paradigma ekonomi melalui akselerasi hilirisasi industri pengolahan. Kebijakan ini diarahkan agar Kabupaten Kotabaru tidak lagi terjebak pada ketergantungan ekspor bahan mentah. Dengan mendorong pengolahan hasil tambang dan perkebunan di dalam daerah, tercipta rantai nilai (value added) yang jauh lebih besar, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan output ekonomi daerah dan pendapatan per kapita penduduk.

Sebagai langkah mitigasi terhadap ketergantungan pada sektor ekstraktif yang bersifat terbatas, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara konsisten menggali potensi sektor-sektor terbarukan, khususnya di bidang maritim dan pariwisata bahari. Transformasi menuju blue economy melalui optimalisasi sektor perikanan dan destinasi wisata unggulan diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Sektor

ini tidak hanya menjamin kelestarian lingkungan, tetapi juga memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Terakhir, penguatan struktur PDRB dilakukan dengan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Melalui pendampingan intensif dan fasilitasi akses pasar, pelaku usaha di Kotabaru didorong untuk mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Penguatan sektor non-pemerintah ini krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan secara inklusif, sehingga kenaikan angka PDRB per kapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kotabaru

Sasaran 4: Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah

Peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah merupakan strategi penting dalam memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru. Sektor-sektor potensial yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekonomi yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Sasaran strategis ini diukur melalui empat indikator kinerja utama, yaitu Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%), Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%), Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%), serta Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%). Keempat sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, baik melalui penguatan sektor pariwisata dan jasa, distribusi dan perdagangan, pengolahan hasil produksi, maupun pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui peningkatan laju pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut, diharapkan tercipta nilai tambah yang lebih besar, peningkatan produktivitas, serta perluasan kesempatan kerja yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Tabel II.17
Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,22	3,23	4,94	152,94%	3,32	148,79%

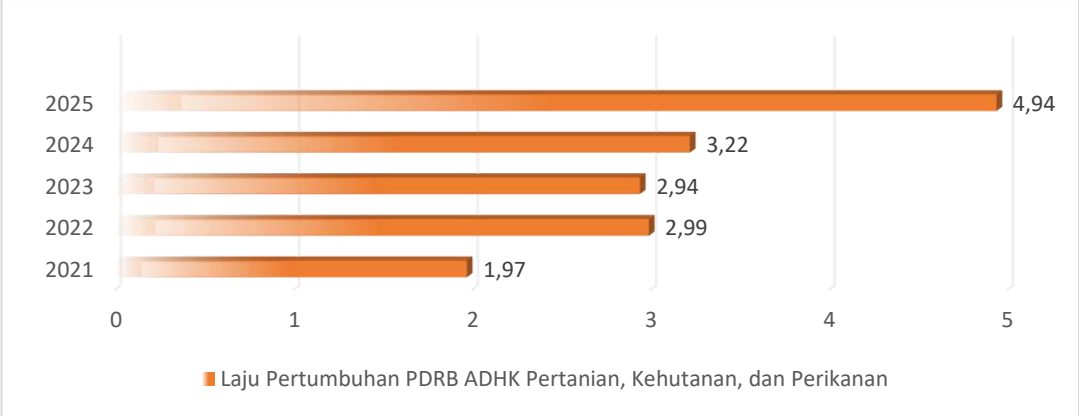
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 4,94 apabila dibandingkan dengan target 3,23%, maka capaiannya sebesar 152,94% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan realisasi sebesar 4,94 angka ini mengalami perubahan yaitu meningkat 1,72 poin dibandingkan dengan tahun 2024 capaian Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan sebesar 3,22.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2025 terealisasi sebesar 4,94 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 3,32 maka capaiannya sebesar 148,79%

Grafik II.13
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, Laju pertumbuhan PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang progresif dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Mengawali periode pada tahun 2021, sektor ini tumbuh di angka 1,97%, yang kemudian mengalami akselerasi signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 2,99%. Meskipun sempat terjadi fluktuasi tipis pada tahun 2023 menjadi 2,94%, performa sektor primer ini kembali menguat pada tahun 2024 dengan capaian 3,22%. Angka pertumbuhan tersebut terpantau meningkat pada tahun 2025 di level yang sama, yakni 4,94%. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sektor pertanian di Kotabaru berhasil menjaga momentum pertumbuhan yang positif sebagai salah satu pilar ekonomi daerah.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju pertumbuhan PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Optimasi lahan perkebunan (khususnya kelapa sawit dan karet) yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kotabaru
2. Adanya dukungan bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani yang meningkatkan efisiensi produksi pangan
3. Pemanfaatan wilayah pesisir Kotabaru yang luas untuk produksi perikanan guna memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor.
4. Kondisi harga jual produk pertanian dan perikanan yang relatif terjaga sehingga memotivasi produsen untuk mempertahankan kapasitas produksi

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju pertumbuhan PDRB pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai berikut:

1. Anomali cuaca yang sulit diprediksi berdampak pada siklus tanam dan produktivitas hasil tangkapan nelayan di laut
2. Masih perlunya peningkatan infrastruktur jalan usaha tani

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh pada penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai tambah. Strategi utama dilakukan melalui hilirisasi industri pengolahan, di mana pemerintah mendorong transformasi dari penjualan bahan mentah menjadi produk olahan hasil pertanian dan perikanan yang memiliki daya saing lebih tinggi. Dengan terciptanya unit-unit pengolahan di dalam daerah, Kabupaten Kotabaru tidak hanya mengandalkan volume produksi, tetapi juga mengamankan margin nilai tambah (value-added) yang lebih besar, yang secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap angka PDRB sektor tersebut.

Guna menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah tantangan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan modernisasi sektor pertanian melalui implementasi teknologi informasi. Langkah mitigasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim dilakukan dengan penerapan sistem pemetaan lahan digital dan pengaturan jadwal tanam yang presisi. Integrasi teknologi ini memastikan keberlanjutan produksi pangan dan komoditas unggulan daerah, sehingga fluktuasi iklim tidak lagi menjadi penghambat utama dalam pencapaian target pertumbuhan sektoral.

Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi pada sektor kehutanan diarahkan pada prinsip kelestarian melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Fokus pada komoditas seperti madu hutan dan pemanfaatan tanaman sela menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem hutan. Sinergi antara peningkatan nilai ekonomi dari hasil hutan non-kayu dan penguatan industri hilir perikanan serta pertanian ini diharapkan menjadi mesin penggerak utama dalam menjaga tren positif laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotabaru yang inklusif dan berkelanjutan

Tabel II.18
Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	4,13	4,14	7,52	181,64%	4,18	179,90%

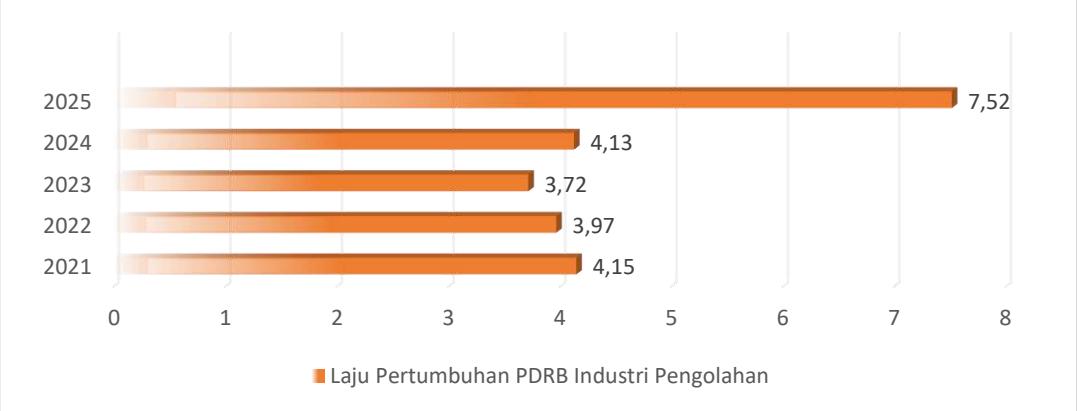
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,52 apabila dibandingkan dengan target 4,13%, maka capaiannya sebesar 181,64% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan sebesar 7,52 angka ini mengalami perubahan yaitu meningkat 3,39 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan sebesar 4,13

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun 2025 sebesar 7,52 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 4,18% maka capaiannya sebesar 179,90%.

Grafik II.14
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan
Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pertumbuhan ini didorong oleh dinamika pada sektor produktif, salah satunya adalah Industri Pengolahan. Meskipun Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

sempat mengalami fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2023 sebesar 3,72% sektor ini menunjukkan resiliensi yang baik.

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan industri pengolahan kembali menguat ke angka 4,13%. Angka pertumbuhan meningkat menjadi 7,52 juga tercatat pada tahun 2025, menunjukkan bahwa sektor industri tetap menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dalam menjaga level PDRB per kapita masyarakat di angka tertingginya selama lima tahun terakhir.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, sebagai berikut:

1. Operasional pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) dan industri pengolahan hasil tambang yang tetap stabil memberikan kontribusi besar pada nilai tambah industri.
2. Penambahan mesin atau pembaruan teknologi pada beberapa lini industri manufaktur lokal yang meningkatkan efisiensi output
3. Kelancaran distribusi bahan baku dari sektor pertanian dan pertambangan lokal menuju pabrik-pabrik pengolahan di dalam daerah

Sedangkan, faktor penghambat capaian Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan yaitu masih terdapat celah antara ketersediaan tenaga kerja lokal dengan kualifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri manufaktur modern.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya untuk transformasi struktur ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan sebagai motor penggerak pertumbuhan domestik yang tangguh. Strategi utama dilakukan dengan akselerasi penyediaan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan industri potensial, meliputi pemenuhan kebutuhan listrik, ketersediaan air bersih, dan aksesibilitas jalan yang mumpuni. Ketersediaan infrastruktur pendukung yang reliabel ini menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan daya tarik investasi (investment attractiveness), khususnya bagi investor industri hilir baru yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Kotabaru.

Sejalan dengan penguatan infrastruktur, pemerintah daerah mendorong pergeseran paradigma produksi dari industri hulu ke hilirisasi produk turunan akhir. Upaya ini diarahkan agar komoditas unggulan daerah,

seperti Crude Palm Oil (CPO), tidak lagi hanya berhenti pada produk setengah jadi, melainkan diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti minyak goreng maupun produk kimia. Diversifikasi produk ini secara eksponensial akan meningkatkan nilai output sektor industri dalam penghitungan PDRB, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Guna memastikan keberlanjutan operasional industri, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga fokus pada penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten melalui skema kolaborasi triple helix. Kerja sama antara pemerintah daerah, institusi pendidikan (SMK/Universitas), dan sektor industri dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan nyata pasar kerja. Dengan terciptanya ekosistem tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi, efisiensi produksi industri meningkat, yang pada gilirannya akan memicu akselerasi laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan secara signifikan dan berkelanjutan.

Tabel II.19
Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%).

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,31	5,40	7,29	135%	5,85	124,61%

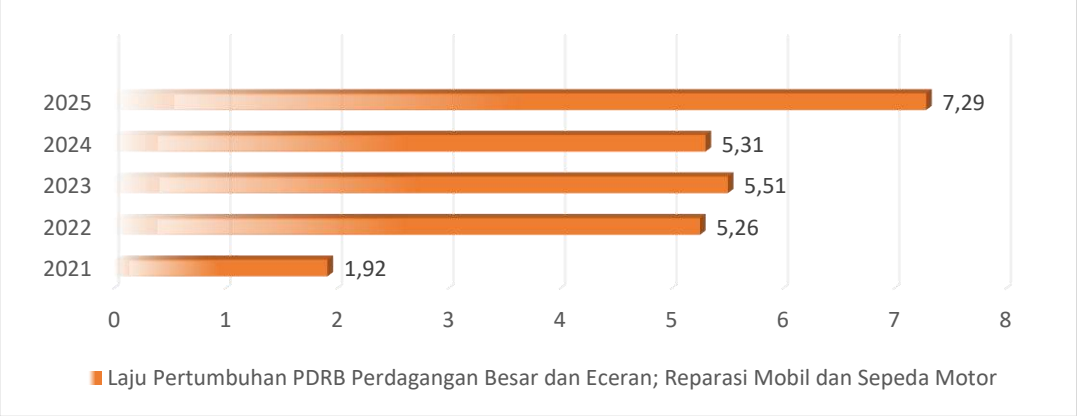
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,29 apabila dibandingkan dengan target 5,40%, maka capaiannya sebesar 135% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor realisasi sebesar 7,29 angka ini mengalami peningkatan 1,98 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,31.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2025 terealisasi sebesar 7,29 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 5,85% maka capaiannya sebesar 124,61%

Grafik II.15
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa tren pemulihan dan stabilitas yang signifikan pada sektor perdagangan dan reparasi kendaraan. Pada tahun 2021, sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang relatif rendah sebesar 1,92%, yang merupakan titik awal pemulihan pascapandemi. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan performa yang sangat tajam menjadi 5,26%, menunjukkan geliat ekonomi yang kembali normal.

Puncak pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan angka 5,51%. Meskipun pada tahun 2024 grafik menunjukkan sedikit normalisasi ke angka 5,31%, performa sektor ini tetap terjaga di level yang stabil. Untuk kepentingan penyusunan LKjIP 2025, angka pertumbuhan tahun 2025 mengalamai peningkat menjadi 7,29%. Perlu dicatat bahwa nilai untuk tahun 2025 ini valid dan dapat digunakan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat mendorong aktivitas transaksi di pasar tradisional maupun ritel modern di Kotabaru
2. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor meningkatkan permintaan jasa reparasi dan suku cadang secara konsisten
3. Aktivitas ekonomi dari sektor tambang dan industri pengolahan menciptakan multiplier effect bagi perdagangan lokal untuk menyuplai kebutuhan operasional perusahaan dan karyawan

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagai berikut:

1. Kendala distribusi barang ke wilayah pelosok atau kepulauan di Kotabaru yang menyebabkan biaya angkut tinggi, sehingga menghambat ekspansi perdagangan besar.
2. Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang tahan lama yang terkadang menekan margin laba pedagang eceran

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya untuk mengakselerasi Laju Pertumbuhan PDRB pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menaruh perhatian besar pada transformasi ekosistem logistik dan distribusi daerah. Strategi utama yang dijalankan adalah pemberian kemudahan perizinan bagi distributor skala besar untuk membangun pusat pergudangan dan pangkalan logistik di wilayah Kotabaru. Langkah ini diambil secara taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga mampu menekan biaya logistik dan menjamin stabilitas harga barang di tingkat konsumen. Efisiensi ini tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan volume transaksi perdagangan domestik secara signifikan.

Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan jasa melalui program penguatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil. Fokus diberikan pada pelatihan manajemen stok dan standar pelayanan pelanggan bagi pemilik bengkel serta pedagang eceran agar lebih

profesional dan kompetitif. Upaya ini bertujuan agar sub-sektor reparasi mobil dan sepeda motor dapat tumbuh seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga kontribusi jasa perbaikan terhadap nilai tambah bruto daerah semakin optimal.

Guna menciptakan stimulus ekonomi yang bersifat insidental namun berdampak masif, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerapkan strategi integrasi sektor pariwisata dengan sektor perdagangan. Melalui penyelenggaraan event pariwisata daerah yang dipadukan dengan bazar perdagangan dan ekspo UMKM, tercipta momentum peningkatan volume transaksi eceran secara musiman. Sinergi lintas sektor ini memastikan bahwa arus kunjungan wisatawan dapat dikonversi menjadi pendapatan nyata bagi pedagang lokal, yang pada akhirnya mendorong tren positif pada Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan reparasi secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Tabel II.20
Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	9,24	9,25	11,68	126,27%	9,29	125,72%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

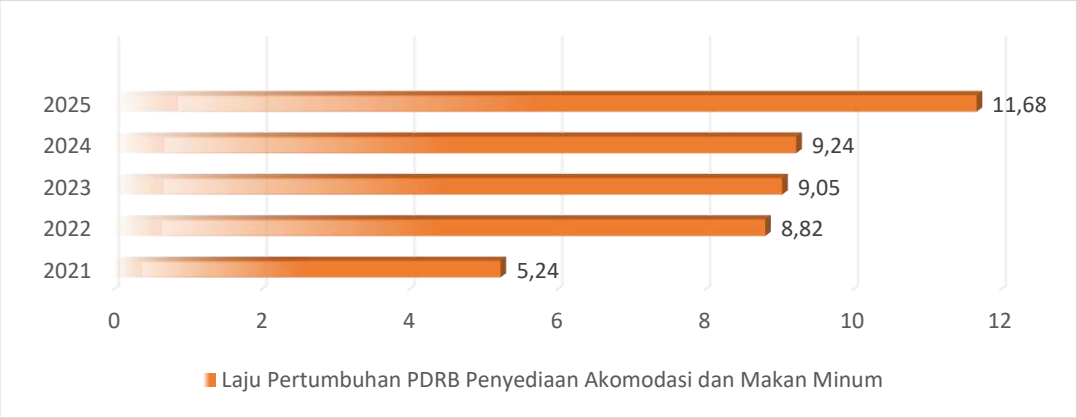
Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 terealisasi sebesar 11,68 apabila dibandingkan dengan target 9,24%, maka capaiannya sebesar 126,27% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum realisasi sebesar 11,68 angka ini mengalami perubahan

peningkatan sebesar 2,44 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,24%.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2025 terealisasi sebesar 11,68 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 9,29% maka capaiannya sebesar 125,72%

Grafik II.16
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pertumbuhan ekonomi pada sektor ini diawali dengan angka 5,24% pada tahun 2021, yang kemudian mengalami akselerasi tajam pada tahun 2022 menjadi 8,82% dan terus menguat hingga mencapai 9,05% di tahun 2023. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 9,24%. Untuk tahun 2025, angka pertumbuhan diestimasikan tetap stabil pada angka 9,24%, meskipun perlu dicatat bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mendorong sektor pariwisata dan jasa penunjangnya, yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun, sebagai berikut:

1. Peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan di Kotabaru secara langsung meningkatkan tingkat hunian hotel (akomodasi) dan omzet usaha rumah makan/restoran
2. Pergeseran pola konsumsi masyarakat lokal yang semakin gemar melakukan aktivitas makan di luar rumah (dining out) serta meningkatnya tren jasa pesan-antar makanan digital
3. Tumbuhnya usaha mikro dan menengah (UMKM) baru di bidang makanan dan minuman yang semakin variatif dan tersebar di titik-titik strategis wilayah Kotabaru.
4. Penyelenggaraan berbagai acara formal pemerintahan, festival budaya, maupun kegiatan korporasi yang mendorong permintaan jasa boga dan penyediaan penginapan

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun, sebagai berikut:

1. Masih terdapat variasi kualitas pelayanan dan fasilitas pada akomodasi kelas menengah ke bawah yang dapat memengaruhi daya saing terhadap tuntutan wisatawan modern.
2. kendala geografis dan infrastruktur pendukung di beberapa lokasi wisata terpencil masih membatasi distribusi pasokan bahan baku dan kunjungan tamu secara masif.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen memperkuat fundamental ekonomi pada sektor pariwisata dan jasa boga sebagai mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Strategi utama dilakukan dengan membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha hotel dan restoran dengan produsen lokal, seperti petani dan nelayan. Sinergi rantai pasok ini bertujuan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan baku segar bagi industri pariwisata sekaligus memangkas biaya logistik yang tinggi. Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, efisiensi operasional di sektor akomodasi meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan nilai tambah bruto sektor ini dalam struktur PDRB daerah.

Dalam era transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan akselerasi digitalisasi transaksi pada destinasi dan desa wisata. Melalui fasilitasi sistem pemesanan akomodasi berbasis daring dan penerapan pembayaran digital (QRIS), pencatatan transaksi pada sektor

akomodasi dan makan minum menjadi lebih akurat, transparan, dan real-time. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput terdata secara formal, sehingga memberikan gambaran pertumbuhan sektoral yang lebih presisi dan akuntabel.

Guna mendukung operasional industri yang lebih kompetitif, pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi. Tenaga kerja lokal di bidang industri pengolahan serta jasa pelayanan dibekali dengan sertifikasi standar industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sesuai dengan ekspektasi investor serta wisatawan mancanegara. Dengan kombinasi antara penguatan rantai pasok, digitalisasi sistem, dan profesionalisme SDM, Laju Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kotabaru diproyeksikan akan terus menunjukkan tren positif yang signifikan.

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
    a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub keg. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.425.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.836.000,- atau 96,18% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	15.425.000,-	14.836.000,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen hasil validasi dan verifikasi permohonan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	4 unit usaha	4 unit usaha
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	26,67%	26,67%

Dokumentasi:



Foto Kegiatan Dalam rangka menghadiri RAT Tahun Buku 2024 KUD gajah mada di Aula gedung serbaguna KUD Gajah Mada desa telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir.

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub keg. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19.601.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.006.000,- atau 96,96% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 unit usaha selama 12 bulan.

Tabel
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	19.601.000,-	19.006.000,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen hasil validasi dan verifikasi permohonan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 unit usaha	2 unit usaha
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	13,33%	13,33%

Dokumentasi:



Foto kegiatan Dalam rangka Penyuluhan pendirian Koperasi ke kantor Quarry Office PT. Pama Indo Mining Desa Batu lassung, Kec. kelumpang Hulu

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

a. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1) Sub keg. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 629.475.000,- terealisasi sebesar Rp. 627.827.036,- atau 99,74% dan capaian kinerja 225% digunakan untuk melakukan penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi sebanyak 9 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	629.475.000,-	627.827.036,-
2	Keluaran	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi	4 unit usaha	9 unit usaha
3	Hasil	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	9,5%	6%

2) Sub keg. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 89.841.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.833.500,- atau 98,88% dan capaian kinerja 175% digunakan untuk pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 7 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	89.841.000,-	88.833.500,-
2	Keluaran	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	4 unit usaha	7 unit usaha
3	Hasil	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	9,5%	6%

Dokumentasi:

Foto Kegiatan Dalam rangka koordinasi dan konsultasi Percepatan Operasional Gerai melalui Digitalisasi Kelembagaan KDKMP pada Aplikasi SIMKOPDES di Kementerian Koperasi RI Jakarta.



3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub keg. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.970.500,- atau 87,79% dan capian kinerja 100% digunakan untuk pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenagangan kabupaten/kota hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah unit usaha koperasi yang disurvei untuk

dinilai sebanyak 25 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	79.700.000,-	69.970.500,-
2	Keluaran	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang disurvei untuk dinilai	25 unit usaha	25 unit usaha
3	Hasil	Jumlah KSP/ USP yang diberikan penilaian	25 unit usaha	25 unit usaha

2) Sub keg. Penilaian Kesehatan Koperasi melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.255.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.124.000,- atau 89,48% dan capian kinerja 100% digunakan untuk penilaian Kesehatan koperasi melalui tata Kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah unit usaha yang diberikan penilaian awal sebanyak 25 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	39.255.000,-	35.124.000,-
2	Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang diberikan Penilaian Awal	25 unit usaha	25 unit usaha
3	Hasil	Jumlah KSP/ USP yang diberikan penilaian	25 unit usaha	25 unit usaha

Dokumentasi:

Foto kegiatan Dalam rangka penilaian kesehatan koperasi Palma Indah maju di SKIP P.Panci Desa Serongga Kec. Kelumpang Hilir



4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

1) Sub keg. peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 317.279.000,- terealisasi sebesar Rp. 316.164.496,- atau 99,65% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk memberikan pendidikan dan peningkatan pengetahuan SDM pengurus dan pengelola koperasi hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian sebanyak 6 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	317.279.000,-	316.164.496,-
2	Keluaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	6 Kali	6 Kali
3	Hasil	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	180 Orang	292 Orang

Dokumentasi:

Foto Kegiatan Bimtek di Meeting Room Hotel Grand Surya Kab.Kotabaru



Foto kegiatan Dalam rangka Pengembangan MockUp atau percontohan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DI Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman



5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   a. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota.
      1) Sub keg. Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 616.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 505.000.000,- atau 81,97% dan capaian kinerja 10.100% digunakan untuk Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya sebanyak 202 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	616.100.000,-	505.000.000,-

2	Keluaran	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2 unit usaha	202 unit usaha
3	Hasil	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan	5,5%	47%

2) Sub keg. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.494.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.420.730,- atau 99,93% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, pembiayaan, pengutamaan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Akses Pembiayaan sebanyak 8 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	102.494.000,-	102.420.730,-
2	Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Akses Pembiayaan	8 unit usaha	8 unit usaha
3	Hasil	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan	5,5%	47%

Dokumentasi

Foto kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Pendirian Koperasi di PT.HPJ Salino



6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

   a. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

      1) Sub keg. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

      Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 47.537.150,- terealisasi sebesar Rp. 44.696.150,- atau 94,02% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah fasilitasi kemitraan usaha mikro 10 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	47.537.150,-	44.696.150,-
2	Keluaran	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro	10 unit usaha	10 unit usaha
3	Hasil	Jumlah Unit Usaha mikro yang bermitra	5 unit usaha	10 unit usaha

      2) Sub keg. fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 179.764.000,- terealisasi sebesar Rp. 145.701.514,- atau 81,05% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk memberikan fasilitasi dalam perizinan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outome kegiatan yaitu Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan keamanan pangan sebanyak 30

Unit usaha selama 1 kali pelatihan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	179.764.000,-	145.701.514,-
2	Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan	30 unit usaha	30 unit usaha
3	Hasil	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pelatihan	30 unit usaha	30 unit usaha

3) Sub keg. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.333.000,- atau 94,64% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Unit Usaha yang mengikuti sosialisasi perizinan UMKM sebanyak 60 unit usaha selama 2 kali sosialisasi dan Jumlah usaha mikro yang difasilitasi izin sebanyak 41 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan
Usaha mikro tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	94.390.000,-	89.333.000,-
2	Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang mengikuti Sosialisasi Perizinan UMKM	60 unit usaha	60 unit usaha
		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Izin	12 unit usaha	41 unit usaha
3	Hasil	Jumlah UMKM yang berizin	12 unit usaha	41 unit usaha

4) Sub keg. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 218.801.500,- terealisasi sebesar Rp. 176.284.000,- atau 80,57% dan capaian kinerja 193,333%

digunakan untuk koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah UMKM yang memahami kepatuhan terhadap perlindungan hukum sebanyak 58 orang selama 2 kali. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Perberdayaan Usaha Mikro Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	218.801.500,-	176.284.000,-
2	Keluaran	Jumlah UMKM yang Memahami Kepatuhan terhadap Perlindungan Hukum	30 Orang	58 Orang
3	Hasil	Jumlah UMKM yang berizin	12 unit usaha	41 unit usaha

5) Sub keg. Penyusunan basis data usaha mikro

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.063.089.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.532.849.650,- atau 86,95% dan capaian kinerja 72,97% digunakan untuk penyusunan basis data usaha mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah jumlah unit usaha mikro terdata sebanyak 109 unit usaha selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	4.063.089.500,-	3.532.849.650,-
2	Keluaran	Jumlah unit usaha mikro terdata	50 unit usaha	109 unit usaha
3	Hasil	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan alat produksi	50 kelompok	43 kelompok

Dokumentasi

Sosialisasi Perizinan Bagi UMKM Tahun 2025



Mempromosikan Produk UMKM



7. Program Pengembangan UMKM

a. Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi Peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro.

1) Sub Keg. Pengembangan usaha mikro.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 578.026.000,- terealisasi sebesar Rp. 574.141.934,- atau 99,33% dan capaian kinerja 250% digunakan untuk kegiatan pengembangan usah mikro. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu jumlah pelaksanaan pameran sebanyak 5 kali selama 12 bulan. Untu klebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pengembangan usaha Mikro Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi

1	Masukan	Dana	578.026.000,-	574.141.934,-
2	Keluaran	Jumlah pelaksanaan pameran	2 kali	5 kali
3	Hasil	Jumlah umkm yang dipasarkan produknya	20 unit usaha	20 unit usaha

Dokumentasi:

Mengikuti Pameran dan Bazar Ekonomi Kreatif Dalam Rangka MTQ Nasional XXXVI di Martapura



Mengikuti Bazar UMKM Hari Jadi Kabupaten Kotabaru (Expo) 2025



Mengikuti Pameran Bandung Prime Bandung Expo 2025 di Cihampelas Walk-Bandung



8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pada program ini dengan Anggaran sebesar Rp. 31.410.178.654,- dan realisasi sebesar Rp. 26.179.561.440,- dengan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator Jumlah produksi perikanan nelayan tangkap (ton) dimana target sebesar 85.535.24 ton kemudian realisasi sebesar 85.779 ton artinya capaian kinerja sebesar 100,28%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan dengan memberikan sarana prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan, serta menciptakan kampung nelayan yang berkelanjutan dan pendataan tentang perikanan tangkap.
b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dengan memberikan pembinaan dan pelatihan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi bantuan pendanaan
c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan memberikan pelayanan maksimal di TPI
d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT dengan memberikan rekomendasi Pelayanan, Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap,
e. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT dengan memberikan Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)

Berikut dokumentasi program dan kegiatan:

a. Dalam rangka pendistribusian Tanda Daftar Koordinasi Kapal Perikanan (TDKP) Nelayan Kecil



b. Monitoring SEHAT dan Rapat SEHAT Nelayan



c. Pemberian Bantuan kepada kelompok nelayan (Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan)





9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada program ini dengan anggaran sebesar Rp. 47.034.870.789,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.289.374.087,- dengan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatnya produksi perikanan

budidaya dengan indikator Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dimana target sebesar 35.702.98 ton kemudian realisasi sebesar 35.704.07 ton artinya capaian kinerja sebesar 100,%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan dengan memberikan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha, Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikan
b. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dengan memberikan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya, pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan, Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan.
c. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya dengan memberikan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK), Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya an Ikan Kecil (TDPIK).
d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan memberikan Prasarana Pembudidayaan Ikan, Klaster Tambak, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya, Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan, Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air, Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan, arana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, pendataan tentang pembudidayaan ikan.

Dokumentasi Kegiatan:



10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pada program ini dengan anggaran sebesar Rp.240.247.500,- , dan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.524.613,- dengan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan yaitu Terjaganya kelestarian ekosistem perairan umum daratan serta keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengawasan yang optimah dengan indikator Jumlah perairan umum daratan/sungai, danau, waduk dan perairan lainnya yang di awasi (Ha) dimana target sebesar 42.946 Ha kemudian realisasi sebesar 42.946 Ha dan Jumlah lahan budidaya perikanan yang di awasi (Ha) dengan target sebesar 8.455 Ha dengan realisasi kinerja sebesar 8.455 Ha artinya capaian kinerja sebesar 100,%. dan Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya dengan memberikan pengawasan pada pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Dokumentasi Program dan Kegiatan:



11. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pada program ini dengan anggaran sebesar Rp.3.208.451.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.166.383.933 ,- dengan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatnya konsumsi ikan dengan indikator Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), dimana target sebesar 73.13 kg kemudian realisasi sebesar 72.11 kg artinya capaian kinerja sebesar 98,61,%. dan Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan memberikan Penerbitan

Rekomendasi Perizinan Berusaha, Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan

b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan memberikan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dengan memberikan peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan, sosialisasi gemar makan ikan, lomba menu serba ikan, survey harga pasar, pasar murah untuk penurunan inflasi, Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil, bantuan sarana prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan

Dokumentasi Program dan Kegiatan:



12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota dengan realisasi 50%, meliputi :

1) Kajian Strategi Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Kotabaru Berbasis Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
2) Kajian Permohonan Izin Reklamasi Lokasi Kegiatan Pendaratan Paralayang dan Gantole. (tidak dilaksanakan)



b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menata dan mengelola Obyek Wisata yang tersebar di beberapa kawasan dengan menerapkan Standar Sapta Pesona. Hal ini dilakukan dalam upaya 92 menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang pariwisata di Obyek Wisata agar dapat memberi keamanan, kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjung Obyek Wisata, Sub Kegiatan meliputi :

1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terealisasi 91,67%, antara lain yang sudah dilaksanakan :
   - Lanjutan Pembangunan Panggung Objek Wisata Pantai Gedambaan.
   - Pemasangan Paving Jogging Track Wisata Gowa lowongan Desa Tegalrejo Kec. Kelumpang Hilir.
   - Pemasangan Paving Menuju Objek Wisata Ocean Fall (Kampung Nelayan) RT. 02 Desa Datang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam
   - Pembangunan Jalan di dalam Kawasan Obyek Wisata RT. 03 Desa Teluk Kemuning Kec. Pulau Laut Kepulauan.
   - Pembangunan Jalan Paving Lokasi Objek Wisata Raja Banua Lawas Desa Banua Lawas Kelumpang Hulu.

- Pembangunan Kios Kuliner di Objek Wisata Tajong Karama Desa Tajong Karama Kec. Pulau Laut Selatan.
- Pembangunan Lanjutan Jalan Paving Wisata di Objek Wisata Goa Liang Udud Desa Barang Kulit Kec. kelumpang Barat.
- Pembangunan Lanjutan Teras Kuliner Objek Wisata Tumpang Dua.
- Pembangunan Pagar Wisata Goa Lowo.
- Pembangunan Paving Blok Halaman Musholla Goa Lowo.
- Pembangunan Pentas Wisata di Objek Wisata Tajong Karama Desa Tajong Karama Kec. Pulau Laut Selatan.
- Pembangunan Pintu Gerbang Wisata Khayangan Hill Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar.
- Pembangunan Tanggul Sungai Goa Lowo.
- Pembangunan Tempat Parkir Objek Wisata Tumpang Dua Desa Sebelimbingan Tumpang Dua Kec. Pulau Laut Utara.
- Pembangunan Toilet Wisata Kampung Nelayan.
- Pembangunan WC Pantai Wisata Teluk Aru Desa Teluk Aru Kec. Pulau Laut Kepulauan.
- Pembuatan Giant Letter di Objek Wisata Nusa Dia Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar.
- Pembuatan Giant Letter di Objek Wisata Teluk Aru Desa Teluk Aru Kec.Pulau Laut Kepulauan.
- Pembuatan Jembatan Penghubung Pantai di Objek Wisata Pantai Gedambaan.
- Pemeliharaan Objek Wisata Siring Laut, Pantai Gedambaan, Air Terjun Tumpang Dua, Ekowisata Meranti Putih, dan Bukit Mamake Bapake.
- Penerangan Lampu, Lampu Taman dan Hias Objek Wisata Siring Laut, Pantai Gedambaan, Air Terjun Tumpang Dua, Ekowisata Meranti Putih, dan Bukit Mamake Bapake.
- Pengadaan Kursi Taman Wisata.
- Pengadaan Meubelair Cottage Objek Wisata Teluk Tamiang.

- Peningkatan akses jalan masuk menuju objek wisata tumpang dua.
- Peningkatan Kawasan Cottage VVIP di Objek Wisata Pantai Gedambaan.
- Perbaikan Jalan dan Jembatan Wisata Religi "Makam Ratu Intan Desa Balai Kec. Pamukan Utara.
- Perbaikan jalan masuk plat beton wisata kuliner siring laut.
- Perkerasan Jogging Track Wisata Goa Lowo RT. 16 Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir.
- Rehab Area Parkir luar di Objek Wisata Pantai Gedambaan.
- Rehab Giant Letter Siring Laut di Objek Wisata Siring Laut.
- Rehab Pedestrian dan Taman Cottage Reguler dan Cottage Family Pantai Gedambaan.
- Rehab Resto SJA 309 di Objek Wisata Siring Laut.
- Rehab Tugu Tulisan Siring Laut di Objek Wisata Siring Laut. Revitalisasi Kolam Di Objek Wisata Air Terjun Tumpang Dua.
- (BATAL) Pembangunan Vila di Wisata Desa Teluk Tamiang.
- (Belum Dilaksanakan) Lanjutan Peningkatan Jalan Wisata Mamake Bapake.

2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terealisasi 100%, diantaranya pembinaan dan Pelatihan masyarakat sekitar dalam pengelolaan Destinasi Wisata

c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini meliputi Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan pembinaan Usaha Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Kotabaru dengan realiasasi 100%.

13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mempromosikan dan mempublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik ataupun melalui media lainnya kepada masyarakat secara luas akan berbagai macam ragam potensi wisata, seni dan budaya berbasis kearifan lokal yang dimiliki daerah dalam kerangka promosi dan pemasaran daya tarik wisata, Sub Kegiatan meliputi:

1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, terealisasi 100%, meliputi:
   - Advertotial Surat Kabar harian
   - Baleho (Luar Daeerah) & Baleho (Dalam Daerah).
   - Souvenir, Brosur dan Leaflet & Endorse Wisata Lokal.
   - Pembuatan Gambar dan Video Promosi Pariwisata.
   - Pembuatan Majalah Pariwisata & Pengembangan Website.
   - Spanduk, Roll Up Banner dan Umbul-Umbul.



2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata melalui pameran promosi pariwisata baik di dalam Kota, Luar Kota (Dalam provinsi), Luar Kota (Luar Provinsi), terealisasi 100%, meliputi:
   - Pameran EXPO Saijaan HUT Kotabaru.

- Pameran Festival Pasar Terapung.
- Pameran Tunggal Pariwisata Kotabaru (Q-Mall Banjarbaru).
- Pameran Launching Calendar of Event Kalimantan Selatan



3) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, terealisasi 100%, meliputi :
   - Kerjasama Media Penyiaran Multiplatform.
   - Kerjasama Penyiaran dan Publikasi dengan Media Televisi Nasional.
   - Kerjasama Publikasi Pemberiataan Online.
   - Promosi Videotron.
   - Billboard Promosi Wisata Dalam dan Luar Provinsi.
   - Kerjasama Promosi dengan 11 Hotel di Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar.



14. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan meliputi :
        1) Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, meliputi pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Kreatifitas, dengan realisasi 100%
            - Pemeliharaan Sound System, Lighting dan Videotron.
            - Pengadaan Peralatan Penunjang Studio dan Panggung Akrab.
            - Pengadaan Peralatan kebersihan Studio dan Panggung Akrab.
    b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
        1) Fasilitasi PendaftaranKekayaan Intelektual, dengan realisasi 100%. Dimana kegiatan ini memfasilitasi pendaftaran HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Sub Sektor Aplikasi/Game, Desain Komunikasi Visual, Fashion, Film, Kriya, Kuliner, Musik, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa.

15. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
    a. Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub Kegiatan meliputi :
        1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, realisasi 100% dengan

pelaksanaan Fasilitasi Event dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi :

- Festival Budaya Saijaan 2025 dan Pesta Leut Bajau Samah.
- Festival Meranti Putih.
- Event Kreatif Putra Putri Pariwisata.
- Pesona Gebyar Ramadhan.
- Pesta Leut Maceratasi Kampung Nelayan.
- Pameran Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Provinsi.
- Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kotabaru.
- Pembuatan Video hasil Karya Seni dan Produksi Musik.
- Lomba Busana Kreasi Sasirangan motif khas Kotabaru.
- Pemilihan Putra Putri Parekraf Kabupaten Kotabaru.
- Penyelenggaraan acara pertunjukan DKD Kotabaru.
- Penyelenggaraan acara pertunjukan DPC PAPPRI Kotabaru.
- Pasar Wadai Berkah Ramadhan.
- Penyelenggaraan peringatan Hari Ekonomi Kreatif nasional.





2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, dengan realisasi 100% meliputi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kotabaru dan penyelenggaraan Podcast Ekraf.

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Sub Kegiatan meliputi :

1) Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan realisasi 100% meliputi :

- Bimbingan Teknis Desain Komunikasi Visual Sebagai Sarana Promosi Bagi Pelaku Ekraf.
- Bimbingan Teknis Kreasi Keragaman Kuliner Daerah Penunjang Pariwisata.
- Bimbingan Teknis Pelatihan Seni Tari Khas Kotabaru.
- Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Fotografi Digital.
- Bimbingan Teknis Produksi Souvenir Khas Kotabaru.
- Bimbingan Teknis Strategi Distribusi dan Pemasaran Ekraf.



16. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sehingga dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Kabupaten Kotabaru. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan penyaluran bantuan dari

Pemerintah Provinsi berupa benih padi sawah serta pemberian berbagai bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani.

Pada subsektor hortikultura, dukungan peningkatan produksi dilakukan melalui pemberian bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk, dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta bantuan alat dan mesin pertanian seperti cultivator untuk pengolahan lahan. Bantuan tersebut disalurkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru guna mendukung pengembangan komoditas hortikultura seperti aneka cabai, sayuran, durian, dan lengkeng. Selain itu, juga diberikan bantuan pengembangan tanaman hidroponik serta bantuan pemanfaatan lahan pekarangan dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting.

Dalam mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, juga disalurkan berbagai alat dan mesin pertanian seperti cultivator, hand traktor, hand sprayer, mesin pencacah, dan mesin perontok padi kepada kelompok tani di beberapa kecamatan. Selain itu, diberikan pula bantuan sarana produksi berupa herbisida untuk mendukung kegiatan pengendalian gulma di lahan pertanian.
Dari sisi pengawasan sarana produksi, dilaksanakan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi pada kios pupuk di beberapa kecamatan serta pelaksanaan rapat koordinasi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) guna memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pada kegiatan pascapanen, dilaksanakan upaya pengendalian inflasi dan dukungan terhadap pemasaran hasil pertanian hortikultura melalui pelaksanaan pasar murah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Sementara itu, pada subsektor perkebunan dilakukan penyaluran bantuan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani di beberapa kecamatan sebagai upaya mendukung peningkatan produksi dan pengembangan komoditas perkebunan daerah.

b. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini meliputi pengawasan terhadap penyediaan benih/bibit ternak serta peredaran bahan pakan dan pakan ternak pada pelaku usaha yang berada di Kecamatan Pulaulaut Utara, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, dan Kecamatan Pamukan Barat. Pengawasan dilakukan guna memastikan mutu, keamanan, dan kelayakan produk yang beredar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan petugas pengumpul data untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data populasi serta produksi ternak di Kabupaten Kotabaru, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas, juga dilakukan pengadaan pakan konsentrat yang diserahkan kepada kelompok tani di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan performa ternak, sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan peternak serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

c. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi dan populasi ternak melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 1.000 kali pelayanan yang tersebar di Kecamatan Pulaulaut Utara, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Selatan, Kelumpang Hilir, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pamukan Barat, dan Sampanahan.

Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan Pelayanan Ternak Terpadu SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini didukung dengan monitoring dan pembinaan manajemen pemeliharaan sapi, termasuk integrasi pemeliharaan sapi di kawasan perkebunan kelapa sawit, guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

Sebagai upaya peningkatan populasi ternak, juga dilakukan penyediaan dan penyaluran bibit ternak yang terdiri dari Kambing PE sebanyak 133 ekor, Sapi Bali jantan 10 ekor, Itik petelur 7.420 ekor, Ayam broiler 2.000 ekor, dan Ayam buras 1.060 ekor yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Di samping itu, dilaksanakan pengadaan dan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) di Kecamatan Pulaulaut Utara dan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan luasan masing-masing 1 hektare sebagai bentuk dukungan ketersediaan pakan yang berkelanjutan. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan produktivitas dan populasi ternak meningkat, pendapatan peternak bertambah, serta mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru secara berkelanjutan

17. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

    Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembangunan prasarana yang mendukung peningkatan prasarana pertanian sebagai berikut:

    a. Pengembangan Prasarana Pertanian

       Pengembangan prasarana pertanian dalam program ini difokuskan pada peningkatan tata kelola dan legalitas usaha perkebunan, khususnya pada komoditas kelapa sawit. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa sosialisasi dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun sawit. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan kepastian legalitas usaha, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar pekebun dalam memasarkan hasil produksinya. Selain itu, kepemilikan STDB juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam tahapan menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun.

Selain kegiatan tersebut, dilaksanakan pula pelatihan bagi pekebun dalam rangka persiapan mengikuti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pekebun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari aspek teknis budidaya, pengelolaan lingkungan, maupun administrasi usaha.

Selanjutnya, dilakukan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap bantuan bibit kelapa sawit yang dihibahkan kepada kelompok tani. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan kelapa sawit dapat meningkat, akses pasar semakin terbuka, serta pendapatan pekebun bertambah. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Pembangunan Prasarana Pertanian

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Penyediaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha tani serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kotabaru.

Pada Tahun 2025, infrastruktur pertanian yang dibangun dan direhabilitasi meliputi pembangunan Jalan Usaha Tani, pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, rehabilitasi irigasi pertanian, rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), rehabilitasi Pos Inseminasi Buatan (IB), serta pembangunan Puskeswan.

Pembangunan Jalan Usaha Tani dilaksanakan di Kecamatan Kelumpang Utara, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, dan Kecamatan Pulau Laut Barat. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mendukung kemudahan akses petani dalam melakukan kegiatan usaha tani, sehingga dapat memperlancar distribusi sarana produksi maupun hasil pertanian. Selain itu, juga dilaksanakan rehabilitasi irigasi pertanian di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan guna mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Pada subsektor perkebunan, pembangunan Jalan Produksi Perkebunan dilaksanakan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, dan Kecamatan Sampanahan. Pembangunan jalan produksi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung kegiatan produksi komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.

Selain itu, dilaksanakan rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, dan Kecamatan Pulau Laut Barat, serta rehabilitasi rumah dinas pada Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kelumpang Hilir. Rehabilitasi sarana tersebut dilakukan untuk menunjang pelayanan penyuluhan kepada petani dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan usaha tani yang berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

Pada subsektor peternakan, dilaksanakan pembangunan Puskeswan di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, serta rehabilitasi Puskeswan di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat. Selain itu, juga dilaksanakan rehabilitasi Pos Inseminasi Buatan (IB) di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara; Desa Pudi, Kecamatan Kelumpang Utara; serta Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kelumpang Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak kepada peternak di daerah.

Melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur pertanian tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha tani, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah di Kabupaten Kotabaru

c. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi Identifikasi dan penetapan lahan padang penggembalaan umum. Identifikasi melalui sosilaisasi dengan mengundang kelompok tani, peternak, Penyuluh Pertanian dan Aparatur Desa dilaksanakan di Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulau Sebuku dan Kelumpang Utara dengan total luasan 150 Ha.

18. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya pada subsektor peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) termasuk

penerapan biosekuriti, sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular dan zoonosis, serta monitoring dan pembinaan kepada peternak.

Selain itu, dilakukan kegiatan disinfeksi pada kandang dan lingkungan sekitarnya yang terindikasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di Desa Mulyoharjo Kecamatan Pamukan Utara, serta pelaksanaan vaksinasi LSD pada ternak sapi di empat desa yaitu Binturung, Balemea, Lintang Jaya dan Mulyoharjo. Kegiatan lainnya meliputi surveilans penyakit Brucellosis dan Flu Burung, serta pemeriksaan keamanan pangan asal hewan (daging sapi dan daging ayam) melalui pengambilan sampel untuk pengujian di Balai Veteriner Banjarbaru.

Selain itu juga dilaksanakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Jembrana pada ternak sapi sebagai upaya menjaga kesehatan ternak, meningkatkan produktivitas peternakan, serta menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat.

b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya pada subsektor peternakan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengawasan terhadap produk pangan asal hewan melalui pemantauan secara kasat mata (organoleptik) maupun melalui pengujian laboratorium.

Pengawasan dilaksanakan terutama di pasar-pasar serta pada saat momentum hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Adha, guna memastikan bahwa produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal serta bebas dari penyakit. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan, melindungi kesehatan

masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Balai Veteriner Banjarbaru, khususnya dalam pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk pangan asal hewan

19. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

    a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.

       Pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengadaan sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Kotabaru. Melalui kegiatan pengendalian yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman dapat ditekan sehingga kondisi pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Hal ini berdampak pada peningkatan hasil produksi pertanian serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya pada sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat

20. Program Penyuluhan Pertanian

    Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini berupa pelaksanaan penyuluhan pertanian sebagai salah satu upaya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah, khususnya pada sektor pertanian.

    Penyuluhan pertanian berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi petani untuk memperoleh informasi, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif dan efisien.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pertemuan teknis penyuluh pertanian serta koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian se-Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan di Kotabaru. Selain itu, juga dilakukan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan Latihan dan Konsultasi (Lakon) pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dilaksanakan di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Tanjung Selayar, dan Kecamatan Pulau Laut Barat.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyuluhan, juga dilakukan pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Kotabaru berupa sepeda motor operasional bagi penyuluh pertanian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan efektivitas penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada petani.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan kapasitas petani dan penyuluh pertanian dapat meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas usaha tani serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah

21. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
    a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
        1) Sub keg. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.104.500,- terealisasi sebesar Rp. 73.572.000,- atau 73,50% dan capaian kinerja 37,50%

digunakan untuk Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 3 Dokumen selama 12 bulan dikarenakan banyak gudang yang tidak memenuhi syarat untuk penerbitan TDG. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar GudangTahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	100.104.500,-	73.572.000,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	3 Dokumen
3	Hasil	Persentase Rekomendasi TDG yang diterbitkan	91%	75%

b. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.734.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.373.062,- atau 55,28% dan capaian kinerja 1.100% digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 88 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	94.734.000,-	52.373.062,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8 Dokumen	88 Dokumen
3	Hasil	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal	96,72%	97,78%

Dokumentasi:

Foto kegiatan Pengecekan Tanda Daftar Gudang di Desa Sungai Nipah Kecamatan Kelumpang Selatan Kotabaru Kalsel



22. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
        1) Sub keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.145.730.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.362.731.245,- atau 84,78% dan capaian kinerja 200% digunakan untuk Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	5.145.730.000,-	4.362.731.245,-
2	Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	8 Unit
3	Hasil	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2%	4,17%

        2) Sub keg. Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
        Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 189.938.000,- terealisasi sebesar Rp. 177.929.300,- atau 93,68% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan

yaitu Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 48 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	189.938.000,-	177.929.300,-
2	Keluaran	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48 Unit	48 Unit
3	Hasil	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2%	4,17%

b. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1) Sub keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 226.099.100,- terealisasi sebesar Rp. 185.083.400,- atau 81,86% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 50 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2025

No	**Narasi**	**Tolakukur**	**Kinerja**	
			Target	**Realisasi**
1	Masukan	Dana	226.099.100,-	185.083.400,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50 Dokumen	50 Dokumen
3	Hasil	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola	50%	50%

		Sarana Distribusi Perdagangan		

Dokumentasi:

Foto kegiatan Dalam rangka Peninjauan Lapangan Penentuan Titik Nol Rencana Rehab Pasar Desa Batu Tunau Kecamatan Pulaulaut Timur



23. Program Pengembangan Ekspor
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub keg. Pameran Dagang Lokal. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 170.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.863.370,- atau 68,74% dan capaian kinerja 500% digunakan untuk Pameran Dagang Lokal. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 10 pelaku usaha selama 1 kali pameran dagang lokal. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pameran Dagang Lokal Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	170.000.000,-	116.863.370,-
2	Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha
3	Hasil	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	100%	100%

Dokumentasi

Dalam Rangka Gebyar Wisata dan Produk Unggulan Daerah TA 2025



24. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1) Sub keg. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.172.850,- terealisasi sebesar Rp. 130.906.245,- atau 96,13% dan capaian kinerja 119% digunakan untuk Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 774 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	136.172.850,-	130.906.245,-
2	Keluaran	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650 Unit	774 Unit
3	Hasil	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	36%	36,07%

2) Sub keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.595.500,- terealisasi sebesar Rp. 61.779.700,- atau 90,06% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 30 Orang selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Tahun 2025

No	**Narasi**	**Tolakukur**	**Kinerja**	
			Target	**Realisasi**
1	Masukan	Dana	68.595.500,-	61.779.700,-
2	Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 Orang	30 Orang
3	Hasil	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	36%	36,07%

3) Sub keg. Penyidikan Metrologi Legal

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.141.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.414.500,- atau 88,73% dan capaian kinerja 102,67% digunakan untuk Penyidikan Metrologi Legal. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Unit Hasil Penyidikan

Metrologi Legal 308 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyidikan Metrologi Legal Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	95.141.000,-	84.414.500,-
2	Keluaran	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	300 Unit	308 unit
3	Hasil	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	36%	36,07%

Dokumentasi:

Pelaksanaan Tera Ulang Alat UTTP Pompa Ukur BBM di Pertashop Gunungsari Stagen Kec. Pulaulaut Utara dan SPBU 65.721.002 Cantung Kec. Kelumpang Hulu





Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Alat UTTP Pasar Tradisional di Limbur Raya Komplek Pasar Kemakmuran Kec. Pulaulaut Sigam dan Pasar Sengayam Kec. Pamukan Barat





Pelaksanaan kegiatan tera ulang alat UTTP Tangki Ukur Mobil kapasitas 16.000 liter milik PT. Putri Wirapuspita di Instalasi Pengujian Tangki Ukur Mobil Stagen





25. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
        1) Sub keg. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.643.500,- terealisasi sebesar Rp. 31.613.500,- atau 81,81% dan capaian kinerja 166,67% digunakan untuk Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi bazar dagang 20 UMKM selama 1 kali bazar dagang. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	38.643.500,-	31.613.500,-
2	Keluaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi bazar dagang	12 UMKM	20 UMKM
3	Hasil	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%

2) Sub keg. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.401.000,- atau 90,58% dan capaian kinerja 216,67% digunakan untuk Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah UMKM yang mengikuti FGD pemasaran produk melalui kemitraan dengan retail dan perhotelan 26 UMKM selama 1 kali. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	34.665.000,-	31.401.000,-
2	Keluaran	Jumlah UMKM yang mengikuti FGD pemasaran produk melalui kemitraan dengan retail dan perhotelan	12 UMKM	26 UMKM
3	Hasil	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%

Dokumentasi:

Koordinasi dan konsultasi rencana standarisasi kualitas produk makanan, minuman, obat-obatan dan kerajinan ke Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) di Banjarbaru



Monitoring Peserta Pelatihan dan Uji Kompetensi Juru Sembelih Halal di Yogjakarta



26. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
    a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
        1) Sub keg. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.302.000,- atau 53,13% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah dokumen potensi industri daerah 1 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	53.270.000,-	28.302.000,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen potensi industri	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Jumlah dokumen rencana pembangunan industry	1 Dokumen	1 Dokumen

        2) Sub keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.

        Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah

koordinasi pengembangan industri 0 selama 12 bulan dikarenakan Adanya perubahan titik kawasan industri, RPIK dan kewenangan yang telah diambil alih oleh provinsi dengan nilai investasi lebih dari 5 milyar keatas. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	21.400.000,-	0,-
2	Keluaran	Jumlah koordinasi pengembangan industri	2 Kali	0
3	Hasil	Jumlah dokumen rencana pembangunan industry	1 Dokumen	1 Dokumen

3) Sub keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.998.282,- atau 60,16% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengolahan produk industri yaitu 10 IKM selama 1 kali pelatihan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	300.845.000,-	180.998.282,-
2	Keluaran	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan pengolahan produk	10 IKM	10 IKM
3	Hasil	Persentase Kapasitas SDM	3,6%	3,54%

4) Sub keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.196.163.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.037.667.681,- atau 95,04% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah kelompok IKM yang diverifikasi 35 kelompok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.196.163.000,-	3.037.667.681,-
2	Keluaran	Jumlah kelompok IKM yang diverifikasi	35 Kelompok	35 Kelompok
3	Hasil	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan bantuan alat produksi	35 Kelompok	35 Kelompok

5) Sub keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.742.148.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.489.335.903,- atau 85,49% dan capaian kinerja 200% digunakan untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Kerajinan Tangan 60 IKM selama 2 kali pelatihan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.742.148.000,-	1.489.335.903,-
2	Keluaran	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Kerajinan Tangan	30 IKM	60 IKM
3	Hasil	Persentase Kapasitas SDM	3,6%	3,54%

6) Sub keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 27.721.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen selama 12 bulan dikarenakan Adanya perubahan titik kawasan industri dan kewenangan yang telah diambil alih oleh provinsi dengan nilai investasi lebih dari 5 milyar keatas. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	27.721.000,-	0,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0
3	Hasil	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	1 Dokumen

7) Sub keg. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.917.072.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.620.576.103,- atau 84,53% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Juru sembelih yang mendapat sertifikat penyembelihan halal 20 Orang selama 12 bulan, Jumlah tempat pemotongan hewan yang mendapat sertifikat halal 20 unit usaha selama 12 bulan, dan Jumlah Produk pelaku usaha yang mendapat sertifikat halal 110 Produk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.917.072.000,-	1.620.576.103,-
2	Keluaran	Jumlah Juru sembelih yang mendapat sertifikat penyembelihan halal	20 Orang	20 Orang
		Jumlah tempat pemotongan hewan yang mendapat sertifikat halal	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha
		Jumlah Produk pelaku usaha yang mendapat sertifikat halal	50 Produk	110 Produk
3	Hasil	Jumlah sertifikasi jaminan produk halal (JPH)	90 Unit Usaha	150 Unit Usaha

27. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.761.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.271.000,- atau 2,31% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah 0 Dokumen selama 12 bulan dikarenakan dalam proses perizinan IUI, IPUI, IKUI kewenangan telah dambil oleh provinsi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	57.761.000,-	1.271.000,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	1 Dokumen	0 Dokumen
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri	46%	23,84%

2) Sub keg. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.432.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.207.500,- atau 68,21% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA). Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian 1 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	16.432.000,-	11.207.500,-
2	Keluaran	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Industri	46%	23,84%

28. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
    a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
        1) Sub keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.745.500,- terealisasi sebesar Rp. 63.211.500,- atau 72,87% dan capaian kinerja

100% digunakan untuk Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	86.745.500,-	63.211.500,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan Data Industri Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Penyediaan Informasi Industri	24,5%	3,0%

2) Sub keg. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.539.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.531.000,- atau 99,48% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Melalui SIINas 1 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.539.000,-	1.531.000,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Persentase Fasilitasi Penyediaan Informasi Industri	24,5%	3,0%

3) Sub keg. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 925.000,- terealisasi sebesar Rp. 849.000,- atau 91,78% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	925.000,-	849.000,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Persentase Fasilitasi	24,5%	3,0%

		Penyediaan Informasi Industri		

Dokumentasi

Pengumpulan data industri, seperti Pelaku usaha industri terbaru pada daerah – daerah untuk menjangkau semua wilayah kabupaten kotabaru untuk pelengkapadan data industri seperti daerah kelumpang selatan dan pulau laut timur dan sebagai bahan evaluasi untuk platform SIINas



Sasaran 5: Menurunnya Pengangguran

Penanggulangan pengangguran merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan, menurunnya daya beli, serta berkurangnya produktivitas daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Menurunnya Pengangguran sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompetitif.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Penurunan TPT mencerminkan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, baik formal maupun informal. Melalui penguatan pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan investasi daerah, pengembangan sektor unggulan, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II.21
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,05	6,02	5,93	101,49%	5,25	87,04%

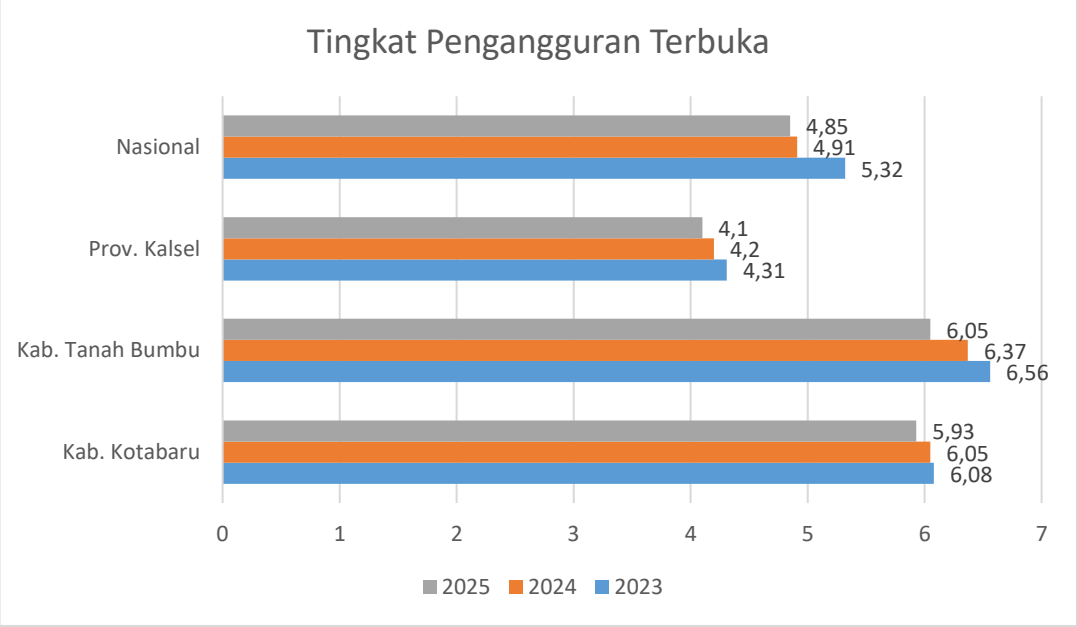
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 terealisasi sebesar 5,93%, apabila dibandingkan dengan target 6,02%, maka capaiannya sebesar 101,49% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi mencapai 5,93% angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,05%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 terealisasi sebesar 5,93% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 5,25% maka capaiannya sebesar 87,04%.

Grafik II.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten di seluruh wilayah pengamatan, mulai dari level Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, hingga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, Kabupaten Kotabaru mencatatkan angka pengangguran sebesar 5,93%, yang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024 (6,05%) dan 2023 (6,08%). Meskipun trennya menurun, angka pengangguran di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (4,1%) dan rata-rata Nasional (4,85%) pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja di tingkat kabupaten masih lebih besar dibandingkan skala provinsi maupun nasional.

Kabupaten Kotabaru berhasil menjaga tren positif dalam menekan angka pengangguran selama periode 2023–2025 dengan total penurunan sebesar 0,15 poin persentase. Pencapaian angka 5,93% di tahun 2025 mencerminkan adanya efektivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan atau pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja baru. Namun, pemerintah daerah perlu tetap waspada dan meningkatkan program penguatan kompetensi SDM, mengingat angka TPT Kotabaru masih cukup jauh melampaui angka TPT Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan upaya ekstra agar daya saing tenaga kerja lokal dapat setara atau bahkan lebih baik dari rata-rata provinsi.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai berikut:

1. Adanya pembukaan lahan baru atau peningkatan kapasitas produksi di sektor pertambangan dan perkebunan sawit yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
2. Pengembangan destinasi wisata unggulan di Kotabaru mulai menciptakan ekosistem ekonomi baru (seperti perhotelan, kuliner, dan jasa transportasi) yang menyerap angkatan kerja produktif.
3. Program bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri (wirausaha baru).

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, sebagai berikut:

1. Masih tingginya ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja dari luar daerah untuk posisi spesialis/teknis karena keterbatasan sertifikasi keahlian tenaga kerja lokal.
2. Masih rendahnya penguasaan teknologi digital dalam mencari kerja serta preferensi sebagian angkatan kerja muda yang hanya terpaku pada sektor formal (pegawai/karyawan).

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berupaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan meningkatkan relevansi lulusan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara aktif memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan (SMK dan Universitas lokal) dengan sektor industri. Langkah ini diwujudkan melalui fasilitasi program pemagangan (internship) yang terstruktur dan terukur dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah daerah. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan pola link and match, di mana kurikulum dan keahlian praktis yang diajarkan selaras dengan standar industri, sehingga program magang tersebut dapat berujung pada penyerapan tenaga kerja lokal secara langsung dan berkelanjutan.

Selain penguatan pada sektor industri konvensional, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan terobosan untuk menjawab tantangan era disrupsi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Hal ini dilakukan dengan membangun wadah kreatif berupa Co-working Space yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan inkubasi bisnis bagi pemuda Kotabaru. Melalui fasilitas ini, para pemuda dibekali dengan keterampilan ekonomi digital dan literasi teknologi tingkat lanjut, dengan target mengubah pola pikir dari sekadar pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator). Inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem wirausaha baru yang mandiri di bidang digital, sehingga dapat memperluas struktur lapangan kerja di daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi generasi muda.

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 5 (lima) yaitu Menurunnya Pengangguran:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

   Program ini merupakan kegiatan untuk menyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK Makro) yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan ditingkat daerah selama 5 tahun berjalan dan proyek 5 tahun kedepan secara menyeluruh. Dokumen ini mencakup analisis data ketenagakerjaan, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, serta strategi pengembangan tenaga kerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

   Tujuan utama penyusunan RTKD Makro antara lain:

   a. Mengidentifikasi kondisi ketenagakerjaan saat ini seperti tingkat pengangguran, lapangan pekerjaan yang tersedia, serta sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan.
   b. Merumuskan strategi pembangunan tenaga kerja yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
   c. Menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perkembangan industri, sehingga lulusan pendidikan dan pelatihan dapat diserap secara optimal oleh dunia kerja.
   d. Mengurangi kesenjangan tenaga kerja, baik dari segi kompetensi maupun kesempatan kerja, agar tercipta pemerataan pembangunan.

   Penyusunan RTKD Makro memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Beberapa manfaat utamanya meliputi:

   a. Panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan berbasis data dan bukti nyata.
   b. Mendorong pembangunan ekonomi lokal, karena sektor tenaga kerja yang kuat akan menciptakan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
   c. Memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, guna menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan.
   d. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing, melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi.

   Dengan adanya RTKD Makro, perencanaan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Dalam Upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pencari kerja local dilaksanakanlah kegiatan Pelatihan calon pencari kerja di BLK dengan melatih calon pencari kerja sebanyak 336 orang. Pelatihan yang diberikan di bidang Las sebanyak 64 orang, bidang Komputer sebanyak 32 orang, bidang Otomotif Roda 4 (empat) sebanyak 64 orang, Otomotif Roda 2 (dua) sebanyak 64 orang, Listrik sebanyak 32 oranga dan pembuatan roti dan kue sebanyak 32 orang. Diisamping pelatihan yang bersifat rutin dalam rangka mengikuti kebutuhan pasar kerja pada tahun 2025 juga diadakan pelatihan alat berat berupa Operator Exavator sebanyak 16 orang, Operator Buldozer sebanyak 16 orang dan Operator Du mp Truck sebanyak 16 orang

   Dokumentasi:
   Pelatihan Operator Alat Berat




   Pelatihan Barista



3. Program Penempatan Tenaga Kerja

   Dalam upaya melayani pencari kerja dengan pelaksanaan penerbitan Kartu Kuning/ Kartu Pencari Kerja tahun 2025 sebanyak 846 kartu. Dari Jumlah 1846 orang yang mendapatkan pelayanan kartu Kuning (AK1) sebanyak 686 orang atau sebesar 81,08 % telah mendapat pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pemagangan calon pencari kerja baik dana yang bersumberkan

APBD sebanyak 10 orang. Selain kegiatan pemagang juga dilaksanakan kegiatan softskill dengan kerjasama dengan dunia usaha.

Dokumentasi:

Kegiatan Pemagangan



4. Program Hubungan Industrial

Sebagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas dan hamonisasi hubungan industrial ketenaga kerja telah dilaksanakn beberapa kegiatan antara lain dengan dengan melaksanakan Koordinasi dan pembinaan ke beberapa Perusahaan yang ada di kabupaten kotabaru sebagai upaya agar tidak terjadinya perselisihan hubungan industrial yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Selain melaksakan pembinaan ke Perusahaan di kabupatenkotabaru, bidang hubungan industrial agar tercipta hubungan industrial yang harmonis

Peserta dialog hubunghan industril di hadiri beberapa Perusahaan seperti Sinar Mas Grup (Perusahaan Sawit), Eagle Grup (Perusa, Perusahaa, Perusahaan PT. Indocement Tunggal Perkasa (Perusahaan Semen).

Dokumentasi:

Dialog Hubungan Industrial dan Rapat UMK beserta UMSK





Sasaran 6: Meningkatnya Investasi Daerah

Peningkatan investasi daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Investasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan usaha, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah, yang menggambarkan peningkatan realisasi nilai investasi dari tahun ke tahun, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pertumbuhan investasi yang positif mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kabupaten Kotabaru. Melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen menciptakan lingkungan investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel II.22
Capaian Pertumbuhan Investasi Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Pertumbuhan Investasi Daerah	%	3,68	5,10	-29,43%	-577,06%%	5,75	-511,82%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Pertumbuhan Investasi Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar -29,43% apabila dibandingkan dengan target 5,10%, maka capaiannya sebesar -577,06% yang dikategorikan ***Sangat Rendah.***

Pada tahun 2025, Pertumbuhan Investasi Daerah realisasi mencapai -29,43% angka ini mengalami penurunan sebesar -25,75 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Pertumbuhan Investasi Daerah sebesar 3,68%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Pertumbuhan Investasi Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar -29,43% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 5,75% maka capaiannya sebesar -511,82%.

Penurunan persentase pertumbuhan pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh hilangnya minat investasi, melainkan karena anomali lonjakan realisasi pada tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi mencapai Rp 6.678.898.313.694,00 (tumbuh 134%), sehingga menciptakan standar basis yang sangat tinggi. Secara statistik, sangat sulit untuk terus tumbuh positif di atas angka yang sudah melonjak ekstrem.

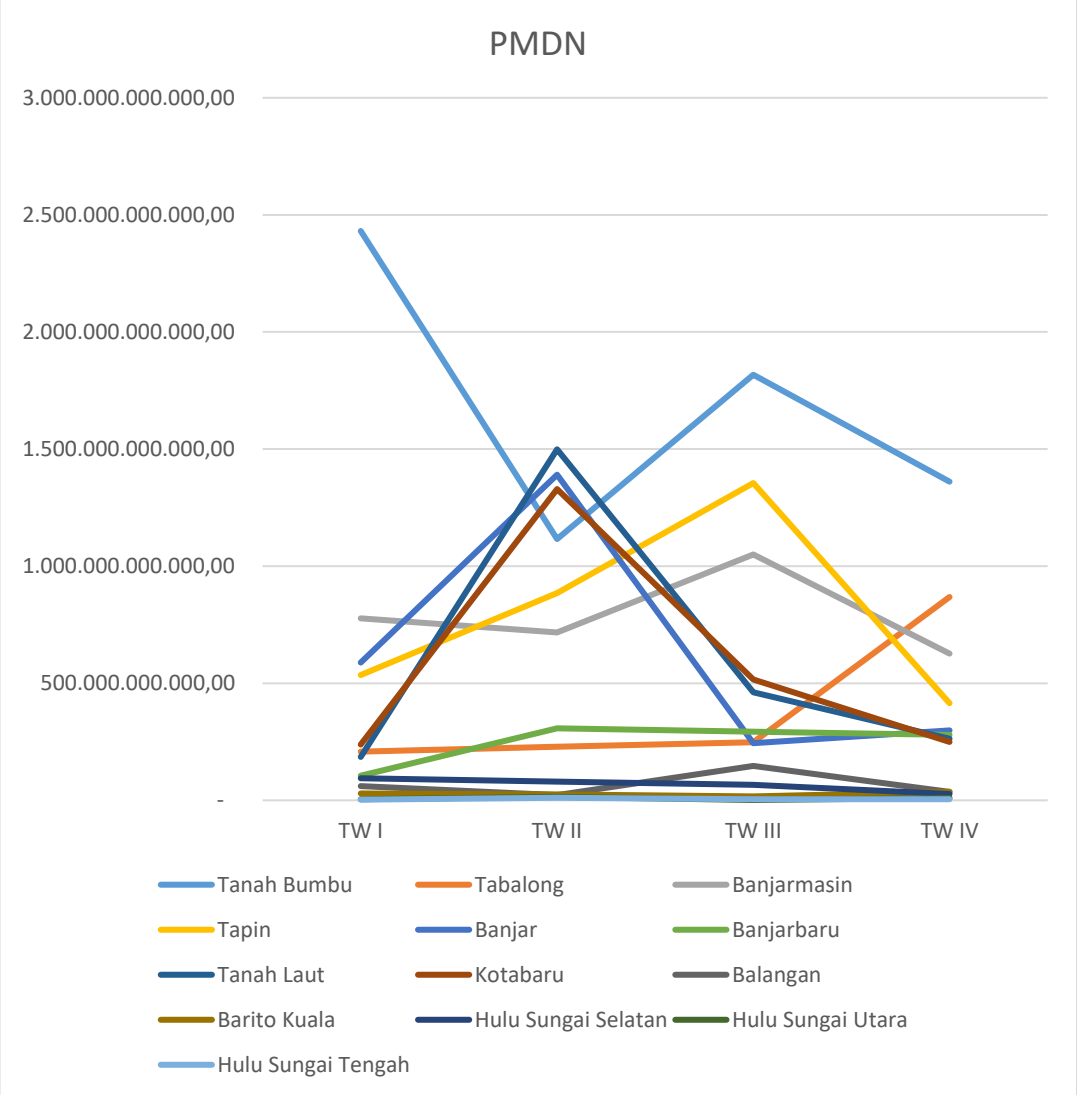
Karakteristik investasi di Kotabaru (yang didominasi sektor pertambangan/industri pengolahan) bersifat lumpy (bergumpal).

1. Tahun 2023-2024: Kemungkinan merupakan fase konstruksi masif (pembelian alat berat, pembangunan pabrik/smelter, infrastruktur) sehingga belanja modal (Capex) sangat besar.

2. Tahun 2025: Proyek-proyek tersebut sudah mulai beroperasi (fase operasional), sehingga nilai investasi barunya tidak sebesar saat fase konstruksi, meskipun aktivitas ekonominya tetap berjalan.

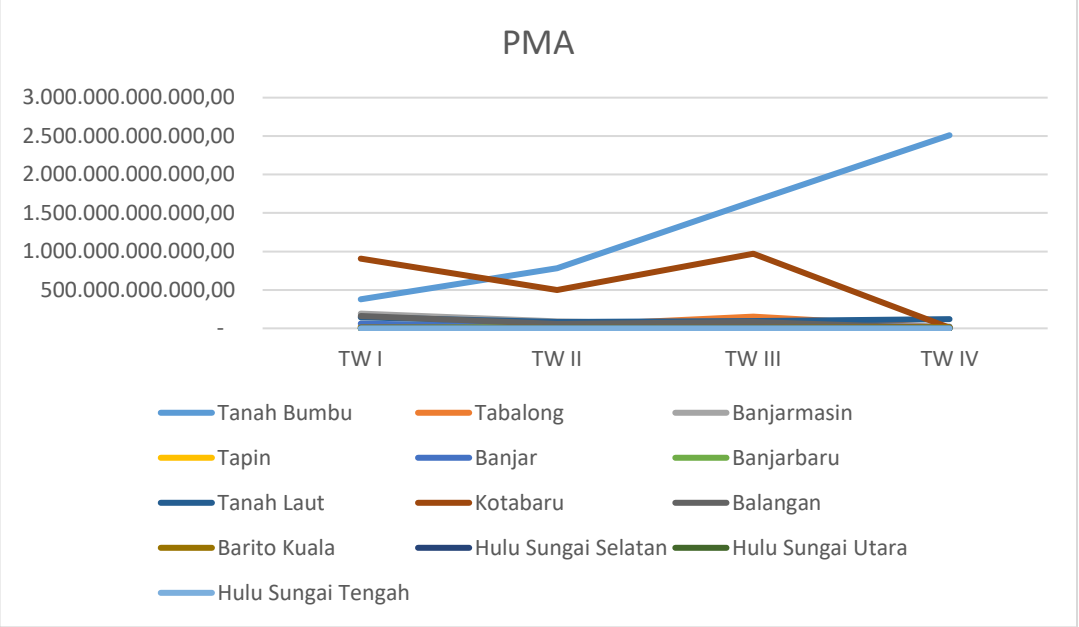
Meskipun pertumbuhan secara persentase bernilai negatif (-29,43%), namun secara Nominal Rupiah, realisasi tahun 2025 (Rp 4.713.191.760.425) sesungguhnya masih jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 (Rp 2.848.793.930.000). Ini menunjukkan bahwa tren investasi di Kabupaten Kotabaru dalam jangka menengah (3 tahun terakhir) sebenarnya masih dalam koridor peningkatan (tren positif), hanya mengalami koreksi teknis pada tahun 2025.

Grafik II.18
Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Selatan Tahun 2025



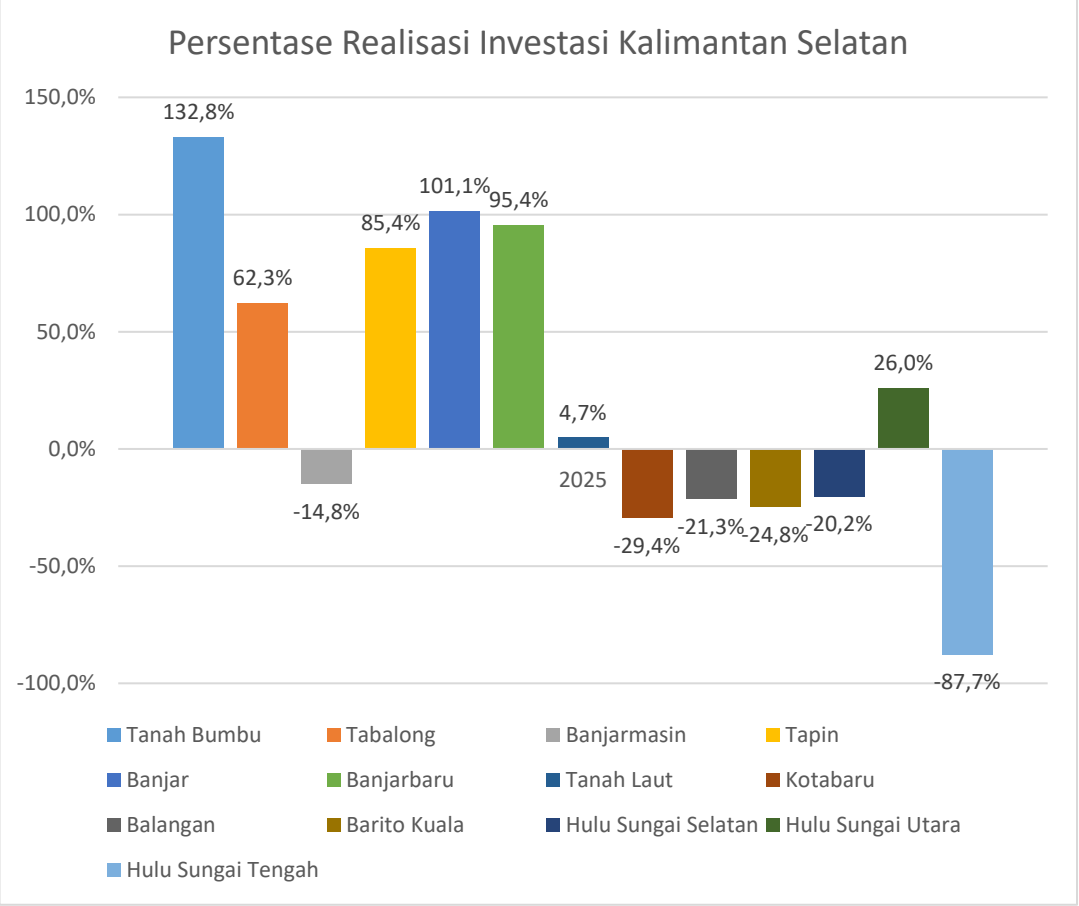
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Grafik II.19
Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Selatan Tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Grafik II.20
Capaian Investasi di Kalimantan Selatan Tahun 2025



Urut	Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi Tahun 2025
1	Tanah Bumbu	12.049.275.304.127,00
2	Kotabaru	4.713.191.760.410,00
3	Banjarmasin	3.515.311.327.961,00
4	Tapin	3.244.429.553.148,00
5	Tanah Laut	2.846.687.755.787,00
6	Banjar	2.650.482.892.803,00
7	Tabalong	1.773.332.233.284,00
8	Banjarbaru	1.029.950.673.137,00
9	Balangan	565.916.627.740,00
10	Hulu Sungai Selatan	266.462.200.873,00
11	Barito Kuala	149.046.745.812,00
12	Hulu Sungai Utara	30.392.916.688,00
13	Hulu Sungai Tengah	22.940.046.975,00

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data DPMPTSP, 2026.

Dalam konstelasi regional Provinsi Kalimantan Selatan, kinerja pertumbuhan investasi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 berada pada klaster daerah yang mengalami koreksi pertumbuhan (pertumbuhan negatif), bersama dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala.

Sebagaimana tervisualisasi dalam Grafik Persentase Realisasi Investasi, Kabupaten Kotabaru mencatatkan pertumbuhan sebesar -29,4%. Posisi ini menunjukkan disparitas yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, yakni Tanah Bumbu, yang mencatatkan pertumbuhan positif tertinggi sebesar 132,8%. Data ini mengisyaratkan adanya dinamika aliran modal yang berbeda secara spesifik di wilayah pesisir tenggara Kalimantan Selatan pada periode berjalan.

Berdasarkan jenis penanaman modal, profil realisasi investasi di Kabupaten Kotabaru menunjukkan fluktuasi yang dinamis sepanjang empat triwulan (TW I s.d TW IV):

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):

   Tren realisasi PMDN Kabupaten Kotabaru menunjukkan pola cyclical dengan eskalasi tertinggi terjadi pada Triwulan II. Setelah mencapai puncak realisasi pada pertengahan tahun, tren investasi domestik mengalami perlambatan (deceleration) pada Triwulan III dan cenderung stagnan hingga melandai pada penutupan tahun di Triwulan IV.
2. Penanaman Modal Asing (PMA):

   Sektor PMA menunjukkan karakteristik volatilitas yang berbeda. Kabupaten Kotabaru mengawali tahun anggaran (Triwulan I) dengan realisasi investasi asing yang cukup tinggi. Meskipun sempat mengalami penurunan pada Triwulan II, kinerja PMA kembali mengalami rebound (pemulihan) signifikan dan mencapai puncak tertinggi pada Triwulan III. Namun demikian, pada Triwulan IV, terjadi penurunan drastis pada realisasi PMA.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Pertumbuhan Investasi Daerah, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui insentif fiskal, kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien
2. Stabilitas yang tinggi terkait dengan keamanan di Kabupaten Kotabaru
3. Kabupaten Kotabaru memiliki sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertambangan dan perikanan
4. Layanan investasi sudah berbasis onlineInvestor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Pertumbuhan Investasi Daerah, sebagai berikut:

1. Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanan secara online masih mengalami kendala
2. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal

3. Pemberian kemudahan dan insentif yang diberikan belum menarik minat investor untuk menanamkan modal
4. Potensi unggulan daerah belum teridentifikasi dan terpetakan dengan baik
5. Pelayanan perizinan belum baik sesuai standar pelayanan
6. Peralatan yang digunakan untuk pelayanan perizinan kurang memadai dan SDM yang ada masih terbatas
7. Pertumbuhan Investasi Daerah disebabkan oleh capaian nilai investasi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 yang berarti pertumbuhan investasi daerah tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif melalui penguatan landasan strategis dan teknis. Langkah awal diwujudkan melalui penyusunan peta potensi investasi daerah yang komprehensif guna memberikan gambaran peluang usaha yang akurat bagi para investor, yang kemudian didukung dengan formulasi strategi promosi penanaman modal yang lebih agresif dan tepat sasaran. Upaya daya tarik investasi ini diperkuat secara legal melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Kebijakan ini tidak hanya bersifat regulatif, namun juga operasional melalui koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antarinstansi guna memastikan pemberian kemudahan tersebut berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sejalan dengan upaya promosi dan kebijakan insentif, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan transformasi mendasar pada aspek pelayanan publik melalui peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis sistem elektronik. Modernisasi sistem perizinan dan nonperizinan ini bertujuan untuk memangkas birokrasi, mempercepat waktu proses, dan meminimalisir hambatan administratif bagi investor. Untuk menjamin efektivitas sistem tersebut, pemerintah daerah secara konsisten melakukan penambahan dan penguatan kapasitas SDM yang mumpuni dalam memfasilitasi pelayanan perizinan. Melalui sinergi antara kesiapan data potensi, kejelasan regulasi insentif, serta keandalan sistem dan aparatur pelayanan, diharapkan Kabupaten Kotabaru dapat menjadi destinasi

investasi unggulan yang mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara berkelanjutan

Berikut program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 6 (enam) yaitu Meningkatnya Investasi Daerah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Ketercapaian sasaran meningkatnya iklim investasi yang kondusif pada program ini sangat didukung oleh keberhasilan dalam pemetaan potensi dan penyediaan insentif daerah. Faktor kunci keberhasilannya terletak pada penyusunan regulasi pemberian fasilitas atau insentif yang memberikan kepastian hukum bagi investor, serta fasilitasi kemitraan yang efektif antara usaha besar dengan UMKM. Selain itu, ketersediaan dokumen Peta Potensi Investasi yang termutakhirkan menjadi panduan krusial bagi investor dalam melihat peluang bisnis di Kotabaru, sehingga minat investasi dapat terkonversi menjadi realisasi konkret.

   Dari sisi anggaran, program ini menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat optimal. Berdasarkan data realisasi tahun 2025, program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.051.837.000,00 dengan realisasi keuangan mencapai Rp1.007.239.800,00 atau sebesar 95,76%. Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan strategis seperti Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal yang terealisasi 96,92% dan Fasilitasi Kemitraan Usaha yang terealisasi 87,72%. Efisiensi anggaran tetap terjaga meskipun target fisik dokumen perencanaan dan regulasi berhasil dicapai 100%.

   Dampak program ini berkontribusi langsung terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Iklim Investasi dan Nilai Realisasi Investasi. Dengan adanya insentif dan peta potensi yang jelas, daya saing investasi Kabupaten Kotabaru meningkat, yang terlihat dari capaian skor indeks iklim investasi yang melampaui target. Program ini menciptakan fondasi regulasi yang kuat, sehingga calon investor merasa aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya mendongkrak angka PMDN dan PMA secara signifikan.



Koordinasi Awal Implementasi Fasilitasi Kemitraan



Kegiatan pengumpulan data kemitraan

2. Program Promosi Penanaman Modal

Faktor utama yang mendukung ketercapaian sasaran pada program promosi adalah intensitas dan kualitas kegiatan pameran serta pertemuan bisnis (business matching) yang dilakukan. Keberhasilan program ini didorong oleh strategi promosi yang terarah melalui penyusunan dokumen strategi promosi yang komprehensif serta partisipasi aktif dalam event investasi skala nasional. Pendekatan proaktif dalam memperkenalkan potensi daerah kepada investor luar menjadi katalisator utama dalam menarik minat pemodal masuk ke Kotabaru. Secara finansial, program ini mencatatkan realisasi anggaran yang sangat tinggi, mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang maksimal. Dari total pagu anggaran sebesar Rp1.207.119.950,00, berhasil direalisasikan sebesar Rp1.164.685.216,00 atau mencapai 96,48%. Anggaran ini dialokasikan secara efektif untuk penyelenggaraan promosi (realisasi 96,48%) dan penyusunan strategi promosi (realisasi 98,52%), di mana seluruh target fisik berupa dokumen dan laporan kegiatan berhasil terpenuhi 100%. Program ini berdampak

langsung dan signifikan terhadap IKU Nilai Realisasi Investasi (PMDN & PMA). Kegiatan promosi yang masif secara langsung meningkatkan awareness dan minat investor, yang terbukti dari lonjakan realisasi investasi tahun 2025 yang mencapai Rp6,6 triliun atau 458% dari target. Tanpa promosi yang gencar dan didukung anggaran yang memadai, potensi daerah tidak akan diketahui oleh investor strategis, sehingga program ini menjadi ujung tombak pencapaian target nominal investasi.



Pengadaan buku profil investasi Kabupaten Kotabaru



Pameran Jakarta Advantage Expo 2025 Mall Artha Gading

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Ketercapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik pada program ini didukung oleh inovasi layanan "jemput bola" dan optimalisasi sistem digital. Faktor pendukung utamanya adalah pelaksanaan layanan berbantuan ke kecamatan melalui kegiatan "Sisir Perizinan" dan "Berlian Saijaan" yang mendekatkan akses kepada masyarakat, serta pendampingan teknis OSS RBA yang intensif. Kemudahan akses dan kecepatan layanan ini menjadi kunci tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Realisasi anggaran pada program pelayanan menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp743.384.650,00, program ini merealisasikan penyerapan

sebesar Rp700.046.978,00 atau 94,17%. Anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk penyediaan pelayanan perizinan berusaha (realisasi 99,63%) dan layanan konsultasi (realisasi 94,82%), di mana volume layanan kepada ribuan pelaku usaha berhasil terlayani sesuai target. Dampak dari program ini sangat krusial terhadap IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Optimalisasi anggaran untuk layanan digital dan lapangan terbukti mampu mendongkrak skor IPP hingga mencapai kategori "Sangat Tinggi" (A). Program ini memastikan bahwa proses perizinan berjalan cepat, transparan, dan akuntabel, yang merupakan indikator utama dalam penilaian kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Faktor pendukung keberhasilan program ini terletak pada efektivitas fungsi pengawasan dan fasilitasi penyelesaian masalah (debottlenecking). Kemampuan petugas dalam melakukan bimbingan teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan. Selain itu, respons cepat tim pengendalian dalam memfasilitasi hambatan yang dihadapi investor di lapangan memastikan realisasi investasi tidak mangkrak. Dari sisi penggunaan anggaran, program pengendalian mencatatkan kinerja yang solid. Pagu anggaran yang disediakan adalah Rp658.232.700,00 dengan realisasi sebesar Rp585.459.976,00 atau 88,94%. Dana ini secara signifikan dialokasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha yang menyerap 93,25% anggaran, serta kegiatan pengawasan lapangan yang menyerap 83,28%. Meskipun terdapat sisa anggaran, target fisik pengawasan dan penyelesaian masalah tetap tercapai 100%. Program ini memiliki dampak ganda terhadap IKU, yaitu pada Nilai Realisasi Investasi dan kepatuhan perizinan. Melalui bimbingan teknis LKPM yang didanai program ini, data investasi yang sebelumnya tidak tercatat menjadi terlaporkan, sehingga menyumbang angka signifikan pada total capaian investasi daerah. Selain itu, fungsi pengawasan memastikan bahwa investasi yang masuk berkualitas dan mematuhi regulasi yang berlaku.



Kegiatan dalam rangka menghadiri undangan ekspose laporan pendahuluan review RDTR mekar putih di ruang rapat program dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan



Kegiatan dalam rangka identifikasi kendala dalam implementasi kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

   Ketercapaian sasaran pada program ini sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi dan integrasi data. Faktor pendukung utamanya adalah pemeliharaan rutin perangkat keras dan lunak serta pengelolaan basis data yang terintegrasi, yang menjamin sistem perizinan dapat diakses secara real-time tanpa gangguan berarti. Ketersediaan data yang akurat juga menjadi pendukung vital bagi pengambilan keputusan strategis pimpinan. Realisasi anggaran untuk program pengelolaan data mencapai tingkat yang wajar. Dari pagu Rp289.266.800,00, terealisasi sebesar Rp253.855.108,00 atau 87,76%. Anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perizinan, di mana target 9 dokumen data berhasil diselesaikan 100%. Sisa anggaran lebih disebabkan oleh efisiensi dalam belanja komponen pendukung sistem. Dampak program ini mendukung IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari sisi aspek digitalisasi layanan. Keandalan sistem informasi yang didukung oleh program ini meminimalisir

keluhan masyarakat terkait gangguan teknis dan memastikan transparansi status perizinan, yang merupakan komponen penting dalam penilaian kepuasan masyarakat dan standar pelayanan publik berbasis elektronik

Sasaran 7: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan hasil pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini. Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan yang disertai dengan menurunnya rasio gini mencerminkan bahwa hasil pembangunan semakin merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Tabel II.23
Capaian Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Tingkat Kemiskinan	%	4,45	4,23	4,39	96,21%	3,50	74,57%

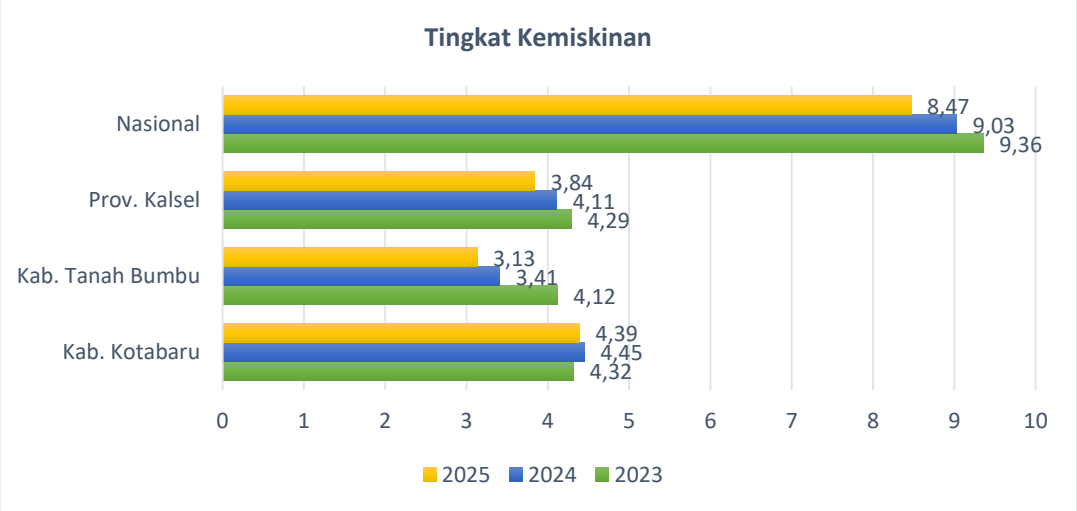
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Tingkat Kemiskinan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 4,39%, apabila dibandingkan dengan target 4,23%, maka capaiannya sebesar 96,21% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Tingkat Kemiskinan realisasi mencapai 4,39% angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Tingkat Kemiskinan sebesar 4,45%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Pertumbuhan Investasi Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar 4,39% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 3,50% maka capaiannya sebesar 74,57%.

Grafik II.21
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten secara Nasional, di Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Tanah Bumbu, namun Kabupaten Kotabaru menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda dengan adanya fluktuasi tipis. Secara Nasional, angka kemiskinan turun dari 9,36% pada 2023 menjadi 8,47% pada 2025, sementara Kalimantan Selatan berhasil menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 3,84% di tahun 2025. Menariknya, meskipun angka kemiskinan Kabupaten Kotabaru di tahun 2025 (4,39%) masih berada di bawah angka Nasional, angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan

posisi tahun 2023 yang berada di angka 4,32%, berbeda dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Tanah Bumbu yang berhasil melakukan penurunan tajam dari 4,12% menjadi 3,13% dalam periode yang sama.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru selama periode 2023–2025 relatif stabil di kisaran 4,3%, yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik karena angkanya jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional. Namun, adanya kenaikan tipis sebesar 0,07 poin persentase dari tahun 2023 ke 2025 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal agar tidak terjadi tren peningkatan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu mengidentifikasi faktor penyebab stagnasi ini, terutama jika dibandingkan dengan performa Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan yang mampu mencapai penurunan signifikan, guna memastikan capaian kinerja daerah tetap selaras dengan target penurunan kemiskinan makro.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Tingkat Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Sektor pertambangan dan perkebunan besar menyediakan lapangan kerja formal yang stabil bagi sebagian besar penduduk usia produktif.
2. Sebagai wilayah kepulauan, akses masyarakat terhadap pangan protein (ikan) relatif mudah dan murah, yang menjaga garis kemiskinan dari sisi pengeluaran makanan.
3. Efektivitas penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa) yang tepat waktu mampu menahan masyarakat di garis bawah agar tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Tingkat Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Warga miskin di pulau-pulau terpencil memiliki biaya transaksi yang besar untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga sisa pendapatan untuk tabungan menjadi nihil.
2. Kabupaten Kotabaru memiliki tantangan logistik yang membuat intervensi program kemiskinan menjadi lebih mahal dan lambat sampai ke sasaran

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru mengedepankan pendekatan yang presisi dan integratif dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui penguatan basis data dan intervensi fisik yang tepat sasaran. Langkah fundamental diawali dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala untuk menjamin validitas sasaran penerima manfaat. Melalui data yang akurat, pemerintah memastikan bahwa bantuan modal usaha dialokasikan secara selektif kepada keluarga miskin yang memiliki potensi produktif, sehingga bantuan yang diberikan tidak lagi bersifat konsumtif jangka pendek, melainkan menjadi stimulus kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga.

Guna mengatasi hambatan geografis yang sering menjadi akar kemiskinan di wilayah pesisir dan pedalaman, Pemerintah Kabupaten Kotabaru memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan di kantong-kantong kemiskinan. Pembangunan dermaga rakyat dan jalan lingkungan dilakukan secara intensif untuk memangkas biaya logistik rumah tangga dan mempermudah akses warga terhadap pusat pasar serta layanan publik. Selain intervensi melalui APBD, pemerintah daerah juga mengoptimalkan peran sektor swasta dengan memetakan perusahaan besar di sekitar wilayah terdampak. Melalui kebijakan yang terukur, perusahaan diwajibkan melakukan intervensi khusus pada desa-desa dengan angka kemiskinan tertinggi di wilayah operasionalnya, baik melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi sehat, maupun pemberian alat kerja. Sinergi antara akurasi data, penguatan konektivitas, dan kolaborasi dunia usaha ini diharapkan dapat mempercepat graduasi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru secara signifikan.

Tabel II.24
Capaian Rasio Gini

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Rasio Gini	Rasio	0,296	0,290	0,275	105,17%	0,250	90%

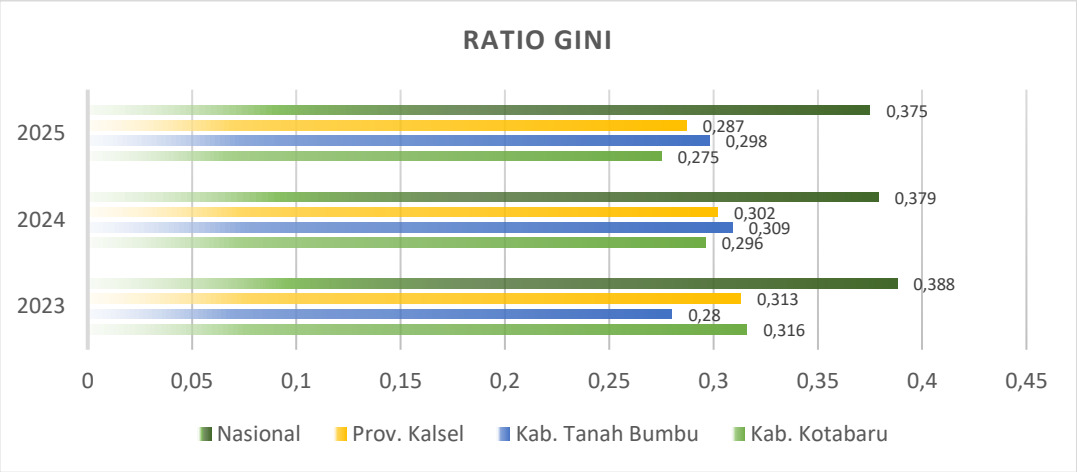
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Rasio Gini pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,275, apabila dibandingkan dengan target 0,290, maka capaiannya sebesar 105,17% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Tingkat Kemiskinan realisasi mencapai 0,275 angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,021 poin dibandingkan dengan tahun 2024 Capaian Rasio Gini sebesar 0,296.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap Capaian Rasio Gini tahun 2025 terealisasi sebesar 0,275 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,250 maka capaiannya sebesar 90%

Grafik II.22
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2023 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Data BPS Nasional, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan tren penurunan ketimpangan pengeluaran penduduk yang positif di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru selama periode 2023 hingga 2025. Secara umum, angka Gini Ratio Nasional merupakan yang tertinggi (berkisar antara 0,388 hingga 0,375), sementara wilayah lingkup daerah menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yang mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih baik di tingkat lokal dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan angka Gini Ratio yang konsisten di hampir seluruh wilayah ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerataan pendapatan dan akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, wilayah ini menunjukkan performa pemerataan ekonomi yang sangat impresif dan konsisten. Meskipun sempat berada di angka 0,316 pada tahun 2023 (lebih tinggi dari Kabupaten Tanah Bumbu saat itu), Kotabaru berhasil menekan angka ketimpangannya secara signifikan menjadi 0,296 pada tahun 2024, dan mencapai level terendah sebesar 0,275 pada tahun 2025. Dengan angka tersebut, Kabupaten Kotabaru tidak hanya berhasil melampaui capaian nasional dan provinsi, tetapi juga resmi menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah dibandingkan wilayah lainnya yang tertera dalam grafik pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di masyarakat Kotabaru semakin merata.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Rasio Gini, sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi daerah akan mendorong peningkatan ekonomi (pendapatan) di masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk
4. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatan PDRB per kapita
6. Adanya kebijakan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
7. Adanya kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha (ekonomi)Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Rasio Gini, sebagai berikut:

1. Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru
2. Dominannya sektor industri berbasis pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru

3. Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kotabaru semakin menurun
4. Adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan modalDiversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang menyerap banyak tenaga kerja seperti sektor industri, jasa, pariwisata, atau pertanian

Sebagai bentuk tindaklanjut, Kabupaten Kotabaru berupaya melakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama dalam mencapai produktivitas daerah yang kompetitif dan berkeadilan. Upaya ini diakselerasi melalui penguatan sektor pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualifikasi akademik masyarakat agar mampu mencapai jenjang pendidikan tinggi atau sarjana. Dengan meningkatnya standar pendidikan, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang signifikan, sehingga masyarakat Kotabaru memiliki daya saing yang lebih kuat dalam mengisi peluang kerja profesional maupun dalam menciptakan inovasi ekonomi secara mandiri.

Paralel dengan pengembangan kapasitas individu, pemerintah daerah juga memperkuat sistem jaring pengaman sosial melalui penyediaan jaminan sosial yang komprehensif bagi masyarakat miskin untuk melindungi mereka dari guncangan ekonomi. Langkah ini dibarengi dengan pelaksanaan kebijakan afirmasi yang sistematis guna memastikan masyarakat kelompok rentan mendapatkan akses yang setara di bidang pendidikan, layanan kesehatan, hingga permodalan usaha. Selain itu, dimensi keadilan gender menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan, di mana pemerintah mendorong kesetaraan gender untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita. Melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Kotabaru berupaya menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan daerah.

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat:

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

   Melakukan fasilitasi pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pada kegiatan ini pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dilaksanakan dalam bidang, permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan social dan lingkungan hidup. Meliputi 2 kecamatan Hampang dan Kecamatan Sengayam.

b. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang. Pada kegiatan ini mensosialisasikan tentang penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang

c. Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota

   1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial Daerah Provinsi dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

      Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di ditempatkan di 22 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

      Adapun Program Kegiatan adalah:

- Adanya Lomba Pilar – pilar Sosial yang berprestasi yang setiap tahun di adakan seleksi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Verifikasi dan Validasi Data PPKS.
- Pendataan untuk mengidentifikasi penerima manfaat program-program kesejahteraasn sosial. Hal ini guna memastikan bahwa bantuan sosial dan dukungan tepat sasaran.
- Mengkoordinasikan berbagai program kesejahteraan sosial yang tersedia di kecamatan masing-masing

2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Dasar Peraturan Menteri Sosial RI No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip yaitu, Berjiwa Sosial, Kemandirian, Kebersamaan, Partisipasi, Lokal dan otonom; dan Nonpartisan.

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permensos Nomor 25 Tahun 2019, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha, atau Masyarakat.

Program kegiatan Karang Taruna sebagai berikut :

- Kegiatan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna (KKBWKT) tingkat Kabupaten. Kegiatan ini akan mengundang seluruh pengurus Karang Taruna Desa di setiap Kecamatan seluruh Kabupaten. Kegiatan dilaksanakan diruang terbuka (Out Door) dengan tema Wisata.
- Kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Karang Taruna. Untuk menambah wawasan terhadap anggota Karang Taruna maka perlu adanya semacam sosialisasi secara tatap muka langsung kepada anggota Karang Taruna dengan adanya kegiatan ini akan membantu dan mempermudah dalam mengali pengetahuan terhadap ke Karang Tarunaan.
- Kegiatan lomba pilar – pilar sosial tingkat Kabupaten dan Provinsi. Karang Taruna adalah salah satu pilar – pilar sosial yang terakomudir di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dari itu Karang Taruna juga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Lomba pilar – pilar sosial tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- Kegiatan Kemah Karya Bakti Wisata Karang Taruna (KKBWKT) se Provinsi Kalimantan Selatan. Sama halnya dengan tingkat Kabupaten namun kegiatan ini berskala besar karena mengundang seluruh Karang Taruna di Desa maupun Pengurus Kabupaten se Kalimantan Selatan.

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan latihan mengenai masalah yang ditangani LK3 antara lain: masalah sosial psikologis, kekeraan dalam rumah tangga, anak terlantar dan masalah sosial lainnya. Kesemua permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam penyelesaian masalahnya

Dokumentasi kegiatan:

- Sosialisasi Puskesos kecamatan Hampang Dinas Sosial



- Sosialisasi Puskesos kecamatan Pamukan Barat Dinas Sosial



- Silaturahmi Karang Taruna ke BPKAD terkait rencana pengolaan pinjam pakai bangunan



2. Program Rehabilitasi Sosial
   a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
      1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan kepanitiaan diklat pendampingan keluarga dalam perawatan lansia. Kegiatan ini sasarannya adalah para keluarga lansia yang kesehariannya bersama sama lansia tersebut, sehingga merekalah yang punya.

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan kepanitiaan diklat pendampingan keluarga dalam perawatan lansia. Kegiatan ini sasarannya adalah para keluarga disabilitas yang kesehariannya bersama sama para disabilitas tersebut, sehingga merekalah yang punya andil kuat dalam perawatan para disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di gedung atau tempat yang ditemtukan dengan kepanitian dan kepesertaan dari beberapa kecamatan yang ditunjuk



2) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dasar

Hal ini diwujudkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dengan memberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja anak terlantar, melakukan pembinaan dan pendidikan. Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “MULIA SATRIA” di Banjarbaru adalah panti khusus untuk pelatihan dengan target utama remaja putus sekolah dari keluarga tidak mampu. Pembukaan disebarkan keseluruh Kecamatan Kabupaten Kotabaru dengan kuota maksimal sebanyak 8 orang yang diterima peserta pendaftaran pertama-tama melengkapi persyaratan yaitu mengisi Formulir Peserta, Kartu Keluarga, Foto Ukuran 3x4, Surat Keterangan Kesehatan dan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Desa. Jenis pelatihan yang diadakan dengan jurusan Tata Busana (Menjahit), Komputer, Tata Rias (Salon), Potong Rambut Pria (Babershop), Otomotif, Bengkel Sepeda Motor, Elektro/Service HP, Meubel Aluminium, Barista (Meracik minuman kopi dan lain-lain secara professional).

Semua jurusan dapat diikuti semua calon klien baik laki-laki maupun wanita. Kemudian diadakan seleksi peserta calon panti satu persatu melalui tes wawancara dengan berbagai pertanyaan salah satunya tentang jurusan apa yang akan diambil pada pelatihan di panti tersebut. Beberapa minggu kemudian akan diumumkan peserta yang lulus seleksi panti dengan dikirimkan surat hasil seleksi dari Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “MULIA SATRIA” dengan daftar nama terlampir, peserta yang lulus kemudian dipanggil untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk pengantaran ke Panti. Setelah ditentukan tanggal keberangkatan, peserta diantar ke Panti dengan didampingi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Setelah sampai di Panti, peserta didampingi untuk registrasi serta kamar yang akan ditempati selama pelatihan. Pelatihan diadakan selama 6 (enam) bulan dengan monitoring sebanyak 1 (satu) kali kemudian terakhir dilakukan penjemputan setelah kegiatan pelatihan berakhir. Pelatihan keterampilan ini diadakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, Peserta dari Kabupaten Kotabaru sebanyak 13 (tiga belas) orang pada tahun 2021, Pada tahun 2022 Peserta terdiri dari 16 (enam belas) orang, Pada tahun 2023 Peserta terdiri dari 20 (dua puluh) Orang, pada tahun 2024 peserta terdiri dari 18 (delapan belas) orang yang peserta terdiri dari beberapa perwakilan Kecamatan, pada tahun 2025 terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang





3) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Sasaran dari kegiatan ini adalah anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan lansia terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya serta penyandang disabilitas (cacat) dalam bentuk bantuan sosial, Bantuan Sosial ini berdasarkan atas usulan – usulan dari desa maupun kecamatan yang telah diverifikasi oleh dinas sosial , setelah nya akan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk penetapan nama nama penerima bantuan sosial tersebut, dalam hal penyaluran masing masing penerima harus memiliki rekening untuk menyerap bantuan sosial dari pemerintah daerah. Dalam Proses pencairan Dinas Sosial bekerja sama dengan bank kalsel dengan membuka rekening khusus bagi penerima tanpa biaya admin dan tanpa saldo minimum yang ditinggalkan. Dengan bantuan ini diharapkan penerima bansos dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.







4) Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian layanan kedaruratan diperuntukkan bagi orang terlantar, eks napi maupun pengemis dan orang hasil razia satpol

PP. Layanan ini sebagai sarana transportasi bagi mereka untuk kembali ketempat asalnya untuk berkumpul kepada keluarga







5) Pemberian Layanan Rujukan

Layanan rujukan ini ditujukan untuk penyandang disabilitas mental yang memiliki keluarga tidak mampu, layanan rujukan tersebut berupa pendampingan penyandang disabilitas mental untuk berobat ke rumah sakit rujukan. Disamping melakukan pendampingan juga memfasilitasi transportasi bagi pasien dan keluarga. melaksanakan/ mengantarkan pasien gangguan jiwa ke RS Sambanglihum BJB Tahun 2017 sebanyak 12 orang terdiri 8 Orang Laki-laki dan 4 orang perempuan. Tahun 2018 sebanyak 13 Orang terdiri dari 9 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan. Tahun 2019 sebanyak 7 Orang terdiri dari 3 Orang Laki-laki dan 4 Orang Perempuan. Tahun 2020 sebanyak 11 Orang terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 3 Orang Perempuan. Tahun 2021 sebanyak 15 Orang terdiri dari 9 Orang Laki-laki dan 6 Orang

Perempuan dan Tahun 2022 sebanyak 17 Orang terdiri dari 14 Orang Laki-laki dan 3 Orang Perempuan. Tahun 2023 sebanyak 9 terdiri 7 Orang laki-laki, dan 2 Orang Perempuan. Tahun 2024 sebanyak 8 terdiri dari 8 orang laki-laki. Tahun 2025 sebanyak 4 Orang laki-laki. Proses dari usulan Kepala Desa/Lurah kepada Dinas Sosial Kab. Kotabaru selanjutnya peninjauan kerumah ODGJ oleh staf Rehabilitasi sosial yang selanjutnya apabila dinyatakan siap pengantaran kesambang lihum dapat melengkapi berkasnya dengan menyertakan KTP, Kartu Keluarga, KTP Pendamping, BPJS Kesehatan, rujukan dari puskesmas setempat/Rumah Sakit ke RSJ Sambang Lihum







b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

   Pelayanan pada rumah singgah untuk semua ppks selama 3 hari atau lebih sebelum diproses sesuai permasalahan PPKS seperti orang terlantar, Orang Hasil razia satpol PP, Odgj terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum, Exs Napi, korban bencana dan PPKS lainnya. Mereka selain mendapatkan konsumsi juga diinapkan di rumah singgah.

2) Pemberian Akses ke Layanan Dasar

   Dengan melaksanakan pemberian layanan data dan pengaduan, melaksanakan pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar. Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) “BARAKAT CANGKAL BACARI” di Banjarbaru adalah panti khusus untuk pelatihan dengan target utama wanita rawan sosial dan Tuna Sosial. Pembukaan disebarkan keseluruh Kecamatan Kabupaten Kotabaru dengan kuota maksimal sebanyak 7 orang, peserta pendaftaran pertama-tama melengkapi persyaratan yaitu mengisi Formulir Peserta, Kartu Keluarga, Foto Ukuran 3x4, Surat Keterangan Kesehatan Jenis pelatihan yang diadakan dengan jurusan Tata Boga, Tata Rias, dan Tata Busana (Menjahit) khusus calon klien wanta dan jurusan bengkel sepeda motor khusus untuk calon klien laki-laki. Kemudian diadakan seleksi peserta calon panti satu persatu melalui tes wawancara dengan berbagai pertanyaan salah satunya tentang jurusan apa yang akan diambil pada pelatihan di panti tersebut.

   Beberapa minggu kemudian akan diumumkan peserta yang lulus seleksi panti dengan dikirimkan surat dari Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) “BARAKAT CANGKAL BACARI” dengan daftar nama terlampir, peserta yang lulus kemudian dipanggil untuk melengkapi persyaratan untuk pengantaran ke Panti. Setelah ditentukan tanggal keberangkatan peserta diantar ke Panti dengan didampingi oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Setelah sampai di Panti, peserta didampingi untuk Registrasi nama serta kamar yang akan

ditempati selama pelatihan. Pelatihan diadakan selama 6 (enam) bulan dengan monitoring sebanyak 1 (satu) kali kemudian terakhir dilakukan penjemputan Siswi. Pelatihan keterampilan ini diadakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, Peserta dari Kabupaten Kotabaru sebanyak 7 (tujuh) orang pada tahun 2021 dan Pada tahun 2022 Peserta terdiri dari 14 (empat belas) orang dan Pada tahun 2023 Peserta terdiri dari 9 (Sembilan) orang dan Pada tahun 2024 Peserta terdiri dari 0 (nol) orang

3) Pemberian Layanan Rujukan

Pemberian layanan rujukan untuk lansia terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak ada lagi keluarga yang peduli kepadanya sehingga menyebabkan keterlantaran, lansia tersebut akan difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk rujukan ke panti sosial yang dapat menampungnya.







3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan social. Ciri – ciri anak terlantar antara lain:

1) Anak berusia 5 – 18 Tahun
2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
3) Salah satu dari orang tuanya atau keduanya sakit.
4) Salah seorang atau keduanya meninggal
5) Keluarga tidak harmonis
6) Tidak ada pengasuh / pengampu sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik jasmani, rohani dan sosial

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk melakukan pendataan, pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan pengolahan data fakir miskin di wilayah kabupaten/kota. Sub kegiatan ini bertujuan menyediakan data fakir miskin yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial.

Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk mengumpulkan dan mencatat data fakir miskin di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan pendataan langsung di lapangan. Sub kegiatan ini bertujuan mengetahui kondisi dan jumlah fakir miskin sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, memberikan fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga, memberikan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Verifikasi dan validasi data usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilakukan

diseluruh kecamatan yang berpusat di desa masing-masing melalui Pusat Terpadu Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) ataupun bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM langsung dengan melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial yang berbasis android dengan mengunggah Kartu Tanda Penduduk yang niknya sudah dilakukan pemadanan data di dukcapil, Kartu Keluarga yang nomornya sudah dilakukan pembeharuan di dukcapil, Foto rumah tampak depan dan tampak dalam. Setelah dilakukan validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel berdasarkan kecamatan masing-masing. Untuk memvalidasi kelengkapan yang harus di validasi berupa Berita Acara Musdes/Muskel, Dokumentasi Pelaksanaan Musdes/Muskel, Foto Publikasi Hasil Musdes/Muskel yang bisa ditampilkan melalui sosial media atau pengumuman desa masing-masing, Daftar Hadir pelaksanaan Musdes/Muskel. Kemudian dilakukan finalisasi berdasarkan hasil validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel. Kemudian sebelum dapat mengupload surat pengesahan dan lampiran pengesahan yang ditanda tangani oleh Bupati Kotabaru harus mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial. Untuk Finalisasi usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu sendiri dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember

Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk membantu proses penyaluran dan pelaksanaan bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin atau keluarga tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku. Sub kegiatan ini bertujuan memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu.

1) Adapun Program Keluarga Harapan yang disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Bantuan Sosial Bersyarat, PKH

membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil, anak 0 tahun sampai 5 tahun, anak sekolah dari SD, SMP, SMA, Disabilitas, Lansia untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (Fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dikabupaten Kotabaru Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada 4 tahap penyaluran pada tahun 2025, penyaluran bantuan secara non tunai melalui. HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) serta melalui PT. Pos Indonesia.

2) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga fakir miskin atau kurang mampu untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi rumah yang tidak layak huni agar menjadi lebih layak dan sehat. Bantuan ini berupa biaya perbaikan rumah seperti atap, lantai dan dinding.
3) Program Sekolah Rakyat adalah program pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat kurang mampu atau rentan sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan hidup agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Program ini biasanya dilaksanakan bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait, serta menyasar anak putus sekolah, keluarga miskin, dan kelompok rentan agar tetap mendapatkan akses pendidikan dasar. Program Sekolah Rakyat sering dikaitkan dengan kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menekankan peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk membantu keluarga fakir miskin atau masyarakat kurang mampu memperoleh bantuan yang mendukung peningkatan usaha atau kegiatan ekonomi produktif. Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Salah satu bentuk bantuan dalam sub kegiatan ini adalah bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin atau kelompok masyarakat berupa modal usaha atau sarana usaha produktif untuk mengembangkan kegiatan ekonomi

b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota, memberikan fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga, memberikan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Verifikasi dan validasi data usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilakukan diseluruh kecamatan yang berpusat di desa masing-masing melalui Pusat Terpadu Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) ataupun bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM langsung dengan melalui aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial yang berbasis android dengan mengunggah Kartu Tanda Penduduk yang niknya sudah dilakukan pemadanan data di dukcapil, Kartu Keluarga yang nomornya sudah dilakukan pembeharuan di dukcapil, Foto rumah tampak depan dan tampak dalam. Setelah dilakukan validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel berdasarkan kecamatan masing-masing. Untuk memvalidasi kelengkapan yang harus di validasi berupa Berita Acara Musdes/Muskel, Dokumentasi Pelaksanaan Musdes/Muskel, Foto Publikasi Hasil Musdes/Muskel yang bisa ditampilkan melalui sosial media atau pengumuman desa masing-masing, Daftar Hadir pelaksanaan Musdes/Muskel. Kemudian dilakukan finalisasi berdasarkan hasil validasi pada menu Riyawat Musdes/Muskel. Kemudian sebelum dapat mengupload surat pengesahan dan lampiran pengesahan yang ditanda tangani oleh Bupati Kotabaru harus mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial. Untuk Finalisasi usulan non bansos, bansos, verifikasi usulan cek bansos, usulan PBI serta usulan penghapusan

maupun perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu sendiri dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember.

Melaksanakan Sosialisasi Penguatan SDM Puskesos Desa sebanyak 7 kali dalam setahun di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Selatan.

c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Bantuan Sosial Bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil, anak 0 tahun sampai 5 tahun, anak sekolah dari SD, SMP, SMA, Disabilitas, Lansia untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan Pendidikan (Fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dikabupaten Kotabaru Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada 4 tahap penyaluran pada tahun 2025, penyaluran bantuan secara non tunai melalui. HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dengan kartu keluarga sejahtera (KKS) serta melalui PT. Pos Indonesia.

Tugas Pendamping PKH

1) Menyusun Rencana kerja PKH di wilayah dampingannya.
2) Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
3) Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis.
4) Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data, pertemuan bulanan P2K2 dan KPM mendiri.
5) Memastikan KPM memperoleh bantuan program komplementer seperti BPNT, KIS, KIP, bantuan sosial atau subsidi lainnya.

6) Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH.
7) Menyusun laporan pelaksanaan P2K2 kepada koordinator kabupaten atau kota dan dinas sosial kabupaten atau kota secara berkala.
8) Menyusun laporan pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten atau kota secara berkala.
9) Memastikan Bantuan PKH sampai ke tangan KPM PKH.

Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2025 (Rp)/Tahun adalah sebagai berikut :

1) Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp. 3.000.000,-
2) Kategori Anak Usia Dini 0 s.d 5 Tahun : Rp. 3.000.000,-
3) Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp. 900.000,-
4) Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp. 1.500.000,-
5) Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp. 2.000.000,-
6) Kategori Penyandang Disabilitas Berat : Rp. 2.400.000,-
7) Kategori Lanjut Usia : Rp. 2.400.000,-

d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

KUBE adalah Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari berbagai macam usaha, dengan anggota sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota-anggota. Bantuan untuk KUBE berupa barang-barang yang diperlukan untuk menunjang usaha mereka, usulan pertama dari masing-masing Kabupaten Kota dengan mengajukan proposal beserta nama usaha yang dilengkapi dengan RAB usaha. Proposal diajukan oleh pendamping lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten kemudian diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian dari Dinas Sosial Provinsi akan melakukan verifikasi calon Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama dengan didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping Dinas dan 1 (satu) orang pendamping lapangan. Setelah diverifikasi , dalam waktu 3-4 bulan akan dilakukan Bimbingan Teknis untuk kelompok didampingi oleh Pendamping Dinas Sosial yang diadakan di Dinas Sosial Provinsi selama 3 (tiga) hari. Setelah pelatihan

selesai, bantuan akan dikirimkan melalui pemborong. Setelah bantuan diterima kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi bantuan dari Dinas Sosial Provinsi dan didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Pendamping lapangan. Besar harapan semua bantuan yang diberikan agar dapat berkembang dan menjadikan usaha, Kelompok Usaha Bersama Tahun 2018 untuk wilayah perkotaan sebanyak 3 (tiga) kelompok, Pesisir sebanyak 5 (lima) kelompok, Pedesaan sebanyak 4 (empat) kelompok. Total bantuan di Tahun 2018 adalah 12 (Dua Belas) Kelompok. Tahun 2019 KUBE wilayah Pedesaan sebanyak 4 (Empat) Kelompok, Wilayah Perkotaan sebanyak 2 (dua) Kelompok, dan Pesisir sebanyak 5 (lima) Kelompok dengan Total bantuan 11 (Sebelas) kelompok. Tahun 2020 untuk bantuan KUBE ditiadakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran untuk covid-19. Tahun 2021 bantuan KUBE sebanyak 1 (satu) kelompok. Tahun 2022-2025 bantuan KUBE tidak ada. Tahun 2021 bantuan UEP sebanyak 105 Orang. Tahun 2022 bantuan UEP sebanyak 54 Orang dan Tahun 2023 bantuan UEP sebanyak 149 Orang. Tahun 2024 bantuan UEP sebanyak 221 orang dan Tahun 2025 bantuan UEP sebanyak 137 orang

Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan:















4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

   Pelaksanaan program ini adalah berupa penyediaan infrastruktur untuk menunjang kemandirian pangan di Daerah yaitu melalui Pembangunan

Lumbung Pangan di Desa Pembelacanan Kec. Kelumpang Selatan, Rehabilitasi Lumbung Pangan di Desa Teluk Kemuning Kec. Pulaulaut Kepulauan, Rehabilitasi Lumbung Pangan di Desa Karangsari Indah Kec. Pulaulaut Timur

Dengan adanya pembangunan lumbung pangan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan masyarakat, menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi pangan sepanjang tahun, serta mengurangi risiko kerawanan pangan pada saat terjadi paceklik atau gangguan pasokan. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan lumbung pangan sebagai infrastruktur penunjang kemandirian pangan, juga dilaksanakan pengadaan dryer (alat pengering) guna menunjang penanganan pascapanen. Penyediaan alat pengering ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kadar air hasil panen agar sesuai dengan standar penyimpanan, sehingga komoditas dapat disimpan lebih lama di dalam lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat.

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan kehilangan hasil (losses) akibat kerusakan dapat diminimalkan, mutu produksi tetap terjaga, serta mendukung stabilitas ketersediaan pangan dan peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian.

Pelaksanaan pengadaan meliputi vertical dryer di Desa Salino Kecamatan Pulaulaut Tengah dan Desa Bumi Asih Kecamatan Kelumpang Selatan, serta dryer UV di Desa Pembelacanan Kecamatan Kelumpang Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen di tingkat desa, memperkuat cadangan pangan lokal, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   a. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah dan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulaulaut Sigam, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Kepulauan, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Utara, Pamukan Barat, Sungai Durian, Pamukan Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hilir, Kelumpang Hulu, Kelumpang Utara, Sampanahan, dan Hampang.

Dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang pangan, juga dilaksanakan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang memuat informasi mengenai kondisi penyediaan bahan makanan bagi penduduk di Kabupaten Kotabaru. Data tersebut menjadi dasar dalam melihat keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan masyarakat

Selain itu, dilakukan kegiatan pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan secara rutin setiap minggu di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kotabaru serta di beberapa pasar yang berada di kecamatan. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan harga dan ketersediaan pangan sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan di pasar.

Tabel
Data Harga Rata-rata Pangan Strategis

No	Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)
1	Beras Medium	15.000	13.200	13.200	12.200	14.000	12.000
2	Jagung	8.000	9.850	9.850	4.450	-	-
3	Kedelai	16.000	13.250	13.250	10.950	11.800	10.000
4	Cabe Merah	85.000	46.550	46.550	22.500	113.226	49.833

No	Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)	Harga Rata-rata Terendah Rp/kg)
5	Bawang Merah	66.250	76.450	76.450	37.100	54.348	30.000
6	Minyak Goreng	25.000	17.000	17.000	14.000	19.000	17.600
7	Gula Pasir	15.000	18.900	18.900	17.200	18.607	17.933
8	Daging Sapi	160.000	180.000	180.000	160.000	180.000	171.333
9	Daging Ayam	41.000	41.650	41.650	37.550	41.600	35.061
10	Telur	32.750	32.000	32.000	28.100	32.367	28.500

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas pangan tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa harga sebagian besar komoditas mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim, produksi, dan kelancaran distribusi. Sementara itu, beberapa komoditas pangan lainnya seperti beras medium, daging ayam, telur, dan daging sapi cenderung menunjukkan harga yang relatif stabil, meskipun tetap mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, komoditas seperti kedelai dan minyak goreng menunjukkan kecenderungan penurunan harga dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan gula pasir mengalami peningkatan harga namun masih dalam kisaran yang stabil. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan masih cukup terjaga, meskipun terdapat komoditas tertentu yang mengalami volatilitas harga yang cukup tinggi sehingga perlu terus dilakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan dan distribusi pangan di pasar.

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan kabupaten/Kota

Kegiatan Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berupa beras berdasarkan Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Penyaluran Cadangan Pangan Tahun 2025 dapat dlihat pada tabel berikut :

Tabel
Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025

No.	Lokasi Penyaluran Beras CPP		Jumlah Jiwa	Jumlah Beras CPP yang disalurkan (Kg)
	Desa	Kecamatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pulau Kerumputan	Pulaulaut Kepulauan	268	916
2.	Batuah	Pamukan Barat	206	720
3.	Sekandis	Pamukan Selatan	152	483
4.	Sukamaju	Sampanahan	246	707
5.	Sampanahan	Sampanahan	283	857
6.	Cantung Kanan	Hampang	129	373
		Total	1.284	4.056

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten kotabaru pada tahun 2025 ini berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/122/KUM/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Pulau Kerumputan Kec. Pulaulaut Kepulauan dan Desa Batuah Kec. Pamukan Barat, Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 100.3.3.2/494/KUM/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah di Desa Sekandis Kec. Pamukan Selatan, Desa Sukamaju Kec. Sampanahan, Desa Sampanahan Kec. Sampanahan dan Desa Cantung Kanan Kec. Hampang

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita per tahun

Tentang penyusunan laporan akhir skor pola pangan harapan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel
Konsumsi Energi dan Protein serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017-2025

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein per kapita per hari									Rekomendasi WNPG	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	s.d 2012	2013
Energi	1413.3	1378.2	1437.5	1408.2	2165.1	2.158	2.056	2.197	2.132	2150	2100
Protein	45.5	44.9	45.7	44.3	66.3	69.7	65,7	68,5	66,99	57	57
PPH	74.5	66.7	75.2	75.6	83.8	84.9	84,3	92,1	89,27		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Pada tahun 2025, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tercatat sebesar 89,27, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 92,1. Penurunan ini menunjukkan adanya dinamika pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan preferensi konsumsi, fluktuasi harga pangan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori baik dan menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat relatif beragam.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi penurunan skor PPH adalah terjadinya alih fungsi lahan serta berkurangnya minat masyarakat untuk menanam dan mengonsumsi bahan pangan sumber karbohidrat selain beras sebagai alternatif pangan pokok. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya ketergantungan terhadap konsumsi beras dan belum optimalnya diversifikasi pangan.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk penyelenggaraan lomba cipta menu B2SA bekerja sama dengan TP PKK Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penurunan konsumsi beras secara bertahap serta meningkatkan konsumsi sumber karbohidrat alternatif selain beras dan tepung terigu.

Sosialisasi B2SA telah dilaksanakan di Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulau Sebuku, dan Kecamatan Kelumpang Selatan. Selain itu, kegiatan Sosialisasi B2SA Goes to School dengan

sasaran siswa SMA telah dilaksanakan di Kecamatan Pulaulaut Barat, Kecamatan Pulaulaut Selatan, dan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan

6. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   a. Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan

      Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), antara lain melalui pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Selain itu, dilakukan penerbitan izin edar berupa Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dengan Label Putih dan Label Hijau. Dalam rangka menjamin keamanan pangan, juga dilaksanakan pengujian kandungan residu pada 41 komoditas pangan segar asal tumbuhan menggunakan metode rapid test. Dari hasil pengujian tersebut, terdapat 1 (satu) komoditas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keamanan pangan.

      Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Komitmen Izin Edar Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Timur, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Sampanahan, dan Kecamatan Kelumpang Hulu. Hingga akhir pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan sebanyak 48 rekomendasi izin registrasi PSAT.

      Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk pertanian lokal. Dengan adanya legalitas dan jaminan keamanan produk, kepercayaan konsumen akan meningkat, akses pasar menjadi lebih luas, serta pendapatan pelaku usaha dan petani dapat bertambah. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

   b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui identifikasi dan pengumpulan data Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di tingkat kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara dini kondisi kerawanan pangan dan gizi sehingga pemerintah daerah dapat melakukan langkah penanganan secara cepat dan tepat apabila terdapat wilayah yang terindikasi mengalami kerawanan pangan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi tersebut, dilakukan penanganan melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah kepada wilayah yang terindikasi rentan berdasarkan hasil analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan. Penyaluran cadangan pangan tersebut dilaksanakan di beberapa desa, yaitu Desa Pulau Kerumputan Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat, Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Sukamaju Kecamatan Sampanahan, dan Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok pada saat terjadi kerentanan pangan, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotabaru.

7. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), antara lain melalui pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Selain itu, dilakukan penerbitan izin edar berupa Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dengan Label Putih dan Label Hijau. Dalam rangka menjamin keamanan pangan, juga dilaksanakan pengujian kandungan residu pada 41 komoditas pangan segar asal tumbuhan menggunakan metode rapid test. Dari hasil pengujian tersebut, terdapat 1 (satu) komoditas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keamanan pangan.

Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemenuhan Komitmen Izin Edar Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Kecamatan Pulaulaut Timur, Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Sampanahan, dan Kecamatan Kelumpang Hulu. Hingga akhir pelaksanaan kegiatan, telah diterbitkan sebanyak 48 rekomendasi izin registrasi PSAT.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk pertanian lokal. Dengan adanya legalitas dan jaminan keamanan produk, kepercayaan konsumen akan meningkat, akses pasar menjadi lebih luas, serta pendapatan pelaku usaha dan petani dapat bertambah. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
   a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
      1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

         Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.152.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.770.500,- atau 80,12% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2 Laporan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

         Tabel

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	42.152.000,-	33.770.500,-
2	Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	2 Laporan
3	Hasil	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	42,42%	42,42%

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1) Sub keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.861.500,- atau 69,45% dan capaian kinerja 372,45% digunakan untuk Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 365 Laporan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	7.000.000,-	4.861.500,-

2	Keluaran	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	98 Laporan	365 Laporan
3	Hasil	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	100%

2) Sub keg. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 404.170.500,- terealisasi sebesar Rp. 295.792.363,- atau 73,19% dan capaian kinerja 675% digunakan untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus 27 Laporan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	404.170.500,-	295.792.363,-
2	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	4 Laporan	27 Laporan
3	Hasil	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	100%	100%

		Pasar Kabupaten/Kota		

c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub keg. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 52.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.776.500,- atau 98,21% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 6 Dokumen selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	52.720.000,-	51.776.500,-
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6 Dokumen	6 Dokumen
3	Hasil	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	62%	100%

2) Sub keg. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.365.500,- terealisasi sebesar Rp. 26.372.200,- atau 96,37% dan capaian kinerja 50% digunakan untuk Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 3 Laporan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	27.365.500,-	26.372.200,-
2	Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	3 Laporan
3	Hasil	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	62%	100%

3) Sub keg. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.158.950,- terealisasi sebesar Rp. 29.941.400,- atau 99,28% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 6 Laporan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	30.158.950,-	29.941.400,-
2	Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	6 Laporan
3	Hasil	Persentase Pengawasan Pupuk dan	62%	100%

		Pestisida Bersubsidi		

Berikut dokumentasi program dan kegiatan:

1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan. Dalam rangka Cek Harga dan Stok Barang Kebutuhan Bahan Pokok dan Bahan Penting Pasar Kemakmuran Kotabaru.



2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Operasi Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Halaman Kantor Polsek Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku



3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pasar Murah rangka pengendalian Inflasi Daerah



4. Operasi Pasar Murah dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah di Halaman Limbur Raya Kecamatan Pulaulaut Sigam





5. Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Daerah TPID & TP2DD se- Kalimantan Selatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin



6. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Sosialisasi dan Uji Sampel Produk Keamanan Pangan di Pasar Kemakmuran Tahun Anggaran 2025 di Blok E Lantai 2.



7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal). Dalam Rangka Pengecekan dan Peninjauan Barang Yang akan di Ekspor oleh PT. GUTHRIE INTERNASIONAL PULAU LAUT REFINERY





8. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Gebyar Wisata dan Produk Unggulan Daerah Tahun 2025



9. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bazar Dagang Tahun 2025



TUJUAN 3: TERWUJUDNYA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Terwujudnya penguatan tata kelola pemerintahan merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance, berbasis kinerja, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan empat sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat; Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan guna mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Pemerintahan sebagai wujud transparansi, penguatan pengawasan, serta pencegahan praktik korupsi; serta Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Keempat sasaran tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Kotabaru yang responsif, bersih, dan melayani demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel II.25
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,39 (B)	72,00 (BB)	76,22 (BB)	105,86%	82 (A)	92,95%

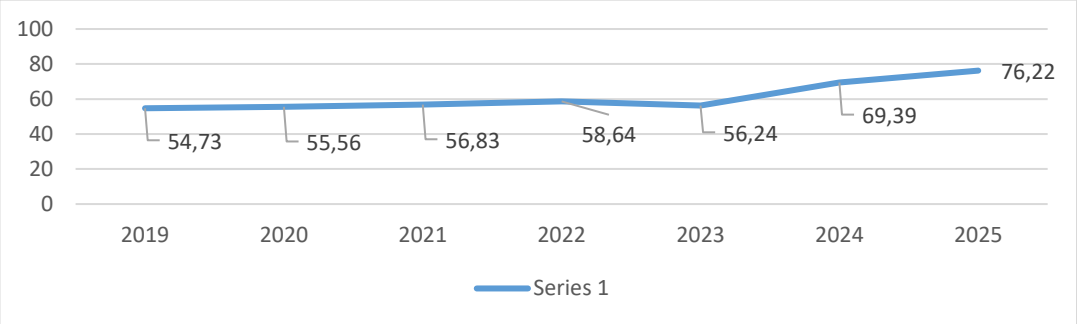
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 terealisasi sebesar 76,22 (BB) apabila dibandingkan dengan target 72,00 (BB) sehingga capaiannya sebesar 105,86% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi realisasinya mencapai 76,22 (BB) angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,83 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 69,39 (B)

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 terealisasi sebesar 76,22 (BB) apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 82 (A) sehingga capaian sebesar 92,95%

Grafik II.23
Perkembangan Indeks RB Kabupaten Kotabaru 2019 s.d 2025



Sumber: Diolah Oleh Penulis berdasaran MenpanRB, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan progresif, terutama pada periode transisi menuju tahun 2025. Setelah mengalami fluktuasi ringan pada tahun 2023 di angka 56,24, pemerintah daerah berhasil

melakukan akselerasi signifikan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 69,39. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan skor mencapai 76,22, yang mengindikasikan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan pada jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata terhadap performa birokrasi daerah secara keseluruhan.

Keberhasilan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru yang mencapai angka 76,22 pada tahun 2025 didorong oleh fondasi manajerial yang kuat. Faktor pendukung utama dalam capaian ini adalah adanya komitmen pimpinan yang tinggi serta penyelarasan kebijakan yang harmonis di seluruh lini perangkat daerah. Selain itu, perumusan rencana aksi yang disusun telah dikonstruksikan agar relevan dengan indikator penilaian, sehingga setiap program kerja memiliki sasaran yang jelas dan terukur. Sinergi antara kebijakan strategis dan implementasi teknis inilah yang menjadi mesin penggerak utama dalam menjaga tren positif performa birokrasi di Bumi Saijaan.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan yang impresif, proses evaluasi internal mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian serius. Masih ditemukan adanya rencana aksi pada beberapa unit kerja yang kurang mendukung pencapaian target makro RB secara optimal, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam terhadap kaitan antara aktivitas rutin dengan indikator kinerja utama. Di samping itu, proses evaluasi yang belum konsisten pada setiap tahapan capaian menyebabkan potensi deviasi kinerja tidak dapat terdeteksi lebih dini, sehingga memerlukan mekanisme kontrol yang lebih ketat agar setiap hambatan di lapangan dapat segera teratasi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan memprioritaskan penyempurnaan kualitas dokumen rencana aksi melalui asistensi teknis yang lebih intensif di setiap SKPD. Fokus utama tindak lanjut adalah memastikan seluruh program kerja memiliki keterkaitan logis (cascading) yang kuat terhadap indikator RB dan digitalisasi tata kelola. Selain itu, akan diterapkan mekanisme evaluasi berkala yang sistematis di setiap triwulan untuk memantau progress capaian secara real-time. Dengan

melakukan penguatan pada aspek monitoring dan perbaikan kualitas rencana aksi, Kabupaten Kotabaru optimis dapat mempertahankan predikat kinerja unggul dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang baik dan terus meningkat dalam mendukung Indeks RB bersaa dengan OPD yang bersangkutan
2. Capaian dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang hampir sempurna di angka 99% mencerminkan komitmen kuat terhadap pemulihan ekonomi melalui produk lokal.
3. Tingkat digitalisasi arsip yang mencapai 89,2% menunjukkan kesiapan infrastruktur administrasi menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang modern
4. Efektivitas dalam mencapai indikator kinerja utama makro yang berada di angka 92%

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Penetapan target IKU dan Rencana Aksi belum sepenuhnya selaras dengan target "Baik" yang ditetapkan dalam Kepmen 182 Tahun 2024.
2. Belum dijadikannya manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan serta kurangnya monitoring terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3. Masih ditemukan sasaran strategis yang tidak selaras antara level Pemda dan OPD, serta indikator yang bersifat output saja (bukan outcome).
4. Masih adanya risiko hubungan kedekatan antara penyedia jasa dengan pejabat dan belum optimalnya mekanisme pencegahan gratifikasi.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam mengakselerasi pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) melalui penguatan integritas dan tata kelola organisasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah ini diwujudkan

dengan membentuk Komite atau Satgas Pengelola Risiko Korupsi serta melaksanakan probity audit secara berkala guna mendeteksi serta memitigasi potensi penyimpangan sejak dini, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk memperkuat transparansi, pemerintah daerah mengembangkan inovasi digital berupa aplikasi e-catalog lokal dan dashboard transparansi anggaran yang mengintegrasikan daftar hitam (blacklist) vendor, guna menutup celah nepotisme dan memastikan akuntabilitas belanja publik. Upaya ini dibarengi dengan internalisasi budaya antikorupsi yang masif kepada seluruh stakeholders, di mana pimpinan daerah menempatkan diri sebagai role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi.

Dalam aspek birokrasi yang berorientasi hasil, Kabupaten Kotabaru melakukan penyempurnaan rencana aksi RB Tematik, khususnya pada fokus penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Strategi ini melibatkan kolaborasi multipihak yang menyatukan akademisi, sektor swasta melalui program CSR, dan komunitas dalam satu peta jalan (roadmap) yang logis dan terintegrasi. Sebagai bagian dari perbaikan manajemen kinerja, pemerintah daerah melakukan reviu total untuk memastikan seluruh target rencana aksi telah selaras dengan standar nasional, termasuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru seperti Kepmen 182/2024. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen rencana aksi tersebut diperbaiki agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) yang berorientasi pada hasil nyata (outcome-based), sehingga Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi pemenuhan administratif, melainkan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabar:

1. Melakukan koordinasi dan diskusi dalam persiapan pengisian rencana aksi yang terdapat dalam portal RB





2. Melaksanakan FGD dalam Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik





3. Melakukan rapat capaian rencana aksi yang telah ditetapkan secara berkala yaitu triwulan I s.d IV





4. Melakukan Finalisasi Capaian Rencana Aksi tahun 2025





Sasaran 8: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menempatkan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Sasaran strategis ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Bumi Saijaan. Fokus utama diarahkan pada penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, serta peningkatan aksesibilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, guna memastikan bahwa kehadiran negara dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam setiap interaksi administratif maupun layanan dasar.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IPP ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Melalui evaluasi berkala terhadap variabel-variabel di dalam IPP seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana,

sistem informasi, konsultasi, dan pengaduan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat memetakan kekuatan serta area perbaikan yang diperlukan untuk mencapai standar pelayanan prima yang berkelanjutan.

Tabel II.26
Capaian Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,55	2,85	3,36	117,89%	3,40	98,82%

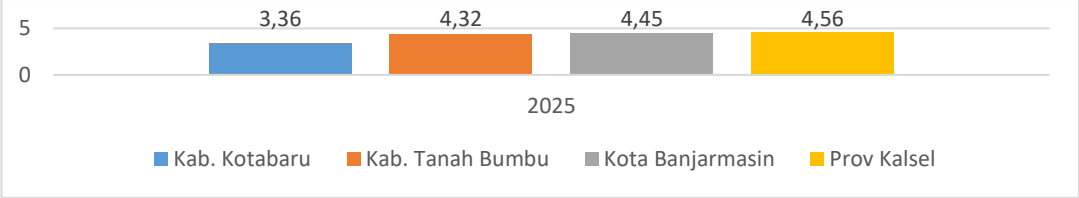
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 terealisasi sebesar 3,36 apabila dibandingkan dengan target 2,55 sehingga capaiannya sebesar 117,89% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik realisasinya mencapai 3,36 angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,81 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,55.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 terealisasi sebesar 3,36 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 3,40 sehingga capaian sebesar 98,82%

Grafik II.24
Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan MenpanRB, 2026.

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Pelayanan Publik tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan memimpin dengan skor tertinggi sebesar 4,56, diikuti oleh Kota Banjarmasin (4,45) dan Kabupaten Tanah Bumbu (4,32). Sementara itu, Kabupaten Kotabaru berada di posisi terendah dengan skor 3,36, yang menunjukkan adanya selisih performa yang cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah tetangga maupun rata-rata provinsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru masih tertinggal dan membutuhkan evaluasi serta perbaikan mendalam agar mampu mengejar ketertinggalan indeks dari daerah lain di Kalimantan Selatan.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Pelayanan Publik, sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotabaru meraih skor 93,97% dalam tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, yang menunjukkan secara administratif prosedur pelayanan sudah tersedia.
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan angka 84,52%, menandakan bahwa meskipun indeks sektoral rendah, masyarakat pengguna layanan merasa cukup puas dengan interaksi layanan saat ini
3. Adanya capaian 89,2% pada digitalisasi arsip menjadi modal penting untuk mempercepat transisi menuju layanan publik berbasis digital (e-services).

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Pelayanan Publik, sebagai berikut:

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat belum dioptimalkan sebagai dasar utama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada unit layanan.

2. Tantangan geografis Kabupaten Kotabaru menyebabkan standar kualitas layanan di pusat kota sulit direplikasi secara merata di kecamatan terpencil

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penguatan pada aspek pengawasan dan keterlibatan pengguna layanan secara aktif. Langkah ini dilakukan melalui sosialisasi masif guna mendorong masyarakat menggunakan kanal pengaduan resmi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif. Untuk memastikan setiap keluhan tertangani secara tuntas dan berkualitas, pemerintah daerah menerapkan mekanisme penilaian (rating) bagi pengguna layanan segera setelah aduan diselesaikan. Melalui sistem umpan balik ini, pemerintah dapat mengukur tingkat efektivitas penanganan keluhan secara real-time dan transparan.

Sejalan dengan penguatan kanal pengaduan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis kini diwajibkan untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret dan terukur berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penyusunan RTL ini berfokus pada perbaikan poin-poin ketidakpuasan masyarakat, sehingga hasil survei tidak hanya menjadi data statistik, melainkan menjadi dasar transformasi layanan di lapangan. Upaya perbaikan sistemik tersebut didukung pula dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas garda terdepan (frontliner). Pelatihan ini ditekankan pada implementasi standar layanan prima yang profesional dan terukur, guna memastikan setiap masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang ramah, cepat, dan akuntabel sesuai dengan tata nilai pelayanan publik nasional

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 8 (delapan) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

   Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat (Kamtipmas) dengan Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan nama Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan 9 Sub Kegiatan:

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Pelatihan Pelayanan Publik dan Komunikasi Efektif, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 2.212.538.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.526.205.260 (75,00%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (100%).
b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Kegiatan penyuluhan dan dialog masyarakat tentang pencegahan gangguan trantibum, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 25 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 62.050.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.934.000 (3,2,0%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (0%).
c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan target 6 Dokumen. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 6 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 35.130.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.600.000 (6,2 %) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (15,94%).
d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan, dengan target 12 Dokumen, Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp.

172.669.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 135.457.500 (83,33%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100%).

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 5 Orang. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 187.907.500 (86,67%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (68,98%).
f. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 3 Unit. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 30.764.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.065.350 (39,22%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (61,54%).
g. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah nihil. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 25.733.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.696.000 (6,59%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (25%).
h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah nihil. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 50.007.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.239.000 (0%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (0%).

i. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 90.200.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.351.000 (87,5%) & realisasi kinerja kegiatan sebesar (70,23%).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan






2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota




3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum




Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan nama Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan 3 Sub Kegiatan:

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Pemangku Jabatan (SKPD terkait)/Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 64.961.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.738.700 (45,78%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (52,5%).
b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.788.626 (8,53%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).
c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 7 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.547.500 (9,24%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan



Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan nama Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan 3 Sub Kegiatan :

a. Pembentukan Sekretariat PPNS. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 0 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.990.000 (10.99%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (20.00%).
b. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, dengan target 1 Laporan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 4 Kegiatan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 52.066.938 (52.07%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

c. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS, dengan target 1 Laporan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.066.938 (52.07%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Dengan Nama Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dengan 9 Sub Kegiatan :

a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 120.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.355.000 (17,80%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 Laporan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Laporan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 381.275.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.263.200 (39,15%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).
c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 179.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.346.000 (71.70%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait, dengan target 6 Paket, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Paket. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 672.308.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.882.400 (2.51%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (3.00%).

e. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, dengan target 30 Orang, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 14 Orang. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.385.400 (40.70%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (46.67%).
f. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 4 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 4 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.798.000 (29.60%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).
g. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal, dengan target 4 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 4 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 102.700.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.007.155 (24.35%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).
h. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK). Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh

Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya, Sah, dan Legal, dengan target 2 Desa/Kelurahan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 0 Desa/Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.104.000 (5.17%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (7.50%).

i. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 73.435.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.476.500 (32.34%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dengan 1 Kegiatan:

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 69.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.407.000 (32.34%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran





Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dengan 1 Kegiatan :

a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian, dengan target 4 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 4 Dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.912.500 (23.04%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan 3 Kegiatan:

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Warga

Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya, dengan target 300 Orang, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 90 Orang. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 130.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.998.000 (22.98%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (30.00%).

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya, dengan target 5 Desa/Kelurahan, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 5 Desa/Kelurahan. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.512.000 (4.26%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (5.00%).
c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana. Tolak ukur kinerja kegiatan pada indikator keluaran adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar, dengan target 1 Dokumen, dengan hasil realisasi keluaran kegiatan adalah 1 dokumen. Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 92.265.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.980.079 (25.99%) dan realisasi kinerja kegiatan sebesar (100.00%).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat




2) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana




3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/kota Pemberian Tali asih berupa sembako ke para janda - janda Veteran sebanyak 26 orang, Pemberian diserahkan pada saat hari Pahlawan 10 Nopember 2024. (foto penyerahan bantuan dilampirkan). Paket Per sembako sebesar Rp. 500.000,-. Adapun isi paket sembako (Beras 5 Kg, Gula 2 Kg, Minyak Goreng 2 liter, Mie Instan 5 Bungkus, Kecap Manis 2 Botol, Susu 2 Kaleng, Teh 1 Kotak, Kopi 2 Bungkus, Sarden 5 Kaleng dan Biskuit 2 Bungkus, Bawang Merah ½ Kg, Telur 10 Butir).

Dokumentasi Kegiatan:

1) Penyerahan Tali Asih dan Sembako untuk Keluarga Veteran




2) Kegiatan Bakti Sosial di Taman Makam Pahlawan



4. Program Pendaftaran Penduduk

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 321.703.772,- terealisasi sebesar Rp. 245.859.083,- atau 76,42% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan memberikan pelayanan langsung yang ada dikantor maupun pelayanan yang langsung turun kemasyarakat yang secara lokasi agak jauh dari kantor pusat (layanan jemput bola). Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan selama 12 bulan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 61.887.551,- atau 74,01% dan

capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan Lembaga dan non Lembaga yang ada di Kabupaten Kotabaru demi sinergi dalam mendukuung peningkatan layanan kependudukan serta sinkronisasi data kependudukan yang diperlukan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kotabaru 2 Laporan selama 12 bulan.

5. Program Pencatatan Sipil
   a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

      Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 265.200.978,- terealisasi sebesar Rp. 213.491.510,- atau 80,50% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan memberikan pelayanan langsung yang ada dikantor maupun pelayanan yang langsung turun kemasyarakat yang secara lokasi agak jauh dari kantor pusat (layanan jemput bola). Hasil yang dicapai/outcome kegiatan Jumlah Layanan Pelayanan Sipil yang Ditingkatkan 10.000 Layanan selama 12 bulan.

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

      Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.732.050,- terealisasi sebesar Rp. 58.477.900,- atau 81,52% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan Lembaga dan non Lembaga yang ada di Kabupaten Kotabaru demi sinergi dalam mendukuung peningkatan layanan kependudukan serta sinkronisasi data kependudukan yang diperlukan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten Kotabaru 5 Laporan selama 12 bulan.

   Dokumentasi:




6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

      Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.099.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.053.635,- atau 88,29% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan memastikan sistem jaringan antara pusat dengan daerah aman serta tidak terjadi kendala dan masalah untuk memastikan percepatan layanan terhadap masyarakat sekaligus memastikan ketepatan dan manfaat terhadap data kependudukan. Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen selama 12 bulan.

      Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.184.200,- terealisasi sebesar Rp. 17.149.350,- atau 65,50% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan memberikan pelayanan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan 3 Dokumen selama 12 bulan.

   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

      Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 133.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.011.595,- atau 85,29% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk memastikan sistem jaringan antara pusat dengan daerah aman serta tidak terjadi kendala dan masalah untuk memastikan percepatan layanan

terhadap masyarakat sekaligus memastikan ketepatan dan manfaat terhadap data kependudukan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan selama 12 bulan.

Dokumentasi:







7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

   Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

   Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 139.355.300,- terealisasi sebesar Rp. 103.210.583,- atau 74,06% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan dengan memastikan penyediaan data kependudukan dengan selalu berkoordinasi serta sinkronisasi dengan Dirjen PDAK Ditjen Dukcapil demi penyajian berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) tepat waktu. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen selama 12 bulan.

   Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 52.355.500,- terealisasi sebesar Rp. 45.097.558,- atau

86,14% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk kegiatan membuat dan menyajikan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun 1 Dokumen selama 12 bulan

8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik di sektor-sektor pemerintah, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral, meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral, meningkatkan aksesibilitas data statistik sektoral dan meningkatkan penggunaan data statistik sektoral dalam pengambilan keputusan.

   Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup beberapa kegiatan, seperti pengembangan sistem statistik sektoral, pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan dan analisis data statistik sektoral, penyebaran data statistik sektoral dan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral, serta meningkatkan penggunaan data statistik dalam pengambilan keputusan.

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

      Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah suatu proses yang melibatkan beberapa tahapan untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan relevan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Berikut adalah penjelasan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota:

      - Pengumpulan Data: Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti survei, sensus, dan data administratif.
      - Pengolahan Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna.

- Analisis Data: Data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara variabel.
- Penyebaran Data: Hasil analisis data kemudian disebarluaskan kepada pengguna data, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas: Kegiatan ini melibatkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan menganalisis data statistik.
- Koordinasi dan Integrasi: Kegiatan ini melibatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai instansi pemerintah daerah untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data statistik.
- Pengembangan Sistem: Kegiatan ini melibatkan pengembangan sistem informasi statistik untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data statistik

1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga statistik sektoral dalam mengelola dan menganalisa data statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru selaku walidata wajib untuk menghimpun dan mendiseminasikan data sektoral secara periodik. Untuk kepentingan diseminasi statistik sektoral, walidata telah secara rutin bekerjasama dengan Koordinator Forum Satu Data menyelenggarakan Forum satu data salah satunya bertujuan untuk menjamin konsistensi dan validitas statistik sektoral yang terpublikasi selain kuantitas dan dinamika data, penyelenggaraan diseminasi statistik sektoral dihadapkan pada tantangan berupa beragamnya kapasitas pengelola data di setiap Produsen Data. Tujuan dari sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral adalah untuk:
    a. Meningkatkan kemampuan lembaga statistik sektoral dalam mengelola dan menganalisis data statistic

b. Meningkatkan kualitas data statistic
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan statistik sectoral
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap data statistic

Dengan demikian, sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan statistik sektoral.



2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional. Sub kegiatan peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional adalah upaya untuk meningkatkan kontribusi statistik sektoral dalam mendukung sistem statistik nasional. Tujuan dari sub kegiatan peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional adalah untuk:

a. Meningkatkan kontribusi statistik sektoral dalam mendukung sistem statistik nasional
b. Meningkatkan kualitas data statistik
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan statistik sektoral
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap data statistik

e. Agar perangkat daerah dapat menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan atau penyusunan kebijakan.

Dengan demikian, sub kegiatan peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan statistik sektoral dan mendukung sistem statistik nasional.





3) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral. Sub kegiatan peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional adalah upaya untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan relevansi data statistik sektoral. Tujuan dari sub kegiatan peningkatan kualitas data statistik sektoral adalah untuk:
   a. Meningkatkan akurasi dan keandalan data statistik
   b. Meningkatkan relevansi data statistik dengan kebutuhan pengguna
   c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap data statistik
   d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan statistik sektoral

   Dengan demikian, sub kegiatan peningkatan kualitas data statistik sektoral sangat penting untuk meningkatkan kualitas data statistik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.





4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
    a. Pengumpulan Data Terintegrasi: Melakukan pengumpulan data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi dengan sistem data nasional.
    b. Pengolahan Data Terstandar: Melakukan pengolahan data yang akurat, konsisten, dan terstandar untuk meningkatkan kualitas data statistik.
    c. Analisis Data Terintegrasi: Melakukan analisis data yang mendalam dan terintegrasi dengan data lainnya untuk meningkatkan relevansi data statistik.
    d. Penyebaran Data Terbuka: Melakukan penyebaran data yang terbuka, transparan, dan terintegrasi dengan sistem data nasional.

e. Koordinasi dan Integrasi Data: Melakukan koordinasi dan integrasi dengan lembaga statistik lainnya untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data statistik.
f. Pengembangan Standar Data: Mengembangkan standar data yang sesuai dengan kebutuhan lembaga statistik sektoral dan terintegrasi dengan sistem data nasional.
g. Pengawasan Kualitas Data: Melakukan pengawasan kualitas data statistik untuk memastikan bahwa data statistik memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, sub kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dapat meningkatkan kualitas data statistik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.



5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar. Sub kegiatan pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar adalah:
   a. Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi dengan sistem data nasional.
   b. Pengolahan Data: Melakukan pengolahan data yang akurat, konsisten, dan terstandar untuk meningkatkan kualitas data statistik.
   c. Analisis Data: Melakukan analisis data yang mendalam dan terintegrasi dengan data lainnya untuk meningkatkan relevansi data statistik.
   d. Penyebaran Data: Melakukan penyebaran data yang terbuka, transparan, dan terintegrasi dengan sistem data nasional.

e. Koordinasi dan Integrasi: Melakukan koordinasi dan integrasi dengan lembaga statistik lainnya untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data statistik.
f. Pengawasan Kualitas: Melakukan pengawasan kualitas data statistik untuk memastikan bahwa data statistik memenuhi standar yang ditetapkan.
g. Dokumentasi Proses: Melakukan dokumentasi proses bisnis statistik sektoral untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
h. Evaluasi dan Peningkatan: Melakukan evaluasi dan peningkatan proses bisnis statistik sektoral untuk meningkatkan kualitas data statistic

Dengan demikian, sub kegiatan pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar dapat meningkatkan kualitas data statistik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.



9. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Persandian untuk Pengamanan Informasi merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal informasi penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik maupun non-elektronik yang aman, andal, dan terlindungi dari ancaman kebocoran serta penyalahgunaan informasi. untuk Pengamanan Informasi merupakan upaya pemerintah daerah dalam melindungi informasi penyelenggaraan pemerintahan agar

tetap rahasia, utuh, dan tersedia. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.Program ini bertujuan untuk mencegah kebocoran informasi, mendukung SPBE yang aman, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan perlindungan dan tata kelola keamanan informasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal.

   Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud tata kelola keamanan informasi yang efektif, meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pengamanan informasi, serta terlindunginya data dan komunikasi resmi pemerintah daerah dari risiko kebocoran dan Ancaman Siber.

   1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik

      Dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan informasi penyelenggaraan pemerintahan, baik yang dikelola melalui sistem elektronik maupun secara manual/non-elektronik. Pelaksanaannya meliputi penerapan pengelolaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik, pengamanan dokumen fisik berklasifikasi, serta monitoring dan evaluasi kepatuhan perangkat daerah terhadap standar keamanan informasi.



b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola persandian yang terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan mekanisme, alur koordinasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan komunikasi sandi, baik untuk kepentingan kedinasan, pengamanan informasi rahasia, maupun komunikasi strategis pemerintah daerah.

Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Melalui jaring komunikasi sandi, diharapkan tercipta sistem komunikasi yang aman, tertib, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung peningkatan sinergi antar perangkat daerah serta memperkuat sistem pengamanan informasi daerah dalam menghadapi potensi ancaman dan risiko kebocoran informasi.



10. Program Pengembangan Kebudayaan

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

       Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di Kabupaten Kotabaru merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola, memfasilitasi, dan mengembangkan seni serta tradisi budaya yang hidup langsung di tengah masyarakat. Kegiatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan praktik budaya lokal, memberikan ruang bagi pelaku seni budaya, dan memperkuat identitas budaya daerah sebagai bagian integral dari pembangunan kebudayaan.

       Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kotabaru melaksanakan berbagai kegiatan nyata, antara lain

       1) Workshop dan pelatihan seni tradisional seperti teater Mamanda, yang digelar sebagai upaya revitalisasi dan regenerasi seni tradisi agar generasi muda memahami, menguasai, dan terus meneruskan kebudayaan yang ada di masyarakat.
       2) Festival dan lomba seni budaya seperti Festival Musik Panting dan Festival Apresiasi Seni Budaya yang menjadi ajang ekspresi kreatif pelaku seni dari pelajar dan warga, sekaligus

mempromosikan bentuk-bentuk budaya lokal kepada masyarakat luas.

3) Pengenalan dan sosialisasi budaya kepada publik dan dunia pendidikan, misalnya kegiatan sosialisasi museum untuk memperluas pemahaman tentang warisan budaya dan sarana pembelajaran budaya bagi sekolah dan masyarakat

b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya merupakan kegiatan strategis yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan bentuk-bentuk kesenian tradisional yang hidup di tengah masyarakat, serta memberikan ruang bagi para pelaku seni lokal untuk terus berkarya dan mentransfer keahlian mereka kepada generasi berikutnya.

Dokumentasi Kegiatan:





11. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Pembinaan kesenian masyarakat pelakunya di Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan, menjaga, dan meneruskan seni tradisional yang hidup di tengah masyarakat. Program ini bertujuan agar seniman lokal dan kelompok kesenian tradisional tetap aktif berkarya, sekaligus meneruskan warisan budaya kepada generasi muda dan masyarakat umum.

Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kotabaru menyelenggarakan berbagai kegiatan nyata seperti:

a. Workshop dan pelatihan seni tradisional, misalnya Workshop Teater Tradisional Mamanda, untuk mengenalkan seni panggung khas daerah kepada generasi muda serta meningkatkan keterampilan pelaku seni agar tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Kegiatan ini juga membantu regenerasi pelaku seni lokal.
b. Festival dan lomba kesenian tradisional, seperti Festival Musik Panting, yang menjadi wadah ekspresi bagi pelajar dan masyarakat dalam menampilkan seni musik tradisional Banjar serta memperkuat rasa cinta terhadap budaya lokal.
c. Workshop pelestarian kesenian lain, seperti pelatihan kesenian karawitan, yang memberi ruang bagi guru dan seniman untuk memahami serta mengembangkan kesenian tradisional dalam pembelajaran dan pagelaran budaya.

12. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya daerah, serta menguatkan identitas lokal generasi muda. Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kotabaru mengadakan berbagai aktivitas yang terkait dengan pelestarian dan pengenalan sejarah serta budaya kepada masyarakat dan peserta didik, antara lain:

a. Festival dan lomba seni budaya tingkat pelajar yang menampilkan karya berkaitan dengan nilai-nilai lokal sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya daerah. Kegiatan ini menjadi media bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang budaya dan sejarah daerah melalui seni, serta memperkuat karakter kebanggaan daerah.
b. Festival apresiasi seni budaya yang melibatkan siswa dan tenaga pendidik, termasuk pertunjukan tari tradisional dan lomba menyanyi, sebagai sarana memupuk kecintaan terhadap seni dan budaya lokal.
c. Workshop seni teater tradisional, seperti pelatihan teater Mamanda yang merupakan bagian dari budaya lokal, sehingga generasi muda mendapatkan wawasan langsung tentang sejarah dan praktik budaya tradisional.
d. Sosialisasi museum dan pendampingan di dunia pendidikan, termasuk pengenalan museum sebagai sumber pembelajaran sejarah dan dialog permuseuman untuk tenaga pendidik, agar lebih mampu memanfaatkan sumber sejarah dalam konteks pendidikan.

Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian konkret dari pembinaan sejarah lokal yang dilakukan oleh Disdikbud Kotabaru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang turut melestarikan dan mengembangkan pengetahuan sejarah dan budaya daerah di Kabupaten Kotabaru

13. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya daerah yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Kegiatan ini meliputi pendataan, verifikasi, kajian nilai penting, hingga proses penetapan objek yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya

tingkat Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sistem perlindungan yang kuat terhadap peninggalan budaya daerah serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai identitas dan jati diri daerah.

b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan memaksimalkan pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan di tingkat daerah. Kegiatan ini mencakup upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya melalui kegiatan pendataan, konservasi, pemeliharaan, dokumentasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota dapat terkelola dengan baik, lestari, dan memberikan manfaat edukatif, sosial, serta ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

c. Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pergerakan Cagar Budaya agar tetap terlindungi serta tidak menimbulkan kerusakan atau kehilangan nilai penting budaya yang dikandungnya. Kegiatan ini meliputi proses penerimaan permohonan, verifikasi administratif dan teknis, serta penerbitan izin resmi bagi pihak yang akan membawa Cagar Budaya untuk keperluan tertentu seperti pameran, penelitian, atau kegiatan edukatif lainnya di dalam wilayah Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, serta tetap menjamin keamanan dan kelestariannya

Cagar Budaya Goa Rasidi



Cagar Budaya Tungku Peleburan Batu Besi



14. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan, keamanan, dan aksesibilitas koleksi bernilai sejarah, budaya, dan intelektual sebagai memori kolektif daerah. Program ini diarahkan tidak hanya pada aspek konservasi fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam konteks Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, kontribusi program dapat diidentifikasi melalui :

a. Aspek Aksesibilitas Layanan

   Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi tanpa dibatasi kondisi fisik koleksi.

b. Aspek Kecepatan dan Ketepatan Layanan

   Ketersediaan katalog dan database meningkatkan efisiensi pelayanan referensi.

c. Aspek Keandalan dan Kepastian Layanan

Koleksi yang terdokumentasi dan terpelihara dengan baik menjamin keberlanjutan layanan jangka panjang.

d. Aspek Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya pemanfaatan koleksi heritage menunjukkan adanya peningkatan persepsi manfaat layanan.

Dengan demikian, secara logis dan terukur, output program pelestarian berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan dimensi akses, mutu, dan keberlanjutan layanan.

15. Program Pengelolaan Arsip

a. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotabaru dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan arsip yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah (SKPD), meliputi aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, serta penyelamatan arsip. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa arsip dinamis di setiap perangkat daerah dikelola sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional, sehingga arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dapat terjaga dan dipreservasi sebagai arsip statis warisan budaya daerah.

Capaian kinerja menunjukkan adanya penurunan hasil pengawasan kearsipan OPD terhadap tata kelola arsip. Beberapa perangkat daerah masih belum melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Sebagai tindak lanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotabaru melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD, peningkatan frekuensi pengawasan kearsipan, pengembangan sistem informasi pengawasan arsip, serta koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam penyelarasan standar pengawasan arsip.

Melalui kegiatan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat mengelola arsipnya dengan baik.

Dokumentasi Pengawasan Kearsipan di SKPD:





16. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini merupakan upaya strategis dalam menjamin keberlangsungan informasi pemerintahan dan perlindungan memori kolektif daerah dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun bencana. Program ini mencakup kegiatan identifikasi arsip vital, penyusunan daftar arsip vital, duplikasi dan alih media arsip, penyelamatan arsip pascabencana, serta penguatan sistem pengamanan arsip.

Karena keberadaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan menjadi prasyarat utama terselenggaranya pelayanan yang cepat, akurat, dan memiliki kepastian hukum.

Dalam konteks Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, kontribusi program dapat dianalisis melalui beberapa dimensi:

a. Dimensi Keberlanjutan Layanan (Continuity of Service)

   Arsip vital yang terlindungi menjamin pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan atau bencana.

b. Dimensi Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

   Dokumen yang terselamatkan menjadi dasar legalitas pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintahan.

c. Dimensi Keandalan Sistem Administrasi

   Pengamanan arsip meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme penyelenggara layanan.

d. Dimensi Manajemen Risiko

   Program ini memperkuat sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko pelayanan publik.

Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang kuat antara output program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan outcome peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain:

a. Belum seluruh OPD memiliki dokumen daftar arsip vital yang mutakhir
b. Infrastruktur pengamanan arsip (ruang tahan api/kelembaban) belum memadai
c. Belum tersedianya sistem backup digital terintegrasi

Sebagai tindak lanjut direncanakan:

a. Penyusunan roadmap perlindungan arsip vital lintas OPD
b. Penguatan regulasi internal terkait manajemen risiko arsip
c. Integrasi perlindungan arsip dengan sistem SPBE dan backup elektronik
d. Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen risiko arsip

Dokumentasi:

Kegiatan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip







17. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang bertujuan untuk memberikan layanan akses terhadap arsip statis maupun arsip tertentu yang memiliki nilai guna informasi bagi masyarakat, peneliti, maupun instansi pemerintah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan dan perlindungan arsip.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan perizinan penggunaan arsip yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

Dalam kaitannya dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, Program Perizinan Penggunaan Arsip memberikan kontribusi melalui beberapa dimensi pelayanan, yaitu:

a. **Dimensi Aksesibilitas Layanan**
   Pelayanan perizinan penggunaan arsip membuka akses informasi yang sah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
b. **Dimensi Transparansi dan Keterbukaan Informasi**
   Ketersediaan mekanisme perizinan yang jelas mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.
c. **Dimensi Kepastian Prosedur Layanan**
   Standar operasional prosedur yang diterapkan memberikan kepastian proses dan waktu pelayanan.
d. **Dimensi Kepuasan Pengguna Layanan**
   Kemudahan akses dan kejelasan prosedur meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan arsip.

Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang jelas antara output program (layanan perizinan penggunaan arsip) dengan outcome peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

a. Belum tersedianya sistem layanan perizinan arsip secara digital yang terintegrasi
b. Keterbatasan sarana akses arsip digital
c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur penggunaan arsip yang masih terbatas

Sebagai tindak lanjut, direncanakan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

a. Pengembangan layanan akses arsip berbasis digital
b. Peningkatan publikasi dan sosialisasi layanan penggunaan arsip
c. Penyempurnaan standar pelayanan untuk meningkatkan kecepatan layanan
d. Penguatan integrasi layanan arsip dengan sistem keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, Program Perizinan Penggunaan Arsip telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan layanan akses arsip yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Keterkaitan antara output kegiatan berupa layanan perizinan penggunaan arsip dengan outcome berupa peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan kepastian layanan menunjukkan adanya rantai kinerja yang selaras dengan prinsip SAKIP.

Ke depan, penguatan sistem layanan digital dan perluasan pemanfaatan arsip diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas manfaat arsip bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Dokumentasi :

Kegiatan Perizinan Penggunaan Arsip





18. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatanya yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatannya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 397.640.352, dan setelah dilakukan rasionalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan menjadi Rp. 241.111.352, Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.728.576,- dengan capaian anggaran 50,07%. digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun anggaran 2025 sebanyak 12 orang.

Rapat Evaluasi dan Koordinasi FPK



b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 196.218.712,- dan setelah dilakukan rasionalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 159.653.712, Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.300.376,- dengan capaian anggaran 52,80%. Digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun anggaran 2025 sebanyak 105 orang

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan



c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 244.498.986,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.183.283.350,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.892.500,- dengan capaian anggaran 3,21%. digunakan untuk Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 laporan.

d. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 234.102.703,- Capaian kinerja output 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan capaian anggaran sebesar 0% Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada tahun anggaran 2025.

e. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskiba tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 198.409.945,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.709.092.945,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 461.190.324,- dengan capaian anggaran 65,04% digunakan untuk Pelaksanaan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskiba. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 dokumen

f. Pembentukan Paskibraka tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.098.696.473,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.1.270.865.002,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.033.136.999,- dengan capaian anggaran 65,04%. digunakan untuk Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Paskibraka pada tahun anggaran 2025 sebanyak 32 orang.

g. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 749.511.000,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.0,-. Capaian kinerja output 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan capaian anggaran 0%. digunakan untuk Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun anggaran 2025.

h. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 379.868.744,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.0,-. Capaian kinerja output 0% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan capaian anggaran 0%. digunakan untuk Pelaksanaan tugas

Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun anggaran 2025
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka



Pembentukan paskibraka



19. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

    Kegiatannya yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, sub kegiatannya sebagai berikut:

a. Penyusunan Program kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.19.511.700,-
   Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dengan persentase capaian anggaran sebesar 0% digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 terlaksana sebanyak 1 Dokumen.
b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.16.767.635,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.16.767.635,-
   Capaian kinerja output 30% dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.409.735,- dengan persentase capaian anggaran sebesar 26.30% dari pagu anggaran perubahan Rp.16.767.635,-digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 sebanyak 3 Dokumen.

c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4.082.026.833,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.2.894.066.833,- Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.119.389.683,- dengan persentase capaian anggaran sebesar 73,23% dari pagu anggaran perubahan Rp.2.894.066.833,- digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 100 Orang

Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula



d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.709.505.004,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.355.669.004,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.148.047.504,- atau sebesar 41,63%. digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 10 Orang.

e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.174.305.355,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada

anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp.88.603.355,-. Capaian kinerja output 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp.20.350.505,- atau sebesar 22,97%. digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 21 Laporan.

Koordinasi dan konsultasi ke dirjen polpum



Pemantauan dan himbauan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan ke partai politik



20. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatannya yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, sub kegiatannya sebagai berikut:
    a. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 76.946.000,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp. 100.268.000. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.786.000,- dengan capaian anggaran 91,54%. digunakan untuk Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2 dokumen.

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 52.789.000,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan sebesar Rp. 25.715.000. Capaian kinerja output 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dengan capaian anggaran 0%. digunakan untuk Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2 dokumen.

c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 319.841.000,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.278.809.000,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 209.208.730,- dengan capaian anggaran 75,09%. digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 kali pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas.

Sosialisasi Antisipasi Kerawanan Ormas Melalui Pembinaan Inklusif Guna Asta Cita Presiden RI



d. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 119.771.402,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.68.311.000 . Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.308.609,- atau 99,996%. digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 10 orang.

Koordinasi keberadaan penganut Kepercayaan kaharingan ke Badan Kesbangpol Kab. Banjar



e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 98.464.294,- dan pada APBD Perubahan menjadi Rp.45.259.772 .Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.239.522,- atau 86,70%. digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 10 laporan.

Monitoring keberadan Balai Adat Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru



21. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

    Kegiatannya yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, sub kegiatannya sebagai berikut:

    a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.49.958.000 dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 27.824.000,-. Capaian kinerja output 50% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.424.000,- atau 5,10% digunakan untuk Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 dokumen.

b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.51.863.000 dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 40.673.000,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.016.000,- atau 98,38% dari pagu anggaran perubahan. Digunakan untuk Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2 dokumen.

c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.304.713.000 dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 364.542.000,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 258.757.200,- atau 70,98% dari pagu anggaran perubahan, digunakan untuk Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 100 orang.

Sosialisasi P4GN PN Bagi Pelajar di Kelumpang Hilir



d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.315.150.000 dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 329.291.000,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 318.422.448,- atau 96,70 % dari pagu anggaran perubahan, digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 100 orang.

Koordinasi ke kantor BNNK Kabupaten Tanah Laut



e. Pelaksanaan Monitorin Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 145.792.612 dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp. 73.699.612,-. Capaian kinerja output 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.774.612,- atau 40,40% dari pagu anggaran perubahan, digunakan untuk Pelaksanaan Monitorin Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 4 laporan.

22. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Kegiatannya yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, sub kegiatannya sebagai berikut

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.694.316.620,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan menjadi Rp.536.602.820,-. Capaian kinerja output 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.360.546.290,- dengan capaian anggaran 67,19%. digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 20 orang.

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Kabupaten Kotabaru



b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.205.849.083,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp.273.411.363,- Capaian kinerja output 91,67% dan realisasi anggaran sebesar Rp.107.919.041,- dengan capaian anggaran 39,47%. digunakan untuk Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 20 orang.

c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.355.273.674,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp.181.700.674,- Capaian kinerja output 91,67% dan realisasi anggaran sebesar Rp.108.650.396,- dengan capaian anggaran 59,80%. digunakan untuk Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun anggaran 2025 sebanyak 20 laporan.

d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.2.425.007.717,- dan setelah dilakukan rasionaalisasi pada anggaran perubahan ditetapkan Rp.1.391.588.467,- Capaian kinerja output 75% dan realisasi anggaran sebesar Rp.320.679.060,- dengan capaian anggaran 23,04%. digunakan untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan yaitu Jumlah

Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 dokumen.



Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Kabupaten Kotabaru

Sasaran 9: Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan sebagai komitmen nyata dalam mewujudkan birokrasi yang modern, transparan, dan efisien. Fokus utama sasaran ini adalah mentransformasi proses kerja manual menjadi berbasis digital yang terintegrasi, guna memangkas sekat birokrasi serta mempercepat akses layanan publik bagi seluruh masyarakat "Bumi Saijaan". Keberhasilan sasaran ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memotret kematangan tata kelola internal, serta Indeks Pemerintah Digital (PemDi) yang merepresentasikan kesiapan ekosistem digital daerah secara menyeluruh.

Dalam periode pelaporan ini, terjadi transisi instrumen pengukuran kinerja digital seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama yang mengarahkan evolusi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks PemDi). Perubahan ini menggeser paradigma dari yang semula berfokus pada pembangunan aplikasi mandiri oleh masing-masing perangkat daerah, menjadi fokus pada keterpaduan layanan digital nasional,

interoperabilitas data, dan penghapusan aplikasi-aplikasi yang tumpang tindih demi efisiensi anggaran.

Capaian kinerja digitalisasi di Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang positif, meskipun tantangan integrasi data masih terus dioptimalkan. Langkah strategis yang telah diambil meliputi penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan literasi digital aparatur, serta konsolidasi aplikasi layanan publik ke dalam portal yang lebih terpusat. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Kotabaru akan terus memperkuat sinkronisasi antara capaian Indeks SPBE dan Indeks PemDi guna memastikan bahwa digitalisasi bukan sekadar pemenuhan standar administratif, melainkan instrumen utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan akuntabel.

Tabel II.27
Capaian Indeks SPBE

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks SPBE	Indeks	2,43	2,60	2,43*	93,46%	0	0%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks SPBE tahun 2025 terealisasi sebesar 2,43* apabila dibandingkan dengan target 2,60 sehingga capaiannya sebesar 93,46% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks SPBE realisasinya mencapai 2,43* angka ini mengalami tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 terealisasi sebesar 2,43* apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0 sehingga capaian sebesar 0%, karena Indeks SPBE beralih menjadi Indeks Pemerintah Digital.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks SPBE, sebagai berikut:

1. Adanya regulasi setingkat Peraturan Bupati (Perbup) mengenai SPBE yang menunjukkan dasar hukum formal sudah terbentuk.
2. Kepemilikan pusat data (Data Center) atau penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah mulai terintegrasi.
3. Adanya beberapa aplikasi unggulan di sektor perizinan atau kependudukan yang sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks SPBE, sebagai berikut:

1. Banyak aplikasi yang berdiri sendiri antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tidak saling "berbicara" (kurangnya integrasi/interoperabilitas).
2. Kurangnya tenaga ahli spesifik seperti data scientist, security analyst, atau arsitek sistem informasi di tingkat kabupaten

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam mengakselerasi transformasi digital melalui penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan aman. Sebagai langkah adaptif terhadap regulasi terbaru, pemerintah daerah melakukan penyesuaian parameter kinerja dengan mengacu pada Indeks Pemerintah Digital sebagai standar baru dalam mengukur kedewasaan digital birokrasi. Upaya ini dipertajam melalui strategi konsolidasi aplikasi di seluruh jajaran OPD guna meminimalisir pemborosan anggaran serta menghilangkan tumpang tindih data. Dengan melakukan simplifikasi sistem aplikasi, Kabupaten Kotabaru berupaya menciptakan arsitektur data yang tunggal dan akurat, sehingga pelayanan publik digital dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Guna menjamin keberlangsungan layanan digital, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menaruh perhatian besar pada aspek keamanan siber dan penguatan sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan tim keamanan informasi yang bertugas melakukan mitigasi risiko secara proaktif dan menjaga integritas data pemerintah dari berbagai ancaman siber. Selain penguatan infrastruktur dan sistem, pemerintah

daerah juga melakukan terobosan dalam pemenuhan talenta digital dengan membuka peluang bagi tenaga ahli spesifik, seperti data scientist, security analyst, hingga arsitek sistem informasi. Langkah strategis dalam merekrut tenaga ahli profesional ini diharapkan mampu memperkuat fondasi teknis daerah, sehingga implementasi SPBE di Kabupaten Kotabaru tidak hanya sekadar digitalisasi dokumen, tetapi bertransformasi menjadi pemerintahan cerdas yang berbasis pada analisis data yang presisi dan keamanan sistem yang tangguh.

Tabel II.28
Capaian Indeks Pemerintah Digital

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0	0	0	0%	1,50	0%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pemerintah Digital tahun 2025 terealisasi sebesar 0 apabila dibandingkan dengan target 0 sehingga capaiannya sebesar 0% yang dikategorikan ***Sangat Rendah***

Pada tahun 2025, Indeks Pemerintah Digital realisasinya mencapai 0 angka ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024 karena nilai indeks tersebut belum berlaku secara resmi.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Pemerintah Digital tahun 2025 terealisasi sebesar 0 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 1,50 sehingga capaian sebesar 0% karena nilai indeks tersebut belum dikeluarkan secara resmi pada tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru saat ini tengah melaksanakan langkah adaptif dalam transformasi birokrasi melalui transisi pengukuran kinerja dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi

Indeks Pemerintah Digital (IPMD). Peralihan ini didasarkan pada mandat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menginstruksikan pergeseran fokus dari sekadar penyediaan aplikasi menuju penguatan ekosistem digital yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna. Dalam rangka memenuhi standar baru tersebut, pemerintah daerah melakukan kebijakan konsolidasi aplikasi secara menyeluruh untuk mengeliminasi tumpang tindih data serta menghindari pemborosan anggaran, sehingga tercipta arsitektur digital daerah yang lebih ramping, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Guna memperkuat fondasi Pemerintah Digital yang aman dan profesional, Kabupaten Kotabaru juga memprioritaskan peningkatan mitigasi risiko melalui pembentukan tim keamanan informasi yang bertugas menjaga integritas data pemerintah dari ancaman siber. Selain penguatan sistem, pemerintah daerah melakukan langkah strategis dalam pemenuhan talenta digital dengan membuka ruang bagi tenaga ahli spesifik, seperti data scientist, security analyst, dan arsitek sistem informasi guna memastikan keberlanjutan inovasi. Melalui kombinasi penyesuaian regulasi, konsolidasi infrastruktur, dan pemenuhan SDM ahli ini, Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk meningkatkan nilai IPMD secara signifikan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan cerdas yang mampu memberikan layanan publik berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat.

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 9 (sembilan) yaitu Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
    a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan nama domain pemerintah daerah

(misalnya kotabarukab.go.id) beserta subdomain perangkat daerah, sesuai ketentuan pemerintah pusat.



b. Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, integrasi, dan pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/*e-Government*) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (DISKOMINFO)

Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan, penyebarluasan, serta pelayanan informasi publik, termasuk penguatan hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, guna mewujudkan transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik.



Sasaran 10: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Intergritas Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil (result-oriented government). Sasaran ini merupakan perwujudan komitmen daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, digunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi standar nasional kredibilitas pemerintah daerah, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pencapaian Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana efektivitas manajemen kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan di setiap perangkat daerah Kabupaten Kotabaru. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa telah terjadi sinkronisasi yang kuat antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan implementasi program di lapangan,

sehingga meminimalkan program yang tidak tepat sasaran (mubazir). Sejalan dengan itu, perolehan Opini BPK (khususnya target Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi bukti integritas dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah. Hal ini mengonfirmasi bahwa standar akuntansi pemerintahan telah dipatuhi secara konsisten, sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Tabel II.29
Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Nilai Sakip	Predikat	61,78 (B)	63,00 (B)	64,80 (B)	102,85%	72 (BB)	90%

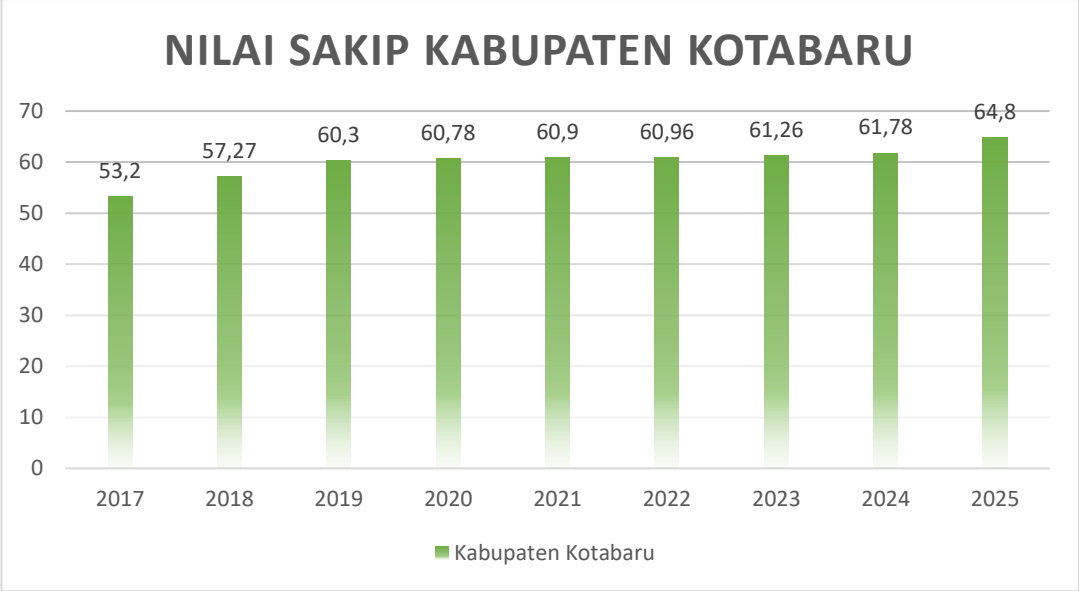
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi sebesar 64,80 (B) apabila dibandingkan dengan target 63,00 (B) sehingga capaiannya sebesar 102,85% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Nilai SAKIP realisasinya mencapai 64,80 (B) angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,02 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 61,78 (B).

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi sebesar 64,80 (B) apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 72,00 (BB) sehingga capaian sebesar 90%.

Grafik II.25
Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru Tahun 2017-2025.

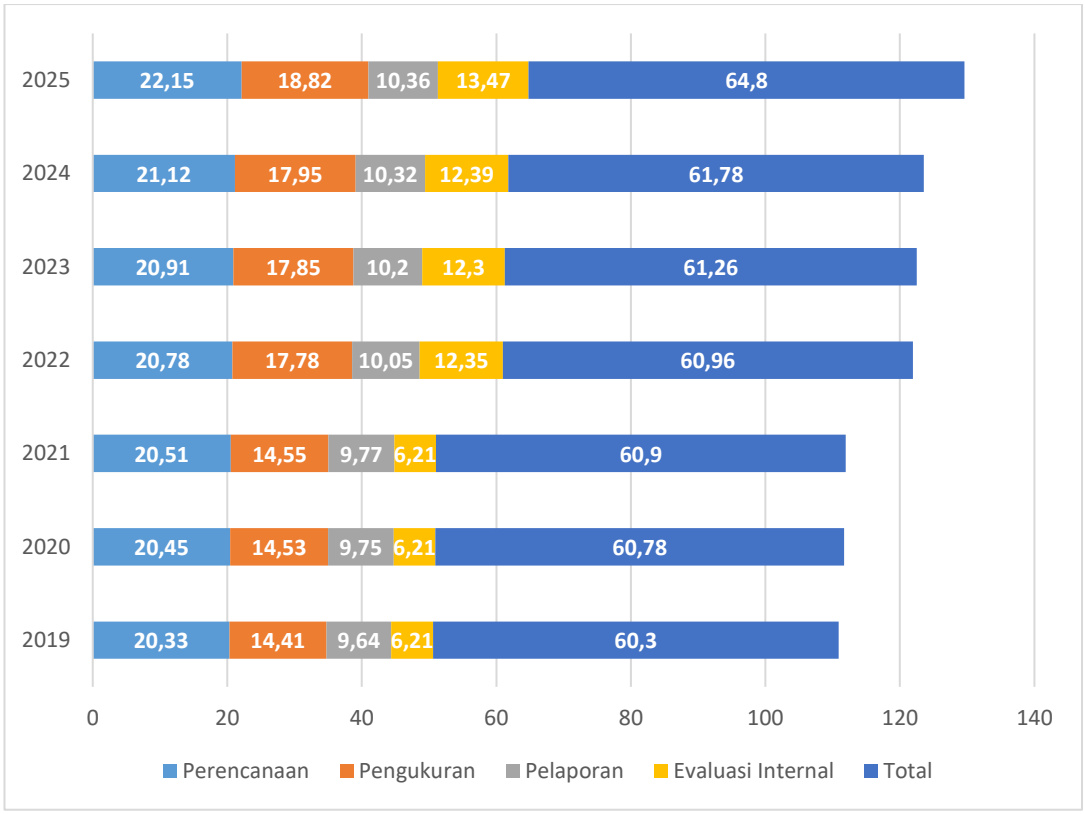


Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan MenpanRB, 2026.

Berdasarkan grafik diatas, perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten dalam periode tahun 2017 hingga 2025. Dimulai dari angka 53,2 pada tahun 2017, nilai ini mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya hingga mencapai nilai sebesar 64,8 pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada periode awal antara tahun 2017 ke 2019, sementara pada tahun-tahun berikutnya kenaikan terjadi secara gradual namun tetap menunjukkan performa yang positif dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rincian Nilai Komponen SAKIP Yang Dinilai berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana terlampir pada grafik berikut:

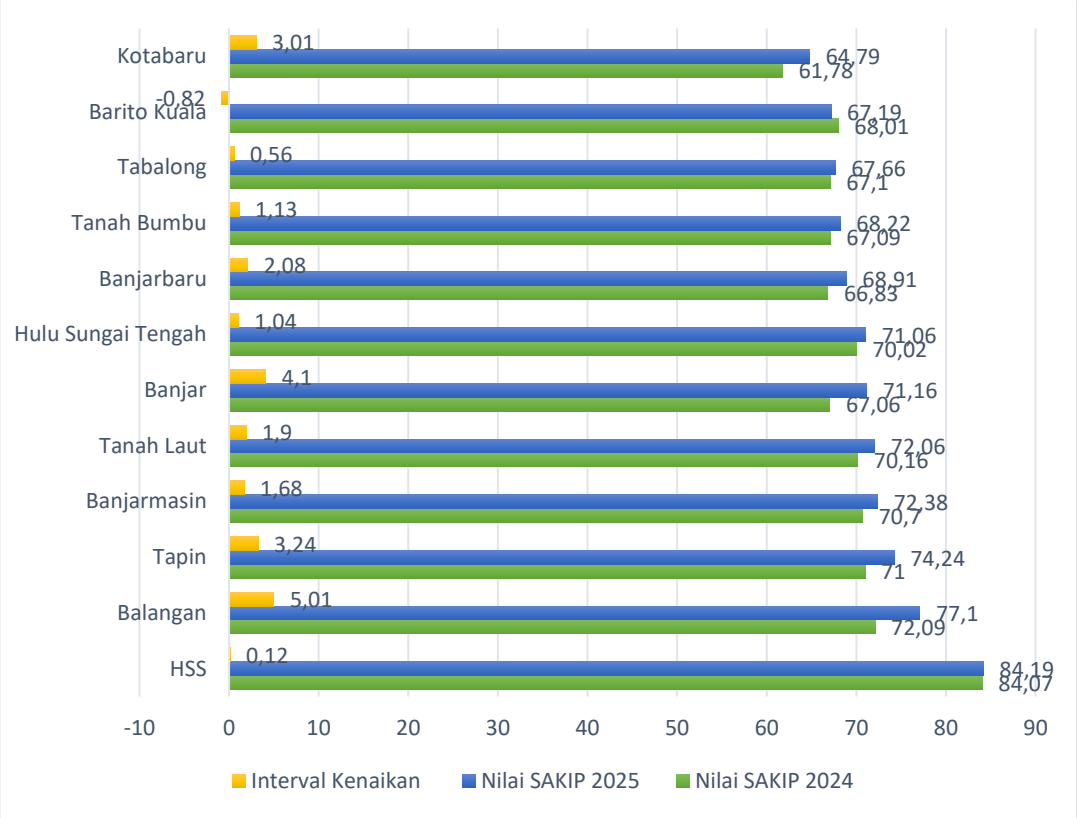
Grafik II.26
Perkembangan Nilai Komponen SAKIP Tahun 2019 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan MenpanRB,2026.

Berdasarkan tren data yang disajikan, Berdasarkan rincian data pada grafik, perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Kotabaru dari tahun 2019 hingga 2025 menunjukkan tren penguatan yang konsisten di seluruh lini penilaian. Keberhasilan ini didorong oleh kontribusi komponen Perencanaan yang meningkat hingga mencapai 22,15, komponen Pengukuran sebesar 18,82, komponen Pelaporan yang stabil di angka 10,36, serta lonjakan signifikan pada komponen Evaluasi Internal yang diproyeksikan menyentuh angka 13,47 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, akumulasi peningkatan dari keempat komponen tersebut membawa nilai total SAKIP Kabupaten Kotabaru pada titik tertinggi sebesar 64,8 di tahun 2025. Capaian ini menjadi kesimpulan penting bahwa transformasi manajemen kinerja di daerah tersebut telah berjalan secara komprehensif dan terukur menuju tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.

Grafik II.27
Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten dan Kota
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan MenpanRB, 2026.

Berdasarkan grafik dijelaskan bahwa Kabupaten Kotabaru menunjukkan performa yang cukup progresif dengan mencatatkan kenaikan nilai SAKIP yang signifikan sebesar 3,01 poin, meningkat dari skor 61,78 pada tahun 2024 menjadi 64,79 di tahun 2025. Meskipun secara posisi administratif berada di urutan terakhir dalam daftar ini, tren pertumbuhan Kotabaru merupakan salah satu yang paling kompetitif dibandingkan daerah lainnya, membuktikan adanya upaya perbaikan manajemen kinerja yang serius di lingkungan pemerintah daerah. Kesimpulannya, Kotabaru sedang berada dalam jalur penguatan akuntabilitas yang positif, namun tetap memerlukan akselerasi yang lebih konsisten agar dapat mengejar ketertinggalan nilai dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan yang rata-rata sudah menyentuh angka di atas 67 hingga 70.

Tabel II.30
Nilai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup OPD Tahun 2025

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	81,5	A

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
2	Dinas Perikanan	81,5	A
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,85	BB
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	78,15	BB
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75,45	BB
6	Inspektorat	75,15	BB
7	Sekretariat Daerah	74,85	BB
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	73,95	BB
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	73,95	BB
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73,65	BB
11	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	73,5	BB
12	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	73,3	BB
13	Dinas Sosial	73,2	BB
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu	72,65	BB
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,55	BB
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72,45	BB
17	Dinas Lingkungan Hidup	72,3	BB
18	Badan Pendapatan Daerah	70,65	BB
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70,35	BB
20	Dinas Kesehatan	70,25	BB
21	Dinas Perhubungan	70,2	BB
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66,55	B
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,35	B
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	66,1	B
25	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	64,6	B
26	Sekretariat DPRD	62,85	B
27	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertanahan	61	B
28	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	51,7	CC

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data Inspektorat Kabupaten, 2026.

Berdasaran tabel diatas, proses evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) difokuskan pada empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi menunjukkan sebaran capaian yang cukup variatif, di mana dua instansi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Perikanan berhasil meraih nilai tertinggi sebesar 81,5 dengan predikat A (Sangat Memuaskan). Dominasi capaian terlihat pada predikat BB (Sangat Baik) yang diraih oleh 19 OPD, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (79,85) hingga Dinas Perhubungan (70,2). Namun, masih terdapat 6 OPD yang berada pada kategori predikat B (Baik), dan 1 OPD yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang masih memperoleh predikat CC (Cukup) dengan nilai 51,7.

Secara keseluruhan, kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Kabupaten Kotabaru menunjukkan tren yang positif dengan mayoritas instansi (75%) telah mencapai kategori BB ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di sebagian besar OPD sudah berjalan secara sistematis dan selaras dengan tujuan daerah.

Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan pendampingan berkelanjutan dari Inspektorat, terutama bagi OPD yang masih berpredikat B dan CC. Fokus perbaikan harus diarahkan pada sinkronisasi indikator kinerja utama serta kualitas evaluasi internal agar seluruh perangkat daerah mampu berkontribusi lebih optimal terhadap peningkatan nilai SAKIP Kabupaten secara kolektif.

Tabel II.31
Nilai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lingkup Kecamatan
Tahun 2025

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
1	Pulau Laut Utara	76.50	BB
2	Pulau Laut Sigam	74.00	BB
3	Pulau Laut Tengah	61.85	B
4	Pulau Laut Timur	61.85	B

NO	NAMA OPD	NILAI APIP	PREDIKAT
5	Pulau Sebuku	61.85	B
6	Pulau Sembilan	61.85	B
7	Sampanahan	61.85	B
8	Sungai Durian	61.85	B
9	Pulaulaut Tanjung Selayar	61.85	B
10	Pulau Laut Kepulauan	61.85	B
11	Pulaulaut Barat	61.85	B
12	Pamukan Utara	61.85	B
13	Pamukan Selatan	61.85	B
14	Pamukan Barat	61.85	B
15	Kelumpang Utara	61.85	B
16	Kelumpang Tengah	61.85	B
17	Kelumpang Selatan	61.85	B
18	Kelumpang Hulu	61.85	B
19	Kelumpang Hilir	61.85	B
20	Kelumpang Barat	61.85	B
21	Hampang	61.85	B
22	Pulau Laut Selatan	61.73	B

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan data Inspektorat Kabupaten, 2026.

Berdasarkan data tersebut, profil capaian kinerja di tingkat kecamatan menunjukkan pemusatan nilai yang sangat signifikan. Terdapat dua kecamatan yang berhasil menonjol dengan predikat BB (Sangat Baik), yaitu Pulau Laut Utara dengan nilai tertinggi 76,50 dan Pulau Laut Sigam dengan nilai 74,00.

Namun, fenomena yang menarik terlihat pada sisa 20 kecamatan lainnya, di mana mayoritas besar (19 kecamatan) memiliki nilai yang identik di angka 61,85 dengan predikat B (Baik). Hanya Pulau Laut Selatan yang memiliki sedikit selisih tipis di angka 61,73, namun tetap berada pada kategori predikat B. Kesamaan nilai yang dominan ini mengindikasikan adanya standar kualitas implementasi SAKIP yang setara di tingkat kewilayahan, namun sekaligus menunjukkan adanya ruang yang luas untuk diferensiasi dan peningkatan kualitas dokumen kinerja antar-kecamatan.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Kualitas pohon kinerja di level Pemerintah Daerah dinilai telah cukup baik, ditandai dengan penetapan Critical Success Factor (CSF) yang relevan untuk mencapai hasil akhir (ultimate outcome). Ini memudahkan penarikan benang merah sasaran dalam laporan kinerja.
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebenarnya sudah difasilitasi dengan aplikasi manajemen kinerja untuk pelaporan progres, yang jika dioptimalkan, akan sangat membantu penyediaan data LKJIP secara real-time dan akurat

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Nilai SAKIP, sebagai berikut:

1. Pada dokumen laporan kinerja, analisis mengenai faktor pendorong dan penghambat tercapainya kinerja tidak disampaikan secara lengkap dan kurang mendalam. Kebanyakan laporan justru hanya berisi penjelasan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
2. Satuan pada beberapa indikator kinerja belum dirumuskan dengan jelas, dan banyak indikator belum mendefinisikan sumber datanya dengan pasti. Hal ini menyulitkan evaluasi dan menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menghitung capaian kinerja yang akan dilaporkan
3. Pengukuran kinerja secara periodik dan berjenjang belum dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat Daerah yang tidak melaporkan progres capaian kinerja triwulanan pada aplikasi manajemen kinerja, sehingga menyulitkan rekapitulasi data historis untuk penyusunan LKJIP tahunan. dokumen laporan kinerja dengan menyampaikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara detail. Analisis ini krusial untuk dijadikan dasar merumuskan solusi atau mempertahankan strategi guna meningkatkan capaian kinerja di masa depan.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya akan melakukan penyempurnaan teknis dan peningkatan komitmen yang lebih mendalam pada beberapa aspek. Sebagai langkah

strategis menuju predikat yang lebih tinggi, pemerintah daerah mewajibkan setiap dokumen pelaporan untuk menyertakan informasi benchmarking terhadap indikator capaian kinerja tertentu. Dengan membandingkan capaian daerah terhadap level nasional, provinsi, maupun daerah sekitar, diharapkan tercipta gambaran keberhasilan pembangunan yang lebih objektif dan kompetitif sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data.

Dalam upaya memperkuat validitas pelaporan, dilakukan pula pembenahan pada aspek administrasi kinerja dengan memperjelas satuan ukur pada seluruh indikator agar lebih spesifik dan konsisten di setiap jenjang. Seluruh indikator kinerja kini wajib dilengkapi dengan definisi sumber data yang jelas serta mekanisme pengumpulan data yang terstandarisasi untuk menjamin akuntabilitas informasi yang disajikan. Lebih jauh lagi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menekankan peningkatan komitmen berjenjang, mulai dari kepala perangkat daerah hingga level staf, untuk melaksanakan pengukuran kinerja periodik secara disiplin. Melalui pendekatan ini, identifikasi terhadap kendala dan hambatan pembangunan dilakukan secara real-time di setiap periode berjalan, bukan sekadar menjadi evaluasi di akhir tahun, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran demi peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kotabaru.

Tabel II.32
Capaian Opini BPK

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*	100%*	WTP	100%*

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Opini BPK tahun 2025 terealisasi sementara WTP* apabila dibandingkan dengan target WTP sehingga capaiannya sebesar 100% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Opini BPK realisasinya sementara WTP dan ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Opini BPK tahun 2025 terealisasi sementara WTP* apabila dibandingkan dengan target RPJMD yaitu WTP sehingga capaian sebesar 100%.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Opini BPK, sebagai berikut:

1. Adanya kemauan kuat dari Bupati dan jajaran kepala SKPD untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
2. Penggunaan sistem terintegrasi yang meminimalisir kesalahan input manual dan mempercepat konsolidasi data
3. Peran aktif Inspektorat dalam melakukan review laporan keuangan sebelum diserahkan ke BPK, sehingga temuan-temuan kecil dapat diperbaiki lebih awal.
4. Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Mengadakan workshop berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Opini BPK, sebagai berikut:

1. Kecepatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya
2. Penyesuaian terhadap aturan baru dari Kementerian Keuangan atau Kemendagri yang terkadang membutuhkan waktu adaptasi teknis di lapangan

Bila dibandingkan dengan target WTP maka pencapaian dari Opini BPK sebesar 100%. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian terhadap indikator Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2016 sampai dengan 2025 mendapatkan predikat WTP secara terus menerus. Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mempertahankan predikat WTP, yaitu:

1. Memperketat pengawasan internal di setiap SKPD agar kesalahan administratif tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
2. Mengadakan workshop berkala bagi bendahara dan pengelola barang, khususnya mengenai pemutakhiran standar akuntansi.
3. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD fungsi akuntansi dan pelaporan terkait data penerimaan kas dan pengeluaran kas.
4. Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data aset, kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
5. Mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Pemda Kabupaten Kotabaru dan input saldo awal Laporan Keuangan.
6. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru.
7. Melaksanakan input saldo awal Laporan Keuangan SKPD Tahun ini dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan.
8. Melaksanakan pembinaan terhadap BLUD.

Sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil mendapatkan Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Sembilan tahun berturut-turut dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2015-2025*.

Tabel.33
Opini BPK RI Perwakilan Kalsel T.A 2015-2025*
Kabupaten Kotabaru

NO.	TAHUN	NO. SURAT	OPINI BPK
1	2015	04.B/LHP/XIX.BJM/05/2017	WTP
2	2016	04.B/LHP/XIX.BJM/05/2017	WTP
3	2017	3.b/S-LHP/XIX.BJM/05/2018	WTP
4	2018	14.b/S-LHP/XIX.BJM/05/2019	WTP
5	2019	9.b/ S-LHP/XIX.BJM/06/2020	WTP
6	2020	6b/S-LHP/XIX.BJM/05/2021	WTP
7	2021	6.B/LHP/XIX.BJM/05/2022	WTP
8	2022	11.B/LHP/XIX.BJM/05/2023	WTP
9	2023	6.b/ S-LHP/XIX.BJM/05/2024	WTP
10	2024	10.B/LHP/XIX.BJM/05/2025	WTP
11	2025	*(data resmi belum diterbitkan)*	WTP*

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024, Kabupaten Kotabaru kembali meraih predikat WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 10.B/LHP/XIX.BJM/05/2025. Capaian ini menjadi landasan kuat bagi penyusunan LKjIP Tahun 2025, di mana pemerintah daerah memproyeksikan keberlanjutan predikat WTP (WTP*) melalui penguatan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu. Konsistensi perolehan opini WTP selama sebelas tahun terakhir ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memastikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 10 (delapan) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Pemerintahan:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

   Kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah adalah kegiatan Penataan Organisasi pada tahun 2025 mempunyai anggaran sebesar Rp1.063.511.660,00 dengan Realisasi Rp907.233.114,00 atau 85,31% dengan tingkat efisiensi sebesar 117,30 %

Faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terintegrasi dengan sasaran strategis.
b. Meningkatnya konsistensi dalam pelaporan kinerja secara periodik.
c. Koordinasi antarperangkat daerah mulai membaik dalam mendukung pencapaian sasaran SAKIP.

Dalam mendukung program tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

a. Melaksanakan Melaksanakan koordinasi ke SKPD dan kecamatan terkait monitoring dan evaluasi penyusunan laporan kinerja SKPD dan kecamatan






b. Melaksanakan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Kecamatan Kabupaten Kotabaru



c. Melaksanakan FGD dalam penyusunan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah untuk OPD dan kecamatan





d. Melaksanakan rapat koordinasi dan persamaan persepsi





e. Evaluasi SAKIP bersama dengan MenPANRB yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD





f. Melaksanakan asistensi penyusunan LKjIP





g. Melaksanakan evaluasi LkjIP bersama dengan Inspektorat



h. Melaksanakan koordinasi LKjIP dengan Biro Organisasi Prov Kalsel









i. Melaksanakan asistensi tindak lanjut evaluasi SAKIP TW2 bersama MenPANRB





2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

   Kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahu 2025 yang mempunyai anggaran sebesar Rp4.199.903.500,00 dengan Realisasi Rp3.147.022.290,00 atau 74,94% dengan tingkat efisiensi sebesar 130,58%.

   Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2025 terealisasi pada Level 3 dengan nilai 86,91, melampaui target Tahun 2025 sebesar Level 3 (80), dengan tingkat capaian kinerja sebesar 115,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa telah mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kelembagaan, proses, maupun penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

   Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar Level 3 (75,03), capaian Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, yang mencerminkan keberhasilan dalam penguatan sistem pengadaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik.

   Faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

   a. Penguatan kelembagaan dan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
   b. Peningkatan kompetensi SDM pengadaan melalui sertifikasi dan pembinaan berkelanjutan.
   c. Optimalisasi penggunaan sistem pengadaan elektronik dan e-katalog.
   d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian proses pengadaan

3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 4.312.948.250 dengan realisasi sebesar Rp. 4.102.292.983, atau tingkat serapan keuangan sebesar 95.12%.

   Dari sisi kinerja, capaian indikator menunjukkan hasil sangat baik, yaitu:

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (Target 100%, Realisasi 100%).
b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Target 100%, Realisasi 100%).
c. Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target (Target 65%, Realisasi 83,33%, capaian kinerja 128%).

Realisasi indikator prioritas pembangunan yang melampaui target menunjukkan efektivitas proses pengendalian dan evaluasi pembangunan. Konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan juga tercapai secara penuh, yang mencerminkan tata kelola perencanaan yang sistematis dan terintegrasi.

FOTO	PENJELASAN
ASISTENSI SAKIP KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 	Kotabaru, Sabtu 30 Agustus 2025 melalui Bapperida Kabupaten Kotabaru melaksanakan tindak lanjut Perbaikan SAKIP yaitu Asistensi SAKIP Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 antara seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kotabaru dengan Asesor dari Kementerian PAN & RB melalui Zoom Meeting di Kantor masing-masing. Acara dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kotabaru dan menyampaikan agar seluruh Perangkat Daerah berkomitmen dalam Upaya peningkatan Nilai SAKIP di Kabuaten Kotabaru. Pelaksanaan Asistensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kabupaten Kotabaru dan menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting dibagi menjadi 3 kelas dan didampingi Kemenpan RB dengan melakukan perbaikan isi Pohon Kinerja berserta indikatornya SKPD dalam aplikasi E-Sakip Pro, Kemenpan RB membantu perbaikan indicator kinerja lebih spesifik, terukur dan relevan dengan visi Pembangunan daerah. Asistensi mencakup peninjauan ulang terhadap tujuan, sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

FOTO	PENJELASAN
Rapat Penyelarasan Renstra dan E-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 	Selasa, 02 September 2025, diselenggarakan Rapat Penyelarasan Renstra dan E-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru di Ruang Rapat Zona Kolaborasi Lt. 3 Bapperida Kabupaten Kotabaru. Rapat Penyelarasan Renstra dan e-Sakip Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru di buka oleh Kepala Bapperida yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bersama Tim Sakip dari Bapperida Kabupaten Kotabaru yang mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah kabupaten kotabaru berkomitmen untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi perbaikan dari Tim Kemenpan RB. Dalam rangka menindaklanjuti hasil asistensi SAKIP dengan Kemenpan RB maka dilakukan rapat yang didampingi oleh Tim Pengembangan aplikasi e-Sakip Pro yang dipimpin oleh Bapak Andi Erwing dari Pusbangsim melelui Zoom Meeting. Rapat dilaksanakan menyelaraskan hasil inputan dalam aplikasi e-Sakip Pro dengan Renstra yang berfokus pada teknis apliaksi e-Sakip Pro mulai dari memperbaiki POhon Kinerja, memperbaiki indicator kinerja disertai target Triwulan (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan), Tagging Perangkat Daerah dan Kabupaten, Perjanjian Kinerja hingga Renaksi.
Rapat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 dilaksanakan Selasa, 06 Mei 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru Lt. III. Peserta kegiatan yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, Unsur Vertikal di Kabupaten Kotabaru. Hasil yang di capai yaitu yang tercantum dalam berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029.

FOTO	PENJELASAN
 	BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025-2029 Pada hari Selasa Tanggal 06 Bulan Mei Tahun 2025 bertempat di Gedung Bappeda Kabupaten Kotabaru, telah diselenggarakan Musrenbang RPJMD Kabupaten yang dihadiri oleh perangkat kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan memperhitungkan : • Sambutan-sambutan dengan materi yang disampaikan oleh para Pembicara dan Narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029; • Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RPJMD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber sebagaimana telah diuraikan, maka pada: Hari, Tanggal : Selasa, 06 Mei 2025 Jam : 08.00 WITA Tempat : Gedung Bappeda Kabupaten Kotabaru , Sebelumnya Seluruh peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru MENYEPAKATI KESATU : rancangan Visi dan Misi jangka menengah daerah, dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini KEDUA : rancangan program prioritas dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini. KETIGA : Perbaikan Rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. KEEMPAT : Hasil dari Musrenbang RPJMD Kabupaten ini sebagai bahan pertimbangan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2029. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kotabaru, 06 Mei 2025 Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pimpinan rapat musrenbang RPJMD Kabupaten Kotabaru H. ERY SAFRUDIN, AP., M.AP Berita Acara Musrenbang Hal - 1 - dari 5

FOTO	PENJELASAN
Rapat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025   	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dilaksanakan Kamis, 17 April 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru Lt. III. Peserta kegiatan yaitu seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, Unsur Vertikal di Kabupaten Kotabaru. Hasil yang di capai yaitu yang tercantum dalam berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.  BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 Pada hari Kamis Tanggal 17 Bulan April Tahun 2025 bertempat di Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru, telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : • Sambutan-sambutan dengan materi yang disampaikan oleh para Pembicara dan Narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025; • Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing narasumber sebagaimana telah diuraikan, maka pada: Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025 Jam : 09.00 WITA Tempat : Gedung Bapperida Kabupaten Kotabaru , Sebelimbingan Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru MENYEPAKATI KESATU : Perbaikan Rancangan RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. KEDUA : Hasil dari Musrenbang RKPD Kabupaten ini sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2026. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kotabaru, 17 April 2025 Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD Kabupaten Kotabaru HUSKA SABRUDIN, AP, M.AP

4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 4.621.723.850 dengan

realisasi sebesar Rp. 3.851.333.004, atau tingkat serapan keuangan sebesar 83.33%.

Dari sisi kinerja, capaian indikator menunjukkan hasil baik, yaitu:

a. Keselarasan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan (Target 100%, Realisasi 100%).
b. Keselarasan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (Target 100%, Realisasi 100%)..
c. Keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Target 100%, Realisasi 100%)..

Capaian ini menunjukkan bahwa proses koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi dokumen perencanaan berjalan optimal. Meskipun tingkat serapan anggaran relatif moderat, substansi keselarasan dokumen tetap tercapai sepenuhnya sehingga mendukung integrasi perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

FOTO	PENJELASAN
Rapat Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 	Pelaksanaan Rapat Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstr) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada Jum'at, 12 September 2025, pukul 09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru. Tujuan Rapat Adalah untuk memastikan kualitas keselarasan dan kepatuhan Dokumen Renstra Perangkat Daerah terhadap kaidah perencanaan yang berlaku sebelum memasuki tahapan penetapan akhir Renstra Perangkat Daerah.

FOTO	PENJELASAN
Rapat Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025  	Pelaksanaan Rapat Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 05 Agustus 2025, pukul 08.30 Wita, bertempat di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru. Tujuan Rapat adalah untuk memastikan kualitas keselarasan, kepatuhan sesuai Sistematika Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah terhadap dokumen RKPD, Renstra serta sesuai kaidah perencanaan yang berlaku sebelum memasuki tahapan penetapan Renja Perangkat Daerah.

5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ini didukung pagu anggaran sebesar Rp. 10.955.863.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.300.042.749, atau tingkat serapan keuangan 94.01%.

Capaian indikator kinerja menunjukkan hasil sangat baik, yaitu:

a. Persentase rekomendasi hasil riset yang digunakan dalam dokumen perencanaan/pelaksanaan (Target 65%, Realisasi 67%, capaian 103%).

b. Persentase kajian berbasis bukti yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (Target 100%, Realisasi 100%).

c. Persentase fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Daerah (Target 100%, Realisasi 100%).

d. Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (Target 65%, Realisasi 67%, capaian 103%).

Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Optimalisasi pemanfaatan hasil riset serta fasilitasi HKI memperkuat daya saing dan inovasi daerah

FOTO	PENJELASAN
PRESENTASI INOVASI KABUPATEN KOTABARU 	Kotabaru, Selasa, 09 September 2025 melalui Bapperida Kabupaten Kotabaru melaksanakan Presentasi Inovasi sebagai bagian dari Lomba Inovasi yang diikuti oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. **A. Agenda Kegiatan:** a. Pembukaan dan Laporan Panitia Pelaksana b. Sesi Paparan/Presentasi Akhir oleh SKPD Peserta Lomba c. Sidang Pleno Penilaian oleh Dewan Juri d. Pengumuman dan Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 **B. Pembukaan dan Peserta** Kegiatan dibuka secara resmi dengan tujuan untuk memberikan apresiasi bagi Perangkat Daerah yang telah menciptakan terobosan dalam pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan

FOTO	PENJELASAN
	Lomba Diikuti oleh SKPD yang telah lolos seleksi administrasi antara lain: Dinas Kesehatan, Bapperida, BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar dan Dinas Pendidikan. **C. Sesi Paparan dan Inovasi** Masing-masing peserta mempresentasikan inovasi unggulannya dihadapan Dewan Juri. Aspke yang dinilai meliputi : kebaruan (novelly), kemanfaatan, dampak bagi Masyarakat, keberlanjutan dan kompabilitas system. Inovasi masing-masing peserta antara lain: **Dinas Kesehatan** : Amplang Saijaan **Bapperida** : Aksa Buwana Saijaan **Dinas Lingkungan Hidup** : EKSIS dan Berakar **BKPSDM** : SIMPEG **Dinas Pendidikan** : Akses **Disdukcapil** : Bakiak **Satpol PP & Damkar** : Sigap Damkar **Dinas Sosial** : TRC Todhak **D. Penilaian** Dewan Juri melakukan rekapitulasi nilai berdasarkan

FOTO	PENJELASAN
	bobot proposal, Paparan, dan Bukti Dukung inovasi. Diputuskan urutan pemenang berdasarkan skor tertinggi pada aspek dampak dan efektifitas Inovasi **E. Penetapan Pemenang** Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, ditetapkan pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebagai berikut : **Juara 1 :** Dinas Kesehatan dengan nama Inovasi : **Amplang Saijaan** (Antar Jemput Pasien Langsung yang Sakit Jiwa ke Pasyankes) **Juara 2** : Bapperida dengan Nama INovasi : **Aksa Buwana Saijaan** (Mengawasi Bumi Saijaan) **Juara 3** : Dinas Lingkungan Hidup dengan nama Inovasi **EKSIS** (Teknik Ekonomi Sirkular Melalui Pengolahan Sampah di TPSR Reko) **Juara Harapan 1 :** BKPSDM dengan nama Inovasi **SIMPEG** **Juara Harapan 2 : Dinas Pendidikan** dengan nama Inovasi **AKSES**

FOTO	PENJELASAN
	Juara Harapan 3 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nama Inovasi **BAKIAK** **F. Kesimpulan** **Pemberian Penghargaan :** Penyerahan Trofi dan piagam penghargaan akan dilaksanakan dikemudian hari. **Rekomendasi Tindak lanjut** : Para pemenang (khususnya juara 1,2 dan 3) akan direkomendasikan dan dibina lebih lanjut untuk mewakili Kabupaten Kotabaru dalam kompetisi Tingkat Provinsi (Kalsel Innovation Award) dan tingkat nasional (Innovation Government Award/IGA Kemendagri). **Replikasi :** SKPD lain didorong mereplikasi atau mengadopsi prinsip-prinsip inovasi dari para pemenang guna peningkatan kinerja organisasi.

FOTO	PENJELASAN
	Banjarbaru, Senin, 21 April 2025, di ruang Pertemuan BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru melalui Bapperida Kabupaten Kotabaru Bersama dengan BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Pendampingan untuk Menyusun proposal Inovasi Daerah di Kabupaten Kotabaru. Pertemuan dihadiri 9 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mendapat pendampingan penyusunan Proposal Inovasi dan Pengisian Indikator Inovasi. Pelaksanaan pendampingan bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan tentang cara penyusunan Proposal Inovasi dan tata cara pengisian indicator serta komponen apa saja yang terdapat dalam Proposal inovasi dimaksud.
Rapat Ekspose Laporan Akhir Kajian Tahun 2025 	Pelaksanaan Rapat Ekspose Laporan Akhir Kajian Tahun 2025 dilaksanakan pada Selasa, 25 September 2025, pukul 11.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida Kabupaten Kotabaru yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kotabaru serta Pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan Rapat, yaitu : **1. Menyampaikan Hasil Akhir Kajian Secara Komprehensif** Memaparkan secara menyeluruh hasil akhir kajian Tahun 2025 kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait agar memperoleh pemahaman yang sama terhadap substansi, temuan, analisis, serta rekomendasi yang dihasilkan.

FOTO	PENJELASAN
	2. Memperoleh Masukan dan Klarifikasi Substantif Menghimpun saran, tanggapan, dan klarifikasi dari Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan guna memastikan bahwa hasil kajian telah sesuai dengan kondisi faktual, kebutuhan daerah, serta regulasi yang berlaku. **3. Menyempurnakan Dokumen Kajian** Melakukan penyempurnaan terhadap laporan akhir berdasarkan hasil diskusi dan masukan dalam forum ekspose sehingga dokumen yang dihasilkan lebih akurat, aplikatif, dan implementatif. **4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan** Memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan hasil kajian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan sektoral, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kotabaru. **5. Mendorong Pemanfaatan Hasil Kajian dalam Perumusan Kebijakan** Memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari kajian dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,

FOTO	PENJELASAN
	program, dan kegiatan pembangunan daerah. **6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Perencanaan** Menunjukkan komitmen Bapperida Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan proses perencanaan yang partisipatif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan**.**
SK PENILAIAN INDEK INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2025 	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 bahwa Pemerintah Kabupaten Kotabaru masuk dalam **Kategori INOVATIF** dengan **nilai 48.03** 

201.	Kabupaten Pakpak Bharat	48,71
202.	Kabupaten Bombana	48,69
203.	Kabupaten Kepulauan Meranti	48,64
204.	Kabupaten Nagan Raya	48,53
205.	Kabupaten Pesisir Barat	48,48
206.	Kabupaten Sijunjung	48,45
207.	Kabupaten Lima Puluh Kota	48,34
208.	Kabupaten Aceh Tengah	48,28
209.	Kabupaten Timor Tengah Utara	48,22
210.	Kabupaten Sukamara	48,20
211.	Kabupaten Gorontalo Utara	48,16
212.	Kabupaten Kotabaru	48,03
213.	Kabupaten Wajo	47,84
214.	Kabupaten Langkat	47,81
215.	Kabupaten Nias Utara	47,74
216.	Kabupaten Pandeglang	47,63
217.	Kabupaten Konawe Utara	47,60
218.	Kabupaten Tapanuli Selatan	47,46
219.	Kabupaten Lombok Barat	47,44
220.	Kabupaten Manggarai Barat	47,43
221.	Kabupaten Siak	47,37
222.	Kabupaten Indragiri Hulu	47,34
223.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	47,21
224.	Kabupaten Ketapang	47,21
225.	Kabupaten Lingga	47,10
226.	Kabupaten Bandung Barat	47,02
227.	Kabupaten Banjarnegara	46,96
228.	Kabupaten Mimika	46,95
229.	Kabupaten Bima	46,91
230.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	46,75

6. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Pada program Riset dan Inovasi Daerah ini tidak memiliki pagu anggaran, namun indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat signifikan, yaitu:

a. Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan (Target 35%, Realisasi 57%, capaian 163%).
b. Persentase fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait inovasi daerah (Target 60%, Realisasi 100%, capaian 167%).

7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan keuangan yang mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah meliputi:

a. Koordinasi dan kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan kegiatan penyusunan rencana anggaran daerah merupakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan keuangan, kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan keuangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan keuangan telah berhasil mencapai target kinerja secara sempurna, yang dibuktikan dengan indikator persentase RAPBD tepat waktu yang mencapai realisasi **100%** (100 dari target 100). Keberhasilan kinerja fisik ini didukung oleh pengelolaan anggaran yang sangat efisien, di mana dari total pagu sebesar Rp 6.296.531.300,-, realisasi belanja hanya terserap sebesar Rp 4.175.234.230,- atau sekitar 66,31%. Dengan terpenuhinya seluruh target kinerja menggunakan biaya yang lebih rendah dari anggaran yang disediakan, organisasi ini mencatatkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, yakni sebesar 150,80%.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS

Koordinasi penyusunan KUA-PPAS adalah tahap penting untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah selaras dengan kemampuan fiskal, sebelum masuk ke tahap penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD.

Indikator Kegiatan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Target	2 Kali Kegiatan Koordinasi (2 Dokumen)
Realisasi	2 Kegiatan Koordinasi (2 Dokumen)
Pagu Kegiatan	Rp.395.834.400,-
Realisasi Keuangan	Rp. 238.503.846,00,- (60,25%)
Realisasi Kinerja	100%



2) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Proses penyelarasan antara perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dan selama penyusunan RKA, dan verifikasi RKA untuk memastikan kesesuaian dengan plafon PPAS, konsistensi dengan RKPD, Ketepatan kode rekening, Kewajaran volume dan harga satuan dan Kesesuaian indikator kinerja.

Indikator Kegiatan	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi
Target	51 Dokumen

Realisasi	51 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.123.404.500,00
Realisasi Keuangan	Rp.102.488.275,00 (83,05%)
Realisasi Kinerja	100%



3) Kegiatan Koordinasi DPA SKPD

Kegiatan koordinasi DPA SKPD adalah aktivitas rapat koordinasi antar SKPD untuk membahas dan menyelaraskan pelaksanaan DPA SKPD Agar pelaksanaan anggaran sesuai aturan, menghindari kesalahan administrasi, memastikan kegiatan berjalan sesuai target.

Indikator Kegiatan	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi
Target	51 Dokumen
Realisasi	51 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.85.925.000,00
Realisasi Keuangan	Rp.75.688.500,00 (88,08%)
Realisasi Kinerja	100%



4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan proses pelaksanaan mulai perencanaan bulan Januari sampai dengan bulan Desember penetapan APBD tahun berikutnya dilaksanakan agar anggaran daerah sesuai aturan perundang-undangan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, menyelaraskan program daerah dengan kemampuan keuangan dan menghindari kesalahan administrasi dan hokum

Indikator Kegiatan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Target	2 Dokumen
Realisasi	2 Dokumen
Pagu Kegiatan	Rp.1.678.576.500,00
Realisasi Keuangan	Rp.1.366.277.863,00 (81,39 %)
Realisasi Kinerja	100%



b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan arus kas keuangan daerah agar penerimaan dan pengeluaran APBD berjalan tertib, aman, dan sesuai aturan.

Sasaran strategis untuk Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan Daerah telah mencapai target kinerja secara optimal dengan realisasi indikator 100%, di mana layanan yang terlayani dengan baik atau sesuai ketentuan mencapai angka 100 dari target 100. Dari sisi keuangan, program ini didukung oleh pagu sebesar Rp 3.410.499.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.166.700.636,- atau setara dengan 63,53%. Keberhasilan dalam memenuhi seluruh target kinerja fisik dengan penggunaan anggaran yang hanya sekitar dua pertiga dari pagu menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat signifikan, yakni sebesar 157,41%.

1) Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten



2) Mempersiapkan Pelayanan Penatausahaan Keuangan Secara Digital



c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencatat, mengolah, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan laporan keuangan daerah telah menunjukkan performa yang optimal dengan tercapainya seluruh target fisik secara sempurna. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan Daerah" berhasil mencapai capaian kinerja 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 63,53% dari pagu Rp 3.410.499.000,-. Secara paralel,

sasaran "Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah" juga mencatatkan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran yang sama, yakni sebesar Rp 2.166.700.636,-, namun dengan angka penyerapan yang tertulis sebesar 60,70%. Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua indikator ini mencatatkan tingkat efisiensi yang identik tinggi sebesar 157,41%, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output layanan dan pelaporan berkualitas tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

1) Kegiatan Pengadaan Cetak Buku Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



2) Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan Atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2025



3) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2025



4) Melaksanakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah program pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh aset/barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar tertib administrasi, aman secara hukum, dan optimal pemanfaatannya.

kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja 96,83% meskipun dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2025 mengalami efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 namun Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah mampu melaksanakan kegiatan dengan kategori sangat baik dengan tingkat efisiensi mencapai 138,86%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

a. Melaksanakan Workshop Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ASN Penatausahaan Aset Daerah



b. Melakukan Inovasi Penatausahaan Aset Secara Digital



9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai pelaksanaan kegiatan dari para Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, yaitu:

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD



Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks pembentukan regulasi, Rapat Paripurna menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan DPRD sesuai dengan fungsi legislasi DPRD. Dengan terbentuknya Perda 19 dan 1 yang tidak terbentuk selama pembahasan pada tahun 2025

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran



Pembahasan kebijakan anggaran merupakan bagian dari fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi ini dijalankan bersama Kepala Daerah dalam rangka menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembahasan kebijakan anggaran adalah proses penelaahan, pendalaman, dan persetujuan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, guna memastikan bahwa anggaran:

1) Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
2) Berpihak pada kepentingan masyarakat
3) Disusun secara transparan dan akuntabel
4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak daerah, mendorong kemandirian fiscal daerah dan menjamin kepatuhan wajib pajak melalui system transaparan dan akuntabel. Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah melakukan:

1) Indentifikasi potensi pajak dengan cara malaksanakan pemetaan objek dan subjek pajak termasuk sektor-sektor strategis dan basis data wajib pajak.
2) Penetapan Target Pajak dengan cara Menyusun proyeksi penerimaan berdasarkan tren historis, potensi ekonomi dan kebijakan tarif
3) Strategi pemungutan dengan cara menentukan pemungutan baik manual, elektronik maupun integrasi dengan OSS, QRIS.
4) Penguatan regulasi dengan cara Menyusun atau mereviusi Perda dan Perbub untuk mendukung kepastian hukum dan sanksi
5) System informasi pajak dengan cara pengembangan aplikasi pajak daerah, dashboard monitoring dan integrasi dengan Bapenda.
6) Kampanye dan edukasi publik dengan cara sosialisasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha tentang kewajiban dan manfaat pajak
7) Koordinasi lintas OPD dengan cara sinkronisasi dan kebijakan antara Bapenda, DPMPTSP, Diskominfo Inspektorat dan OPD penghasil.

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memahami efektivitas, efesiensi dan potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan, meningkatkan kapasitas fiscal daerah melalui inovasi dan perluasan basis pajak

serta merupakan proses formal untuk menetapkan arah, regulasi dan mekanisme pengelolaan pajak daerah dengan acara :

1) Membuat basis data wajib pajak : evaluasi jumlah, jenis dan distribusi wajib pajak aktif dan potensial
2) Tren realisasi pajak : analisis capaian historis, deviasi dari target dan factor penghambat
3) Potensi pajak baru : identifikasi sektor ekonomi baru, digitalisasi dan objek pajak yang belum tergarap
4) Efektivitas pemungutan : rasio biaya pemungutan terhadap penerimaan serta tingkat kepatuhan wajib pajak
5) Kesenjangan regulasi : identifikasi celah hukum, tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan UU terbaru
6) Ekstenfikasi pajak : menambah jumlah wajib pajak melalui pemutakhiran data dan integrasi NIK-NPWP
7) Intentifikasi pajak : meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pemungutan dari wajib pajak yang sudah terdaftar
8) Digitalisasi system pajak : pengembangan aplikasi e-pajak, QRIS, dashboard monitoring dan integrasi OSS
9) Pajak berbasis zonasi dan potensi local : penyesuaian tarif dan objek pajak berdasarkan dan pengawasan wilayah
10) Kemitraan dengan swasta dan komunitas : kolaborasi dalam edukasi, pelaporan dan pengawasan partisipatif
11) Kajian akademik dan teknis : studi kelayakan, benchmarking dan simulasi dampak fiscal
12) Penyusunan rancangan perda : draft regulasi pajak baru atau revisi disertai naskah akademik
13) Konsultasi public dan OPD : forum diskusi dengan pelaku usaha, Masyarakat dan lintas OPD
14) Sinkrinisasi dengan pusat : Penyesuaian dengan UU JKPD, UU PDRD dan regulasi Kemenkue / Kemendagri
15) Penetapan dan sosialisasi : Pengesahan oleh DPRD dan diseminasi kepada Masyarakat pelaku usaha

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban dan manfaat pajak daerah, mendorong partisipasi aktif dan kepatuhan wajib pajak, menyebarluaskan kebijakan baru secara inklusif dan transparan dengan cara :

1) Meyebarkan Salinan perda/perbub melalui kanal resmi dan cetak
2) Menyederhanakan isi regulasi dalam bentuk FAQ, infografis dan video penjelasan
3) Menyelenggarakan forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan
4) Menyediakan akses kebijakan melalui aplikasi pajak daerah dan website interaktif
5) Menyesuaikan materi penyuluhan untuk pelaku usaha, Masyarakat umum dan generasi muda

d. Penyediaan Saranan dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kualitasi layanan kepada wajib pajak dan memperkuat system informasi dan pengawasan fiscal dengan cara :

1) Menyediakan kantor pelayanan pajak daerah dan kendaraan operasional
2) Menyediakan server, komputer, scanner, perinter, jaringan internet dan lain-lain
3) Menyediakan aplikasi untuk pelayanan pajak daerah dengan integrasi OSS, QRIS dan e-billing

e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin validitas dan kelengkapan data objek pajak, memperluas basios pajak daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilasi pengelolaan pajak dengan cara :

1) Indentifikasi objek pajak
2) Survei lapangan dan verifikasi
3) Pemutakhiran data berkala

4) Integrasi denan system lain (BPN, Dukcapil, DPMPTSP)
5) Penandaan objek pajak
6) Pencatatan objek pajak kedalam system
7) Pemberitahuan kepada wajib pajak

f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan akurasi data objek pajak dan subjek pajak, mendukung pnegmbilan Keputusan berbasi data dan memfasilitasi pelaporan kinerja pajak yang akuntabel dan tepat waktu denan cara :

1) Memasukkan data hasil pendataan dan pendaftara serta verifikasi kelelngkapan dan keabsahan
2) Pengelompokan objek pajak berdasarkan jenis, zonasi dan nilai ekonomis
3) Sinkronisasi dengan system OSS, BPN Dukcapil dan aplikasi pajak daerah dan Penerapan protocol keamanan untuk melindungi data wajib pajak
4) Melaksanakan pemuktahiran berkala, audit dan pembersihan data, backup dan recovery serta monitoring akses dan aktivitas
5) Membuat laporan realisasi pajak berdasarkan jenis pajak dan wilayah, laporan wajib pajak aktif, laporan potensi pajak dan laporan kinerja system.

g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dab Bangunan (BPHTB)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mennentukan besarnya kewajiban pajak secara adil dan proporsional, menjamin akurasi data nilai pajak (NOP) dan nilai transaksi dan mendukung transparansi dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dengan cara :

1) Survei lapangan dan dokumentasi objek, penggunaan data BPN, DPMPTSP dan OSS serta penetapan NKOP oleh Kepala Daerah melalui SK

2) Verifikasi dokumen transaksi dan legalitas, penyesuaian dengan NJOP dan ZNT serta penetapan besaran BPHTB melalui SKPD terkait

h. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menentukan secara sah siapa saja yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah, menjamin kepastian hukum dan keadilan fiscal dan mendukung efektivitas pemngutan dan pengawasan pajak dengan cara :

1) Melaksanakan indetifikasi subjek pajak, verifikasi administrative, pendaftaran resmi, penetapan oleh SKPD dan penerbitan nomor wajib pajak daerah (NPWPD)

i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kemudahan akses informasi dan layanan perpajakan, membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan serta menyelesaikan permasalahan dan keluhan secara cepat, tepat dan professional dengan cara :

1) Melaksanakan beberapa jenis layanan seperti : informasi pajak, pendaftaran dan mutase, cetak dokumen pajak, pembayaran dan pelaporan serta konsultasi dan pengaduan.
2) Menyedialan saluran pelayanan dan konsultasi
3) Melaksanakan Standar Pelayanan minimal (SPM)
4) Membuat inivasi dan penguatan layanan seperti : digitaliasi layanan

j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa data pelaporan pajak sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan peraturan, medeteksi ketidaksesuaian, kesalahan atau potensi manipulasi data serta menyediakan dasar yang valid untuk pengambilan Keputusan fiscal dan audit internal dengan cara :

1) Melaksanakan tahapan penelitian dan verifikasi : pengumpulan data pelaporan, pemeriksaan dokumen, cross check system dan lapangan, analisis konsisten dan kewajaran serta pencatatan temuan dan rekomendasi

2) Melakukan verifikasi sumber data : laporan realisasi pajak, data wajib pajak aktif dan pasif, transaksi pembayaran dan pelaporan mandiri dan integrasi data dengan lintas OPD

k. Penagihan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, menindaklanjuti piutang pajaak yang belum bayar serta menjaga stabilitas fiscal dan realisasi target pendapatan daerah dengan cara :

1) Melaksanakan beberapa jenis penagihan seperti : penagihan aktfi dan pasif, penagihan teguran, penagihan paksa, pemblokiran dan penyitaan.
2) Melaksanakan tahapan tagihan yaitu : udentifikasi tunggakan, penerbitan surat teguran, kunjungan atau komunikasi langsung, penerbitan surat paksadan terakhir tindak lanjut hujun/fiskal

l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang hukum bagi wajib pajak untuk menyampaiakan keberatan atas ketetapan pajak, menjamin transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam proses penetapan pajak serta menyelesaikan sengketa pajak secara administrative sebelum masuk ke jalur hukum dengan cara :

1) Melaksanakan prosedur pengajuan keberatan yaitu : pengajuan keberatan, penerimaan dan resgitrasi, penelitian administrative dan substantif, penyelesaian dan penetapan Keputusan serta pemberitahuan hasil

m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan, mendeteksi dan mencegahpenyimpangan, manipulasi dan ketidakpatuhan serta meningkatkan kualitas tata Kelola fiscal daerah secara berkelanjutan dengan cara :

1) Melaksanakan pengendalian pajak daerah yaitu : pengendalian internal, pengendali sistemik, pengendalian berbasis risiko

2) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen

n. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas wajib pajak dan aparatur pajak daerah agar tercipta kepatuhan sukarela dan pelayanan yang berkualitas, menguji keptuhan wajib pajak terhadap kewaiban perpajakan dan menilai kebenaran pelaporan serta untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pajak berjalan sesuai letentuan dan bebas penyimpangan dengan cara :

1) Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi, penyusunan pendauan teksis
2) Melaksanakan pemeriksaan tahunan atau siklus tertentu terhadap wajib pajak strategis serta verifikasi langsung terhadap objek pajak dan aktivitas usaha.
3) Melaksanakan monitoring realisasi, piutang dan efektivitas system pemungutan, audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap Bapenda sebagai pengelola pendapatan daerah

o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi, menjamin pelaksanaan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan dan mencegah penyimpangan dan meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dengan cara :

1) Melaksanakan sosialisasi regulasi dan evaluasi kinerja berkala

p. Melaksanakan monitoring realisasi, piutang, dan efektivitas sistem pemungutan dan melaksanakan audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap wajib pajak maupun pengelola pajakElektronifikasi transaksi pemerintah daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi keuangan pemerintah daerah, mendorong transparansi dan akuntablitas pengelolaan APBD, memperluas akses layanan public

berbasis digital dan mengurangi risiko kebocoran dan penyimpangan transaksi tunai dengan cara:

1) Melaksanakan digitalisasi kanal pembayaran: pajak dan retribusi daerah via QRIS, e-payment, e-billing dan kanal digital bank.
2) Integrasi Sistem Informasi: pengembangan aplikasi Saijaan

Dokumentasi Kegiatan:

1) Pemasangan Tapping Box di rumah makan atau restoran, hotel dan usaha di Kabupaten Kotabaru



2) Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah ”SmartGov”



3) Penilaian PBB-P2 di PT. Sime Darby Oils Pulaulaut Refinery Kotabaru



4) Koordinasi dan Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet



5) Operasi sisir pajak bumi dan bangunan (PBB) ke desa-desa



6) BAPENDA melakukan koordinasi penyusunan tahapan Pemanfaatan Peta ZNT Bersama Kanwil BPN/ATR



7) Edukasi Tata Cara Pengisian Formulir Pendaftaran dan Pelaporan Objek Baru Sarang Burung Walet dan PBB-P2



11. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan Program Strategis Inspektorat Daerah dalam mendukung Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah, sekaligus berkontribusi langsung terhadap Sasaran 10 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Pemerintahan.

Pada Tahun 2025, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.857.700.950 dengan realisasi sebesar Rp2.070.546.139 atau dengan persentase sebesar 72%, sementara capaian indikator kinerja mencapai 100%.

Pelaksanaan Program diwujudkan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan realisasi sebesar 81% dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terealisasi sebesar 60% yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terdiri dari Sub Kegiatan:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Realisasi belanja 76%, capaian kinerja 100%
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Realisasi belanja 97%, capaian kinerja 100%
3) Reviu Laporan Kinerja Realisasi belanja 64%, capaian kinerja 100%
4) Reviu Laporan Keuangan Realisasi belanja 83%, capaian kinerja 100%
5) Pengawasan Desa Realisasi belanja 81%, capaian kinerja 100%
6) Kerjasama Pengawasan Internal Realisasi belanja 68%, capaian kinerja 100%
7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Realisasi belanja 84%, capaian kinerja 100%,

Berdasarkan capaian Sub Kegiatan tersebut di atas, total realisasi belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar 81% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari Sub Kegiatan:

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Realisasi 89%, capaian 5 dari 5 laporan (100%).
2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Realisasi 55%, capaian 36 dari 36 laporan (100%).
3) Indikator penyelesaian TLHP BPK RI dan BPKP juga tercapai 100%.

Analisis Keberhasilan (Berbasis Kinerja dan Anggaran)

1) Ketercapaian IKU 100% menunjukkan keselarasan antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan Program.
2) Efisiensi anggaran 28% (selisih antara pagu dan realisasi) tanpa mengurangi capaian *output*, mencerminkan penerapan Prinsip *money follow Program* dan *value for money*.
3) Seluruh sub kegiatan konsisten mencapai capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintahan.
4) Rasio biaya per laporan pengawasan relatif efisien, dengan 36 laporan terealisasi pada 55% anggaran Sub Kegiatan.
5) Terjadinya percepatan penyelesaian TLHP dan kerugian Negara/Daerah menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas Perangkat Daerah.

Secara *outcome*, Program ini memperkuat fungsi pengawasan intern, meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, dan mendukung penguatan SPIP di Perangkat Daerah.

Analisis Kegagalan / Area Peningkatan

Meskipun capaian *output* 100%, evaluasi berbasis kinerja menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki:

1. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya presisi, terlihat dari realisasi 55% pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, yang mengindikasikan potensi *over-estimasi* kebutuhan.
2. Indikator masih dominan pada level *output*, belum sepenuhnya mengukur *outcome* seperti:
    1) Penurunan temuan berulang.
    2) Peningkatan maturitas SPIP.
    3) Peningkatan kualitas pengendalian intern OPD.
3. Pendekatan pengawasan masih relatif korektif, sehingga perlu penguatan pendekatan preventif berbasis Manajemen Risiko.

Dengan demikian, meskipun efektif dan efisien secara kuantitatif, penguatan kualitas pengukuran dampak menjadi kebutuhan strategis untuk peningkatan nilai SAKIP.

Simpulan Strategis

Program Penyelenggaraan Pengawasan (IKU No. 2) Tahun 2025 dinilai:

1) Efektif, karena seluruh target kinerja tercapai 100%;
2) Efisien, karena capaian maksimal diperoleh dengan realisasi anggaran 72%;

Perlu peningkatan kualitas *outcome*, agar pengawasan tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi juga berdampak terukur terhadap peningkatan akuntabilitas dan integritas pemerintahan.

Dokumentasi:





12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.368.436.800 dengan realisasi sebesar Rp.954.088.467 atau dengan persentase sebesar 69.721%, sementara capaian indikator kinerja mencapai 100%.

Pelaksanaan Program diwujudkan melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan sebesar Rp.233.760.500 realisasi sebesar Rp. 215.608.348 dengan Capaian Indikator Kinerja 92% dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp.

1.134.676.300 realisasi sebesar Rp. 738.480.119 dengan Capaian Kinerja 65%.

Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) daerah yang lebih berkualitas, terukur, dan akuntabel. Melalui pendampingan yang terstruktur, perangkat daerah memperoleh arahan teknis dalam menyusun kebijakan pengawasan yang selaras dengan indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja, serta target yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

Pendampingan difokuskan pada penyelarasan antara kebijakan teknis pengawasan dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini mendorong penyusunan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis hasil (outcome oriented). Asistensi yang dilakukan pada tahap perumusan kebijakan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan pengawasan memiliki indikator kinerja yang jelas, mekanisme pengukuran yang terstandar, serta dukungan data yang memadai untuk pelaporan dalam LKJiP

Meskipun menunjukkan capaian positif, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam mendukung optimalisasi LKJiP daerah. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya pemahaman perangkat daerah mengenai integrasi kebijakan teknis pengawasan dengan kerangka SAKIP dan LKJiP. Akibatnya, sebagian kebijakan yang dirumuskan belum sepenuhnya mencerminkan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja dan target daerah. Keterbatasan kualitas dan ketersediaan data pengawasan juga menjadi hambatan dalam proses analisis capaian kinerja. Dalam beberapa kasus, kebijakan teknis telah disusun dengan baik, namun belum didukung oleh sistem pengumpulan data yang konsisten dan terdokumentasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penyajian analisis dalam LKJiP.

Secara umum, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi di bidang pengawasan telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas LKJiP daerah, terutama dalam memperkuat keterkaitan antara kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan, dan pelaporan kinerja. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, integrasi sistem data, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan agar kebijakan teknis pengawasan benar-benar menjadi pendorong utama peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ke depan, Inspektorat Daerah akan memperkuat pengawasan berbasis risiko, menyempurnakan perencanaan anggaran berbasis evaluasi kinerja, serta mengembangkan indikator berbasis outcome guna mendukung peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran 11: Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam mewujudkan birokrasi yang profesional melalui sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian di lingkungan "Bumi Saijaan" didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebelumnya adalah Indeks Sistem Merit, yang berfungsi mengukur sejauh mana manajemen ASN telah terbebas dari intervensi politik dan praktik primodialisme guna menciptakan aparatur yang kompetitif dan berintegritas.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menghadapi tantangan fundamental dalam pengelolaan Manajemen ASN seiring dengan berlakunya PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara total merombak paradigma penilaian sistem merit dari yang semula bersifat administratif-prosedural (PermenPANRB 40/2018) menjadi berbasis dampak nyata *(impact-based*).

Sosialisasi terkait PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit dilaksanakan pada Rabu, 04 Maret 2026 melaui tautan *zoom* dan *youtube*, sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

panrb

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/94/SM.99/2026 — 24 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Undangan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Daring**

Yth.
Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memperkuat kesiapan implementasi kebijakan tersebut, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada:

hari : Rabu, 4 Maret 2026
waktu : pukul 08.30 WIB s.d. 12.00 WIB
tempat : Daring melalui Zoom dan Live Youtube
(tautan: https://bit.ly/sosialisasi-merit-pemda)

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir secara daring bersama dengan pejabat yang menangani sistem merit. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung sdri. Dewi (0881-0241-83410) atau sdri. Niken (0856-4354-7974).

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENI SUZANA
Sekretaris Kementerian
NIP. 196808311994012001

Tembusan
1. Menteri PANRB
2. Wakil Menteri PANRB

Berdasarkan sosialisasi yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, diketahui Bobot penilaian kini lebih ditekankan pada dampak nyata, dengan rincian aspek sebagai berikut:

1. Manajemen Talenta (20%): Mendapat bobot terbesar untuk memastikan pengembangan karier ASN berbasis talenta.
2. Pengembangan Kompetensi (16%).
3. Pengelolaan Kinerja (14%).
4. Perencanaan Kebutuhan & Standarisasi Jabatan (10%).

5. Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi (10%).
6. Penghargaan & Pengakuan (10%).
7. Disiplin & Pemberhentian (10%).
8. Digitalisasi Manajemen ASN (10%).

Perubahan ini menuntut Kabupaten Kotabaru untuk tidak lagi sekadar memenuhi kelengkapan dokumen, melainkan membuktikan bahwa tata kelola ASN berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Indeks Sistem Merit, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penyesuaian strategis yang mencakup 8 (delapan) aspek utama manajemen ASN sebagaimana diatur dalam arah baru periode 2025-2029:

1. Standardisasi Jabatan dan Perencanaan Kebutuhan: Penyelarasan kebutuhan pegawai dengan prioritas pembangunan kewilayahan.
2. Pengembangan Talenta dan Karier: Implementasi manajemen talenta yang lebih dinamis untuk memastikan right person on the right place.
3. Pengelolaan Kinerja dan Budaya Kerja: Menggeser fokus dari sekadar pengisian SKP menjadi pengukuran dampak kinerja terhadap kepuasan masyarakat.
4. Digitalisasi Manajemen ASN: Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy).*

Dengan diberlakukannya PermenPANRB 19/2025, capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten Kotabaru kini menjadi cerminan dari efektivitas organisasi dalam melayani masyarakat. Transformasi ini bukan sekadar pemenuhan indikator makro, melainkan fondasi bagi birokrasi yang lebih lincah (agile) dan kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Tabel II.34
Capaian Indeks Sistem Merit

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		

Indeks Sistem Merit	Indeks	-	0,4	0	0%	0,48	0%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Sistem Merit tahun 2025 terealisasi sebesar 0 apabila dibandingkan dengan target 0,4 sehingga capaiannya sebesar 0% yang dikategorikan ***Sangat Rendah.*** Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,48 sehingga capaian sebesar 0%**.** Hal tersebut berdasarkan pada indikator Indeks Sistem Merit mengalami perubahan penilaian yang semula bersifat administratif-prosedural (PermenPANRB 40/2018) menjadi berbasis dampak nyata *(impact-based*) seperti yang dijelaskan pada PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Merit.

Sebagai perbandingan berikut capaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2024 (sebelum berlakunya PermenPANRB 19/2025):

Tabel II.35
Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi
		2024
Indeks Sistem Merit	Indeks	184,5

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kabupaten Kotabaru tahun 2024, Indeks Sistem Merit mencatatkan realisasi sebesar 184,5. Berdasarkan standar penilaian, pencapaian angka 184,5 tersebut menempatkan tata kelola ASN Kabupaten Kotabaru mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja masih berada pada tingkat yang rendah atau belum mandiri. Meskipun terdapat upaya administratif yang terdokumentasi, hasil ini menunjukkan adanya urgensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam dan perbaikan sistemik pada berbagai aspek manajemen ASN guna meningkatkan profesionalisme birokrasi di masa mendatang.

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 11 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Program Kepegawaian Daerah
   a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
      Kegiatan ini merupakan pilar utama dalam siklus manajemen ASN di Kabupaten Kotabaru, yang dikelola untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, tertib administrasi pensiun, serta penyajian data kepegawaian yang akurat.
      1) Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 2.056.950 terealisasi sebesar Rp 1.918.000 atau 93,24% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%
      2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 35.394.850 terealisasi sebesar Rp 30.916.000 atau 87,35% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%
      3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan Anggaran sebesar Rp. 554.633.800 terealisasi sebesar Rp 487.833.566 atau 87,96% dengan target Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%
      4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan Anggaran sebesar Rp. 186.323.550 terealisasi sebesar Rp 185.916.321 atau 99,78% dengan target Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 100 Dokumen, dan Realisasi Target 100 Dokumen atau 100%

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan Anggaran sebesar Rp. 603.588.920 terealisasi sebesar Rp 597.213.360 atau 98,90% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%
6) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Anggaran sebesar Rp. 35.394.850 terealisasi sebesar Rp 19.320.500 atau 77,66% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi kerja PNS yang dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi, pengembangan karier, atau pemenuhan kebutuhan organisasi.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Mutasi ASN dengan Anggaran sebesar Rp 26.171.150 terealisasi sebesar Rp 2.817.500 atau 10,77% dengan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan Anggaran sebesar Rp 346.388.000 terealisasi sebesar Rp 286.993.651 atau 82,85% dengan target Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 81,33%.
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan Anggaran sebesar Rp 466.140.000 terealisasi sebesar Rp 362.243.957 atau 77,71% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 97,64%

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini merupakan upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Di Kabupaten Kotabaru, pengembangan kompetensi tidak lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan kebutuhan strategis organisasi.

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 2.506.439.000 terealisasi sebesar Rp 740.847.122 atau 29,56% dengan target Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan sebanyak 49 Orang, dan Realisasi Target 49 Orang atau 100%
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dengan Anggaran sebesar Rp. 92.742.000 terealisasi sebesar Rp 362.243.957 atau 99,98% dengan target Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir sebanyak 1000 Orang, dan Realisasi Target 532 Orang atau 53,20%

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini berfokus pada transformasi budaya kerja dari yang sekadar "hadir" menjadi "berkinerja". Penilaian dilakukan secara sistematis untuk mengukur capaian target individu yang selaras dengan target organisasi.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan Anggaran sebesar Rp 1.005.362.374 terealisasi sebesar Rp 955.530.278 atau 95,04% dengan target Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebanyak 10 Laporan, dan Realisasi Target 10 Laporan atau 100%
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp 72.369.700 terealisasi sebesar Rp 42.517.140 atau 58,75% dengan target Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan sebanyak 300 Orang, dan Realisasi Target 244 Orang atau 81,33%.

3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan Anggaran sebesar Rp 87.442.100 terealisasi sebesar Rp 39.211.000 atau 44.84% dengan target Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan sebanyak 1095 Orang, dan Realisasi Target 780 Orang atau 71,23%
4) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan Anggaran sebesar Rp 119.573.650 terealisasi sebesar Rp 93.364.181 atau 78,08% dengan target Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 10 Laporan, dan Realisasi Target 10 Laporan atau 100%

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

      Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, serta Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di BKPSDM Kotabaru bertujuan menjamin profesionalisme ASN melalui pengakuan keahlian formal dan penguatan institusi pelatihan yang terakreditasi. Fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan pejabat struktural melalui diklat manajerial serta pemenuhan keahlian teknis bagi pejabat fungsional sesuai standar kompetensi jabatan.

      1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional dengan Anggaran sebesar Rp. 567.821.500 terealisasi sebesar Rp 93.364.181 atau 66,56% dengan target Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi sebanyak 1 Dokumen, dan Realisasi Target 1 Dokumen atau 100%

2) Sub Kegiatan Terselenggaranya diklat pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan dengan Anggaran sebesar Rp. 10.546.555.600 terealisasi sebesar Rp 7.272.800.878 atau 68,96% dengan target Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebanyak 6 Laporan, dan Realisasi Target 6 Laporan atau 100%

Dokumentasi Program dan Kegiatan:

1. Seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025




2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrator/Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.






3. Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kotabaru Tahun Anggaran. 2025




4. Asistensi Pelaporan SKP Tahun 2025 dan Penyusunan SKP Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru




5. Sosialisasi Impelentasi Digitalisasi Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru




6. Pembinaan Disiplin ASN (Tausiah/Ceramah Agama) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru



7. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru



8. Pelaksanaan Asessment CACT di BKN Kanreg VIII Banjarbaru untuk Gol.III/c & III/d





9. Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan II Angkatan I – 22 Tahap Klasikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru





TUJUAN 4: TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS DESA YANG MERATA

Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh untuk mengikis kesenjangan antarwilayah melalui visi pembangunan yang dimulai dari pinggiran, yaitu desa. Sebagai daerah dengan karakteristik geografis kepulauan dan daratan yang luas, sasaran Terwujudnya Pembangunan Wilayah Berbasis Desa yang Merata menjadi kunci untuk memastikan setiap warga "Bumi Saijaan" merasakan kehadiran pemerintah. Fokus utama sasaran ini adalah memperkuat kemandirian desa serta menyediakan aksesibilitas yang adil, sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi dalam sistem ekonomi daerah yang lebih besar.

Keberhasilan visi pemerataan ini diukur melalui dua dimensi utama. Pertama, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Infrastruktur, yang memotret sejauh mana ketersediaan dan kualitas sarana pendukung seperti jalan, jembatan, energi, dan telekomunikasi mampu menopang aktivitas ekonomi di seluruh pelosok Kotabaru. Kedua, Indeks Desa (ID), yang menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Peningkatan Indeks Desa mencerminkan perbaikan pada ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, sekaligus menunjukkan keberhasilan transformasi desa dari status berkembang menuju desa maju dan mandiri.

Tabel II.36
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Indeks	2,99	3,00	3,02	100,66%	3,40	88,82%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

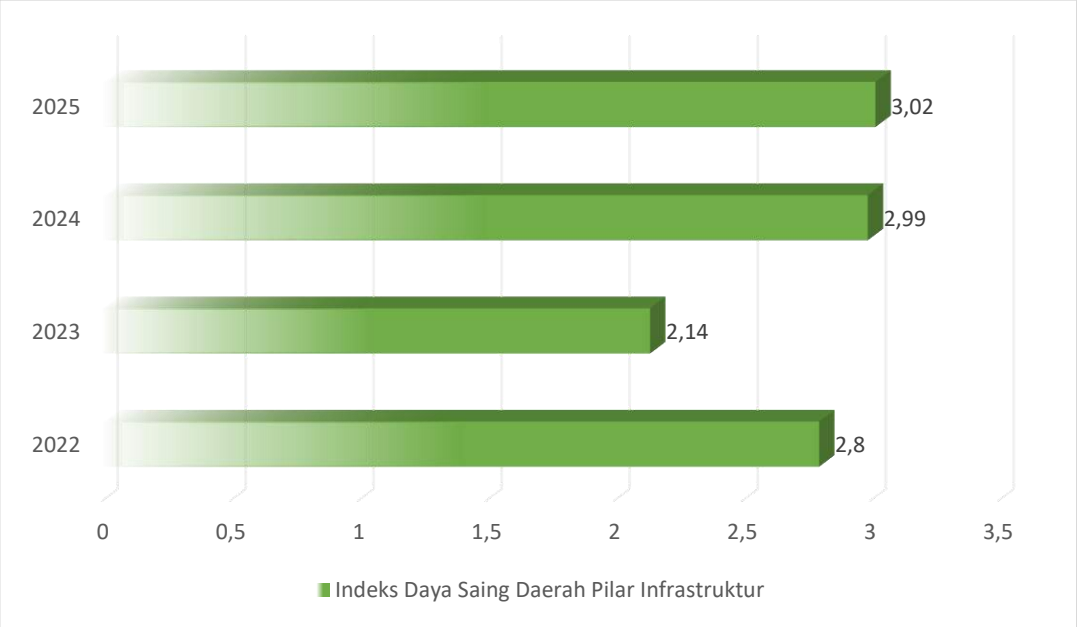
Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

tahun 2025 terealisasi sebesar 3,02 apabila dibandingkan dengan target 3,00 sehingga capaiannya sebesar 100,66% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur realisasinya terealisasi sebesar 3,02 angka ini mengalami perubahan yaitu meningkat sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,99.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur tahun 2025 terealisasi terealisasi sebesar 3,02 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 3,40 sehingga capaian sebesar 88,82%

Grafik II.28
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur
Tahun 2022 s.d 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan BRIN, 2026.

Grafik menunjukkan fluktuasi dan tren penguatan pada capaian Indeks Daya Saing Daerah khususnya pada Pilar Infrastruktur. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 2,8, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 2,14. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan atau pengembangan infrastruktur pada periode tersebut.

Namun, kondisi ini berhasil diatasi pada tahun 2024 dengan lonjakan indeks yang cukup tajam ke angka 2,99, yang merupakan capaian tertinggi

dalam periode empat tahun terakhir. Untuk kepentingan penyusunan LKjIP 2025, angka indeks pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 3,02.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi dengan wilayah pelosok/pesisir.
2. Perluasan jangkauan jaringan internet dan infrastruktur digital hingga ke tingkat desa yang meningkatkan skor pilar infrastruktur pendukung.
3. Pemanfaatan berbagai sumber pendanaan (APBD, APBN, maupun Dana Alokasi Khusus) secara terintegrasi untuk proyek infrastruktur strategis daerah.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Wilayah Kotabaru yang merupakan kepulauan luas menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur per kilometer menjadi lebih mahal dibandingkan wilayah daratan.
2. Masih terdapat perbedaan kualitas infrastruktur yang cukup mencolok antara wilayah perkotaan dengan wilayah kecamatan terluar/terpencil.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah sebagai fondasi utama peningkatan daya saing ekonomi. Strategi utama yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif melalui kemitraan strategis antara pemerintah dan pihak swasta. Melalui skema konsesi dalam pembangunan infrastruktur strategis—seperti pelabuhan dan pasar modern—pemerintah daerah berupaya mempercepat ketersediaan fasilitas publik tanpa memberikan beban berlebih pada APBD. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan akseleratif dan profesional, sehingga mampu menunjang konektivitas logistik dan perdagangan di wilayah Kotabaru.

Sejalan dengan tuntutan era ekonomi digital, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga fokus pada perluasan pilar infrastruktur digital secara inklusif. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan titik akses Wi-Fi publik di area-area strategis serta percepatan digitalisasi layanan publik di tempat umum.

Langkah ini merupakan strategi efisien untuk memperkecil kesenjangan akses informasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan birokrasi, yang secara langsung berkontribusi pada kenaikan skor indeks infrastruktur digital daerah. Dengan ekosistem digital yang kuat, masyarakat dan pelaku usaha dapat berinteraksi dengan lebih cepat dan efisien dalam ekonomi global.

Terakhir, guna menjamin keberlanjutan investasi fisik, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerapkan prinsip pembangunan infrastruktur berbasis ketahanan iklim. Setiap perencanaan dan pembangunan aset daerah baru kini wajib mengintegrasikan aspek mitigasi dampak perubahan iklim, terutama dalam mengantisipasi fenomena banjir rob yang menjadi tantangan di wilayah pesisir. Dengan mempertimbangkan faktor risiko bencana dalam desain teknis, pemerintah memastikan daya tahan dan usia pakai aset infrastruktur daerah menjadi lebih panjang. Sinergi antara pembiayaan kreatif, infrastruktur digital, dan ketahanan iklim ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Kotabaru yang memiliki daya saing tinggi dan tangguh di masa depan.

Tabel II.37
Capaian Indeks Desa

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Desa	Indeks	-	75	73,95	98,6%	79	93,60%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Desa tahun 2025 terealisasi sebesar 73,95 apabila dibandingkan dengan target 75 sehingga capaiannya sebesar 98,6% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Desa realisasinya mencapai 73,95 angka ini mengalami tidak mengalami perubahan karena dalam tahun 2024 indikator ini belum mempunyai nilai untuk Kabupaten Kotabaru.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Desa tahun 2025 terealisasi sebesar 73,95 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 79 sehingga capaian sebesar 93,60%

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik yang tepat sasaran.
2. Perbaikan infrastruktur jalan desa dan jembatan yang menghubungkan.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur, sebagai berikut:

1. Pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana PAUD/TK di tingkat desaMasih adanya desa-desa di wilayah kepulauan atau pedalaman yang memiliki akses komunikasi dan transportasi terbatas, sehingga skor infrastrukturnya rendah.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk memperkuat kemandirian desa melalui transformasi ekonomi perdesaan yang berbasis pada optimalisasi potensi lokal. Langkah strategis ini diwujudkan dengan melakukan pendampingan intensif serta penyaluran bantuan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kapasitas manajerial dan daya saing usaha di tingkat desa. Melalui penguatan BUMDes, setiap desa didorong untuk menciptakan minimal satu produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek penggerak ekonomi yang mandiri dan kompetitif.

Guna mengakselerasi pencapaian status desa yang lebih maju dan mandiri, pemerintah daerah juga membangun sinergi lintas sektor dengan mengintegrasikan kontribusi sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung penguatan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan adanya sinkronisasi antara pendampingan pemerintah, kemandirian BUMDes, dan dukungan sektor swasta, diharapkan

terjadi peningkatan signifikan pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Indeks Desa, yang pada akhirnya akan menghapuskan kategori desa tertinggal di Kabupaten Kotabaru.

Sasaran 12: Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dasar

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan urat nadi utama dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar, pemerintah berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga "Bumi Saijaan" terhadap aksesibilitas dan utilitas publik. Mengingat karakteristik geografis Kotabaru yang unik terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan yang luas, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas logistik, serta memastikan distribusi layanan publik mencapai titik terjauh.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Infrastruktur Dasar, sebuah indikator komposit yang memotret tingkat kemantapan jalan, akses air minum yang layak, serta ketersediaan sistem sanitasi yang memenuhi standar. Pencapaian indeks ini mencerminkan sejauh mana intervensi anggaran dan kebijakan pembangunan fisik mampu memberikan dampak langsung pada kenyamanan dan produktivitas warga. Dengan infrastruktur dasar yang semakin mantap, hambatan spasial antar-kecamatan dapat diminimalisir, sehingga ketimpangan ekonomi wilayah dapat ditekan secara signifikan.

Tabel II.38
Capaian Indeks Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	-	0,40	0,40*	100%	0,48	83,33%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Infrastruktur Dasar tahun 2025 terealisasi sementara sebesar 0,40* apabila dibandingkan dengan target 0,40 sehingga capaiannya sebesar 100% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Infrastruktur Dasar realisasinya sementara sebesar 0,40* angka ini tidak mengalami perubahan poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,40.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Infrastruktur Dasar tahun 2025 terealisasi sementara sebesar 0,40* apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,48 sehingga capaian sebesar 83,33%

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Infrastruktur Dasar, sebagai berikut:

1. Penerapan standar teknis yang ketat dalam setiap proyek infrastruktur memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan indikator penilaian indeks infrastruktur dasar.
2. Adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar di pemukiman warga
3. Efektivitas penggunaan Dana Desa yang disinergikan dengan APBD untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase di tingkat desa
4. Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor vital

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Infrastruktur Dasar, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan area pemukiman baru yang sangat cepat terkadang lebih mendahului kesiapan penyediaan infrastruktur dasar (drainase dan pengelolaan limbah)
2. Infrastruktur lama yang mulai mengalami kerusakan memerlukan alokasi anggaran pemeliharaan yang cukup besar, yang seringkali bersaing dengan anggaran pembangunan baru

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar bagi

seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data. Strategi utama yang dijalankan adalah dengan mengoptimalisasi kontribusi sektor swasta melalui sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah daerah aktif mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kotabaru untuk mengarahkan dana sosial mereka pada pembangunan fasilitas vital seperti akses air bersih, sanitasi, dan perbaikan jalan lingkungan, khususnya di desa-desa yang berada di lingkar tambang dan perkebunan. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara konsisten melakukan survei teknis untuk memetakan prioritas pembangunan infrastruktur. Pendekatan berbasis survei ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak di tiap wilayah secara presisi, sehingga alokasi anggaran maupun bantuan pihak ketiga dapat difokuskan pada infrastruktur yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) terbesar terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan integrasi antara pendanaan partisipatif dari sektor swasta dan perencanaan yang berbasis data lapangan, Indeks Infrastruktur Dasar Kabupaten Kotabaru diproyeksikan akan terus meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi sosial dan ekonomi daerah secara berkelanjutan

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 12 yaitu Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
    a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku

            Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 756.564.350,- atau 75,66% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 78,96% digunakan

untuk pemeliharaan rutin dan berkala yang dapat mencegah kerusakan berat serta pembiayaan personil/petugas operator embung, petugas pemeliharaan dan kebersihan, pengawas dan teknisi serta biaya administrasi penyusunan laporan operasi dan pemeliharaan.

2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 12.635.000,- tidak terealisasi.

3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 772.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 685.354.017,- atau 88,71% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 100% digunakan untuk operasi sungai secara rutin, pemeliharaan rutin dan berkala, Perawatan tanggul, bronjong, dan revetment (pelindung tebing), Perbaikan tanggul sungai yang rusak atau longsor, Penguatan tebing sungai, dan Normalisasi sungai serta pembiayaan Tenaga Kerja dan Administrasi, petugas operasi dan pemeliharaan, Pengawas lapangan atau teknisi. serta biaya administrasi penyusunan laporan operasi dan pemeliharaan.

4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 184.592.887,- atau 92,30% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 100% digunakan untuk Pemantauan kondisi struktur breakwater/seawall secara berkala, pemeliharaan rutin dan berkala, Pembersihan sampah dan material yang menumpuk di sekitar bangunan pantai, Perbaikan retakan pada struktur beton seawall serta pembiayaan Tenaga Kerja dan Administrasi, petugas operasi dan pemeliharaan, Pengawas lapangan atau teknisi. serta

biaya administrasi penyusunan laporan operasi dan pemeliharaan

5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (tidak dilaksanakan).
6) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (tidak dilaksanakan).
7) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.091.490,- atau 78,73% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 100% digunakan untuk pemeliharaan rutin dan berkala yang dapat mencegah kerusakan berat serta pembiayaan personil/petugas operator embung, petugas pemeliharaan dan kebersihan, pengawas dan teknisi serta biaya administrasi penyusunan laporan operasi dan pemeliharaan.
8) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- tidak terealisasi.
9) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (tidak dilaksanakan)
10) Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku

    Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 2.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 223.673.449,- atau 8,95% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 13,67% digunakan untuk Perbaikan Bangunan Pengambilan Air (Intake), Rehabilitasi Saluran atau Pipa Air Baku, Rehabilitasi Bangunan Pendukung seperti bak penampungan, Perbaikan atau penggantian pompa air baku yang rusak, Normalisasi atau Pembersihan Sumber Air, Perbaikan atau pemasangan pagar pengaman.
11) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 176.746.457,- atau 16,07% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 22,11%.

12) Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya (tidak dilaksanakan)

13) Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 11.532.523.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.176.542.870,- atau 53,56% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 61,21%.

14) Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 2.820.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 472.894.730,,- atau 16,77% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 26,70%.

15) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar,dan Pengaman Pantai

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 998.096.000,- tidak terealisasi.

16) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (tidak dilaksanakan)

17) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 750.548.256,- atau 83,39% dengan capaian target kinerja 100% dan capaian realisasi 84,76% digunakan untuk penyusunan laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku.

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 5.620.297.000,- terealisasi sebesar Rp. 863.773.184,- atau 15,37% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 25,92%.

2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.562.000,- atau 0,64% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 10,00%.
3) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.619.895,- atau 49,62% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,- tidak terealisasi.
5) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.278.471.000,- terealisasi sebesar Rp. 887.753.580,- atau 69,44% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

Dokumentasi:



2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.511.085.000,- terealisasi sebesar Rp. 843.078.078,- atau 55,79% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 63,60%.
      2) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.955.384.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.928.538.630,- atau 98,63% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 99,75%.
      3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 3.849.606.385,- terealisasi sebesar Rp. 788.466.162,- atau 20,48% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 23,61%.
      4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.482.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 734.808.449,- atau 49,57% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      5) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.969.110.725,- terealisasi sebesar Rp. 1.539.041.654,- atau 78,16% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (tidak dilaksanakan)

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 490.983.594,- terealisasi sebesar Rp. 222.084.767,- atau 45,23% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 5.650.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.650.000.000,- atau 100% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 861.081.500,- terealisasi sebesar Rp. 765.501.374,- atau 88,90% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      4) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- tidak terealisasi.

   Dokumentasi:








5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 12.163.121.535,- terealisasi sebesar Rp. 2.528.912.645,- atau 20,79% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 21,50%.
      2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 582.510.620,- terealisasi sebesar Rp. 186.428.807,- atau 32,00% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 46,52%.

3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 620.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 619.192.646,- atau 99,87% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

4) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 224.522.874,- terealisasi sebesar Rp. 219.012.254,- atau 97,55% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

5) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 381.638.870,- terealisasi sebesar Rp. 342.661.200,- atau 89,79% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

6) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 646.561.867,- terealisasi sebesar Rp. 368.452.256,- atau 56,99% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

Dokumentasi:







6. Program Penataan Bangunan Gedung
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 89.072.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.200.400,- atau 64,22% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      2) Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan StrategisKabupaten/Kota

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 49.995.790,- terealisasi sebesar Rp. 29.642.000,- atau 59,29% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
      3) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 42.157.318.411,- terealisasi sebesar Rp. 36.536.175.765,- atau 86,67% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 91,09%.
      4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli

(TPA), TimPenilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 463.768.700,- terealisasi sebesar Rp. 195.885.300,- atau 42,24% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

Dokumentasi:





7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (PUPR)

   Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 56.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.019.634,- atau 93,71% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%

9. Program Penyelenggaraan Jalan
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta PerencanaanTeknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

         Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- tidak terealisasi.

2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 9.762.772.995,- terealisasi sebesar Rp. 5.073.733.713,- atau 51,97% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 56,32%.

3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 271.771.138.327,- terealisasi sebesar Rp. 197.014.658.509,- atau 72,49% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 79,36%.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 894.922.348,- atau 89,49% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 4.944.972.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.836.419.411,- atau 77,58% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 74,72%.

6) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 60.226.778.858,- terealisasi sebesar Rp. 42.919.943.924,- atau 71,26% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 85,94%.

7) Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.035.037.147,- atau 86,25% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

8) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 956.286.523,- atau 95,63% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 7.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.175.884.912,- atau 98,30% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

Dokumentasi:












TERBANGSU
TANAH DIJUAL


Sta 2+700
#Lapisan Pondasi Agregat B


Sta 21+250
#Lapisan Pondasi Agregat B











10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
        1) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi JabatanOperator dan Teknisi atau Analis

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.179.242,- atau 35,18% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
        2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 99.761.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.364.573,- atau 90,38% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota. Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 201.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 197.323.000,- atau 97,77% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    a. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.039.481.894,- terealisasi sebesar Rp. 562.899.601,- atau 54,15% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 90,82%.
        2) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang (tidak dilaksanakan)
        3) Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (tidak dilaksanakan)
        4) Sub Kegiatan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 508.331.910,- terealisasi sebesar Rp. 400.490.231,- atau 78,79% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 95,32%.
    b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.939.780.170,- terealisasi sebesar Rp. 414.720.534,- atau 21,38% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
        2) Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

           Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 2.699.746.500,- terealisasi sebesar Rp. 565.993.838,- atau 20,96% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.
    c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 183.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 173.903.189,- atau 95,32% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

2) Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (tidak dilaksanakan)

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 78.745.800,- terealisasi sebesar Rp. 64.944.492,- atau 82,47% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

2) Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK

   Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 109.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.671.360,- atau 94,53% dengan capaian target kinerja target 100% dan capaian realisasi 100%.

Dokumentasi:






ALBUM PETA






ALBUM PETA




Album Peta






RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH


LAPORAN FAKTA
DAN ANALISA
PENDAMPINGAN PERSETUJUAN
SUBSTANSI RDTR WP SERONGGA







12. Program Pengembangan Perumahan
    a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
        1) Sub keg. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.36.955.000,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk melakukan penanganan bencana alam namun terkendala penetapan surat Keputusan bencana alam yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Kotabaru. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.955.070	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit	0 unit

3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.955.070	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit	0 unit
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

b. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1) Sub keg. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.36.955.000,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk melakukan penanganan bencana alam namun terkendala penetapan surat Keputusan bencana alam yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Kotabaru. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.955.070	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit	0 unit
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.955.070	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	18 Unit	0 unit
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

2) Sub keg. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 35.313.922,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk melakukan penanganan bencana alam namun terkendala penetapan surat Keputusan bencana alam yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Kotabaru. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	35.313.922	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit	0 unit
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Tabel
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	35.313.922	-
2	Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit	0 unit

3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

3) Sub keg. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.851.992.051,- terealisasi sebesar Rp170.332.127,- atau 9,20% dan capaian kinerja 0% digunakan untuk melakukan penanganan relokasi Kawasan kumuh terkendala masih dalam permasalahan hasil temuan BPK-RI Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebelum perubahan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.851.992.051	170.332.127
2	Keluaran	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	253 unit	0 unit
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Tabel
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sesudah perubahan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.851.992.051	170.332.127
2	Keluaran	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	253 unit	0 unit

		Program Kabupaten/Kota		
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Dokumentasi:

1. Kegiataan penanganan pengikatan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Kabupaten Kotabaru.



2. Foto kegiataan pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan (PSU)



c. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.243.055.000,- terealisasi sebesar Rp237.568.800,- atau 97,74% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan penanganan tata Kelola pengembangan perumahan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebelum perubahanTahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	243.055.000	237.568.800
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

Tabel
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	243.055.000	237.568.800
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%	0%

13. Program Kawasan Permukiman

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 104.991.300,- terealisasi sebesar Rp 103.302.317,- atau 98,39% dan capaian kinerja 62,14% digunakan untuk melakukan penguatan tata Kelola kelembagaan dalam penyelenggaran Kawasan permukiman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	104.991.300	103.302.317
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	104.991.300	103.302.317
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1) Sub keg. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp2.310.741.000,- terealisasi sebesar Rp 2.284.440.400,- atau 98,86% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan dukungan sebagai penyaji kajian dan dokumen pelaksanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi

1	Masukan	Dana	2.310.741.000	2.284.440.400
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

Tabel
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.310.741.000	2.284.440.400
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	9 Dokumen	9 Dokumen
3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

2) Sub keg. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.110.403.200,- terealisasi sebesar Rp109.323.200,- atau 99,02% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk pelaksanaan proses surve hasil pelaksanaan dan penetapan Lokasi penanganan RTLH tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	110.403.200	109.323.200
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen

		Perumahan dan Permukiman Kumuh		
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani	100%	100%

Tabel
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	110.403.200	109.323.200
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani	100%	100%

c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

1) Sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 4.960.883.400,- terealisasi sebesar Rp4.960.883.400,- atau 100% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni didalam Kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan . Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	4.960.883.400	4.960.883.400
2	Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	153 Unit	153 Unit

3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

Tabel
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesudah perubahan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	4.960.883.400	4.960.883.400
2	Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	153 Unit	153 Unit
3	Hasil	Persentasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	9,5%	6%

14. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
    a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.
        1) Sub keg. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

        Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp22.390.838.693,- terealisasi sebesar Rp21.758.307.793,- atau 97,18% dan capaian kinerja 18,68% digunakan untuk melakukan perbaikan rumah tidak layak huni diluar Kawasan kumuh. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi

1	Masukan	Dana	22.390.838.693	21.758.307.793
2	Keluaran	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1134 unit	1023 Unit
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	73,20%	13,63%

Tabel
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	22.390.838.693	21.758.307.793
2	Keluaran	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1134 unit	1023 Unit
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	73,20%	13,63%

2) Sub keg. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp2.600.540.020,- terealisasi sebesar Rp2.549.936.020,- atau 97,18% dan capaian kinerja 18,68% digunakan untuk melakukan Pembangunan baru dalam penyelenggaran Kawasan permukiman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.600.540.020	2.549.936.020
2	Keluaran	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	51 Unit	51 Unit
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	73,20%	13,63%

Tabel
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.600.540.020	2.549.936.020
2	Keluaran	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	51 Unit	51 Unit
3	Hasil	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	73,20%	13,63%

15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
    a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
        1) Sub keg. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.

        Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp553.296.500,- terealisasi sebesar Rp 547.523.594,- atau 98,96% dan capian kinerja 100% digunakan untuk pelaksanaan penilaian dan evaluasi hasil

peningkatan jalan lingkungan diluar jalan Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	553.296.500	547.523.594
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15 Dokumen	15 Dokumen
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

Tabel
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	553.296.500	547.523.594
2	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15 Dokumen	15 Dokumen
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

2) Sub keg. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp138.665.985.030,- terealisasi sebesar Rp82.800.582.983,- atau 59,71% dan capian kinerja 100% digunakan untuk peningkatan jalan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	138.665.985.030	82.800.582.983
2	Keluaran	Jumlah Lokasi Perumahan yang	314 Paket	314 Paket

		Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

Tabel
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	138.665.985.030	82.800.582.983
2	Keluaran	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	314 Paket	314 Paket
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

3) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 58.258.000,- terealisasi sebesar Rp52.916.591,- atau 90,83% dan capian kinerja 100% digunakan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan peningkatan PSU. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	58.258.000	52.916.591
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	1 laporan

3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	58.258.000	52.916.591
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

4) Sub keg. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp44.511.000,- terealisasi sebesar Rp41.266.000,- atau 92,71% dan capian kinerja 100% digunakan untuk melakukan verifikasi serah terima PSUM Pengembang Perumahan kegiatan peningkatan PSU. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	44.511.000	41.266.000
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

Tabel
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

Sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	44.511.000	41.266.000
2	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Presentasi Urusan PSU Perumahan terselenggara	67,82	51,22

16. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub keg. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp820.575.700,- terealisasi sebesar Rp492.935.584,- atau 60,07% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan sertifikasi asset Pemerintah Daerah pada tabel di bawah ini:

Tabel
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	59.467.250	22.375.250
2	Keluaran	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	3 BA	3 BA
3	Hasil	Presentase Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	100%	100%

Tabel
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja

			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	59.467.250	22.375.250
2	Keluaran	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	3 BA	3 BA
3	Hasil	Presentase Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	100%	100%

Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja 8 (Delapan) program 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 92,43 % dan realisasi anggaran sebesar 75,18% pada Dinas Perkimtan Kabupaten Kotabaru di entry pada aplikasi SISMONEV dan ESAKIP

Dokumentasi:
Foto kegiatan rapat – rapat bidang pertanahan



Foto kegiataan pelaksanaan pengukuran tanah



17. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp173.502.029.000,- terealisasi sebesar Rp146.982.111.408,- atau 84,71% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan pengadaan tanah untuk fasilitasi umum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	173.502.029.000	146.982.111.408
2	Keluaran	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan	2 dokumen	2 dokumen
3	Hasil	Presentase pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang telah dilaksanakan dari total target Untuk Pembangunan	100%	100%

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesudah perubahan
Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	173.502.029.000	146.982.111.408
2	Keluaran	Jumlah laporan koordinasi	2 dokumen	2 dokumen

		penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan		
3	Hasil	Presentase pembayaran Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang telah dilaksanakan dari total target Untuk Pembangunan	100%	100%

18. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

a. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absenteedalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub keg. Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp36.228.500,- terealisasi sebesar Rp11.989.000,- atau 33,09% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan penguatan pendampingan dalam rangka redistribusi tanah negara untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.228.500	11.989.000
2	Keluaran	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
3	Hasil	Jumlah Dokumen/Surat Keputusan penetapan subjek dan objek yang di terbitkan	1 dokumen	1 dokumen

Tabel
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	36.228.500	11.989.000
2	Keluaran	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
3	Hasil	Jumlah Dokumen/Surat Keputusan penetapan subjek dan objek yang di terbitkan	1 dokumen	1 dokumen

19. Program Penatagunaan Tanah

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp820.575.700,- terealisasi sebesar Rp492.935.584,- atau 60,07% dan capaian kinerja 100% digunakan untuk melakukan sertifikasi asset Pemerintah Daerah pada tabel di bawah ini:

Tabel
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Sebelum perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	820.575.700	492.935.584
2	Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Presentase bidang tanah pemerintah daerah yang telah di daftarkan	100%	100%

Tabel

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Sesudah perubahan Tahun 2025

No	Narasi	Tolakukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	820.575.700	492.935.584
2	Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
3	Hasil	Presentase bidang tanah pemerintah daerah yang telah di daftarkan	100%	100%

Dokumentasi:
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah



20. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

    Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

    a. Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan kewenangan pemerintah kabupaten. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 105.044.796.350,- terealisasi sebesar Rp. 103.786.334.420,- atau 98,80% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini meliputi penyediaan, pemasangan, dan pengadaan berbagai perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan yang dimaksud antara lain :

1) Rambu-rambu lalu lintas (peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk)
2) Penerangan Jalan Umum (PJU)
3) Marka jalan
4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
5) Delineator, cermin tikungan, dan guardrail
6) Papan nama jalan dan fasilitas keselamatan lainnya









b. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan merupakan upaya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru untuk menjaga fungsi, kondisi, dan keandalan perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten agar tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.908.448.800,- terealisasi sebesar Rp. 20.863.683.170,- atau 99,79% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penyediaan perlengkapan jalan serta dalam rangka mendukung amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan dalam menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas.





c. Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 427.168.740,- terealisasi sebesar Rp. 327.855.516,- atau 76,75% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir oleh pihak swasta maupun pemerintah telah sesuai dengan izin yang diterbitkan serta memenuhi ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.









d. Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pelayanan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor (KIR) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka menjamin keselamatan, kelayakan jalan, serta kepatuhan administrasi kendaraan angkutan umum dan kendaraan barang yang beroperasi di wilayah kabupaten. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429.874.440,- terealisasi sebesar Rp. 380.019.132,- atau 88,40% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kendaraan bermotor tertentu untuk menjalani uji berkala guna memastikan aspek teknis dan laik jalan.








e. Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan : Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor (KIR), baik bagi petugas penguji maupun pemilik/pengusaha angkutan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.093.450,- terealisasi sebesar Rp. 66.647.000,- atau 83,21% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru guna menjamin bahwa proses pengujian kendaraan berjalan sesuai standar teknis, transparan, dan akuntabel.




f. Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota merupakan upaya teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka mengoptimalkan fungsi jaringan jalan kabupaten melalui pengaturan, pengendalian, dan rekayasa arus lalu lintas. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 836.603.500,- terealisasi sebesar Rp.

835.036.222,- atau 99,81% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan efisiensi pergerakan orang dan barang.



g. Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perhubungan dalam menjamin tersedianya layanan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mobilitas orang dan/atau distribusi barang antar wilayah dalam satu daerah kabupaten. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.692.827.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.218.070.906,- atau 87,14% dan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya angkutan umum bagi masyarakat.



21. Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

a. Sub Kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal merupakan upaya strategis Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas transportasi laut dan mendukung sistem logistik daerah. Pelabuhan pengumpan lokal berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani angkutan penumpang dan/atau barang dalam lingkup pelayanan lokal serta terhubung dengan pelabuhan yang lebih besar dalam sistem jaringan transportasi. Didalam sub kegiatan ini juga merupakan pekerjaan dari Pembangunan Dermaga. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.538.766.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.010.197.426,- atau 56,81% dan capaian kinerja 88%. Terdapat 2 Dermaga yang tidak terealisasikan pekerjaannya yaitu Dermaga Teluk Aru mengalami

Force Majeure (Kondisi Alam yang ekstrim menyebabkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan dan tidak dibayarkan). Hal ini telah dikonsultasikan dengan BPK RI serta Dermaga Speedboat termasuk kegiatan yang mengalami efisiensi sehingga di batalkan, namun perencanaan tetap dilaksanakan sedangkan pekerjaan fisik dianggarkan di APBD Tahun 2026.



Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

b. Sub Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka menjamin kelancaran, keselamatan, dan keberlanjutan operasional pelabuhan pada perairan sungai dan danau yang menjadi kewenangan kabupaten. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 285.548.386,- terealisasi sebesar Rp. 261.029.950,- atau 91,41% dan capaian kinerja 100%.



Sasaran 13: Meningkatnya Kemandirian Desa

Pemerintah Kabupaten Kotabaru meyakini bahwa kekuatan daerah berakar pada kemandirian desa-desanya. Sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa merupakan upaya konkret untuk mentransformasi desa dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang mampu mengelola potensi sumber daya alam dan manusianya secara berdaulat. Di wilayah "Bumi Saijaan" yang luas, kemandirian desa adalah kunci untuk mempercepat kesejahteraan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah pusat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Mandiri, yang merujuk pada klasifikasi tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Status "Mandiri" menunjukkan bahwa desa tersebut telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Peningkatan persentase ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pendampingan pemerintah kabupaten dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional dan akuntabel.

Tabel II.39
Capaian Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Desa Mandiri	%	18,18	18,20	22,44	123,30%	36,36	61,71

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase Desa Mandiri tahun 2025 terealisasi sebesar 22,44% apabila dibandingkan dengan target 18,20% sehingga capaiannya sebesar 123,30% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Persentase Desa Mandiri realisasinya sebesar 22,44% angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,26 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 18,18%

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase Desa Mandiri tahun 2025 terealisasi sebesar 22,44% apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 36,36 sehingga capaian sebesar 61,71%

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Persentase Desa Mandiri, sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa yang mulai beralih dari sekadar pembangunan fisik ke pemberdayaan ekonomi dan penguatan BUMDes
2. Desa yang telah berstatus Mandiri mampu menjaga kualitas tata kelola dan kemandirian ekonominya sehingga tidak terjadi penurunan status

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Persentase Desa Mandiri, yaitu tantangan dalam meningkatkan kapasitas manajerial perangkat desa untuk memenuhi indikator penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih kompleks

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen penuh dalam mendorong kemandirian desa sebagai pilar

utama pembangunan daerah yang inklusif. Strategi penguatan desa diarahkan pada aspek kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lebih kompetitif. Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan strategis antara BUMDes dengan sektor industri pengolahan serta perdagangan besar yang beroperasi di wilayah Kotabaru. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan unit usaha desa yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam rantai pasok industri, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan. Dengan basis ekonomi desa yang kuat, status desa diharapkan dapat tereskalasi menjadi Desa Mandiri yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Selain penguatan ekonomi, peningkatan Persentase Desa Mandiri juga dilakukan melalui penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana. Menyadari kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang luas dan dinamis, pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan skor pilar lingkungan pada Indeks Desa Membangun (IDM) melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini membekali perangkat desa dan masyarakat dengan kemampuan mitigasi serta adaptasi terhadap risiko bencana alam, sehingga stabilitas sosial dan infrastruktur desa tetap terjaga. Melalui perpaduan antara kemandirian ekonomi berbasis BUMDes dan ketangguhan lingkungan, Kabupaten Kotabaru optimis dapat melampaui target persentase Desa Mandiri, yang menjadi indikator nyata keberhasilan pembangunan dari pinggiran.

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 13 yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa:

1. Program Penataan Desa
   a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

      Untuk tahun 2025 Kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana desa adalah sebagai berikut:

      1) Kecamatan Hampang
      2) Kecamatan Sungai Durian
      3) Kecamatan Kelumpang Selatan
      4) Kecamatan Pulaulaut Barat
      5) Kecamatan Pulau Sebuku

6) Kecamatan Sampanahan
7) Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan
8) GOR Babussalam Banjarbaru (mendampingi Kadis dialog dialog Gubernur Kalimantan Selatan dengan Kepala Desa/ lurah se Kalimantan Selatan terkait percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih
9) Qin Hotel Banjarbaru (DPMD Provinsi Kalimantan Selatan) menghadiri undangan sosialisasi peningkatan kapasitas pengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan




b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
   1) Pembinaan/ fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dalam rangka studi tiru pemekaran desa pada tanggal 06 Maret 2025
   2) Pembinaan/ fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dalan rangka menindaklanjuti pemekaran desa di Desa Manunggul Lama Kecamatan Sungai Durian pada tanggal 06 Agustus 2025



2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
   a. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

      Pada tahun 2025 ini kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan terdapat peningkatan yang cukup signifikan meskipun dalam hal penganggaran mengalami penurunan akibat rasionalisasi anggaran.

Namun demikian secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik hingga akhir tahun. Adapun kegiatan – kegiatan tersebut adalah:

1) Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se Kalimantan selatan Tahun 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 26 Juni 2025 bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin. Pembahasan mengenai Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kalimantan Selatan
2) Pendampingan pada Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kotabaru, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 di ruang Rapat Zona Kolaborasi Lt. III Kantor Bapperida Kotabaru
3) Koordinas dan Konsultasi terkait kegiatan PKP Ke DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September 2025, bersama dengan Tim Penyusun Kajian Masterplan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4) Pendampingan Peserta Bimtek Penguatan dan Publikasi Inovasi Desa 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 Oktober 2025 di Ballroom Hotel Nasa Banjarmasin
5) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Desember 2025



3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

      Melakukan Pembinaan/ Fasilitasi Adminstrasi Pemertintahan Desa dibentuk Tim

1) Pelaksana Kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintah baik PNS maupun Non PNS khususnya di lingkup Bidang Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Pembinaan/ Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam rangka Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa bagi Kasi Pemerintahan Desa Se- Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 15 September 2025




b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperkuat Penyusunan Produk Hukum Desa. Tahapan Penyusunan Produk Hukum Desa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang Konsep dasar dan Metode serta tahapan perancangan Peraturan Desa.

Penyusunan Produk Hukum Desa ini akan membantu Mengarahkan Proses Perancangan Peraturan Desa menggunakan pendekatan Strategis dengan tetap mengikuti Prosedur perancangan Peraturan Perundang-Undanggan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Jadwal kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa :

No	DESA	WAKTU (Wita)	KECAMATAN	TANGGAL	TEMPAT
1.	Sejakah	08.00-selesai	Pulaulaut Timur	21 Agustus 2025	Masing-masing kantor Desa

2.	-	08.00-selesai	Hampang	20 Maret 2025	Masing-masing kantor Kecamatan
3.	-	08.00-selesai	Pulaulaut Timur	20 Maret 2025	Masing-masing kantor Kecamatan
4.	Magalau Hilir	08.00-selesai	Kelumpang Barat	25 September 205	Masing-masing kantor Desa





c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk tahun 2025 ini kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa ada 2 sub kegiatan yaitu :

1) Pendampingan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) satu kali setiap tahun. Di Tahun 2024 penyusunan RKPDes untuk Tahun 2025 sudah difasilitasi untuk seluruh desa sebanyak 198 desa di Kabupaten Kotabaru.

Untuk Tahun 2024 ada 198 Desa yang dikukuhkan kembali Kepala Desanya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memuat perubahan masa kerja Kepala Desa yang semula hanya 6 tahun

menjadi 8 tahun, sehingga perlu dilakukan juga perubahan dan penyesuaian dokumen RPJM Desa. Untuk tahun 2025 ada 157 Desa yang sudah difasilitasi dan wajib melakukan penyesuaian dokumen RPJM Desa karena sudah habis di tahun 2025

2) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa dinyatakan bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi dasar penyusunan APBDes dengan kata lain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa harus sesuai dengan kegiatan di RKP Desa. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan program-program yang sudah direncanakan dan dianggarkan dan juga laporan setelah program kegiatan dilaksanakan baik program yang bersifat fisik maupun non fisik. Dengan realisasi anggaran di tahun 2025 yaitu Rp. 83.808.510,- atau (97,50%) ini, telah dilaksanakan sesuai dengan target yaitu fasilitasi perencanaan desa untuk 198 Desa dan monitoring evaluasi pembangunan desa untuk 55 desa (100%) dan berdampak pada tertibnya administrasi desa dan terpenuhinya dokumen desa dalam kegiatan perencanaan desa juga dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan perencanaannya.



3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa target utamanya adalah fasilitasi/ pembinaan/ pendampingan penyusunan Dokumen APB Desa, Dokumen Perubahan APB Desa dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa serta pembinaan/ fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa kepada seluruh Desa se Kabupaten Kotabaru sebanyak 198 Desa dengan target keluaran sebanyak 3 Dokumen.

Fasilitasi/ pembinaan/ pendampingan telah dilaksanakan kepada seluruh Desa se Kabupaten Kotabaru meliputi :

- Pembinaan pengelola APB Desa;
- Fasilitasi/pendampingan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Pertanggungjawaban APB Desa;
- Pendampingan Hasil Evaluasi APB Desa;
- Fasilitasi penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) dan Dana Desa (DD); dan
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.





4) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

No	Desa	Waktu (Wita)	Kecamatan	Tanggal	Tempat
1.	Magalau Hilir	08.00-selesai	Kelumpang Barat	25 s/d 26 September 2025	Masing-masing kantor Desa
2.	Sang- Sang	08.00-selesai	Kelumpang Tengah	29 s/d 30 September 2025	Masing-masing kantor Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam wilayah Kabupaten Kotabaru ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa agar semua Lembaga Adat yang ada di desa dan Kecamatan dapat di data serta di bina sesuai dengan peraturan Perundang –undangan yang berlaku, Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Maret s/d April Tahun 2025 di 5 (lima) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru yaitu :

- Kecamatan Sampanahan
- Kecamatan Kelumpang Barat
- Kecamatan Pulaulaut Timur
- Kecamatan Pamukan Barat
- Kecamatan Pamukan Utara



b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kabupaten Kotabaru. Pembinaan meliputi Pemberian Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Posyandu.



c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
d. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna
e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi. Agar kegiatan transmigrasi dapat berjalan lagi. Ada perubahan paradigma tentang transmigrasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Jika sebelum nya kegiatan transmigrasi hanya berfokus pada penempatan transmigrasi baru saja. Tapi kegiatan transmigrasi sekarang sangat jauh berubah paradigma nya sebagai konsekuesi terbatas lahan yang ada. Transmigrasi Sekaran meliputi Transmigrasi Pugar, Transmigrasi Terpatan dan Transmigrasi Baru yang semuanya harus ada dalam 1 Kawasan Transmigrasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada program ini Adalah Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan dan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada tahun 2025 program kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan kerana tidak adanya Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian transmigrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi

7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

   Pada program ini telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berada di Lokasi transmigrasi maupun Eks transmigrasi. Saat ini di kabupaten kotabaru sudah tidak ada lagi Lokasi transmigrasi kerana telah selesai tahapan pembinaannya oleh Kementerian Transmigrasi dan hak hak warga transmigrasi pun telah di berukan berupa sertifikat lahan baik lahan 1 maupun lahan 2. Lokasi Transmigrasi yang ada saat ini statusnya telah berubah menjadi desa. Namun demikan pemerintah tetap berkometmen untuk terus melakukan pembinaan agar ekstrasnmigrasi tersebut berkontribusi terhadap kemajuan desa. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinan terhadap esk transmigrasi sebanyak 45 KK.

TUJUAN 5: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kotabaru memandang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Di tengah tantangan perubahan iklim global dan karakteristik geografis "Bumi Saijaan" yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap dinamika lingkungan, tujuan ini diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekosistem. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa eksploitasi potensi daerah tidak mengorbankan hak generasi mendatang, sekaligus membangun daerah yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui dua indikator kinerja utama yang saling melengkapi. Pertama, Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang memotret efektivitas kontribusi daerah dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sektor kehutanan, energi, dan limbah yang lebih hijau. Kedua, Indeks Risiko Bencana (IRB), yang merepresentasikan tingkat kerentanan serta kapasitas daerah dalam memitigasi, mengadaptasi, dan merespons potensi bencana. Penurunan angka indeks risiko bencana menunjukkan semakin kuatnya kesiapsiagaan infrastruktur dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian alam.

Tabel II.40
Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	1,92	0,004	0,20%	1,52	0,26%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

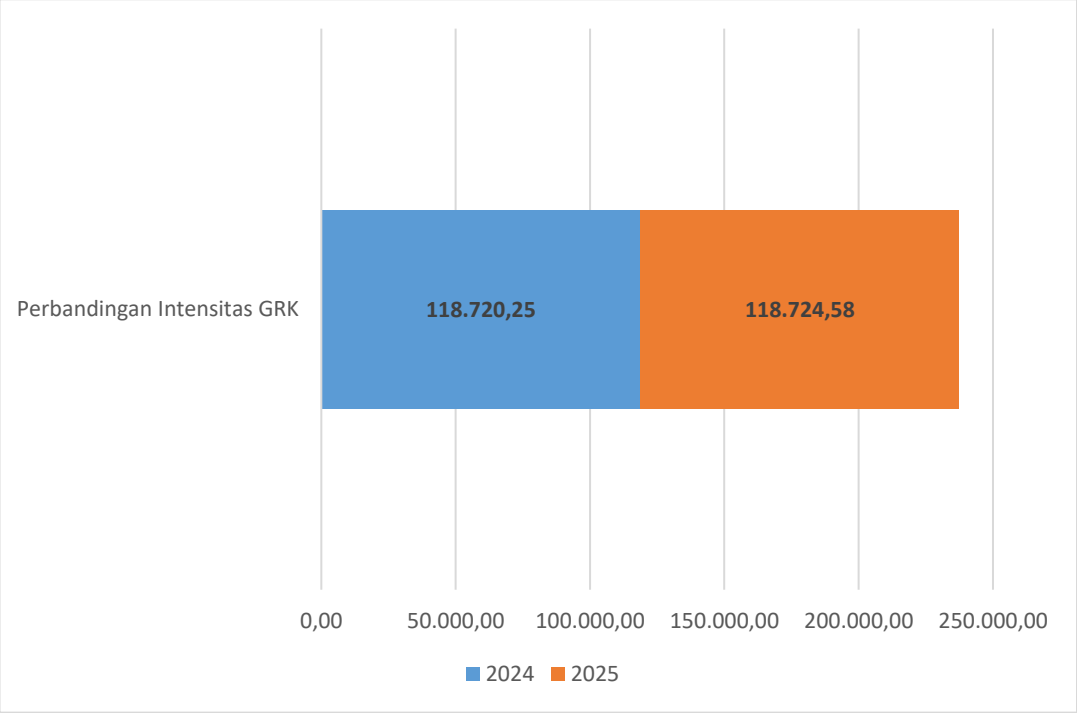
Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun 2025 terealisasi sebesar 0,004 apabila dibandingkan dengan target

1,92% sehingga capaiannya sebesar 0,20% yang dikategorikan ***Sangat Rendah.***

Pada tahun 2025, Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK realisasinya sebesar 0,004 angka ini mengalami peningkatan poin dibandingkan dengan tahun 2024 karena pada tahun tersebut belum terdapat nilai persentase tersebut.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK tahun 2025 terealisasi sebesar 0,004 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 1,52 sehingga capaian sebesar 0,26%

Grafik II.29
Perbandingan Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kotabaru



Pada tahun 2025 penurunan intensitas GRK terealisasi sebesar 118.724,58 Ton, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 118.720,25 Ton, berdasarkan realisasi tersebut tingkat emisi pada Kabupaten Kotabaru terjadi penurunan sebesar 0,004%. Nilai persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK ini sangat rendah dari target yang telah ditentukan karena ada beberapa kendala teknis dalam mencapai nilai yang optimal yaitu belum siap dan tersedianya data yang dibutuhkan dalam mendukung capaian tersebut oleh OPD terkait.

Grafik II.30
Perbandingan Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup, 2026.

Berdasarkan data pada grafik diatas mengenai penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2025, Kabupaten Kotabaru mencatatkan pencapaian sebesar 118.724,58. Meskipun angka ini terlihat jauh lebih kecil dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang menyentuh 6.276.961 dan target Nasional sebesar 2.240.520.310, angka tersebut mencerminkan kontribusi nyata di tingkat tapak dalam mendukung program rendah karbon. Keberhasilan ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan target iklim yang lebih luas, di mana setiap unit administratif berperan sebagai penyokong akumulasi penurunan emisi secara kolektif.

Sebagai kesimpulan, capaian Kabupaten Kotabaru di tahun 2025 menegaskan peran strategis wilayah kabupaten dalam struktur penurunan emisi GRK di tingkat provinsi dan nasional. Walaupun terdapat perbedaan skala volume yang signifikan antar tingkatan wilayah, data ini membuktikan bahwa Kabupaten Kotabaru telah mengambil langkah konkret dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Konsistensi dalam menjaga angka penurunan emisi ini sangat krusial agar target lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan peta jalan transisi energi dan pelestarian lingkungan yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK, sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan daerah yang mendorong efisiensi energi pada sektor industri pengolahan dan bangunan perkantoran pemerintah
2. Peningkatan sistem pengelolaan sampah di TPA dan pengolahan limbah industri yang mengurangi pelepasan gas metana ke atmosfer
3. Adanya kesadaran perusahaan besar di Kotabaru (pertambangan dan perkebunan) untuk mulai menggunakan teknologi rendah karbon dalam operasionalnya

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK, sebagai berikut:

1. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, emisi dari sektor transportasi terus meningkat dan menjadi tantangan dalam menekan total emisi daerah.
2. Faktor cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko karhutla dapat menyebabkan lonjakan emisi GRK secara mendadak dalam skala besar.
3. Masih terdapat data-data yang belum lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga belum dapat menggambarkan nilai penurunan intensitas GRK secara optimal.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru secara konsisten menempuh langkah-langkah strategis untuk menekan laju emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Salah satu strategi prioritas adalah dengan akselerasi transisi energi bersih pada infrastruktur publik, melalui pemanfaatan energi surya dan biomassa untuk sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) serta fasilitas umum lainnya. Langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang memiliki intensitas emisi tinggi. Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah di wilayah Kotabaru, pemerintah daerah berkomitmen untuk meminimalkan beban emisi sektor energi sekaligus mendorong efisiensi belanja daerah dalam jangka panjang serta meningkatkan komitmen kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam melengkapi data yang diperlukan untuk menggambarkan capaian penurunan intensitas GRK secara baik dan optimal.

Sejalan dengan intervensi teknologi, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga fokus pada penguatan aspek perilaku masyarakat melalui kampanye penghematan energi secara masif. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif baik di lingkungan perkantoran pemerintah, sektor industri, maupun rumah tangga, mengenai pentingnya penggunaan energi yang bijak dan efisien. Penurunan konsumsi energi dari sisi permintaan (demand side) ini merupakan instrumen yang murah namun efektif dalam menurunkan intensitas GRK per unit output ekonomi. Melalui perpaduan antara inovasi energi terbarukan dan budaya hemat energi, Kabupaten Kotabaru optimis dapat mencapai target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi daerah, sekaligus berkontribusi nyata pada target iklim nasional.

Tabel II.41
Capaian Indeks Risiko Bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Risiko Bencana	Indeks	152,79	150	108,02	127,98%	142	123,92%

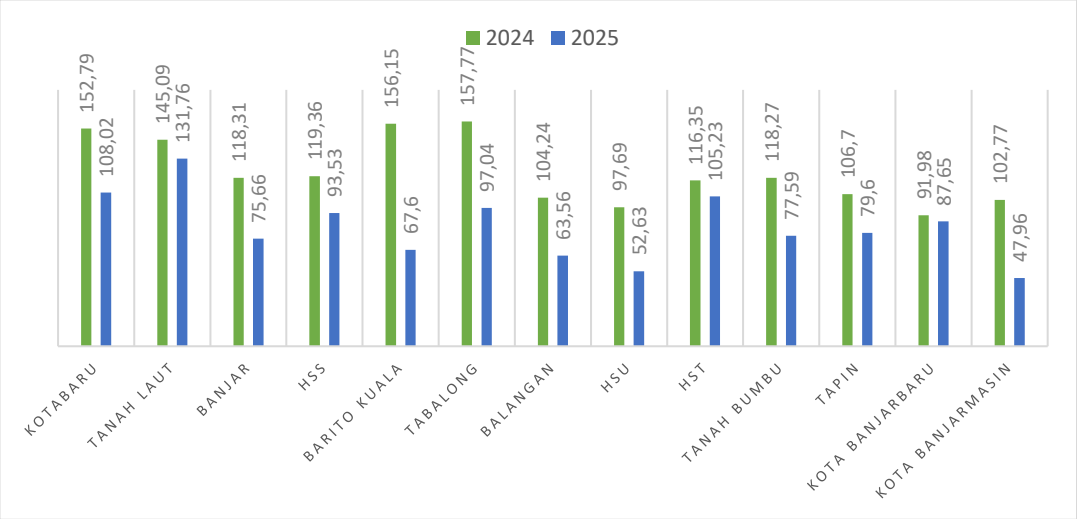
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Risiko Bencana tahun 2025 terealisasi sebesar apabila 108,02 dibandingkan dengan target 150 sehingga capaiannya sebesar 127,98% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Risiko Bencana realisasinya mencapai angka 108,02 ini mengalami peningkatan sebesar 44,77 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 152,79.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Risiko Bencana tahun 2025 terealisasi sebesar 108,02 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 142 sehingga capaian sebesar 123,92%

Grafik II.31
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota dan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan INArisk, 2026.

Berdasarkan grafik tersebut, Berdasarkan data grafik perbandingan tahun 2024 dan 2025 di Kalimantan Selatan, terlihat tren positif di seluruh wilayah di mana nilai indeks mengalami penurunan yang signifikan. Mengingat prinsip bahwa semakin rendah nilai indeks maka semakin baik kualitas atau performa daerah tersebut, hampir seluruh kabupaten dan kota menunjukkan keberhasilan dalam melakukan perbaikan. Kota Banjarmasin muncul sebagai wilayah dengan performa terbaik pada tahun 2025 dengan angka terendah (47,96), disusul oleh HSU (52,63) dan Balangan (63,56). Secara umum, tahun 2025 menjadi tahun pencapaian bagi Kalimantan Selatan karena mayoritas daerah berhasil menekan angka indeks mereka hingga di bawah angka 100.

Khusus untuk Kabupaten Kotabaru, terdapat catatan penting mengenai progres yang telah dicapai. Pada tahun 2024, Kotabaru memiliki indeks yang cukup tinggi yaitu sebesar 152,79, namun pada tahun 2025 angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan menjadi 108,02. Penurunan sebesar 44,77 poin ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang sangat efektif dan konsisten di wilayah tersebut. Meskipun demikian, secara komparatif, Kotabaru masih menempati posisi tertinggi kedua di antara seluruh daerah pada tahun 2025, hanya berada di bawah Tanah Laut (131,76). Kesimpulannya, Kotabaru telah menunjukkan arah perkembangan

yang sangat baik dan progresif, namun tetap memerlukan akselerasi kebijakan yang lebih kuat agar dapat menyamai pencapaian daerah lain yang sudah berhasil mencapai angka indeks di bawah 100.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Risiko Bencana, sebagai berikut:

1. Penguatan peran BPBD dan forum relawan lintas sektor dalam koordinasi penanggulangan bencana yang lebih responsif.
2. Penyelesaian Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi yang lebih akurat dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah.
3. Keberhasilan sosialisasi mitigasi bencana di tingkat sekolah (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang aktif.

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Risiko Bencana, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan hutan menjadi area terbuka atau perkebunan yang tidak terkendali dapat meningkatkan potensi risiko banjir bandang dan tanah longsor secara mendadak.

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya memperluas cakupan program Desa Tangguh Bencana (Destana) ke seluruh desa yang masuk dalam kategori "Bahaya Tinggi". Upaya ini didukung melalui kebijakan pengalokasian anggaran dana desa yang lebih terarah untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, serta pembangunan infrastruktur mitigasi skala lokal. Dengan mengarusutamakan manajemen bencana ke dalam tata kelola desa, diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri dan responsif dalam menghadapi potensi ancaman bencana di lingkungannya masing-masing.

Selain penguatan di level masyarakat, pemerintah daerah juga mempertegas regulasi terhadap sektor usaha dengan mewajibkan setiap investasi skala besar, seperti di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri, untuk memiliki sistem manajemen risiko bencana mandiri yang tersertifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki standar keamanan operasional yang tinggi dan mampu melakukan penanggulangan darurat secara mandiri. Sinergi antara ketangguhan masyarakat di tingkat desa dan akuntabilitas sektor swasta dalam pengelolaan risiko ini merupakan strategi kunci Kabupaten Kotabaru untuk secara konsisten menurunkan nilai Indeks Risiko Bencana dan menciptakan ruang pembangunan yang aman dan berkelanjutan

Sasaran 14: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai wujud tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga kelestarian ekosistem di "Bumi Saijaan". Mengingat kekayaan sumber daya alam Kotabaru yang melimpah, baik di sektor kehutanan maupun pesisir, sasaran ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak merusak daya dukung serta daya tampung lingkungan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebuah indikator komposit yang mengintegrasikan kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, serta kualitas air laut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan lingkungan di wilayah kabupaten.

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini mencerminkan efektivitas berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan, seperti pengawasan ketaatan izin lingkungan bagi pelaku usaha, rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya pengurangan timbulan sampah plastik. Peningkatan nilai IKLH menunjukkan bahwa Kabupaten Kotabaru berhasil menyelaraskan pertumbuhan wilayah dengan upaya mitigasi pencemaran dan kerusakan alam. Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan, Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Tabel II.42
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,09	76,1	80,22	105,41%	76,73	104,54%

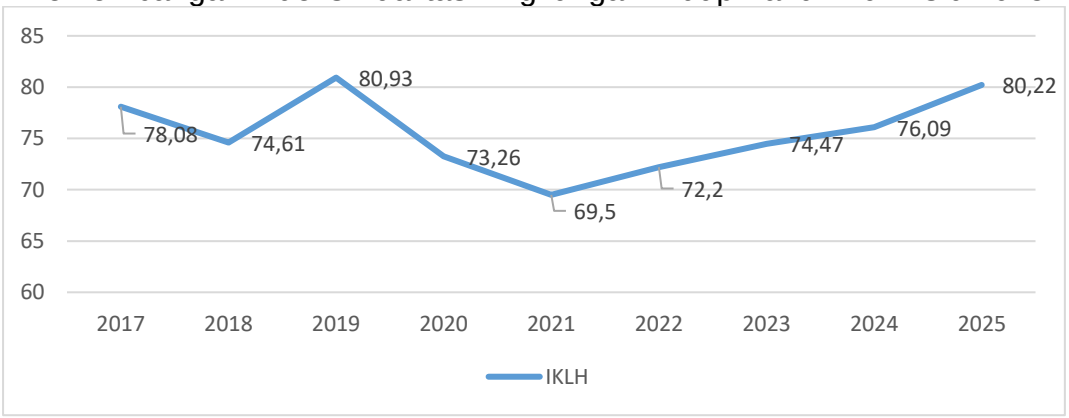
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 terealisasi sebesar apabila 80,22 dibandingkan dengan target 76,1 sehingga capaiannya sebesar 105,41% yang dikategorikan *Sangat Tinggi.*

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup realisasinya mencapai angka 80,22 ini mengalami peningkatan sebesar 4,13 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 76,09.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 terealisasi sebesar 80,22 apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 76,73 sehingga capaian sebesar 104,54%

Grafik II.32
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 s.d 2025



Sumber : Diolah oleh Penulis, Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru, 2026

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan IKLH Kabupaten Kotabaru dari tahun 2017 hingga 2025, terlihat fluktuasi yang cukup dinamis namun menunjukkan tren pemulihan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan skor 69,5, pemerintah daerah berhasil melakukan berbagai intervensi lingkungan yang efektif sehingga angka tersebut terus merangkak naik secara konsisten hingga mencapai skor 80,22 pada tahun 2025.

Peningkatan tajam dari tahun 2023 (74,47) ke tahun 2025 (80,22) mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan sumber daya alam, pengawasan terhadap limbah industri, serta upaya rehabilitasi lahan di Kabupaten Kotabaru telah berjalan dengan optimal. Angka 80,22 ini juga melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai rekor tertinggi di tahun 2019 (80,93), yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian alam.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha/industri terhadap dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sehingga limbah hasil aktivitas industri lebih terkendali.
2. Penambahan luasan taman kota dan area hijau di wilayah Kotabaru yang berkontribusi pada kualitas udara dan estetika kota
3. Peningkatan jangkauan pelayanan sampah dan penguatan Bank Sampah yang mengurangi beban pencemaran pada tanah dan air.
4. Keberhasilan dalam penanaman kembali dan pemulihan lahan kritis

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Risiko kebakaran lahan pada musim kemarau yang sewaktu-waktu dapat menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) secara drastis akibat kabut asap

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekosistem. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong sektor industri di wilayah Kotabaru untuk mengadopsi prinsip ekonomi berkelanjutan melalui penerapan sertifikasi industri hijau dan penggunaan teknologi produksi bersih. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan emisi gas buang, limbah cair, dan residu produksi lainnya langsung dari sumbernya, sehingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas industri dapat dikurangi secara signifikan sejalan dengan target pencapaian kualitas udara dan air yang lebih baik.

Selain fokus pada sektor industri, pemerintah daerah juga mengoptimalkan sinergi dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang difokuskan pada perlindungan keanekaragaman hayati dan pemulihan ekosistem lokal. Program ini tidak hanya bersifat teknis-konservatif, tetapi juga menyasar pada aspek sosiologis melalui edukasi perubahan perilaku masyarakat secara masif, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang bertanggung jawab. Dengan memadukan komitmen kepatuhan industri dan partisipasi aktif masyarakat melalui dukungan kemitraan swasta, diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru dapat terus meningkat, sekaligus menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 14 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup: (DLH)

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten /Kota

            Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan visi utama untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selain sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pengendalian ini juga berfungsi sebagai pendukung dalam mengantisipasi isu-isu global serta menciptakan keseimbangan dan keserasian antar sektor pembangunan.

Fokus sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rancang bangun pembangunan di Kabupaten Kotabaru yang berbasis lahan dengan tetap memperhatikan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan demi mempertahankan fungsi dan kualitas lingkungan pada kondisi yang layak, mewujudkan tata kelola berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

Secara operasional, kegiatan ini menghasilkan output nyata yang mencakup pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan, serta langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengendalian dan pemantauan yang ketat. Seluruh rangkaian proses ini bermuara pada outcome berupa tersusunnya Dokumen Muatan Hasil Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh alokasi anggaran yang efisien. Meskipun terdapat penyesuaian dari Pagu Anggaran Murni sebesar Rp69.226.361 menjadi Rp39.506.361 pada Pagu Anggaran Perubahan, program ini berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut ditandai dengan tuntasnya penyusunan 1 dokumen pengendalian RPPLH sebagai acuan strategis daerah.



b. Kegiatan Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang, pemerintah telah mengalokasikan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp453.844.761. Namun, berdasarkan penyesuaian kebijakan anggaran, pada Pagu Anggaran Perubahan, nilai alokasi untuk sub kegiatan ini tercatat menjadi nol (Rp0). Hal ini mengindikasikan adanya reklasifikasi atau pergeseran prioritas pendanaan dalam rencana tata ruang pada periode berjalan.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup

ub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS bagi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang memiliki potensi dampak atau risiko lingkungan hidup yang signifikan, awalnya dialokasikan Pagu Anggaran Murni sebesar Rp379.727.198. Sama halnya dengan sub kegiatan sebelumnya, Pagu Anggaran Perubahan untuk pos ini juga tercatat sebesar Rp0. Kondisi ini berimplikasi langsung pada capaian program, di mana realisasi kinerja untuk kegiatan KLHS KRP yang berisiko lingkungan tersebut dilaporkan tidak ada atau tidak terealisasi pada tahun anggaran ini.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian pencemaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung antar sektor pembangunan.

Melalui kegiatan ini dilakukan pembahasan mengenai potensi sumber pencemaran lingkungan, strategi pengendalian pencemaran pada berbagai media lingkungan, serta penyelarasan kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Sasaran sub kegiatan adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup sehingga kebijakan pengendalian pencemaran dapat dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.980.000 atau 99,90%, dengan capaian output berupa 2 kegiatan koordinasi yang terlaksana sesuai rencana.





2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menghitung sumber-sumber emisi gas rumah kaca yang berasal dari berbagai sektor kegiatan pembangunan di daerah. Inventarisasi emisi GRK merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, karena data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penurunan emisi di tingkat daerah. Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data dan informasi mengenai emisi gas rumah kaca daerah yang akurat dan terukur sehingga dapat mendukung perencanaan kebijakan mitigasi perubahan iklim di daerah.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6.146.150 dengan realisasi sebesar Rp 6.141.192 atau 99,92%





3) Sub kegiatan Pelaksanaan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap media Tanah, air, udara dan laut

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif dalam mengendalikan potensi pencemaran lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas pembangunan maupun kegiatan masyarakat. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui pembinaan kepada pelaku usaha, pengawasan awal terhadap potensi sumber pencemar, serta pemberian rekomendasi teknis terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup serta menurunnya potensi pencemaran pada media lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 248.893.000 dengan realisasi sebesar Rp 223.160.431 atau 89,66%, dengan capaian output berupa 8 laporan kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.



4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan laut

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi kualitas lingkungan hidup secara berkala melalui kegiatan pemantauan pada berbagai media lingkungan. Pemantauan dilakukan melalui pengambilan sampel serta pengukuran parameter kualitas lingkungan di lapangan.

Data hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi lingkungan hidup serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data kualitas lingkungan hidup yang akurat dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 238.846.719 dengan realisasi sebesar Rp 228.178.040 atau 95,53%, dengan capaian output berupa pemantauan kualitas lingkungan pada 13 lokasi.

Pemantauan lingkungan telah dilaksanakan pada 13 (tiga belas) kecamatan sebagaimana rencana kerja yaitu Pulaulaut Utara, Pulalaut Sigam, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Tengah, Pulaulaut Barat, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir, Kelumpang Barat, Sungai Durian, Sampanahan, Pamukan Barat, Kelumpang Utara dan Pamukan Utara, untuk sampel air dan penambahan pada 1 (satu) kecamatan yaitu Hampang dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai. Sedangkan pemantauan kualitas udara dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pulaulaut Sigam, Kelumpang Hilir dan Pamukan Barat, sebanyak 4 titik pada masing-masing kecamatan.





5) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung komitmen nasional terhadap pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan perubahan iklim serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi mitigasi di daerah.

Melalui sub kegiatan ini, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pengendalian perubahan iklim. Peningkatan kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengurangan emisi GRK dan peningkatan ketahanan lingkungan.

Salah satu bentuk implementasi dari sub kegiatan ini adalah melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ini merupakan bentuk pengakuan terhadap desa atau komunitas

yang telah melaksanakan aksi nyata dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan emisi GRK.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa desa yang memperoleh Sertifikat Kategori Kampung Iklim Pratama Tingkat Kabupaten, yaitu:

1. Desa Teluk Tamiyang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
2. Desa Tanjung Selayar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
3. Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat
4. Desa Sumber Sari, Kecamatan Pulau Laut Barat
5. Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK di tingkat nasional.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 59.651.450, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.600.290 atau 99,91% dari pagu anggaran yang tersedia. Adapun capaian output dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 laporan kegiatan mitigasi perubahan iklim sebagai bahan evaluasi serta dasar perencanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim pada tahun berikutnya.





6) Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang memuat gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru secara komprehensif. Dokumen ini memuat informasi mengenai kualitas lingkungan, tekanan terhadap lingkungan, serta respons kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen SLHD juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sasaran sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen informasi lingkungan hidup daerah yang komprehensif sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 5.071.524 dengan realisasi sebesar Rp 4.996.524 atau 98,52%,



7) Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data kualitas lingkungan yang akurat melalui kegiatan pengambilan sampel serta pengujian parameter lingkungan di laboratorium. Pengujian tersebut meliputi berbagai parameter yang berkaitan dengan kualitas air, udara, tanah, dan media lingkungan lainnya.

Hasil pengujian parameter lingkungan ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data hasil pengujian kualitas lingkungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 488.696.840 dengan realisasi sebesar Rp 471.626.200 atau 96,51%, dengan capaian output berupa 179 paket pengujian parameter kualitas lingkungan.

Capaian kegiatan pemantauan kualitas air dan udara tahun 2025 sebanyak 191 sampel dengan detail:

a) 95 sampel air pada semester 1 (dengan penambahan pemantauan badan Sungai terdekat dengan TPA Sungup Kanan, Sungai Serongga, Sungai Bangkalaan, Sungai Bantilan dan Sungai Cengal dalam penentuan titik pantau)
b) 96 sampel air pada semester 2 (dengan penambahan pemeriksaan sampel Sungai Cantung dalam rangka RPPMA)
c) 24 sampel udara dengan 8 sampel pada kecamatan Pulaualut Sigam (4 titik x 2 frekuensi), 8 sampel pada kecamatan Kelumpang Hilir (4 titik x 2 frekuensi) dan 8 sampel pada kecamatan Pamukan Barat (4 titik x 2 frekuensi)

d) Total sampel air dan udara yang telah dilaksanakan di tahun 2025 yaitu 215 sampel yang jika dipresentasekan yaitu 120% (melampaui target tahunan)



8) Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pemantauan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemantauan yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi berbagai peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang digunakan dalam kegiatan pengukuran dan pengujian parameter lingkungan.

Ketersediaan sarana dan prasarana ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi data kualitas lingkungan serta mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan hidup di daerah.

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.242.830.930 dengan realisasi sebesar Rp 1.197.500.451 atau 96,35%,






9) Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan operasional laboratorium lingkungan hidup berjalan secara optimal dalam mendukung kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan. Pengelolaan laboratorium meliputi pengelolaan administrasi laboratorium, pemeliharaan peralatan laboratorium, serta pelaksanaan kegiatan pengujian parameter lingkungan.

Laboratorium lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam menyediakan data ilmiah yang akurat mengenai kondisi lingkungan hidup, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Sasaran sub kegiatan adalah meningkatnya kapasitas layanan laboratorium lingkungan hidup dalam mendukung kegiatan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 665.569.770 dengan realisasi sebesar Rp 636.889.229 atau 95,69%, dengan capaian output berupa 1 dokumen pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.



b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sub kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan hidup melalui kegiatan rehabilitasi pada kawasan yang mengalami kerusakan lingkungan. Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan serta memulihkan fungsi ekologis lingkungan sehingga dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kegiatan rehabilitasi ini dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti penanaman vegetasi, pemulihan kondisi lahan yang terdegradasi, serta upaya lain yang mendukung pemulihan fungsi lingkungan hidup pada kawasan yang terdampak kerusakan lingkungan.

Sasaran sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada kawasan yang mengalami kerusakan serta pulihnya fungsi ekologis lahan melalui kegiatan rehabilitasi lingkungan.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 306.091.000 dengan realisasi sebesar Rp 276.014.365 atau

90,17%, dengan capaian output berupa rehabilitasi lingkungan seluas 1 hektare.



3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

      Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan melalui pembangunan, penataan, dan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air, penyeimbang ekosistem, serta ruang publik bagi masyarakat.

      Sub kegiatan ini pada awalnya direncanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.596.477.800, kemudian melalui APBD Perubahan dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.216.299.000 untuk pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau dan pembangunan pagar makam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berhasil merealisasikan 25 paket kegiatan serta 1 paket pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan Siring Laut.

      Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala berupa meningkatnya kebutuhan terhadap luasan area ruang terbuka hijau sehingga lokasi yang direncanakan sebelumnya tidak lagi mencukupi dan memerlukan pencarian lokasi alternatif. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan juga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Sasaran sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga dapat berfungsi optimal sebagai kawasan penyangga lingkungan, ruang publik masyarakat, serta habitat flora dan fauna di Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 4.216.299.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.643.032.213 atau 86,40%.



2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan kawasan keanekaragaman hayati melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana yang menunjang kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan.

Sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati dapat dikelola dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologisnya.

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati sehingga kawasan yang memiliki nilai ekologis dapat terpelihara dengan baik.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 754.557.750 dengan realisasi sebesar Rp 745.040.964 atau

98,74%, dengan capaian output berupa 1 unit sarana prasarana keanekaragaman hayati.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
   a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota

         Sub kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelaku usaha yang belum memiliki izin serta belum melakukan pengelolaan limbah B3 secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

         Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha serta fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tata cara pengelolaan limbah B3, khususnya dalam kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

         Sub kegiatan ini pada awalnya direncanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 204.078.000, kemudian melalui anggaran perubahan dialokasikan sebesar Rp 133.052.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.630.300 atau 30,54%.

         Pelaksanaan kegiatan ini berhasil merealisasikan pembinaan terhadap 10 pelaku usaha, yaitu:

         1. PT Sawitakarya Manunggul
         2. PT Bersam Sejahtera Sakti
         3. PT Smart Bukit Kapur

4. PT Skip Sungai Kupang
5. PT Banua Lawas Lestari
6. PT Fajar Agro Sejahtera
7. PT Wijaya Borneo Tigana
8. PT Palma Prima Plantation
9. Bengkel-bengkel di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Selatan
10. Koordinasi dengan PT Sinar Bintang Albar terkait transportasi dan pengumpulan Limbah B3

Sasaran sub kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 sehingga dapat meminimalkan potensi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah berbahaya dan beracun di wilayah Kabupaten Kotabaru.



5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

         Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemilik izin lingkungan dan izin PPLH terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan,

pengawasan, serta fasilitasi pemenuhan komitmen izin lingkungan terhadap pelaku usaha maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan terlaksananya pengawasan terhadap penaatan izin lingkungan dan izin PPLH.

Sasaran kegiatan ini adalah pemilik izin lingkungan dan izin PPLH, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan serta pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Sub kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 51.498.998, kemudian melalui anggaran perubahan dialokasikan sebesar Rp 23.001.998 dengan target capaian berupa 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pengawasan terhadap 6 fasilitas pelayanan kesehatan serta pelaksanaan 2 kegiatan rapat fasilitasi terkait izin lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, antara lain Puskesmas Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan, Puskesmas Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Sigam, Puskesmas Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam, Puskesmas Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, serta Puskesmas Sengayam Kecamatan Pamukan Barat. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pemenuhan izin pembuangan air limbah dari aktivitas fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, kegiatan juga mencakup rapat fasilitasi mediasi antara masyarakat Desa Magalau Hulu dengan PT Sumber Daya Energi terkait dugaan pencemaran lingkungan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan pelaku usaha dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan operasional IPAL sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.





2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, serta pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.

Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan.

Sasaran sub kegiatan ini adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 122.802.000 dengan realisasi sebesar Rp 121.138.800 atau 98,65%.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2025 berhasil merealisasikan pengawasan terhadap 22 pelaku usaha, antara lain: PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, PT Baramega Citra Mulia Persada (BCMP), PT Borneo Sawit Persada, PT Paripurna Swakarsa Pondok Lanu Factory & Estate (PLF) Pamukan Selatan, PT Langgeng Muara Makmur, PT Pesona Lintas Surasejahtera, PT Swadaya Andika PKS Selabak, PT Sumberdaya Energi Lestari Qinfa, Puskesmas Sengayam, PT Kalimantan Energi Lestari, PT Blue Coke Indonesia, PT Benua Lawas Lestari, PT Sebuku Iron Lateritik, CV Berkah Pulau Laut, PT Sawitakarya Manunggul, PT Kingtose Indonesia, PT Sebuku Baja Perkasa, serta PT Buana Karya Wiratama, yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan serta kewajiban pengelolaan lingkungan hidup oleh masing-masing pelaku usaha.





6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH

a. Kegiatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokal yang dimiliki dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah serta pengumpulan data dan informasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat dan pengetahuan tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, serta pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat hukum adat yang memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 27.415.900 dengan realisasi sebesar Rp 27.330.900 atau 99,69%.



7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat

         Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan pendidikan lingkungan hidup yang diikuti oleh sekolah setingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui pembinaan sekolah menuju program Adiwiyata.

         Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas sekolah dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup sehingga tercipta sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan.

         Sasaran kegiatan ini adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Kotabaru yang dibina dalam program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.

         Output kegiatan ini adalah jumlah pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, yaitu Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten sebanyak 10 sekolah.

         Sub kegiatan ini pada awalnya memiliki pagu anggaran murni sebesar Rp 281.999.950, kemudian melalui APBD Perubahan dialokasikan sebesar Rp 197.587.300 dengan realisasi kinerja pembinaan terhadap 50 sekolah (100%), dengan target pembinaan 10 sekolah calon Adiwiyata Kabupaten.

Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan antara lain:

1) SMAS Indocement Tarjun
2) SMKN 2 Kotabaru
3) SMPN 1 Kotabaru
4) SDN 2 Tarjun
5) SMAN 1 Kelumpang Hilir
6) SMAN 1 Kelumpang Hulu
7) SMPN 3 Pulau Laut Tengah
8) SDN Gunung Sari
9) SMKN 1 Kotabaru
10) SDN Megasari
11) SMAN 1 Pulau Laut Selatan
12) SDN 1 Tanjung Seloka
13) SMKN 1 Tanjung Selayar
14) SMPN 1 Pulau Laut Barat
15) SMAN 1 Pulau Laut Barat
16) SDN 1 Pulau Laut Barat
17) SDN 1 Mekarpura
18) SMAN 1 Pulau Laut Tengah
19) SMPN 1 Pulau Laut Tengah
20) SDN Sebelimbingan
21) SMPN 2 Kotabaru
22) SMPN 3 Kotabaru
23) SMA 2 Kotabaru
24) MTsS Darul Ulum Kotabaru
25) MTsN 1 Kotabaru
26) MTsN 2 Kotabaru
27) SMPN 4 Kotabaru
28) SMPN 7 Kotabaru
29) SMAN 1 Kotabaru
30) SMPN 1 Pulau Laut Timur
31) SMPN 2 Pulau Laut Timur

32) SMAN 1 Pulau Laut Timur
33) SDN 1 Berangas
34) SDS Laut Timur
35) SMPS Laut Timur
36) SMPS Indocement Kelumpang Hilir
37) SDIT Darul Hijrah Kelumpang Hilir
38) SMP Sabilul Muttaqin Kelumpang Hilir
39) SMPN 3 Kelumpang Hilir
40) SDN 1 Sungai Kupang Kelumpang Hulu
41) SDN 2 Sungai Kupang Kelumpang Hulu
42) SDN 1 Hampang
43) SMPN 1 Hampang
44) SMAN 1 Hampang
45) SDN Karang Payau
46) SDN Gendang Timburu Sungai Durian
47) SDN 2 Sungai Durian
48) SMPN 2 Kelumpang Selatan
49) MAN Kotabaru
50) SMKS Indocement Tarjun.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan sekolah-sekolah di Kabupaten Kotabaru dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah sehari-hari





8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilakukan melalui penerimaan laporan pengaduan masyarakat, verifikasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, serta pemantauan terhadap kegiatan usaha yang diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat terkait permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pihak usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 110.848.800 dengan realisasi sebesar Rp 103.167.855 atau 93,07%.

Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru telah menindaklanjuti 8 (delapan) kasus pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di beberapa wilayah Kabupaten Kotabaru. Penanganan pengaduan dilakukan melalui kegiatan verifikasi lapangan, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan,

serta pemantauan terhadap kegiatan usaha yang diduga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Adapun beberapa kasus pengaduan yang ditangani pada tahun 2025 antara lain:

1. Dugaan pencemaran debu dari aktivitas industri oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Desa Tarjun dan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir.
2. Dugaan pencemaran Sungai Sampanahan yang dilaporkan oleh warga Desa Sampanahan Kecamatan Sampanahan.
3. Identifikasi potensi pengaduan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur terkait aktivitas pertambangan dan perkebunan.
4. Dugaan kerusakan lingkungan pasca kegiatan pertambangan oleh PT Sebuku Batubai Coal di Kecamatan Pulau Laut Tengah.
5. Monitoring pengelolaan lingkungan hidup PT Pelsart Tambang Kencana di Kecamatan Sungai Durian terkait dugaan pencemaran lingkungan dan pemantauan DAS Sampanahan.
6. Dugaan pencemaran kebun masyarakat akibat limbah stockpile batubara oleh PT Sumber Daya Energi di Desa Magalau Hulu dan Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian.
7. Pengawasan insidentil terhadap dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas tambang PT Sumber Daya Energi sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
8. Identifikasi potensi kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha PT Kalimantan Energi Lestari di Kecamatan Sungai Durian.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan koordinasi yang dilakukan, sebagian kasus telah dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan, sedangkan beberapa kasus lainnya masih dalam tahap

pemantauan untuk memastikan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup oleh pelaku usaha. Penanganan pengaduan dilaksanakan melalui pendekatan koordinasi dan musyawarah antara masyarakat, pemerintah desa/kecamatan, serta pelaku usaha guna mencapai penyelesaian permasalahan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan.



9. Program Pengelolaan Persampahan
   a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
      1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

         Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta penguatan peran kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan sehingga dapat mendukung upaya pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang berperan dalam kegiatan pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 9.487.030.500 dengan realisasi sebesar Rp 9.127.682.506 atau 96,21%, dengan capaian kinerja berupa pembinaan terhadap 6 kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Kotabaru melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan sarana dan prasarana persampahan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga pelayanan pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Kotabaru.

Sasaran kegiatan ini adalah perangkat daerah serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 589.696.800 dengan realisasi sebesar Rp 587.154.814 atau 99,57%, dengan capaian kinerja berupa 1 dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.



3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Kotabaru melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Penyediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir sampah sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah berkurangnya volume sampah yang dikelola melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai penerima manfaat pelayanan pengelolaan persampahan.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 21.806.432.400, dengan capaian kinerja berupa pengelolaan sampah sebanyak 19.670 ton dari target 46.984 ton sampah. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa 1 unit jembatan timbang, 1 unit excavator mini, 1 unit excavator, 2 unit truk, serta 4 unit pick up untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Kotabaru.



4) Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan

Sub kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah melalui kegiatan pengangkutan sampah dari sumber sampah maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat tertangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta dapat menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan pengangkutan sampah sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat dapat tertangani secara optimal.

Sasaran kegiatan ini adalah kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Kotabaru yang memerlukan pelayanan pengangkutan sampah.

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 4.771.121.700 dengan realisasi sebesar Rp 4.008.032.520 atau 84,01%, dengan capaian kinerja berupa penanganan sampah melalui pengangkutan sebanyak 91.406 ton sampah.

5) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah

Sub kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah dilaksanakan dalam rangka mengurangi timbulan sampah melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya melalui kegiatan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah sehingga volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dikurangi.

Tujuan kegiatan ini adalah mengurangi timbulan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang berperan dalam kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Outcome kegiatan ini adalah berkurangnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat sehingga dapat mengurangi beban pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 174.163.444 dengan realisasi sebesar Rp 79.897.444 atau 45,87%, dengan capaian kinerja berupa pengurangan sampah

melalui pemanfaatan kembali sampah sebanyak 9.563 ton dari target 16.393 ton sampah.



10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
    a. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota

        Sub kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

        Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya.

        Sasaran kegiatan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Kotabaru.

        Sub kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 212.634.000 dengan realisasi sebesar Rp 204.475.277 atau 96,16%, dengan capaian kinerja berupa 1 dokumen kerja sama penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota.




11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
    a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

           Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian terhadap kinerja berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui penilaian kantor ramah lingkungan di lingkungan pemerintah daerah sebagai upaya mendorong penerapan perilaku ramah lingkungan dalam aktivitas perkantoran.

           Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja serta kepedulian instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan kerja.

           Sasaran kegiatan ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Kotabaru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan kantor yang ramah lingkungan.

Sub kegiatan ini pada awalnya direncanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000**,** namun pada saat **APBD** Perubahan mengalami efisiensi anggaran sehingga menjadi Rp **0**. Meskipun demikian, kegiatan tetap dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan kegiatan ini tetap menghasilkan output berupa terlaksananya penilaian kantor ramah lingkungan pada SKPD di Kabupaten Kotabaru sebagai bentuk evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.





Sasaran 15: Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Kotabaru memandang resiliensi atau ketangguhan daerah sebagai pilar krusial dalam melindungi hasil-hasil pembangunan dari risiko ketidakpastian alam. Mengingat letak geografis Kotabaru yang memiliki garis pantai panjang serta wilayah perbukitan, sasaran strategis Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim difokuskan pada penguatan kemampuan daerah untuk

menyerap, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana secara cepat dan efektif. Upaya ini bukan sekadar tindakan responsif saat terjadi bencana, melainkan pendekatan preventif yang mengintegrasikan aspek mitigasi ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui IKU Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks ini merupakan instrumen pengukuran yang mengevaluasi kapasitas daerah berdasarkan pemenuhan 7 (tujuh) fokus utama, mulai dari penguatan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, hingga sistem penanggulangan kedaruratan. Peningkatan nilai IKD mencerminkan bahwa Kabupaten Kotabaru semakin siap dalam menghadapi ancaman bencana melalui infrastruktur pelindung yang lebih kokoh, sistem peringatan dini yang andal, serta komunitas warga yang teredukasi dan tangguh (Desa Tangguh Bencana).

Tabel II.43
Capaian Indeks Ketahanan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2025 Terhadap RPJMD
		2024	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,50	0,50	0,50	100%	0,58	86,20%

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

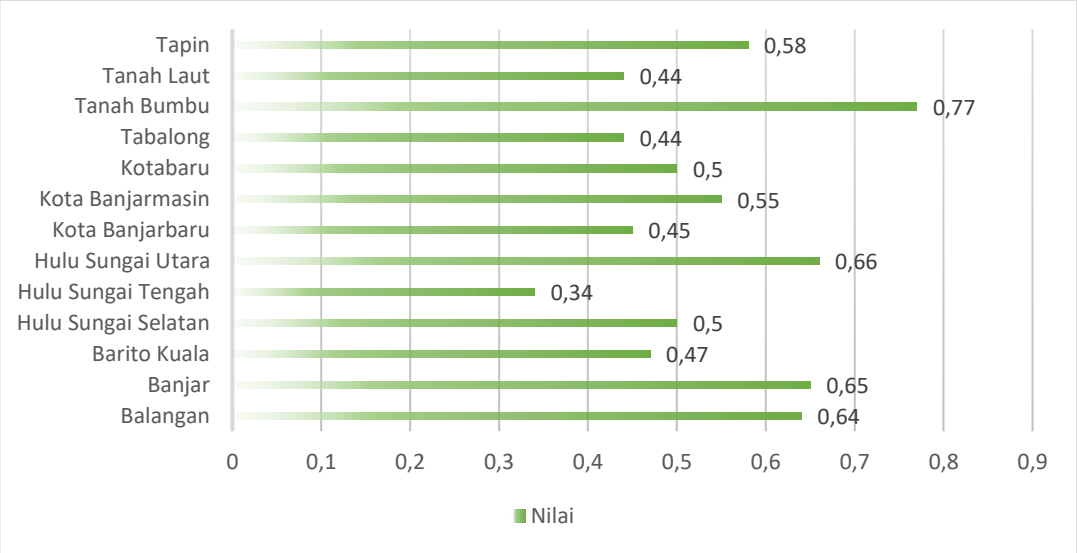
Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar apabila 0,50 dibandingkan dengan target 0,50 sehingga capaiannya sebesar 100% yang dikategorikan ***Sangat Tinggi.***

Pada tahun 2025, Indeks Ketahanan Daerah realisasinya mencapai angka 0,50 ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,50.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar 0,50 apabila

dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,58 sehingga capaian sebesar 86,20%

Grafik II.33
Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

Grafik tersebut menyajikan Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah untuk berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, angka indeks menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah, dengan rentang nilai antara 0,34 hingga 0,77, sebagai berikut:

1. Capaian Tertinggi: Kabupaten Tanah Bumbu memimpin dengan indeks ketahanan tertinggi sebesar 0,77, disusul oleh Hulu Sungai Utara (0,66) dan Banjar (0,65).
2. Capaian Terendah: Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat memiliki indeks ketahanan paling rendah dalam daftar ini, yaitu sebesar 0,34.
3. Kelompok Menengah: Sebagian besar wilayah berada pada kisaran angka 0,40 hingga 0,60, termasuk pusat pemerintahan seperti Kota Banjarmasin (0,55) dan Kota Banjarbaru (0,45).

Berdasarkan data tersebut, kondisi ketahanan di Kotabaru dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks: Kotabaru memiliki nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,5.

2. Posisi Relatif: Dengan angka 0,5, Kotabaru berada tepat di titik tengah dalam skala data yang ada. Nilai ini identik dengan nilai yang dicapai oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Status: Angka 0,5 menunjukkan tingkat ketahanan yang berada pada kategori moderat atau cukup. Meskipun sudah lebih baik dibandingkan beberapa wilayah seperti Hulu Sungai Tengah (0,34) atau Tabalong (0,44), Kotabaru masih memiliki selisih yang cukup jauh (0,27 poin) untuk mencapai tingkat ketahanan yang dimiliki oleh Tanah Bumbu.

Faktor Pendorong dalam capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah, sebagai berikut:

1. Adanya regulasi daerah yang mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai fondasi ketahanan daerah
2. Ketersediaan anggaran operasional untuk instansi terkait (seperti BPBD) yang memastikan program pencegahan tetap berjalan setiap tahunnya
3. Tingginya modal sosial dan gotong royong masyarakat pesisir dan kepulauan di Kotabaru dalam menghadapi ancaman bencana alam

Sedangkan, faktor penghambat capaian indikator Ketahanan Daerah adalah Luasnya wilayah Kotabaru yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan distribusi logistik dan pemerataan infrastruktur ketahanan secara cepat

Sebagai bentuk tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk memperkuat struktur ketangguhan wilayah dalam menghadapi potensi bencana melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis kemitraan. Strategi utama dilakukan dengan memperbanyak pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara masif di seluruh wilayah kerentanan. Melalui penguatan kapasitas di tingkat akar rumput (grassroots) ini, diharapkan ketahanan daerah tidak hanya bertumpu pada kesiapan pemerintah kabupaten, tetapi juga terbangun melalui kemandirian masyarakat desa dalam melakukan mitigasi dini dan tanggap darurat yang efektif secara mandiri.

Guna memastikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam melalui mekanisme

bedah indikator IKD secara kolektif bersama seluruh pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel spesifik yang masih menunjukkan nilai rendah, sehingga rencana aksi yang disusun dapat lebih fokus dalam menjawab tantangan teknis maupun manajerial yang ada. Upaya ini didukung penuh dengan penyelenggaraan pelatihan teknis berkelanjutan bagi aparatur pemerintah dan relawan bencana yang ditekankan pada manajemen risiko bencana yang terukur. Dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mempertajam akurasi intervensi kebijakan, Kabupaten Kotabaru optimis dapat terus menaikkan skor Indeks Ketahanan Daerah guna menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih aman dan terlindungi.

Berikut program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan terhadap Sasaran 15 yaitu Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim:

1. Program Penanggulangan Bencana
    a. Kegiatan Pelayanan Informasi Bencana, melaksanakan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Perjenis Bencana), dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui Sosialisasi Tatap Muka maupun melalui Media Sosial terhadap 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Timur dan Kecamatan Pulau Laut Sigam sebanyak 700 Orang serta memberikan Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi sebanyak 30 Rambu di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sigam.
    b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, sebagai berikut:
        1) Melaksanakan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025
        2) Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kotabaru kepada beberapa Kelompok Masyarakat seperti Anak-anak Sekolah, Pegawai ASN, para wartawan serta Aparat Desa di lingkungan Kabupaten Kotabaru.

c. Melaksanakan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kotabaru, dengan:
    1) Melakukan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BNPB Pusat di Jakarta;
    2) Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) di BPBD Provinsi Kalsel;
    3) Melakukan Koordinasi BPBD, PUPR dan Komisi I, II & III di Dewan Pembahasan Penanganan Bencana Banjir di Kab.Kotabaru.
    4) Melaksanakan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten Kotabaru
    5) Melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dokumentasi

Input data ke-Aplikasi Harapan Ceria dalam Rangka Validasi data Pascabencana Tingkat Kabupaten



Prakiraan Cuaca secara berkala kepada masyarakat



Sosialisasi Kecamatan Tangguh Bencana



Kegiatan Basic Sea Rescue Survival dan Pelatihan Water Rescue bagi Pekerja Proyek Jembatan Pulau Laut PT Hutama Karya bersama BASARNAS Kotabaru



d. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana

1) Melaksanakan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan melakukan Koordinasi Bersama BPBD, Basarnas, Kepolisian, TNI Penangnan Pasca Longsor di Sungai Durian sebanyak 1kali;
2) Melaksanakan Penyiapan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan:
3) Melakukan Koordinasi ke BPBD Propinsi Kalsel Penanganan Bantaun Logistik Korban Bencana;
4) Melakukan Koordinasi dan Sherring Penggunaan Peralatan Pusdalops dengan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu;
5) Melakukan Koordinasi Bantuan Logistik Peralatan Kebencanaan dan Peralatan Pusdalops bi BPBD Propinsi Kalsel;
6) Melakukan Koordinasi Bantuan Peralatan untuk Pusdalops di BNPB Pusat Di Jakarta.

Dokumentasi:

Penjemputan Nelayan yang Dikabarkan Hilang di Perairan Laut Tanjung Selayar



Penangangan Pohon Tumbang



Penanganan Banjir





Penanganan Kebakaran di wilayah Kotabaru





2. Program Penanganan Bencana
   a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
      1) Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan

         Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk menyediakan makanan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam atau bencana sosial.
      2) Sub kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar pangan korban bencana selama masa tanggap darurat atau pemulihan awal.
      3) Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang

         Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk menyediakan bantuan pakaian atau perlengkapan sandang bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam atau bencana sosial.

         Sub kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar sandang korban bencana agar tetap dapat hidup secara layak selama masa penanganan bencana.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan : Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Kegiatan ini adalah upaya pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial untuk mengoordinasikan, memberikan sosialisasi, dan mendukung kegiatan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran Tagana dan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan awal bencana.

Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana karena Kejadian tidak dapat diduga atau diprediksi kapan pun dimanapun kita tidak dapat mengetahuinya namun kesiapsiagaan kita semua harus waspada. Apabila terjadi Bencana Dinas Sosial akan membantu dengan berupa barang sandang maupun pangan (sembako).

Koordinasi hubungan dengan instansi terkait yang mana apabila terjadi bencana Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan instansi terkait BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar dan Kecamatan yang ada dikabupaten Kotabaru sebanyak 22 Kecamatan juga dengan Desa/Kelurahan apabila ada terjadi Bencana Desa bisa secara langsung menghubungi pihak kecamatan atau Dinas Sosial baru surat menyusul laporan kejadian bencana. Dinas Sosial mempunyai relawan TAGANA (TARUNA SIAGA BENCANA) merakalah yang akan membantu bila terjadi bencana, baik bencana alam maupun sosial. Mobil dapur umum yang siap siaga setiap saat baik bahan bakar, oli mobil dan peralatan lainnya yang ada di mobil dapur umum. Sembako untuk bahan masak yang ada di dapur umum.

Dokumentasi Kegiatan

Penyerahan Bantuan Kepada Korban terdampak Bencana Sosial Kebakaran





BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya

Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah, selain itu juga ditambah dengan terbatasnya jangkauan aparatur pemerintah pusat untuk pelaksanaan serta pengawasan pembangunan di daerah. Sehingga Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan dengan melaporkan

pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

DAK atau Dana Alokasi Khusus merupakan Dana APBN yang dialokasikan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan menjadi kewenangan provinsi, kota dan kabupaten termasuk di dalamnya proyek strategis nasional dan mendukung program nawacita Presiden. Secara umum, tujuan DAK sendiri adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Berikut data realisasi tugas pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Kotabaru, untuk Tahun Anggaran 2025.

3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler / Penugasan / Afirmasi

Tabel III.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler / Penugasan / Afirmasi Tahun 2025

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Non Fisik	Swakelola	Kontraktual	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**DAK FISIK 2025**									
1	BIDANG PENDIDIKAN									
	Pendidikan SD	3	Paket	223.704.000	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan SMP	4	Paket	216.600.000	-	162.450.000	-	-	-	-
2	BIDANG KESEHATAN DAN KB									
	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	15	Paket	36.711.385.000	-	36.166.628.316	36.224.680.275	98,67	-	99,31
3	BIDANG KONEKTIVITAS									
	Jalan	4.632	Km	28.648.807.000	-	-	-	-	-	-
	Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)	5,03	Km	20.824.035.000	-	-	-	-	-	-
	Transportasi Perairan - Tematik Kawasan	2	Paket	6.073.000.000	-	-	-	-	-	-

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Non Fisik	Swakelola	Kontraktual	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Produksi Pangan Nasional (KPPN)									
4	BIDANG IRIGASI	185,7	Hektar	760.901.000	-	-	-	-	-	-
5	BIDANG AKUATIK	321, 1720, 4	Paket, Meter lari dan Unit	13.670.500.000	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAK FISIK			**107.128.932.000**	**-**	**36.329.078.316**	**36.224.680.275**	**33,81**		**34,03**
II	**DAK NON FISIK 2025**									
1	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN DINAS (KAB/KOTA)	1	Tahun	6.503.303.600	6.503.303.600	-	5.875.054.510	90,34	-	90,34
2	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN - PUSKESMAS	1	Tahun	20.524.805.236	20.524.805.236	-	18.274.825.671	89,04	-	89,04
3	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN - PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1	Tahun	531.040.000	531.040.000	-	385.732.659	72,64	-	72,64
	TOTAL DAK NON FISIK			**27.559.148.836**	**27.559.148.836**	**-**	**24.535.612.840**	**89,03**		**89,03**

3.3 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN

Tabel III.2 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2025 BIDANG PENDIDIKAN

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	SD	**3**	**Paket**	**223.704.000**	**-**	**-**		**-**
	Revitalisasi SD							
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD NEGERI SUNGAI PUNGGAWA	1	Paket	100.000.000				-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 2 GUNUNG CALANG	1	Paket	100.000.000				-
	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD NEGERI 2 PANTAI	1	Paket	23.704.000				-
	TOTAL			**223.704.000**	**-**	**-**		**-**

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual Volume	Kontraktual (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (%)	Fisik Volume	Fisik %
1	2	3	4	6	9	10	12	13	14	15
	SMP	**4**	**Paket**	**216.600.000**		**162.450.000**	-	-		-
	Revitalisasi SMP									
	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP NEGERI 1 SUNGAI DURIAN	1	Paket	54.150.000		54.150.000				-
	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP NEGERI 1 PULAU LAUT BARAT	1	Paket	54.150.000		54.150.000				-
	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP NEGERI 3 PULAU LAUT TENGAH	1	Paket	54.150.000		54.150.000				-
	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP NEGERI 5 KOTABARU	1	Paket	54.150.000						-
	TOTAL			**216.600.000**		**162.450.000**	-	-		-

3.4 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG KESEHATAN

Tabel III.3 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2025 BIDANG KESEHATAN

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI		
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual		Keuangan		Fisik
					Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	%
1	2	3	4	6	9	10	12	13	15
	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan	**15**	**Paket**	**36.711.385.000**		**36.166.628.316**	**36.224.680.275**	**98,67**	**99,31**
	Penguatan Puskesmas								
	Renovasi/penambahan ruang Puskesmas SEBATUNG	1	Paket	6.030.000.000	1	6.000.010.890	6.000.010.689	99,50	100,00
	Renovasi/penambahan ruang Puskesmas KELUMPANG F (Desa Sekandis)	1	Paket	6.030.000.000	1	5.917.146.330	5.996.372.180	99,44	100,00
	Rumah Dinas Puskesmas MARABATUAN	1	Paket	622.150.000	1	620.083.682	620.083.662	99,67	100,00
	Air bersih Puskesmas BERANGAS	1	Paket	285.000.000	1	284.000.000	284.000.000	99,65	100,00
	Air bersih Puskesmas BANIAN	1	Paket	285.000.000	1	284.000.000	284.000.000	99,65	100,00

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI		
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual		Keuangan		Fisik
					Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	%
1	2	3	4	6	9	10	12	13	15
	IPAL Puskesmas TAMIANGGERONGGANG	1	Paket	630.000.000	1	627.000.000	627.000.000	99,52	100,00
	IPAL Puskesmas GUNUNG BATU BESAR	1	Paket	630.000.000	1	627.000.000	627.000.000	99,52	100,00
	IPAL Puskesmas BAKAU	1	Paket	630.000.000	1	627.000.000	627.000.000	99,52	100,00
	Penguatan Puskesmas Pembantu								
	Pembangunan baru Pustu Desa Lontar Timur	1	Paket	766.000.000	1	765.064.168	764.063.168	99,75	100,00
	Pembangunan baru Pustu Desa Tanjung Seloka Utara	1	Paket	766.000.000	1	744.903.758	744.903.758	97,25	100,00
	Pembangunan baru Pustu Desa Pulau Kerumputan	1	Paket	766.000.000	1	761.782.657	761.782.657	99,45	100,00
	Pembangunan baru Pustu Desa Serongga	1	Paket	766.000.000	1	761.499.689	761.499.689	99,41	100,00
	Pembangunan baru Pustu Desa Sungai Pinang	1	Paket	766.000.000	1	764.690.046	764.690.046	99,83	100,00
	Pembangunan baru Pustu Desa Sungai Betung	1	Paket	766.000.000	1	762.131.042	762.131.042	99,49	100,00
	Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat								

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI		
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Kontraktual		Keuangan		Fisik
					Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	%
1	2	3	4	6	9	10	12	13	15
	Pembangunan baru (sarana dan prasarana) Kecamatan Pulau Laut Utara	1	Paket	16.037.569.500	1	15.916.819.605	15.916.819.605	99,25	100,00
	Kegiatan Penunjang								
	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	7	Paket	105.000.000	7	104.700.949	104.700.949	99,72	100,00
	Biaya tender	3	Paket	29.795.500		29.795.500	26.394.500	88,59	88,59
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	10	Orang Bulan	569.000.000		569.000.000	552.228.330	97,05	97,05
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	8	Frekuensi	231.870.000		-		-	-
	TOTAL			**36.711.385.000**		**36.166.628.316**	**36.224.680.275**	**98,67**	**99,31**

3.5 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG JALAN

Tabel III.4 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2025 BIDANG JALAN

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Kontraktual		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	9	10	12	13	14	15
	Jalan	**4.632**	**Km**	**28.648.807.000**		**-**	**-**	**-**		**-**
	Penanganan Jalan Kabupaten									
	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan/ rekonstruksi) Lontar - Tanjung Seloka	4.632	Km	28.176.057.000						-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Kontraktual		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	9	10	12	13	14	15
	Kegiatan Penunjang									
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	6	Orang Bulan	400.000.000						-
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	100	Frekuensi	72.750.000						-
	TOTAL			**28.648.807.000**		**-**	**-**	**-**		**-**

3.6 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG KONEKTIVITAS

Tabel III.5 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG KONEKTIVITASTAHUN 2025

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI	
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Keuangan (%)	Fisik %
					Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	15
	Transportasi Perairan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)	**2**	**Paket**	**6.073.000.000**		**-**		**-**	**-**	**-**
	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pelabuhan									
	Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat Pulau Laut Timur Kecamatan Pengadaan lampu penerangan di areal Pelabuhan	1	Paket	29.969.980						-
	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Sisi Perairan Pulau Laut Timur Kecamatan Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga, Rehabilitasi/ Peningkatan Trestle, Rehabilitasi/ Peningkatan Causeway, Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga	1	Paket	5.753.839.524						-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI	
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Keuangan (%)	Fisik %
					Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	15
	Kegiatan Penunjang									
	Biaya tender	1	Paket	10.254.496						-
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	7	Orang Bulan	190.000.000						-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	7	Frekuensi	14.152.000						-
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	12	Frekuensi	74.784.000						-
	TOTAL			**6.073.000.000**		**-**		**-**	**-**	**-**

3.7 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG IRIGASI

Tabel III.6 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN TAHUN 2025 BIDANG IRIGASI

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	Irigasi	**185,7**	**Hektar**	**760.901.000**		**-**		**-**	**-**	**-**		**-**
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi											
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sungai Limau (Saluran Primer, Saluran Sekunder, Saluran Pembuang, Pintu Air)	185,7	Hektar	722.855.950								-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	Kegiatan Penunjang											
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	0	Orang Bulan	32.555.050								-
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	5	Frekuensi	5.490.000								-
	TOTAL			**760.901.000**		**-**		**-**	**-**	**-**		**-**

3.8 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG PANGAN AKUATIK

Tabel III.7 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG PANGAN AKUATIK TAHUN 2025

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)	**321, 1720, 4**	**Paket, Meter lari dan Unit**	**13.670.500.000**	**-**	**-**		**-**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil							
	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT PULAU LAUT SELATAN	30	Paket	450.000.000				-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT PAMUKAN SELATAN	67	Paket	1.005.000.000				-
	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/ atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT PULAU LAUT SELATAN	80	Paket	730.000.000				-
	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/ atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran) untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT KELUMPANG SELATAN	60	Paket	660.000.000				-
	Sarana penangkapan ikan (alat penangkapan ikan dan/ atau sarana pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran)	70	Paket	770.000.000				-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	untuk perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT PAMUKAN SELATAN							
	Sarana dan Prasarana Kampung Nelayan PULAU LAUT SELATAN	1	Paket	1.604.567.500				-
	Sarana dan Prasarana Kampung Nelayan PAMUKAN SELATAN	1	Paket	1.604.567.500				-
	Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota)							
	Penyediaan sarana dan peralatan produksi UPTD Balai Benih kesehatan Ikan Gedambaan	1	Paket	250.000.000				-
	Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk UPTD Balai Benih kesehatan Ikan Gedambaan	2	Paket	225.000.000				-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil							
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal PULAU LAUT TENGAH	1	Paket	100.000.000				-
	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar / Komoditas Lokal KELUMPANG HULU	1	Paket	150.000.000				-
	Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) KELUMPANG SELATAN	2	Paket	300.000.000				-
	Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumput Laut) PAMUKAN SELATAN	5	Paket	750.000.000				-

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Jalan Produksi Kawasan Budidaya PULAU LAUT TIMUR	860	Meter Lari	1.720.000.000				-
	Jalan Produksi Kawasan Budidaya PAMUKAN SELATAN	860	Meter Lari	1.720.000.000				-
	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							
	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil PULAU LAUT TIMUR	1	Unit	237.500.000				-
	Bedah Unit Pengolahan ikan skala mikro kecil PULAU LAUT UTARA	3	Unit	712.500.000				-
	Kegiatan Penunjang							

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	12	13	14	15
	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	12	Paket	308.548.100				-
	Biaya tender	3	Paket	11.985.500				-
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	12	Orang Bulan	268.765.400				-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	3	Frekuensi	6.540.000				-
	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Frekuensi	85.526.000				-
	TOTAL			**13.670.500.000**	**-**	**-**		**-**

3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

Tabel III.8 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2025

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN	REALISASI		
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (%)	Fisik %
1	2	3	4	6	8	12	13	15
	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN DINAS (KAB/KOTA)	1	Tahun	6.503.303.600	6.503.303.600	5.875.054.510	90,34	90,34
	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup			849.295.000	849.295.000	766.405.500	90,24	90,24
	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit			796.546.000	796.546.000	449.793.500	56,47	56,47
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			430.880.600	430.880.600	427.948.000	99,32	99,32

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN	REALISASI		
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (Rp. Dalam Ribuan)	Keuangan (%)	Fisik %
1	2	3	4	6	8	12	13	15
	Penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder			168.661.000	168.661.000	151.593.000	89,88	89,88
	Kefarmasian dan BMHP			3.018.185.000	3.018.185.000	2.966.741.750	98,30	98,30
	Pembinaan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas			28.217.000	28.217.000	9.403.000	33,32	33,32
	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan untuk Topik Prioritas			1.211.519.000	1.211.519.000	1.103.169.760	91,06	91,06
	TOTAL			**6.503.303.600**	**6.503.303.600**	**5.875.054.510**	**90,34**	**90,34**

3.10 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Tabel III.9 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS TAHUN 2025

No	SUB BIDANG KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	12	13	14	15
	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN - PUSKESMAS	1	Tahun	20.524.805.236	-	20.524.805.236	18.274.825.671	89,04	-	89,04
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal			3.923.472.725		3.923.472.725	2.793.133.833	71,19		71,19
	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup			6.775.519.867		6.775.519.867	6.368.149.000	93,99		93,99
	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit			5.355.911.653		5.355.911.653	4.958.717.950	92,58		92,58
	Manajemen Puskesmas			1.792.680.349		1.792.680.349	1.720.036.478	95,95		95,95

No	SUB BIDANG KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	12	13	14	15
	Insentif UKM			2.648.207.642		2.648.207.642	2.420.709.410	91,41		91,41
	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD			29.013.000		29.013.000	14.079.000	48,53		48,53
	TOTAL			**20.524.805.236**		**20.524.805.236**	**18.274.825.671**	**89,04**		**89,04**

3.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan BPOM

Tabel IV.10 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL BPOM TAHUN 2025

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	12	13	14	15
	BANTUAN OPERSIONAL KESEHATAN - PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1	Tahun	531.040.000	-	531.040.000	385.732.659	72,64	-	72,64
	Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPPIRT			183.239.800		183.239.800	151.642.300	82,76		82,76
	Pengawasan post market sarana IRTP			72.989.200		72.989.200	43.175.000	59,15		59,15
	Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga			140.241.000		140.241.000	90.639.859	64,63		64,63

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI			
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Keuangan		Fisik	
				(Rp. Dalam Ribuan)	Volume	(Rp. Dalam Ribuan)	(Rp. Dalam Ribuan)	(%)	Volume	%
1	2	3	4	6	7	8	12	13	14	15
	Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan			134.570.000		134.570.000	100.275.500	74,52		74,52
	TOTAL			**531.040.000**		**531.040.000**	**385.732.659**	**72,64**		**72,64**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Kotabaru, meliputi:

1. Amanah Konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat 2: Tiap – tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 31 ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   - Pasal 18 ayat (1) : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditetapkan dengan SPM.
   - Pasal 18 ayat (2) : Pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
   - Pasal 18 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut tentang SPM diatur dengan PP
   - Pasal 1 ayat (17) : SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
   - Pasal 298 ayat 1 : Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal
3. PP No. 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal
4. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

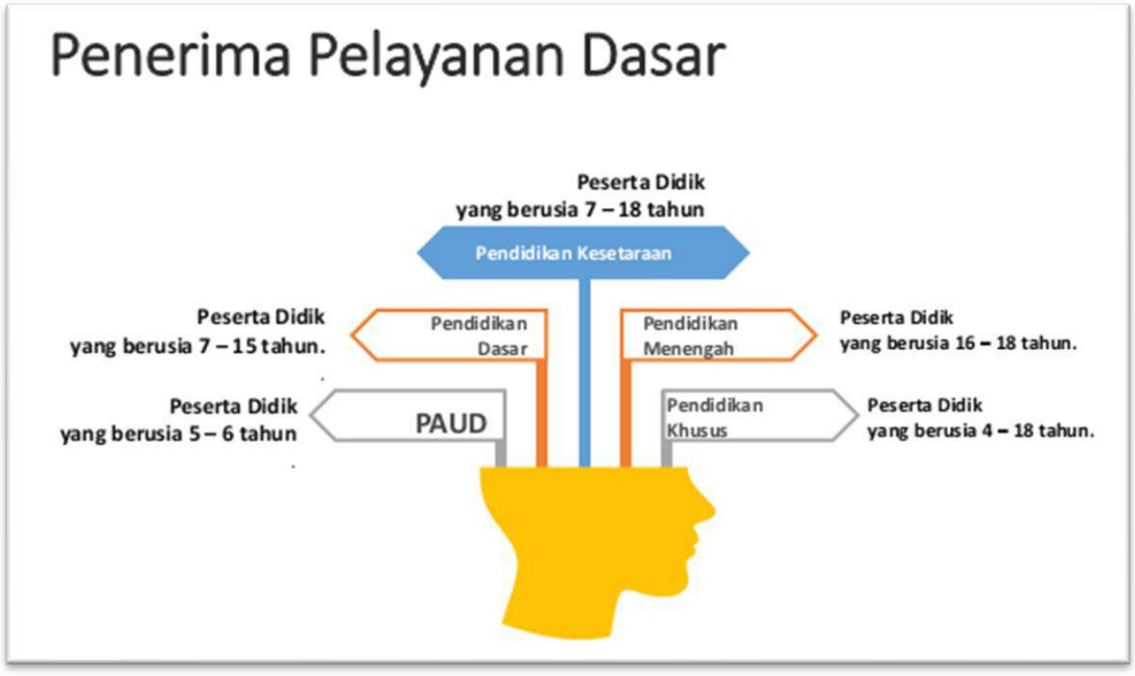
5. Permendikbudristek RI No. 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidkan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 195/M/2024 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Kotabaru dalam kurung waktu lima tahun (2025-2029), maka arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotabaru meliputi:

1. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan meliputi kuantitas maupun kualitasnya mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Non Formal dalam rangka meningkatkan akses pendidikan secara meluas dan merata.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan mutu pendidik beserta sebarannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin mutu/kualitas lulusan peserta didik dalam menghadapi persaingan global, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di lingkungan Kabupaten Kotabaru.
3. Meningkatkan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan\
4. Pelaksanaan pendidikan non formal dan fasilitasi kegiatan belajar masyarakat. Peningkatan Pendidikan Non Formal serta fasilitasi kegiatan belajar masyarakat perlu menjadi prioritas dan perhatian mengingat Visi dari Bupati Kabupaten Kotabaru yang mengedepankan sektor agrobisnis, sehingga pendidikan berkelanjutan masyarakat sangat cocok dalam mendukung visi yang sudah dicanangkan Bupati Kabupaten Kotabaru.



Gambar IV.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan



Gambar IV.2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidkan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2.	Pendidikan Dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3.	Pendidikan Kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel IV.1. Materi Muatan SPM Pendidikan Kabupaten/Kota

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2018 di sebut juga mutu pelayanan dasar meliputi:

4.1.2.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang/Jasa Dan Tata Cara Pemenuhannya

Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa meliputi :

1. Standar satuan pendidikan

   Standar satuan pendidikan terdiri atas :

   a) Standar Kompetensi Kelulusan
   b) Standar Isi
   c) Standar Proses
   d) Standar Sarana Prasarana
   e) Standar Pengelolaan
   f) Standar Pembiayaan
   g) Standar Penilaian

2. Standar biaya pribadi peserta didik

   Standar biaya pribadi peserta didik terdiri atas :

   a) Perlengkapan dasar peserta didik

b) Pembiayaan pendidikan



Gambar IV.3 Standar Jumlah Kualitas Barang/Jasa SPM Pendidikan

a. Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Perlengkapan dasar peserta didik berdasarkan kewenangan Kabupaten terdiri atas:

Tabel IV.2. Perlengkapan dasar peserta didik

No	Penerima Pelayanan Dasar	Perlengkapan Dasar	Jumlah	Kualitas
1.	PAUD	Buku gambar	6 buah per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru
		Alat mewarnai	1 set paling sedikit 12 warnaper peserta didik per semester	
2.	SD dan SMP	Buku teks pelajaran	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum
		Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)	1 set per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru
3	Pendidikan Kesetaraan	Modul belajar	1 paket per peserta didik per tahun	Sesuai dengan kurikulum
		Perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)	1 set per peserta didik per semester	Dalam kondisi baru

b. Pembiayaan Pendidikan

Ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam permendikbud yaitu :

1. Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda dibebankan kepada Pemda untuk:
   - ✓ Pendidikan dasar;
   - ✓ Pendidikan Menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun
2. Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali
3. Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orang tua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat
4. Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah

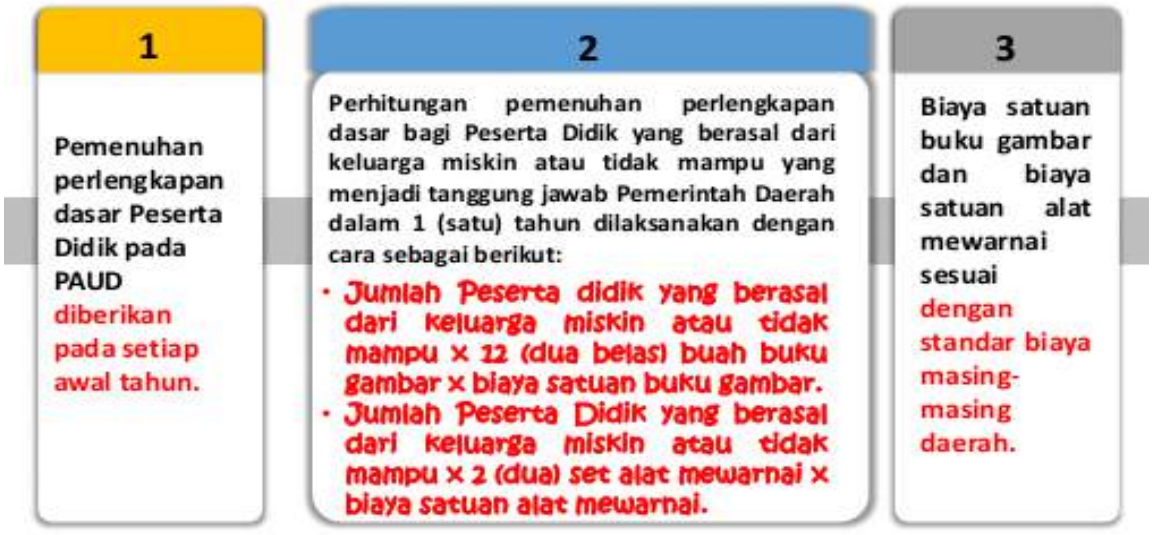


Gambar IV.4 Pembiayaan Pendidikan

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (PAUD)

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan pembiayaan pendidikan untuk program Pendidikan Anak Usia Dini adalah terbagi 3 yaitu :

1. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.
2. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   - Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 12 (dua belas) buah buku gambar x biaya satuan buku gambar.
   - Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set alat mewarnai x biaya satuan alat mewarnai.
3. Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.



Gambar IV.5 Pemenuhan Perlengkapan Pendidikan

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (SD dan SMP)

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan pembiayaan pendidikan untuk program Bidang SD dan SMP adalah terbagi 4 yaitu :

1. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SD dan SMP diberikan pada setiap awal tahun
2. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
   - Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 1 (satu) paket buku teks pelajaran x biaya satuan buku teks pelajaran.
   - Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
3. Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik
4. Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa (Pendidikan Kesetaraan)

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan pembiayaan pendidikan untuk program Pendidikan Kesetaraan adalah terbagi 4 yaitu:

1. Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.
2. Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 1 (satu) paket modul belajar x biaya satuan modul belajar.
- Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu x 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis x biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

3. Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik
4. Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

4.1.2.2 STANDAR JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TATACARA PEMENUHANNYA

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)

1. Dalam hal guru PAUD pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud
2. Dalam hal kepala satuan PAUD formal pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat Keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan tembusan kepada Mendikbud.

Tabel IV.3. Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

NO	JENIS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Guru PAUD	1 Paling rendah memiliki ijasah D-IV/S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan 2 Memiliki sertifikat profesi guru PAUD
2	Kepala Satuan PAUD	1 Paling rendah memiliki ijasah D-IV/S1i; 2 Memiliki sertifikat Pendidik; dan 3 Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD dan SMP)

1. Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada kabupaten/kota belum memiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.
2. Dalam hal kepala satuan pendidikan pada kabupaten/kota belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

3. Surat keterangan tersebut dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Mendikbud.

NO	JENIS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Guru Kelas	1 Paling rendah memiliki ijasah D-IV/S1 ; dan 2 Memiliki sertifikat Pendidik.
2	Guru Mata Pelajaran	1 Paling rendah memiliki ijasah D-IV/S1 ; dan 2 Memiliki sertifikat Pendidik.
3	Kepala Sekolah	1 Paling rendah memiliki ijasah D-IV/S1i; 2 Memiliki sertifikat Pendidik; dan 3 Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan Calon kepala sekolah
4	Tenaga Penunjang Lainnya	1 Paling rendah memiliki ijasah SMA/sederajat

Tabel IV.4 Jenis Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pendidikan Kesetaraan)

No	Jenis pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
1.	Tutor pendidikan kesetaraan	paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1
2.	Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan	paling rendah memiliki ijazah D-IV/S1
3.	Tenaga penunjang lainnya.	paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat

4.1.3 Realisasi

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan pada tahun 2025, Capaian SPM urusan Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 yaitu sebesar 99,31% dengan predikat Tuntas Utama.

Standar Pelayanan Minimal pada uruasn pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal , adapun capaian masing-masing 3 jenis standar pelayanan yaitu sebagai berikut, Pendidikan Dasar Usia Dini capaian sebesar 99,06%. Pada jenis pelayanan Pendidikan Dasar capaian 98.43% dengan kategori sangati tinggi. Sedangkan untuk capaian pada jenis layanan dasar pendidikan kesetaraan juga termasuk tinggi yaitu 99,89% dengan kategori sangati tinggi Secara detail target dan realiasi capaian urusan SPM Pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.5 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan

Jenis Layanan	Total Capaian
Pendidikan Anak Usia Dini	99,06%
Pendidikan Dasar	98,43%
Pendidikan Kesetaraan	99,89%
	99,31% (TUNTAS UTAMA)

4.1.4 Alokasi Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di berbagai kegiatan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Alokasi Anggaran SPM urusan Pendidikan

URAIAN	2025	2025 Pergeseran	2025 Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**589,106,369,118**	**584,493,557,118**	**571,980,554,121**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**349,123,458,250**	**346,183,947,250**	**343,147,629,259**
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	920.000.000	914.608.000	696.258.000
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	440.000.000	434.767.000	218.344.000
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000	993.121.000	993.121.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.496.545.000	7.417.136.000	10,693,814,300
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	3,773,739,000	3,738,139,000	2,596,937,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500,000,000	496,973,000	496,973,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150,000,000	150,000,000	370,071,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	11,625,000,000	11,446,937,000	7,146,737,000

URAIAN	2025	2025 Pergeseran	2025 Perubahan
Pengadaan Mebel Sekolah	10,495,000,000	10,481,863,000	10,482,164,698
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3,130,000,000	3,118,958,000	5,310,213,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	483,700,000	400,399,000	169,520,000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	32,510,798,350	32,460,269,350	33,893,445,350
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3,051,599,850	2,820,641,850	2,906,729,854
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	433,206,000	282,227,000	652,860,500
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31,184,206,000	31,184,206,000	31,184,206,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2,003,999,600	1,916,484,600	1,941,484,357
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1,200,000,000	1,193,284,000	598,476,000
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50,000,000	50,000,000	190,345,500
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	49,999,800	37,861,800	37,861,800

4.1.5 Dukungan Personil

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, seperti terlampir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai dukungan personil 142 orang terdiri dari:

1. Jumlah Pegawai sebanyak 142 orang terdiri dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil : 97 orang
   b. Calon Pegawai Negeri Sipil : 2 orang
   c. Tenaga Honorer : 36 orang
   d. Tenaga Kontrak/Outsorsing : 7 orang
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :
   a. Eselon II/b : 1 orang
   b. Eselon III/a : 1 orang
   c. Eselon III/b : 2 orang
   d. Eselon IV/a : 3 orang
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :
   a. Golongan IV/c : 4 orang
   b. Golongan IV/b : 3 orang
   c. Golongan IV/a : 8 orang
   d. Golongan III/d : 14 orang
   e. Golongan III/c : 6 orang
   f. Golongan III/b : 9 orang
   g. Golongan III/a : 1 3 orang
   h. Golongan II/d : 1 0 orang
   i. Golongan II/c : 6 orang
   j. Golongan II/b : 4 orang
   k. Golongan II/a : 4 orang

l. Golongan I/d : 1 orang
m. Golongan I/b : 1 orang

4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

a. S2 : 05 orang
b. S1 : 27 orang
c. D3 : 01 orang
d. SMA / sederajat : 12 orang
e. SMP / sederajat : 01 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

SPM pada dasarnya sudah diimplementasikan sejak lama, namun implementasinya masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan permasalahan, baik yang berasal dari pihak internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kemenag dan Pihak Sekolah masih sering dan selalu terjadi. Identifikasi berbagai pemasalahan disertai solusi yang diharapkan, kami gambar pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7 Identifikasi Masalah dan Solusi Implementasi SPM

Jenis Masalah	Permasalahan	Tindak Lanjut/Solusi
PAUD	Lembaga PAUD yang kurang, kualitas dan kuantitas guru PAUD, Mutu PAUD, Animo masyarakat terhadap urgensi PAUD	pembangunan PAUD Negeri di lokasi yang lebih strategis, penyediaan transportasi sekolah, atau program bantuan biaya untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap

Jenis Masalah	Permasalahan	Tindak Lanjut/Solusi
		pendidikan usia dini yang berkualitas
Akses Internet	Banyaknya satuan pendidikan yang terkendala rendahnya kualitas sinyal internet bahkan tidak mendapatkan sinyal internet	Bekerjasama dengan provider internet, pengadaan peralatan internet komersial dan SKPD terkait
Sebaran dan tingkat kualifikasi Guru	Tingkat sebaran guru PNS yang tidak merata sehingga terpaksa menerima guru dibawah Tingkat kualifikasi S1 dan banyak guru yang tidak paham dengan teknologi	Melakukan rotasi guru berdasarkan kebutuhan sekolah, Pengadaan guru ASN/PPPK dan program program belajar komunitas guru belajar
Anak tidak sekolah dan Peserta Didik Miskin	pada usia sekolah yang ternyata putus sekolah dikarenakan berbagai alasan, dan peserta didik miskin yang terancam putus sekolah	menyediakan anggaran untuk penuntasan anak tidak sekolah dan peserta didik miskin
Sarana Prasarana	Belum Memadai Sarana dan Prasarana	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pendidikan Non Formal	Tidak tersedianya Lembaga Pendidikan Paket A, B dan C disetiap kecamatan	Agara setiap kecamatan memiliki fasilitas Lembaga PKBM

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk kabupaten/kota terdiri dari 12 jenis layanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.8 Jenis Layanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kotabaru

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
		yang mendapatkan pelayanan Kesehatan					
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficie n cy Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien c y Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

4.2.3.1. Realisasi Capaian Layanan Dasar

Adapun realisasi capaian layanan dasar Bidang Kesehatan Pada Tahun 2025, sebagaimana data pada pada tabel berikut:

Tabel IV.10 Realisasi Capaian Layanan Dasar Kesehatan
Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	6291	5575	88,62
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	6005	4781	79,62
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	5719	4662	81,52
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	27394	17274	63,06
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	51893	48256	92,99
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	166201	101731	61,21

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	19216	15181	79,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan	72456	34027	46,96

Sumber : Bidang Kesmas & P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

4.2.3.2. Realisasi Mutu Pelayanan Dasar

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel IV.11 Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil/ 10	629	558	88,71
2	Tablet Tambah Darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	1132380	1003500	88,62
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Sejumlah Ibu Hamil*1 Paket/100	63	56	88,89
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Sejumlah Ibu Hamil*1 Paket/100	63	56	88,89

Sumber : Bidang Kesmas & P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel IV.12. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Bersalin

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Formulir Partograf	Sejumlah Ibu Bersalin	6005	4781	79,62
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah Ibu Bersalin	6005	4781	79,62
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Sejumlah Ibu Bersalin	6005	4781	79,62
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		28	28	100

Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel IV.13. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Sejumlah Bayi Baru Lahir	5719	4662	81,52
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah Bayi Baru Lahir	5719	4662	81,52
3	Salep/tetes mata	1 Tube *Sejumlah Bayi	1144	932	81,47

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	antibiotic	Baru Lahir/5			
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah Bayi Baru Lahir	5719	4662	81,52
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Sejumlah Bayi Baru Lahir	5719	4662	81,52
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Sejumlah Bayi Baru Lahir	5719	4662	81,52
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		28	28	100

Sumber : Bidang Kesmas & P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel IV.14 Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Balita

Sumber : Bidang Kesmas & P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	27394	17274	63,06

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Sesuai Kebutuhan	27394	17274	63,06
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Sesuai Kebutuhan	27394	17274	63,06
4	Vitamin A Biru	Sesuai Kebutuhan	1559	1149	**73,70**
5	Vitamin A Merah	Sesuai Kebutuhan	16132	12142	75,27
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Sesuai Kebutuhan	6599	3504	**53,10**
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Sesuai Kebutuhan	6599	3528	**53,46**
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Sesuai Kebutuhan	6599	2900	**43,95**
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB – Hib	Sesuai Kebutuhan	6599	3415	**51,75**
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	Sesuai Kebutuhan	6599	3858	**58,46**
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB – Hib	Sesuai Kebutuhan	6604	3247	**49,17**
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	Sesuai Kebutuhan	6604	3422	**51,82**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Sesuai Kebutuhan	46203	23874	**51,67**
14	Peralatan Anafilaktik	Sesuai Kebutuhan	28	28	100
15	Formula terapi gizi buruk		0	0	0

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel IV.15 Mutu Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	51893	48256	**92,99**
2	Form pencatatan/buku pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	0	0	**0**
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	51893	48256	**92,99**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	51893	27595	**53,18**

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tabel IV.16 Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Minimal 2 Per Puskesmas	56	56	100
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Sesuai Jumlah Sasaran	28	28	100
3	Alat : Tensimeter	Sesuai Jumlah Sasaran	166201	101731	61,21
4	Alat : Glukometer	Sesuai Jumlah Sasaran	166201	101731	61,21
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Sesuai Jumlah	28	28	100

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
		Sasaran			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alcohol	Sesuai Jumlah Sasaran	166201	101731	61,21
7	Alat : KIT IVA Tes	Wanita Usia 30-50	45327	849	1,87
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb		28	28	100
9	Kit Opthalmologi komunitas		28	28	100
10	Kuesioner PUMA		28	28	100
11	Alat Pelayanan KB		0	0	0
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		28	28	100
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)		16620	0	0

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tabel IV.17. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
5	nstrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Sesuai Jumlah Sasaran	19216	15181	79,00
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE		28	28	100

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel IV.18 Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	Minimal 2 Per Puskesmas	56	56	100
2	Obat Hipertensi		3	3	100
3	Tensimeter	Sesuai Jumlah	28	28	100
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Sesuai Jumlah Sasaran	28	28	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Sesuai Jumlah Sasaran	28	28	100

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel IV.19 Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Obat Diabetes Melitus	Terintegrasi	3	3	100
2	Fotometer atau Glukometer	Sesuai Sasaran	2047	4727	100

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Sesuai Sasaran	2047	4727	100
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Sesuai Sasaran	28	28	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Minimal 2 Per Puskesmas	28	28	100

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel IV.20. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan ODGJ

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 Per Puskesmas	28	28	100
2	Penyediaan Psikofarmaka	Sesuai Kebutuhan	3	3	100
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Sesuai Kebutuhan	28	28	100
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai Kebutuhan	28	28	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Sesuai Kebutuhan	28	28	100

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel IV.21. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Terduga TB

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Sesuai Kebutuhan	30	30	100
2	Reagen Zn TB	Sesuai Jumlah Sasaran*1 Paket/10	507	304	59,96
3	Masker bedah dan Masker N95	Sesuai Kebutuhan*60	304320	182640	60,02
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen,	Sesuai Kebutuhan	25360	15220	60,02
5	Katrid tes cepat molekuler	Sesuai Kebutuhan	5072	3044	60,02
6	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai Kebutuhan	30	30	100
7	edoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sesuai Kebutuhan	30	30	100
8	Tuberkulin		0	0	0

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Tabel IV.22. Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Standar	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Sesuai Kebutuhan	28	28	100
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Sesuai Kebutuhan	7972	7527	94,42
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Sesuai Kebutuhan	7972	7527	94,42
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan Kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai Kebutuhan	28	28	100

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

Sesuai dengan Perhitungan menggunakan Permendagri 59 Tahun 2021 hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.23 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Penyedia Mutu Layanan Dasar		Indeks Pencapaian SPM	Total Pencapaian	Kategori IP SPM
		Realisasi	IP Penerima (80%)	Realisasi	IP Mutu Minimal (20%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	88,62	70,89	91,23	18,25	89,14	79,05	Tuntas Pratama
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	79,62	63,69	93,21	18,64	82,33		
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	81,52	65,21	92,08	18,42	83,63		
4	Pelayanan Kesehatan balita	63,06	50,45	69,12	13,82	64,27		
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	92,99	74,39	79,95	15,99	90,38		
6	Pelayananke sehatan pada usia produktif	61,21	48,97	78,18	15,64	64,60		
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	79,00	63,20	90,31	18,06	81,26		
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	46,96	37,57	100	20	57,57		
9	Pelayanan Kesehatan penderita DM	100	80	100	20	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Penyedia Mutu Layanan Dasar		Indeks Pencapaian SPM	Total Pencapaian	Kategori IP SPM
		Realisasi	IP Penerima (80%)	Realisasi	IP Mutu Minimal (20%)			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ	69,44	55,55	100	20	75,55		
11	PelayananKesehatan orang TB	60,02	48,01	82,67	16,53	64,55		
12	Pelayanan Kesehatan Orang denga risiko terinfeksi Virus HIV	94,42	75,53	98,88	19,78	95,31		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 meliputi belanja operasional dan belanja modal. Hal ini sangat berhubungan dimana semua Program dan Kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya adalah bertujuan untuk menerapkan SPM dan mendukung pencapaian SPM.

Alokasi anggaran belanja berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan berdasarkan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.499,513,830,-, realisasi sampai Bulan Desember sebesar Rp. 4.887.602.995,- (88,87%).

Tabel IV.24 Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Pendanaan	Pagu (Rp)	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD	Alokasi Anggaran penerapan SPM dengan Anggaran Dinas Kesehatan
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru	5.318.792.284.118			
2	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan	440.836.270.873	8,29%		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Dinas Kesehatan	5.499.513.830		0,10%	1,25%
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat (Dana Desa, Kerja Sama, Dana Bagi Hasil)				
	a. APBN				
	b. APBD DAU	1.617.997.809			
	c. APDB DAK FISIK				
	d. APBD DAK NON FISIK	3.881.516.021			
	e. Lainnya				

Sumber : Laporan E81 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kotabaru didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru dan Puskesmas serta jaringannya (Pustu, Puskesling, dsb) serta di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun daftar SDM yang ada di puskesmas adalah berikut :

Tabel IV.25 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Pangkat/Gol	Jml	Jabatan	
					Struktural	Fungsional
1	SD Sederajat	9	IA	0	7	41
2			IB	0		
3	SLTP Sederajat	10	IC	0		
4			ID	1		
5	SMA Sederajat	184	IIA	32		
6	DI	2	IIB	6		
7	DII	1	IIC	356		
8	DIII	951	IID	65		
9	DIV	150	IIIA	268		
10	S1	774	IIIB	255		
11	S2	16	IIIC	113		
12	S3	0	IIID	96		

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Pangkat/Gol	Jml	Jabatan	
					Struktural	Fungsional
13	Prof	0	IVA	21		
14			IVB	13		
15			IVC	1		
16			IX	50		
17			X	25		
18			XI	1		
19			Disamakan Gol I	18		
20			Disamakan Gol II	330		
21			Disamakan Gol III	248		
22			-	140		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Tahun 2026

Tabel IV.26 SDM Penyelenggara SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Puskesmas	RSUD PJS & Sengayam	Jumlah
1	Dokter Umum	37	19	56
2	Dokter Obgyn	0	2	2

No	Status Kepegawaian	Puskesmas	RSUD PJS & Sengayam	Jumlah
3	Dokter Gigi	22	3	25
4	Dokter SP. Penyakit Dalam	0	3	3
5	Dokter SP. Paru	0	2	2
6	Dokter SP. Anak	0	3	3
7	Dokter SP. Kulit Kelamin	0	0	0
8	Dokter SP. Jiwa	0	2	2
9	Bidan	425	67	492
10	Perawat	280	198	478
11	Kesehatan Masyarakat	35	4	39
12	ALTM	70	19	89
13	Radiografer	0	9	9
14	Gizi / Nutrisionis	84	10	94
15	Kefarmasian	85	39	124
16	Promosi Kesehatan dan ilmu Perilaku	87	2	89

Sumber : Bidang SDMK Dinkes 2026

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kelengkapan data yang dikirim puskesmas tidak lengkap, tidak adanya ketepatan waktu pelaporan dan analisis data cakupan yang rendah
2. Perhitungan kebutuhan sesuai SPM untuk variabel dan komponen banyak yang sulit terpenuhi.
3. Penganggaran sudah berbasis SPM namun dalam teknis pelaksanaannya belum sepenuhnya fokus mendukung SPM.
4. Dari segi SDM jumlah dan kualifikasi/kompetensi/distribusinya belum rasional dan pengelola program yang sering berganti-ganti.

Solusi:

1. Diperlukan advokasi lebih intensif tentang teknik penganggaran yang menyangkut SPM.
2. Pemerataan dalam penempatan tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas.
3. Meningkatkan penggalangan komitmen Dinas Kesehatan terhadap data sasaran, pengumpulan data serta pengelola program kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas:

a) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu setiap Warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pencapain target SPM Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel IV.27 Target Pencapaian urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
			Indikator	Nilai	
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum Sehari - Hari	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	100%	2025
		Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
			Indikator	Nilai	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik	Pelayanan SPADL-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S Dengan Kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 Jiwa/ha	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolhan air limbah	100%	2025
		Pelayanan SPADL-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S Dengan Kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 Jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan			

4.3.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru pada tahun anggran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.28 Realisasi Pencapaian urusan Pekerjaan Umum

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	satuan	Realisasi	Capaian	Sumber Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum Sehari - Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan akses air minum	4.152	Jiwa	4.152	100%	APBD
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	1.236	Jiwa	1.236	100%	APBD

Sumber : Dinas PUPR, 2026

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum pada tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tabel IV.29 Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum Sehari - Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan akses air minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	%	1.511.085.000	APBD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	%	1.955.384.000	APBD
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	%	3.849.606.385	APBD
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	%	1.482.400.000	APBD
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	%	1.969.110.725	APBD
2.Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolhan air limbah	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100	%	490.983.594	APBD
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100	%	5.650.000.000	APBD
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD)	100	%	861.081.500	APBD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100	%	100.000.000	APBD

Sumber : Dinas PUPR, 2026

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur pada tahun 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru sampai tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 105 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS, P3K, P3W, dan PJLP sebagai berikut :

Tabel IV.30 Dukungan Personil Urusan pekerjaan umum

No	Program	Bidang	Jumlah Personil	Keteranggan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan	4 Orang	PNS
		Keuangan	4 Orang	PNS
		Umpeg	6 Orang	PNS
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	SDAPL	13 Orang	PNS
3.		P3K & P3W	18 Orang	-
		PJLP	7 Orang	-
Total			**52 Orang**	

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru di sampaikan sebagai berikut:

Tabel IV.31 Dukungan Personil Urusan SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Dukungan Personel	
			PNS	Non PNS
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum Sehari – Hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	19	7
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan limbah domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolhan air limbah	19	7

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dukungan personil: Bidang AMPL Di dukung Personil dari Subbid P2LP dan SPAM sebanyak 19 orang PNS dan 7 orang Non PNS.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ketersedian data penduduk terhadap indikator SPM yang menjadi target untuk kegiatan program ditahun berjalan.
2. Tidak maksimalnya penetapan kebutuhan data untuk lokus peneratap program SPM.
3. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk memenuhi target pencapaian SPM sesuai dengan kondisi real dilapangan.
4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sering terlambatnya proses pelaksanaan karena proses penetapan pejabat pengelola kegiatan.

Solusi :

1. Melakukan pengumpulan data penduduk untuk target progran SPM selanjutnya.
2. Melakukan pendataan dan inventarisasi penduduk untuk penyesuaian kebutuhan pemenuhan target SPM.
3. Mengusulkan rencana dan usulan kegiatan melalui APBD Provinsi, APBN dan DAK.
4. Menyampaikan permohonan percepatan penunjukan pejabat pengelola kegiatan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan SPM tahun berjalan.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 29/PERMEN/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Kotabaru

$$\text{Rumus Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Keterangan :

∑Rumah Tangga Terlayani	:	Jumlah rumah tangga korban bencana yang ditangani dengan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, relokasi rumah, dan bantuan sewa rumah pada tahun n
∑Rumah Tangga	:	Jumlah total rencana unit rumah tangga korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

$$\text{Rumus Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Keterangan :

∑Rumah Tangga Terlayani	:	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang menerima pelayanan berupa fasilitasi ganti aset, subsidi uang sewa, atau penyediaan rumah layak huni
∑Rumah Tangga	:	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang memenuhi kriteria penerima layanan

1. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.32 Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN		BATAS WAKU PENCAPAI
		INDIKATOR	NILAI	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Persentase Rumah Tangga Korban Bencana yang ditangani	100%	Setiap Tahun
2	Fasiltasi Penyediaan raumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Persentase Rumah Tangga terkena Relokasi program pemerintah yang terlayani	100%	Setiap Tahun

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD.

Tabel IV.33 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TAHUN 2025
		INDIKATOR		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	1	Persentase rumah tangga korban bencana yang ditangani	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	1	Persentase rumah tangga terkena relokasi program pemerintah yang terlayani	100%

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Realiasi capaian SPM urusan Perumahan rakyat yaitu sebesar 100% (seratus persen), data capaian tersebut terdiri 2 indikator jenis pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel IV. 34 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM 2025	Realisasi SPM 2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Persentase rumah tangga korban bencana yang ditangani	100 (%)	91,67 (%)
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kotabaru	Persentase rumah tangga terkena relokasi yang terlayani	100 (%)	100.00 (%)

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah,sebagai berikut :

Tabel IV.36 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
1.	penyediaan dan	Pendataan	Pengumpulan	258,867,997	402,703,630	
	Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau rekolkasi program kabupaten/kota	Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
		Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	735,313,922	35.313.922	(Anggaran dipindahkan ke Rehabilitasi Layak Huni bagi MBR
			2.Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	666.955.070	36.955.070	

Sumber : Dnas Perkimtan, 2026

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.38 Personil Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru

No	Unit Kerja	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S3	S2	S1	Diploma 3	Diploma 1	PNS	Non-PNS
1.	Sekretariat		1	5			7	4
2.	Bidang Perumahan Rakyat		1	6			9	2
3	Bidang Kawasan Permukiman			4			9	2
4.	Bidang Pertanahan		2	3			9	2
Jumlah			4	18			34	10

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan solusi / langkah - langkah strategis guna penyelesaian permasalahan yang ditempuh :

a. Permasalahan

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran progam dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
2. Masih adanya Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten.

3. Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimalnya
4. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
5. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
6. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.

b. Solusi

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat,Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
2. Perencanaan Anggaran yang baik agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik.
3. Melakukan Bimtek terhadap karyawan atau melakukan perekrutan tenaga ahli / Teknis.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 SKPD Pelaksana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotabaru secara teknis dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pelayanan Dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana.

TEKNIS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SUB-URUSAN BENCANA

Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan 1) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, 2) perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar, 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan

oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Berikut uraian Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan bencana daerah kabupaten/kota.

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

a. Pengertian

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

b. Dasar Pemikiran Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu

c. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu Pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

tabel IV. 39 Pencapaian Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
A.	**Sasaran :** Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	**Sasaran :** Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana **Indikator :**	Rumus: X= Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana **Target :** arget: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	ancaman bencana Y= Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Indikator Kinerja : X / Y x 100%	pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB

2. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

a. Pengertian

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

b. Dasar Pemikiran. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

c. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:

Tabel IV.40 Pemenuhan Jenis Dan Pencapaian Mutu Pelayanan BPBD

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
A.	**Sasaran :** Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**Sasaran :** Terlatihnya Warga Negara dalam Rangka Kesiapsiagaan Bencana **Indikator :** Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan **Target :** 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X= Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan Y= Jumlah Warga Negara dalam Wilayah Rawan bencana Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y}$ x 100%	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
B.	**Sasaran :** Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	**Sasaran :** Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana **Indikator :** Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana **Target :** 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X= Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops Y= Jumlah Warga Negara dalama Cakupan Bencana Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y}$ x 100%	Merupakan tahapan Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

b. Dasar Pemikiran. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin

c. Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

tabel IV.41 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
A.	**Sasaran :** Respon Cepat Darurat Bencana	**Sasaran :** Terlatihnya Warga Negara dalam Rangka Kesiapsiagaan Bencana **Indikator :** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) **Target :**	Rumus: X= Jumlah Keceparan respon kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan darurat bencana Y= Jumlah Seluruh Penetapan Status darurat bencana Indikator Kinerja :	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
		100% (seratus persen) paling lama satu tahun	X — x 100% Y	
B.	**Sasaran :** Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	**Sasaran :** Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana **Indikator :** Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana **Target :** 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	Rumus: X= Jumlah petugas lapangan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana Y= Perkiraan Jumlah Keseluruhan pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Kinerja : X — x 100% Y	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanakebutuhan dasar
C.	**Sasaran :** Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	**Sasaran :** Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana **Indikator :** Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	Rumus: X= Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi bencana Y= Perkiraan Jumlah Keseluruhan dari Korban Bencana Indikator Kinerja : X	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencanakebutuhan dasar

No	Sub Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Keterangan
		Target : 100% (seratus persen) paling lama satu tahun	x 100% Y	

4.5.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kotabaru selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah kota yang bersangkutan, dapat dilihat pada tabel berikut

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KEBENCANAAN BPBD KABUPATEN KOTABARU TA. 2025

Tabel IV.42 Target Pencapaian SPM BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian %	APBD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	726	726	100%	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana	200	200	100%	
3	Pelayanan penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang	300	300	100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian %	APBD 2025 (Rp)
	danevakuasi korban bencana	memperoleh layanan penyelamatandan evakuasi korban bencana				

Sumber : BPBD Kotabaru, 2026

4.5.1.3 Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Bidang Trantibum Linmas Urusan Kebencanaan Kabupaten Kotabaru selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah bersangkutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.43 capaian SPM sub urusan bencana

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2025 %
			Jumlah Orang Yang Akan dilayani	APBD 2025	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2025	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	726	254.901.250	726	224.995.497	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200	515.895.050	200	294.055.242	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	300	1.392.846.900	300	978.589.129	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2025 %
			Jumlah Orang Yang Akan dilayani	APBD 2025	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2025	
	korban bencana	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					

4.5.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Pelayanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru bersumber dari APBD Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.45 Anggaran APBD Untuk Pencapaian SPM 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	254.901.250	224.995.497	88.27
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	515.895.050	294.055.242	57
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.392.846.900	978.589.129	70.26
Jumlah		1.200.320.973	3.268.395.200	2.587.170.469

Tabel IV.46 Capaian Anggaran Kegiatan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM Kegiatan	Perencanaan APBD 2025 (Rp)	Pelaksanaan Realisasi (Rp)	Persentase %
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencnan Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana)	254.901.250	224.995.497	88.27
	Jumlah	**254.901.250**	**224.995.497**	**88.27**
2.	**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	278.805.000	163.667.623	58.7

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan SPM Kegiatan	Perencanaan APBD 2025 (Rp)	Pelaksanaan Realisasi (Rp)	Persentase %
b.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	44.190.000	-	0
c.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	39.415.000	33.220.500	84.28
d.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	122.958.500	72.965.449	59.34
e.	Penyusunan Rencana Kontijensi	30.526.550	24.201.670	79.28
	Jumlah	**515.895.050**	**294.055.242**	**57**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
a.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.090.151.900	859.464.499	78.84
b.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	302.695.000	119.124.630	39.35
	Jumlah	**1.392.846.900**	**978.589.129**	**70.26**
	Jumlah Total	**3.268.395.200**	**2.587.170.469**	**79.16**

4.5.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil untuk penyelenggaraan SPM bidang Trantibumlinmas sub urusan bencana di Kabupaten Kotabaru dari BPBD berjumlah 53 Orang terdiri dari ASN, Honerer TNP dan THL/TKS, yang pada operasional di lapnngan mendapat dukungan dari TNI, Polri, Basarnas, instansi vertical dan perangkat daerah lainnya, perusahaan, relawan serta unsur masyarakat lainnya yang peduli penanggulangan bencana.

Adapun daftar personil dan jumlah pegawai BPBD Kotabaru sampai dengan 31 Desember 2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.47 Data Personil Jumlah Pegawai BPBD Tahun 2025

No	Nama	NIP/NTNP	Keterangan
1	Hendra Indrayana, S.STP, M.IP	198404152002121001	Kepala Pelaksana BPBD
2	Faisal Muhdi, S.Kom	197804232005011009	Sekretaris BPBD
3	Syaifullah Fahri, S	197210112006041016	Kabid Kedaruratan dan Logistik
4	Dr. H.Syamsul Adha, S.Sos, Ms	196912011998031008	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi
5	Lathifu Arsyiono, S.STP	199112192012061002	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Hertanto Prasatyo, S.pi	197402052005011011	Fungsional Perencana Ahli Madya
7	Zainal Arifin,SE	196903021998021005	Kasubbag Keuangan
8	Yudhi Irawan, A. Md. Kom	198303062010011009	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Muhammad Ali	196804101993031009	Pelaksana
10	Hj. Siti Maimunah, S. Sos. MM	197505062003122004	Pelaksana
11	Sahdat, S.Pd	197802022004041014	Pelaksana
12	Tajudin Noor	197003202000031006	Pelaksana
13	Grendi Aldaer Malau, S.STP	199611222020081001	Pelaksana
14	Lathif Faham Fauzi, S.Si.	199412242020121007	Pelaksana/Plt. Kasubbag Perencanaan
15	Desy Eka Puspitasari, S.T.	199412092020122012	Pelaksana
16	Muhammad Ali	197108262006041014	Pelaksana
17	Aspandi	196904132007011027	Pelaksana
18	Mohammad Fahmi	197810072009011003	Pelaksana
19	Suhardi	198009202010011006	Pelaksana
20	Muhammad Aco askur, A.Md ANT III	199203092020121003	Pelaksana

No	Nama	NIP/NTNP	Keterangan
21	Muliani	197411202012122001	Pelaksana
22	Yudi Iswandana	198307162009011007	Pelaksana
23	Sabirin M	197403012007011010	Pelaksana
24	Muhammad Ajrin, S.T.	199102262025041001	Ahli Pertama-Analis Kebencanaan
25	Rizky Dwi Cahyadi, S.T.	199206282025041001	Ahli Pertama-Penata Penanggulangan Bencana
26	Any Machfuzah, SE	198607032023212042	Ahli Pertama-Arsiparis
27	Raisya Nursyahbani, S.T.	199207032024212029	Ahli Pertama-Penata Penanggulangan Bencana
28	Adam Machfuz, S.Kom	199611202025211013	Pelaksana
29	Yulia Agustin, SE	197808242025212005	Pelaksana
30	M.Rizali	198101012025211200	PPPKPW
31	Syaiful Fansyari, SE	198109252025211064	PPPKPW
32	Wandari Saputra, S.Sos	198406272025211079	PPPKPW
33	Nazaruddin	198707062025211143	PPPKPW
34	Lailatus Sa’diah, A.Md	199303052025212103	PPPKPW
35	Novitri Forda Tanjung	199211262025212111	PPPKPW
36	Michael HM Rapar	197705222025211049	PPPKPW
37	Sarman	198909092025211199	PPPKPW
38	Nurmiah	199712292025212072	PPPKPW
39	Evi Ulan Dari, A.Md.A.B	199704012025212099	PPPKPW
40	Muhammad Aldi	200011112025211054	PPPKPW
41	Adelia Cahyaningsih	200010232025212024	PPPKPW
42	Masrani	20240828	THL

No	Nama	NIP/NTNP	Keterangan
43	Ahmad Nurrahman	20240824	THL
44	Muhammad Supyannoor	20240820	THL
45	Nurul Jannah	20240822	THL
46	Jauza Nabila Faisal	20240818	THL
47	Erika Destya	20250267	THL
48	Sephia Anggraini	20250268	THL
49	M.Said Fadillah	-	TKS
50	Selfi	-	TKS
51	Muhammad Aswan, S.M.	-	TKS
52	Siti Zahrawani	-	TKS
53	M.Rizwan Hadi Winata	-	TKS
Jumlah			**53 Orang**

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	
1	Pembina	IVa	3	Orang
2	Penata Tk.I	IIId	7	Orang
3	Penata	IIIc	1	Orang
4	Penata Muda Tk.I	IIIb	0	Orang
5	Penata Muda	IIIa	1	Orang
6	Pengatur Tk I	IId	2	Orang
7	Pengatur	IIc	4	Orang
8	Pengatur Muda Tk.I	IIb	1	Orang
9	Pengatur Muda	IIa	1	Orang
10	Juru Tk.I	Id	1	Orang
		Jumlah	**21**	

4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum Linmas Urusan Kebencanaa yaitu :

Tabel IV.48 Permasalahan dan solusi urusan tratibum BPBD Tahun 2025

No	Kategori	Permasalahan	Solusi
1	**Pengumpulan Data**		
	Prosedur penentuan indikator kebencanaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan teknik pengumpulan data	Belum adanya koordinasi penentuan indikator kebencanaan dan belum pahamnya teknik pengumpulan data	Pengkoordinasian penentuan indikator spm kebencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemberian kapasitas teknik pengumpulan data
	Sarana dan prasarana untuk pengumpulan/analisa data belum memadai	Belum optimalnya router atau wifi sebagai sarana pengiriman informasi	Penyediaan router atau wifi tambahan sebagai sarana pengiriman informasi
	Peta Risiko Bencana belum diperbaharui	Kajian risiko bencana masih dalam proses penyusunan	Pembaharuan Peta Risiko Bencana melalui Pembaharuan Kajian Risiko Bencana
2	**Perhitungan Kebutuhan**		
	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk seluruh SPM	Alokasi anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih belum mencukupi	Peningkatan anggaran dan melakukan pemilahan berdasarkan prioritas untuk mendukung penyelesaian SPM
3	**Perencanaan dan Penganggaran**		

No	Kategori	Permasalahan	Solusi
	Dukungan anggaran belum mencukupi untuk seluruh SPM	Alokasi anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih belum mencukupi	Peningkatan anggaran dan melakukan pemilahan berdasarkan prioritas untuk mendukung penyelesaian SPM
4	**Pelaksanaan**		
	Akses dan fasilitas dalam pelayanan informasi kebencanaan yang masih terbatas	Terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat	Meningkatkan informasi kebencanaan melalui beragam media komunikasi
5	**Lain-Lain**		
	Masih perlunya peningkatan kapasitas pegawai yang mendukung pelaksanaan kegiatan BPBD	Kegiatan pada BPBD memerlukan kapasitas/kompetensi yang khusus	Mengusulkan peningkatan kemampuan dan mengusulkan permintaan pegawai sesuai kapasitas yang diperlukan oleh BPBD

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.2 SKPD Pelaksana : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Strategi pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru diwujudkan dalam bentuk program-program dan kegiatan. Program merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru untuk menyusun program dan kegiatan serta perencanaan anggaran. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

Rencana pencapaian SPM tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru dan Rencana Strategi (Renstra) Satpol PP. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Satpol PP, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang terkait dengan pencapaian SPM, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru melaksanakan program sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini direalisasikan dalam bentuk patroli berupa kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam

kebakaran pada sekitar wilayah kerjanya dengan menggunakan berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi/kawasan yang dianggap rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan penggaran biaya Oprasional Satpol PP Dan Damkar berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP Dan Damkar sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini direalisasikan dalam bentuk Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran secara dini, Pemadaman Kebakaran, Melaksanakan kegiatan evakuasi dan penyelamatan.

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan dua program, yaitu :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

b. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tangung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada

seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (response time) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

4.5.2.2 Target Pencapaian SPM

Dalam pencapain target SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel IV.49 Target Pencapaian Trantibum pada Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2025

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		ANGGARAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
		INDIKATOR	NILAI		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	3.471.347.780	Setiap Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2.934.035.500	Setiap Tahun

4.5.2.3 Realisasi

Tabel IV.50 Realisasi Capaian SPM uruan Trantibum Linmas pada SATPOL PP dan Damkar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Anggaran
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	332.750	332.750	100%	APBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	332.750	332.750	100%	APBD

4.5.2.4 Alokasi Anggaran

Tabel IV.51 Alokasi Anggaran SPM urusan Trantibum Linmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun Anggaran 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan	Jumlah anggaran	Sumber Anggaran
Jenis Pelayanan yang diberikan	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	14.997.623.538	APBD
	Presentase perda dan perkada yang di tegakkan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	625.000.000	APBD

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan	Jumlah anggaran	Sumber Anggaran
	Presentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.675.283.200	APBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	685.700.000	APBD
	Presentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan	-	-	-	-	APBD
	Presentase Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan	-	-	-		APBD

4.5.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut :

Tabel IV.52 Dukungan Personil Satpol PP dan Damkar

No	PROGRAM	Bidang	Jumlah Personil		Keteranggan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan	5	Orang	PNS
		Keuangan	5	Orang	PNS
		Umpeg	6	Orang	PNS
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran, Rekonstruksi Dan Penyelamatan	29	Orang	PNS
		Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	7	Orang	PNS
3.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Pembinaan, Pengendalian Dan Perlindunggan Masyrakat	22	Orang	PNS
		Bidang Penegakan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur	4	Orang	PNS
4.		TNP	49	Orang	Tenaga Non PNS
Total			**134**	**Orang**	

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penentuan dan pencapaian SPM pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru tentu saja tidak terlepas dari permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman *stakeholder* yang terkait langsung dengan penentuan dan pencapaian SPM, yang mengakibatkan realisasi/capaian SPM tidak sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan
- Pengetahuan dan Ketrampilan personil yang belum optimal. Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki ketrampilan khusus. Dibandingkan dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat besar dan mengandung resiko yang besar, oleh karenanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus – kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
- Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas. Sarana prasarana serta fasilitas kerja sebagai penunjang kerja yang masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan sehingga hasil kinerja lebih optimal.
- Masih kurangnya jumlah personil Kurangnya jumlah personil menjadi salah satu hambatan dalam upaya penegakan perda dan qanun di Kota Banda Aceh, kurangnya personil tersebut dikarenakan mutasi PNS ke SKPD lain, pemutusan kontrak kerja bagi pegawai kontrak, dan turnover (mengundurkan diri).

- Belum adanya regulasi yang mengatur terhadap beberapa pelanggaran Ada beberapa qanun yang masih belum jelas untuk diambil tindakan hukum terhadap pelanggarnya, seperti inditifikasi terhadap waria, gay, dan psk yang mangkal ketika ditindak.
- Kurangnya Koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak Satlinmas.

b. Solusi

Solusi yang akan dilakukan sebagai upaya menetralisir permasalahan yang menghambat penetuan dan pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru adalah :

- Menambah jumlah personil baik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan jumlah minimal 65 orang atau 2 peleton sedang untuk kebutuhan maksimal berjumlah 150 orang.
- Adanya koordinasi yang intens antara pihak kecamatan dengan pihak satlinmas.
- sosialisasi kepada untuk mengaktifkan Satlinmas yang ada di masing-masing wilayah Kabupaten Kotabaru,
- meningkatkan komitmen bersama agar SPM bisa dicapai secara konsinten dari perencanaan hingga pelaksanaan.

4.6 Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip -prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap Daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Kotabaru 2025-2029 dengan Visi Kabupaten "**MEWUJUDNYA KOTABARU YANG HEBAT (HARMONIS, ENERGIK, BERSATU, AMANAH, DAN TANGGUH) DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJU DAN BERKELANJUTAN''**, dan sebagai Dinas yang mengemban urusan wajib Urusan Sosial, Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan 2025 – 2029 akan melaksanakan 1 (Satu) Misi dari 4 (Empat) misi Kepala Daerah tersebut diatas, yaitu : Misi 2 (Dua) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing denganpemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan dan Misi 2 (Dua) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Melalui Revitalisasi Potensi Unggulan Lokal dan Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Unggulan Pemberantasan Kemiskinan, sehingga kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial harus baik dan benar. Oleh karena itu, masyarakat Kotabaru mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, Dinas Sosial akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kotabaru. Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal mungkin dapat dilaksanakan.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Urusan Sosial yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penanganan Disabilitas Terlantar diluar panti Sosial.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota ; dan
6. Perlindungan dan Jaminan Sosial Khususnya Masyarakat Miskin, Fakir Miskin dan Kelompok Rentan.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel IV.53 Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM uruasn Sosial Tahun 2025

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN		**CARA MENGHITUNG**	**KETERANGAN**
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti	**Rumus:** X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti. Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y}$ x 100%	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen)
SUB KEGIATAN			
1.	Layanan Data Dan Pengaduan	Rumus = (a x b) + c + d + e	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau

			lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Layanan kedaruratan	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Rumus = c + d	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain
		Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. Rumus = b+c+d	
		Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru Rumus = a + b	
3.	Penyediaan permakanan	Rumus = (a x b x c) + d	Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain.
4.	Penyediaan Sandang	Rumus = a+b+c+d+e	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang

			berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
5.	Penyediaan alat Bantu	Rumus = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	Rumus= a + b + c +d	a. Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik,

			mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan.
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat	Rumus= a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat perkegiatan c. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan
9.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Rumus= a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak

10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
13.	Layanan rujukan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN		**CARA MENGHITUNG**	**KETERANGAN**
A.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	**Rumus:** X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN		CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan Permakanan	**Rumus** = a + b + c a = d x e x f	Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial. sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk korban bencana.
2.	Penyediaan Sandang	Rumus = a + b + c a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Rumus = a + b + c a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan

			Sosial Untuk Korban Bencana.
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Rumus = a + b + c a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5.	Pelayanan dukungan psikososial	Rumus = a + b + c a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial untuk Tahun Pemerintahan 2021-2026 dengan beberapa kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel IV.54. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN
		INDIKATOR	NILAI	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh	100 %	Setiap Tahun

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN		BATAS WAKTU PENCAPAIAN
		INDIKATOR	NILAI	
	Disabilitas Terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial diluar panti		
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun
6.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Khususnya Masyarakat Miskin, Fakir Miskin dan Kelompok Rentan	Jumlah Warga Masyarakat Miskin, Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100 %	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dasar Bidang Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosialyang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dikali seratus persen (100%).
b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi jumlah korban bencana alam dan social di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota di kali seratus persen (100%).
c. Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan Daerah Kabupaten/Kota dikali seratus persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ditunjukan pada Tabel Berikut :

Tabel IV.56 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MUDA			95,04%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				97,41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,33%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	192	188	4	97,92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,08%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	95,38%
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	38	38	0	100,00%
	2 . Penyediaan Permakanan	10	10	2	100,00%
	3 . Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat	38	38	21	100,00%
	4 . Penyediaan Sandang	38	38	0	100,00%
	5 . Penyediaan Alat Bantu	6	6	0	100,00%
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	6	6	0	100,00%
	7 . Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritul dan sosial	10	10	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	8 .Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar	20	20	0	100,00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	100,00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2	2	0	100,00%
	11 . Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	7	7	0	100,00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Rujukan	10	8	2	80,00%
	13 . Layanan Rujukan	5	3	2	60,00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				93,78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	80	76	4	95,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17,78%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	16	16	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/Layanan Reaksi cepat	2	2	0	100,00%
	3 . Penyediaan Permakanan	16	16	0	100,00%
	4 . Penyediaan Sandang	16	16	0	100,00%
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	2	1	1	50,00%
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	2	2	0	100,00%
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	2	2	0	100,00%
	8 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	2	2	0	100,00%
	9 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	15	15	0	100,00%
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga Dasar	2	2	0	100,00%
	11 . Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	2	1	1	50,00%
	12 . Layanan Rujukan	3	2	1	66,67%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				97,47%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,75%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	192	189	3	98,44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,72%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	93,59%
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	52	52	0	100,00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3	2	1	66,67%
	3 . Penyediaan Permakanan	52	52	0	100,00%
	4 . Penyediaan Sandang	52	52	0	100,00%
	5 . Penyediaan Alat Bantu	1	1	0	100,00%
	6 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	2	2	0	100,00%
	7 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10	10	0	100,00%
	8 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga				100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Lanjut Usia Terlantar	10	10	0	
	9 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	2	1	1	50,00%
	10 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	1	0	100,00%
	11 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	3	3	0	100,00%
	12 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3	3	0	100,00%
	13 . Layanan Rujukan	1	1	0	100,00%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				86,57%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68,24%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	34	29	0	85,29%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang	Jumlah Mutu Barang /Jasa	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum	91,67%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		dibutuhkan	yang Tersedia	Tersedia	
	1 . Layanan Data Dan Pengaduan	3	2	1	66,67%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	6	5	1	83,33%
	3 . Penyediaan Permakanan	6	5	1	83,33%
	4 . Penyediaan Sandang	6	5	1	83,33%
	5 . Penyediaan Perbekalan Kesehatan	6	5	1	83,33%
	6 . Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1	1	0	100,00%
	7 . Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	1	1	0	100,00%
	8 . Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	1	1	0	100,00%
	9 . Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1	1	0	100,00%
	10 . Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	1	1	0	100,00%
	11 . Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	12 . Layanan Rujukan	1	1	0	100,00%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	343	343	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1 . Penyediaan permakanan	150	150	0	100,00%
	2 . Penyediaan sandang	150	150	0	100,00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	0	100,00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20	20	0	100,00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	20	20	0	100,00%

Tabel IVI.57 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Dalam Program dan Kegiatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			9333
		1.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	52	52	100
		2.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20 Orang	20 Orang	100
		3.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15 Orang	15 Orang	100
		4.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	79 Orang	79 Orang	100
		5.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapat Layanan Kedaruratan	10 Orang	10 Orang	100
		6.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	5 Orang	3 Orang	60
	2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			100

No	Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		1.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10 Orang	10 Orang	100
		2.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15 Orang	15 Orang	100
		3.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	10 Orang	10 Orang	100
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Terlaksananya Penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah			100
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran			100
		1.	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	7 Bencana	7 Bencana	100
		2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	7 Bencana	7 Bencana	100

4.6.4 Alokasi Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui APBD telah menganggarkan pembiayaan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung kegiatan standar pelayanan minimal urusan sosial, sebagaimana ditunjukan pada Tabel berikut :

Tabel IV.58 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan			Anggaran (RP)	Realisasi	Persentase (%.)
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.013.239.050,-	849.374.150,-	83,83
		1.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	106.730.200,-	90.376.500,-	84,68
		2.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	119.406.850,-	109.320.850,-	91,55
		3.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	154.515.500,-	119.560.500,-	77,38
		4.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	430.425.000,-	367.551.000,-	85,39
		5.	Pemberian Layanan Kedaruratan	143.745.000,-	121.373.800,-	84,44
		6.	Pemberian Layanan Rujukan	58.416.500,-	41.191.500,00	70,51

No	Program dan Kegiatan		Anggaran (RP)	Realisasi	Persentase (%.)
	2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	173.631.000,-	153.891.660,-	88,63
		1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37.683.550,-	29.124.250,-	77,29
		2. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	78.938.450,-	75.210.410,-	95,28
		3. Pemberian Layanan Rujukan	57.009.000,-	49.557.000,-	86,93
B.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	216.522.024,-	132.744.420,-	61,31
		1. Penyediaan Makanan	205.112.024,-	125.814.020,-	61,34
		2. Penyediaan Sandang	11.410.000,-	6.930.400,-	60,74

4.6.5 Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kotabaru yang berperan Aktif membantu memberikan pelayanan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 ditunjukkan, disajikan sebagai berikut :

Tabel IV.59 Dukungan Personil Dinas Sosial

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22 Orang	Bertugas di wilayah Kecamatan
2	PKH	23 Orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
3	Pekerja Sosial Disabilitas	1 Orang	Bertugas di wilayah kabupaten
4	Pekerja Sosial Anak	1 Orang	Bertugas di wilayah kabupaten
5	Tanggap Darurat Bencana	22 Orang	Bertugas di wilayah Kabupaten
6	Operator SIKN-G	10 Orang	Bertugas di wilayah Kabupaten
	JUMLAH	**78 Orang**	**Bertugas di wilayah Kabupaten**

Sedangkan Sumber Daya Manuasi (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru yang mendukukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari Kondisi Jumlah Pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2025, Jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 19 (delapan belas) table berikut :

Tabel IV.60 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan
Pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Uraian	Es.II	Es III	Es IV	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		-	2	3	5
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	2	1	4
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial		-	2	-	2
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		1		4	5
Total		1	2	6	8	17

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Permasalahan yang menyangkut Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Melengkapi data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja terbaru terbaru sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
2. Personil yang menangani teknis SPM dan pelaporan.
3. Anggaran yang berkaitan dengan Program SPM.

b) Solusi :

Memaksimalkan segala sumberdaya yang pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru untuk pemenuhan capaian SPM Pendidikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 572.055.554.121,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar 77.38% yaitu sebesar Rp. 381.398.206.535,-. Berikut ini adalah perhitungan anggaran dan realisasi serapan SPM Pendidikan tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru :

Tabel IV.61 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
1.	Pendidikan anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83.390.031.308	64,418,255,662	77.25%
2	Pendikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6.361.436.344	4,188,491,976	65.84%
3	Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/ Sederajat)	PengelolaanPendidikan Sekolah Dasar	343.147.629.259	250.013.754.410	72.86%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	139.081.457.210	124,075,228,783	89.21%
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000	0	0
	TOTAL		**572.055.554.121**	**381.398.206.535**	**77.38%**

Tabel IV.60 Alokasi Penganggaran SPM Pendidikan Kabupaten Kotabaru :

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SAKER PERANGKAT DAERAH
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KAB. KOTABARU	5,318,792,284,118			
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	922,911,852,662	17.35%		
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	572,055,554,121		10.76%	61.98%

4.7.2. Urusan Kesehatan

Ada beberapa program dan kegiatan yang terkait secara langsung dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 antara lain dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.62 Program dan Kegiatan urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan Yang Diberikan	Program/ Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.777.068.310 Realisasi 1.710.590.000	APBD (375.053.289) DAK (1.402.015.021)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	357.619.300 Realiasasi 277.001.000	APBD (59.459.300) DAK (298.160.000)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	244.462.300 Realisasi 158.701.145	APBD
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

No	Jenis Layanan Yang Diberikan	Program/ Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	114.502.987 Realisasi 97.807.000	APBD (237.034.716) DAK (215.775.000)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.264.767.879 Realisasi 1.143.177.000	APBD (123.000.879) DAK (1.141.767.000)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	104.322.350 Realisasi 99.978.350	APBD
		Kegiatan Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
7	Pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	150.513.640	APBD (93.791.640)

No	Jenis Layanan Yang Diberikan	Program/ Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	pada usia lanjut	Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Realisasi 135.986.000	DAK (56.722.000)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	90.763.800 Realisasi 88.076.300	APBD
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.976.600 Realisasi 25.547.600	APBD
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	604.977.800 Realisasi 579.903.800	APBD (42.005.000) DAK (562.972.000)

No	Jenis Layanan Yang Diberikan	Program/ Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
11	Pelayanan Kesehatan orang TerdugaTB	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	582.884.356 Realisasi 445.080.800	APBD (163.004.356) DAK (419.880.000)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	181.654.508 Realisasi 125.754.000	APBD

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru 2026

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan.Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bedasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat ditugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2025 selain kategori non urusan terdapat beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru melalui 1 Bidang pengampu SPM dengan rincian sebagai berikut :

SPM Pekerjaan Umum

1. Urusan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan kegiatan:

(1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK dan Pendampingan) Rp. 45.644.508.875,-

(2) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK dan Pendampingan) Rp. 13.060.869.000,-

Kebijakan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru sebagai Dinas teknis yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik di bidang Pekerjaan Umum adalah: Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Prasarana

Sumber Daya Air dan Cipta Karya) berbasis Penataan Ruang dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman yang andal.

Adapun arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru adalah :

1) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2) Mendorong upaya pengembangan sanitasi dan air bersih.
3) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta cakupan pelayanan dasar bidang permukiman.
4) Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5) Memperkuat system pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW.
6) Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang.
7) Mewujudkan pelayanan prima yang optimal di bidang mutu konstruksi dan mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan.
8) Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.
9) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM tercantum pada table dibawah ini:

Tabel IV.63. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			APBD
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		APBD
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	APBD
		2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD
		3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD
		4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	APBD
		5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH			APBD
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		APBD
		1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	APBD
		2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	APBD
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	APBD
		4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	APBD

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel IV.64. Program dan kegiatan urusan perumahan rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Ket
1.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	
			3.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	
			4.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			5.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			6.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
2.	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	7.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarela- wan Tanggap Bencana	
			8.	Sosialisasi Tentang mekanisme	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Ket
				Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	
			9.	Sosialisasi Pengembanagan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	
			10.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			11.	Rembug Warga untuk menentukan calon Penerima Rumah bagi korban bencana	
			12.	Koordinasi untuk menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
3.	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	13.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	
			14.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			15.	Pengadaan lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	
			16.	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	
			17.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	
			18.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Kabupaten/Kota	
4.	Program Pengembangan Perumahan	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	19.	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota Atau Relokasi	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Ket
		Pemerintah Kabupaten/Kota		Program Kabupaten Kota	
			20.	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencan Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
5.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	21.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.	
6.	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22.	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
7.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	23.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			24.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran /Peremajaan Permukiman kumuh	
			25.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
8.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	26.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

4.7.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Badan Penanggungalan Bencana Daerah BPBD

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 yang mendukung Penerapan SPM Kebencanaan adalah :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

   Kegiatan :

   a. Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

2. Program Kedaruratan Penanggulangan Bencana Daerah

Tanggap darurat di Daerah terkena Bencana

Tabel IV.65 Program dan Kegaitan Urusan Trantibum dan Linmas BPBD 2025

No	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencnan Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana	254.901.250
2	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	278.805.000
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	44.190.000
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	39.415.000
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	122.958.500
				Penyusunan Rencana Kontijensi	30.526.550

No	Jenis Pelayanan SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	APBD 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.090.151.900
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	302.695.000
Jumlah Total					**3.268.395.200**

b. Satpol PP dan Damkar

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program yang dapat diuraikan melalui hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran yang dapat memberikan arah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel IV.66 Program dan Kegaitan Urusan Trantibum Linmas pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			APBD
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	APBD
		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	APBD
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	APBD
		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	APBD
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	APBD
		6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	APBD
		7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	APBD
		8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	APBD
		9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	APBD
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD
		2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD
		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		APBD
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	APBD
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			APBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		APBD
		1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	APBD
		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	APBD
		3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	APBD
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	APBD
		5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	APBD

4.7.6. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya :

1. Program Rehabilitasi Sosial

   Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.

   Sub Kegiatan :

   a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.
   b. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
   c. Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
   d. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   e. Pemberian Layanan Kedaruratan.
   f. Pemberian Layanan Rujukan.

   Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.

   Sub Kegiatan :

   a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.
   b. Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
   c. Pemberian Layanan Rujukan.

2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

   Kegiatan : Pemeliharaan Anak Terlantar.

   Sub Kegiatan :

   a. Penjangkuan Anak Terlantar.

3. Program Penanganan Bencana

   Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota.

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Makanan.
   b. Penyediaan Sandang
   c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagan Bencana Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

Program dan Kegaiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Koabaru Tahun Anggaran 2025 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM sosial dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel IV. 67 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

No	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Pembiayaan (Rp.)
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	1.013.239.050,-
		1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 Orang	106.730.200,00
		2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20 Orang	119.406.850,00
		3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	154.515.500,00
		4. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	86 Orang	430.425.000,00

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabru Tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 mengacu pada visi Kabupaten Kotabaru “Kotabaru HEBAT (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, Tangguh) Maju dan Berkelanjutan” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 misi yaitu :

1) Membangun daya saing sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan kreatif.
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat yagn berkelanjutan
3) Menguatkan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan
4) Membangun infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan untuk ketahanan wilayah dan lingkungan berkelanjutan

Berdasarkan analisis penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangkaian pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 mempunyai tujuan pokok sebagai berikut :

1) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2) Terwujudnya penguatan ekonomi daerah.
3) Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan
4) Terwujudnya pembangunan wilayah berbasis desa yang merata
5) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 ini secara dominan menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah,capaian penerapan standar pelayanan minimal dan capaian akuntabilitasi kinerja Pemerintahan Daerah. Adapun simpulan dari penjelasan LPPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Capaian makro Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut :

1) Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan, yaitu 72,42 ditahun 2024 Meningkat menjadi 73.03 di Tahun 2025
2) Angka kemiskinan menurun, dari 4,45 ditahun 2024, turun menjadi 4,39 di Tahun 2025.
3) Tingkat pengangguran di Kabupaten Kotabaru mengalami penurunan dari 6,05 ditahun 2024, turun menjadi 5,93 di Tahun 2025.
4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan dari 5.30 ditahun 2024 menjadi 5,4 di tahun 2025.
5) Pendapatan per kapita dilihat dari Pengeluaran Perkapita mengalami kenaikan dari Rp.12.929.000,- tahun 2024 menjadi Rp.13.163.000,- pada tahun 2025.
6) Gini ratio kabupaten Kotabaru mengalami penurunan dari 0,296 pada tahun 2024 menjadi 0,275 pada tahun 2025.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

1) Jumlah Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah 52 perangkat daerah.
2) Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru per Desember Tahun 2024 adalah 4.167 Orang , sedangkan pada tahun 2025 PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru :
   a. PNS Kabupaten : 2.375 Orang
   b. PPPK Kabupaten : 688 Orang
   c. PPPK Paruh Waktu Kabupaten : 2.410 Orang
3) Total Anggaran Pendapatan dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp. 3.673.862.085.815,- pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp.3.778.153.534.417,-

4) Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2024 sebesar, Rp. 4.192.783.028.976,- belanja Daerah pada Tahun 2025 menjadi Rp. 3.666.170.501.203,-

Tentu dalam penerapan masih dapat kendala dalam menghadirikan urusan pelayanan wajib. Namun dengan semangat kerja keras serta kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta masyarakat Capaian penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Kotabaru semakin meningkat dari pada tahun 2025.

Dapat disampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menerapkan SPM sebagai berikut :

1) Capaian Urusan SPM bidang Pendidikan mengalami kenaikan dari 96,40 %. pada tahun 2024 menjadi 99,31% pada tahun 2025.
2) Capaian Urusan SPM bidang Kesehatan mengalami kenaikan menjadi 79.05% pada tahun 2025.
3) Capaian Urusan SPM bidang Pekerjaan Umum mengalami kenaikan dari 90,55%. pada tahun 2024 menjadi 100,00% pada tahun 2025.
4) Capaian Urusan SPM bidang perumahan rakyat mengalami kenaikan menjadi 91,67% pada tahun 2025.
5) Capaian Urusan SPM bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, mengalami kenaikan menjadi 96,96% pada tahun 2025.
6) Capaian Urusan SPM bidang sosial mengalami kenaikan menjadi 95,04 % pada tahun 2025.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam target kinerja dan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya selama Tahun 2025 berdasarkan Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029:

1) Hasil indikator kinerja utama Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
2) Hasil indikator kinerja utama Harapan Lama Sekolah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
3) Hasil indikator kinerja utama Usia Harapan Hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
4) Hasil indikator Kinerja utama Pravelensi Stunting menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
5) Hasil indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
6) Hasil indikator kinerja utama Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
7) Hasil indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutan dan Perikanan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
8) Hasil indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
9) Hasil indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
10) Hasil indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
11) Hasil indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
12) Hasil indikator kinerja utama Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Rendah.
13) Hasil indikator kinerja utama Tingkat Kemiskinan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
14) Hasil indikator kinerja utama Ratio Gini menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.

15) Hasil indikator kinerja utama Indeks Pelayanan Publik capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
16) Hasil indikator kinerja utama Indeks SPBE menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
17) Hasil indikator kinerja utama Indeks Pemerintah Digital menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Rendah.
18) Hasil indikator kinerja utama Nilai Sakip menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
19) Hasil indikator kinerja utama Opini BPK menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat Tinggi.
20) Hasil indikator kinerja utama Indeks Sistem Merit menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Rendah.
21) Hasil indikator kinerja utama Indeks Infrastruktur Dasar menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
22) Hasil indikator kinerja utama Persentase Desa Mandiri menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
23) Hasil indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.
24) Hasil indikator kinerja utama Ketahanan Daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang, berikut alokasi dana dan realisasinya selama tahun 2025 telah dijelaskan secara ringkas. Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya indikator pembangunan yang menunjukkan hasil menggembirakan dan sisi lainnya juga dapat dilihat adanya indikator pembangunan yang menunjukkan kenyataan yang belum memuaskan dan membutuhkan perhatian kita bersama. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, sosial budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerjasama dari semua pihak (stakeholders) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan lebih sempurna sesuai kewenangan tugas dan kompetensi

masing-masing, sehingga seluruh program pembangunan yang telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih atas segala masukan, saran dan koreksi yang telah disampaikan selama ini. Saya berharap semua ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Selanjutnya, apabila dalam penyampaian Memori Serah Terima Jabatan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridho-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Amin Ya Rabbal Alamin.

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPDD) KABUPATEN KTOABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Ringkasan Laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun untuk menjelaskan tentang capaian Kinerja makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

PENDAHULUAN

Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus melakukan upaya pembangunan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru :

1. Visi :

“Kotabaru HEBAT (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, Tangguh) Maju dan Berkelanjutan”

2. Misi :

untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 misi yaitu:

a) Membangun daya saing sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan kreatif.
b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat yagn berkelanjutan.
c) Menguatkan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan.
d) Membangun infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan untuk ketahanan wilayah dan lingkungan berkelanjutan.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro merupakan data yang diperoleh dari rilis oleh Badan Pusat Statistik. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya, adapun indikator kinerja makro meliputi:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
b) Persentase Penduduk Miskin
c) Tingkat Pengangguran Terbuka
d) Pertumbuhan Ekonomi
e) Pendapatan Per Kapita
f) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Secara umum capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Tahun 2021 - 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,42	73,03
2	Angka Kemiskinan	4,45	4,39
3	Angka Pengangguran	6,05	5,93
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,40
5	Pendapatan Per Kapita	12.929.000	13.163.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,296	0,275

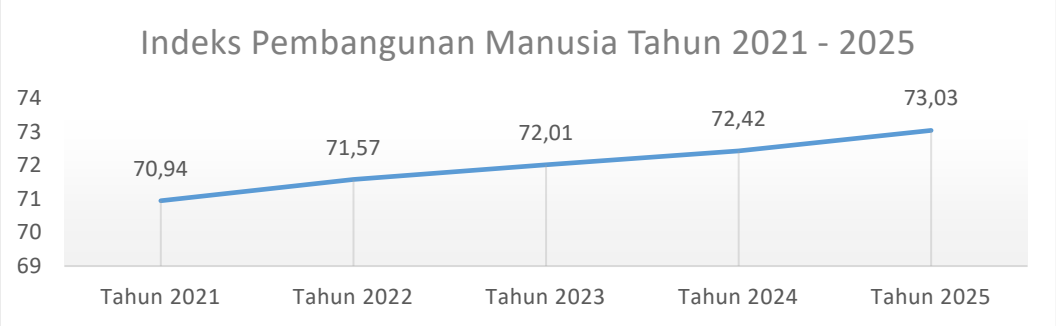
Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran yang menunjukan tingkat pencapaian pembangunan manusia disuatu wilayah. Indeks Pembangunan Kabupaten Kotabaru menunjukan trend positif meningkat setiap tahun yaitu sebesar 72,42 pada tahun 2024.dan meningkat menjadi 73,03 pada tahun 2025. Hal ini seiring komitmen Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru mendorong kegiatan Pembangunan di Bidang Pendidikan sehingga meningkatkan persentase pendidikan di Kabupaten Kotabaru dengan cara memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan, menambah jumlah guru setiap tahun, melalukan peningkatan sertifikasi guru, mencegah angka putus sekolah serta meningkatkan akses pendidikan.

Selain itu juga Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru juga meningkatkan layanan di bidang kesehatan dibuktikan dengan meningkatnya usia harapan hidup warga masyarakat kabupaten kotabaru yaitu dari 73,88 pada tahun 2024 meningkat 74.03 pada tahun 2025.

Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 meningkat setiap tahun, dan informasi tersebut disajikan dengan data berikut :



Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026

2. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah Indikator yang mengukur persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 mengalami trend positif yaitu terjadi pengurangan dari 4,45 pada tahun 2024 menjadi 4,39 pada tahun 2025. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembukaan lapangan kerja dengan berkolaborasi setiap perusahaan yang berinvetasi di daerah dengan mewajibakan menggunakan tenaga lokal minamal 50% dan serta dengan program perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Data angka kemiskinan Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :



Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026.

3. Angka Pengangguran

Indikator Angka Pengangguran adalah merupakan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja.

Angka pengangguran di Kabupaten Kotabaru dari tahun 2024 sebesar 6,05 mengalami penurunan menjadi 5,93 pada tahun 2025. Hal ini seiring kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, untuk mendayagunakan pekerja lokal pada perusahaan yang berinvetasi di kotabaru, selaian itu juga Pemerintah memberikan stimulus dan bimbingan serta pelatihan kepada penggiat UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.

Mengantisipasi meningkatnya angka pengguran Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui dinas tenaga kerja telah melaksanakan bimbingan dan pembekalan keterampilan bagi usia produktif untuk dapat membuka usaha / lapangan kerja secara mandiri. Adapun pembekalan tersebut yaitu melakukan kursus dibidang perbengkelan, kursus menjahit, kursus tata boga, kursus adminstrasi perkantoran, diharapkan melalui pembekalan tersebut peserta memiliki ilmu dasar sehingga siap terjun ke dunia kerja.

Selain itu pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melakukan pembinaan bagi UMKM sehingga UMKM Kabupaten Kotabaru memiliki daya saing, dan dapat mandiri.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencoba berkolaborasi dengan investor dan pengusahan di Kabupaten kotabaru dalam rangka membuka lapangan kerja untuk meningkatkan penyerapan angkatan usia produktif.

Data angka pengangguran Kabupaten Kotabaru dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 disajikan sebagaimaan data berikut :



Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah adalah indkator kondisi perekonomian yang terjadi secara bekelanjutan. Pertumbuhan ekonomi kabupaten kotabaru pada tahun 2020 mencapai titik terendah yaitua minus 1,87 ini terjadi akibat pandemi COVID 19 dimana pertumbuhan minus ini dirasakan diseluruh Kabupaten/Kota di indonesia, dampak ini tidak hanya dirasakan diindonesia bahkan diluar negeri negara-negara besar merasakan dampak dari pandemi covid 19 yang menyembabkan penurunan pertumbuhan ekonomi

Adapaun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 sebesar 3,35, dan secara perlahan mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya kebijakan pemulihan ekonomi nasional disertai dengan kerja keras bapak bupati mewujudkan visi-misi untuk meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarkat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2025 sebesar 5,40.

Hal ini sejalan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan percepatan belanja Pemerintah, Relaksasi

Pajak Penghasilan dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan melaksanakan Kebijakan keuangan negara melalui reklaksasi APBN.

Dan juga kebijakan pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru yaitu melalui bekerjasama dengan sektor perbankan melalui relaksasasi pembiayaan, memberikan dukungan terhadap UMKM Kabupaten Kotabaru, melakukan kebijakan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas daya beli dan bahan pokok dimasyarakat, serta menjaga inflasi agar dalam ambang batas wajar.

Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ditujunkkan dengan diagram sebagai berikut :



Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026.

5. Pendapatan Perkapita (PDRB)

Pendapatan perkapita yaitu indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk disuatu wilayah dalam waktu satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kotabaru setiap tahun mengalami peningkatan yaitu dari Tahun 2021 sebesar Rp.11.720.000,- menjadi Rp.13.163.000,- pada tahun 2025. Hal ini menunjukan meningkatnya pendapatan masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

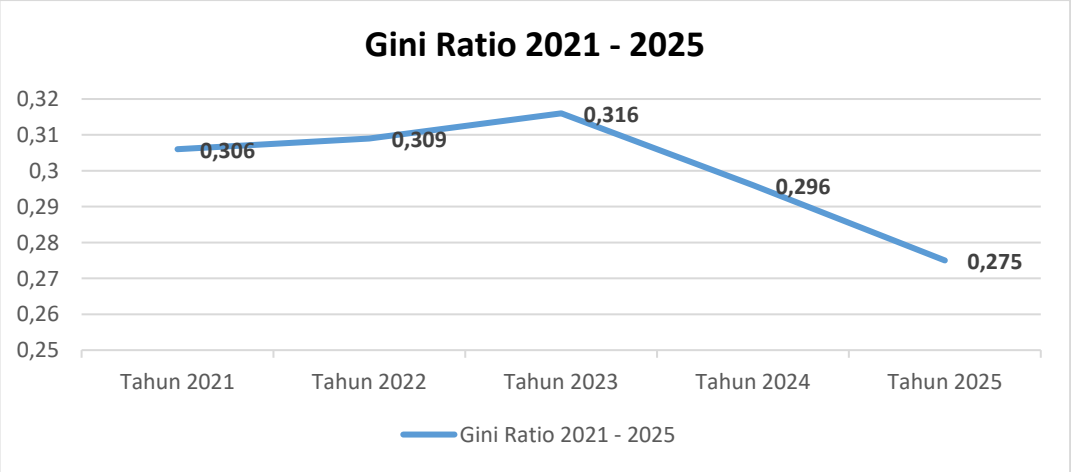


6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan rendah jika nilai Gini ratio kurang dari 0,3. Ketimpangan pendapatan sedang jika nilai Gini ratio berada di antara 0,3 hingga 0,5. Ketimpangan pendapatan tinggi jika nilai Gini ratio 0,5 atau lebih.

Indikator Gini Ratio Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 relatif stabil dikisaran lebih dari 0,3, yaitu sebesar 0,296 pada tahun 2024 dan sebesar 0,275 pada tahun 2025. Hal ini menunjukan bahwa di Kabupaten Kotabaru ketimpangan pendapatan di kategori rendah. Artinya pendapatan terdistribusi merata pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Gambaran indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada data yang disajikan sebagai berikut



Sumber data BPS Kotabaru, Maret 2026

2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap, yaitu dijelaskan secara rinci pada point selanjutnya .

2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru	
		1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %		
		1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	56,23 %		
		1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	69,46 %		
		1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	71,67%		
2	Kesehatan	1.b.1	Persentase Kematian ibu	0,13	Dinas Kesehatan	
		1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	8,92		
		1.b.3	Persentase pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	92,84 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.b.4. Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai standar	79,62 %		
		1.b.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	81,52 %		
		1.b.6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,97 %		
		1.b.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,01 %		
		1.b.8 Persentase pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar	61,21 %		
		1.b.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,16 %		
		1.b.10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47,02 %		
		1.b.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		
		1.b.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	69,44 %		
		1.b.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,41 %		
		1.b.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi	96,82 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum	1.c.1 Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	47,11 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kotabaru	SDA
		1.c.2 Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	35.12 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kotabaru	SDA
		1.c.3 Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	83.53 %		
		1.c.4 Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	72.68%		
		1.c.5 Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	93.62		
		1.c.6 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	11.10%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100 %		
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %		
		1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	12.21 %		
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100 %		
4	Perumahan Rakyat	1.d.1	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mermperoleh rumah layak huni	0% (Tidak dapat dilaksanakan)	Dinas Perumahan Rakyat , Permukiman dan Pertanahan	
		1.d.2	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	20,15%		
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%		
		1.d.4	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, sarana, dan utiitas umum	100%		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	0.00 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100 %		
		1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100 %		
		1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		
		1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82.61%		
6	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	96.97 %	Dinas Sosial	
		1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		
		1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	94.55 %		
		1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 %		
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	91.28 %		
8	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	40.24%		
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	77.57%		
9	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian	baru dilaksanakan tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2.b.2 Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	25 : 89066
10	Pangan	2.c.1 Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43.00 %	Dinas Ketahanan Pangan	
11	Pertanahan	2.d.1 Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	28.44 %	Dinas Perumahan Rakyat , Permukiman dan Pertanahan	
		2.d.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0 %		
		2.d.3 Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	0 %		
12	Lingkungan Hidup	2.e.1 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	75.00 %	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.e.2 Persentase jumlah sampah yang tertangani	15.55 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	96,15 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	51,69 %		
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100 %		
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	91,95 %		
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %		
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %		
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100 %		
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	DPMD	
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	61.82 %		
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	100 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	10.41 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru	sumber data dari BPS
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	66.66 %		
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	44.00 %		
16	Perhubungan	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.62	Dinas Perhubungan	
		2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.37		
		2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100 %		
17	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	14.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87.50 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	56,64 %		
18	KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	34.69 %	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	81.76 %		
19	PENANAMAN MODAL	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-29,43 %	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru	
		2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	70.03 %		
20	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	23.07 %	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru	
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.64 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	2.89 %		
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	38.46 %		
21	Statistik	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Persandian	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	27.02 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
23	Kebudayaan	1.2	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-66.67 %		
24	Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	58.26	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	Surat Keteran gan
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	10.98		Surat Keteran gan
25	Kearsipan	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	79.17 %	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
26	Kelautan & Perikanan	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	100.20 %	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	Data Produksi terlampir
		3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	72.81 Kg/Kap		
27	Pariwisata	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0.01 %	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotabaru	
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-4.49 %		
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	7.85 %		
28	Pertanian	3.c.1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	-10.17 %	Dinas Pertanian	
		3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	-34.84 %		
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	32.39 %		
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan	9.31 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Menular Strategis (PHMS))			
29	Perdagangan	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	36.07 %	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru	
30	Perindustrian	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	100 %		
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1.32 %		
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	63.44 %		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	30.09 %		

2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3 IKK Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	BPKAD Kabupaten Kotabaru
		4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	19.37 %	
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	12.20 %	
		4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	73.12 %	
		4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	45.35 %	Inspektorat
2	Kepegawaian	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71.04 %	BKPSDM Kabupaten Kotabaru

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Perencanaan	4.d Persentase Perangkat daerah yang menetapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100%	BAPPERIDA
4	Pengawasan	4.e.1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,02	Inspektorat
		4.e.2 Kapabilitas Sistem Penendalian Intern Pemeirntah (APIP)	3	
		4.e.3 Manajemen Risiko Indkeks	2,52	
		4.e.4 Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	90,03	
5	Pengadaan	4.f.1 Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40.00 Poin	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotabaru
		4.f.2 Pemanfaatan sistem pengadaan	24.69 Poin	
		4.f.3 Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22.22 Poin	
6	Manajamen Keuangan	4.g.1 Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1 (Tepat Waktu)	BPKAD dan Bag Hukum
		4.g.2 Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	90 %	Bag. Hukum
		4.h Penilaian Maladministrasu Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3	Inspekorat dan Bag. Organisasi

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru menginformasikan capaain keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan kinerja Bupati Kotabaru Tahun 2025. Adapun Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang termuat dalam Indikator kinerja Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 93 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.4 Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dibandingkan dengan target perjanjian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**	**72,8**	**73,03**	**100,31%**	**Sangat Tinggi**
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,6 Tahun	7,71	101,44%	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2 Tahun	12,23	100,24%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74 Tahun	74,03	100,04%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Prevalensi Stunting	%	22,6 %	23,2	97,34%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas keluarga	Indeks	42,99	64,23	149,40%	Sangat Tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,52	0,551*	94,03%	Sangat Tinggi
B	**Terwujudnya penguatan daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,35 %**	**5,4**	**99,81%**	**Sangat Tinggi**
		Laju Inflasi	**%**	**3,50 %**	**3,03**	**113,42%**	**Sangat Tinggi**
		Angka PDRB Perkapita	**Rp Juta**	**111,10 (Rp Juta)**	**115,04 (Rp Juta)**	**103,54%**	**Sangat Tinggi**
4	Meningkatnya nilai tambah sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,23 %	4,94	152,94 %	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	4,14 %	7,52	181,64 %	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,40 %	7,29	135%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	%	9,25 %	11,68	126,27%	Sangat Tinggi
5	Menurunya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,02 %	5,93	101,49%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	5,10 %	-29,43%	-577,06%	Sangat Rendah
7	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,23 %	4,39	96,21%	Sangat Tinggi
		Rasio Gini	Rasio	0,290	0,275	105,17%	Sangat Tinggi
C	**Terwujudnya penguatan tata Kelola pemerintahan**	**Indeks Reformasi birokrasi**	**Indeks**	**72.00 (BB)**	**76,22 (BB)**	**105,86%**	**Sangat Tinggi**
8	Meningkatnya pelayayan kualitas publik	Indeks pelayanan publik	Indeks	2,85	3,36	117,89%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya degilisasi tata Kelola pemerintahan	Indeks SPBE	Indeks	2,60	2,43	93,46%	Sangat Tinggi
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	0	0**	0%	Sangat Rendah
10	Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan integtrtas pemerintah	Nilai SAKIP	Predikat	63 (B)	64,80 (B)	102,85%	Sangat Tinggi
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11	Meningkatnya kualitas manajemen aparatur sipil negara	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.4	0**	0%	Sangat Rendah
D	**Terwujudnya Pembangunan wilayah berbasis desa yang merata**	**Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastuktur**	**Indeks**	**3,00**	3,02	100,66%	Sangat Tinggi
		Indeks Desa	**Skor**	**75,00**	73,95	98,6%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya sarana dan prasarana	Indeks Infrastuktur dasar	Indeks	0,40	0,40*	100%	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya kemandirisn desa	Persentase Desa Mandiri (%)	%	18,20 %	47,27	259,72%	Sangat Tinggi
E	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah**	**Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**%**	**1,92**	**1,92***	**100%**	**Sangat Tinggi**
		Indeks Risiko Bencana	**Angka**	**150**	**108,02**	**127,98%**	**Sangat Tinggi**
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,1	80,22	105,41%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,50	0,50	100%	Sangat Tinggi

4. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Secara sederhana, SPM merupakan "ambang batas" atau standar paling rendah yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik (pemerintah) agar masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya secara layak. SPM berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan negara (melalui Pemerintah Daerah) hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini adalah bentuk nyata dari perlindungan hak-hak dasar rakyat.

Hasil capaian pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel II.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 - 2025

NO	URUSAN	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	KATEGORI
1.	Bidang Pendidikan	96,40%	99.31%	Tuntas Utama
2.	Biidang Kesehatan	89,44%	79,05%	Tuntas Pratama
3.	Bidang Pekerjaan Umum	100%	100 %	Tuntas Paripurna
4.	Bidang Perumahan Rakyat	100%	91,67%	Tuntas Utama
5.	Bidang Trantibum Linmas	100%	96,96%	Tuntas Utama
6.	Bidang Sosial	98,08	95,04%	Tuntas Utama

5. Hasil EPPD atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 bahwa Kabupaten Kotabaru mendapatkan hasil EPPD dengan **skor kinerja 2,7390** dan status kinerja **Tinggi**.

6. Opini atas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Mei 2025, perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024, bahwa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan diberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

7. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH		**3.778.153.534.417,00**	**3.220.827.388.171,85**
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	319.433.558.218,00	392.920.665.304,85
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.443.854.663.051,00	2.823.025.003.497,00
	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	3.138.604.320.438,00	2.535.679.388.492,00
	Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya	173.970.455.000,00	150.524.975.600,00
	lain-lain pendapatan daerah yang sah	14.865.313.148,00	4.881.719.370,00
BELANJA DAERAH		**4.580.832.249.036,00**	**3.666.170.501.203,61**
1	BELANJA OPERASI	2.621.491.002.938,00	2.077.574.776.931,66
2	BELANJA MODAL	1.349.562.595.412,00	1.074.309.325.375,95
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.786.925.251,00	40.800.000,00
4	BELANJA TRANSFER	603.991.725.435,00	514.245.598.896,00

8. Penghargaan Yang diraih Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2025 menjadi saksi atas transformasi luar biasa Kabupaten Kotabaru di bawah kepemimpinan Bapak H. Muhammad Rusli, S,Sos dan Bapak Syairi Mukhlis, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang progresif. Melalui dedikasi yang tinggi dan sinergi antar-lembaga, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berhasil mengukir prestasi gemilang,

membuktikan bahwa "Bumi Saijaan" tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga unggul di atas rata-rata nasional dalam berbagai urusan pemerintahan.

Apresiasi dari Jantung Pemerintahan Pusat Keberhasilan Kotabaru diakui secara nasional ketika Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyerahkan langsung penghargaan Pemimpin Daerah Inovatif 2025 bidang Pendidikan di Jakarta. Melalui program unggulan "Kotabaru Cerdas", pemerintah daerah dinilai sukses menghadirkan akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok pesisir dengan dukungan anggaran mencapai 58 miliar rupiah. Tak hanya itu, di bidang tata kelola keuangan, Kotabaru menyabet penghargaan Kinerja DAK Fisik Terbaik 2025 dari Pemerintah Pusat, sebuah pengakuan atas realisasi anggaran pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan akuntabel.

Kepedulian Lingkungan yang Melampaui Batas Kotabaru tercatat sebagai daerah yang paling banyak memboyong Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2025, bahkan beberapa di antaranya sukses menembus level Adiwiyata Mandiri di tingkat kementerian nasional. Ini mempertegas visi "Kotabaru Hebat" harmoni antara pembangunan dan kelestarian alam.

Daftar penghargaan yang diraih oleh kabupaten Kotabaru padat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan dari kementerian Pariwisata atas Festival Budaya Saijaan “Magic From The Sea” sebagai 110 Event terpilih Karisma Event Nusantara 2025.
2. Penghargaan dari Badan Intelejen Negera Republik Indonesia atas Kerjasama Pembangunan Mako Binda Kalimantan Selatan.
3. Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Kalimantan Selatan atas Penyelenggaraan Haji Tahun 2025.
4. Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas kontribusi nyata sebagai mitra kerja dalam pemajuan dan perlindungan ekosistem kekayaan intelektual di Kabupaten Kotabaru.
5. Penghargaaan dari Universitas Lambung Mangkurat atas hibah untuk program studi di luar kampus utama (PSDKU) Universitas Lambung Mangkurat.
6. Penghargaaan dari Universitas Lambung Mangkurat atas kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan Pendidikan dan peningkatan kualitas mahasiswa mempersiapkan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.
7. Penghargaan Internasional OIC kepada Bupati Kotabaru sebagai tokoh peduli Pemuda Muslim Dunia

8. Penghargaan oleh Dandim 1004 Kotabaru atas sinergi dan dukungan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke 80 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025.
9. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas Penghargaaan Sekolah Adiwiyata 2025.
10. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas Pemimpin Inovatif 2025 di bidang Pendidikan.
11. Penghargaan Antasari Awards 2026 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas dedikasi dalam pembangunan Pendidikan berkelanjutan dan sebagai kepala Daerah Inspiratif Tahun 2026.

9. Penutup

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran, semoga apa yang menjadi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dapat menjadi bahan Informasi dan evaluasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya masyarakat dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada waktu yang akan datang.

Akhirnya, Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, tokoh agama, alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kotabaru yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam membangun Bumi Saijaan yang kita cintai. Semoga Allah SWT melimpahkan pertolongan, perlindungan, rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada Kita semua.

Kotabaru, 27 Maret 2026

BUPATI KOTABARU,

MUH. RUSLI, S.Sos

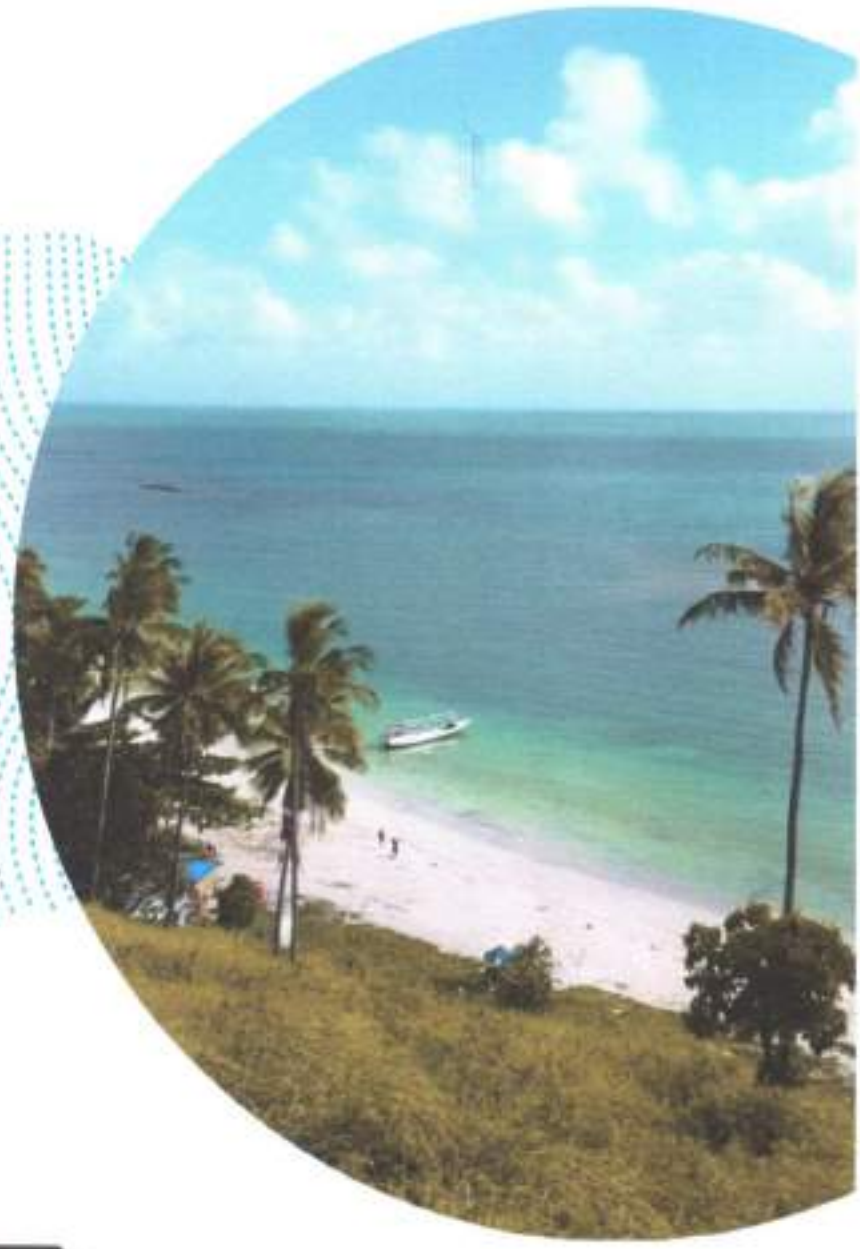
APIP INSPEKTORAT

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

LAPORAN HASIL REVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024



NOMOR : 700.1.2.8/45/Rev.IK/2025
TANGGAL : 04 APRIL 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Pangeran Kesuma Negara No.08 Gedung Abdi Negara Lt. 1 Sayap Kiri
Pulau Laut Sigam, Kotabaru–Kalimantan Selatan 72111 Telp: (0518) 21402, Fax (0518) 21293
Email: inspektorat@kotabarukab.go.id

Kotabaru, 4 April 2025

Nomor : 700.1.2.8/45/Rev.IK/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024

Yth Bupati Kotabaru

Di -
Kotabaru

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, sebagai berikut:

1. **Pernyataan Reviu**

   Kami telah melaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

   Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja tahun 2024 yang disajikan belum sepenuhnya akurat karena masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dan data yang belum diperbarui dengan data terkini.

2. **Dasar Reviu**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 065/224/ORG.SETDA Tanggal 23 Februari 2024 Hal Reviu Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Tahun 2023.
- Keputusan Bupati Nomor 188.45/43/KUM/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
- Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/96-Set/IK/2024 Tanggal 7 Maret 2024.

3. **Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2024.

4. **Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

- Format Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 telah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan Kinerja Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 telah memuat data dan informasi penting Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, serta telah menyajikan rumus untuk mengukur capaian kinerja beberapa indikator dan penjelasan upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada beberapa indikator.
- Sasaran "Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya" dengan peningkatan capaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) sebesar 15.884,55 ton tetapi yang disajikan dalan laporan kinerja adalah sebesar 15.884,45 Ton.
- Terdapat 13 sasaran strategis yang mana target perjanjian kinerja belum tercapai.
- Sasaran yang dimuat dalam LKJ dalam Tabel 2.4 (Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah) merupakan sasaran Tahun 2026.

- Dalam Target yang disajikan sebagai target RPJMD untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah 71,01-71,95 (71,48), yang mana data tersebut belum sesuai dengan target yang ada di dokumen RPJMD baik Tahun 2024 ataupun 2026.
- Sasaran strategis kabupaten Kotabaru tahun 2024 dalam LKjIP belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran strategis dalam Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang belum sesuai dengan LKjIP.
- Sasaran strategis kabupaten Kotabaru tahun 2024 dalam LKjIP seluruhnya telah sesuai dengan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026
- Laporan Kinerja Pemerintah Kotabaru Tahun 2024 telah menyajikan akuntabilitas keuangan.
- Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru dibawah Koordinasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan telah didukung dokumen yang memadai.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kotabaru atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024, bahwa terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kaidah penulisan dan perbaikan sesuai dengan informasi/data yang akurat di dalam laporan kinerja ini.

Demikian Laporan Hasil Reviu ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak diucapkan terimakasih.

Inspektur Daerah,

H. Ahmad Fitriadi F., S.H., M.Hum.,CGRE.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731027 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Pangeran Kesuma Negara No.08 Gedung Abdi Negara Lt. 1 Sayap Kiri
Pulau Laut Sigam, Kotabaru–Kalimantan Selatan 72111 Telp: (0518) 21402, Fax (0518) 21293
Email: inspektorat@kotabarukab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024

Uraian Catatan Hasil Reviu	No. Indeks KKR
Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 meliputi:	
1. Sistematika Penyajian Untuk menguji kesesuaian format penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	**KKR 01**
2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Untuk menguji keandalan dan akurasi data informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.	**KKR 02**

3. Penelaahan Penyelenggaran dan Substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Untuk menilai analisis penyajian data kinerja yang memadai, penyajian perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, penyajian perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah dan nasional, pengujian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan penunjang, pengujian penetapan sasaran dan indikator kinerja apakah telah memenuhi kriteria SMART, dan menilai penyajian substansi Laporan Kinerja.	**KKR 03** **s.d** **KKR 05**

Hasil Reviu:	
1. Sistematika Penyajian Laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 telah menyajikan data-data sebagai berikut: a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah b. target kinerja Tahun 2024 c. capaian kinerja Tahun 2024 d. lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan e. upaya perbaikan ke depan f. akuntablitas keuangan	**KKR 01**
2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 telah mempedomani standar/ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 dibawah koordinasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, sehingga dapat diyakini: • Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dokumen data yang memadai; • Data/informasi kinerja yang disajikan telah diyakini keandalan karena telah didukung dokumen/data yang memadai.	**KKR 02**

3. Penelaahan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah a. Penyajian perbandingan capaian kinerja kabupaten Kotabaru tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya telah disajikan, mengacu pada format laporan kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. • Terdapat 1 Sasaran Strategis yang mana selisih capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 berbeda jumlah dengan yang disajikan, yaitu sasaran "Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya" dengan peningkatan capaian Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) sebesar 15.884,55 ton tetapi yang disajikan dalan laporan kinerja adalah sebesar 15.884,45 Ton. b. Penyajian perbandingan capaian kinerja kabupaten Kotabaru tahun 2024 dengan target perjanjian kinerja Tahun 2024 telah disajikan, mengacu pada format laporan kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. • Terdapat 13 sasaran strategis yang mana target perjanjian kinerja belum tercapai, yaitu :	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Distribusi PDRB (ADHB) Sektor Industri
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
4	**Meningkatnya investasi, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang berdaya saing dan pro rakyat, berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**
5	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Angka Kesempatan Kerja
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sektor Usaha Mikro Kecil	Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil
7	**Meningkatnya infrastruktur dasar dan penunjang yang layak untuk kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan, partisipatif dan gotong royong yang sesuai dengan penataan ruang**	**Indeks Gini**
8	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat ke Pusat Kegiatan Ekonomi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
9	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni

10	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang penddikan dasar	Indeks Pendidikan
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
12	**Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**
13	Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel yang melayani	Nilai SAKIP

c. Penyajian perbandingan capaian kinerja Kabupaten Kotabaru tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPJMD telah disajikan, mengacu pada format laporan kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Sasaran yang dimuat dalam LKJ dalam Tabel 2.4 (Capaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah) merupakan sasaran Tahun 2026.
- Dalam Target yang disajikan sebagai target RPJMD untuk indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah 71,01-71,95 (71,48), yang mana data tersebut belum sesuai

dengan target yang ada di dokumen RPJMD baik Tahun 2024 ataupun 2026.

d. Sasaran strategis kabupaten Kotabaru tahun 2024 dalam LKjIP belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran strategis dalam Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Kotabaru, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang belum sesuai dengan LKjIP, yaitu:

Indikator Kinerja	LKjIP
Meningkatnya Kinerja Sektor Pengolahan Berbasis Produk Lokal	Meningkatnya Kinerja Sektor **Industri** Pengolahan Berbasis Produk Lokal

e. Sasaran strategis kabupaten Kotabaru tahun 2024 dalam LKjIP seluruhnya telah sesuai dengan sasaran strategis dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026.

KESIMPULAN

Laporan kinerja tahun 2024 yang disajikan belum sepenuhnya akurat karena masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dan data yang belum diperbaharui dengan data terkini.

Kotabaru

Inspektur Pembantu II,	Inspektur Daerah,
Aminullah, SH	H. Ahmad Fitriadi F., S.H., M.Hum.,CGRE.,CGCAE
Pembina (IV/a)	Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197908132010011011	NIP. 197310272000031005

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU



(0518) – 21402/Fax (0518) – 21293
inspektorat@kotabarukab.go.id
Jl. Pangeran Kesuma Negara No. 08 Gedung Abdi Negara Lt. 1 Sayap Kiri, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, Kalimantan Selatan, 72111